



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Kementerian Agama yang berfungsi sebagai petunjuk dalam melakukan perencanaan program atau kegiatan untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Menteri ini ditetapkan Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025-2029.
- (2) Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025-2029 yang tercantum dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran-Rencana Strategis Kementerian/Lembaga merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025-2029 digunakan sebagai pedoman bagi unit eselon I dan satuan kerja lainnya dalam melakukan penyusunan:

- a. rencana strategis satuan kerja;
- b. program prioritas Menteri;
- c. rencana kerja tahunan;
- d. rencana kerja anggaran;
- e. perjanjian kinerja;
- f. pohon kinerja organisasi;
- g. sasaran kinerja pegawai; dan
- h. dokumen perencanaan dan kebijakan lainnya.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2025

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



NASARUDDIN UMAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN
HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 1030

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama Republik Indonesia
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri


Imam Syaukani, S.Ag., M.H.
NIP.197112142000031002

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

Kementerian Agama memiliki peran strategis dalam meningkatkan pembangunan nasional dan menciptakan masyarakat yang rukun, cerdas dan maslahat. Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 2025-2029 ini memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan, dan strategi yang akan diterapkan dalam lima tahun ke depan. Renstra ini menaruh perhatian khusus pada upaya pencapaian RPJMN dan mempertegas peran Kementerian Agama dalam mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengusung Visi besar “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Renstra Kementerian Agama mendukung pencapaian program pemerintah di sektor pembangunan agama dan pendidikan.

Dalam pembangunan bidang agama, Kemenag menaruh perhatian utama pada kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama; kerukunan umat beragama; keselarasan relasi agama dan budaya; kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan pemanfaatan ekonomi keagamaan umat. Untuk pembangunan bidang pendidikan, Kemenag menaruh perhatian utama pada peningkatan akses pendidikan berkualitas dan mutu pembelajaran pada lembaga pendidikan di bawah Kemenag, yang terdiri sekolah umum dengan kekhasan agama, pendidikan agama, pendidikan keagamaan dan pendidikan pesantren, serta perguruan tinggi keagamaan (PTK). Khusus untuk PTK, Kemenag juga menaruh perhatian pada peningkatan daya saing lulusan.

A. Kondisi Umum

1. Kondisi Umum Bidang Agama

Terdapat dua sasaran strategis (SS) bidang agama dan keagamaan untuk mendorong pencapaian visi misi Kemenag: Meningkatnya masyarakat yang memiliki cara pandang dan praktik beragama jalan tengah untuk mewujudkan kerukunan dan harmoni sosial (SS1); dan Meningkatkan layanan keagamaan transformatif (SS2). Bagian berikut memaparkan kondisi aktual kehidupan masyarakat terkait kedua sasaran strategis tersebut.

a. Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama

Pemahaman dan pengamalan ajaran agama yang baik diperlukan untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat yang heterogen. Dalam hal ini, literasi keagamaan yang kuat menjadi fondasi penting untuk mendorong praktik keagamaan yang lebih bijak dalam kehidupan sosial. Dengan literasi yang memadai, masyarakat diharapkan mampu menumbuhkan kepedulian sosial, menjunjung tinggi etika dan budi pekerti di ruang publik, serta mematuhi aturan sosial maupun negara.

Tabel 1.1 menunjukkan skor Indeks Kesalehan Umat Beragama (IKsUB) mencapai 83,83 pada 2024. Angka ini sedikit lebih tinggi dari nilai IKsUB tahun 2023 (82,59) namun lebih rendah dari capaian tahun 2022 (84,55). Capaian tahun 2024 juga lebih rendah dari target yang ditetapkan (86,08). Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, kesenjangan antara target dan realisasi pada 2024 lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, kecuali tahun 2023. Padahal, tahun 2023 merupakan tahun kritis di mana persentase capaian menurun sebesar 2,87 poin persentase dari tahun sebelumnya, menjadi 96,51%. Penurunan Indeks Kesalehan Umat Beragama tahun 2023 dapat diatasi melalui penguatan internalisasi nilai-nilai moderasi beragama, peningkatan toleransi di ruang publik, serta optimalisasi program pembinaan keagamaan yang adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Selain itu, pengelolaan isu-isu keagamaan secara bijak serta peningkatan literasi digital akan berkontribusi signifikan dalam menjaga dan meningkatkan kualitas perilaku keagamaan masyarakat.

Dengan demikian, meskipun realisasi tahun 2024 menunjukkan peningkatan, penurunan yang sempat terjadi sebelumnya telah berhasil diatasi.

Tabel 1. 1 Capaian Indeks Kesalehan Umat Beragama, 2020-2024

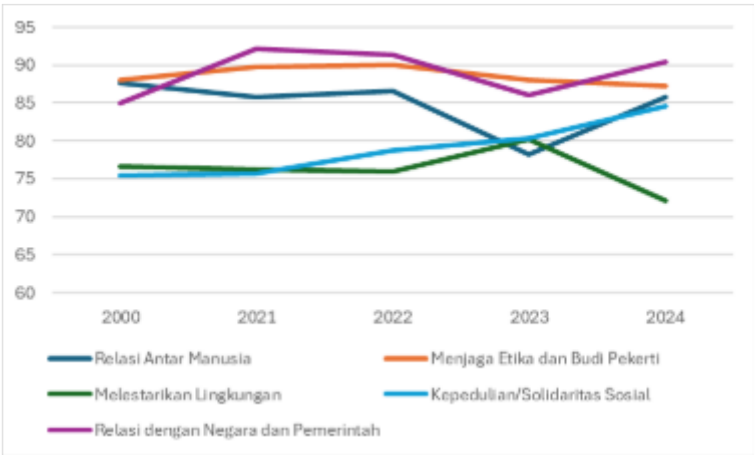
Capaian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	84,08	84,58	85,08	85,58	86,08
Realisasi	82,53	83,92	84,55	82,59	83,83
Persentase Capaian	98,15	99,22	99,38	96,51	97,38

Sumber: Laporan Kinerja Kemenag Tahun 2024

Secara umum peningkatan tersebut diperoleh melalui beberapa kebijakan dan program Kemenag dalam mendukung penguatan kesalehan umat beragama, yang antara lain: (1) Pemenuhan rasio penyuluh dengan kelompok sasaran penyuluhan agama; (2) Pembinaan keluarga sebagai aktor utama habituasi kesalehan umat beragama; (3) Fasilitasi ibadah keagamaan untuk memperkuat intensitas ritual umat beragama; (4) Pelaksanaan program-program untuk membangun kepedulian sosial umat beragama; dan (5) Optimalisasi penggunaan media digital dalam bimbingan dan penyuluhan agama.

Menjawab kondisi dan tantangan tersebut, Kementerian Agama pada tahun 2024 melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan Indeks Kesalehan Umat Beragama. Langkah yang ditempuh meliputi penguatan program moderasi beragama, peningkatan pembinaan keagamaan berbasis komunitas, serta penyediaan materi dakwah dan pendidikan agama yang lebih inklusif dan kontekstual. Selain itu, Kemenag memperluas kolaborasi dengan tokoh agama, lembaga pendidikan, dan media dalam menyebarkan nilai toleransi serta memperkuat literasi digital agar masyarakat lebih selektif dalam menerima informasi keagamaan. Program evaluasi dan monitoring juga diperkuat sehingga capaian dapat terukur dan berkelanjutan, yang pada akhirnya berhasil meningkatkan indeks menjadi 97,38.

Berdasarkan data di atas, tiga dimensi IKsUB menunjukkan tren positif yang konsisten, sedangkan dua dimensi lainnya yaitu relasi antar manusia dan melestarikan lingkungan masih fluktuatif dan perlu ditingkatkan, khususnya melalui penguatan perspektif ekoteologi agar kesadaran spiritual dalam menjaga lingkungan semakin terinternalisasi dalam kehidupan beragama.



Gambar 1. 1 Perkembangan Indeks Kesalehan Umat Beragama, 2020-2024

Sumber: Laporan Kinerja Kemenag Tahun 2024

b. Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama

Moderasi beragama dan kerukunan umat beragama juga diperlukan untuk menjaga keharmonisan masyarakat. Kecenderungan radikalisasi agama di beberapa kelompok tertentu berpengaruh negatif terhadap hubungan antarumat beragama dan berpotensi menurunkan tingkat toleransi serta kerukunan sosial. Untuk memotret kondisi hubungan antarumat beragama, Badan Litbang dan Diklat Kemenag melakukan survei hubungan antarumat beragama dari tahun ke tahun. Tabel 1.2 berikut menunjukkan perkembangan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) dari 2020 hingga 2024.

Tabel 1. 2 Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama, 2020-2024

Capaian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	73,91	74,00	74,70	75,00	75,80
Realisasi	67,46	72,39	73,09	76,03	76,47
Persentase Capaian	91,27	97,82	97,84	101.37	100,88

Sumber: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama dapat diakses

Pembangunan agama berperan penting dalam memperkuat kohesi sosial dan harmoni masyarakat. Hal ini tercermin dari peningkatan IKUB secara signifikan sebesar 9,01 poin, dari 67,46 (2020) menjadi 76,47 (2024) dan berada pada jalur yang tepat untuk mencapai target tahun 2025 sebesar 76,77. Tren positif ini menunjukkan keberhasilan

kolektif umat dalam membangun toleransi di tengah keberagaman masyarakat

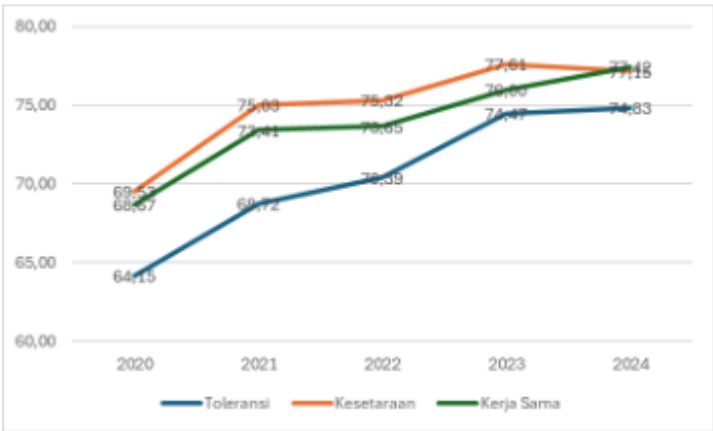
Sejalan dengan meningkatnya kerukunan antarumat beragama, penyelesaian konflik antarumat agama semakin meningkat dari 87 persen (2020) menjadi 100 persen (2024).

Tabel 1. 3 Penanganan Konflik Antarumat Beragama, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Target	81,00	81,00	88,00	90,00	95,00
Realisasi	87,00	68,61	88,00	100,00	100,00
Persentase Capaian	107,41	84,71	100,00	111,11	105,26

Sumber: Laporan PKUB Tahun 2024

Pencapaian tersebut dapat diraih berkat beberapa kebijakan dan program yang sudah dilaksanakan Kemenag. Kebijakan dan program tersebut mencakup antara lain: (1) Penyusunan Peta Jalan Kerukunan dan Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama; (2) Penguatan Moderasi Beragama Berbasis Komunitas; (3) Pembentukan Kelompok Kerja Penyuluh Agama (Pokjaluh); (4) Peningkatan peran rumah ibadah sebagai pusat syiar moderasi beragama; (5) Penyusunan literasi keagamaan yang moderat; (6) Peningkatan kapasitas, mediasi dan pendampingan penyelesaian konflik keagamaan; (7) Akselerasi Gerakan Moderasi Beragama melalui Tahun Toleransi 2022; dan (8) Pengembangan *Religiosity Index*. Ke depan, penanganan dan pencegahan konflik akan mengandalkan *Early Warning System* (EWS), yang berperan sebagai sistem deteksi dini potensi konflik keagamaan melalui pemantauan isu, dinamika sosial, dan indikator kerawanan dari tingkat lokal hingga nasional.



Gambar 1. 2 Indeks Kerukunan Umat Beragama, 2020-2024

Upaya pembangunan bidang agama menunjukkan capaian yang belum merata pada seluruh elemen kerukunan umat beragama. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) terdiri atas tiga dimensi utama, yaitu Toleransi, Kesetaraan, dan Kerja Sama. Data tahun 2020–2024 memperlihatkan bahwa dimensi Toleransi dan Kerja Sama mengalami peningkatan konsisten, sementara dimensi Kesetaraan justru mengalami sedikit penurunan dari 77,61 pada tahun 2023 menjadi 77,15 pada 2024. *Sumber: Balitbang Kemenag Tahun 2024*

Kerukunan umat beragama dipengaruhi oleh interaksi positif antarumat, aktivitas beribadah, pengalaman diskriminasi, rasa saling percaya, persepsi keterancaman, dan peran tokoh agama; di tengah masyarakat multikultur, keselarasan antara praktik keagamaan dan budaya perlu terus diperkuat untuk mencegah potensi konflik, tercermin dari indeks Penerimaan Umat terhadap Keragaman Budaya yang mencapai 81 pada 2024, menunjukkan penurunan risiko konflik berbasis agama dan etnis sebagaimana yang terlihat dalam Tabel 1.4.

Tabel 1. 4 Capaian Indeks Penerimaan Umat Beragama atas Keragaman Budaya, Tahun 2021-2024

Capaian	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Target	65,00	70,00	72,00	76,00
Realisasi	72,38	76,20	83,06	81,00
Persentase Capaian	111,35	108,86	115,36	106,57

Sumber: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun 2024

Peningkatan penerimaan umat terhadap keragaman budaya dapat diraih, antara lain, berkat beberapa kebijakan dan program yang telah dilakukan oleh Kemenag dalam beberapa tahun terakhir. Kebijakan dan progam ini mencakup, antara lain: (1) Penguatan Dialog Lintas Agama dan Seni Budaya; (2) Pengembangan Literasi Khazanah Budaya Bernafas Agama; (3) Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Bernafas Agama; dan (4) Peningkatan Peran Organisasi Sosial Keagamaan. Ke depan, Kemenag perlu melakukan pendekatan yang lebih inklusif dalam memperkuat pemahaman bahwa budaya dan agama bisa saling mendukung. Diperlukan program edukasi dan dialog antar tokoh agama dan budaya untuk menemukan titik temu antara tradisi lokal dan ajaran agama. Selain itu, perlu ada upaya untuk mengembangkan dan melestarikan budaya yang bernafaskan agama, serta meminimalkan benturan antara praktik budaya dan ajaran agama.

c. Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama

Kementerian Agama menyelenggarakan berbagai layanan pokok terkait kehidupan keagamaan, meliputi Kantor Urusan Agama, Ibadah Haji, Jaminan Produk Halal, pemberdayaan rumah ibadah, pengadaan dan distribusi kitab suci, penguatan lembaga keagamaan, peningkatan kompetensi tokoh agama, serta pengembangan Ekonomi Keagamaan Umat.

- 1) Kementerian Agama berperan aktif dalam pemberdayaan dan pembangunan rumah ibadah serta pemenuhan kebutuhan kitab suci bagi umat sebagai upaya meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan. Melalui dukungan infrastruktur, pendampingan pengelolaan, dan fasilitasi sarana ibadah, Kemenag mendorong rumah ibadah menjadi pusat kegiatan keagamaan yang aman, nyaman, dan inklusif. Selain itu, penyediaan dan distribusi kitab suci secara merata, termasuk pusat Khonghucu sebanyak 1.000 eksemplar, Ditjen Bimas Islam 497.853, Ditjen Bimas Kristen 33.855, Ditjen Bimas Katolik 945, Ditjen Bimas Hindu 6.500, dan Ditjen Bimas Buddha 12.000 hal ini dilakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap sumber ajaran yang sah, sehingga praktik keagamaan dapat dijalankan dengan baik dan berkesinambunganKepuasan Layanan Kantor Urusan Agama
- 2) Kantor Urusan Agama (KUA) menyediakan berbagai layanan keagamaan yang diperlukan umat beragama. Layanan ini mencakup, antara lain, pendaftaran dan pencatatan pernikahan, penyuluhan agama, pengelolaan zakat dan wakaf, dan layanan bimbingan haji. Terkait dengan hal ini, Tabel 1.5 berikut menyajikan capaian Indeks Kepuasan Layanan KUA selama periode 2020-2024.

Tabel 1. 5 Capaian Indeks Kepuasan Layanan KUA, 2020-2024

Capaian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00
Realisasi	95,95	78,90	83,28	83,26	85,08
Persentase Capaian	119,94	97,41	101,56	100,31	101,29

Sumber: Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM

Pada 2024, nilai Indeks Kepuasan Layanan KUA mencapai 85,08. Angka ini lebih tinggi dari tahu-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh KUA di berbagai daerah dalam beberapa tahun terakhir.

Beberapa hal berkontribusi terhadap peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan KUA. Sejak tahun 2022, Kemenag meluncurkan program prioritas Revitalisasi KUA. KUA diarahkan menjadi Pusat Layanan Keagamaan (KUA Pusaka) sehingga dapat memenuhi kebutuhan umat beragama sebagai pengguna layanan KUA. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, Kemenag juga melakukan beberapa kebijakan dan program untuk meningkatkan kualitas layanan KUA, yang mencakup, antara lain: (1) Perbaikan ruang pelayanan KUA; (2) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM KUA revitalisasi; (3) Penguatan transformasi digital pelayanan KUA; dan (4) Pengembangan layanan KUA untuk pemberdayaan ekonomi umat.

Namun demikian, ada beberapa hal yang masih menjadi catatan. Hasil survey di atas menunjukkan terjadinya peningkatan kualitas

layanan pada semua aspek layanan. Semua dimensi layanan mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Dibandingkan dengan aspek lain, **aspek Sarana dan Prasarana memiliki nilai agak rendah di tahun 2024**. Jika kita lihat lebih lanjut, aspek Sarana Prasarana merupakan satu dari dua dimensi layanan yang memiliki peningkatan nilai kepuasan tertinggi, meningkat dari 66,75 pada tahun 2020 menjadi 81,26 pada tahun 2024. Aspek Sarana Prasarana mengalami peningkatan skor sebesar 14,51 poin, hanya sedikit lebih rendah dari aspek Layanan Aduan yang menunjukkan peningkatan skor paling tinggi, yakni sebesar 16,18 poin. Namun demikian, hal ini masih menjadi **prioritas Kemenag dalam meningkatkan layanannya kepada masyarakat pada tahun mendatang**.

Selain itu, kualitas layanan KUA belum merata di semua daerah. Beberapa masalah yang sering dihadapi mencakup kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, infrastruktur yang belum memadai, dan proses layanan yang terkadang tidak efisien, sehingga mempengaruhi kepuasan masyarakat. Meski KUA telah berupaya memberikan layanan terbaik, hingga saat ini masih ditemukan kendala dalam hal kecepatan pelayanan, transparansi, dan pemahaman masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Ke depan, Kemenag perlu meningkatkan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap kinerja KUA, khususnya di daerah-daerah yang masih perlu ditingkatkan kualitas layanannya.

3) Kepuasan terhadap Layanan Sertifikasi Produk Halal

Layanan Sertifikasi Produk Halal merupakan salah satu layanan utama Kementerian Agama yang bertujuan memastikan produk yang beredar di masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan dalam ajaran agama. Meski layanan sertifikasi halal kini berada di BPJPH, Kementerian Agama tetap memerlukan direktorat atau eselon II untuk mengawal kebijakan halal, memastikan tata kelola yang akuntabel, dan memperkuat literasi halal masyarakat melalui penyuluh agama, pengawas daerah, serta jaringan 5.917 KUA di seluruh Indonesia

Untuk mengukur kepuasan terhadap layanan sertifikasi produk halal, Kemenag menggunakan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai tabel dibawah ini.

Tabel 1. 6 Capaian Indeks Kepuasan Layanan Sertifikasi Produk Halal, 2021-2024

Uraian	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Target	65,00	70,00	80,00	80,00
Realisasi	84,50	88,10	88,56	89,12
Persentase Capaian	120,00	125,80	110,70	110,70

Sumber: Laporan Kinerja Kemenag Tahun 2023.

Pada 2024, Indeks Kepuasan Layanan Sertifikasi Produk Halal mencapai 89,12, mencerminkan tingginya kepuasan masyarakat

berkat berbagai program dan kegiatan, termasuk sertifikasi halal gratis serta kolaborasi untuk memperkuat ekosistem halal, yang juga berhasil meraih penghargaan nasional dan internasional. Ke depan, layanan ini dapat semakin ditingkatkan melalui perluasan distribusi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), percepatan proses sertifikasi, penguatan literasi halal bagi pelaku usaha dan masyarakat, serta kolaborasi lintas pihak yang lebih masif.

4) Kepuasan terhadap Layanan Ibadah Haji

Ibadah haji, sebagai salah satu rukun Islam, mendapat perhatian besar dari Kementerian Agama yang terus meningkatkan kualitas layanannya melalui berbagai program, termasuk evaluasi layanan katering, pembinaan bimbingan haji, layanan ramah lansia, transformasi digital, dan perlindungan jamaah. Pada 2024, Indeks Kepuasan Layanan Ibadah Haji tercatat 88,20, menunjukkan peningkatan dibanding 2023 meski masih di bawah capaian 2022, dengan tantangan utama terkait kapasitas akomodasi, transportasi, layanan kesehatan, dan proses pendaftaran. Untuk mengatasi hal ini, Kemenag membangun Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) di 253 Kantor Kemenag kabupaten/kota, mempermudah proses pendaftaran, konsultasi, dan pelayanan haji/umrah secara cepat, efisien, dan terintegrasi. Layanan haji pada tahun 2025 masih dilakukan oleh Kementerian Agama, namun mulai tahun 2026 seluruh penyelenggaraan haji akan dialihkan ke Kementerian Haji. Peralihan ini bertujuan untuk meningkatkan fokus, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan haji, memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga, serta memberikan layanan yang lebih cepat, transparan, dan berkualitas bagi seluruh jamaah.

d. Pemberdayaan Ekonomi Keagamaan Umat

Ekonomi keagamaan umat memiliki potensi strategis dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, tidak hanya dari sisi sosial ekonomi, tetapi juga dalam memperkuat pendidikan dan layanan keagamaan. Pemberdayaan dana sosial keagamaan menjadi salah satu instrumen penting yang dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan mutu layanan tersebut.

Tabel 1.8 menunjukkan capaian pemanfaatan dana sosial keagamaan dalam mendukung pendidikan dan keagamaan pada periode 2020–2024. Pada tahun 2024, tercatat 63,42% dana sosial keagamaan dialokasikan untuk layanan pendidikan dan keagamaan. Capaian ini memang menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 89,83%, namun masih lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 55,84%, serta tahun-tahun sebelumnya. Pola capaian ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi fluktuasi, pemberdayaan dana sosial keagamaan tetap memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung peningkatan layanan pendidikan dan keagamaan.

Tabel 1. 7 Persentase Pemanfaatan Dana Sosial Keagamaan untuk Mendukung Layanan Pendidikan dan Keagamaan, 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	50,00	51,00	53,00	54,00	55,00
Realisasi	44,30	51,25	55,84	89,83	63,42
Persentase Capaian	88,60	100,49	105,35	166,36	115,3

Sumber: Laporan Kinerja Kemenag 2024

Pencapaian tersebut dapat diraih berkat, antara lain, beberapa kebijakan dan program yang dijalankan Kemenag untuk memperkuat pemberdayaan umat dalam beberapa tahun terakhir. Kebijakan dan program tersebut mencakup, antara lain: (1) Program Kampung Zakat; (2) Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis KUA; (3) Inkubasi Wakaf Produktif, dan (4) Program Kota Wakaf. Selain itu, Kemenag juga berupaya meningkatkan literasi masyarakat tentang dana sosial keagamaan.

Namun demikian, pemanfaatan ekonomi keagamaan umat masih menghadapi beberapa tantangan, seperti belum optimalnya pengelolaan dana sosial keagamaan, tidak meratanya distribusi dana sosial, dan minimnya transparansi dalam pengelolaan dana sosial tersebut. Meski dana sosial keagamaan seperti zakat, infak, dan sedekah memiliki potensi besar, pengelolaannya masih terpusat pada beberapa lembaga besar. **Banyak lembaga keagamaan lokal belum mampu mengoptimalkan (potensi) dana yang ada untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan keagamaan di masyarakat.**

2. Kondisi Umum Bidang Pendidikan

Di bidang pendidikan, Kemenag memiliki empat (4) SS sebagai berikut : Meningkatnya pemerataan akses pendidikan (SS3); Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah (SS4); Meningkatnya pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas (SS5); dan Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas (SS6). Bagian ini memaparkan kondisi umum bidang pendidikan terkait dengan keempat SS tersebut.

a. Akses Berkualitas dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah

Sub-Bagian ini memaparkan dua hal: (1) Perkembangan akses pendidikan dan kontribusi Kemenag dalam meningkatkan akses pendidikan dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dasar dan menengah; dan (2) perkembangan mutu pendidikan dasar dan menengah.

1) Akses Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah

Pendidikan anak usia dini memiliki peran penting dalam mempersiapkan anak untuk menempuh pendidikan dasar. Anak-anak yang memiliki persiapan lebih baik akan dapat menempuh

pendidikan dasar dengan lebih baik. Indonesia perlu meningkatkan akses PAUD. Secara nasional, angka partisipasi kasar (APK) PAUD hanya mencapai 47,05% pada 2024.

Kemenag turut berperan dalam memperluas layanan PAUD melalui berbagai lembaga seperti RA, PAUDQU, Taman Seminari Katolik, Pratama Widya Pasraman Hindu, dan Nava Dhammasekha Buddha. Pada 2024, jumlah siswa PAUD di bawah Kemenag mencapai 1.393.803 anak atau setara 7,91% dari total anak usia 3–6 tahun (APK). Dengan tingkat APK PAUD secara nasional yang baru mencapai 47,05%, **masih terbuka ruang luas bagi Kemenag untuk meningkatkan kontribusinya dalam meningkatkan APK PAUD.**

Tabel 1. 8 Jumlah Siswa dan APK pada Satuan Pendidikan, 2024

No	Jenjang	Usia Siswa	Jumlah Penduduk dalam Rentang Usia	Kemenag		Kemdikdasmen		APK Nasional (%)
				Jumlah Siswa	APK (%)	Jumlah Siswa	% APK	
1	RA/Sederajat	3-6	17.618.391	1.393.803	7,91	6.895.192	39,14	47,05
2	MI/Sederajat	7-12	28.689.290	4.250.509	14,82	24.323.553	84,78	99,60
3	MTs/Sederajat	13 - 15	13.987.265	3.345.861	23,92	10.521.011	75,22	99,14
4	MA/Sederajat	16 - 18	13.404.822	1.728.356	12,89	11.409.569	85,12	98,01

Sumber: Diolah dari Data EMIS Kemenag dan BPS Tahun 2024

Tabel 1. 9 Jumlah Siswa dan APM pada Satuan Pendidikan, 2024

No	Jenjang	Usia Siswa	Jumlah Penduduk dalam Rentang Usia	Kemenag		Kemdikdasmen		APM Nasional (%)
				Jumlah Siswa	APK (%)	Jumlah Siswa	APK (%)	
1	RA/Sederajat	3-6	17.618.391	1.120.570	6,36	NA	NA	NA
2	MI/Sederajat	7-12	28.689.290	4.040.887	14,09	22.248.686	77,55	91,64
3	MTs/Sederajat	13-15	13.987.265	2.898.843	20,72	7.988.593	57,11	77,84
4	MA/Sederajat	16-18	13.404.822	1.433.094	10,69	8.095.255	60,39	71,08

Sumber: Diolah dari Data EMIS Kemenag dan BPS

Pada jenjang pendidikan dasar, APK nasional untuk anak usia 7-12 tahun mencapai 99,60% pada 2024. Kemenag berkontribusi signifikan dalam meningkatkan APK pendidikan dasar melalui berbagai layanan pendidikan, seperti MI, PKPPS Tingkat Ula, dan SDTK. Dengan total 4.250.509 siswa pada 2024, satuan pendidikan dasar di bawah Kemenag menyumbang APK sebesar 14,09%. Untuk angka partisipasi murni (APM), satuan

pendidikan pada jenjang pendidikan dasar di bawah Kemenag menyumbang sebesar 91,64% pada 2024.

Pada jenjang pendidikan menengah, Kemenag melalui lembaga seperti MTs, Wustha, SMPTK, Madyama, dan Widya Pasraman juga berkontribusi besar dalam meningkatkan akses pendidikan menengah pertama. Dengan sekitar 3,35 juta siswa dari total 13,99 juta anak usia 13–15 tahun, Kemenag menyumbang APK sebesar 23,92% pada 2024. Secara nasional, APK anak usia 13–15 mencapai 99,14% pada 2024. Akan tetapi, APM jenjang pendidikan menengah pertama baru mencapai 77,84%, dengan kontribusi Kemenag mencapai sebesar 20,72 %. **Masih ada sekitar 22.16% anak usia 13-15 tahun yang belum mendapatkan layanan pendidikan menengah pertama.** Ini memberi ruang yang cukup besar bagi Kemenag untuk meningkatkan kontribusinya dalam peningkatan akses pendidikan menengah pertama.

Untuk anak usia 16–18 tahun Kemenag menyediakan layanan pendidikan menengah atas melalui MA, PKPPS Tingkat Ulya, SMAK, SMTK, dan Utama Widya Pasraman. Pada 2024, APK pendidikan menengah atas nasional yang mencapai 98,01%. Dengan **1,73 juta siswa dari total 13,4 juta anak usia 16-18 tahun menempuh pendidikan menengah atas di bawah Kemenag**, Kemenag menyumbang APK pendidikan menengah atas sebesar 12,89%. Capaian ini menunjukkan peran strategis Kemenag dalam memperluas akses pendidikan jenjang menengah atas di Indonesia. Untuk APM, Kemenag menyumbang 10,69 poin persentase pada jenjang pendidikan menengah atas dari total APM nasional yang mencapai 71,08% pada 2024.

Capaian tersebut dapat diraih berkat, antara lain, berbagai kebijakan dan program yang dijalankan Kemenag untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan. Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan dan program tersebut mencakup, antara lain: (1) Peningkatan kapasitas kelas satuan pendidikan termasuk di daerah 3T; (2) Melakukan pengembalian anak tidak sekolah ke dalam satuan/sistem pendidikan/pelatihan; (3) Menyediakan bantuan pendidikan; dan (4) Peningkatan kualitas pendidikan tahun terakhir pada Pra-Sekolah

Terkait dengan pemerataan akses pendidikan, salah satu isu strategis yang dihadapi Indonesia adalah terbatasnya akses pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), serta bagi kelompok marginal secara ekonomi. Akses pendidikan yang tidak merata di wilayah ini menghambat pemerataan kesempatan belajar bagi anak-anak di Indonesia. Untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan, hal-hal yang sudah dilakukan Kemenag dalam beberapa tahun terakhir mencakup, antara lain: (1) Peningkatan kapasitas kelas satuan pendidikan termasuk di daerah 3T; (2) Melakukan pengembalian anak tidak sekolah ke dalam satuan/sistem pendidikan/pelatihan; (3) Menyediakan bantuan pendidikan; dan (4) Peningkatan kualitas pendidikan tahun terakhir pada Pra-Sekolah.

Salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas akses pendidikan dilaksanakan melalui Program Hasil Terbaik Cepat

(PHTC) Revitalisasi Madrasah pada Tahun 2025. Program Revitalisasi Madrasah merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan akses, mutu dan daya saing pendidikan keagamaan di Indonesia. Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Revitalisasi Madrasah merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan, termasuk madrasah. Program ini bertujuan mempercepat peningkatan kualitas sarana prasarana madrasah di seluruh Indonesia melalui mekanisme pembiayaan konstruksi *Single Year Contract* (SYC) dan *Multi Years Contract* (MYC).

Dari total 2.120 usulan madrasah, hasil verifikasi menunjukkan: 1.416 madrasah memenuhi kriteria untuk direvitalisasi, 702 madrasah tidak memenuhi kriteria, karena faktor seperti kerusakan ringan, lahan bermasalah, duplikasi pendanaan, atau jumlah siswa yang tidak memenuhi syarat dan 2 madrasah tidak dapat disurvei karena kendala keamanan dan akses, khususnya di Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Madrasah yang memenuhi kriteria ditangani melalui dua skema: 1) SYC Tahun 2025 sebanyak 568 madrasah di 27 provinsi termasuk Aceh, Sumatera Barat, Riau, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua, meliputi 364 madrasah dalam tahap konstruksi, 139 madrasah dalam tahap persiapan kontrak dan 65 madrasah dalam proses lelang. 2) MYC 2025–2026 sebanyak 848 madrasah di 26 provinsi antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat, 8 madrasah dalam tahap lelang dan 840 madrasah dalam tahap persiapan lelang.

Dengan perencanaan, pembiayaan, dan pelaksanaan konstruksi yang terintegrasi, diharapkan revitalisasi madrasah dapat selesai tepat waktu, sesuai target, serta berdampak nyata bagi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

2) Mutu Pembelajaran dan Pengajaran

Pembangunan sumber daya manusia memerlukan mutu pendidikan yang unggul. Terkait hal ini, kualitas sistem pendidikan ditentukan bukan hanya oleh akses pendidikan melainkan juga mutu pendidikan. Tanpa mutu pendidikan yang baik, tidak banyak yang akan dipelajari oleh siswa di bangku sekolah sehingga tujuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tidak akan tercapai secara maksimal.

Mutu pendidikan bisa diukur dengan melihat sejauh mana siswa menguasai beberapa kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Dalam literasi, hasil Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dalam AN menunjukkan siswa MI rata-rata memiliki nilai 51,19 pada 2024. Angka ini lebih tinggi dari nilai AN tahun-tahun sebelumnya. Proporsi siswa MI yang memiliki kompetensi minimum dalam literasi juga meningkat. Pada tahun 2024, proporsi siswa dengan kompetensi literasi di atas kompetensi minimum mencapai 59 %. Angka ini juga lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya (Tabel 1.12).

Tabel 1. 10 Rata-Rata Nilai AN Literasi dan Numerasi Siswa Madrasah, 2021-2024

Jenjang Pendidikan	Literasi				Numerasi			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
MI	44,53	48,23	49,58	51,19	32,29	35,65	38,44	46,08
MTs	55,77	58,12	59,60	61,07	51,85	51,56	54,69	56,73
MA	59,38	58,18	61,93	63,50	48,84	49,91	53,19	54,90

Sumber: Diolah dari Data AN Kemdikdasmen, 2024

Tabel 1. 11 Persentase Siswa dengan Kompetensi Minimum dalam AN, 2021-2024

Jenjang Pendidikan	Literasi				Numerasi			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
MI	47,0	54,3	56,9	59,0	24,8	38,1	46,5	55,3
MTs	47,8	54,4	58,4	61,2	33,0	35,8	52,5	59,6
MA	52,2	48,8	60,2	61,0	32,0	39,4	56,3	59,0

Sumber: Diolah dari Data AN Kemdikdasmen, 2024

Hasil AN 2021–2024 juga menunjukkan peningkatan kompetensi literasi siswa pada jenjang pendidikan menengah. Pada jenjang MTs, rata-rata nilai kompetensi literasi siswa mencapai 61,07 pada 2024. Angka ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya (2023), yakni 59,60. Pada jenjang MA, rata-rata nilai AN siswa di bidang literasi pada 2024 mencapai 63,5. Angka ini juga lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya (2023), yang mencapai 61,93. Akan tetapi, **capaian ini masih belum mencapai tingkat yang diharapkan. Perlu upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kompetensi literasi siswa madrasah.**

Dalam numerasi, kompetensi siswa madrasah juga meningkat dari tahun ke tahun. Pada jenjang MI, rata-rata nilai AN siswa dalam kompetensi numerasi naik dari 32,29 pada 2021 menjadi 46,08 pada 2024. Pada jenjang MTs, meski rata-rata nilai AN siswa sedikit turun dari 51,85 pada 2021 menjadi 51,56 pada 2022, nilai tersebut kembali naik menjadi 56,73 pada 2024. Pada jenjang MA, rata-rata nilai AN siswa dalam kompetensi numerasi naik dari 48,84 pada 2021 menjadi 54,90 pada 2024.

Proporsi siswa dengan kompetensi minimum dalam numerasi juga mengalami peningkatan. Pada jenjang MI, misalnya, proporsi siswa dengan kompetensi minimum meningkat dari 24,8% pada 2021 menjadi 55,3% pada 2024. Capaian ini mencerminkan upaya berkelanjutan Kemenag dalam meningkatkan performa siswa madrasah. Namun demikian, nilai rata-rata dan proporsi tersebut tergolong rendah dan masih perlu untuk terus ditingkatkan.

Dalam menilai kompetensi siswa, Kemenag menyelenggarakan Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia (AKMI), yang

mengukur kompetensi literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains, dan literasi sosial budaya siswa madrasah. Menurut hasil AKMI, rata-rata kompetensi literasi sosial budaya siswa MI mencapai 49,8 pada 2024. Pada tingkat MTs, rata-rata nilai literasi sosial budaya mencapai 90,03 pada 2024. Angka ini juga hanya sedikit lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya (89,9). Pada jenjang MA, nilai rata-rata literasi sosial budaya pada 2024 mencapai 130,19. Angka ini juga hanya sedikit lebih tinggi dari angka tahun sebelumnya (129,95). Angka-angka ini menunjukkan bahwa capaian kompetensi literasi sosial budaya terus meningkat seiring dengan semakin tinggunya jenjang pendidikan siswa.

Beberapa pencapaian tersebut dapat diraih antara lain berkat kebijakan dan program yang dijalankan Kemenag untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Kebijakan dan program tersebut mencakup, antara lain: (1) Penerapan kurikulum Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia yang mengintegrasikan penguatan kemampuan berpikir; (2) Penguatan pembelajaran literasi dasar dalam membaca, menulis dan berhitung pada kelas-kelas rendah; (3) Penguatan kualitas penilaian hasil belajar siswa yang dimanfaatkan untuk peningkatan mutu; dan (4) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dan pengintegrasian model inovatif dalam pembelajaran.

Namun demikian, masih relatif rendahnya skor kompetensi literasi, numerasi dan literasi sains siswa madrasah menunjukkan perlunya perhatian serius terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan. Pemerintah perlu memberikan perhatian lebih pada penguatan kompetensi guru, pengembangan kurikulum berbasis literasi esensial, optimalisasi teknologi pendidikan, dan peningkatan akses pembelajaran. Kolaborasi antar pemangku kepentingan dan pendampingan intensif bagi sekolah/ madrasah perlu dilakukan untuk meningkatkan kompetensi siswa. Bagi Kemenag khususnya, ini memerlukan penguatan kebijakan pendidikan yang ada, khususnya untuk meningkatkan pendidikan madrasah.

3) Pengelolaan dan Penempatan Guru

Guru merupakan salah satu faktor utama dalam peningkatan mutu pendidikan. Siswa yang belajar di bawah bimbingan guru yang baik akan memiliki performa yang lebih tinggi dari siswa yang belajar di bawah bimbingan guru yang kurang baik.

Berdasarkan data EMIS 2024 (per Desember 2024), jumlah peserta didik di RA, MI, MTs, dan MA/MAK mencapai 10.571.578 orang dengan total guru 936.697 orang. Rasio guru-siswa secara umum mencapai 1:10 untuk jenjang RA. Angka ini berarti setiap satu orang guru bertanggung jawab mengajar rata-rata 10 orang siswa pada jenjang RA. Pada jenjang di atasnya, rasio guru-siswa mencapai 1:11 untuk jenjang MI, 1:13 untuk jenjang MTs, dan 1:10 untuk jenjang MA (1:10). , dan 1:11 dan 1:13 untuk jenjang MTs dan MI. Angka ini lebih rendah dari angka rujukan yang ditetapkan pemerintah, yakni 20 untuk SD/SMP/SMA dan 15 untuk SMK (BPS 2023).

Secara kuantitas, **angka tersebut menunjukkan bahwa jumlah guru di lingkungan Kemenag sudah mencukupi. Akan tetapi, kualitas distribusi guru masih perlu ditingkatkan.** Terdapat perbedaan yang cukup besar antar madrasah dan mata pelajaran. Tidak sedikit madrasah memiliki rasio guru-murid lebih dari 20, namun di sisi lain tidak sedikit pula madrasah yang memiliki rasio guru-murid sebesar 9 atau kurang. Pada jenjang MA, lebih dari 50% madrasah memiliki rasio guru-siswa sebesar 9 atau kurang. Kesenjangan juga ditemukan antar mata pelajaran. Rasio guru-siswa untuk mata pelajaran Mamematika mencapai 1:20 di Jawa dan 1:30 di luar Jawa. Untuk mata pelajaran Sains, rasio guru-siswa lebih tinggi, yakni 1:22 di Jawa dan 1:35 di luar Jawa (EMIS, 2024).

Selain itu, jumlah guru bersertifikat pendidik masih tergolong rendah di lingkungan Kemenag. Pada 2024, Tabel 1.13 menunjukkan hanya sekitar 39,16% guru sudah bersertifikat pendidik. Pada jenjang RA dan MA, proporsi guru yang sudah bersertifikat lebih rendah, hanya mencapai, secara berurutan, 28,82 % dan 34,62%.

Tabel 1. 12 Guru Bersertifikat Pendidik Pada RA, MI, MTs, dan MA

No	Satuan Pendidikan	Jumlah Guru	Jumlah Guru Bersertifikat	Persentase Guru Bersertifikat
1	RA	103.477	29.817	28,82
2	MI	287.746	128.968	44,82
3	MTs	263.985	104.254	39,49
4	MA	141.492	48.983	34,62
Rata-Rata				39,16

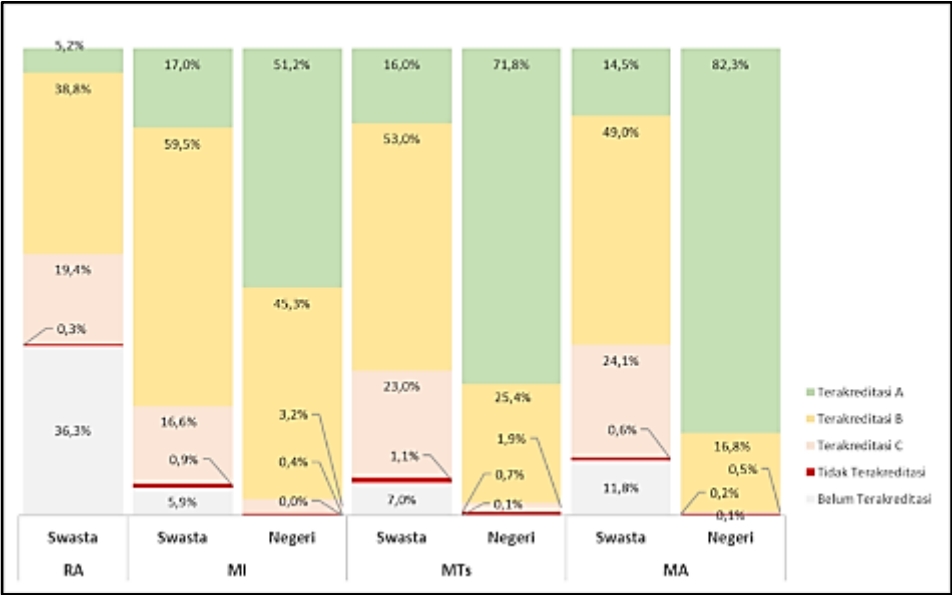
Sumber: EMIS GTK Ditjen Pendis Kemenag, 2024

Pencapaian tersebut tidak terlepas dari beberapa kebijakan dan program yang dilakukan Kemenag untuk meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru mencakup. Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan dan program tersebut mencakup, antara lain: (1) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kompetensi; (2) Peningkatan kemampuan profesional berkelanjutan; (3) Peningkatan kesejahteraan berbasis penilaian kinerja; dan (4) Pemerataan distribusi dan revitalisasi LPTK dalam meningkatkan kualitas lulusannya sesuai dengan kebutuhan.

Ke depan, Kemenag perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan terkait kualitas dan ketimpangan distribusi guru dengan memfokuskan perhatian pada peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik, serta memenuhi dan pemeratakan tenaga pengajar di seluruh wilayah.

4) Akreditasi Madrasah

Penjaminan mutu diperlukan untuk meningkatkan dan menjaga kualitas pendidikan. Proses ini melibatkan penilaian kualitas satuan pendidikan melalui akreditasi yang mencakup capaian standar nasional pendidikan dan kinerja. Gambar 1.4 berikut memaparkan status atau hasil akreditasi *terhadap* RA dan madrasah di lingkungan Kemenag. Pada 2024, secara keseluruhan (RA, MI, MTs dan MA), **masih belum banyak sekolah di bawah Kemenag yang terakreditasi A. Mayoritas memiliki nilai akreditasi B atau lebih rendah (C).** Namun demikian, terdapat perbedaan yang cukup besar antara madrasah negeri dan swasta.



Gambar 1. 3 Status Akreditasi Satuan Pendidikan (%)
* Tidak ada RA negeri. Seluruh RA dikelola swasta.
Sumber: Diolah dari BAN PDM (2024)

Pencapaian tersebut tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan Kemenag untuk meningkatkan akreditasi madrasah. Beberapa hal yang dilakukan Kemenag pada periode 2019-2024 mencakup, antara lain: (1) Penguatan fasilitasi Kemenag dalam meningkatkan status akreditasi satuan pendidikan; (2) Peningkatan budaya mutu pendidikan dalam Sistem Manajemen Madrasah/Pendidikan Keagamaan; (3) Peningkatan alih status dari madrasah swasta menjadi madrasah negeri secara terbatas; dan (4) Peningkatan kualitas kelembagaan pengelola/pembina SPMI pada satuan kerja di pusat dan daerah.

5) Kualitas Karakter Siswa

Pencapaian pendidikan terlihat bukan hanya dalam perkembangan kognisi siswa, melainkan juga dalam perkembangan karakter mereka. Baik kognisi maupun karakter siswa sama-sama diperlukan untuk kemajuan masyarakat. Untuk mengetahui perkembangan karakter siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melakukan asesmen karakter siswa dilakukan melalui Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar) yang terintegrasi dengan AN. Tabel 1.15 menunjukkan hasil asesmen karakter siswa dan iklim kebhinekaan satuan

pendidikan di bawah Kemenag berdasarkan hasil Sulingjar 2024. Survei karakter mengukur beberapa hal, yakni (1) Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Berakhlak Mulia; (2) Gotong royong; (3) Kreativitas; (4) Nalar kritis; (5) Kebhinekaan global; dan (6) Kemandirian.

Pada 2024, dalam survei karakter, rata-rata skor capaian MI/Sederajat dan MA/Sederajat tergolong “Baik”, yang berarti peserta didik terbiasa menerapkan nilai-nilai karakter pelajar Pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis serta berkebinekaan global. Akan tetapi, skor capaian MTs/Sederajat tergolong “Sedang”, yang berarti peserta didik telah menyadari pentingnya nilai karakter namun perlu dukungan untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 1. 13 Karakter Peserta Didik dan Iklim Kebhinekaan Satuan Pendidikan di Bawah Kemenag, 2024

Jenjang	Capaian Karakter		Capaian Iklim Kebhinekaan	
	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
MI/Sederajat	52,67	Baik	64,19	Sedang
MTs/Sederajat	50,65	Sedang	64,28	Sedang
MA/Sederajat	52,81	Baik	63,39	Sedang

Sumber: Diolah dari Rapor Pendidikan, Kemdikdasmen 2024

Iklim kebhinekaan melihat sejauh mana satuan pendidikan menunjukkan sikap dan perilaku menerapkan toleransi agama dan budaya, dan komitmen kebangsaan. Iklim kebhinekaan diukur dengan indeks komposit yang terdiri dari 3 sub-indikator, yaitu toleransi agama dan budaya, komitmen kebangsaan, dan toleransi dan kesetaraan peserta didik. Untuk iklim kebhinekaan, skor capaian satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan di bawah Kemenag tergolong **“Sedang”, yang berarti satuan pendidikan sudah mulai mampu menghadirkan suasana belajar yang menjunjung tinggi toleransi keberagaman.**

Pencapaian tersebut dapat diraih berkat beberapa kebijakan dan program yang dilakukan Kemenag dalam beberapa tahun terakhir (2019-2024), yang mencakup, antara lain: (1) Peningkatan kompetensi kepala madrasah dan satuan pendidikan keagamaan dalam menciptakan budaya belajar aman dan nyaman; (2) Peningkatan jumlah madrasah/satuan pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan karakter; (3) Pengintegrasian nilai kepeloporan dalam kegiatan intra dan ekstrakurikuler; (4) Peningkatan kualitas kegiatan kepramukaan yang meningkatkan kepeloporan, keteladanan, dan kerja sama; dan (5) Penguatan kerja sama dengan orang tua dalam penerapan pendidikan karakter di lingkungan keluarga.

6) Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus

UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara, termasuk mereka yang menyandang disabilitas, untuk mendapatkan layanan pendidikan. Sesuai dengan ketentuan konstitusional ini, Kemenag mengembangkan kebijakan pendidikan Islam yang inklusif. Hingga 2024, Kemenag telah merintis pendidikan inklusi di 567 madrasah negeri dan swasta untuk tingkat MI, MTs, dan MA, dengan 3.344 siswa berkebutuhan khusus.

Hasil Sulingjar 2024 menunjukkan bahwa satuan pendidikan di bawah Kemenag, baik MI, MTs maupun MA, tergolong memiliki capaian “Sedang” dalam iklim inklusivitas (Tabel 1.16). Kategori ini menunjukkan bahwa satuan pendidikan mulai mengembangkan suasana proses pembelajaran yang menyediakan layanan yang ramah bagi peserta didik dengan disabilitas dan cerdas berbakat istimewa. Akan tetapi, capaian indeks kesenjangan iklim insklusivitas untuk peserta didik berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan di bawah Kemenag juga tergolong “Sedang”, yang berarti terdapat kesenjangan perlakuan inklusivitas terhadap peserta didik berkebutuhan khusus berdasarkan kelompok sosial ekonomi atau wilayah perkotaan-perdesaan.

Tabel 1. 14 Capaian dan Kesenjangan Iklim Inklusivitas Satuan Pendidikan di Bawah Kemenag, 2024

Jenjang	Capaian Iklim Inklusivitas		Kesenjangan Iklim Inklusivitas	
	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
MI/Sederajat	49,37	Sedang	0,66	Sedang
MTs/Sederajat	51,65	Sedang	0,94	Sedang
MA/Sederajat	53,89	Sedang	1,38	Sedang

Sumber: Diolah dari Rapor Pendidikan, Kemdikdasmen 2024

Kemenag terus berupaya memperluas akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus pada semua satuan pendidikan di bawah Kemenag, baik pada jalur formal maupun non formal, melalui penerbitan PMA Nomor 1 tahun 2024 tentang Akomodasi Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama. Semua satuan pendidikan diharapkan dapat menyediakan layanan pendidikan inklusif untuk semua anak, sesuai latar belakang dan kebutuhan belajarnya. Untuk mendukung implementasi peraturan dan kebijakan tersebut Kemenag akan terus melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru madrasah, dan advokasi serta peningkatan kompetensi dan keahlian para pendidik di lingkungan pendidikan keagamaan dan pesantren.

b. Akses Berkualitas dan Mutu Pendidikan Keagamaan dan Pesantren

Selain sekolah dengan kekhasan agama, Kemenag juga membawahi sekolah keagamaan dan pesantren. Bagian ini menunjukkan perkembangan pendidikan keagamaan dan pesantren.

1) Pendidikan Keagamaan

Layanan pendidikan keagamaan disediakan sesuai dengan agama masing-masing siswa. Untuk peserta didik beragama Islam, pendidikan keagamaan diselenggarakan melalui pendidikan diniyah dan pesantren. Pendidikan diniyah terdiri dari dua jenis, yaitu pendidikan Al-Quran dan Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT). Baik MDT maupun pendidikan Al-Quran merupakan lembaga pendidikan non-formal. Pendidikan Al-Quran terdiri dari Taman Kanak-Kanak Al-Quran (TKQ), Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ), dan Ta'limul Quran Lil Aulad (TQA). Sementara itu, MDT dibagi menjadi MDT Ula, MDT Wustha, dan MDT Ulya untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, dan Ma'had Al-Jami'ah untuk jenjang pendidikan tinggi.

Tabel 1.17 menunjukkan jumlah dan distribusi peserta didik (santri) di setiap lembaga pendidikan keagamaan Islam. Sebagian besar MDT berada pada jenjang MDT Ula (89,5%), menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap MDT Ula sebagai penguatan pendidikan agama Islam tingkat dasar. Untuk pendidikan Al-Quran, mayoritas masyarakat memilih Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) (92,1%) sebagai tempat pendidikan Al-Quran, menunjukkan pentingnya pengenalan dan pengajaran membaca serta menghafal Al-Quran.

Tabel 1. 15 Jumlah Lembaga dan Santri Pendidikan Keagamaan Islam

No	Satuan Pendidikan	Lembaga		Peserta Didik / Santri	
1	MDT	105.139		2.916.106	
	- MDT Ula	94.058	89,5%	2.702.385	92,7%
	- MDT Wustha	10.171	9,7%	199.635	6,8%
	- MDT Ulya	735	0,7%	10.992	0,4%
	- Ma'had Al-Jami'ah	175	0,2%	3.094	0,1%
2	LPQ	201.156		2.581.518	
	- TKQ	9.690	4,8%	64.639	2,5%
	- TPQ	185.349	92,1%	2.418.135	93,7%
	- TQA	1.368	0,7%	4.793	0,2%
	• PAUDQU	3.576	1,8%	72.929	2,8%
	• RTQ	1.147	0,6%	20.524	0,8%
	• PTQ	26	0,01%	498	0,02%
TOTAL		306.295		5.497.624	

Sumber: EMIS Kemenag 2024.

Selain pendidikan keagamaan Islam, Kemenag juga mengelola pendidikan keagamaan Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Tabel 1.18 menunjukkan bahwa dari total 664 sekolah keagamaan, 1% di antaranya adalah negeri, sedangkan sisanya

dikelola swasta. Sekolah keagamaan Kristen merupakan yang terbesar dengan 421 sekolah (63,4%), diikuti oleh sekolah keagamaan Hindu (104 sekolah, 15,7%) dan Katolik (102 sekolah, 15,4%).

Tabel 1. 16 Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha, 2024

Pendidikan Keagamaan	Negeri		Swasta		Total Satuan	Total Siswa
	Satuan	Siswa	Satuan	Siswa		
Budha			37	680	37	680
Nava Dhammasekha-PAUD			35	651	35	651
Mula Dhammasekha-SD			1	12	1	12
Uttama Dhammasekha-SMA			1	17	1	17
Hindu			104	3.311	104	3.311
Pratama Widyalaya-PAUD			82	1.855	82	1.855
Adi Widyalaya-SD			12	741	12	741
Madyama Widyalaya-SMP			5	245	5	245
Utama Widyalaya-SMA			5	470	5	470
Katolik	3	643	99	7.041	102	7.684
Taman Seminari-SMA			56	1.475	56	1.475
SMAK-SMA	3	643	43	5.566	46	6.209
Kristen	4	271	417	20.606	421	20.877
SDTK-SD			72	4.630	72	4.630
SMPTK-SMP			118	5.193	118	5.193
SMTK-SMA	4	271	168	7.588	172	7.859
SMAK-SMA			59	3.195	59	3.195
Total	7	914	657	31.638	664	32.552

Sumber: EMIS Kemenag 2024

2) Pendidikan Pesantren

Sistem pendidikan nasional mengakomodasi keberadaan pendidikan pesantren, yang merupakan sistem pendidikan Islam tertua di Indonesia. Sistem pendidikan ini mendapat pengakuan negara melalui UU No. 18/2019 tentang Pesantren. Pesantren mengembangkan kurikulum berbasis kitab kuning dan kajian keislaman. Pada akhir 2024, terdapat 41.286 pesantren dengan 3.339.536 santri pada akhir 2024. Angka ini belum mencakup santri di Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiah

(PKPPS), Satuan Pendidikan Muadalah (SPM), Pendidikan Diniyah Formal (PDF), dan Ma'had Aly yang berjumlah 449.048 (Tabel 1.19). Dengan memperhitungkan santri pada MDT dan LPQ di atas, total santri di seluruh lembaga pendidikan keagamaan Islam dan pesantren mencapai 9.286.208 orang.

Tabel 1. 17 Jumlah Satuan Pendidikan Berbasis Pesantren dan Santri, 2024

No	Satuan Pendidikan	Lembaga	Santri
1	PKPPS	1.998	261.197
2	SPM	281	132.582
3	PDF	175	34.225
4	Ma'had Aly	79	21.044
Total		2.533	449.048

Sumber: EMIS Kemenag 2024

Salah satu indikator formal yang digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan pesantren adalah capaian AN peserta didik (santri) yang diikuti pada program PKPPS. pendidikan Paket A/Ula (Setara MI), nilai rata-rata peserta didik dalam kompetensi literasi meningkat dari 45,99 pada 2021 menjadi 49,03 pada 2024, sementara nilai rata-rata AN untuk kompetensi numerasi naik dari 33,71 menjadi 44,12. Proporsi siswa yang memiliki kompetensi minimum dalam literasi meningkat dari 58,8% menjadi 62,8% dalam periode tersebut. Dalam numerasi, angka tersebut meningkat dari 36,9% menjadi 55,9% pada periode yang sama.

Peningkatan serupa juga terlihat pada jenjang Paket B/Wustha (Setara MTs). Nilai rata-rata AN dalam kompetensi literasi meningkat dari 57,44 pada 2021 menjadi 58,17 pada 2024, sementara proporsi siswa yang memiliki kemampuan di atas kemampuan minimum naik dari 51,6 % menjadi 54,1 % pada periode yang sama. Dalam kompetensi numerasi, nilai rata-rata siswa Paket B/Wustha meningkat dari 52,42 pada 2021 menjadi 54,61 pada 2024, sementara proporsi siswa dengan kompetensi di atas kompetensi minimum meningkat dari 36,9% menjadi 51,8%.

Pada Paket C/Ulya, rata-rata nilai literasi sempat menurun dari 60,25 pada 2021 menjadi 55,79 pada 2022, namun nilai literasi kembali naik menjadi 59,03 pada 2023. Sementara itu, rata-rata nilai numerasi meningkat dari 48,54 pada 2021 menjadi 51,41 pada 2023. Meski proporsi siswa dengan kompetensi minimum dalam literasi menurun, proporsi dengan kompetensi minimum untuk numerasi justru meningkat signifikan. Secara keseluruhan, kompetensi siswa di bidang literasi dan numerasi meningkat cukup signifikan dari 2021 hingga 2023 (Table 1.20). Namun demikian, capaian ini masih di bawah harapan dan perlu ditingkatkan.

Tabel 1. 18 Rata-Rata Skor Siswa PKPPS Ula, Wustha, dan Ulya pada Asesmen Nasional Tahun 2021-2024

Jenjang	Rata-rata Skor							
	Literasi				Numerasi			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Paket A/ Ula	45,99	48,35	49,36	49,03	33,71	35,65	38,16	44,12
Paket B/ Wustha	57,44	56,25	57,11	58,17	52,42	50,63	52,91	54,61
Paket C/ Ulya	60,44	55,67	58,59	60,75	48,9	49,14	51,18	52,84

Sumber: Diolah dari hasil AN Kemdikdasmen 2021-2024

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan pesantren, Kemenag akan memfokuskan kebijakan peningkatan pendidikan pesantren ke depan pada **penguatan kurikulum berbasis literasi dan numerasi, peningkatan kapasitas pendidik melalui pelatihan berkelanjutan, optimalisasi metode pembelajaran inovatif**, serta pemantauan dan evaluasi berkala terhadap capaian siswa untuk memastikan peningkatan yang konsisten dan merata di semua jenjang pendidikan.

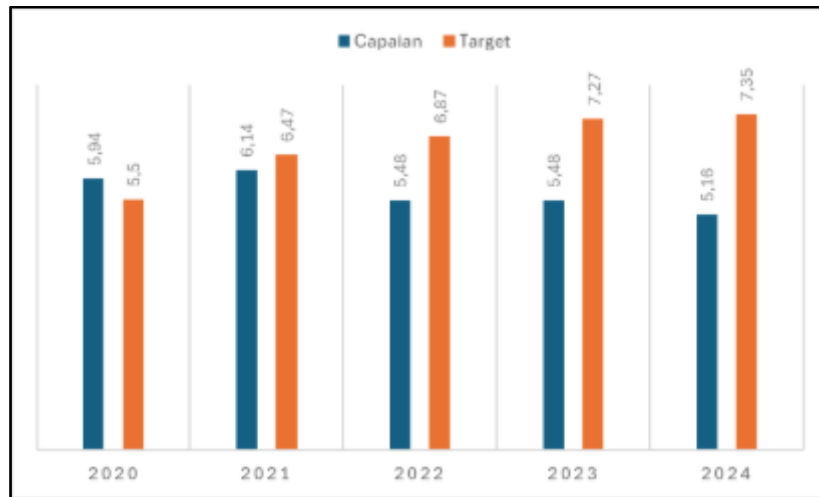
c. Akses Berkualitas, Mutu dan Daya Saing Pendidikan Tinggi

Sub-Bagian ini akan memaparkan dua hal utama: (1) Perkembangan akses pendidikan tinggi; dan (2) Perkembangan mutu dan daya saing Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK).

1) Akses Perguruan Tinggi Keagamaan/Ma'had Aly

Indonesia tahun 2024 sebagaimana dimuat dalam data BPS dan dikonfirmasi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) baru mencapai 32% (Sumber Susenas BPS, 2024). Angka ini masih lebih rendah dibanding APK PT beberapa negara tetangga seperti Singapura (91%), Malaysia (43%), atau Thailand (49%).

Terkait dengan akses pendidikan tinggi, Kemenag turut berkontribusi terhadap penyediaan layanan pendidikan tinggi melalui Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) dan Ma'had Aly. Data BPS Tahun 2024 menyebutkan terdapat total PTK 967 PTK, yang terdiri dari 894 PTK Swasta 73 PTK Negeri. Ma'had Aly sebagai pendidikan tinggi berbasis pesantren mengembangkan kajian keislaman secara berjenjang, mulai dari program sarjana hingga doktor. Pada 2023, jumlah mahasiswa di PTK dan Ma'had Aly berjumlah 1.024.406 orang dengan rincian 1.003.362 mahasiswa PTK dan 21.044 mahasantri Ma'had Aly. Dengan jumlah mahasiswa ini, Kemenag menyumbang APK PT sebesar 4,54 poin persentase terhadap APK PT nasional.



Gambar 1. 4 Perkembangan APK PTK dan Ma'had Aly

Capaian tersebut dapat diraih antara lain berkat beberapa kebijakan dan program yang dijalankan Kemenag dalam meningkatkan layanan pendidikan tinggi agama dan keagamaan. Dalam beberapa tahun terakhir (2020-2024), hal-hal yang dilakukan Kemenag untuk meningkatkan APK pendidikan tinggi mencakup, antara lain: (1) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan; (2) Diversifikasi pengembangan keunggulan PTK berbasis kekuatan kelembagaan lokal; dan (3) Pengendalian dan pembinaan PTK swasta yang kurang bermutu. Ke depan, Kemenag dapat meningkatkan kontribusinya dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi dengan terus meningkatkan **kualitas pendidikan PTK, terutama dengan meningkatkan kualitas penelitian dan mengatasi disparitas antara PTK Negeri dan Swasta, sehingga lebih banyak pihak tertarik melanjutkan studi ke PTK.**

2) Pengelolaan dan Penempatan Dosen

Kualitas pendidikan tinggi akan sangat tergantung pada kualitas dosen. Dalam konteks pendidikan tinggi, dosen berfungsi sebagai tenaga pengajar dan peneliti yang bertugas mengembangkan ilmu pengetahuan dan inovasi. Tanpa pengembangan inovasi dan ilmu pengetahuan, kualitas pendidikan tinggi akan sulit untuk ditingkatkan.

Pada 2024, data EMIS menunjukkan bahwa dari 43.598 dosen di bawah Kemenag, 10.183 dosen (23,36%) berpendidikan doktor. Sementara, 33.205 dosen (76,16%) memiliki latar belakang pendidikan Strata 2, dan 210 dosen (0,48%) berpendidikan S1. Capaian ini dapat diraih antara lain berkat upaya berkelanjutan Kemenag untuk meningkatkan kompetensi dosen dan juga tenaga kependidikan. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas pengajaran, Kemenag juga berupaya meningkatkan kualitas penerapan kurikulum dan pembelajaran inovatif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Namun demikian, dengan sebagian besar dosen masih berpendidikan Strata 2 atau bahkan Strata 1, Kemenag masih memiliki tantangan besar untuk meningkatkan kualitas dosen. Kemenag perlu meningkatkan kualifikasi sebagian besar

dosennya agar bisa menyelesaikan pendidikan doktor atau paling tidak master bagi mereka yang masih berpendidikan S1. Selain itu, Kemenag juga perlu terus mendorong peningkatan kompetensi dosen di lingkungan Kemenag. Secara jabatan fungsional, Tabel 1.20 **menunjukkan hanya 1.270 dosen (3,18 %) telah meraih jabatan fungsional Guru Besar dan 11.300 dosen (28,33%) masih berstatus Asisten Ahli.**

Tabel 1. 19 Jabatan Fungsional Dosen PTKN dan PTKS

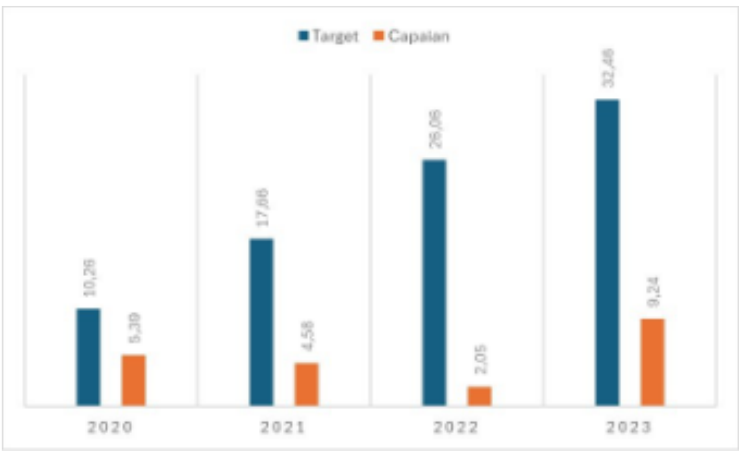
No.	Jabatan Fungsional	Jumlah	%
1.	Guru Besar	1.270	3,18
2	Lektor Kepala	4.154	10,42
3	Lektor	23.160	58,07
4	Asisten Ahli	11.300	28,33
TOTAL		43.598	100

Sumber: EMIS Kemenag 2024

3) Akreditasi PTK dan Asesmen Ma’had Aly

Akreditasi merupakan salah satu instrumen penting untuk melakukan penjaminan mutu. Pendidikan Tinggi Keagamaan, khususnya yang masih memiliki nilai akreditasi yang rendah atau bahkan belum terakreditasi perlu untuk meningkatkan kualitasnya sehingga dapat terakreditasi dan mendapat nilai unggul.

Pada 2024, 25 UIN dan 2 IAIN terakreditasi unggul serta 1 institusi terakreditasi A. Akan tetapi, secara umum Kemenag masih menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kualitas PTK dan Ma’had Aly. Gambar 1.5 menunjukkan **hanya 9,24% PTK/Ma’had Aly mendapatkan nilai akreditasi/asesmen minimal B, jauh di bawah target Kemenag (32,46%).**



Gambar 1. 5 Persentase PTK/Ma’had Aly dengan Status Akreditasi/Asesmen Unggul

Sumber: Ditjen Pendidikan Islam Kemenag

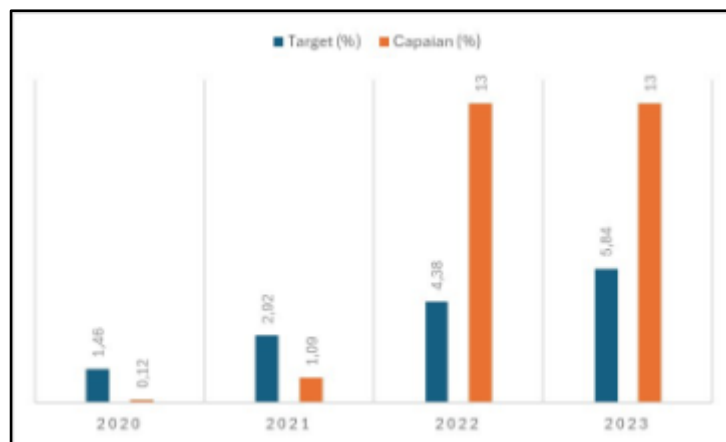
Dalam beberapa tahun terakhir, Kemenag terus mendorong program studi yang masih terakreditasi B untuk meningkatkan kualitas program studi maupun institusi yang menaunginya agar

memperoleh predikat unggul dan menjadi lembaga PTK/Ma'had Aly yang unggul dan kompetitif. Akan tetapi, rendahnya kenaikan pangkat dosen, kurangnya kesadaran pimpinan, dan rendahnya *link and match* lulusan masih sering menjadi hambatan bagi PTK dan Ma'had Aly untuk meningkatkan akreditasi mereka.

Ke depan, Kemenag perlu terus mendorong PTK/Ma'had Aly untuk meningkatkan nilai akreditasi/asesmen, terutama yang masih mendapat nilai B. Selain itu, perlu diberikan perhatian lebih pada PTK/Ma'had Aly yang belum memiliki status akreditasi/asesmen atau masih berstatus C melalui pemetaan, penguatan kelembagaan, dan kerja sama dengan PTK/Ma'had Aly unggul agar mencapai hasil yang lebih baik

4) Akreditasi dan Peringkat Internasional PTK

Akreditasi internasional dan jumlah mahasiswa asing merupakan dua indikator penting yang menunjukkan pengakuan internasional terhadap PT. Pada 2023, sekitar 13% PTK memiliki prodi internasional. Meski tidak ada perubahan signifikan antara 2022 dan 2023, namun capaian tahun 2023 tersebut jauh lebih tinggi dari capaian tahun 2021 dan 2020 (Gambar 1.5). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah program studi terakreditasi internasional dan memiliki mahasiswa asing meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir.



Gambar 1. 6 PTK dengan Prodi Terakreditasi Internasional (%)

Sumber: Ditjen Pendidikan Islam Kemenag

Peningkatan ini didorong oleh pemberian beasiswa untuk mahasiswa asing dan penyebaran informasi tentang PTK ke tingkat global. Dalam beberapa tahun terakhir (2019-2024), Kemenag terus mendorong penyelenggaraan kelas/program studi bertaraf internasional. Selain itu, Kemenag juga mendorong pengembangan kelembagaan PTK menuju *World Class University*.

Kementerian Agama memiliki visi menjadikan PTKI sebagai *World Class University*. Hal ini dilakukan melalui berbagai upaya sistematis dan konsisten untuk mentransformasikan PTKI menjadi perguruan tinggi berbasis riset dan menerapkan standar

internasional. Upaya ini mulai terlihat hasilnya dari tingkat pengakuan internasional terhadap beberapa PTKIN oleh lembaga-lembaga pemeringkat internasional seperti *QS World University Ranking* (QS WUR). Tahun 2024 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berada dalam peringkat 131 untuk QS WUR Asia Tenggara, dan 751-800 untuk QS WUR Asia. Universitas ini menempati peringkat 101-140 QS WUR Dunia untuk kajian *Theology, Divinity and Religious Studies*.¹ Sementara itu di tahun yang sama, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menempati peringkat 169 untuk QS WUR Asia Tenggara².

Selain itu, keberadaan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) juga menjadi perhatian Kemenag dan Pemerintah dalam upaya untuk terus mengembangkan mutu perguruan tinggi sehingga dalam RPJMN 2025 – 2029, UIII ditetapkan menjadi salah satu Proyek Strategi Nasional melanjutkan apa yang sudah ditetapkan di era sebelumnya sebagaimana di atur dalam Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Selain untuk mengembangkan mutu pendidikan tinggi, UIII juga dimaksudkan sebagai salah satu wahana *soft diplomacy* Indonesia dalam menyuarakan Islam moderat di dunia Internasional.

UIII mengusung visi “Terwujudnya dunia lebih baik melalui Pendidikan pascasarjana dan riset unggulan”, UIII mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan sains, teknologi, ilmu sosial dan humaniora, serta memperkuat peran Indonesia sebagai episentrum Islam *rahmatan lil ‘alamin* di kancah internasional.

Untuk mewujudkan visi tersebut, UIII menetapkan misi strategis yang mencakup: 1) menyelenggarakan Pendidikan Tingkat sarjana dan pascasarjana yang unggul; 2) mengembangkan penelitian yang inovatif dan berkontribusi kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan Masyarakat; dan 3) memajukan kebudayaan Islam Indonesia sebagai salah satu bagian dari peradaban dunia. Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2019 tentang Statuta UIII, Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) pada awalnya ditetapkan untuk menyelenggarakan pendidikan tingkat pascasarjana yang unggul. Namun, seiring perkembangan kebutuhan dan dinamika pendidikan tinggi, UIII mengajukan usulan perubahan statuta untuk memperluas mandatnya agar dapat menyelenggarakan pendidikan pada jenjang sarjana. Langkah ini bertujuan memperkuat posisi UIII sebagai pusat keilmuan, penelitian, dan kebudayaan Islam Indonesia yang berkontribusi dalam peradaban dunia. Selain program pascasarjana, UIII juga merencanakan pembukaan program sarjana (S1) pada beberapa fakultas, antara lain Bioteknologi, Informatika, dan Kesehatan Masyarakat.

¹ Sumber : <https://kemenag.go.id/internasional/masuk-qs-world-university-ranking-2024-uin-jakarta-setara-universitas-kelas-dunia-r3hx6>

² Sumber : <https://lpm.uin-malang.ac.id/uin-malang-terus-berupaya-tingkatkan-peringkat-qs-wur/>

Dalam 5 tahun ke depan, akselerasi internasionalisasi melalui program *joint degree*, peningkatan jumlah mahasiswa asing hingga 50% dari jumlah mahasiswa dalam negeri. Jumlah mahasiswa yang berafiliasi dengan UIII di tahun 2024 adalah 474 mahasiswa termasuk 203 mahasiswa asing yang berasal dari 40 negara. Hingga saat ini, tak kurang dari 42,8% mahasiswa UIII merupakan mahasiswa internasional yang berasal berbagai negara di Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika. UIII juga mulai menerima mahasiswa internasional dari negara maju seperti Australia.

Selama periode 2021–2025, UIII menunjukkan progres riset yang signifikan melalui pendanaan internal strategis, publikasi, dan keterlibatan akademik internasional. Pada tahun 2024, UIII mengalokasikan dana riset untuk 12 proyek—termasuk kategori *flagship*, kolaboratif, dan berbasis fakultas—serta enam proyek pengabdian masyarakat, yang dievaluasi melalui seminar bersama para dosen eksternal untuk memperkuat kualitas dan efek sosial penelitian sebagaimana dilansir dalam laman https://old.uiii.ac.id/news/57806/stepping-into-2025-confidently-through-improved-research-and-community-service?utm_. Memasuki 2025, Sebanyak 20 dosen memperoleh kontrak riset formal melalui *Research Grant Program*, yang mencakup berbagai disiplin ilmu, termasuk studi Islam, ilmu sosial, pendidikan, dan ekonomi, sesuai dengan pendekatan interdisipliner UIII dalam menangani isu-isu kontemporer, yang bertujuan memperkuat ekosistem riset, menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi, dan menjawab tantangan global di berbagai disiplin. Keberhasilan akademik UIII juga terlihat dari sejumlah mahasiswa dan dosen yang berprestasi di forum internasional, antara lain, mahasiswa PhD dan MA yang memenangi kompetisi penulisan artikel dan menjadi pembicara dalam konferensi internasional seperti ISEAES, AGC-SCOPOS Aceh, dan konferensi di Jerman dan Istanbul.

Upaya penguatan terhadap pemeringkatan pada *Times Higher Education* (THE) *Impact SDGs* sebagaimana dirilis laman <https://www.timeshighereducation.com/impactrankings> pada Rabu, 18 Juni 2025. Dalam pemeringkatan tersebut, UIN Raden Intan Lampung berada di rentang peringkat 1001–1500 dunia, posisi ke-36 secara nasional, dan menempati posisi tertinggi di antara PTKIN se-Indonesia.³ Harapannya, UIII di periode berikutnya dan juga diikuti oleh PTKN lainnya mampu masuk ke dalam pemeringkatan *THE Impact SDGs* sebagaimana ditargetkan dalam matriks kinerja Renstra Kementerian Agama untuk 2025-2029.

5) Serapan Lulusan PTK di Dunia Kerja

Serapan lulusan di dunia kerja menjadi salah satu indikator kualitas dan daya saing lulusan perguruan tinggi. Hal itu juga menunjukkan relevansi kurikulum yang dikembangkan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja khususnya.

³ <https://kemenag.go.id/nasional/uin-raden-intan-lampung-raih-peringkat-pertama-the-impact-rankings-2025-lingkup-ptkin-ptlbE>

Lulusan perguruan tinggi memiliki tingkat keterserapan yang cukup baik di dunia kerja. Gambar 1.7 menunjukkan bahwa pada 2024, 83,03% lulusan perguruan tinggi dapat memperoleh pekerjaan dalam jangka waktu 1 tahun setelah lulus.

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	32,32	37,36	42,40	47,44	53,36
Realisasi	31,14	62,48	11,66	76,97	83,03
(%)	96,35	167,24	27,50	162,26	155,60

Gambar 1. 7 Persentase Lulusan PTK yang Bekerja dalam Jangka Waktu 1 Tahun Setelah Kelulusan

Sumber: Ditjen Pendidikan Islam Kemenag Tahun 2023

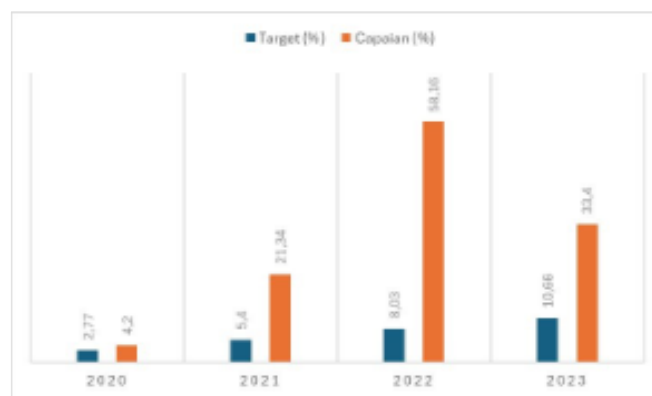
Berdasarkan tabel di atas yang bersumber dari Laporan Kinerja Kementerian Agama Tahun 2024, lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan menunjukkan tren positif. Pada tahun 2023, persentase lulusan yang berhasil bekerja dalam waktu 1 tahun setelah lulus tercatat sebesar 76,97%, sedangkan pada tahun 2024 meningkat menjadi 83,03%. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2024, yang mencatat persentase penduduk angkatan kerja berpendidikan tinggi sebesar 12,86%. Dalam beberapa tahun terakhir (2020–2024), Kemenag terus berupaya meningkatkan daya saing lulusan melalui berbagai langkah, antara lain: (1) Peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan industri/dunia usaha/dunia kerja dan asosiasi profesi untuk menghasilkan karya inovatif; (2) Pembentukan pusat penempatan kerja (*placement center*) untuk menjembatani lulusan dengan industri/dunia usaha/dunia kerja (formal dan informal); (3) Revitalisasi dan pengendalian LPTK agar jumlah lulusan dan kualitasnya relevan dengan kebutuhan industri/dunia usaha/dunia kerja.

Akan tetapi, tantangan PTK akan semakin berat, terutama dengan adanya perubahan cepat di pasar kerja akibat kemajuan teknologi, khususnya kecerdasan buatan (AI). Lulusan PTK perlu mengembangkan keterampilan yang lebih fleksibel dan inovatif, seperti keterampilan digital dan pemecahan masalah, agar dapat bersaing. Untuk itu, ke depan Kemenag dan PTK perlu terus meningkatkan kolaborasi antara lembaga pendidikan, industri, dan pemerintah untuk memastikan lulusan memiliki keterampilan praktis yang sesuai dengan kebutuhan pasar global.

- 6) Publikasi dan Sitasi Publikasi Ilmiah di Jurnal Internasional
- Publikasi di jurnal internasional bereputasi dan sitasi publikasi ilmiah juga menjadi indikator penting mutu perguruan tinggi. Kemampuan untuk melakukan hal-hal ini menunjukkan kapasitas yang tinggi untuk melakukan penelitian yang berkualitas. Tanpa penelitian yang berkualitas, pengajaran dan

kegiatan akademik di lingkungan perguruan tinggi akan stagnan. Oleh karena itu, publikasi dan sitasi publikasi ilmiah, khususnya di jurnal internasional bereputasi, perlu terus digalakkan.

Pada 2023, sekitar 2.196 artikel yang ditulis sivitas akademika PTK diterbitkan di jurnal internasional bereputasi. Angka ini lebih tinggi dari capaian 3 tahun sebelumnya (2020), yang hanya mencapai 14,3%. Dalam hal sitasi publikasi ilmiah, Gambar 1.8 menunjukkan bahwa pada 2023, dari 2.196 publikasi ilmiah yang terbit di jurnal internasional, sebanyak 1.293 atau 58,88% memperoleh sitasi. Angka ini lebih tinggi dari capaian dua tahun sebelumnya (2021), yang mencapai 21,34%. Akan tetapi, proporsi artikel yang mendapat sitasi ilmiah pada 2023 masih lebih rendah dari proporsi artikel yang mendapat sitasi ilmiah pada 2022 yaitu sebanyak 58,16%. Hal ini mungkin mengindikasikan perbedaan kualitas pada artikel-artikel tersebut.



Gambar 1. 8 Persentase Sitasi Publikasi Ilmiah di Jurnal Internasional

Sumber: Ditjen Pendidikan Islam Kemenag

Beberapa hal berkontribusi terhadap peningkatan publikasi ilmiah sivitas akademika PTK. Dalam beberapa tahun terakhir (2019-2024), Kemenag terus berupaya untuk meningkatkan publikasi dan sitasi jurnal ilmiah di jurnal internasional melalui, antara lain: (1) Peningkatan jumlah artikel ilmiah yang terpublikasi secara nasional dan internasional; dan (2) Peningkatan kualitas dan pemanfaatan produk penelitian (termasuk sitasi, hak cipta, hak paten, prototipe, produk perundangan, desain, dll.).

Namun demikian, **capaian tersebut belum merata dan masih didominasi oleh tujuh PTKIN besar**. Kemenag perlu mendorong dosen PTK lain untuk meningkatkan publikasi ilmiah dan sitasi publikasi ilmiah. Selain itu, Kemenag juga perlu meningkatkan kualitas jurnal PTKI. Hingga Januari 2024, tercatat 37 jurnal ilmiah di bawah PTKIN telah terindeks Scopus. Kemenag perlu mendorong PTKI mengembangkan kualitas jurnal ilmiah mereka melalui program akselerasi yang dapat mencakup *workshop* tata kelola jurnal, pelatihan pengelola, penghargaan bagi jurnal bereputasi, serta pendampingan bagi dosen dalam menulis artikel berkualitas internasional. Kolaborasi dengan lembaga luar negeri dan riset antar-PTKI juga perlu diperkuat.

3. Kondisi Umum Bidang Tata Kelola Pemerintahan

a) Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan setiap kebijakan dan kegiatan yang ditentukan. Sebagus apapun perencanaan suatu kebijakan atau kegiatan, pelaksanaannya tidak dapat berjalan dengan baik tanpa didukung oleh tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Untuk mengukur kualitas tata kelola, Kemenag menggunakan hasil penilaian laporan keuangan dan reformasi birokrasi. Tabel berikut menunjukkan hasil penilaian tersebut. Pada tahun 2023, Kemenag memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat ini diperoleh dan dapat dipertahankan Kemenag sejak beberapa tahun sebelumnya. Predikat ini sangat membanggakan mengingat Kementerian Agama adalah instansi vertikal dengan satuan kerja yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia dari tingkat Pusat, Provinsi, Kota/Kabupaten, hingga Kecamatan. Capaian ini dapat diraih berkat sinergitas dari seluruh satuan kerja untuk berkomitmen mengelola keuangan negara secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Demikian pula pada indikator nilai indeks reformasi birokrasi.

Dalam reformasi birokrasi, pada 2023 Kemenag memperoleh 79,16. Meski nilai ini sedikit lebih rendah dari target yang ditetapkan, nilai ini lebih tinggi dari nilai yang diraih Kemenag pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan nilai 79,16, Kemenag mendapat predikat ‘Sangat Baik’ dalam menjalankan reformasi birokrasi. Hal ini dapat dicapai melalui perbaikan terus menerus dalam hal penataan peraturan perundangan, penataan organisasi, penguatan tata kerja, penguatan pengelolaan SDM, penguatan *hybrid* sistem pengawasan internal, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tabel 1.20 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel Tahun 2020-2024

Indikator		2020	2021	2022	2023	2024
Opini Laporan Keuangan	Target	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Realisasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Persentase Pencapaian	100	100	100	100	100
Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Target	76	77	79	80	82
	Realisasi	75,32	75,84	75,84	79,16	85,83
	Persentase Pencapaian	98,74	97,82	96	98,95	104,67

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Agama Tahun 2020 - 2024

Disamping capaian yang baik tentang reformasi birokrasi, pada tahun 2022 Kemenag memperoleh penilaian Sangat Baik dari Ombudsman RI tentang kualitas pelayanan publik. Kemenag mendapat nilai 90.28 dan masuk dalam kategori A (Zona Hijau), dengan opini Kualitas Tertinggi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik.

Capaian-capaian tersebut diraih berkat berbagai upaya yang dilakukan Kemenag untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel. Dalam beberapa tahun terakhir (2020-2024), upaya tersebut mencakup, antara lain: (1) Peningkatan pola pikir ASN dalam penerapan *Core Values* (kompas moral) ASN BerAKHLAK; (2) Pengelolaan portal satu pintu dalam big data melalui integrasi sistem aplikasi data dan informasi; (3) Peningkatan tata laksana transformasi digital Kementerian Agama melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; (4) Penguatan implementasi Reformasi Birokrasi melalui inovasi berdampak; (5) Penguatan keterbukaan informasi publik; (6) Peningkatan kualitas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah; (7) Penerapan sistem merit; dan (8) Penguatan pengawasan internal untuk kepatuhan standar pelayanan publik.

Berbagai program yang telah dilaksanakan oleh Kemenag tersebut memberikan hasil positif terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel. Implementasi *Core Values* ASN BerAKHLAK, integrasi sistem aplikasi dan data, peningkatan tata laksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, implementasi reformasi birokrasi, dan berbagai langkah lainnya telah diakui berjalan cukup baik. Berbagai penghargaan yang diterima menunjukkan bahwa perbaikan ini diakui oleh para instansi pengampu elemen-elemen reformasi birokrasi secara nasional. Meski demikian, jalan Kemenag masih panjang untuk mewujudkan organisasi birokrasi yang modern, adaptif, dan mencapai standar tertinggi dalam tata kelola pemerintahan. Penguatan sistem pencegahan korupsi, penguatan implementasi sistem merit, penguatan implementasi reformasi birokrasi tematik dan berdampak, serta keterbukaan informasi masih harus terus dilanjutkan untuk mencapai standar tertinggi tata kelola pemerintahan di Kemenag.

b) Kualitas Kebijakan

Perumusan kebijakan perlu didukung dengan bukti empiris dan penalaran yang jelas berdasarkan bukti tersebut. Tanpa bukti dan penalaran berdasarkan bukti, kualitas kebijakan dapat dengan mudah dipertanyakan publik. Oleh karena, penelitian pengembangan menjadi salah satu hal yang sangat diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang baik. Kualitas penelitian pengembangan dapat dilihat dari jumlah penelitian yang dijadikan dasar kebijakan (*policy paper*).

Tabel 1.23 berikut menunjukkan proporsi hasil penelitian yang dijadikan dasar kebijakan di Kemenag. Pada tahun 2023, realisasi capaian sasaran ini sebesar 100.00 atau 114,94% dari target sebesar 87.00 dengan kategori sangat baik. Capaian tersebut tidak mengalami penurunan dibanding dengan capaian tahun 2022 meskipun ada kenaikan target pada tahun 2023.

Tabel 1. 21 Persentase Penelitian yang Dijadikan Dasar Kebijakan Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun					Nilai Indeks yang sudah dicapai tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024	
Target	80,00	82,00	85,00	87,00	90,00	10,00

Uraian	Tahun					Nilai Indeks yang sudah dicapai tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024	
Realisasi	100,00	100,00	100,00	100,00	162	(Telah melampaui target)
(%)	120,00	120,00	117,65	114,94	180,00	(Telah melampaui target)

Sumber: Laporan Subdit Penelitian Kementerian Agama Tahun 2024

Capaian ini dapat diraih berkat beberapa upaya yang dilakukan Kemenag untuk meningkatkan kualitas penelitian pengembangan yang dilakukan di lingkungan Kemenag. Upaya tersebut mencakup, antara lain: (1) Peningkatan kualitas perumusan kebijakan melalui penyusunan *policy paper*; (2) Peningkatan kompetensi analisis kebijakan; (3) Peningkatan audiensi dan advokasi hasil penelitian kebijakan kepada stakeholder pengambil keputusan; dan (4) Peningkatan hasil penelitian yang memperoleh Hak atas Kekayaan Intelektual.

Dari uraian di atas terlihat bahwa kualitas penelitian, pengembangan, dan kebijakan semakin mengalami kemajuan. Banyaknya hasil penelitian yang ditindaklanjuti menjadi naskah kebijakan menunjukkan bahwa Kementerian Agama semakin mengarah pada implementasi *evidence-based policy*. Peningkatan kompetensi analisis kebijakan, dan peningkatan advokasi hasil penelitian kebijakan, menunjukkan bahwa penelitian, pengembangan, dan pengembangan kebijakan sudah berada pada rel yang sesuai. Dengan transformasi Kemenag mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045, kualitas penelitian, pengembangan, dan penyusunan kebijakan juga harus semakin ditingkatkan.

B. Potensi dan Permasalahan

1. Kerukunan Umat Beragama dan Harmonisasi Sosial

Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama bertujuan memperbaiki kehidupan beragama dan kerukunan dan harmoni sosial. Kemenag mengukur perkembangan kehidupan beragama dan kerukunan dan harmoni sosial melalui IKsUB, IKUB dan data capaian lainnya. Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut, terdapat berbagai potensi yang mendukung pencapaian tujuan ini, seperti kompetensi penyuluh agama, jaringan bimbingan keagamaan, kerja sama lintas lembaga dan pengembangan sistem peringatan dini. Dukungan organisasi internasional seperti PBB dan UNESCO, dan kerja sama dengan lembaga-lembaga lain menjadi peluang besar yang dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan cara pandang dan praktik keagamaan jalan tengah.

Tabel 1. 22 Potensi dan Permasalahan Peningkatan Pemahaman dan Praktik Beragama Jalan Tengah

Kekuatan	Peluang
1. Kompetensi para penyuluh, penghulu, guru agama, dan tokoh agama yang cukup tinggi untuk memberikan pemahaman yang baik dan contoh	1. Perkembangan teknologi digital dan media sosial memberi peluang besar untuk penyebaran pesan-pesan keagamaan yang positif secara cepat dan luas.

pengamalan ajaran agama jalan tengah di masyarakat 2. Jaringan penyuluh agama di seluruh Indonesia yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam memberikan bimbingan kepada masyarakat 3. Kemampuan Kemenag untuk mendukung lembaga keagamaan dalam melaksanakan program-program yang relevan dengan pengamalan ajaran agama. 4. Posisi Kemenag sebagai <i>leading sector</i> dalam promosi moderasi beragama memungkinkan Kemenag melakukan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga maupun perangkat Pemerintah Daerah. 5. Pengembangan sistem peringatan dini oleh Kemenag untuk mendeteksi potensi konflik berbasis agama dan mengambil tindakan preventif sebelum situasi berkembang menjadi lebih serius.	2. Peluang kerjasama dengan instansi lain, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, ormas keagamaan, dan organisasi masyarakat sipil untuk memperluas jangkauan program peningkatan pemahaman dan praktik agama jalan tengah, 3. Dukungan organisasi internasional seperti PBB, UNESCO, dan berbagai LSM global terhadap program-program yang mempromosikan toleransi, moderasi beragama dan dialog antaragama. 4. Penerimaan pendekatan multikultural dalam dunia pendidikan memungkinkan integrasi pendidikan moderasi beragama ke dalam kurikulum sekolah secara lebih luas. 5. Kerja sama para pemuka agama dan budayawan dalam mempromosikan perdamaian dan kerukunan sosial.
Kelemahan	Tantangan
1. Regulasi dan program belum disusun berdasarkan kerangka kesalehan sosial. 2. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi program antar satuan kerja. 3. Keterbatasan kompetensi rohaniawan dan penyuluh agama dalam memahami konteks sosial-budaya dan isu-isu lingkungan, dan mendorong masyarakat meningkatkan pemahaman agama berorientasi pada kesalehan sosial dan keselarasan dengan alam 4. Keterbatasan program dan dukungan anggaran terhadap penyuluhan pada daerah terpencil	1. Penyebaran paham radikal dan ekstremisme atas nama agama berpotensi memecah belah masyarakat dan menimbulkan konflik. 2. Penyebaran interpretasi keliru atau menyimpang dari ajaran agama melalui ceramah, buku, dan media digital oleh kelompok atau individu yang memiliki agenda tertentu 3. Meningkatnya sekularisasi di sebagian kalangan, terutama di kota-kota besar, dapat menyebabkan gesekan dengan kelompok yang lebih konservatif dalam beragama. 4. Polarisasi politik berdasarkan pada identitas agama atau

5. Prosedur pengusulan program yang panjang menghambat inisiatif inovasi program dan penyuluhan.	etnis dapat mengancam kohesi sosial umat beragama.
6. Kurangnya pemanfaatan teknologi, terutama teknologi informasi dalam menyebarkan pesan-pesan keagamaan sehingga jangkauan audiens terbatas.	5. Komersialisasi penyiaran agama yang menjadikan agama sebagai alat untuk keuntungan materi
7. Sinergi kebijakan antara Kemenag dan lembaga lain dapat meningkatkan efektivitas dan harmonisasi program-program kerukunan antarumat beragama	6. Penggunaan media sosial dan platform digital untuk penyebaran kebencian, intoleransi, atau fitnah berbasis agama.
	7. Budaya pop dan konsumtivisme yang semakin menjauhkan umat beragama dari nilai-nilai kesalehan keagamaan
	8. Kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan sosial dapat memicu ketidakpuasan yang diekspresikan melalui konflik berbasis agama.

Mempertimbangkan potensi yang ada, kekurangan yang dimiliki, peluang yang tersedia dan ancaman yang mungkin timbul pada pemahaman dan praktik beragama jalan tengah yang perlu diangkat adalah mempercepat penerbitan peraturan perundangan tentang perlindungan umat beragama, peningkatan jaminan beribadah, pengarusutamaan penguatan moderasi beragama, peningkatan layanan cegah konflik sosial keagamaan, penyelesaian konflik antar dan intra umat beragama, dan peningkatan kesalehan spiritual dan kesalehan sosial.

2. Kualitas Layanan Keagamaan Transformatif

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama, Kemenag menaruh perhatian khusus pada tiga hal utama: Layanan Dana Sosial Keagamaan (Ziswaf, BAKKAT, Punia, Paramitha, Dana Kebajikan, Dana Amal Kasih), layanan penjaminan hak beragama, beribadah, beraktivitas, layanan KUA, layanan penjaminan dan literasi produk halal, dan layanan ibadah haji dan umrah. Selain itu, Kemenag juga menaruh perhatian besar terhadap perkembangan ekonomi keagamaan umat. Tabel berikut memaparkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Kemenag dalam meningkatkan kualitas layanan kehidupan beragama.

Tabel 1. 23 Potensi dan Permasalahan SWOT Peningkatan Layanan Keagamaan Transformatif

Kekuatan	Peluang
1. KUA memiliki jaringan yang luas sampai tingkat kecamatan dan prosedur pelayanan standar seiring dengan proses	1. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap KUA memungkinkan KUA

revitalisasi dan transformasi digital layanan KUA. 2. Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan pendaftaran serta akses materi persiapan ibadah haji. 3. Meningkatnya kuota haji dapat mengurangi masa tunggu, khususnya pada jemaah dengan nomor urut porsi yang lebih awal. 4. Proses bisnis pendaftaran sertifikasi halal yang semakin matang dan mapan memungkinkan pelayanan yang lebih terjamin. 5. Dukungan dari pemerintah pusat dan daerah terhadap pengembangan ekonomi keagamaan umat, termasuk melalui kebijakan fiskal, regulasi, dan insentif, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan ekonomi keagamaan. 6. Kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah memungkinkan pengembangan program-program ekonomi yang berbasis syariah, seperti investasi sosial dan kewirausahaan berbasis agama (peluang) 7. Meningkatnya jumlah SDM muda di Kemenag baik di pusat maupun daerah meningkatkan potensi kapasitas SDM dalam digitalisasi layanan keagamaan	memperluas sosialisasi dan jangkauan layanannya 2. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan transfer pengetahuan antar KUA dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pegawai KUA dan penerapan etos kerja yang lebih baik. 3. Kemenag sebagai penyelenggara resmi ibadah haji dapat menerapkan standarisasi kualitas dan prosedur layanan untuk meminimalkan kesenjangan kualitas layanan di daerah 4. Potensi kolaborasi dengan pemangku kepentingan, baik Kementerian, Pemerintah Daerah, Lembaga Non-Pemerintah, Universitas, dan lain sebagainya, untuk meningkatkan jangkauan sertifikasi halal 5. Industri halal memiliki potensi pertumbuhan yang sangat besar di tingkat global maupun nasional, dengan nilai ekonomi yang juga semakin meningkat dari waktu ke waktu. 6. Potensi dana wakaf meningkat dalam waktu 4 (empat) tahun terakhir dan diperkirakan akan terus meningkat lebih dari 2 (dua) kali lipat 7. Peningkatan kesadaran di kalangan organisasi keagamaan tentang pentingnya mobilisasi dan konsolidasi dana sosial keagamaan agar lebih berdampak terhadap kesejahteraan umat. .
Kelemahan	Tantangan
1. Anggaran terbatas dan kualitas sarana dan prasarana (spt. Fasilitas dan	1. Pemahaman masyarakat tentang fungsi dan transformasi layanan KUA,

jaringan internet) dan sumber daya manusia tidak merata di berbagai KUA 2. Kualitas sarana dan prasarana pelayanan haji, khususnya pada asrama haji embarkasi antara dan transit, belum sesuai standar sarana dan prasarana ibadah haji 3. Kualitas layanan ibadah haji di tanah suci, khususnya penyediaan akomodasi, konsumsi dan transportasi, dan manajemen kerumunan jamaah haji di Indonesia dan tanah suci masih perlu ditingkatkan. 4. Keberadaan layanan jaminan produk halal, organisasi pelaksana dan pendampingan proses sertifikasi produk halal belum merata di seluruh wilayah di Indonesia 5. Tumpang tindih kebijakan/program atau pelaksanaan kebijakan antar pemangku kepentingan di bidang pengelolaan ekonomi keagamaan umat 6. Penggunaan teknologi informasi dan inovasi dalam pengelolaan dana keagamaan umat masih terbatas 7. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana keagamaan umat belum menjadi prioritas, padahal hal ini menjadi concern bagi masyarakat .	dan sertifikasi jaminan produk halal masih perlu ditingkatkan. 2. Keragaman kondisi wilayah Indonesia dan kebijakan nasional yang berpengaruh terhadap model pelayanan ibadah haji 3. Adanya ketidakpercayaan di sebagian masyarakat terhadap pengelolaan kuota haji yang betul-betul transparan 4. Munculnya ketidakpercayaan di sebagian masyarakat terhadap pelaksanaan sertifikasi produk halal. 5. Adanya ketidakpercayaan sebagian kalangan terhadap lembaga pengelola zakat, wakaf, dan dana umat lainnya terkait transparansi dan akuntabilitas 6. Persaingan dengan sektor keuangan konvensional yang lebih mapan dan didukung oleh infrastruktur kuat dan handal membuat produk dan layanan ekonomi syariah sulit bersaing. 7. Keterbatasan infrastruktur di daerah-daerah terpencil membuat pelaksanaan program ekonomi keagamaan sulit dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Mempertimbangkan pembahasan diatas, hal-hal yang perlu dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan keagamaan antara lain, yaitu : Transformasi layanan keagamaan berbasis digital, Peningkatan sumber daya manusia yang andal dan profesional, Penguatan layanan KUA, Layanan haji, Layanan halal, dan Layanan penyuluh agama yang berdampak dan berorientasi pada kemaslahatan, Distribusi kitab suci dan buku keagamaan yang merata, sarana dan prasarana peribadatan yang sesuai standar serta penyaluran dana sosial keagamaan yang tepat sasaran untuk mendukung pengentasan kemiskinan.

3. Akses Pendidikan yang Merata

Pemerataan akses pendidikan berkualitas di lingkungan Kemenag dilakukan melalui peningkatan layanan pendidikan dengan kekhasan agama, pendidikan agama dan keagamaan, dan pesantren. Peningkatan akses pendidikan diukur melalui kenaikan tingkat APK dan APM. Tabel berikut memaparkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Kemenag dalam meningkatkan pemerataan akses pendidikan.

Tabel 1. 24 Potensi dan Permasalahan Pemerataan Akses Pendidikan

Kekuatan	Peluang
1. Kementerian Agama memiliki jaringan pendidikan dengan kekhasan agama yang luas, tersebar di penjuru negeri dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat 2. Madrasah memiliki kurikulum integratif yang menggabungkan pendidikan umum dan agama 3. Bantuan pendanaan pemerintah dalam bentuk BOS menjamin satuan pendidikan memperoleh anggaran untuk membiayai kegiatan operasional dan peningkatan mutu pendidikan. 4. Pesantren berperan menuntaskan Wajib Belajar 13 Tahun melalui PDF/ <i>Muadalah</i> dan pendidikan kesetaraan 5. Dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah, termasuk Inpres No. 7 Tahun 2025 yang memberi mandat revitalisasi madrasah	1. Pemerintah menggalakkan pendidikan anak usia dini dan mendorong peningkatan akses pendidikan 2. Citra pendidikan kekhasan agama semakin meningkat di mata masyarakat karena pendidikan kekhasan agama menggabungkan pengetahuan umum dan agama. 3. Pemerintah menjamin akses pendidikan dasar dan menengah (pendidikan dasar 13 Tahun) dengan menyediakan BOS dan KIP. 4. Diversifikasi akses pendidikan yang berkualitas melalui berbagai model kelembagaan dan pembelajaran 5. Revitalisasi sarana prasarana dapat dilaksanakan melalui dukungan anggaran APBN dan Non APBN
Kelemahan	Tantangan
1. Kualitas sarana dan prasarana tidak merata. Sebagian besar lembaga pendidikan umum dengan kekhasan agama dan lembaga pendidikan keagamaan adalah sebagian besar lembaga pendidikan	1. Persaingan yang cukup tinggi dengan lembaga pendidikan lain. 2. Banyak pesantren berada di daerah terpencil yang terbatas akses transportasinya.

swasta dengan kualitas sarana prasarannya yang belum memadai.	3. Jumlah PAUD masih terbatas.
2. Distribusi guru tidak merata antar lembaga pendidikan dan antar wilayah.	4. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana atau partisipasi masyarakat dalam pendanaan.
3. Dana BOS hanya mencukupi 30% dari total kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.	5. Risiko penyebaran paham keagamaan radikal di lembaga pendidikan agama dan keagamaan.
4. Akses digital lembaga pendidikan agama dan keagamaan tidak merata. Banyak lembaga memiliki akses digital yang rendah.	6. Penyaluran PIP sebagian besar dilakukan oleh pemerintah pusat sehingga proses distribusinya membutuhkan waktu yang lama.
5. Banyak madrasah/satuan pendidikan keagamaan dengan kondisi gedung rusak ringan hingga berat, belum memenuhi standar keamanan dan kenyamanan	7. Keterlambatan revitalisasi berpotensi menurunkan mutu pembelajaran dan daya saing lulusan madrasah dan satuan pendidikan keagamaan
6. Terbatasnya integrasi pesantren dengan dunia usaha dan industri.	

Mempertimbangkan potensi yang ada, kekurangan yang dimiliki, peluang yang tersedia, dan ancaman yang akan timbul, isu strategis yang diangkat adalah peningkatan sarana dan prasarana pada madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif, Peningkatan partisipasi siswa/santri/mahasiswa/mahasantri termasuk pada satuan pendidikan keagamaan di daerah 3T, Peningkatan Anak Kelas 1 MI/Ula/SD/Adi Widyalya/Nava yang pernah mengikuti PAUD (TK/RA/BA), Peningkatan satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah, Peningkatan satuan pendidikan nonformal yang direvitalisasi, Peningkatan siswa yang menyelesaikan pendidikan tepat waktu, dan Peningkatan anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan, Peningkatan penyediaan bantuan pendidikan, Peningkatan mahasiswa baru yang berkuliah di perguruan tinggi berkualitas dan di Prodi STEM terakreditasi unggul.

4. Mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah

Satuan pendidikan di bawah Kemenag memiliki kekuatan dalam dukungan Kemenag untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui berbagai kebijakan atau program. Jumlah guru di lingkungan Kemenag juga mencukupi. Peluang peningkatan hasil belajar siswa muncul dari penerapan teknologi dan semakin besarnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kualitas pendidikan agama dan keagamaan. Lebih lanjut Tabel berikut memaparkan kekuatan, kelemahan, potensi dan tantangan

yang dihadapi Kemenag dalam meningkatkan pembelajaran dan pengajaran.

Tabel 1. 25 Potensi dan Permasalahan Peningkatan Hasil Belajar Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah

Kekuatan	Peluang
1. Jumlah guru secara umum cukup memadai dengan rasio guru-siswa lebih rendah dari jumlah yang ditetapkan pemerintah pusat. 2. Dukungan kebijakan Kemenag terhadap peningkatan mutu pendidikan melalui berbagai program/kebijakan seperti sertifikasi guru, pelatihan guru dan revitalisasi madrasah. 3. Penerapan kurikulum yang mendorong pemahaman Islam moderat dan moderasi beragama.	1. Keberadaan PPG untuk meningkatkan kompetensi (literasi dan numerasi) guru. 2. Perkembangan teknologi informasi (internet) memungkinkan Kemenag melakukan pelatihan ke seluruh daerah. 3. Semakin berkembangnya kesadaran dan sikap kritis masyarakat terhadap mutu pendidikan madrasah dan lembaga pendidikan agama.
Kelemahan	Tantangan
1. Banyak lembaga pendidikan agama dan keagamaan yang memiliki status akreditasi rendah atau belum terakreditasi. 2. Kesenjangan kompetensi antar guru. Sebagian guru belum bersertifikat pendidik, kurang mendapat pelatihan, atau memiliki latar belakang pendidikan terbatas. 3. Sistem penilaian mutu pengajaran madrasah belum terstandarisasi dengan baik secara nasional. 4. Ketergantungan banyak lembaga pendidikan agama dan keagamaan terhadap dana masyarakat. 5. Terbatasnya penggunaan teknologi informasi dan komputer dalam pengajaran.	1. Terbatasnya kapasitas BAN dan jumlah asesor untuk melakukan akreditasi. 2. Pengaturan pendidikan agama dalam PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan masih terbatas. 3. Cukup tingginya beban administratif guru. 4. Distribusi guru tidak merata di semua wilayah. 5. Resistensi terhadap perubahan atau inovasi dalam kurikulum karena dianggap menyimpang dari tradisi. 6. Perubahan sosial budaya yang cepat seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan.

6. Muatan pendidikan agama terfokus pada pembelajaran agama namun kurang memperhatikan pendidikan karakter.	7. Kesenjangan akses internet di berbagai wilayah.

Untuk menerjemahkan dari potensi di atas tentang Mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah. Adapun strategi untuk menanggulangi isu strategis di atas antara lain, yaitu: Peningkatan kualitas pembelajaran yang berorientasi pada kemampuan berpikir siswa, Pemanfaatan hasil asesmen kompetensi tingkat nasional sebagai landasan evaluasi dan penyempurnaan kualitas pendidikan, Peningkatan peserta didik dalam memahami dan praktik beragama yang moderat, Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pendidikan berbasis partisipasi komunitas masyarakat, Integrasi keilmuan agama dan umum dalam penerapan pembelajaran, Peningkatan siswa yang memiliki nilai karakter baik, Peningkatan siswa yang memiliki prestasi akademik dan ekstrakurikuler, Peningkatan kualitas pendidikan agama dan penyelenggaraan project penguatan profil pelajar pancasila.

5. Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Satuan pendidikan Kemenag memiliki kekuatan dalam pengelolaan pendidik ASN secara terpusat, tingginya dedikasi guru, serta kewenangan satuan pendidikan masyarakat dalam mengelola tenaga pendidik. Jumlah pendidik juga cukup memadai dengan cukup rendahnya angka rasio guru-siswa. Keunggulan juga terlihat dari kehadiran LPTK dan jejaring kerja sama dengan berbagai lembaga nasional dan internasional.

Tabel 1. 26 Potensi dan Permasalahan Pengelolaan dan Penempatan Guru

Kekuatan	Peluang
1. Berbagai dukungan Kemenag untuk meningkatkan kompetensi guru, seperti pelatihan guru dan beasiswa untuk guru. 2. Keberadaan program peningkatan kapasitas guru di PTK, seperti PPG dan sertifikasi guru 3. Adanya asosiasi profesi yang menunjang peningkatan profesionalisme guru. 4. Komitmen tinggi para guru di lembaga pendidikan agama dan keagamaan untuk melakukan pengabdian melalui pengajaran.	1. Peningkatan kompetensi guru melalui program sertifikasi guru. 2. Potensi kerja sama dengan berbagai lembaga nasional dan internasional untuk meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. 3. Dana BOS dapat digunakan untuk pengembangan program keprofesian berkelanjutan bagi guru dan tenaga kependidikan. 4. Penggunaan teknologi informasi untuk mendukung penyediaan pelatihan berkelanjutan untuk guru dan tenaga kependidikan

Kelemahan	Tantangan
1. Terbatasnya kesempatan untuk mendapatkan pelatihan berkelanjutan.	1. Program sertifikasi masih belum efektif meningkatkan kompetensi guru.
2. Rendahnya insentif dan kesejahteraan guru, terlebih untuk guru non-ASN (honorar). Banyak dari mereka yang mendapatkan gaji yang tidak layak.	2. Cepatnya perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan menuntut guru untuk mampu mengikuti perkembangan zaman dan menyesuaikan metode pembelajaran.
3. Belum meratanya kompetensi guru antar madrasah dan wilayah.	3. Persaingan dengan lembaga pendidikan lain untuk mendapatkan guru dan tenaga kependidikan terbaik.
4. Kurangnya jumlah guru yang berkualitas dan terampil dalam menggunakan metode pengajaran yang inovatif.	4. Terbatasnya jumlah LPTK yang memenuhi syarat menyelenggarakan PPG .
5. Terbatasnya kemampuan guru dalam bidang teknologi dan informasi.	5. Kualitas dan distribusi guru masih terbatas. Kurang dari 50% memiliki sertifikat pendidik pada semua jenjang pendidikan.
6. Terbatasnya kemampuan anggaran Kemenag untuk menyediakan pelatihan berkelanjutan untuk guru dan tenaga kependidikan.	6. Kesenjangan motivasi intrinsik di sebagian guru dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan kompetensi dan prestasi.

Berdasarkan kondisi, tantangan, peluang yang dimiliki dan ancaman yang berpotensi menjadi isu strategis ke depan untuk meningkatkan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah peningkatan guru dan tenaga kependidikan yang profesional pada madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan, Peningkatan nilai indeks pemerataan guru dengan kategori baik, Peningkatan guru yang memiliki sertifikat pendidik, Pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama dengan murid seagama, Peningkatan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal, Peningkatan kualitas guru yang memperoleh penguatan kompetensi melalui Asesmen Kompetensi Guru (AKG), Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Peningkatan guru yang memperoleh penguatan moderasi beragama, Peningkatan guru yang memperoleh layanan peningkatan jenjang karir, Peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG), serta Peningkatan pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan.

6. Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan

Potensi utama Kemenag untuk meningkatkan penyelenggaraan PTK yang berkualitas terletak perkembangan kualitas PTK sehingga beberapa PTK dapat memperoleh pengakuan global. Komitmen para pengajar dan tenaga kependidikan, peningkatan publikasi ilmiah, dan penggunaan teknologi informasi di lingkungan PTK turut menjadi kekuatan PTK. Selain itu, PTK memiliki peluang kerja sama dengan berbagai lembaga dan dunia industri. Namun demikian, beberapa tantangan dapat menjadi penghambat bagi PTK untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan daya saing lulusan. Tantangan ini kualitas dosen yang masih perlu ditingkatkan, perkembangan teknologi, termasuk AI, yang sangat cepat dan sangat berpengaruh terhadap pendidikan tinggi dan pasar kerja di dunia industri, kesenjangan akses teknologi informasi yang tidak merata, semakin tingginya biaya pendidikan tinggi, dan terbatasnya kemampuan BAN dan LAM untuk melakukan akreditasi.

Tabel berikut lebih lanjut memaparkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Kemenag dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi.

Tabel 1. 27 Potensi dan Permasalahan Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan

Kekuatan	Peluang
1. Dukungan regulasi dari Kementerian Agama (misalnya: moratorium akreditasi, revitalisasi kurikulum) 2. Program beasiswa dan bantuan finansial untuk mahasiswa. 3. Ketersediaan SDM yang berkualitas di beberapa PTK (Perguruan Tinggi Keagamaan) 4. Jejaring nasional dan internasional dengan lembaga pendidikan dan keagamaan.	1. Perkembangan teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran daring dan <i>hybrid</i>. 2. Dukungan hibah penelitian dan kerjasama internasional dari pemerintah dan donor luar. 3. Tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan keagamaan yang bermutu tinggi. 4. Potensi integrasi keilmuan antara keagamaan dan sains.
Kelemahan	Tantangan
1. Kualitas SDM dosen belum merata (banyak yang belum S3 atau belum bersertifikasi). 2. Keterbatasan sarana dan prasarana, terutama di PTK swasta. 3. Kurikulum yang belum sepenuhnya adaptif terhadap kebutuhan	1. Persaingan dengan perguruan tinggi umum yang memiliki daya saing lebih tinggi dalam infrastruktur dan SDM. 2. Radikalisme atau ekstremisme yang dapat menyusup dalam narasi keagamaan. 3. Ketimpangan dana antara PTK negeri dan swasta.

zaman (misalnya: digitalisasi, kewirausahaan, interdisipliner).	4. Isu intoleransi yang dapat mencoreng citra PTK.
4. Rendahnya publikasi ilmiah dan penelitian bereputasi.	

Merujuk pada hasil analisis potensi, peluang, kelemahan, dan tantangan pada Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan, strategi yang akan dilakukan meliputi, Peningkatan mutu pendidikan pada perguruan tinggi keagamaan dan Prodi melalui penilaian akreditasi, Peningkatan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), Peningkatan dosen yang berkualifikasi di atas Strata 2, Peningkatan dosen yang mempunyai pengalaman di luar kampus dan menjadi Narasumber Konferensi nasional maupun internasional, Peningkatan lulusan perguruan tinggi (berkualifikasi S1) dengan pengalaman 1 (satu) semester di luar kampus, Peningkatan lulusan PTK yang berhasil memiliki pekerjaan: a. Karyawan b. Wirausaha, Peningkatan lulusan yang mendapat sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi bereputasi, Peningkatan mahasiswa yang berkegiatan di luar program studi, Peningkatan karya tulis ilmiah yang bereputasi nasional dan internasional serta berorientasi SDGs dan yang dimanfaatkan DUDI/Masyarakat, serta Peningkatan perguruan tinggi keagamaan yang masuk ke dalam peringkat THE Impact SDGs.

7. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel

Keberhasilan awal dalam melakukan reformasi birokrasi, opini WTP atas LKKA, penerapan teknologi 4.0, dan perkembangan zona integritas dan audit berbasis risiko menjadi beberapa kekuatan Kemenag untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Kemenag. Peluang untuk terus meningkatkan tata kelola terbuka melalui optimalisasi PNBP, integrasi data digital, penguatan manajemen kinerja, dan regenerasi ASN BerAKHLAK. Tabel berikut lebih lanjut memaparkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Kemenag dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan di lingkungan Kemenag.

Tabel 1. 28 Potensi dan Permasalahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel

Kekuatan	Peluang
1. Dalam pengelolaan keuangan negara, Kemenag mendapat opini WTP terhadap LKKA dari tahun 2016-2018.	1. Potensi PNBP yang sangat besar, termasuk pengelolaan asrama haji, pendidikan, dan jaminan produk halal.
2. Teknologi dan informasi 4.0 sudah mulai digunakan pada setiap satuan kerja di Pusat maupun di Daerah.	2. Perkembangan TIK dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan cakupan dan kemutakhiran data yang dikumpulkan, serta

3. Penerapan zona integritas dan budaya kinerja yang semakin baik di setiap satuan kerja. 4. Audit berbasis risiko dilaksanakan sesuai dengan <i>best practices</i> yaitu pengawasan diarahkan dengan penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien, dan didukung dengan program advokasi.	mengintegrasikan data yang ada. 3. Manajemen kinerja dan <i>merit system</i> yang selaras antara Pusat dan Daerah. 4. Pelaksanaan pengawasan dalam bentuk audit kinerja berbasis tugas fungsi, audit kinerja program, audit tematik dan lainnya mampu menghasilkan perbaikan tata kelola yang efektif dan akuntabel.
Kelemahan	Tantangan
1. Sistem komunikasi dan koordinasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang tepat belum diformulasikan. 2. Pengelolaan aset BMN belum tertib dalam menginventarisir barang. 3. Koordinasi, sinkronisasi, dan kemutakhiran data masih lemah. 4. Belum memiliki strategi komprehensif dalam penerapan nilai-nilai budaya kinerja, dan 5. Pemahaman ASN Kemenag tentang manajemen risiko dan pengendalian intern masih perlu ditingkatkan.	1. Tekanan efisiensi fiskal dan jumlah satuan kerja yang sangat banyak dan tersebar di berbagai wilayah memerlukan keterlibatan sistematis dari pimpinan. 2. Budaya kerja yang beragam di daerah menyulitkan proses perbaikan yang menyeluruh. 3. Sebagian aset hak milik masih diakui oleh pihak lain, dan proses alih status kepemilikan berjalan lambat. 4. Banyaknya jumlah aplikasi yang dipakai berbagai satuan kerja menyebabkan duplikasi data dan susah diintegrasikan 5. Kesenjangan akses teknologi informasi (internet) antar daerah

Mempertimbangkan potensi yang ada, kekurangan yang dimiliki, peluang yang tersedia, dan ancaman yang akan timbul, isu strategis yang diangkat adalah Peningkatan perolehan nilai reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas instansi pemerintah, peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan realisasi anggaran berbasis *output*, Penyelesaian kerugian negara berbasis laporan tindak lanjut hasil pengawasan, Peningkatan data statistik yang dimanfaatkan untuk merumuskan kebijakan, Peningkatan pengawasan tata kelola kelembagaan, Peningkatan laporan kinerja dan keuangan yang akuntabel, Peningkatan perolehan nilai pengendalian korupsi.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA

A. Visi Kementerian Agama

Kementerian Agama merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengelola urusan keagamaan dan pendidikan, dalam menjalankan tugasnya kementerian agama memiliki visi dan misi yang jelas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dengan mempertimbangkan kinerja selama lima tahun terakhir potensi yang dimiliki, dan berbagai tantangan yang dihadapi ke depan, serta mengacu Visi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029, “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, Kemenag merumuskan Visi untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

"Terwujudnya Masyarakat yang Rukun, Maslahat, dan Cerdas Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"

Terdapat tiga kata kunci dalam Visi Kemenag, yaitu **Rukun, Maslahat, dan Cerdas**. Kandungan makna dalam masing-masing kata tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, **rukun** merupakan dasar kehidupan bermasyarakat yang harmonis di tengah keberagaman Indonesia. Rukun atau kerukunan berarti hubungan yang harmonis antara berbagai kelompok masyarakat, termasuk antarumat beragama, antar suku, dan antara masyarakat dan pemerintah. Kerukunan tidak hanya berarti tidak adanya konflik, tetapi juga adanya kolaborasi aktif untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai negara dengan berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa, rukun menjadi kunci utama untuk menjaga persatuan. Rukun sendiri memiliki tiga dimensi, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Toleransi berarti sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan dalam keyakinan, praktik keagamaan, dan kebebasan beribadah tanpa memaksakan pandangan pribadi kepada orang lain. Kerukunan juga mengisyaratkan cara pandang keagamaan dan kebangsaan terhadap kesetaraan sebagai anak bangsa yang memiliki hak yang sama dalam menjalankan keyakinan dan beribadah tanpa diskriminasi. Makna kesetaraan dalam kerukunan beragama merujuk pada pengakuan dan perlakuan yang adil terhadap setiap pemeluk agama tanpa membedakan latar belakang keyakinan. Kesetaraan ini menempatkan setiap individu dalam posisi yang sama di hadapan hukum, negara, dan masyarakat, sehingga tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah berdasarkan agamanya. Dalam konteks kerukunan, kesetaraan mendorong terciptanya ruang dialog yang sehat, saling menghargai perbedaan, serta kerja sama yang harmonis antarumat beragama demi menciptakan kehidupan sosial yang damai, toleran, dan inklusif. Kerukunan juga mengandung kerjasama sebagai kesediaan untuk melakukan aktivitas bersama dalam lingkup sosial atau ekonomi, dalam ikatan komunitas, pemukiman ataupun lingkaran profesi, kesukaan terhadap hal tertentu. Keberagaman yang mengedepankan kerukunan adalah kunci dalam membangun kebersamaan sebagai bangsa Indonesia dan berkontribusi terhadap pembangunan.

Kedua, **maslahat**. Maslahat dalam konteks beragama adalah keberagaman yang relevan dengan kebutuhan zaman, tidak hanya bersifat

ritualistik tetapi juga menyentuh aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya serta memberi manfaat bagi kebaikan sosial lingkungan alam semesta. Beragama yang maslahat adalah praktek keagamaan yang mengedepankan manfaat bagi pihak lain, orang lain dan lingkungan. Ajaran agama diharapkan mampu menjadi panduan untuk menciptakan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Beragama maslahat mencerminkan keberagamaan yang memberikan manfaat dan membawa kebaikan, baik secara individu maupun kolektif, sehingga terbangun kesejahteraan bersama.

Ketiga, **cerdas** adalah istilah yang merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, menganalisis, dan menerapkan informasi atau pengetahuan secara efektif dalam berbagai situasi. Visi cerdas adalah capaian kondisi masyarakat yang memiliki keandalan dari aspek mental, emosional, sosial, dan praktis yang memungkinkan individu-individu mampu beradaptasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang bijaksana. Pencapaian visi cerdas dilakukan Kemenag melalui program pendidikan yang dikembangkan melalui sejumlah institusi pendidikan di seluruh Indonesia.

Visi tersebut merupakan wujud dari komitmen bersama untuk membangun masyarakat Indonesia yang harmonis, sejahtera, dan berdaya saing tinggi, sejalan dengan cita-cita besar bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini mengandung semangat transformasi dan kolaborasi yang mendalam, dan mencerminkan arah pembangunan bangsa dalam jangka panjang. Visi ini juga menggambarkan arahan strategis yang menuntun seluruh elemen bangsa untuk berkontribusi dalam membangun Indonesia yang harmonis, sejahtera, dan berdaya saing. Melalui kolaborasi, inovasi, dan kerja keras, visi ini menjadi panduan untuk mewujudkan cita-cita besar bangsa di tahun 2045, dengan tetap menjaga nilai-nilai luhur kebangsaan dan keberlanjutan pembangunan untuk generasi mendatang.

B. Misi Kementerian Agama

Sebagai kementerian yang memiliki tanggung jawab di bidang agama dan pendidikan, Kemenag wajib memastikan bahwa misinya tidak hanya mencerminkan prioritas internal, tetapi juga mendukung pencapaian Misi Presiden dan Wakil Presiden. Sinergi ini menjadi esensial untuk menjawab tantangan pembangunan sekaligus mengoptimalkan potensi bangsa. Dalam Rencana Strategis Kemenag, Asta Cita atau delapan Misi Presiden dan Wakil Presiden diadopsi sebagai acuan strategis guna menjamin keselarasan arah kebijakan nasional dan sektoral. Asta Cita atau 8 Misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
3. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
4. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
5. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;

6. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, inklusivitas, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
7. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat adil makmur

Berdasarkan RPJMN 2025-2029, Kemenag merumuskan misi untuk mendukung pencapaian delapan Asta Cita. Misi Kemenag 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang rukun dan berorientasi pada kemaslahatan;
2. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum dengan kekhasan agama, pendidikan keagamaan dan pendidikan pesantren; dan
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Misi pertama bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, memperkuat harmoni dalam kehidupan beragama, yang sejalan dengan kata kunci rukun dan maslahat dalam visi Kemenag. Kehidupan beragama yang rukun adalah pondasi bagi terciptanya masyarakat yang harmonis, sementara orientasi pada kemaslahatan memastikan agama menjadi kekuatan positif yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui misi ini, masyarakat Indonesia diharapkan tidak hanya hidup rukun, tetapi juga memanfaatkan nilai-nilai agama untuk membangun kesejahteraan bersama. Dengan harmoni yang terjaga, masyarakat akan lebih siap menghadapi tantangan global dan berkontribusi pada cita-cita besar Indonesia Emas 2045.

Selanjutnya, *misi kedua* bertujuan untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan mendukung kata kunci masyarakat cerdas dalam visi Kemenag. Cerdas diwujudkan melalui pendidikan yang berkualitas sebagai elemen penting dalam mencetak generasi yang tidak hanya memahami nilai-nilai agama tetapi juga memiliki kemampuan intelektual dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Pendidikan yang berkualitas menjadikan masyarakat Indonesia memiliki kemampuan intelektual dan memiliki kesadaran moral yang tinggi. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan nilai-nilai agama menjadi kunci dalam membentuk generasi yang unggul secara akademik sekaligus berakarakter mulia. Generasi terdidik dan berdaya mendorong terciptanya ekosistem inovatif, harmoni dan bermaslahat, serta berkontribusi pada kemajuan bangsa.

Terakhir, *misi ketiga* mencerminkan pentingnya tata kelola yang baik untuk mendukung pencapaian visi Kemenag. Tata kelola yang baik adalah prasyarat untuk memastikan keberhasilan implementasi program di bidang agama dan pendidikan—program yang mendukung toleransi, kemaslahatan, dan kerukunan. Untuk itu, seluruh pelaksanaan program harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan profesional, sehingga setiap prosesnya dapat dipertanggungjawabkan dan menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas. Dengan tata kelola yang demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat, sehingga memudahkan terciptanya kolaborasi dalam mewujudkan masyarakat yang rukun, maslahat, dan cerdas. Hal ini juga akan mempercepat langkah menuju Indonesia yang maju dan berdaya saing pada tahun 2045.

C. Tujuan Kementerian Agama

Untuk mewujudkan tiga misi utama tersebut, Kemenag menetapkan lima tujuan strategis dengan memperhatikan tantangan di bidang agama dan pendidikan. Berikut adalah tujuan tersebut:

1. Perwujudan kerukunan umat beragama dan cinta kemanusiaan melalui peningkatan kualitas pemahaman agama yang moderat untuk kemaslahatan bangsa dengan indikator tujuan, yaitu Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Kesalehan Umat Beragama;
2. Peningkatan kualitas umat beragama yang berdampak melalui pelayanan keagamaan, penyelenggaraan ibadah haji, dan pemberdayaan ekonomi yang merata, adil, dan inklusif berbasis ekoteologi dengan indikator tujuan yaitu, Indeks Layanan Keagamaan
3. Peningkatan akses pendidikan yang terintegrasi, berkeadilan, ramah, dan terjangkau dengan indikator tujuan Tingkat Penyelesaian Pendidikan MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widyalyaya/Uttama Dhammasekha dan Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi;
4. Peningkatan mutu dan lulusan lembaga pendidikan dan pesantren yang mandiri, unggul dan berdaya saing dengan indikator tujuan yaitu, Persentase peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan pendidikan keagamaan yang memenuhi standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: (a) Literasi (b) Numerasi, Persentase guru dan tenaga kependidikan yang profesional pada madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan, Persentase lulusan pendidikan tinggi Keagamaan/Ma'had Aly yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun dan Jumlah perguruan tinggi keagamaan yang masuk ke dalam peringkat THE Impact SDGs;
5. Peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan melalui budaya yang bersih dan melayani berbasis digital dengan indikator tujuan Nilai Reformasi Birokrasi.

Dengan lima tujuan strategis ini, Kemenag berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan nasional dalam mewujudkan visi Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2045.

D. Sasaran Strategis Kementerian Agama

Untuk mencapai 5 tujuan strategis yang telah ditetapkan, Kemenag merumuskan tujuh (7) Sasaran Strategis (SS), yang mencerminkan kondisi ideal yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2029. Setiap sasaran strategis ini dilengkapi dengan indikator kinerja yang spesifik, terukur, dan dapat dijadikan acuan dalam menilai ketercapaian target yang diharapkan.

1. Tujuan 1: Perwujudan kerukunan umat beragama dan cinta kemanusiaan melalui peningkatan kualitas pemahaman agama yang moderat untuk kemaslahatan bangsa,, dapat tercapai dengan sasaran berikut:

Tabel 2. 1 Tujuan 1

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan
SS 1	Meningkatnya masyarakat yang memiliki cara pandang dan praktik beragama jalan tengah untuk mewujudkan kerukunan dan harmoni sosial	Indeks Kerukunan Umat Beragama
		Indeks Kesalehan Umat Beragama

2. Tujuan 2: Peningkatan kualitas umat beragama yang berdampak melalui pelayanan keagamaan, penyelenggaraan ibadah haji, dan pemberdayaan ekonomi yang merata, adil dan inklusif berbasis eko-teologi, dapat tercapai dengan sasaran berikut:

Tabel 2. 2 Tujuan 2

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan
SS 2	Meningkatnya layanan keagamaan transformatif	Indeks Layanan Keagamaan

3. Tujuan 3: Peningkatan akses pendidikan yang terintegrasi, berkeadilan, ramah dan terjangkau, dapat tercapai dengan sasaran berikut:

Tabel 2. 3 Tujuan 3

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan
SS 3	Meningkatnya pemerataan akses pendidikan	Tingkat Penyelesaian Pendidikan MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widyalyaya/Uttama Dhammasekha
		Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi
SS 4	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah	Persentase peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan pendidikan keagamaan yang memenuhi standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional : a. Literasi b. Numerasi
SS 5	Meningkatnya Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang profesional pada madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan

4. Tujuan 4: Peningkatan mutu dan lulusan lembaga pendidikan dan pesantren yang mandiri, **unggul** dan berdaya saing, dapat tercapai dengan sasaran berikut:

Tabel 2. 4 Tujuan 4

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan
SS 6	Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan yang berkualitas	Persentase lulusan pendidikan tinggi Keagamaan/Ma'had Aly yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun
		Jumlah perguruan tinggi keagamaan yang masuk ke dalam peringkat THE Impact SDGs:

5. Tujuan 5: Peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan melalui budaya yang bersih dan melayani berbasis digital dapat tercapai dengan sasaran sebagai berikut :

Tabel 2. 5 Tujuan 5

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan
SS 7	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi

E. Identifikasi Risiko Pencapaian Sasaran Strategis

Adapun Indikasi risiko dari seluruh sasaran strategis pada Kemenag adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 6 Identifikasi Risiko Pencapaian Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
1.	Meningkatnya masyarakat yang memiliki cara pandang dan praktik beragama jalan tengah untuk mewujudkan kerukunan dan harmoni sosial a. Indeks Kerukunan Umat Beragama b. Indeks Kesalehan Umat Beragama	1. Kebebasan beragama belum disertai dengan kemampuan literasi keagamaan yang inklusif ,moderat , dan berorientasi kemaslahatan 2. Penyelesaian konflik antar dan intra umat beragama belum optimal 3. Pembinaan tokoh agama dan forum kerukunan umat beragama belum merata	1.1. Penyusunan peraturan tentang perlindungan umat beragama 1.2. Memperluas program literasi moderasi beragama 1.3. Pembentukan dan pembinaan desa kerukunan 2.1. Penyusunan instrumen pengendalian data dan penyelesaian kasus konflik antar dan intra umat beragama melalui aplikasi EWS 2.2. Meningkatkan monitoring media sosial untuk mendeteksi dini ujaran kebencian dan isu SARA	Sekretariat Jenderal, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha dan BMBPSDM

No	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
			2.3. Peningkatan dialog kerukunan agama difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS 2.4. Peningkatan kegiatan penguatan moderasi beragama dengan melibatkan lintas sektoral antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat 3.1. Memperkuat peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam mediasi dan dialog 3.2. Menyelenggarakan kegiatan lintas iman (dialog, kerja sosial bersama) 3.3. Meningkatkan monitoring media sosial untuk mendeteksi dini ujaran kebencian dan isu SARA 3.4. Memberikan pelatihan manajemen konflik bagi tokoh agama, penyuluh, dan penggerak masyarakat 3.5. Mendorong kolaborasi antar organisasi keagamaan di tingkat lokal dan nasional 3.6. Pelatihan agen kerukunan umat beragama	
		1. Nilai agama belum optimal diejawantahkan menjadi kerja-kerja pembangunan yang membawa kebaikan bersama 2. Literasi umat beragama terhadap kitab suci rendah 3. Partisipasi umat beragama dalam mengikuti perayaan keagamaan dan event keagamaan rendah 4. Kualitas tata kelola lembaga agama dan lembaga keagamaan belum akuntabel	1.1. Integrasi nilai-nilai kesalehan dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal 2.1. Peningkatan bimbingan keagamaan yang berkelanjutan, seperti kegiatan keagamaan dan konsultasi agama 2.2. Peningkatan penerbitan naskah/buku keagamaan pendukung peribadatan yang layak edar 2.3. Membangun konten positif keagamaan yang inklusif, mudah diakses, dan menarik bagi lintas generasi	Sekretariat Jenderal, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha dan BMBPSDM

No	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
			3.1. Peningkatan penyelenggaraan <i>event</i> keagamaan dan budaya 3.2. Peningkatan penyiaran agama melalui ruang publik dan media elektronik 3.3. Peningkatan penyelenggaraan perayaan keagamaan dan hari besar keagamaan 4.1. Pemberdayaan lembaga agama dan lembaga keagamaan untuk layanan keagamaan dan pendidikan 4.2. Penguatan tata kelola lembaga agama dan lembaga keagamaan yang akuntabel dan profesional	
2	Meningkatnya Layanan Keagamaan Transformatif dengan indikator Indeks Layanan Keagamaan	1. Kurangnya kompetensi dan keterampilan petugas KUA 2. Keterbatasan sarana dan prasarana layanan 3. Sistem, mekanisme dan prosedur layanan KUA yang panjang dan tidak efisien 4. Minimnya inovasi layanan berbasis teknologi 5. Tingginya biaya layanan nikah diakibatkan pencatatan pernikahan dilakukan di luar KUA 6. Rendahnya angka peristiwa nikah yang tercatat di KUA	1.1. Peningkatan lulusan pelatihan dan Pendidikan administrasi bagi penyuluh agama dan penghulu/fasilitator 1.2. Peningkatan SDM <i>front office</i> KUA yang profesional 2.1. Revitalisasi sarana dan prasarana KUA 2.2. Pembentukan dan pembinaan KUA berdaya 3.1. Peningkatan layanan KUA sesuai standar 4.1. Pendataan peristiwa nikah berbasis digital yang mudah diakses 5.1. Penyempurnaan tarif biaya pencatatan nikah di luar kantor 5.2. Sosialisasi tentang pencatatan nikah di KUA 6.1. Peningkatan inovasi layanan pernikahan seperti penyelenggaraan nikah massal bekerjasama dengan pemerintah daerah dan organisasi masyarakat	Ditjen Bimas Islam dan BMBPSDM
		1. Keterbatasan kuota haji 2. Kurangnya kompetensi petugas	1.1. Peningkatan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) dan MoU Kerjasama layanan haji dan umrah	Ditjen PHU dan BMBPSDM

No	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
		3. Fasilitas layanan yang tidak memadai 4. Proses administrasi yang lambat dan kurang transparan 5. Minimnya inovasi berbasis teknologi 6. Lemahnya pengawasan terhadap biro perjalanan haji dan umrah	1.2. Peningkatan calon jamaah haji yang diberangkatkan 2.1. Peningkatan sertifikasi petugas haji 3.1. Peningkatan sarana dan prasarana layanan haji 3.2. Peningkatan layanan transportasi, akomodasi, dan konsumsi sesuai standar 3.3. Pembentukan kantor urusan haji Indonesia dan Kampung Haji di Arab Saudi dan Pembangunan Hotel Haji di Arab Saudi 4.1. Peningkatan layanan pendaftaran melalui Pusat layanan haji dan umrah terpadu 4.2. Layanan pendaftaran melalui strategi <i>mobile service</i> 5.1. Penguatan sistem informasi haji 6.1. Perumusan kebijakan berbasis hasil evaluasi penyelenggaraan haji 6.2. Peningkatan kualitas tata kelola keuangan haji yang akuntabel	
		1. Kurangnya Kompetensi penyuluh agama terkait Ilmu Agama dan Sosial Keagamaan, Komunikasi, Sosiokultural, dan Kolaboratif 2. Rendahnya rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran	1.1. Peningkatan frekuensi layanan penyuluhan agama 1.2. Peningkatan konten keagamaan yang dipublikasi 1.3. Standardisasi pengelolaan kualitas layanan bimbingan keagamaan 1.4. Peningkatan penyuluh agama yang berkualifikasi pendidikan dan kompetensi 2.1. Peningkatan bimbingan kelompok sasaran/binaan (Lembaga agama dan rumah ibadah) 2.2. Rekrutmen penyuluh agama sesuai rasio jumlah umat	Sekretariat Jenderal, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha dan BMBPSDM
		1. Sertifikasi halal terhadap jasa dan barang belum optimal	1.1. Peningkatan layanan sertifikasi halal secara <i>self declare</i>	Ditjen Bimas Islam

No	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
		2. Proses sertifikasi halal yang lambat 3. Kurangnya kompetensi pendamping dan auditor halal 4. Keterbatasan fasilitas laboratorium uji 5. Minimnya inovasi layanan berbasis teknologi dan mekanisme dan prosedur yang rumit	1.2. Peningkatan sarana dan prasarana layanan sertifikasi halal 2.1. Pemangkasan waktu penerbitan sertifikasi halal melalui optimalisasi layanan terpadu 2.2. Penyusunan peraturan tentang penyelenggaraan jaminan produk halal 3.1. Peningkatan pelatihan dan pendidikan bagi pendamping dan auditor halal 3.2. Rekrutmen pendamping dan pengawas halal sesuai formasi 4.1. Peningkatan kerjasama Kementerian Agama dengan BPJPH dalam layanan jaminan produk halal 4.2. Penguatan kemitraan dengan lembaga LPH 1. Penguatan sistem informasi halal untuk memudahkan akses layanan sertifikasi halal 2. Peningkatan layanan konsultasi dan literasi halal	
3	Meningkatnya pemerataan akses pendidikan dengan indikator : a. Tingkat Penyelesaian Pendidikan MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widyalyaya/Uttama Dhammasekha b. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi	1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan 2. Belum optimalnya penyaluran bantuan pendidikan dan beasiswa tepat sasaran bagi siswa kurang mampu 3. Tingginya angka anak tidak sekolah (ATS)	1.1. Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran memadai seperti laboratorium IPA, laboratorium komputer, perpustakaan, dan akses internet 2.1. Menyediakan bantuan pendidikan (beasiswa afirmasi, BOS, PIP) untuk siswa kurang mampu, khususnya di daerah 3T 3.1. Mengoptimalkan pendampingan belajar berbasis asrama/pesantren bagi siswa yang tinggal di boarding school. 3.2. Menerapkan <i>early warning system</i> untuk mendeteksi siswa berisiko tidak lulus (indikator: nilai rendah, ketidakhadiran, masalah perilaku) 3.3. Peningkatan layanan Pendidikan non formal	1. Sekjen (Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Keagamaan dan Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu), 2. Ditjen Pendidikan Islam 3. Ditjen Bimas Kristen, 4. Ditjen Bimas Katolik, 5. Ditjen Bimas Hindu, 6. Ditjen Bimas Buddha

No	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
			3.4. Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah melalui pendidikan kesetaraan 3.5. Pengembangan sistem pendataan anak tidak sekolah	
		1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan tinggi keagamaan 2. Belum optimalnya penyaluran bantuan pendidikan dan beasiswa tepat sasaran bagi calon mahasiswa kurang mampu	1.1. Pembangunan dan revitalisasi pendidikan tinggi keagamaan 1.2. Pengembangan lembaga pendidikan berbasis gender dan inklusi 1.3. Penyelenggaraan layanan Pendidikan berbasis hybrid 1.4. Pendirian dan pengembangan pendidikan agama dan keagamaan unggul terintegrasi 2.1. Penyediaan bantuan Pendidikan (Beasiswa dan KIPK)	1. Sekjen (Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Keagamaan dan Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu), 2. Ditjen Pendidikan Islam 3. Ditjen Bimas Kristen, 4. Ditjen Bimas Katolik, 5. Ditjen Bimas Hindu, 6. Ditjen Bimas Buddha
4	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah dengan indikator Persentase peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan pendidikan keagamaan yang memenuhi standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional Literasi dan Numerasi	1. Keterbatasan kompetensi pendidik dalam menerapkan metode pembelajaran yang efektif dan berpusat pada siswa 2. Minimnya sarana dan prasarana pendukung 3. Kurangnya budaya membaca dan belajar 4. Kurikulum yang belum sepenuhnya kontekstual 5. Hanya sebagian kecil murid yang menyadari pentingnya nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila 6. Minimnya teladan positif dari pendidik 7. Kegiatan ekstrakurikuler yang kurang variatif 8. Fokus pembelajaran yang lebih menitikberatkan pada aspek kognitif dibandingkan	1.1. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tentang penerapan metode pembelajaran yang inovatif 1.2. Pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran 1.3. Penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung kualitas pembelajaran 2.1. Peningkatan sarana pendukung pembelajaran (alat peraga pembelajaran, digitalisasi pembelajaran, sarana praktek pembelajaran 3.1. Mengajak anak menggunakan berbagai prinsip matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari 3.2. Mengintegrasikan kegiatan literasi dan numerasi dalam semua mata pelajaran	1. Ditjen Pendidikan Islam 2. Ditjen Bimas Kristen, 3. Ditjen Bimas Katolik, 4. Ditjen Bimas Hindu, 5. Ditjen Bimas Buddha 6. BMBPSDM

No	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
		afektif dan psikomotorik 9. Ketidakkonsistenan penerapan aturan dan disiplin di sekolah maupun rumah	4.1. Mengembangkan bahan ajar dan modul pembelajaran kontekstual yang sesuai dengan tingkat peserta didik 4.2. Penguatan skema pemilihan muatan pembelajaran pilihan untuk memfasilitasi minat, bakat dan kemampuan peserta didik 5.1. Mengajarkan dan membiasakan anak untuk berperilaku sesuai nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat 6.1. Pelatihan guru tentang metode pembelajaran berbasis keteladanan dalam menanamkan karakter 7.1. Memperluas kegiatan pramuka, OSIS, kegiatan keagamaan, dan program bakti sosial sebagai media pembentukan karakter 8.1. Peningkatan penyelenggaraan Pendidikan karakter siswa berbasis pembelajaran agama, praktik beragama siswa, sikap toleransi, dan kewarganegaraan 9.1. Penguatan keterlibatan masyarakat dalam mendukung upaya yang dilakukan satuan pendidikan untuk menguatkan karakter dan wellbeing peserta didik dan pendidik	
		1. Sekolah belum cukup mampu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah 2. Sekolah belum menghadirkan suasana belajar yang menjunjung tinggi toleransi keberagaman	1.1. Mendorong keterlibatan siswa dan komite sekolah dalam kegiatan pembelajaran 1.2. Meningkatkan frekuensi supervisi kelas untuk memastikan interaksi guru-siswa mendukung iklim belajar kondusif 1.3. Penangan dan cegah dini kekerasan antar siswa (perundungan dan kekerasan fisik)	1. Ditjen Pendidikan Islam 2. Ditjen Bimas Islam, 3. Ditjen Bimas Kristen, 4. Ditjen Bimas Katolik, 5. Ditjen Bimas Hindu, 6. Ditjen Bimas Buddha

No	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
		3. Sekolah belum memfasilitasi kebutuhan murid dengan disabilitas maupun cerdas istimewa berbakat istimewa	2.1. Memberikan lebih banyak kesempatan untuk siswa saling berinteraksi secara positif dengan siswa lainnya dari beragam latar belakang suku, ras dan agama 2.2. Penegakan tata tertib dan budaya sekolah yang menghargai keberagaman 3.1. Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas belajar agar aman, nyaman, dan ramah anak	
5	Meningkatnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas dengan indikator Persentase guru dan tenaga kependidikan yang profesional pada madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan	1. Keterbatasan akses pendidikan lanjutan 2. Minimnya kesempatan mengikuti pendidikan profesi guru (PPG) 3. Terbatasnya pelatihan berkelanjutan 4. Kebijakan rekrutmen yang kurang mempertimbangkan kualifikasi	1.1. Fasilitasi beasiswa atau bantuan biaya studi bagi guru/tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi minimal 1.2. Penjaminan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan dalam bentuk finansial dan nonfinansial 2.1. Mendorong partisipasi guru dalam Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan memfasilitasi proses administrasinya 3.1. Penguatan dan Penilaian kinerja rutin melalui AKG dan MGMP 3.2. Pelatihan, workshop, dan bimbingan teknis untuk memperkuat kompetensi 3.3. Pemenuhan rasio guru agama dengan peserta didik seagama. 4.1. Menyusun standar kompetensi dan kualifikasi jabatan secara jelas.	1. Setjen (Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan keagamaan dan Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu) 2. Ditjen Pendidikan Islam 3. Ditjen Bimas Islam, 4. Ditjen Bimas Kristen, 5. Ditjen Bimas Katolik, 6. Ditjen Bimas Hindu, 7. Ditjen Bimas Buddha
6	Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan yang berkualitas dengan indikator a. Persentase lulusan pendidikan tinggi Keagamaan/Ma'had Aly yang	1. Keterbatasan relevansi kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja 2. Minimnya kesempatan mengikuti program magang untuk mendukung	1.1. Peningkatan mahasiswa dengan pengalaman magang 1 (satu) semester di luar kampus 2.1. Peningkatan PTK yang memiliki Pusat Pengembangan Karir 2.2. Peningkatan mahasiswa yang difasilitasi untuk mendapat sertifikat	1. Ditjen Pendidikan Islam 2. Ditjen Bimas Islam, 3. Ditjen Bimas Kristen, 4. Ditjen Bimas Katolik, 5. Ditjen Bimas Hindu,

No	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
	mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun b. Jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat THE Impact SDGs	pengalaman non akademis 3. Terbatasnya kerjasama PTK dengan dunia usaha dan industri 4. Minimnya layanan bimbingan karier 5. Data lulusan yang tidak valid dan <i>reliable</i>	kompetensi dari lembaga sertifikasi bereputasi 2.3. Peningkatan prodi yang menyelenggarakan sertifikasi profesi 3.1. Peningkatan lulusan pendidikan tinggi keagamaan bidang STEM 3.2. Menjalin MoU dengan dunia usaha/industri. 3.3. Meningkatkan program magang dan praktik kerja 4.1. Pengembangan Soft Skills dan Sertifikasi Kompetensi 5.1. Monitoring dan <i>Tracer Study</i> Rutin	6. Ditjen Bimas Buddha
		1. Rendahnya jumlah dan kualitas publikasi ilmiah yang relevan dengan SDGs 2. Minimnya kolaborasi riset internasional 3. Kurangnya program pengabdian masyarakat yang terukur 4. Keterbatasan kebijakan pendanaan dalam mengintegrasikan SDGs	1.1. Meningkatkan jumlah dan kualitas publikasi internasional terkait SDGs 1.2. Penguatan Riset dan Pengabdian Masyarakat Berorientasi SDGs 1.3. Membentuk pusat riset unggulan yang fokus pada isu-isu SDGs prioritas 1.4. Penyelenggaraan PTK berbasis gender dan inklusi 2.1. Peningkatan kerjasama PTK Nasional dan Internasional 2.2. Peningkatan PTK yang berpartisipasi dalam penilaian THE Impact SDGs 3.1. Mendorong kolaborasi dengan pemerintah/komunitas lokal. 3.2. Menyediakan beasiswa dan program kewirausahaan untuk mahasiswa 4.1. Mengalokasikan dana untuk kegiatan akademik dan non-akademik yang mendukung literasi SDGs bagi mahasiswa.	1. Ditjen Pendidikan Islam 2. Ditjen Bimas Islam, 3. Ditjen Bimas Kristen, 4. Ditjen Bimas Katolik, 5. Ditjen Bimas Hindu, 6. Ditjen Bimas Buddha
7	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	1. Lemahnya komitmen pimpinan dan pegawai dalam pelaksanaan pelaksanaan reformasi birokrasi	1.1. Memberikan penghargaan (insentif, promosi, apresiasi) bagi unit/pegawai berprestasi dalam reformasi.	1. Sekretaris jenderal 2. Inspektorat Jenderal

No	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
	dengan indikator Nilai reformasi birokrasi	2. Rendahnya kualitas pelayanan publik 3. Minimnya inovasi 4. Lemahnya monitoring dan evaluasi	1.2. Menerapkan sanksi tegas bagi yang tidak melaksanakan komitmen (teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat). 2.1. Menyusun dan menerapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) yang jelas dan terukur. 2.2. Mengadakan pelatihan <i>frontliner</i> tentang pelayanan prima. 2.3. Membuka mekanisme pengaduan dan survei kepuasan masyarakat secara rutin. 3.1. Membentuk unit atau tim inovasi di setiap bagian. 3.2. Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi/industri untuk adopsi inovasi. 4.1. Menindaklanjuti hasil Monev dengan rekomendasi perbaikan yang wajib diimplementasikan. 4.2. Peningkatan kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal atas Akuntabilitas Keuangan, Kinerja dan Integritas SDM aparatur Kementerian Agama	3. Ditjen Pendidikan Islam 4. Ditjen Bimas Islam, 5. Ditjen Bimas Kristen, 6. Ditjen Bimas Katolik, 7. Ditjen Bimas Hindu, 8. Ditjen Bimas Buddha 9. Ditjen PHU 10. BMBPSDM

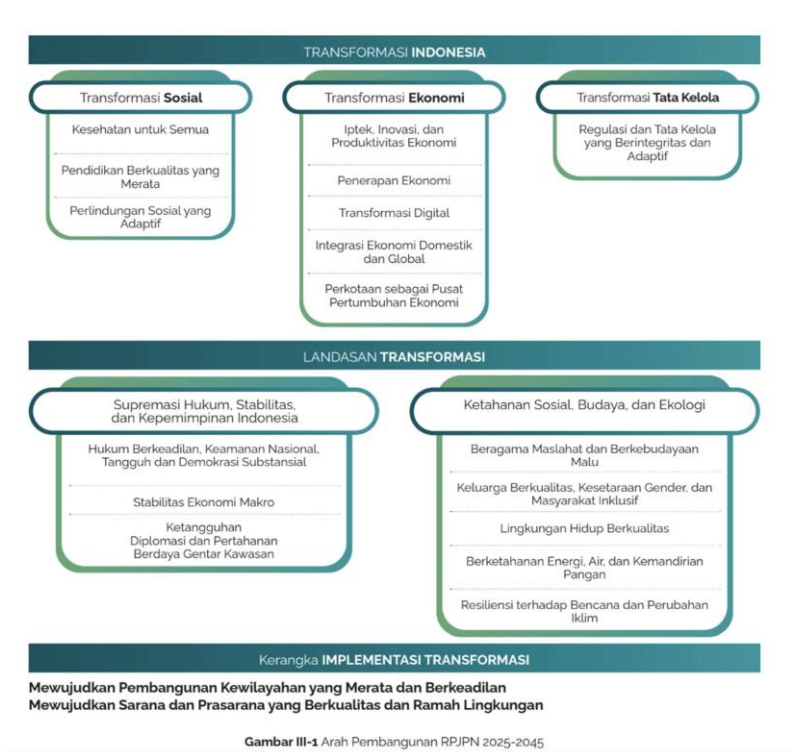
BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah kebijakan dan strategi pada bab ini menjelaskan langkah Kemenag 2025–2029 untuk mendukung sasaran RPJMN 2025–2029, dimulai dari uraian kebijakan nasional, dilanjutkan kebijakan Kemenag, serta kerangka regulasi dan kelembagaan sebagai landasan implementasi program lima tahun ke depan.

A. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi nasional menjadi landasan arah kebijakan Kemenag, khususnya dalam pencapaian sasaran pembangunan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM dan pengelolaan lembaga keagamaan yang lebih efektif. Secara kolektif, kebijakan dan strategi pemerintah saat ini bertujuan untuk mendukung tercapainya cita-cita Indonesia Emas 2045, dengan SDM yang unggul, berkarakter, berdaya saing, dan berbudaya.

Strategi Pencapaian Indonesia Emas telah diamanatkan dalam RPJPN 2025 - 2045, melalui 5 agenda transformasi dan 17 arah pembangunan nasional.



Gambar 3. 1 Agenda Transformasi RPJPN

Pencapaian tujuan jangka panjang ini kemudian diuraikan dalam 8 misi Asta Cita dan 17 program prioritas dan 8 program PHTC yang ditetapkan Presiden, yang juga menjadi strategi jangka menengah pemerintah saat ini.



Gambar 3. 2 Asta Cita sebagai prioritas Pembangunan Nasional

Kementerian Agama, sesuai tugas dan fungsinya, secara spesifik dapat berkontribusi dalam proses operasionalisasi misi Asta Cita, khususnya dalam penguatan SDM, penguatan reformasi birokrasi, dan penguatan penyelarasan kehidupan yang harmonis dan toleran antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Dalam operasionalisasi misi Asta Cita ini, Kemenag dapat berperan dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan internal Kemenag, khususnya dalam pencapaian program prioritas; penguatan pendidikan, sains, dan teknologi digital (digitalisasi) di satuan pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama; memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah; serta pelestarian seni budaya warisan keagamaan dan peningkatan ekonomi kreatif yang berbasis keagamaan.

Kementerian Agama juga turut mendukung pencapaian Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden dan Wakil Presiden, khususnya dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis di madrasah, pesantren, dan pendidikan keagamaan lainnya, pendirian lembaga pendidikan umum dengan kekhasan agama yang unggul dan terintegrasi di setiap kabupaten, revitalisasi satuan pendidikan madrasah dan keagamaan lainnya, dan jaminan kesejahteraan ASN Guru dan Dosen.

8 PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (PHTC)

Dalam mencapai misi Asta Cita dan Prioritas Nasional, Presiden menetapkan 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), sebagaimana berikut :

1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil; Intervensi Kementerian Agama dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kementerian Agama (Kemenag) berperan penting dalam pelaksanaan di lingkungan pendidikan Islam, khususnya madrasah dan pesantren. Kemenag memastikan program ini berjalan efektif, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai agama serta memberikan manfaat bagi siswa. Intervensi itu dimulai dari penerbitan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2024 sebagai pedoman pelaksanaan program makan bergizi gratis di pesantren.
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50% dalam lima tahun, dan bangun RS lengkap berkualitas di kabupaten;
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional;
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi;
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut;
6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan), TNI/Polri, dan pejabat negara;
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan; Dasar pelaksanaan PHTC pada kegiatan ini adalah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran. Total revitalisasi madrasah melalui PHTC adalah Total Madrasah PHTC sebanyak 2.120 Madrasah, terbagi ke dalam 2 Tahap: Tahap 1: 179 madrasah di 5 Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.396.581.901.000 dan Tahap 2: 1.941 madrasah di 37 Provinsi dengan alokasi Rp. 4.309.422.134.000. Pelaksanaan tahap 2 dilakukan melalui mekanisme *Multi Years Contractual (MYC)*.
8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

PHTC sebagai program implementasi kebijakan Presiden terpilih disusun berdasarkan misi Asta Cita dan Program Prioritas dimandatkan kepada Kementerian/Lembaga untuk pedoman penyusunan program dan penganggaran. Kemenag melaksanakan 4 (empat) dari 8 (delapan) yaitu nomor (1) Pemberian Makan Siang dan Susu Gratis di Pesantren serta Bantuan Gizi untuk Anak Balita dan Ibu Hamil, nomor (4) Memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi, (5) Melanjutkan dan menambahkan Program Kartu Kesejahteraan Sosial serta Kartu Usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. dan nomor (6) Menaikkan Gaji ASN (Terutama Guru dan Dosen).

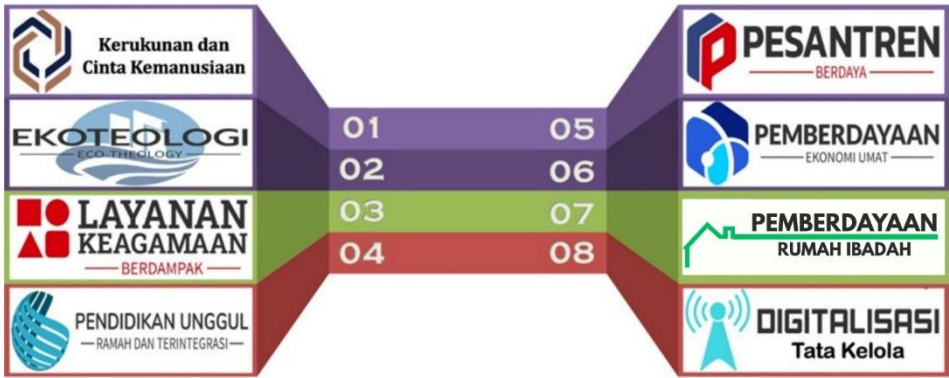
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 ditetapkan bahwa Kemenag dalam menjalankan fungsi agama dan fungsi pendidikan ditetapkan 14 (empat belas) arah kebijakan (PP) sebagai berikut:

Tabel 2. 7 Arah Kebijakan Fungsi Agama dan Fungsi Pendidikan Kemenag

Fungsi Agama	Fungsi Pendidikan
1. Penguatan Moderasi Beragama dan Kualitas Layanan Bimbingan Keagamaan	1. Percepatan Wajib Belajar 13 tahun
2. Jaminan Hak Beragama dan Kehidupan Beragama yang Harmonis	2. Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
3. Peningkatan Peran Tokoh Agama dan Lembaga Sosial Keagamaan	3. Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Berkualitas
4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan	4. Penguatan Sistem Tata Kelola Kependidikan
5. Transformasi Layanan KUA yang Berkualitas, Merata, dan Inklusif	5. Pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas dan Pengembangan STEM
6. Transformasi Layanan Haji dan Umrah yang Transparan, Akuntabel, Aman, dan Nyaman	6. Pendidikan untuk Peningkatan Produktivitas, Daya Saing, dan Kemampuan Kerja
7. Transformasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	
8. Pengembangan Dana Sosial Keagamaan Produktif	

B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Agama

Untuk menyelaraskan Asta Cita, Prioritas Nasional, dan arah kebijakan dalam RPJMN, maka disusun Asta Protas Menteri Agama 2025-2029 sebagai berikut



Gambar 3. 3 Asta Protas Menteri Agama 2025-2029

Asta Protas Menteri Agama yang menjadi pedoman arah kebijakan Kementerian Agama sebagai berikut:

- 1) Kerukunan dan Cinta Kemanusiaan
Untuk memperkuat kerukunan dan menumbuhkan cinta kemanusiaan, Kementerian Agama merumuskan strategi yang berorientasi pada kemaslahatan, penghormatan terhadap

keberagaman, serta pembangunan budaya saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat. Strategi tersebut meliputi:

- Penyelenggaraan forum dialog tingkat internasional, nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan pemuda lintas iman
- Fasilitasi, pembinaan, dan penguatan kapasitas FKUB dalam menjalankan fungsi mediasi, fasilitasi pendirian rumah ibadah, dan penyelesaian perselisihan
- Pelatihan dan sosialisasi moderasi beragama bagi ASN Kementerian Agama, guru pendidikan agama, penyuluh agama, Tokoh Agama, Siswa, serta mahasiswa PTK
- Pengembangan *early warning system* berbasis data dan laporan masyarakat untuk mendeteksi potensi konflik keagamaan dan penyelesaian konflik antar dan intra umat beragama
- Penyusunan regulasi, pedoman, dan standar tata kelola lembaga agama dan keagamaan yang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keberpihakan pada kerukunan
- Penguatan KUA sebagai *Early Warning System* potensi konflik.
- Penguatan kerukunan berbasis isu lingkungan, HAM, kesetaraan gender, budaya dan digital
- Peningkatan kerja sama antar lembaga agama, lembaga sosial keagamaan, dan pemerintah daerah dalam layanan keagamaan dan layanan pendidikan
- Pembentukan Agen Kerukunan Tingkat Kab/Kota
- Inseri kurikulum berbasis cinta kemanusiaan dan penghargaan terhadap perbedaan dalam program kediklatan dan pengembangan SDM
- Intensifikasi kampanye nilai, kearifan lokal, dan budaya penopang
- kerukunan umat di Indonesia"
- Penyebarluasan informasi positif melalui media cetak, elektronik, dan digital terkait toleransi, kerukunan, dan moderasi beragama

2) Ekoteologi

Ekoteologi merupakan cara pandang iman yang melihat seluruh ciptaan sebagai suci dan saling terhubung dalam jaringan kehidupan. Konsep ini strategis bagi pembangunan nasional bidang agama karena mendorong lahirnya peradaban ekologis yang menumbuhkan kepedulian, rasa hormat, dan tanggung jawab moral terhadap lingkungan serta kelompok rentan.

Penyelarasan program prioritas ini dilaksanakan menggunakan strategi, yaitu :

- Pelatihan bagi ASN Kemenag, guru agama, penyuluh, mahasiswa, serta tokoh agama tentang nilai ekoteologi dalam ajaran agama
- Penerbitan dan diseminasi bahan literasi keagamaan maslahat
- Penyebaran pesan dakwah dan kampanye nilai maslahat melalui media massa, media sosial, dan komunitas
- Survei dan kajian lapangan terkait pemahaman dan praktik keagamaan maslahat di kalangan masyarakat
- Penyediaan fasilitas hijau (bank sampah, sumur resapan, panel surya, taman hijau, sanitasi sehat, transportasi ramah lingkungan) di Kantor Kemenag pusat dan daerah, rumah ibadah dan lembaga pendidikan agama dan keagamaan

- Peningkatan Kerja Sama Kementerian Agama dengan KLHK, Pemerintah Daerah, LSM Lingkungan, dan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penerapan Green Campus, Green Pesantren, dan Green Madrasah/Satuan Pendidikan Keagamaan
 - Integrasi kurikulum pelestarian lingkungan dalam pendidikan agama dan keagamaan
 - Penyelenggaraan Event keagamaan, event seni budaya bernapas agama dan perayanaan keagamaan berbasis ekotiologi dan penghormatan atas keragaman budaya sebagai wujud pengamalan nilai agama
- 3) Layanan Keagamaan Berdampak (Maslahat)
- Program atau aktivitas yang dijalankan berdasarkan nilai keagamaan dan berhasil memberikan nilai kontribusi positif yang nyata, konkret, dan bermanfaat luas bagi hidup masyarakat (baik material, spiritual, dan mental) serta menjaga kemaslahatan umum. Dalam rangka memastikan pelaksanaan program prioritas tersebut, dibutuhkan strategi sebagai berikut :
- Peningkatan sarana-prasarana KUA (KUA Berdaya)
 - Penguatan kapasitas fasilitator bimbingan perkawinan, penyuluh agama dan kurikulum bimbingan perkawinan yang kontekstual
 - Fasilitasi pernikahan sah, mudah, bermartabat, serta layanan inklusif di KUA
 - Pengarusutamaan program keluarga masalah, bimbingan remaja usia sekolah, dan edukasi berbasis nilai keagamaan
 - Penguatan regulasi, sistem pengawasan, dan penjaminan mutu produk halal yang akuntabel
 - Peningkatan frekuensi bimbingan penyuluh agama terhadap kelompok sasaran
 - Peningkatan naskah & buku keagamaan Islam yg layak edar/ sesuai kaidah
 - Penyediaan modul, buku saku, media digital, dan konten dakwah berbasis kerukunan dan beragama maslahat
 - Peningkatan Kerja Sama Penyuluh Agama dengan Lembaga Lintas Sektoral (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, LSM, ormas, komunitas) dalam memberikan layanan bimbingan, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat
 - Fasilitasi Penentuan Arah Kiblat dan Kalender Hijriah
 - Pemanfaatan aplikasi berbasis digital (misalnya Jadwal Salat, Kalender Hijriah, Aplikasi Halal, dan Arah Kiblat Online) yang dapat diakses lembaga agama dan umat beragama
 - Fasilitasi penerimaan naskah dan buku keagamaan dari penulis atau penerbit untuk dilakukan proses penilaian dan Pemberian tanda layak edar bagi naskah/buku yang memenuhi kriteria sesuai regulasi
 - Peningkatan mushaf Al-Qur'an, terjemah, serta produk turunan Al-Qur'an (terjemahan, tafsir, aplikasi digital) yang memperoleh tanda tashih
 - Peningkatan Percetakan dan distribusi mushaf Al-Qur'an, Alkitab, Tripitaka, Weda, dan kitab suci lainnya dalam edisi resmi
 - Pengembangan aplikasi atau e-book kitab suci agar dapat diakses melalui perangkat digital

- Survei ketersediaan kitab suci di rumah tangga, rumah ibadah, dan lembaga pendidikan keagamaan
 - Gerakan nasional membaca kitab suci di sekolah, madrasah, widyalaya, satuan pendidikan keagamaan, pesantren, rumah ibadah, dan komunitas keagamaan.
- 4) Pendidikan Unggul, Ramah, dan Terintegrasi, adapun strategi yang dilakukan yaitu :
- Penyediaan sarana-prasarana pendidikan di daerah 3T, termasuk: madrasah satu atap, inklusi, kelas filial, pembelajaran hybrid, jarak jauh, kampus jauh, merdeka belajar dan berbasis teknologi
 - Peningkatan akses pendidikan melalui beasiswa, bantuan BOS/BOP, dan program afirmatif bagi keluarga pra-sejahtera, rentan, dan difabel.
 - Penjaringan Anak Tidak Sekolah dan layanan pencegahan melalui pendidikan kesetaraan.
 - Fasilitasi perpindahan peserta didik antar satuan pendidikan formal dan non-formal.
 - Peningkatan pemahaman dan peran keluarga serta tokoh agama, masyarakat, dan adat tentang pentingnya pendidikan
 - Peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan pra-sekolah terutama untuk memberikan bekal kesiapan belajar pada jenjang wajib belajar
 - Penyelenggaraan Makan bergizi gratis pada lembaga pendidikan agama dan pendidikan keagamaan tingkat dasar dan menengah
 - Pengembangan skema pembiayaan pendidikan tinggi keagamaan bagi mahasiswa yang berkeadilan untuk mendukung tingkat keberlanjutan masyarakat ke pendidikan tinggi
 - Penguatan mutu lembaga pendidikan dasar menengah dan tinggi melalui akreditasi unggul
 - Penyelenggaraan program pembelajaran bilingual pada satuan pendidikan
 - Peningkatan legalitas dan perlindungan hukum aset tanah wakaf untuk satuan pendidikan madrasah guna mendukung keberlangsungan dan kepastian layanan pendidikan
 - Peningkatan legalitas dan perlindungan hukum aset tanah wakaf untuk satuan pendidikan madrasah guna mendukung keberlangsungan dan kepastian layanan pendidikan
 - Pengembangan kurikulum integratif yang menggabungkan nilai-nilai agama, ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kewirausahaan
 - Penguatan pendidikan agama, pendidikan karakter, dan pendidikan kewargaan untuk memperkuat jati diri bangsa
 - Penguatan asesmen tingkat nasional berbasis pendidikan agama yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk memantau perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik serta kualitas lingkungan belajar
 - Penguatan pendidikan vokasi yang selaras dengan perkembangan kebutuhan DUDIKA secara berkelanjutan
 - Pengembangan mekanisme rekrutmen guru agama ASN secara terpusat sesuai kebutuhan berbasis analisis beban kerja
 - Penguatan peran Kementerian Agama dalam memastikan penempatan guru agama sesuai kebutuhan

- Pengembangan mekanisme jenjang karir guru berbasis sistem merit
 - Penjaminan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan dalam bentuk finansial dan non-finansial
 - Pembentukan Madrasah Aliyah Keagamaan dan Kejuruan (Vokasi)
 - Penguatan regulasi tentang restrukturisasi guru agama di lingkungan Kementerian Agama
 - Pengembangan profesi kepala madrasah dan satuan pendidikan keagamaan
 - Penguatan peran pengawas sebagai pendamping kepala satuan pendidikan
 - Perluasan layanan pendidikan tinggi keagamaan untuk mengakomodasi pendidikan sepanjang hayat
 - Pendirian dan pengembangan pendidikan agama dan keagamaan unggul dan berkelas dunia terintegrasi
 - Peningkatan pendidikan profesi guru untuk mendukung pemberian Sertifikasi guru dan Dosen
 - Peningkatan lulusan pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi keagamaan yang terserap di dunia kerja dan didunia industri
- 5) Pesantren Berdaya, dilaksanakan melalui strategi :
- Pembentukan Direktorat Jenderal Pondok Pesantren
 - Penguatan Pesantren dan Ma'had Aly sebagai sentra Keunggulan Kajian Islam
 - Pengembangan pesantren di wilayah 3T dan Afirmasi
 - Pemberian beasiswa santri dokter dan tenaga Kesehatan
 - Pendirian Pesantren bertaraf Internasional
 - Penguatan regulasi dan standar mutu akademik, kurikulum, tata kelola, bahasa pengantar (Arab/Inggris), serta manajemen kelembagaan pesantren internasional
 - Penyusunan dan penerapan kurikulum integrasi berbasis ilmu agama, sains, teknologi, dan kompetensi bahasa asing
 - Peningkatan kerjasama dengan universitas dan lembaga pendidikan Islam internasional untuk pertukaran santri, beasiswa, dan pengakuan kurikulum
 - Proses akreditasi pesantren dengan standar mutu internasional dan penerbitan sertifikat kelulusan
 - Pelatihan dan sertifikasi bagi ustad/pengajar/dosen pesantren dan ma'had aly
 - Penyelenggaraan Asesmen internal dan eksternal untuk mengukur capaian mutu satuan pendidikan formal di pesantren
 - Bantuan pembangunan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, asrama, serta sarana pembelajaran berbasis IT
 - Penguatan regulasi terkait pengakuan ijazah, kesetaraan, serta kompetensi lulusan pesantren dan pendidikan keagamaan
 - Penguatan kemandirian pesantren melalui santri entrepreneur, kewirausahaan dan Unit Usaha Produktif
 - Fasilitasi layanan rekognisi akademik dan profesional lulusan pesantren dengan satuan pendidikan umum, PTN/PTS dalam dan luar negeri, serta dunia usaha/industri

- 6) Pemberdayaan Ekonomi Umat, dengan strategi :
 - Optimalisasi dana sosial keagamaan (zakat, wakaf, infaq, shadaqah, punia, kebajikan, amal kasih) untuk penanggulangan kemiskinan dan pengembangan ekonomi umat
 - Pembentukan lembaga inkubasi wakaf produktif, pengembangan kota zakat/wakaf, dan rumah ibadah pusat ekonomi umat
 - Peningkatan kapasitas lembaga filantropi, kolaborasi pemanfaatan aset wakaf, dan penyusunan data terintegrasi berbasis nasional dan wilayah
 - Pengembangan aplikasi dan kanal pembayaran zakat/dana sosial keagamaan secara online untuk mempermudah umat dalam menunaikan zakat/dana sosial keagamaan
 - Peningkatan partisipasi umat beragama dalam berzakat/berdharma
 - Gerakan bersama pemanfaatan dana sosial keagamaan/filantropi
 - keagamaan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem, stunting, dan peningkatan kesejahteraan umat"
 - Penjaminan mutu lembaga dana sosial keagamaan/filantropi keagamaan
 - Penguatan kolaborasi program pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan
- 7) Pemberdayaan Rumah Ibadah, melalui strategi :
 - Perbaikan bangunan, penyediaan fasilitas dasar (air bersih, listrik, sanitasi), serta peningkatan keamanan rumah ibadah
 - Penerapan energi terbarukan (instalasi panel surya), penghijauan lingkungan rumah ibadah, pengelolaan sampah ramah lingkungan
 - Pelatihan Manajemen dan Tata Kelola Rumah Ibadah Inklusif
 - Penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga keagamaan, CSR perusahaan, dan organisasi sosial keagamaan untuk mendukung revitalisasi rumah ibadah
 - Penyediaan Fasilitas ramah anak, difabel, lanjut usia, perpustakaan dan layanan berbasis gender serta digital
 - Pelatihan Manajemen dan Tata Kelola Rumah Ibadah Inklusif
 - Pemilihan rumah ibadah percontohan
 - Peningkatan kegiatan dan perayaan keagamaan di rumah ibadah
- 8) Digitalisasi Tata Kelola, melalui strategi :
 - Implementasi budaya kerja yang bersih, jujur, dan profesional melalui kode etik ASN, sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system), dan pengawasan internal yang akuntabel.
 - Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk menghadirkan layanan publik yang cepat, transparan, efisien, dan terintegrasi melalui pengembangan aplikasi layanan digital dan digitalisasi dokumen layanan.
 - Penerapan SPBE secara menyeluruh dalam proses administrasi dan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan terukur.
 - Peningkatan kompetensi ASN Kementerian Agama yang smart dan moderat

- Penyederhanaan struktur organisasi dan prosedur kerja melalui redesign proses bisnis yang lebih lincah, terfokus pada hasil (result-oriented), dan mampu merespons kebutuhan masyarakat secara real-time.
- Penguatan sistem evaluasi kinerja berbasis indikator yang jelas dan dapat diukur, serta mengaitkan hasil kinerja dengan pemberian reward dan sanksi secara proporsional.
- Pengembangan ekosistem data terbuka (open government) untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan serta pengambilan keputusan publik.
- Peningkatkan satuan kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM
- Pengembangan Satu Data Kemenag dan Satu Akses Layanan (Architecture Enterprise SPBE dan Integrasi Sistem Informasi) termasuk digitalisasi layanan dan pengawasan/pengendalian
- Implementasi Manajemen Talenta, Sistem merit dan Reformasi Birokrasi
- Pemanfaatan Data Terpadu dalam pengambilan kebijakan layanan bidang agama dan pendidikan agama/keagamaan

Penjabaran *Asta Protas* Menteri Agama merupakan landasan utama dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama (Kemenag) guna mencapai visi dan tujuan pembangunan bidang agama dan pendidikan keagamaan. Rumusan arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama disusun dengan mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, serta diselaraskan dengan Program Prioritas Menteri Agama. Dalam perumusannya, Kementerian Agama juga mempertimbangkan potensi serta isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam lima tahun mendatang.

Kebijakan dan strategi Kementerian Agama tahun 2025-2029 diarahkan sebagai berikut:

1. Peningkatan masyarakat yang memiliki cara pandang dan praktik beragama jalan tengah untuk mewujudkan kerukunan dan harmoni sosial

Arah Kebijakan dalam mewujudkan masyarakat yang memiliki cara pandang dan praktik beragama jalan tengah untuk mewujudkan kerukunan dan harmoni dengan menitikberatkan peningkatan pemahaman dan praktek keagamaan maslahat dalam mewujudkan kehidupan beragama yg rukun, mitigasi dan penyelesaian konflik intra dan antar umat beragama dan pengarustamaan penguatan moderasi beragama. Adapun strateginya adalah:

1) Penguatan Literasi & Pendidikan Moderasi Beragama

- Penguatan literasi keagamaan yang moderat di pendidikan, rumah ibadah, dan ruang publik.
- Peningkatan kurikulum dan pelatihan keagamaan yang menanamkan toleransi, inklusivitas, dan nilai kemanusiaan.
- Pengembangan modul, kurikulum, dan materi dakwah tentang moderasi beragama.
- Penguatan kurikulum kebhinekaan, pelatihan guru, dan pembentukan lingkungan sekolah yang menghargai keberagaman.

- Penguatan karakter dan literasi keagamaan yang moderat, inklusif, dan kontekstual.
- Pengembangan literasi khazanah budaya bernapas agama.

2) Penguatan Ekosistem Kehidupan Beragama & Kerukunan

- Pengembangan ekosistem kehidupan beragama yang harmonis berbasis komunitas.
- Forum dialog antarumat dan antarbudaya untuk membangun saling pengertian.
- Optimalisasi peran tokoh agama, tokoh adat, dan pemimpin komunitas dalam dakwah perdamaian.
- Peningkatan kapasitas kelembagaan FKUB untuk mediasi, advokasi, dan resolusi konflik.
- Penguatan KUA sebagai *Early Warning System* potensi konflik.
- Pembentukan Agen Kerukunan di tingkat Kabupaten/Kota.
- Peningkatan kerukunan intern, antarumat, dan umat dengan pemerintah.
- Penguatan kerukunan berbasis isu lingkungan, HAM, kesetaraan gender, budaya digital, dan pelibatan pemuda.

3) Kampanye, Diseminasi & Digitalisasi

- Penyebarluasan materi dakwah, khutbah, dan ceramah berperspektif cinta kemanusiaan.
- Kampanye nasional nilai kemanusiaan melalui media sosial, TV, film, dan platform digital.
- Pengembangan repositori digital dan platform materi literasi keagamaan.
- Peningkatan kampanye publik, seminar, dan workshop untuk diseminasi karya tulis ilmiah tentang kerukunan.
- Intensifikasi kampanye nilai, kearifan lokal, dan budaya penopang kerukunan.
- Peningkatan partisipasi masyarakat melalui kampanye dan program diseminasi yang luas.

4) Tata Kelola Kelembagaan & Kebijakan

- Integrasi nilai moderasi beragama dalam tata kelola kelembagaan keagamaan dan pendidikan.
- Penguatan regulasi dan kebijakan afirmatif perlindungan hak beragama warga negara.
- Integrasi prinsip keadilan sosial, HAM, dan solidaritas kemanusiaan dalam kebijakan lintas sektor.
- Implementasi moderasi beragama lintas Kementerian/Lembaga/Pemda.
- Peningkatan pelatihan etika, moral, dan pendidikan karakter bagi pegawai Kemenag.

5) Budaya, Lingkungan & Event Keagamaan

- Panduan green religion yang ramah manusia dan lingkungan.
- Kegiatan keagamaan yang berorientasi kebaikan terhadap alam, lingkungan, dan sesama.
- Event keagamaan dan seni budaya bernapas agama dengan promosi dan kualitas tinggi.
- Penghormatan atas keragaman budaya sebagai wujud pengamalan nilai agama.

2. Peningkatan Layanan Keagamaan Transformatif

Arah kebijakan dalam meningkatkan Layanan Keagamaan Transformatif melalui pelayanan keagamaan yang transformatif, inklusif, dan adaptif berbasis ekoteologi difokuskan pada peningkatan kepuasan layanan KUA kecamatan, layanan ibadah haji, layanan sertifikasi halal, dan layanan penyuluh agama yang memenuhi standar, inovatif, dan berbasis digitalisasi layanan. Strategi yang akan dilakukan adalah:

1) Peningkatan Layanan Keagamaan

- Revitalisasi rumah ibadah dan pemenuhan sarpras di wilayah 3T.
- Digitalisasi layanan administrasi keagamaan.
- Pelatihan SDM pengelola rumah ibadah & penyiag agama.
- Penyediaan kitab suci, sumber bacaan ramah difabel, dan sistem penilaian buku keagamaan yang transparan.
- Penguatan harmoni sosial melalui penyuluhan agama profesional dan mitigasi konflik.
- Penyediaan layanan keagamaan terpadu pada tingkat kota dan kabupaten untuk mempermudah akses dan meningkatkan umat beragama untuk memperoleh layanan keagamaan

2) Tata Kelola Haji & Umrah

- Perbaiki tata kelola end-to-end: kuota, biaya, fasilitas, dan edukasi manasik berbasis teknologi.
- Regulasi haji yang akuntabel, sanksi tegas, serta transparansi daftar jemaah.
- Peningkatan layanan di Armuzna, penyediaan konsumsi full covered, serta efisiensi visa dan paspor.
- Pengembangan PLHUT, revitalisasi asrama haji, dan penyusunan buku pedoman perhajian.
- Penguatan investasi dan tata kelola distribusi Dam sesuai prinsip syariah.

3) Penguatan Keluarga & Bimbingan Perkawinan

- Peningkatan sarana-prasarana KUA (KUA Berdaya) dan kurikulum bimbingan perkawinan yang kontekstual.
- Penguatan kapasitas fasilitator, penyuluh agama, serta pemberian insentif yang adil.
- Fasilitasi pernikahan sah, mudah, bermartabat, serta layanan inklusif di KUA.
- Pengarusutamaan program keluarga masalah, bimbingan remaja usia sekolah, dan edukasi berbasis nilai keagamaan.

4) Penguatan Sistem Jaminan Produk Halal

- Penguatan regulasi, sistem pengawasan, dan penjaminan mutu produk halal yang kredibel.
- Platform digital terpadu untuk layanan halal, edukasi, dan literasi ekonomi umat.

5) Pemberdayaan Ekonomi Umat & Filantropi

- Optimalisasi dana sosial keagamaan (zakat, wakaf, infaq, shadaqah, dana amal kasih, pramita, punia dan kebajikan) untuk penanggulangan kemiskinan dan pengembangan ekonomi umat.
- Pembentukan lembaga inkubasi wakaf produktif, pengembangan kota zakat/wakaf, dan rumah ibadah pusat ekonomi umat.
- Peningkatan kapasitas lembaga filantropi keagamaan, kolaborasi

pemanfaatan dana sosial keagamaan dan aset wakaf, dan penyusunan data terintegrasi berbasis wilayah.

6) **Layanan Keagamaan Berbasis Ekologi**

- Internalisasi ajaran agama peduli lingkungan, pelatihan berbasis kesadaran lingkungan, dan pemanfaatan energi terbarukan.
- Program penghijauan (penanaman pohon/wakaf pohon) serta standardisasi layanan berbasis pelestarian lingkungan di rumah ibadah.

3. Peningkatan pemerataan akses pendidikan.

Upaya penguatan peningkatan dan pemerataan akses pendidikan diimplementasikan pada Digitalisasi pendidikan menjadi salah satu upaya dalam mendukung pembangunan pendidikan sebagaimana diatur dalam Perpres No. 12/2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, sejalan dengan 17 program prioritas Presiden dan 8 program hasil terbaik cepat. Upaya ini bertujuan untuk mempercepat transformasi pendidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, guna meningkatkan akses, mutu, efisiensi, dan daya saing pendidikan di semua jenjang pendidikan. Pelaksanaan program pada Kementerian Agama dilaksanakan dibawah koordinasi Sekretariat Jenderal Kementerian Agama. Hal ini dikarenakan sasaran penerima manfaat yang mencakup satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, serta peserta didik pada seluruh varian layanan pendidikan untuk seluruh agama yang ada di Kementerian Agama, yang dalam pembinaannya tersebar di berbagai unit eselon 1.

Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Agama (Pusdatin Kemenag) bertindak sebagai koordinator program dikarenakan posisinya sebagai penanggungjawab program prioritas Kementerian Agama di bidang Digitalisasi Tata Kelola, dengan jadwal sebagai berikut:

Tabel 2. 8 Jadwal Program Prioritas Kementerian Agama

Tahapan	Tahun				
	2025	2026	2027	2028	2029
Perencanaan					
Persiapaan					
Pengadaan peralatan pendukung digitalisasi pendidikan					
Pemanfaatan:					
1. Penyusunan dan pengembangan konten pembelajaran digital					
2. Peningkatan kompetensi pendidik dalam penerapan pembelajaran berbasis digital					
3. Pengayaan dan pengembangan kurikulum berbasis digital					
Operasional					

Upaya meningkatkan akses pendidikan yang terintegrasi, berkeadilan, ramah, dan terjangkau, kebijakan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelas satuan pendidikan termasuk yang didukung dengan sarana prasarana yang memadai (termasuk daerah 3T), melakukan pengembalian Anak Tidak Sekolah ke dalam satuan / sistem pendidikan / pelatihan, memberikan bantuan pendidikan, dan meningkatkan kualitas pendidikan PAUD. Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pendidikan di daerah 3T, termasuk madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya, seperti: (1) madrasah satu atap; (2) madrasah inklusi; (3) kelas fillial; (4) pembelajaran *hybrid*; (5) pembelajaran jarak jauh; (6) kampus jauh; dan (7) merdeka belajar.
- b. Pembangunan satuan pendidikan baru di wilayah yang butuh di afirmasi
- c. Penyediaan sarana dan prasarana SATAP pada satuan pendidikan
- d. Optimasi dukungan anggaran Non APBN
- e. Penjaminan kualitas setiap satuan pendidikan memenuhi standar sekolah inklusi
- f. Memperluas jangkauan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga pra-sejahtera, kelompok rentan, dan difabel melalui skema subsidi, BOS, BOP, dan program afirmatif lainnya.
- g. Pemberian bantuan operasional kepada satuan pendidikan
- h. Penjaringan Anak Tidak Sekolah ke dalam program pendidikan kesetaraan
- i. Penguatan layanan pendidikan dan satuan pendidikan untuk pencegahan anak tidak sekolah
- j. Peningkatan pemahaman dan peran keluarga serta tokoh agama, masyarakat, dan adat tentang pentingnya pendidikan
- k. Perluasan akses kemudahan perpindahan peserta didik antar satuan pendidikan formal dan non-formal sebagai implementasi rekognisi pendidikan
- l. Peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan pra-sekolah terutama untuk memberikan bekal kesiapan belajar pada jenjang wajib belajar.
- m. Pengembangan layanan Satu Atap (SATAP) PAUD-MI/SD bagi desa/kelurahan yang belum memiliki PAUD
- n. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) PAUD di daerah yang tidak memungkinkan pembangunan SATAP PAUD-MI/SD
- o. Pengembangan sistem pendataan serta penjangkauan dan pendampingan yang efektif bagi anak usia 5-6 tahun untuk mendapatkan layanan PAUD
- p. Peningkatan pemahaman dan peran keluarga serta tokoh agama, masyarakat, dan adat tentang pentingnya PAUD
- q. Makan bergizi gratis pada lembaga pendidikan agama dan pendidikan keagamaan tingkat dasar dan menengah
- r. Perluasan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mendukung wajib belajar 13 tahun

- s. Penguatan ekosistem kemandirian ekonomi pesantren melalui pengembangan unit usaha produktif yang berkelanjutan, berbasis potensi lokal, dan prinsip syariah
 - t. Rintisan pengembangan Pesantren
 - u. Peningkatan daya saing dan internasionalisasi pendidikan pesantren melalui pendirian Pesantren Internasional yang unggul dalam ilmu keislaman, sains, dan wawasan global
 - v. Penguatan sistem layanan kesehatan, termasuk kesehatan mental untuk peserta didik dan pendidik dengan melibatkan ekosistem.
 - w. Pemberian beasiswa santri dokter dan tenaga Kesehatan
 - x. Pendirian dan pengembangan pesantren di wilayah 3T
 - y. Peningkatan pesantren, majelis taklim, dan organisasi keagamaan sebagai mitra strategis dalam mendidik umat dan menggerakkan ekonomi lokal melalui pelatihan kewirausahaan dan pendampingan usaha berbasis nilai keagamaan.
 - z. Pendirian dan pengembangan pendidikan agama dan keagamaan unggul terintegrasi
 - aa. Pengembangan kebijakan afirmasi serta bantuan dan subsidi pembiayaan pendidikan tinggi keagamaan yang berkeadilan
 - bb. Pengembangan skema pembiayaan pendidikan tinggi keagamaan bagi mahasiswa yang berkeadilan untuk mendukung tingkat keberlanjutan masyarakat ke pendidikan tinggi.
 - cc. Peningkatan legalitas dan perlindungan hukum aset tanah wakaf untuk satuan pendidikan madrasah guna mendukung keberlangsungan dan kepastian layanan pendidikan
 - dd. Peningkatan Kapasitas Pesantren dalam Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat
 - ee. Pengembangan prasarana pendidikan tinggi keagamaan berbasis teknologi untuk mendukung daya saing dan produktivitas lulusan.
 - ff. Pengembangan skema pendanaan serta pembiayaan inovatif bagi pengembangan pendidikan tinggi keagamaan.
 - gg. Pemerataan kualitas dan akses perguruan tinggi keagamaan di daerah afirmasi.
 - hh. Penyediaan sarana dan prasarana satuan pendidikan menengah vokasi yang sesuai dengan standar DUDIKA.
4. Peningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.
- Kebijakan dalam peningkatan hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah dititikberatkan pada peningkatan kualitas kemampuan literasi dan berfikir siswa dalam mata pelajaran Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia, peningkatan mutu satuan pendidikan dasar menengah, peningkatan kualitas Layanan Perbukuan Pendidikan Agama dan Keagamaan, peningkatan kualitas penilaian dan pemanfaatan hasil pembelajaran, peningkatan kualitas perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan, dan peningkatan layanan rekognisi pendidikan. Strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:
- a. Mengembangkan kurikulum integratif yang menggabungkan nilai-nilai keislaman, ilmu pengetahuan, keterampilan abad 21, dan karakter kewirausahaan sesuai kebutuhan zaman.
 - b. Penerapan Kurikulum yang Berfokus pada Kompetensi Esensial, Adaptif, dan Kontekstual
 - c. Penguatan pendidikan agama, pendidikan karakter, dan

pendidikan kewargaan untuk memperkokoh jati diri bangsa dalam pergaulan dunia

- d. Penguatan skema pemilihan muatan pembelajaran pilihan pada Pendidikan Menengah untuk memfasilitasi minat, bakat dan kemampuan peserta didik.
- e. Penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung pembelajaran di setiap satuan pendidikan melalui dukungan asimetris dan kolaborasi dengan K/L terkait.
- f. Penguatan rancangan asesmen tingkat nasional berbasis pendidikan agama yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk memantau perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik serta kualitas lingkungan belajar.
- g. Penguatan pemanfaatan hasil asesmen tingkat nasional sebagai umpan balik kepada satuan pendidikan dan Kementerian Agama untuk peningkatan kualitas layanan pendidikan yang adil dan merata.
- h. Penguatan keterlibatan masyarakat dalam mendukung upaya yang dilakukan satuan pendidikan untuk menguatkan karakter dan wellbeing peserta didik dan pendidik
- i. Penguatan koordinasi dan pembagian peran antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam implementasi skema PAUD-HI yang berkonvergensi dengan berbagai program yang menyasar anak usia dini
- j. Peningkatan pesantren untuk mengembangkan unit-unit usaha produktif berbasis potensi lokal dan wakaf produktif guna meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren dan daya saing lulusan.
- k. Memfasilitasi kolaborasi antara pesantren, lembaga pendidikan, dan sektor industri untuk pemagangan, pelatihan kewirausahaan, dan kelanjutan studi alumni.
- l. Menyediakan layanan sertifikasi kompetensi dan pengembangan karier bagi lulusan lembaga pendidikan dan pesantren melalui pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja dan kewirausahaan.
- m. Mengintegrasikan teknologi digital dalam manajemen sekolah/pesantren dan proses pembelajaran untuk menciptakan sistem yang efisien, transparan, dan modern.
- n. Penguatan sistem dan budaya pendidikan yang ramah anak guna menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, bebas kekerasan, serta mendukung perkembangan karakter dan potensi peserta didik secara holistik
- o. Peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan, akhlak mulia, dan kerukunan.
- p. Penguatan mekanisme dalam pemenuhan hak peserta didik untuk memperoleh Pendidikan agama dan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berkualitas,

- sesuai dengan agama dan kepercayaan peserta didik.
- q. Pemenuhan standar untuk merekognisi lulusan pendidikan non-formal
 - r. Penjaminan satuan pendidikan nonformal berkualitas
 - s. Penyempurnaan sistem asesmen nasional, Rapor Pendidikan dan akreditasi sebagai sumber data evaluasi sistem pendidikan (ESP)
 - t. Penguatan kualitas pangkalan data pendidikan serta kemudahan akses dan penggunaan
 - u. Penguatan mekanisme integrasi data untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan
 - v. Peningkatan jaminan mutu layanan pesantren
 - w. Penguatan Pesantren dan Ma'had Aly Sebagai Sentra Keunggulan Kajian Islam
 - x. Intensifikasi kampanye praktik baik pesantren ramah anak
 - y. Pengembangan teaching factory sebagai media praktik siswa/peserta didik yang disesuaikan dengan perkembangan DUDIKA.
 - z. Perluasan kerja sama satuan pendidikan menengah vokasi dengan DUDIKA dan asosiasi profesi dalam penguatan proses pembelajaran berbasis industri.
 - aa. Penyelarasan konsentrasi keahlian pada satuan pendidikan menengah vokasi dengan perkembangan kebutuhan DUDIKA secara berkelanjutan.
 - bb. Penguatan skema pemagangan bagi peserta didik dan pendidik pendidikan menengah vokasi.
 - cc. Perluasan dan penguatan kerja sama satuan pendidikan menengah vokasi dengan lembaga sertifikasi profesi dan asosiasi profesi.
 - dd. Perluasan cakupan sertifikasi kompetensi bagi lulusan pendidikan menengah vokasi.
 - ee. Pengembangan dan penguatan skema insentif bagi DUDIKA yang berkontribusi dalam pengembangan kompetensi lulusan pendidikan menengah vokasi.
 - ff. Peningkatan kolaborasi dengan DUDIKA sebagai wahana pembelajaran satuan pendidikan menengah vokasi.
5. Peningkatnya Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas
- Kebijakan dalam Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas difokuskan pada restrukturisasi dan pemerataan guru dan tenaga kependidikan, peningkatan guru dan tenaga kependidikan yang profesional, peningkatan kesejahteraan guru berbasis penilaian kinerja dan pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama. Strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:
- a. Pengembangan data guru secara terpadu termasuk proyeksi kebutuhan guru dan penyusunan sistem informasi tentang kebutuhan guru untuk calon guru dan pemangku kepentingan lainnya

- b. Pengembangan mekanisme rekrutmen guru agama ASN secara terpusat sesuai kebutuhan berbasis analisis beban kerja
 - c. Penguatan peran Kementerian Agama dalam memastikan penempatan guru agama sesuai kebutuhan
 - d. Pengangkatan guru dari calon yang memiliki sertifikat profesi, kualifikasi dan atau pelatihan terstandar dan berjenjang
 - e. Penguatan mekanisme pemenuhan kebutuhan guru melalui penyesuaian linearitas guru, termasuk penerapan multi-grade dan multi-subject, untuk memenuhi kebutuhan belajar dan kebutuhan SDM
 - f. Pengembangan mekanisme rekrutmen dan remunerasi pendidik vokasi dari praktisi dunia kerja
 - g. Peningkatan kompetensi guru berbasis pemanfaatan data asesmen di tingkat nasional
 - h. Pemenuhan dan penguatan kompetensi tenaga kependidikan melalui jalur kualifikasi dan atau pelatihan terstandar
 - i. Penguatan mekanisme rekrutmen kepala satuan pendidikan melalui jalur kualifikasi dan/atau pelatihan terstandar untuk kepemimpinan pembelajaran
 - j. Pengembangan mekanisme jenjang karir guru berbasis sistem merit
 - k. Penjaminan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan dalam bentuk finansial dan non-finansial
 - l. Program mentoring terstandar bagi calon kepala satuan pendidikan (bersifat wajib bagi setiap kepala satuan pendidikan)
 - m. Pengembangan profesi kepala madrasah dan satuan pendidikan keagamaan
 - n. Penguatan peran pengawas sebagai pendamping kepala satuan pendidikan
 - o. peningkatan kompetensi guru melalui penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG);
 - p. peningkatan kompetensi guru berkelanjutan melalui KKG dan MGMP;
 - q. peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja sebagai acuan untuk pembinaan, pemberian penghargaan, serta peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - r. peningkatan pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian yang merata pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan pemetaan komprehensif mengenai kebutuhan dan ketersediaan, termasuk di daerah 3 T
 - s. Peningkatan kapabilitas pendidik dan tenaga pendidik dalam pemanfaatan infrastruktur esensial pembelajaran pendidikan menengah vokasi
6. Peningkatnya penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan yang berkualitas

Kebijakan dalam meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan yang berkualitas difokuskan pada peningkatan mutu pendidikan, kompetensi lulusan yang memenuhi kebutuhan dunia kerja dan dunia industri. Strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan kualitas, dan penjaminan mutu bagi perguruan tinggi keagamaan dan program studi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi.

- b. Perluasan layanan pendidikan tinggi keagamaan untuk mengakomodasi pendidikan sepanjang hayat.
- c. Penguatan sinkronisasi data dan informasi pendidikan tinggi keagamaan yang berkelanjutan
- d. Penguatan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pembelajaran serta manajemen pendidikan tinggi keagamaan.
- e. Pengembangan skema pendanaan serta pembiayaan inovatif bagi pengembangan pendidikan tinggi keagamaan.
- f. Pendirian dan pengembangan pendidikan agama dan keagamaan unggul terintegrasi
- g. Pengembangan Perguruan Tinggi Keagamaan berkelas dunia
- h. Peningkatan kualitas Literasi Keagamaan berbasis budaya digital dan media sosial
- i. Pemerataan layanan pendidikan tinggi keagamaan berkualitas yang inklusif, aman, dan nyaman
- j. Pengembangan dan penguatan inovasi pembelajaran berkualitas
- k. Pengembangan dan penguatan kurikulum pendidikan tinggi keagamaan yang adaptif
- l. Peningkatan Aksesibilitas dan Keterjangkauan Teknologi Pembelajaran
- m. Peningkatan layanan pembelajaran sepanjang hayat
- n. Penguatan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal pendidikan tinggi keagamaan
- o. Penerapan dan pengembangan kebijakan diferensiasi misi perguruan tinggi keagamaan
- p. Pengembangan Diversifikasi dan Peningkatan Sumber Pendanaan Pendidikan Tinggi keagamaan
- q. Penguatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Anggaran Pendidikan Tinggi keagamaan
- r. Penguatan Kapasitas dan Kepemimpinan di Perguruan Tinggi keagamaan
- s. Reformasi Tata Kelola dan Pengembangan Karir Dosen
- t. Pengembangan program upskilling dan reskilling bagi dosen dan tenaga kependidikan
- u. Pengembangan kurikulum LPTK yang adaptif untuk membangun kompetensi guru termasuk memfasilitasi pendidikan inklusif
- v. Penyelenggaraan prodi pendidikan keguruan yang diselaraskan dengan proyeksi kebutuhan
- w. Pengintegrasian LPTK dan program profesi guru termasuk untuk mengakomodasi sertifikasi double-major
- x. Penguatan LPTK dalam penyelenggaraan program induksi untuk guru pemula
- y. Peningkatan Relevansi kurikulum dan kualitas pembelajaran pendidikan tinggi keagamaan vokasi terhadap perkembangan DUDIKA.
- z. Perluasan layanan pendidikan tinggi vokasi untuk mengakomodasi pembelajaran sepanjang hayat bagi masyarakat.
- aa. Penguatan penjaminan mutu dan standard pelaksanaan diversifikasi layanan pendidikan tinggi.
- bb. Peningkatan kompetensi dan mobilitas dosen dan instruktur perguruan tinggi keagamaan.
- cc. Perluasan cakupan serta bidang sertifikasi kompetensi dan profesi mahasiswa dan dosen/instruktur perguruan tinggi keagamaan.

- dd. Peningkatan kolaborasi dan mobilitas pembelajaran dan penelitian bagi mahasiswa dan dosen lingkup nasional dan internasional
- 7. Peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan melalui budaya yang bersih dan melayani berbasis digital.
 - a. Mendorong implementasi budaya kerja yang bersih, jujur, dan profesional melalui kode etik ASN, sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*), dan pengawasan internal yang akuntabel.
 - b. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk menghadirkan layanan publik yang cepat, transparan, efisien, dan terintegrasi melalui pengembangan aplikasi layanan digital dan digitalisasi dokumen layanan.
 - c. Mendorong penerapan SPBE secara menyeluruh dalam proses administrasi dan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan terukur.
 - d. Menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi berbasis kebutuhan digitalisasi birokrasi bagi ASN agar mampu menjalankan tugas-tugas berbasis teknologi dengan optimal.
 - e. Menyederhanakan struktur organisasi dan prosedur kerja melalui redesign proses bisnis yang lebih lincah, terfokus pada hasil (*result-oriented*), dan mampu merespons kebutuhan masyarakat secara real-time.
 - f. Memperkuat sistem evaluasi kinerja berbasis indikator yang jelas dan dapat diukur, serta mengaitkan hasil kinerja dengan pemberian reward dan sanksi secara proporsional.
 - g. Mengembangkan ekosistem data terbuka (*open government*) untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan serta pengambilan keputusan publik.
 - h. Meningkatkan satker WBK/WBBM
 - i. Satu Data Kemenag dan Satu Akses Layanan (Architecture Enterprise SPBE dan Integrasi Sistem Informasi) termasuk digitalisasi layanan dan pengawasan/pengendalian
 - j. Pemanfaatan Data Terpadu dalam pengambilan kebijakan layanan bidang agama dan pendidikan agama/keagamaan
 - k. Implementasi Manajemen Talenta, Sistem merit dan Reformasi Birokrasi
 - l. Peningkatan kompetensi ASN Kementerian Agama yang smart dan moderat
 - m. Penerapan konsep Green pesantren, green campus, dan green building (Efisiensi Energi, Penggunaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan, Pengelolaan Air dan Limbah) di Kantor Kementerian Agama pusat dan daerah, rumah ibadah dan lembaga pendidikan agama dan keagamaan

C. Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi merupakan panduan umum yang dibutuhkan Kementerian Agama untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan dalam urusan pemerintahan di bidang agama dan pendidikan sekaligus mendukung pencapaian sasaran strategis tahun 2025–2029. Penyusunan kerangka ini mengacu pada UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 59/2024 tentang RPJPN 2025–2045, Perpres No. 12/2025 tentang RPJMN 2025–2029, serta Permen PPN No. 10/2023 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L. Pada periode ini, akan disusun 17 regulasi yang mencakup 2 UU, 2 PP, 1 Perpres, dan 12 PMA

untuk mendukung perubahan kelembagaan, kebijakan strategis, serta melengkapi regulasi yang belum tercapai pada periode sebelumnya, sehingga dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan pembangunan bidang agama.

Penjabaran lengkap terhadap dokumen kerangka regulasi, berikut :

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyele- saian
1.	RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan	Perubahan ini perlu dilakukan dalam hal RUU Sisdiknas dilakukan perubahan, maka Peraturan Pelaksananya dimungkinkan untuk berubah.	- Sekretaris Jenderal (Biro Hukum) - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam; - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen; - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik; - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu; - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha; - Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Keagamaan - Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu.	- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains	2025
2.	Penyusunan RPP Perubahan atas Perpres Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama	1. Penajaman Fungsi Kementerian Agama; 2. Penataan Fungsi Direktorat Jendral Pendidikan Islam; 3. Pembentukan Direktorat Jendral Pesantren, dan 4. Penghapusan materi mengenai Direktorat Jendral	- Sekretaris Jenderal (Biro Hukum, Biro Ortala dan Biro Perencanaan) - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam; -	- Kementerian Haji dan Umrah	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyele-saian
		Penyelenggaraan Haji dan Umrah			
3.	RPP perubahan atas PP No 39/2021 ttng Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	Amanat Perpres BPJPH	- Sekretaris Jenderal (Biro Hukum)	- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;	2025
4.	RPerpres tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama (KUB)	Penting untuk memperkuat upaya pemerintah dalam menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama, melalui regulasi yang mampu mendorong keterlibatan semua pihak— baik negara, tokoh agama, maupun masyarakat— dalam menyelesaikan potensi konflik keagamaan dan memperkuat toleransi di tengah keberagaman.	- Pusat Kerukunan Umat Beragama; - Sekretaris Jenderal (Biro Hukum)	- Kementerian Dalam Negeri - Komnas HAM	2025
5.	Revisi Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama	Penyelerasan terhadap revisi Pearturan Presiden Nomor 152 terkait Direktoat Haji dan Umrah dengan penajaman revisi pada : • Penajaman Fungsi Kementerian Agama; • Penataan Fungsi Direktorat Jendral Pendidikan Islam; • Pembentukan Direktorat Jendral Pesantren, dan • Penghapusan materi mengenai Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah	- Sekretaris Jenderal (Biro Hukum, Biro Ortala dan Biro Perencanaan) - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;	- Sekretariat Jendral - Direktorat Jendral Pendidikan Islam - Biro Hukum - Biro Organisasi dan Tata Laksana - Biro Perencanaan dan Penganggar an	2025
6.	RPMA tentang Perubahan atas PMA Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Kementerian Agama	Perlunya upaya perlindungan anak secara holistik dari berbagai bentuk kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, tidak terbatas pada kekerasan seksual saja.	- Sekjen	- Sekjen	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
7.	RPMA tentang Perubahan atas PMA 16 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Agama di Sekolah	Penguatan pengelolaan pembelajaran dan standarisasi penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah umum	- Sekjen dan Pendis	- Sekjen; dan Pendis	2027
8.	RPMA tentang Perubahan PMA 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam	Penyesuaian ketentuan mengenai pengaturan pendidikan Keagamaan Islam berdasarkan PP 55 Tahun 2007 dan UU Pesantren. Penguatan penyelenggaraan Pendidikan Quran dan Pendidikan Diniyah Takmiliah	- Sekjen dan Pendis	- Sekjen dan Pendis	2028
9.	RPMA tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau	Pengakuan kompetensi dan peningkatan efektifitas pembelajaran	- Sekjen, Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	- Sekjen, Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	2025
10.	Revisi PMA 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah	Harmonisasi kebijakan mengenai standar kompetensi kepala madrasah dan penambahan ketentuan seleksi kepala Madrasah Unggulan	- Sekjen dan Pendis	- Sekjen dan Pendis	2025
11.	RPMA tentang Perubahan atas PMA 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah	Penguatan pengelolaan dan peningkatan layanan madrasah	- Sekjen dan Pendis	- Sekjen dan Pendis	2026
12.	RPMA tentang Organisasi dan Tata Kerja Madrasah	Penguatan organisasi dan kelembagaan madrasah	- Sekjen dan Pendis	- Sekjen dan Pendis	2026
13.	RPMA tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri	Standarisasi pembentukan organ Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dalam rangka Peningkatan Layanan dan Penguatan organisasi dan kelembagaan PTKN	- Sekjen, Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	- Sekjen, Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	2027
14.	RPMA tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Keagamaan	Standarisasi penyusunan statuta bagi PTK dalam rangka penguatan pengelolaan PTK	- Sekjen, Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	- Sekjen, Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik,	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyele-saian
				Bimas Hindu, Bimas Buddha	
15.	RPMA tentang Kemasjidan	<i>Masjid/Musala di Indonesia sangat banyak, beragam tipologinya, dan umumnya dikelola oleh masyarakat. Karena berkaitan dgn pelayanannya untuk umat/masyarakat, maka pengaturan tata kelolanya diperlukan. Pemerintah hadir membersamai transformasi masjid menjadi lebih profesional, moderat, berdaya, dan berdampak. Untuk itu, diperlukan regulasi yang lebih memadai dan dapat memayungi pembinaan tsb. Secara teknis, regulasi ini menjadi omnibus terhadap intisari regulasi Dirjen Bimas yg ada, dan berupaya menjawab kondisi dan kebutuhan aktual dan faktual di masyarakat.</i>	-	-	
16.	Revisi Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama	Adanya pengurangan jumlah pusat pada Badan, yang semula 5 pusat menjadi hanya 4 pusat, sedangkan dalam naskah akademik yang diusulkan oleh BMBPSDM adalah sebanyak 5 Pusat Resetrukturisasi Pusat Penilaian Buku Agama, Lektur, dan Literasi Keagamaan dari Sekretariat Jenderal ke BMBPSDM	- BMBPSDM	- KemenPANR B,Kemenku m, Sekretariat Jenderal Kemenag, Pusbangkom	2025
17.	Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Keagamaan	Adanya perubahan nomenklatur serta tugas dan fungsi Badan Litbang dan Diklat menjadi Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berimplikasi terhadap perubahan nomenklatur serta tugas dan fungsi unit pelaksana teknis dibawahnya Memberikan kejelasan kedudukan, kewenangan, tugas, fungsi, serta tata kerja UPT pengembangan kompetensi SDM Keagamaan	- BMBPSDM	- KemenPANR B, Kemenkum, Sekretariat Jenderal Kemenag, Pusbangkom	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyele-saian
18.	Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Strategi Kebijakan Bidang Agama	Adanya perubahan nomenklatur serta tugas dan fungsi Badan Litbang dan Diklat menjadi Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berimplikasi terhadap perubahan nomenklatur serta tugas dan fungsi unit pelaksana teknis dibawahnya Memberikan kejelasan kedudukan, kewenangan, tugas, fungsi, serta tata kerja Balai Litbang Agama pasca fungsi penelitian dan pengembangan sudah tidak boleh ada selain di BRIN	- BMBPSDM	- KemenPANR B, Kemenkum, Sekretariat Jenderal Kemenag, Pustrajak	2025
19.	Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an	Adanya perubahan nomenklatur serta tugas dan fungsi Badan Litbang dan Diklat menjadi Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berimplikasi terhadap perubahan nomenklatur serta tugas dan fungsi unit pelaksana teknis dibawahnya Memberikan kejelasan kedudukan, kewenangan, tugas, fungsi, serta tata kerja Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an	- BMBPSDM	- KemenPANR B, Kemenkum, Sekretariat Jenderal Kemenag, LPMQ	2025
20.	Perubahan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama	Adanya perubahan Nomenklatur Kementerian yang menjadi anggota Sekretariat Bersama Pembaharuan nomenklatur Kementerian/Lembaga sesuai dengan yang berlaku dalam Kabinet Merah Putih	- BMBPSDM	- Kemenkum, Sekretariat Jenderal Kemenag, Kemenko PMK	2025
21.	Rancangan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Moderasi Beragama	Adanya ketentuan dalam KMA 450 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada RA, MI, MTs, MA, dan MAk bahwa Madrasah wajib memberikan kegiatan kokurikuler yang mengandung unsur moderasi beragama bagi peserta didik. Serta perlu penambahan bentuk pengembangan dalam kegiatan penguatan moderasi beragama yang berupa Film, Musik dan	- BMBPSDM	- KemenPANR B, Kemenkum, Sekretariat Jenderal Kemenag	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyele-saian
		Kegiatan Kebudayaan Terciptanya regulasi yang harmonis dalam norma penguatan moderasi beragama			
22.	Rancangan Keputusan Menteri Agama tentang panduan pemantauan dan evaluasi penguatan moderasi beragama pada Kementerian/Lemb aga	Sebagai tindak lanjut dari PMA Nomor 3 Tahun 2024 dan juga belum adanya pengaturan secara teknis tata cara pemantauan, dan evaluasi terhadap penguatan moderasi beragama pada K/L Terwujudnya keseragaman dalam proses pemantauan dan evaluasi implementasi moderasi beragama pada K/L	- BMBPSDM	- Sekretariat Jenderal Kemenag, Kemenko PMK	2025
23.	Rancangan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan KMA 455 Tahun 2024 tentang Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tim Pelaksana Harian Sekretariat Bersama	Adanya perubahan Nomenklatur Kementerian yang menjadi anggota Sekretariat Bersama Pembaharuan nomenklatur sesuai dengan yang berlaku dalam Kabinet Merah Putih	- BMBPSDM	- Sekretariat Jenderal Kemenag, Kemenko PMK	2025
24.	Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Sumber Daya Manusia pada Kementerian Agama	Adanya beberapa perubahan substansi maupun nomenklatur pelatihan dari Instansi Pembina Pelatihan (LAN) Terbitnya PMA 15 Tahun 2021 yang mensyahkan adanya loka diklat keagamaan sebagai lembaga pelatihan pada Kementerian Agama Penyempurnaan dan substansi pelatihan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Instansi Pembina Pelatihan, yaitu Lembaga Administrasi Negara, serta penambahan loka diklat keagamaan sebagai lembaga penyelenggara pelatihan	- BMBPSDM	- KemenPANR B, Kemenkum, Sekretariat Jenderal Kemenag, Pusbangkom	2025
25.	Revisi Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penerbitan, Pentashihan, dan Peredaran Mushaf Al-Qur'an	1. Perlu ada penambahan secara rinci terkait pencetakan mushaf Al-Quran 2. Belum adanya ketentuan pengelolaan limbah bahan cetak mushaf Al-Quran 3. Sanksi administratif belum memberikan efek	- BMBPSDM	- KemenPANRB, Kemenkum, Sekretariat Jenderal Kemenag, LPMQ	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyele-saian
		jera, sehingga perlu adanya sanksi pidana. Memberikan kepastian terhadap ketentuan pencetakan mushaf Al-Quran, tata Kelola pemusnahan limbah bahan cetak, akreditasi penerbit dan pencetak, dan ketentuan sanksi pidana bagi yang melanggar ketentuan			
26.	Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Formasi JF Pentashih Mushaf Al-Qur'an	Amanat dari PerMenPAN-RB Nomor 19 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an Memberikan kepastian penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an	- BMBPSDM	- KemenPANR B, Kemenkum, Sekretariat Jenderal Kemenag, LPMQ	2025
27.	Perubahan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Satu Akun Angka Standar Buku Internasional dan Layanan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Adanya perubahan nomenklatur serta tugas dan fungsi Badan Litbang dan Diklat menjadi Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Memberikan kejelasan terhadap kedudukan dan tata kerja perpustakaan dibawah Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	- BMBPSDM	- Perpustnas, Sekretariat Jenderal Kemenag, Sekretariat BMBPSDM	2025
28.	Rancangan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Kebudayaan tentang Relasi Agama dan Budaya		- BMBPSDM	- Kemenkum, Kemenbud, Sekretariat Jenderal, Sekretariat Badan, Pustrajak	2025
29.	Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang Penguatan Konsep Ekoteologi bagi Pengelola Rumah Ibadah		- BMBPSDM	- Kemenkum, Sekretariat Jenderal, Sekretariat Badan, Pustrajak, Ditjen Bimas semua Agama	2025
30.	Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang Pembinaan Lembaga Moderasi		- BMBPSDM	- Kemenkum, Sekretariat Jenderal, Sekretariat	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyele-saian
	Beragama di Masyarakat			Badan, Pustrajak	
31.	Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang tentang Standar Keluaran Kebijakan Pendidikan dan Keagamaan di lingkungan Kementerian Agama		- BMBPSDM	- Kemenkum, Sekretariat Jenderal, Sekretariat Badan, Pustrajak, LAN	2025
32.	Rancangan Surat Edaran Menteri Agama tentang Koordinasi Penyusunan Dokumen Kebijakan pada Kementerian Agama		- BMBPSDM	- Kemenkum, Sekretariat Jenderal, Sekretariat Badan, Pustrajak	2025

D. Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Pasal 25 UU No. 61/2024, seluruh kementerian dan lembaga negara harus bersinergi sebagai satu sistem pemerintahan untuk mencapai visi-misi Presiden, termasuk BPJPH dan BPKH di lingkungan Kementerian Agama. Transformasi kelembagaan diarahkan pada efektivitas, efisiensi, dan peningkatan indeks reformasi birokrasi melalui penguatan sistem kerja, regulasi yang harmonis, serta manajemen SDM berbasis meritokrasi dan teknologi digital. Kementerian Agama juga berperan dalam program prioritas nasional, seperti reformasi birokrasi, peningkatan pendidikan agama, digitalisasi layanan, pemberantasan kemiskinan, penguatan ekonomi keummatan, toleransi antarumat, serta pelestarian lingkungan. Investasi pada pendidikan agama dan keagamaan dipandang strategis karena memberikan manfaat sosial, budaya, dan moral yang mendukung terciptanya masyarakat yang rukun, adil, dan sejahtera.

Melalui kerangka kelembagaan di atas, hal yang diperlukan dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran strategis Kementerian Agama adalah sebagai berikut:

1. Transformasi kelembagaan Kementerian Agama dan instansi vertikal menjadi organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran pada masa transisi yang didukung sumberdaya manusia yang unggul ditargetkan tahun 2025.
2. Transformasi sumber daya manusia melalui sistem merit dan manajemen talenta secara transparan dan akuntabel mewujudkan ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa ditargetkan tahun 2026.
3. Transformasi digital Kementerian Agama dalam mewujudkan peningkatan pelayanan prima ditargetkan tahun 2027.

- 4. Penguatan transformasi kelembagaan, tata laksana, manajemen SDM berbasis analisis/evaluasi jabatan, beban kerja, dan peta jabatan yang terstandar ditargetkan tahun 2028
- 5. Transformasi kelembagaan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dan unit pelaksana teknis lainnya harus dilaksanakan secara selektif, akuntabel, dan berkontribusi pada penaikan indeks reformasi birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ditargetkan tahun 2029.
- 6. Penguatan transformasi jabatan, khususnya jabatan fungsional bidang agama menjadi kekuatan Kementerian Agama dalam mengemban amanah umat ditargetkan tahun 2029.

Struktur kelembagaan Kementerian Agama dirancang untuk memastikan tercapainya misi tersebut melalui koordinasi yang efektif antara tingkat pusat dan daerah. Pada tingkat pusat, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, serta Direktorat Jenderal Urusan Agama dan Pendidikan Keagamaan menjadi pilar utama dalam implementasi program-program prioritas. Sementara itu, pada tingkat daerah, Kantor Wilayah Kementerian Agama di Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Kantor Urusan Agama (KUA) berfungsi sebagai ujung tombak layanan langsung kepada masyarakat.

Sejak diundangkannya PMA No. 25 Tahun 2024, dan diperkuat melalui **PMA No. 33 Tahun 2024** tahun 2026, beberapa unit kerja baru yang memiliki peran penting untuk menunjang kinerja Kemenag adalah :

Tabel 2. 9 Unit Kerja Baru Kementerian Agama

Unit	Nomenklatur	Tugas	Fungsi
Puspenma	Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan	Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan pendidikan agama dan keagamaan	• Merumuskan kebijakan, rencana, program, dan kegiatan pembiayaan dari mulai Pendidikan Dasar Menengah pada lembaga pendidikan yang memiliki kekhasan agama dan Pendidikan Pesantren sampai ke Perguruan Tinggi Keagamaan baik negeri maupun swasta • Memberikan layanan beasiswa (dalam negeri & luar negeri), investasi pendidikan, PIP, KIP Kuliah, riset kolaboratif, dan kerjasama pendidikan lainnya • Melaksanakan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan biaya pendidikan

Unit	Nomenklatur	Tugas	Fungsi
Pusat Penilaian Buku Agama, Lektur, dan Literasi Keagamaan <i>(sering disebut Pusat Literasi atau Pusat Buku/ Literasi)</i>	Unit Pusat Penilaian Buku Agama, Lektur, dan Literasi Keagamaan	Bertanggung jawab atas penilaian buku-buku agama dan literasi keagamaan	Menyusun dan menjalankan penilaian atas kualitas buku agama serta materi literasi keagamaan untuk mendukung penyebaran pengetahuan agama yang akurat dan sehat (Balitbang Diklat Kemenag,
Pusdatin	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Unit untuk penguatan data dan informasi	Bertindak sebagai unit pusat untuk penguatan data dan pengelolaan teknologi informasi di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag)

Pada periode 2025–2029, arah kelembagaan Kementerian Agama berfokus pada digitalisasi layanan publik, peningkatan kapasitas pendidik, standarisasi pendidikan keagamaan, dan penguatan kolaborasi lintas elemen masyarakat. Digitalisasi diterapkan untuk mempercepat akses, meningkatkan efisiensi, dan menghadirkan layanan yang transparan, termasuk renovasi rumah ibadah dan penyelesaian konflik secara adil. Standarisasi pendidikan diterapkan melalui kurikulum yang terukur, metode pengajaran efektif, dan evaluasi objektif yang menanamkan nilai moderasi beragama. Kolaborasi pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat diperkuat melalui forum komunikasi dan program berbasis komunitas, sedangkan assessment pendidikan nasional pada 2028 menjadi dasar penyusunan peta jalan peningkatan kompetensi pendidik dan peserta didik. Pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2023, beberapa usulan kelembagaan alternatif meliputi:

- a. Pembentukan Unit Baru
Penambahan unit kerja baru yang bersifat strategis untuk menangani isu prioritas seperti Harmonisasi Standar Halal Nasional dan International serta program pendidikan yang inklusi berbasis Vokasi.
- b. Perubahan Nama dan Fungsi Unit
Selanjutnya terdapat reformasi nomenklatur terhadap unit tertentu untuk mencerminkan peran yang lebih strategis seperti pada unit Edukasi Keagamaan dan Dakwah Digital.
- c. Penguatan Unit Eksisting
Optimalisasi fungsi unit yang sudah ada turut diperhatikan pula melalui peningkatan kapasitas SDM dan integrasi teknologi seperti unit bagian Strategi dan Komunikasi Kelembagaan.

Untuk itu, di bawah ini ditampilkan usulan kelembagaan alternatif untuk Rencana Kelembagaan Strategis Kementerian Agama 2025-2029:

Tabel 2. 10 Rencana Kerangka Kelembagaan Strategis Kementerian Agama 2025-2029

No.	Unit	Deskripsi	Target Penyelesaian
1	Pusat Layanan keagamaan	Menyediakan layanan keagamaan yang terpadu dan mudah diakses dengan mengintegrasikan berbagai layanan seperti haji, umrah, pernikahan, zakat, wakaf, sertifikasi halal, pendidikan keagamaan, dan lainnya dalam satu pusat layanan (<i>one stop service</i>)	2025 s/d 2026
2	Bidang Fasilitasi Sertifikasi Halal	Memberikan fasilitasi dalam proses sertifikasi halal untuk pelaku usaha.	2025 s/d 2027
3	Subdirektorat Pendidikan Vokasi dan Inklusi	Meningkatkan akses pendidikan vokasi berbasis inklusi untuk kelompok rentan.	2025 s/d 2027
4	Subdirektorat Fasilitasi Profesi Guru	Mengelola pengembangan dan fasilitasi profesi guru melalui pelatihan dan sertifikasi.	2025 s/d 2027
5	Bagian Pengadaan dan Mutasi ASN	Mengelola proses pengadaan, penempatan, dan mutasi Aparatur Sipil Negara.	2025 s/d 2027
6	Bagian Pemetaan dan Pengelolaan Kompetensi ASN	Melakukan analisis kebutuhan kompetensi ASN serta penyusunan program pengembangan.	2025 s/d 2027
7	Subdirektorat Evaluasi dan Pengendalian Mutu Layanan Haji	Melakukan evaluasi dan pengendalian mutu layanan untuk meningkatkan pengalaman jemaah haji.	2025 s/d 2027
8	Subdirektorat Bina Kelembagaan dan Kerja Sama Zakat dan Wakaf	Meningkatkan koordinasi kelembagaan zakat dan wakaf serta menjalin kerja sama strategis.	2025 s/d 2027
9	Subdirektorat Edukasi, Inovasi, dan Kerja Sama Zakat dan Wakaf	Melakukan edukasi publik tentang zakat dan wakaf serta inovasi pengelolaannya.	2025 s/d 2027
10	Subdirektorat Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat	Melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas lembaga pengelola zakat.	2025 s/d 2027
11	Subdirektorat Pengawasan dan Pengamanan Harta Benda Wakaf	Mengawasi pengelolaan dan menjaga keutuhan aset wakaf.	2025 s/d 2027
12	Bagian Strategi Komunikasi dan Hubungan Kelembagaan	Meningkatkan strategi komunikasi publik dan membangun hubungan kelembagaan dengan pemangku kepentingan.	2025 s/d 2027

No.	Unit	Deskripsi	Target Penyelesaian
13	Subdirektorat Seni, Budaya, dan Siaran Keagamaan Islam	Mengembangkan seni, budaya, dan penyiaran berbasis nilai-nilai Islam untuk masyarakat.	2025 s/d 2027
14	Subdirektorat Pendidikan <i>Salafiyah</i> dan Kajian Kitab Kuning	Mendukung pengembangan pendidikan tradisional Islam berbasis kajian kitab klasik.	2025 s/d 2027
15	Direktorat Jenderal Pesantren	Memastikan kualitas pendidikan pesantren, santri, serta para tenaga pendidik pesantren yang lebih fokus pada penataan pesantren yang maslahat.	2025 s/d 2027
		Transformasi kelembagaan Kementerian Agama dan instansi vertikal menjadi organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran pada masa transisi yang didukung sumberdaya manusia yang unggul ditargetkan tahun 2025.	
		Transformasi sumber daya manusia melalui sistem merit dan manajemen talenta secara transparan dan akuntabel mewujudkan ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa ditargetkan tahun 2026.	
		Transformasi digital Kementerian Agama dalam mewujudkan peningkatan pelayanan prima ditargetkan tahun 2027	
		Penguatan transformasi kelembagaan, tata laksana, manajemen SDM berbasis analisis/evaluasi jabatan, beban kerja, dan peta jabatan yang terstandar ditargetkan tahun 2028	
		Transformasi kelembagaan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dan unit pelaksana teknis lainnya harus dilaksanakan secara	
		selektif, akuntabel, dan berkontribusi pada penaikan indeks reformasi birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan ditargetkan tahun 2029	

No.	Unit	Deskripsi	Target Penyelesaian
		Penguatan transformasi jabatan, khususnya jabatan fungsional bidang agama menjadi kekuatan Kementerian Agama dalam mengemban amanah umat ditargetkan tahun 2029.	
16	Pengembangan Struktur Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha	Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha dengan dua fungsi layanan yaitu layanan agama dan layanan pendidikan perlu melakukan pengembangan struktur organisasi khususnya pada Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha sehingga layanan pendidikan dan layanan agama berjalan optimal, yaitu dengan mengembangkan Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha menjadi 2 Direktorat yaitu: a. Direktorat Urusan Agama Buddha b. Direktorat Pendidikan Buddha	2026
17	Perubahan bentuk Perguruan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten menjadi Institut	Perubahan bentuk perguruan tinggi keagamaan Buddha negeri dari Sekolah Tinggi menjadi Institut Agama Buddha Negeri didasarkan pada kebutuhan masyarakat, pengembangan ilmu pengetahuan	2026
		Teknologi dan/atau seni, kebutuhan pembangunan nasional dan pertumbuhan potensi mahasiswa serta untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan Buddha dan	
18	Perubahan bentuk Perguruan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah menjadi Institut	Perubahan bentuk perguruan tinggi keagamaan Buddha negeri dari Sekolah Tinggi menjadi Institut Agama Buddha Negeri didasarkan pada kebutuhan masyarakat, pengembangan ilmu pengetahuan Teknologi dan/atau seni, kebutuhan pembangunan nasional dan pertumbuhan potensi mahasiswa serta untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan Buddha	2026

No.	Unit	Deskripsi	Target Penyelesaian
19	Perubahan PMA Nomor 15 Tahun 2022 tentang pendirian, perubahan, dan pencabutan izin perguruan tinggi keagamaan swasta	Urgensi dari perubahan PMA ini: 1. Peningkatan Tata Kelola Pendidikan Tinggi Keagamaan Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi, efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pendirian, perubahan, serta pencabutan izin perguruan tinggi keagamaan swasta. 2. Penyesuaian dengan Perkembangan Hukum dan Kebijakan Peraturan sebelumnya dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebijakan terbaru, sehingga diperlukan penyesuaian untuk memastikan relevansi dan keberlanjutan regulasi dalam konteks pendidikan tinggi keagamaan. 3. Perlindungan terhadap Masyarakat Pencabutan izin terhadap perguruan tinggi keagamaan swasta yang tidak memenuhi ketentuan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian akibat layanan pendidikan yang tidak sesuai standar. 4. Peningkatan Kualitas Pendidikan Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan tinggi keagamaan, sehingga dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas di Indonesia	2026
20	Pengusulan STP Santo Petrus Kefamenanu dan STP Santo Bonaventura Medan sebagai LPTK dan Penyelenggaraan PPG	Perubahan pada isi Lampiran: Saat ini baru ada 2 LPTK Penyelenggaraan PPG yaitu STPKat Santo Fransiskus Asisi Semarang dan STK Santo Yakobus Memenuhi syarat untuk jadi LPTK dan untuk melayani akses guru-guru wilayah Timur	2026

No.	Unit	Deskripsi	Target Penyelesaian
21	Rancangan Revisi PP 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Keagamaan	Dalam PP 55 Tahun 2007 pada Ditjen Bimas Katolik belum mengakomodir satuan Pendidikan Keagamaan Katolik Tingkat Dasar (TK,SD, dan SMP)	2026
22	Pengusulan RPMA Penegerian SMAK Solor dan SMAK Tambolaka	Meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan Pendidikan dan 2 SMAK ini memenuhi syarat untuk perubahan bentuk dari swasta ke negeri	2026
23	Keputusan Direktur Jenderal Bimas Katolik tentang Penetapan Sekolah Unggul Keagamaan Katolik	Tindak lanjut apa yg menjadi program prioritas ASTA CITA Presiden dan salah satu Lembaga Pendidikan keagamaan Katolik tingkat Menengah adalah yang menjadi pilot project menjadi sekolah unggul adalah SMAK Negeri Ende	2026
24	Usulan RPMA tentang Ortaker SMAK Negeri	Peraturan sebagai dasar hukum yang ada di dalam PMA Nomor 8 Tahun 2019 yang lama perlu penyesuaian karena tidak berlaku lagi	2026
25	Perubahan Nomenklatur pada Direktorat GTK	Penyelarasan beberapa nomenklatur yang di Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Dirjen Pendis sesuai dengan Tugas dan Fungsi	2026
26	STAKPN Sentani	Peningkatan status STAKPN Sentani menjadi Institut untuk memperluas program studi, meningkatkan kapasitas akademik, dan memperkuat daya saing di tingkat nasional.	2025 - 2026
27	STAK Teruna Bhakti Yogyakarta	Alih status STAK Teruna Bhakti menjadi Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri (STKN) guna memperkuat legitimasi, kualitas akademik, serta memperluas kesempatan pendidikan keagamaan Kristen di Yogyakarta.	2025 - 2027
28	Institut Agama Kristen Ambon, Tarutung, Manado Menjadi Universitas	Transformasi tiga Institut Agama Kristen menjadi Universitas untuk memperluas fakultas, meningkatkan kapasitas riset, dan menjawab kebutuhan SDM Kristen di berbagai bidang ilmu.	2025 - 2027
29	Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya, Toraja dan Kupang untuk menambahkan Program Studi dan Fakultas	Penambahan program studi dan fakultas baru untuk memperluas akses, meningkatkan kualitas akademik, dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan zaman.	2025 - 2029

No.	Unit	Deskripsi	Target Penyelesaian
30	1. Sekolah Tinggi Agama Kristen Merauke Prov. Papua Selatan 2. Sekolah Tinggi Agama Kristen Diaspora Wamena Prov. Papua Pegunungan 3. Sekolah Tinggi Agama Kristen Waropen Papua Utara 4. STAK Nabire Papua Tengah 5. STT IKAT Sambab Manokwari Provinsi Papua Barat	Penegerian PTKKS diharapkan menjadi langkah tepat untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kapasitas akademik, diwilayah Papua	2025 - 2029
31	Penegerian Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (SPKK) 1. Provinsi Maluku a. Sekolah Menengah Pertama Teologi Kritsen (SMPTK) Patti Maluku Barat Daya; b. SMPTK Gereja Masehi Injili Halmahera (GMIH) Eppata Duono Maluku Utara c. Sekolah Menengah Atas Kristen (SMAK) Rambatu Provinsi Maluku 2. Provinsi Papua a. Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Kadesi Arso VI Keerom, Papua; b. SMTK YPK Ebenhaezer Senggi, Kabupaten Keerom Provinsi Papua; c. SMAK Sion Meukisi, Kabupaten Jayapura Provinsi Papua. d. SMTK Petrus Kafiari Kabupaten Biak	Mengusulkan Transformasi kelembagaan SPKK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penataan dan penguatan SPKK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kurikulum, akreditasi, dan tata kelola.	2026 - 2029

No.	Unit	Deskripsi	Target Penyelesaian
	3. Nusa Tenggara Timur a. SMTK Benfomeni Kab. Timor Tengah Selatan; b. SMTK Waikabubak Kab. Sumba Barat. c. SMAK Sabu Timur, Kab Sabu Raijua d. SMAK Arastamar Mantap Alor Kab Alor e. SMTK Oelbubuk Kab Timor Tengah Selatan 4. Sulawesi Utara SMTK Wisong kalamatta Sereh Kab. Kep. Talaud Sulawesi Utara 5. Sulawesi Tengah a. SMPTK Swastiastu Tolai Kab. Parigi Moutong Prov. Sulawesi Tengah 6. Kalimantan Barat a. SMTK Kalimantan Barat 7. Sumatera Barat a. Sekolah Dasar, Lentera Kasih, Siberut Selatan kab Kep Mentawai; b. Sekolah Menengah Pertama, Lentera Kasih, Siberut Selatan kab Kep Mentawai; c. Sekolah Menengah Atas, Lentera Kasih, Siberut Selatan kab Kep Mentawai		
32	Rancangan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2027 Tentang Pendidikan Keagamaan	Penyusunan revisi regulasi agar lebih relevan dengan dinamika pendidikan keagamaan Kristen, reformasi birokrasi, dan kebutuhan layanan publik modern.	2025 - 2027

No.	Unit	Deskripsi	Target Penyelesaian
34	Transformasi digital untuk mendukung pelayanan prima kepada umat.	Digitalisasi sistem layanan, pengelolaan data, dan informasi Ditjen Bimas Kristen guna mewujudkan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel.	2026-2029
35	Pengembangan Struktur Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dengan penambahan unit eselon II: 1. Direktorat Pendidikan Tinggi Kristen 2. Direktorat Penerangan Agama Kristen	Pengembangan struktur Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pelayanan yang semakin kompleks di bidang pendidikan dan urusan Agama Kristen sebagai berikut: Semula Direktorat Pendidikan dibagi menjadi dua unit kerja, yaitu: 1. Direktorat Pendidikan Tinggi dan 2. Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kristen. Sementara itu, Direktorat Urusan Agama diubah menjadi: 1. Direktorat Urusan Agama Kristen dan 2. Direktorat Penerangan Agama Kristen. Perubahan struktur ini dimaksudkan untuk memperjelas fungsi, tugas, serta kewenangan masing-masing Direktorat agar pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat Kristen lebih efektif dan terarah.	2026-2029
36	Pengembangan Struktur Kasie/ penyelenggara	Pengembangan struktur Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pelayanan yang semakin kompleks	2026 - 2029
37	Pengembangan Struktur, Perubahan Pembimbing Masyarakat Kristen (Pembimas) menjadi Kepala Bidang (kabid)	Pengembangan struktur Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pelayanan yang semakin kompleks	2026 - 2029
38	Ditjen Bimas Kristen	Penguatan tata kelola dan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis analisis jabatan, evaluasi jabatan, beban kerja, dan peta jabatan	
39	Seluruh Unit Ditjen Bimas Kristen	Penguatan sistem merit dan manajemen talenta untuk ASN serta peningkatan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan.	2025-2029

No.	Unit	Deskripsi	Target Penyelesaian
40	Perubahan bentuk IAHN Tampung Penyang Palangkaraya, IAHN Gde Pudja Mataram, dan IAHN Mpu Kuturan menjadi Universitas	Perubahan bentuk perguruan tinggi keagamaan Hindu negeri dari Institut menjadi Universitas didasarkan pada kebutuhan masyarakat : 1. Pengembangan ilmu pengetahuan Teknologi dan/atau seni 2. Kebutuhan pembangunan nasional 3. Pertumbuhan potensi mahasiswa Meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan Hindu	2026 - 2029
41	Penegerian Widyalyaya	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan Hindu. Satuan Pendidikan Widyalyaya yang akan di Negerikan: 1. Adi Widyalyaya Sutasoma Nabire 2. Adi Widyalyaya Gunadarma Luwuk Banggai 3. Adi Widyalyaya Dwitawana Saraswati Kolaka Timur 4. Adi Widyalyaya Gurukula Bangli 5. Madyama Widyalyaya Rsi Markandeya Taro 6. Madyama Widyalyaya Gurukula Bangli 7. Madyama Widyalyaya Jnana Dharma Sastra Singaraja 8. Utama Widyalyaya Ganesha Parwati Banyuwangi	2026 -2029
42	Pendirian Widyalyaya Negeri oleh Pemerintah	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan Hindu. Pendirian Widyalyaya Negeri akan dilaksanakan di wilayah Bali.	2026 -2029
43	Penambahan Fakultas dan Program Studi pada PTKHN	Memperluas akses, meningkatkan kualitas akademik, dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan zaman. 1. Penambahan Fakultas Saintek pada Universitas Hindu Negeri IGB Sugriwa Denpasar. 2. Penambahan program studi baru pada IAHN Gde Pudja Mataram	2026 - 2027

No.	Unit	Deskripsi	Target Penyelesaian
44	Transformasi digital tata kelola dan layanan Ditjen Bimas Hindu	Digitalisasi sistem layanan, pengelolaan data, dan informasi Ditjen Bimas Hindu guna mewujudkan pelayanan yang cepat, akurat, mudah dan bermutu (PANCADATU)	2026 - 2029
45	Penyempurnaan Struktur Penyelenggara Hindu menjadi Seksi Bimas Hindu	Penyempurnaan struktur Penyelenggara Hindu pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se Indonesia. Hal tersebut dimaksudkan untuk kesetaraan, keadilan dan proposional layanan keagamaan Hindu.	2026 - 2029
46	Penyempurnaan Struktur Pembimbing Masyarakat Hindu (Pembimas) menjadi Bidang Bimas Hindu	Penyempurnaan struktur Pembimas Hindu pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi se Indonesia. Hal tersebut dimaksudkan untuk kesetaraan, keadilan dan proporsional layanan keagamaan Hindu.	2026 - 2029
47	Penyempurnaan / Pembentukan struktur Bidang Bimas Hindu.	Penyempurnaan struktur Bidang Bimas Hindu pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo dan Kalimantan Utara. Hal tersebut dimaksudkan untuk kesetaraan, keadilan dan proporsional layanan keagamaan Hindu.	2026 - 2029
48	Penyempurnaan / Pembentukan struktur Seksi Bimas Hindu.	Penyempurnaan struktur Seksi Bimas Hindu pada Kantor Kemenag Kabupaten/Kota Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Bogor, Bekasi, Karanganyar, Sragen, Boyolali, Jepara, Gunung Kidul, Kediri, Lumajang, Mesuji, Pringsewu, Kota Manado, Tana Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Luwuk, Pasangkayu. Hal tersebut dimaksudkan untuk kesetaraan, keadilan dan proporsional layanan keagamaan Hindu.	2026 - 2029
49	Pembentukan struktur Bidang Bimas Hindu pada Provinsi baru.	Pembentukan struktur Bidang Bimas Hindu pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang akan dibentuk di Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat Daya dan Papua Pegunungan. Hal tersebut dimaksudkan untuk kesetaraan, keadilan dan proporsional layanan keagamaan Hindu.	2026 - 2029

No.	Unit	Deskripsi	Target Penyelesaian
50	Pembentukan Struktur Subdirektorat Seni dan Budaya Keagamaan Hindu Pada Direktorat Urusan Agama Hindu	Mengembangkan seni dan budaya berbasis nilai-nilai Hindu untuk masyarakat.	2026 - 2029
51	Subdirektorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) pada Direktorat Pendidikan Hindu	Meningkatkan kualitas layanan pada Guru dan Tenaga Kependidikan.	2026 - 2029

Usulan kelembagaan alternatif ini diharapkan dapat meningkatkan fleksibilitas dan kapabilitas organisasi dalam menghadapi tantangan masa depan. Implementasi usulan ini memerlukan dukungan regulasi yang jelas, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan terutama pada Kementerian Agama Republik Indonesia.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Agama serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Kemenag menetapkan 5 tujuan yang dilengkapi dengan 7 sasaran strategis, yang merupakan kondisi yang hendak dicapai oleh Kemenag dalam 5 (lima) tahun ke depan, seperti tertera pada BAB II. Adapun tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis diukur menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai berikut :

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, maka ditetapkan berbagai Sasaran Program untuk 5 Program di Kemenag, sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen

Sasaran Program (*Outcome*):

- a. Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif , dengan indikator kinerja program Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- b. Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel dengan indikator kinerja program:
 1. Indeks Kapabilitas APIP (IACM)
 2. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

2. Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama

Sasaran Program (*Outcome*):

- a. Meningkatnya pemahaman dan praktek keagamaan maslahat dalam mewujudkan kehidupan beragama yg rukun, dengan indikator kinerja program:
 1. Persentase rekomendasi *Early Warning System* yang ditindaklanjuti
 2. Indeks kesalehan Umat Beragama
 3. Persentase lembaga agama dan lembaga sosial keagamaan yang memenuhi standar pengelolaan

Sasaran Kegiatan (SK):

1. Terlaksananya KUA sebagai pusat cegah konflik Agama, dengan Indikator Kinerja Kegiatan Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS.
2. Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama, dengan Indikator Kinerja Kegiatan:
 - a. Persentase peningkatan dialog kerukunan agama difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS
 - b. Persentase peningkatan audiens MTQ / Pesparawi/ Pesparani/ Utsawa Dharma Gita/ Swayamvara Tripitaka Gatha
 - c. Persentase peningkatan peserta event seni budaya agama
 - d. Persentase peningkatan partisipan perayaan hari besar keagamaan yang diselenggarakan Negara
 - e. Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan
3. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Islam dan Kualitas Pengawasan dalam Pemanfaatan Produk Halal, dengan Indikator Kinerja Kegiatan:
 - a. Persentase rekomendasi hasil konsultasi halal yang diterbitkan

- b. Nilai literasi halal
- c. Tingkat kepatuhan lembaga/masyarakat/Pelaku Usaha Islam terhadap pelaksanaan peraturan
- b. Terwujudnya transformasi layanan keagamaan yang berkualitas, merata, dan inklusif, dengan indikator program:
 - 1. Nilai Layanan penyuluhan Agama
 - 2. Persentase Calon Pengantin yang mendapatkan Bimbingan Perkawinan
 - 3. Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Bimbingan Keagamaan Keluarga
 - 4. Indeks Kepuasan Layanan KUA
 - 5. Persentase sarana dan prasarana layanan peribadatan yang memenuhi standar
 - 6. Indeks Literasi kitab suci agama
 - 7. Persentase penduduk miskin yang menerima manfaat dana sosial keagamaan untuk peningkatan kesejahteraan
 - 8. Persentase lembaga dana sosial keagamaan yang akuntabel dan profesional
 - 9. Nilai Kepuasan Layanan Pentashihan al-Qur'an dan Edukasi al-Qur'an
 - 10. Indeks Kepuasan Jamaah Haji Dalam Negeri dan Luar Negeri

Sasaran Kegiatan (SK):

- 1. Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak, dengan Indikator Sasaran Kegiatan:
 - a. Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)
 - b. Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama
 - c. Persentase fasilitator bimbingan perkawinan yang tersertifikasi
 - d. Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan
 - e. Persentase rumah ibadah yang memperoleh bantuan sarana dan prasarana peribadatan
 - f. Persentase peningkatan kitab suci yang disediakan
 - g. Persentase peningkatan naskah & buku keagamaan Khonghucu yang layak edar/ sesuai kaidah.
 - h. Persentase jumlah calon penerima dana kebajikan terintegrasi basis data terpadu nasional
 - i. Persentase Lembaga dana kebajikan yang meningkat kompetensi tata kelola untuk mendukung penanggulangan kemiskinan dan memajukan kesejahteraan
 - j. Persentase calon pengantin yang mendapatkan Bimbingan Perkawinan Agama Islam
 - k. Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh bimbingan pra nikah
 - l. Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Bimbingan Keagamaan Keluarga Sakinah
 - m. Persentase KUA Berdaya (Excellent)
 - n. Persentase KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana
 - o. Persentase peningkatan jumlah peristiwa nikah
 - p. Persentase penghulu yang memperoleh sertifikat kompetensi
 - q. Nilai Layanan Penyuluh Agama Islam

- r. Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)
 - s. Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Islam
 - t. Persentase sarana prasarana peribadatan agama Islam yang memenuhi standar
 - u. Persentase peningkatan kitab suci yang disediakan
 - v. Persentase peningkatan naskah & buku keagamaan Islam yang layak edar/ sesuai kaidah
 - w. Persentase peningkatan perpustakaan masjid yang sesuai standar
 - x. Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat
 - y. Persentase peningkatan lembaga agama yang memperoleh manfaat layanan syariah dan hisab rukyat
 - z. Persentase jumlah mustahik Zakat/calon penerima dana sosial keagamaan Islam terintegrasi basis data terpadu nasional
 - aa. Persentase kolaborasi program pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan
 - bb. Persentase harta benda wakaf yang dikelola dan dikembangkan produktif
 - cc. Persentase advokasi pengamanan Harta Benda Wakaf (mutasi, sengketa) yang ditindaklanjuti
 - dd. Persentase Lembaga dana sosial keagamaan/Zakat yang diawasi sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan profesional
 - ee. Persentase Lembaga Wakaf yang diawasi sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan profesional
 - ff. Persentase layanan izin pembentukan lembaga amil zakat dan wakaf
 - gg. Persentase Akta Ikrar Wakaf Yang Diterbitkan
2. Meningkatkan kualitas layanan pentashihan, pengkajian dan edukasi al Qur'an, dengan Indikator Sasaran Kegiatan:
- a. Tingkat kepatuhan penerbit pada regulasi penerbitan Al-Qur'an
 - b. Persentase peningkatan Surat Tanda Tashih/Izin Edar Mushaf Al Qur'an
 - c. Persentase peningkatan masyarakat yang memanfaatkan literasi Al-Qur'an digital
 - d. Nilai kualitas pengembangan dan pengkajian al- Qur'an
 - e. Nilai layanan Museum Bayt Al Qur'an
 - f. Persentase peningkatan pengunjung Bayt Al- Qur'an dan Museum Istiqlal
3. Meningkatkan kualitas pelayanan jemaah haji, dengan Indikator Sasaran Kegiatan:
- a. Tingkat Kepuasan layanan Asrama Haji
 - b. Persentase calon jemaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota
 - c. Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar
 - d. Persentase jumlah daging /Dam yang disalurkan ke penduduk Indonesia
4. Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji, dengan Indikator Sasaran Kegiatan:

- a. Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan
- b. Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu
5. Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji, dengan Indikator Sasaran Kegiatan:
 - a. Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75
 - b. Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji
6. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah, dengan Indikator Sasaran Kegiatan Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A);
 - a. Lembaga penyelenggara haji khusus;
 - b. Lembaga penyelenggara umrah
7. Meningkatnya pemanfaatan dana operasional haji yang efektif, dengan Indikator Sasaran Kegiatan Opini laporan pengelolaan dana operasional teraudit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
8. Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu, dengan Indikator Sasaran Kegiatan Tingkat Kepuasan pengakses layanan *website* haji.

3. Program Wajib Belajar 13 Tahun

Sasaran Program (*Outcome*):

- a. Meningkatnya pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah, dengan indikator kinerja program:
 1. Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif

Sasaran Kegiatan (SK):

1. Meningkatnya pemerataan akses Pendidikan Keagamaan yang berkualitas, dengan Indikator Sasaran Kegiatan:
 - a. Persentase madrasah dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras
 - b. Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif
 - c. Persentase peningkatan jumlah siswa madrasah pada satuan pendidikan
 - d. Persentase peningkatan jumlah siswa
 - e. Persentase madrasah pada satuan pendidikan daerah 3 T
 - f. Persentase Anak Kelas 1 MI yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA)
 - g. Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah
 - h. Persentase siswa dalam satu kohort yang lulus tepat waktu

4. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

Sasaran Program (*Outcome*):

- a. Meningkatnya kualitas pengajaran dan Pembelajaran, dengan indikator kinerja program:
 1. Nilai Layanan Penilaian Buku Pendidikan Agama dan Keagamaan
 2. Persentase peserta didik madrasah satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan pendidikan keagamaan yang memenuhi standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional:
 - a. Literasi membaca b. Numerasi
 3. Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik literasi membaca
 4. Persentase satuan pendidikan Islam yang memiliki indeks karakter pada kategori baik
 5. Persentase satuan pendidikan Islam yang memiliki: a. Iklim keamanan sekolah; b. Iklim inklusivitas; c. Iklim Kebhinekaan pada kategori baik
 6. Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang ramah anak
 7. Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial
 8. Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran
 9. Persentase madrasah, satuan Pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam, dan satuan Pendidikan keagamaan Islam yang diakreditasi sesuai SNP
 10. Persentase lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapatkan rekognisi.

Sasaran Kegiatan (SK):

1. Meningkatnya kualitas Layanan Perbukuan Pendidikan Agama dan Keagamaan, dengan Indikator Sasaran Kegiatan Persentase Peningkatan Buku Pendidikan Agama dan Keagamaan yang mendapat tanda layak terbit
2. Meningkatnya kualitas penilaian Pendidikan madrasah, dengan Indikator Sasaran Kegiatan:
 - a. Rata-rata asesmen tingkat nasional untuk:
 - literasi membaca
 - numerasi
 - b. Nilai keberagamaan siswa pada satuan pendidikan
 - c. Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa
 - d. Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas
 - e. Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran
 - f. Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler
 - g. Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)

3. Meningkatnya kualitas perangkat kurikulum, dengan Indikator Sasaran Kegiatan:
 - a. Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan
 - b. Persentase materi ajar digital (modul, video, *e-book*) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran
 - c. Persentase peningkatan jumlah publikasi dakwah yang diterbitkan
 - d. Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan
 - e. Persentase satuan pendidikan umum yang memperoleh peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan melalui dukungan sarana ibadah dan fasilitas pendidikan keagamaan
4. Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan, dengan Indikator Sasaran Kegiatan:
 - a. Persentase PAUD/RA/Pratama Widyalyaya/Nava Dhammasekha yang terakreditasi minimal B
 - b. Persentase Satuan Pendidikan formal pesantren yang memperoleh hasil asesmen minimal *jayyid*.
 - c. Persentase peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal
 - d. Persentase MI/SD/Adhi Widyalyaya/Mula Dhammasekha yang terakreditasi minimal B
 - e. Persentase MTs/SMP/Madyama Widyalyaya/Muda Dhammasekha yang terakreditasi minimal B
 - f. Persentase MA/SMA/Uttama Widyalyaya/Uttama Dhammasekha yang terakreditasi minimal B
 - g. Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara
 - h. Persentase Madrasah yang menerapkan program pendidikan bilingual
 - i. Persentase siswa yang mengikuti kompetisi Nasional maupun Internasional
 - j. Persentase madrasah dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik
 - k. Persentase MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri
 - l. Persentase MA Kejuruan dan MA Program Keterampilan yang meningkatkan life skill melalui program magang
 - m. Persentase lulusan MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang mendapatkan pekerjaan /bekerja dalam waktu kurang dari 1 tahun
5. Meningkatnya layanan rekognisi pendidikan, dengan Indikator Sasaran Kegiatan Persentase lulusan yang mendapatkan pengakuan atas kualifikasinya oleh lembaga pemerintah, pendidikan umum atau lembaga profesi

- b. Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, kompeten, dan merata, dengan Indikator Kinerja Program:
1. Persentase provinsi yang memiliki indeks pemerataan guru pendidikan keagamaan dengan kategori baik
 2. Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik
 3. Persentase pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama pada satuan pendidikan

Sasaran Kegiatan (SK):

1. Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan, dengan Indikator Sasaran Kegiatan:
 - a. Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP
 - b. Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal
 - c. Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil
 - d. Persentase Kepala Sekolah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) minimal predikat terampil
 - e. Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik
 - f. Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP) minimal predikat terampil
 - g. Persentase guru yang meningkat jenjang karir
 - h. Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir
 - i. Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama
 - j. Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan.

5. Program Pendidikan Tinggi

Sasaran Program (*Outcome*):

- a. Meningkatnya partisipasi peserta didik pada PTK/Ma'had Aly, dengan indikator kinerja program:
1. Persentase peningkatan jumlah mahasiswa pada PTK
- Sasaran Kegiatan (SK):
1. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana PTK, dengan Indikator Sasaran Kegiatan:
 - a. Persentase PTK yang Memenuhi Standar Sarana Prasarana
 - b. Persentase Prodi yang Memenuhi Sarana Prasarannya
 2. Meningkatnya layanan pendidikan tinggi keagamaan yang terjangkau, dengan Indikator Sasaran Kegiatan:
 - a. Persentase mahasiswa penerima beasiswa
 - b. Proporsi mahasiswa baru yang berkuliah di perguruan tinggi berkualitas
- b. Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu, dengan indikator kinerja program:
1. Persentase PTK/Mahad Aly' yang terakreditasi;

Sasaran Kegiatan (SK):

1. Meningkatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi, dengan Indikator Sasaran Kegiatan:
 - a. Persentase perguruan tinggi keagamaan yang terpetakan berdasarkan keunggulannya
 - b. Persentase Prodi yang mendapatkan akreditasi unggul
 - c. Persentase Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasi
 - d. Persentase program studi Program Profesi Guru (PPG) yang terakreditasi unggul
 - e. Persentase PTK yang mendapatkan pembinaan standar mutu
- c. Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas, dengan indikator kinerja program:
 1. Persentase dosen dan tenaga kependidikan PTKI/Ma'had Aly yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi.

Sasaran Kegiatan (SK):

1. Terpenuhinya kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal, dengan Indikator Sasaran Kegiatan:
 - a. Persentase dosen berkualifikasi akademik S3 (a) total (b) STEM (c) non STEM
 - b. Persentase dosen yang mempunyai pengalaman di luar kampus
 - c. Persentase dosen yang menduduki jabatan lektor/lektor kepala/guru besar
 - d. Persentase dosen yang mengikuti program peningkatan kompetensi
 - e. Persentase dosen yang menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional
 - f. Rasio dosen asing dengan dosen dalam negeri
 - g. Persentase pemenuhan jumlah tenaga kependidikan pada jenjang jabatan fungsional
 - h. Persentase tenaga kependidikan yang mendapatkan peningkatan kompetensi
- d. Meningkatnya daya saing lulusan PTKI/Ma'had Aly, dengan indikator kinerja program:

1. Rata-rata masa tunggu lulusan pendidikan tinggi keagamaan untuk mendapatkan pekerjaan

Sasaran Kegiatan (SK):

Meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja, dengan Indikator Sasaran Kegiatan:

- a. Persentase lulusan perguruan tinggi berkualifikasi S1 dengan pengalaman 1 (satu) semester di luar kampus
- b. Persentase PTK yang memiliki Pusat Pengembangan Karir
- c. Persentase lulusan PTK yang berhasil memiliki pekerjaan : a. Karyawan b. Wirausaha
- d. Persentase tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi keagamaan bidang STEM
- e. Persentase lulusan yang mendapat sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi bereputasi
- f. Persentase prodi yang menyelenggarakan sertifikasi profesi

- g. Persentase peningkatan mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi
 - h. Rasio Outbound per Inbound mahasiswa
 - i. Persentase mahasiswa yang berkegiatan di luar program studi
- e. Meningkatnya relevansi pendidikan tinggi keagamaan melalui penguatan kemitraan strategis, dengan indikator kinerja program:
- 1. Persentase kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK
 - 2. Rata-rata masa tunggu lulusan pendidikan tinggi keagamaan Kristen untuk mendapatkan pekerjaan

Sasaran Kegiatan (SK) : Meningkatnya kualitas pemanfaatan kerja sama,

- f. Meningkatnya kualitas karakter keagamaan mahasiswa yang ramah, inklusif, dan selaras dengan nilai-nilai kebangsaan, dengan indikator kinerja program:
- 1. Persentase PTK/Ma'had Aly yang mengembangkan literasi keagamaan
 - 2. Rata-rata masa tunggu lulusan pendidikan tinggi keagamaan Kristen untuk mendapatkan pekerjaan

Sasaran Kegiatan (SK): Meningkatnya budaya akademik yang *religious* dan toleran, dengan Indikator Sasaran Kegiatan:

- a. Persentase PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri/pemerintah/ Lembaga Masyarakat /Internasional
 - b. Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti di bidang pendidikan dan pengajaran
 - c. Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti di bidang penelitian dan publikasi
 - d. Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti di bidang pengabdian kepada masyarakat
- g. Meningkatnya produktivitas dan daya saing pendidikan tinggi, dengan Indikator Sasaran Program Jumlah perguruan tinggi keagamaan yang masuk ke dalam peringkat THE Impact SDGs.

Sasaran Kegiatan (SK): Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian, dengan Indikator Sasaran Kegiatan:

- a. Persentase karya tulis ilmiah yang bereputasi nasional
- b. Persentase publikasi ilmiah bereputasi internasional PTK yang disitasi
- c. Jumlah karya tulis ilmiah berorientasi SDGs yang terpublikasi di jurnal internasional bereputasi
- d. Rasio produktivitas publikasi ilmiah dengan jumlah dosen
- e. Jumlah *Paten Granted* karya tulis ilmiah Perguruan Tinggi Keagamaan
- f. Persentase hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan DUDI/Masyarakat
- g. Persentase Lembaga Penelitian dan Pengabdian ke Masyarakat (LPPM) yang ditingkatkan kapasitasnya

B. Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai tujuan Kementerian Agama serta sasaran strategis dan program yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai sumber daya, khususnya pendanaan yang memadai. Pendanaan ini bersumber dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta dari masyarakat. Saat ini, sumber pendanaan yang digunakan mencakup Rupiah Murni, Rupiah Murni Pendamping, Surat Berharga Syariah Negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Badan Layanan Umum, Pinjaman Hibah Luar Negeri dan sumber pendanaan lainnya yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kerangka pendanaan yang tertuang dalam Renstra Kementerian Agama 2025-2029 menjadi pedoman dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan program serta kegiatan Kementerian Agama, dengan mengacu pada kaidah-kaidah pengelolaan pendanaan nasional.

Adapun indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Kementerian Agama sampai dengan tahun 2029 tercantum dalam tabel berikut.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Kementerian Agama Republik Indonesia 2025-2029 dirancang sebagai arah implementatif yang komprehensif dalam mendukung tercapainya Visi Indonesia Emas 2045 dan Visi Kementerian Agama. Muatan yang tercantum dalam dokumen tersebut merujuk pada arah kebijakan Prioritas Nasional (Asta Cita) dan kebijakan internal Kementerian Agama (Asta Protas Menteri Agama).

Sistematika penulisan Rencana Strategis disusun berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029. Adapun substansi pembahasan dokumen Rencana Strategis meliputi: Kondisi Umum (Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis Periode sebelumnya), Potensi dan permasalahan, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, Target Kinerja, Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Pendanaan, Kerangka Kelembagaan, Kerangka Regulasi, dan Matrik Kinerja.

Muatan Renstra telah mengakomodasi kebijakan bidang agama dan bidang pendidikan yaitu pemahaman dan kerukunan kehidupan umat beragama, layanan agama yang transformatif, akses pendidikan yang berkualitas, mutu pendidikan, tata kelola, guru dan tenaga kependidikan, layanan pendidikan keagamaan dan pendidikan pesantren, serta relevansi dan daya saing Pendidikan Tinggi/Ma'had Aly.

Renstra diharapkan menjadi pedoman dalam penyusunan program dan anggaran, sasaran kinerja pegawai, proses bisnis layanan Kementerian Agama, peraturan yang akan diterbitkan dan efektifitas pelaksanaan reformasi birokrasi. Selain itu, dokumen ini sebagai *evidence* bahwa Kementerian Agama ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) serta berkontribusi dalam peningkatan capaian Reformasi Birokrasi.

Untuk mencapai sasaran tersebut, Kementerian Agama merancang sejumlah langkah strategis sebagai penguatan sinergi dan kolaborasi dengan lembaga pemerintah, organisasi keagamaan, dan masyarakat sipil. Mekanisme monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan setiap program berjalan sesuai target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Implementasi dari setiap program dan kebijakan yang tertuang dalam dokumen ini tidak hanya menjadi sebuah perencanaan, melainkan sebuah wujud nyata dari upaya bersama dalam mencapai masa depan bangsa yang lebih harmonis, maju, dan berkeadilan.

MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

NASARUDDIN UMAR

Matrik Kinerja Dan Pendanaan

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KEMENTERIAN AGAMA									49.129.022	68.116.490	74.970.036	76.556.593	82.940.573	
SS.1	Meningkatnya masyarakat yang memiliki cara pandang dan praktik beragama jalan tengah untuk mewujudkan kerukunan dan harmoni sosial													
IKSS.1.1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Nilai	76,47	76,77	77,14	77,51	77,88	78,25						
IKSS.1.2	Indeks Kesalehan Umat Beragama	Nilai	83,83	84,20	84,50	84,80	85,10	85,40						
SS.2	Meningkatnya Layanan Keagamaan Transformatif													
IKSS.2.1	Indeks Layanan Keagamaan	Nilai	86,51	87,11	87,51	87,89	88,26	88,62						
SS.3	Meningkatnya pemerataan akses pendidikan													
IKSS.3.1	Tingkat Penyelesaian Pendidikan MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widyalaya/Utama Dhammasekha	Nilai	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00						
IKSS.3.2	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi Keagamaan	Nilai	4,36	4,76	5,00	5,24	5,38	5,60						
SS.4	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah													
IKSS.4.1	Persentase peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional													
	a. Literasi membaca	Persen	58,07	59,30	59,71	60,04	60,10	60,15						
	b. Numerasi	Persen	50,91	52,55	52,97	53,80	53,80	54,21						
SS.5	Meningkatnya Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas													
IKSS.5.1	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang profesional pada madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan	Persen	61,00	51,17	60,43	75,69	87,95	98,00						
SS.6	Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan yang berkualitas													
IKSS.6.1	Persentase lulusan pendidikan tinggi Keagamaan/Ma'had Aly yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun	Persen	5,16	5,36	5,47	5,86	6,00	6,12						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SS.7 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel													
IKSS.7.1 Nilai reformasi birokrasi	Nilai	79,16	80,93	82,70	84,47	86,24	88,01						
025.DC - Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama								3.308.610	3.936.523	4.200.817	4.468.209	3.758.120	SETJEN, DITJEN PHU, DITJEN BIMAS ISLAM, DITJEN BIMAS KRISTEN, DITJEN BIMAS KATOLIK, DITJEN BIMAS HINDU, DITJEN BIMAS BUDDHA, BPJPH
SP.1 Meningkatnya pemahaman dan praktek keagamaan maslahat dalam mewujudkan kehidupan beragama yang rukun													
IKSP.1.1 Persentase rekomendasi Early Warning System (keagamaan) yang ditindaklanjuti	Persen	10,00	25,00	40,00	55,00	70,00	85,00						
IKSP.1.2 Persentase rekomendasi Early Warning System Agama Islam yang ditindaklanjuti	Persen	76,92	79,49	82,05	84,62	87,18	89,74						
IKSP.1.3 Persentase rekomendasi Early Warning System Agama Kristen yang ditindaklanjuti	Persen	50,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00						
IKSP.1.4 Persentase rekomendasi Early Warning System Agama Katolik yang ditindaklanjuti	Persen	74,51	20,00	40,00	60,00	80,00	96,00						
IKSP.1.5 Persentase rekomendasi Early Warning System Agama Hindu yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00						
IKSP.1.6 Persentase rekomendasi Early Warning System Agama Buddha yang ditindaklanjuti	Persen	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00						
IKSP.1.7 Persentase rekomendasi Early Warning System Agama Khonghucu yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	99,10	99,20	99,30	99,40	99,50						
IKSP.1.8 Indeks kesalehan Umat Beragama Islam	Nilai	82,44	82,60	82,70	82,80	82,90	83,00						
IKSP.1.9 Indeks kesalehan Umat Beragama Kristen	Nilai	87,48	88,60	89,70	90,80	91,90	93,00						
IKSP.1.10 Indeks kesalehan Umat Beragama Katolik	Nilai	N/A	79,50	80,90	82,30	83,70	85,10						
IKSP.1.11 Indeks kesalehan Umat Beragama Hindu	Nilai	83,83	83,80	83,80	83,80	83,80	83,80						
IKSP.1.12 Indeks kesalehan Umat Beragama Buddha	Nilai	82,95	82,98	83,02	83,05	83,08	83,11						
IKSP.1.13 Indeks kesalehan Umat Beragama Khonghucu	Nilai	83,16	83,42	83,70	83,97	84,14	84,23						
IKSP.1.14 Persentase lembaga agama dan lembaga sosial keagamaan yang memenuhi standar pengelolaan	Persen	14,84	15,08	19,84	24,60	29,76	34,92						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKSP.1.15	Persentase lembaga agama Kristen dan lembaga sosial keagamaan Kristen yang memenuhi standar pengelolaan	Persen	0,40	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00					
IKSP.1.16	Persentase lembaga agama Katolik dan lembaga sosial keagamaan Katolik yang memenuhi standar pengelolaan	Persen	N/A	52,69	52,92	53,15	53,38	53,61					
IKSP.1.17	Persentase lembaga agama Hindu dan lembaga sosial keagamaan Hindu yang memenuhi standar pengelolaan	Persen	N/A	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00					
IKSP.1.18	Persentase lembaga agama Buddha dan lembaga sosial keagamaan Buddha yang memenuhi standar pengelolaan	Persen	78,57	70,00	72,71	76,01	79,01	81,92					
IKSP.1.19	Persentase lembaga agama Khonghucu dan Lembaga sosial Keagamaan Khonghucu yang memenuhi standar pengelolaan	Persen	14,84	15,08	19,84	24,60	29,76	34,92					
IKSP.1.20	Persentase naskah kebijakan pembangunan bidang agama yang dimanfaatkan	Persen	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00					
IKSP.1.21	Indeks Moderasi Beragama	Nilai	75,24	76,00	76,50	77,00	77,50	78,00					
IKSP.1.22	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Agama dan Keagamaan.	Persen	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00					
SP.2 Terwujudnya transformasi layanan keagamaan yang berkualitas, merata, dan inklusif													
IKSP.2.1	Nilai Layanan Penyuluhan Agama	Nilai	84,52	84,63	84,74	84,85	84,96	85,07					
IKSP.2.2	Nilai Layanan Penyuluhan Agama Kristen	Nilai	85,73	86,18	86,63	87,08	87,53	87,98					
IKSP.2.3	Nilai Layanan Penyuluhan Agama Katolik	Nilai	83,74	84,19	84,64	85,09	85,54	85,99					
IKSP.2.4	Nilai Layanan Penyuluhan Agama Hindu	Nilai	87,63	88,08	88,53	88,98	89,43	89,88					
IKSP.2.5	Nilai Layanan Penyuluhan Agama Buddha	Nilai	83,21	83,66	84,11	84,56	85,01	85,46					
IKSP.2.6	Nilai Layanan Penyuluhan Agama Khonghucu	Nilai	83,23	60,00	65,00	70,00	73,00	75,00					
IKSP.2.7	Persentase Calon Pengantin yang Mendapatkan Bimbingan Perkawinan	Persen	27,00	35,00	50,00	65,00	75,00	85,00					
IKSP.2.8	Persentase Calon Pengantin yang Mendapatkan Bimbingan Perkawinan Agama Kristen	Persen	70,00	70,05	71,20	72,33	73,52	74,00					
IKSP.2.9	Persentase Calon Pengantin yang Mendapatkan Bimbingan Perkawinan Agama Katolik	Persen	N/A	21,59	42,70	62,61	81,91	90,00					
IKSP.2.10	Persentase Calon Pengantin yang Mendapatkan Bimbingan Perkawinan Agama Hindu	Persen	79,70	90,91	90,91	91,67	91,31	91,31					
IKSP.2.11	Persentase Calon Pengantin yang	Persen	100,00	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00					

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Mendapatkan Bimbingan Perkawinan Agama Buddha												
IKSP.2.12	Persentase Calon Pengantin yang Mendapatkan Bimbingan Perkawinan Agama Khonghucu	Persen	19,86	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00					
IKSP.2.13	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Bimbingan Keagamaan Keluarga	Persen	0,01	0,70	0,80	0,90	1,00	1,10					
IKSP.2.14	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Bimbingan Keagamaan Keluarga Kristiani	Persen	70,71	71,37	72,03	73,69	75,35	76,01					
IKSP.2.15	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Bimbingan Keagamaan Keluarga Bahagia	Persen	N/A	16,81	35,30	55,46	76,47	90,00					
IKSP.2.16	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Bimbingan Keagamaan Keluarga Sukinah	Persen	3,02	10,21	10,21	10,21	10,21	10,21					
IKSP.2.17	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Bimbingan Keagamaan Keluarga Hitta Sukhaya	Persen	0,28	0,32	0,33	0,37	0,40	0,45					
IKSP.2.18	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Bimbingan Keagamaan Keluarga Anhe Jiating	Persen	11,62	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00					
IKSP.2.19	Persentase sarana dan prasarana layanan peribadatan yang memenuhi standar	Persen	66,69	67,35	68,02	68,68	69,34	70,00					
IKSP.2.20	Persentase sarana dan prasarana layanan peribadatan Agama Kristen yang memenuhi standar	Persen	20,00	31,80	36,17	40,53	44,89	49,26					
IKSP.2.21	Persentase sarana dan prasarana layanan peribadatan Agama Katolik yang memenuhi standar	Persen	N/A	4,21	6,50	8,87	11,32	13,83					
IKSP.2.22	Persentase sarana dan prasarana layanan peribadatan Agama Hindu yang memenuhi standar	Persen	56,96	57,00	58,00	59,00	60,00	61,00					
IKSP.2.23	Persentase sarana dan prasarana layanan peribadatan Agama Buddha yang memenuhi standar	Persen	28,19	31,8	36,17	40,53	44,89	49,26					
IKSP.2.24	Persentase sarana dan prasarana layanan peribadatan Agama Khonghucu yang memenuhi standar	Persen	5,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00					
IKSP.2.25	Indeks Literasi kitab suci Agama Islam	Nilai	66,69	67,35	68,02	68,68	69,34	70,00					
IKSP.2.26	Indeks Literasi kitab suci Agama Kristen	Nilai	68,98	69,70	70,39	71,06	71,90	72,57					
IKSP.2.27	Indeks literasi kitab suci Agama Katolik	Nilai	N/A	68,08	68,75	69,42	70,08	70,75					
IKSP.2.28	Indeks Literasi kitab suci Agama Hindu	Nilai	N/A	71,24	71,50	71,75	71,90	72,00					
IKSP.2.29	Indeks Literasi Kitab Suci Agama Buddha	Nilai	83,21	83,66	84,11	84,56	85,01	85,46					
IKSP.2.30	Indeks Literasi Kitab Suci Agama	Nilai	N/A	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00					

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR		SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Khonghucu													
IKSP.2.31	Persentase penduduk miskin yang menerima manfaat dana sosial keagamaan untuk peningkatan kesejahteraan	Persen	2,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00						
IKSP.2.32	Persentase penduduk miskin yang menerima manfaat dana sosial keagamaan Kristen untuk peningkatan kesejahteraan	Persen	N/A	0,00	0,004	0,005	0,006	0,007						
IKSP.2.34	Persentase penduduk miskin yang menerima manfaat dana sosial/ Dana Punia keagamaan Hindu untuk peningkatan kesejahteraan	Persen	0,05	0,11	0,16	0,23	0,28	0,34						
IKSP.2.35	Persentase penduduk miskin yang menerima manfaat dana sosial Paramita keagamaan Buddha untuk peningkatan kesejahteraan	Persen	0,00	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00						
IKSP.2.36	Persentase penduduk miskin yang menerima manfaat dana sosial Kebajikan keagamaan Khonghucu untuk peningkatan kesejahteraan	Persen	0,9	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50						
IKSP.2.37	Persentase lembaga dana sosial keagamaan yang akuntabel dan profesional	Persen	78,00	81,00	85,00	88,00	91,00	95,00						
IKSP.2.38	Persentase lembaga dana sosial keagamaan Kristen yang akuntabel dan profesional	Persen	33.00	33.00	66.67	66.67	75.00	90,00						
IKSP.2.39	Persentase lembaga dana sosial keagamaan Katolik yang akuntabel dan profesional	Persen	N/A	50,00	50,00	66,67	75,00	80,00						
IKSP.2.40	Persentase lembaga dana punia yang akuntabel dan professional	Persen	N/A	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00						
IKSP.2.41	Persentase lembaga dana paramita keagamaan Buddha yang akuntabel dan profesional	Persen	0,00	44,44	55,56	66,67	77,78	95,00						
IKSP.2.42	Persentase Lembaga dana kebajikan yang akuntabel dan profesional	Persen	40,78	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00						
IKSP.2.43	Indeks Kepuasan Layanan KUA	Nilai	85,53	85,64	85,75	85,85	85,96	86,07						
IKSP.2.44	Nilai Kepuasan Layanan Pentashihan al-Qur'an dan Edukasi al-Qur'an	Nilai	N/A	77,00	77,50	78,00	78,50	79,00						
IKSP.2.45	Indeks Kepuasan Layanan Penilaian Buku Agama	Nilai	N/A	0,00	80,00	86,20	86,50	87,25						
IKSP.2.46	Indeks Kepuasan Layanan : Jamaah haji Indonesia (IKJHI) dalam negeri Jamaah haji Indonesia (IKJHI) luar negeri	Nilai	90,45;88,20	91,00;88,25	0.00;0.00	0.00;0.00	0.00;0.00	0.00;0.00						
2104 Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah									761.700	1.022.524	1.034.017	1.046.406	1.059.816	[BIMAS ISLAM] Direktorat KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK.2104.1 Terlaksananya KUA sebagai Pusat Kerukunan Umat Beragama Tingkat Kecamatan / Tingkat Akar Rumput													
IKSK.2104.1.1 Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS	Persen	0,00	16,90	33,80	50,70	67,60	90,42						
RO.2104.UAI.005 KUA yang Mengembangkan EWS (Early Warning System)	Lembaga	0,00	1000	2000	3000	4000	5917	10.000	18.754	18.754	18.754	18.754	
IKRO.2104.UAI.005.1 Jumlah KUA yang mengembangkan EWS (Early Warning System) dalam menjaga toleransi dan cinta kemanusiaan umat Islam	Lembaga	0,00	1000	2000	3000	4000	5917						
SK.2104.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah													
IKSK.2104.2.1 Persentase calon pengantin yang mendapatkan Bimbingan Perkawinan Agama Islam	Persen	100,00	86,78	94,44	94,74	95,00	95,24						
IKSK.2104.2.2 Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh bimbingan pra nikah	Persen	0,00	1,40	2,85	4,34	5,88	7,46						
IKSK.2104.2.3 Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Bimbingan Keagamaan Keluarga Sakinah	Persen	0,28	0,03	0,06	0,11	0,23	0,34						
IKSK.2104.2.4 Persentase KUA Berdaya	Persen	0,00	11,83	27,04	47,34	64,41	79,62						
IKSK.2104.2.5 Persentase KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana	Persen	8,45	32,42	57,77	66,58	71,79	82,00						
IKSK.2104.2.6 Persentase peningkatan jumlah peristiwa nikah	Persen	-6,5	1,0	2,2	2,3	3,9	2,5						
IKSK.2104.2.7 Persentase penghulu yang memperoleh sertifikat kompetensi	Persen	0,00	9,57	30,43	50,00	69,57	82,00						
RO.2104.QDE.002 Calon Pengantin Islam Mendapatkan Bimbingan Perkawinan	Orang	N/A	1.704.000	1.977.889	2.294.885	2.674.202	3.098.221	160.726	160.726	160.726	160.726	160.726	
IKRO.2104.QDE.002.1 Jumlah Calon Pasangan Pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan agama Islam	Pasangan	N/A	1.394.000	1.347.889	1.334.885	1.374.202	1.448.221						
IKRO.2104.QDE.002.2 Jumlah Remaja Usia Sekolah yang mendapatkan Bimbingan Pra Nikah	Orang	211.265	310.000	630.000	960.000	1.300.000	1.650.000						
IKRO.2104.QDE.001 Bimbingan Keluarga Sakinah – Masalahat	Keluarga	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	27.951	40.641	44.705	49.176	54.093	
IKRO.2104.QDE.001.3 Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Bimbingan Keluarga Sakinah dan Masalahat	Keluarga	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500						
RO.2104.UAI.001 KUA Berdaya	Lembaga	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	12.500	38.283	42.111	46.322	50.995	
IKRO.2104.UAI.001.1 Jumlah KUA yang Ditingkatkan Mutu dan Kualitas Pelayanan Keagamaan	Lembaga	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400						
RO.2104.UAI.002 KUA yang ditingkatkan sarana dan prasarana	Lembaga	500	1.918	1.500	1.200	900	486	35.000	120.000	123.600	127.308	131.127	
IKRO.2104.UAI.002.5 Jumlah KUA yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarana sesuai standar	Lembaga	500	1.918	1.500	1.200	900	486						
RO.2104.UAI.003 KUA yang Dibangun (SBSN)	Lembaga	135	154	271	160	160	170	196.922	291.120	291.120	291.120	291.120	
IKRO.2104.UAI.003.5 Jumlah KUA yang Dibangun	Lembaga	135	154	271	160	160	170						
RO.2104.UAI.004 KUA Rusak Sedang dan Berat	Lembaga	N/A	143	150	150	150	150	21.601	30.000	30.000	30.000	30.000	

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Direhabilitasi												
IKRO.2104.UAI.004.5	Jumlah KUA yang Rusak Sedang dan Berat yang Direhabilitasi	Lembaga	N/A	143	150	150	150	150					
RO.2104.QAA.002	Layanan Nikah dan Rujuk	Orang	2.956.604	2.789.212	2.695.778	2.669.770	2.748.404	2.896.442	277.000	302.000	302.000	302.000	302.000
IKRO.2104.QAA.002.06	Jumlah Peristiwa Nikah dan Rujuk yang Dilayani	Pasangan	1.478.302	1.394.606	1.347.889	1.334.885	1.374.202	1.448.221					
RO.2104.QDC.001	Penghulu yang Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	1.100	1.100	2.400	2.250	2.250	3.500	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
IKRO.2104.QDC.001.7	Jumlah Penghulu yang ditingkatkan Kompetensinya	Orang	1.100	1.100	3.500	5.750	8.000	11.500					
2122	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf								128.497	175.600	175.600	175.600	175.600
SK.2122.1	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Ziswaf												
IKSK.2122.1.1	Persentase jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan Islam terintegrasi basis data terpadu nasional	Persen	0,25	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50					
IKSK.2122.1.2	Persentase kolaborasi program pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan	Persen	10,00	11,00	12,00	13,00	15,00	16,00					
IKSK.2122.1.3	Persentase harta benda wakaf yang dikelola dan dikembangkan produktif	Persen	4,00	6	8	10	12	14					
IKSK.2122.1.4	Persentase advokasi pengamanan Harta Benda Wakaf (mutasi, sengketa) yang ditindaklanjuti	Persen	2,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00					
RO.2122.QEA.001	Mustahiq yang diselaraskan dengan Data Kemiskinan (Regsosek/DT-SEN)	Orang	N/A	25.900.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
IKRO.2122.QEA.001.1	Jumlah Data Mustahiq yang Diselaraskan dengan Data Kemiskinan Regsosek	Orang	N/A	25.900.000	-	-	-	-					
IKRO.2122.QEA.001.2	Jumlah Data Zakat dan Wakaf yang Selaras dengan Data Kemiskinan (DT-SEN)	Orang	N/A	-	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000					
RO.2122.QEA.002	Rumah Tangga Miskin diberdayakan melalui Kampung ZISWAF	Kelompok Masya-rakat	N/A	2.298	2.298	2.298	2.298	2.298	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
IKRO.2122.QEA.002.1	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Diberdayakan dalam Pengentasan Angka Kemiskinan	Kelompok Masyarakat	N/A	2.298	2.298	2.298	2.298	2.298					
RO.2122.QDB.001	Pembinaan Lembaga Amil Zakat dan Nadzir Wakaf yang Diperkuat Program Pengentasan Kemiskinan	Lembaga	N/A	9.193	9.193	9.193	9.193	9.193	40.926	67.000	67.000	67.000	67.000
IKRO.2122.QDB.001.1	Jumlah Lembaga Amil Zakat & Nadzir Wakaf yang dibina dan Diperkuat Literasinya	Lembaga	N/A	7.690	7.189	6.687	6.183	5.681					
IKRO.2122.QDB.001.2	Jumlah Lembaga Akta Ikrar Wakaf yang Diterbitkan	Lembaga	N/A	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500					

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKRO.2122.QDB.01.3	Jumlah Layanan Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat dan Wakaf dalam Program Pengentasan Kemiskinan	Lembaga	0	3	4	6	10	12					
SK.2122.2	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Profesionalitas Lembaga Zakat Infaq Sedekah dan Wakaf												
IKSK.2122.2.1	Persentase Lembaga Amil Zakat yang diawasi sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan profesional	Persen	15,00	17,00	19,00	21,00	23,00	25,00					
IKSK.2122.2.2	Persentase Lembaga Wakaf yang diawasi sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan profesional	Persen	1,00	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00					
IKSK.2122.2.3	Persentase layanan izin pembentukan lembaga amil zakat dan wakaf	Persen	1,00	6,00	8,00	10,00	12,00	15,00					
IKSK.2122.2.4	Persentase Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan	Persen	2,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00					
IKSK.2122.2.5	Persentase lembaga Zakat dan Wakaf yang dibina	Persen	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00					
RO.2122.QIC.001	Lembaga Amil Zakat yang Diaudit Syariah dan Keuangannya	Lembaga	N/A	811	1.087	1.486	2.050	2.796	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
IKRO.2122.QIC.001.1	Jumlah Lembaga Zakat yang Diawasi Pengelolaannya	Lembaga	N/A	739	800	839	900	1.000					
IKRO.2122.QIC.001.2	Jumlah Lembaga Wakaf yang Diawasi Pengelolaannya	Lembaga	18	72	287	647	1.150	1.796					
RO.2122.QIC.002	Layanan Advokasi Aset Wakaf	Layanan	N/A	20	23	28	34	20	4.671	2.500	2.500	2.500	2.500
IKRO.2122.QIC.002.1	Jumlah Aset Wakaf yang Diberikan Pendampingan Advokasi dalam Penanganan Permasalahan Hukum	Lokasi	N/A	115	138	166	200	220					
RO.2122.QEI.001	Bantuan Operasional BWI	Lembaga	1	180	180	180	180	180	16.400	21.400	21.400	21.400	21.400
IKRO.2122.QEI.001.1	Terbinanya Lembaga Pengelola Wakaf (BWI)	Lembaga	N/A	180	180	180	180	180					
IKRO.2122.QEI.001.2	Jumlah Harta benda wakaf yang dikelola dan dikembangkan produktif	Aset Wakaf	N/A	8.982	8.981	8.982	8.982	8.981					
RO.2122.QEI.002	Bantuan Operasional BAZNAS	Lembaga	1	110	110	110	110	110	3.500	4.700	4.700	4.700	4.700
IKRO.2122.QEI.002.1	Terbinanya Lembaga Pengelola Zakat (BAZNAS)	Lembaga	1	110	110	110	110	110					
2123 Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam									204.379	394.930	430.223	468.915	510.439
SK.2123.1	Meningkatnya Kualitas Syiar dan Pembinaan Lembaga Agama dan Lembaga Sosial Keagamaan Islam												
IKSK.2123.1.1	Persentase peningkatan audiens MTQ	Persen	80,00	83,00	86,00	88,00	89,00	90,00					
IKSK.2123.1.2	Persentase peningkatan peserta event seni budaya agama Islam	Persen	2,40	4,00	7,14	6,67	6,25	5,88					
IKSK.2123.1.3	Persentase peningkatan partisipan perayaan hari besar Islam yang diselenggarakan Negara	Persen	90,00	99,34	99,35	99,35	99,36	99,36					
IKSK.2123.1.4	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan Agama Islam yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	Persen	74,58	74,71	74,85	74,99	75,13	75,27					
RO.2123.PEG.001	Event Seni Budaya Keagamaan Islam (MTQ)	Kegiatan	N/A	1.826	1.826	1.826	1.826	1.826	31.064	98.510	108.361	119.197	131.117

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKRO.2123.PEG.01.1 Jumlah Audiens pada <i>Event</i> Seni Budaya Keagamaan Islam (MTQ) dalam Meningkatkan Kesalehan Umat Islam	Orang	N/A	120.000	140.000	160.000	180.000	200.000						
RO.2123.AEG.001 Penyelenggaraan <i>Event</i> Seni Budaya dan Hari Besar Islam	Kegiatan	N/A	34	34	34	34	34	7.000	13.680	15.048	16.523	18.208	
IKRO.2123.AEG.01.2 Jumlah Partisipan dalam Penyelenggaraan <i>Event</i> Seni Budaya Islam	Orang	N/A	3.500	3.750	4.000	4.250	4.500						
IKRO.2123.AEG.01.3 Jumlah Partisipan pada Perayaan Hari Besar Islam yang Diselenggarakan Negara	Orang	N/A	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
RO.2123.QDB.001 Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Agama Islam (MUI)	Lembaga	1	1	1	1	1	1	3.000	7.000	8.000	9.000	10.000	
IKRO.2123.QDB.01.1 Jumlah Lembaga Agama Islam (Majelis Ulama Indonesia) yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan	Lembaga	1	1	1	1	1	1						
RO.2123.QDB.002 Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan Islam	Lembaga	N/A	104	104	104	104	104	78.422	176.000	193.600	212.960	234.256	
IKRO.2123.QDB.02.1 Jumlah Lembaga Sosial Keagamaan Islam yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Tata Kelola Kelembagaan	Lembaga	N/A	104	104	104	104	104						
RO.2123.QDD.002 Majelis Taklim yang Dibina	Kelompok Masyarakat	1.028	1.207	1.328	1.460	1.607	1.028	14.712	27.540	30.294	33.323	35.655	
IKRO.2123.QDD.02.4 Jumlah Lembaga Majelis Taklim yang Dibina dalam meningkatkan kesalehan umat Islam	Lembaga	N/A	1.028	1.207	1.328	1.460	1.607						
RO.2123.QDD.001 Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama dan Moderasi Beragama Islam	Kelompok Masyarakat	N/A	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	6.498	27.200	29.920	32.912	36.203	
IKRO.2123.QDD.01.4 Jumlah Dialog Internal Umat Islam dalam menciptakan kerukunan umat Islam	Kelompok Masyarakat	N/A	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400						
SK.2123.2.1 Meningkatnya Kualitas Penyuluhan Agama Islam													
IKSK.2123.3.1 Nilai Layanan Penyuluh Agama Islam	Nilai	82,88	83,33	83,78	84,23	84,68	85,13						
IKSK.2123.3.2 Persentase penyuluh agama Islam yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	Persen	100	90	91	92	93	94						
IKSK.2123.3.3 Rasio penyuluh agama Islam dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Rasio	1:5	1:4	1:4	1:4	1:4	1:4						
RO.2123.QDC.002 Penyuluh Agama Islam yang ditingkatkan Kompetensinya	Orang	N/A	25.289	25.289	25.289	25.289	25.289	20.076	30.000	30.000	30.000	30.000	
IKRO.2123.QDC.02.1 Jumlah Penyuluh Agama Islam yang ditingkatkan kemampuan dan profesionalitas dalam memberikan penyuluhan pada masyarakat	Orang		25.289	25.289	25.289	25.289	25.289						
IKRO.2123.QDC.02.3 Jumlah Kelompok Sasaran Binaan Penyuluh Agama Islam yang mendapatkan bimbingan	Kelompok Masyarakat		101.156	101.156	101.156	101.156	101.156						
IKRO.2123.QDC.02.3 Jumlah Penyuluh Agama Islam yang memberikan penyuluhan agama Islam	Orang		25.289	25.289	25.289	25.289	25.289						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	pada Masyarakat													
RO.2123.QDC.003	Penyuluh Agama Islam yang dibina Menjadi Influencer Sosial Media	Orang	N/A	11.923	11.923	11.923	11.923	11.923	12.215	15.000	15.000	15.000	15.000	
IKRO.2123.QDC.003.1	Jumlah Konten Digital Penyuluhan Agama Islam Inklusif Tranformatif yang dibuat dan dipublikasikan	Orang	N/A	11.923	11.923	11.923	11.923	11.923						
IKRO.2123.QDC.003.2	Jumlah Penyuluh Agama Islam yang Dibina menjadi Influencer Sosial Media	Orang	N/A	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000						
RO.2123.QDC.001	Honorarium Penyuluh Agama Islam Non PNS	Orang	N/A	2.616	0	0	0	0	31.392	0	0	0	0	
IKRO.2123.QDC.001.3	Jumlah Penyuluh Agama Islam Non ASN yang Memberikan Layanan Bimbingan Penyuluhan Agama Islam	Orang	N/A	2.616	0	0	0	0						
2124 Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah									287.821	220.226	224.728	229.681	235.129	[BIMAS ISLAM] Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
SK.2124.1	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama Islam													
IKSK.2124.1.1	Persentase peningkatan dialog kerukunan agama Islam yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	Persen	76,92	79,49	82,05	84,62	87,18	89,74						
RO.2124.QDD.001	2124.QDD.001 Respon dan Cegah Dini Konflik Keagamaan Islam	Kelompok Masyarakat	N/A	83.800	83.800	83.800	83.800	83.800	141.344	27.026	29.728	32.701	35.971	
IKRO.2124.QDD.001.1	Jumlah Rekomendasi Sistem Peringatan Dini dalam Pencegahan Konflik Keagamaan	Kelompok Masyarakat	N/A	83.800	83.800	83.800	83.800	83.800						
SK.2124.2	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Layanan Keagamaan Islam													
IKSK.2124.2.1	Persentase sarana prasarana peribadatan agama Islam yang memenuhi standar	Persen	16,00	68,00	69,00	70,00	71,00	73,00						
IKSK.2124.2.2	Persentase peningkatan kitab suci agama Islam yang disediakan	Persen	38,34	40,00	42,00	44,00	46,00	48,00						
IKSK.2124.2.3	Persentase peningkatan naskah dan buku keagamaan Islam yang layak edar/sesuai kaidah	Persen	0,00	13,00	67,00	75,00	80,00	83,00						
IKSK.2124.2.4	Persentase peningkatan perpustakaan masjid yang sesuai standar	Persen	79,00	89,00	90,00	91,00	92,00	92,00						
IKSK.2124.2.5	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	Persen	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	90,00						
IKSK.2124.2.6	Persentase peningkatan lembaga agama yang memperoleh manfaat layanan syariah dan hisab rukyat	Persen	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	90,00						
RO.2124.QAA.001	Layanan Syariah Hisab Rukyat	Laporan	N/A	4.979	4.990	5.001	5.012	5.023	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
IKRO.2124.QAA.001.5	Jumlah Pengukuran Arah Kiblat	Layanan	2.367	2.010	2.020	2.030	2.040	2.050						
IKRO.2124.QAA.001.6	Jumlah Layanan Syariah Hisab Rukyat	Layanan	N/A	2.979	2.980	2.981	2.982	2.983						
RO.2124.QAA.000	Literasi Keagamaan Islam Digital	Laporan	N/A	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194	6.000	6.000	6.600	7.260	7.986	

[illegible]

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	toleransi, dan cinta kemanusiaan umat Khonghucu												
IKSK.2130.1.1	Persentase peningkatan dialog kerukunan agama khonghucu yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	Persen	50,00	52,63	55,26	57,89	60,53	63,16					
IKSK.2130.1.2	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan Khonghucu yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	Persen	N/A	15,08	19,84	24,60	29,76	34,92					
IKSK.2130.1.3	Persentase peningkatan audiens perayaan hari besar keagamaan Khonghucu	Persen	N/A	10	11	12	13	14					
RO.2130.QDD.001	Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama Khonghucu	Kelompok Masya-rakat	160	160	160	160	160	160	1.989	5.532	5.532	5.532	5.532
IKRO.2130.QDD.001.1	Jumlah dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS agama khonghucu	Jumlah	160	160	160	160	160	160					
RO.2130.QDB.001	Lembaga Agama dan Keagamaan Khonghucu yang dibina	Lembaga	38	38	50	62	75	88	3.714	4.643	5.571	6.686	8.023
IKRO.2130.QDB.001.1	Jumlah lembaga agama dan keagamaan Khonghucu yang dibina	Jumlah	38	38	50	62	75	88					
IKRO.2130.QDB.001.2	Jumlah <i>audiens</i> Perayaan Hari Besar Keagamaan Khonghucu	Jumlah	N/A	1000	1100	1300	1400	1500					
SK.2130.2	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan khonghucu yg profesional, inklusif, dan berdampak												
IKSK.2130.2.1	Persentase penyuluh agama Khonghucu yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	Persen	N/A	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00					
IKSK.2130.2.2	Rasio penyuluh agama Khonghucu dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Rasio	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2					
IKSK.2130.2.3	Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga <i>Anhe Jiating</i> yang disediakan	Persen	N/A	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00					
IKSK.2130.2.4	Persentase rumah ibadah Khonghucu yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan	Persen	N/A	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00					
IKSK.2130.2.5	Persentase peningkatan kitab suci agama Khonghucu yang disediakan	Persen	N/A	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00					
IKSK.2130.2.6	Persentase peningkatan naskah dan buku keagamaan Khonghucu yang layak edar/sesuai kaidah	Persen	N/A	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00					
IKSK.2130.2.7	Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama Khonghucu yang tersertifikasi	Persen	N/A	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00					
IKSK.2130.2.8	Persentase calon penerima dana sosial kebajikan terintegrasi basis data terpadu nasional	Persen	N/A	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50					
IKSK.2130.2.9	Persentase lembaga dana kebajikan yang meningkat kompetensi tata kelola untuk mendukung penanggulangan	Persen	N/A	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00					

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR		SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan													
RO.2130.QDC.007	Penyuluh Agama Khonghucu Non ASN Penerima Tunjangan	Orang	N/A	102	0	0	0	0	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088	
IKRO.2130.QDC.008.1	Jumlah penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	Jumlah	N/A	102	0	0	0	0						
RO.2130.QDC.002	Penyuluh Agama Khonghucu yang ditingkatkan Kompetensinya dan dibina menjadi Influencer Sosial Media	Orang	N/A	174	174	174	174	174	800	800	800	800	800	
IKRO.2130.QDC.002.1	Jumlah Penyuluh Agama Khonghucu yang ditingkatkan Kompetensinya	Jumlah	N/A	174	174	174	174	174						
RO.2130.QEG.001.1	Kitab Suci Agama Konghucu dan Sarana Peribadatan Agama Khonghucu yang Disediakan	Paket	N/A	2381	2771	3011	3251	3491	5.897	3.566	4.958	6.784	9.251	
IKRO.2130.QEG.001.1	Jumlah buku keagamaan Khonghucu pendukung peribadatan sesuai kaidah.	Jumlah	550	550	600	650	700	750						
IKRO.2130.QEG.001.2	Jumlah kitab suci khonghucu yang disediakan	Jumlah	1000	1100	1100	1200	1300	1400						
RO.2130.QEI.001	Rumah Ibadah Agama Khonghucu yang difasilitasi untuk meningkatkan layanan	Lembaga	N/A	55	60	65	70	75	816	1.020	1.224	1.469	1.763	
IKRO.2130.QEI.001.1	Jumlah rumah ibadah agama Khonghucu yang memperoleh bantuan sarana dan prasarana peribadatan	Jumlah	50	55	60	65	70	75						
IKRO.2130.QEI.001.2	Jumlah Lembaga dana kebajikan yang meningkat kompetensi tata kelola untuk mendukung penanggulangan kemiskinan dan memajukan kesejahteraan disediakan	Jumlah	N/A	1	1	1	1	1						
IKRO.2130.QEI.001.3	Jumlah calon penerima dana kebajikan terintegrasi basis data terpadu nasional	Jumlah	N/A	250	350	450	550	650						
2137 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen									243.432	198.837	190.846	227.960	314.175	[BIMAS KRISTEN] Direktorat Urusan Agama Kristen
SK.2137.1	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat Kristen													
IKSK.2137.1.1	Persentase peningkatan dialog kerukunan agama Kristen yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	Persen	3,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00						
IKSK.2137.1.2	Persentase peningkatan audiens PESPARAWI	Persen	N/A	0,00	13,20	0,00	0,00	16,70						
IKSK.2137.1.3	Persentase peningkatan peserta event seni budaya agama Kristen	Persen	N/A	0,00	13,20	0,00	0,00	16,70						
IKSK.2137.1.4	Persentase peningkatan partisipan perayaan hari besar Kristen yang diselenggarakan Negara	Persen	N/A	0,00	5,56	6,32	6,93	7,78						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.2137.1.5 Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan Kristen yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	Persen	0,40	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00						
RO.2137.QDD.001 Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama Kristen		2,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	7.721	11.250	14.063	16.875	19.406	
IKRO.2137.QDD.01.1 Jumlah dialog kerukunan agama Kristen difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	Dialog	2,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00						
RO.2137.AEG.001 Event Perayaan Hari Besar Agama Kristen	Kegiatan	N/A	0	3	3	3	3	-	-	1.500	3.000	4.500	
IKRO.2137.AEG.01.1 Jumlah Event Perayaan Hari Besar Agama Kristen yang diselenggarakan	Kegiatan	N/A	0	3	3	3	3						
IKRO.2137.AEG.01.2 Jumlah partisipan perayaan Hari Besar Kristen yang diselenggarakan negara	Orang	4.300	4.500	4.750	5.050	5.400	5.820						
RO.2137.PEG.001 Event Seni Budaya Keagamaan Kristen (PESPARAWI)	Kegiatan	N/A	77	77	1	1	77	55.719	60.000	15.000	20.000	75.500	
IKRO.2137.PEG.01.1 Jumlah Event PESPARAWI yang diselenggarakan	Kegiatan	34	77	77	1	1	77						
IKRO.2137.PEG.01.2 Jumlah audiens penyelenggaraan PESPARAWI	Orang	14.271	0	16.155	0	0	18.852						
IKRO.2137.PEG.01.3 Jumlah peserta event Seni Budaya Agama Kristen	Orang	8.396	0	9.504	0	0	11.091						
RO.2137.QDB.001 Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan Kristen	Lembaga	119	151	166	189	205	225	7.436	10.200	12.750	15.300	17.595	
IKRO.2137.QDB.01.1 Jumlah Lembaga Sosial Keagamaan Kristen yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	Lembaga	119	151	166	189	205	225						
RO.2137.QDB.003 Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Agama Kristen (Aras Nasional dan Sinode)		N/A	185	210	240	280	300	22.075	25.000	32.000	35.000	38.000	
IKRO.2137.QDB.03.1 Jumlah Lembaga Agama Kristen (Aras Nasional dan Sinode) yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	Lembaga	N/A	185	210	240	280	300						
SK.2137.2 Meningkatnya kualitas layanan keagamaan Kristen Yang profesional, inklusif, dan berdampak													
IKSK.2137.2.1 Persentase penyuluh agama Kristen yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	Persen	88,00	90,00	92,00	93,00	95,00	98,00						
IKSK.2137.2.2 Rasio penyuluh agama Kristen dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Rasio	1:3	1:3	1:3	1:4	1:4	1:5						
IKSK.2137.2.3 Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama Kristen yang dibina	Persen	70,00	70,05	71,20	72,33	73,52	74,00						
IKSK.2137.2.4 Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh bimbingan pranikah Kristen	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	1,00						
IKSK.2137.2.5 Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga Kristiani yang disediakan	Persen	0,00	6,67	7,50	7,56	8,11	10,00						
IKSK.2137.2.6 Persentase rumah ibadah agama Kristen	Persen	5,41	7,08	9,20	10,73	12,06	12,57						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan												
IKSK.2137.2.7	Persentase peningkatan kitab suci agama Kristen yang disediakan	Persen	16,73	18,83	25,56	29,17	35,48	38,10					
IKSK.2137.2.8	Persentase buku keagamaan Kristen pendukung peribadatan yang sesuai kaidah	Persen	31,77	35,00	37,45	40,12	42,74	43,71					
IKSK.2137.2.9	Persentase jumlah calon penerima dana Amal Sosial Kristiani terintegrasi basis data terpadu nasional	Persen	N/A	33,33	33,33	66,67	66,67	66,67					
IKSK.2137.2.10	Persentase Lembaga dana Amal Sosial Kristiani yang meningkat kompetensi tata kelola untuk mendukung penanggulangan kemiskinan dan memajukan kesejahteraan	Persen	33,33	33,33	33,33	66,67	66,67	66,67					
RO.2137.QDC.001	Tunjangan Penyuluh Agama Kristen Non ASN	Orang	6.953	3.420	0	0	0	0	80.088	-	-	-	-
IKRO.2137.QDC.001.1	Jumlah Penyuluh Non PNS Penerima Tunjangan	Orang	6.953	3.420	0	0	0	0					
RO.2137.QDC.002	Penyuluh Agama Kristen yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	6.859	6.950	7.105	7.182	7.336	7.569	14.353	17.000	19.500	22.000	25.250
IKRO.2137.QDC.002.1	Jumlah penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	Orang	6.859	6.950	3.967	4.020	4.116	4.257					
IKRO.2137.QDC.002.2	Jumlah Penyuluh Agama Kristen dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Kristen	Orang	6.859	6.950	3.967	4.020	4.116	4.257					
RO.2137.QDC.003	Penyuluh Agama Kristen yang dibina menjadi influencer sosial media		N/A	0	278	294	320	335	0	2.317	2.821	3.330	3.640
IKRO.2137.QDC.003.1	Jumlah penyuluh agama Kristen yang dibina menjadi influenser sosial media	Orang	N/A	0	278	294	320	335					
IKRO.2137.QDC.003.2	Jumlah konten digital penyuluhan agama Kristen inklusif transformatif yang dibuat dan dipublikasikan	Konten	N/A	0	150	200	250	300					
RO.2137.QDE.001	Bimbingan Keluarga Kristiani	Keluarga	7.630	11.157	11.400	11.600	11.800	12.000	5.996	12.000	15.000	18.000	20.700
IKRO.2137.QDE.001.1	Jumlah Keluarga Kristiani yang memperoleh Bimbingan Keluarga Kristiani	Keluarga	7.630	11.157	11.400	11.600	11.800	12.000					
IKRO.2137.QDE.001.2	Jumlah layanan bimbingan keluarga Kristiani yang disediakan	Layanan	150	160	172	185	200	220					
RO.2137.QDE.002	Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Kristiani			1.390	2.500	3.500	5.200	8.300	1.041	3.570	5.588	6.705	8.571
IKRO.2137.QDE.002.1	Jumlah fasilitator bimbingan perkawinan yang dibina	Orang	N/A	1.390	2.500	3.500	5.000	8.000					
IKRO.2137.QDE.002.2	Jumlah remaja Kristen usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah	Orang	N/A	0	0	0	200	300					
IKRO.2137.QDE.002.3	Jumlah calon pengantin Kristiani	Pasangan	N/A	154.900	155.200	155.500	155.800	156.000					

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
RO.2137.QEI.001	Bantuan Rumah Ibadah Agama Kristen yang Difasilitasi untuk meningkatkan Layanan	Lembaga	529	782	950	1.280	1.980	2.035	40.732	44.000	55.000	66.000	75.900	
IKRO.2137.QEI.001.1	Jumlah Rumah Ibadah Agama Kristen yang mendapat bantuan dalam pemenuhan standar sarana prasarana	Lembaga	529	782	950	1.280	1.980	2.035						
RO.2137.QEO.001	Kitab Suci dan Sarana Peribadatan Agama Kristen yang disediakan		25.113	25.959	30.000	34.000	38.000	42.000	7.171	9.000	11.250	13.500	15.525	
IKRO.2137.QEO.001.1	Jumlah Kitab Suci Agama Kristen yang disediakan	Unit	25.113	25.959	30.000	34.000	38.000	42.000						
IKRO.2137.QEO.001.2	Jumlah Buku Keagamaan Kristen pendukung peribadatan yang sesuai kaidah	Unit	NA	0	5	10	15	20						
RO.2137.QDB.002	Pembinaan Lembaga Amal Kristiani yang Diperkuat Program Pengentasan Kemiskinan		1	1	1	2	2	3	600	1.500	1.875	2.250	2.588	
IKRO.2137.QDB.002.1	Jumlah Lembaga Amal Sosial Kristiani yang dibina/diperkuat dalam pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan	Lembaga	1	1	1	2	2	3						
RO.2137.QEI.002	Bantuan Operasional Pembinaan Lembaga Pengelola Amal Sosial Kristiani			3	3	3	3	3	500	3.000	4.500	6.000	7.000	
IKRO.2137.QEI.002.1	Jumlah Lembaga dana Amal Sosial Kristiani yang memperoleh bantuan operasional	Lembaga	N/A	3	3	3	3	3						
2140 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik									136.804	124.261	138.691	162.154	199.836	[BIMAS KATOLIK] Direktorat Urusan Agama Katolik
SK.2140.1	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama Katolik								0	0	0	0	0	
IKSK.2140.1.1	Persentase Peningkatan Dialog Kerukunan Agama Katolik yang difasilitasi untuk merumuskan Rekomendasi EWS	Persen	N/A	0,00	50,00	33,33	25,00	20,00						
IKSK.2140.1.2	Persentase Peningkatan Audiens Pesparani	Persen	N/A	7,14	5,88	6,25	5,56	5,66						
IKSK.2140.1.3	Persentase peningkatan peserta event seni budaya agama Katolik	Persen	N/A	10,00	5,56	7,14	6,67	5,26						
IKSK.2140.1.4	Persentase peningkatan partisipan perayaan hari besar Katolik yang diselenggarakan Negara	Persen	N/A	4,17	4,20	4,61	4,95	5,24						
IKSK.2140.1.5	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan Katolik yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	Persen	N/A	17,50	36,25	56,25	77,50	85,00						
RO.2140.AEG.001	Penyelenggaraan Event Seni Budaya dan Hari Besar Keagamaan Katolik	Kegiatan	N/A	0	1	1	1	1	0	1.000	1.150	1.323	1.521	
IKRO.2140.AEG.001.1	Jumlah partisipan perayaan hari besar agama Katolik yang diselenggarakan Negara	Orang	N/A	0,00	13.025	13.625	14.300	15.050						
RO.2140.PEG.001	Penyelenggaraan Event dan Seni Budaya Keagamaan Katolik (Pesparani)	Kegiatan	N/A	39	39	38	38	39	1.900	10.000	2.186	2.513	11.500	

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKRO.2140.PEG.01.1	Jumlah audiens penyelenggaraan Pesparani	Orang	N/A	0	19.500	0	0	20.300					
IKRO.2140.PEG.01.2	Jumlah peserta event seni budaya agama Katolik	Orang	N/A	0	8.000	0	0	8.300					
IKRO.2140.PEG.01.3	Jumlah Penyelenggaraan Event dan Seni Budaya Keagamaan Katolik (Pesparani)	Kegiatan	N/A	39	39	39	39	39					
RO.2140.QDB.002	Fasilitas dan Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan Katolik	Lembaga	N/A	179	179	179	179	179	7.458	8.577	9.863	11.343	13.044
IKRO.2140.QDB.02.1	Jumlah lembaga agama Katolik dan sosial keagamaan Katolik yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	Lembaga	N/A	179	179	179	179	179					
RO.2140.QDD.002	Dialog Kerukunan Umat Beragama Katolik	Kelompok Masyarakat	N/A	4.977	4.977	4.977	4.977	4.977	5.004	5.755	6.618	7.611	8.753
IKRO.2140.QDD.02.1	Jumlah dialog kerukunan agama Katolik difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	Kegiatan	N/A	39	39	39	39	39					
SK.2140.2	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan Katolik yang profesional, inklusif, dan berdampak								0	0	0	0	0
IKSK.2140.2.1	Persentase Penyuluh Agama Katolik yang memperoleh nilai kinerja berkategori Baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	Persen	100,00	80,00	85,00	90,00	95,00	96,00					
IKSK.2140.2.2	Rasio Penyuluh Agama Katolik dengan Kelompok Sasaran yang mendapatkan Bimbingan Agama Katolik	Nilai	1:2	1:6	1:6	1:6	1:6	1:6					
IKSK.2140.2.3	Persentase peningkatan frekuensi bimbingan perkawinan Katolik	Persen	N/A	23,33	28,59	36,09	45,39	56,03					
IKSK.2140.2.4	Persentase remaja Katolik usia sekolah yang memperoleh bimbingan perkawinan pra nikah	Persen	N/A	0,00	12,00	25,00	30,00	32,00					
IKSK.2140.2.5	Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga bahagia Katolik yang disediakan	Persen	N/A	16,81	35,30	55,46	76,47	90,00					
IKSK.2140.2.6	Persentase rumah ibadah Katolik yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan	Persen	N/A	4,21	6,50	8,87	11,32	13,83					
IKSK.2140.2.7	Persentase peningkatan Kitab Suci Agama Katolik yang disediakan	Persen	N/A	19,77	39,69	59,68	79,73	99,78					
IKSK.2140.2.8	Persentase Buku Keagamaan Katolik pendukung peribadatan yang sesuai kaidah	Persen	N/A	0,00	15,00	20,00	23,33	25,00					
IKSK.2140.2.9	Persentase jumlah calon penerima Dana Amal Kasih Katolik terintegrasi basis data terpadu nasional	Persen	N/A	18,97	38,45	58,45	78,97	99,49					
IKSK.2140.2.10	Persentase Lembaga Dana Amal Kasih Katolik yang meningkat kompetensi tata kelola untuk mendukung penanggulangan kemiskinan dan memajukan kesejahteraan	Persen	N/A	80,00	85,00	90,00	95,00	96,00					
RO.2140.QDB.001	Pembinaan Lembaga Pengelola Dana Amal Kasih Katolik yang Diperkuat	Lembaga	N/A	38	38	38	38	38	500	1.900	2.185	2.513	2.890

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Program Pengentasan Kemiskinan												
IKRO.2140.QDB.01.1	Jumlah Calon Penerima dana Amal Kasih Katolik terintegrasi basis data terpadu nasional	Orang	N/A	18.390	18.890	19.390	19.890	20.390					
IKRO.2140.QDB.01.2	Jumlah Lembaga BAKKAT yang dibina	Lembaga	N/A	1	2	3	4	4					
RO.2140.QDB.003	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Agama Katolik (KWI)	Lembaga	N/A	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	1.950	2.550	2.933	3.372	3.878
IKRO.2140.QDB.03.1	Jumlah lembaga agama Katolik yang profesional yang dibantu	Lembaga	N/A	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00					
RO.2140.QDC.001	Penyuluh Agama Katolik Non ASN Penerima Tunjangan	Orang	N/A	2,777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.324	0	0	0	0
IKRO.2140.QDC.01.1	Jumlah Penyuluh Agama Katolik Non ASN Penerima Tunjangan	Orang	N/A	2,777,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
RO.2140.QDC.002	Penyuluh Agama Katolik yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	N/A	3,488,00	3,662,00	3,847,00	4,038,00	4,118,00	9.235	10.621	12.214	14.046	16.153
IKRO.2140.QDC.02.1	Jumlah kelompok sasaran penyuluhan Katolik yang mendapatkan bimbingan atau penyuluhan agama Katolik	Kelompok	N/A	2,712,00	2,712,00	2,712,00	2,712,00	2,712,00					
IKRO.2140.QDC.02.2	Jumlah penyuluh agama Katolik yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	Orang	N/A	3,332,00	3,332,00	3,332,00	3,332,00	3,332,00					
RO.2140.QDC.003	Penyuluh Agama Katolik yang dibina menjadi influencer sosial media	Orang	N/A	1,030,00	1,030,00	1,030,00	1,030,00	1,030,00	920	1.320	1.748	2.314	3.057
IKRO.2140.QDC.03.1	Jumlah Konten Digital Keagamaan Katolik Inklusif Transformatif yang dihasilkan	Konten	N/A	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00					
RO.2140.QDD.001	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Kategorial Katolik	Kelompok Masya-rakat	N/A	848,00	848,00	848,00	848,00	848,00	3.267	4.240	4.876	5.608	6.448
IKRO.2140.QDD.01.1	Jumlah Kelompok Kategorial Katolik yang Diberikan Fasilitas dan Pembinaan	Kelompok	N/A	848,00	848,00	848,00	848,00	848,00					
RO.2140.QDE.001	Bimbingan Keluarga Bahagia Katolik	Keluarga	N/A	9,792,00	9,792,00	9,792,00	9,792,00	9,792,00	5.229	6.014	6.916	7.953	9.146
IKRO.2140.QDE.01.1	Jumlah keluarga Katolik yang memperoleh bimbingan keluarga bahagia	Keluarga	N/A	5,316,00	5,484,00	6,379,00	6,645,00	7,442,00					
RO.2140.QDE.002	Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Katolik	Keluarga	N/A	3,580,00	3,580,00	3,580,00	3,580,00	3,580,00	3.320	3.818	4.391	5.049	5.807
IKRO.2140.QDE.02.1	Jumlah peningkatan frekuensi bimbingan perkawinan Katolik	Kegiatan	N/A	38,00	40,00	43,00	47,00	52,00					
IKRO.2140.QDE.02.2	Jumlah remaja Katolik usia sekolah yang memperoleh bimbingan pemahaman perkawinan	Orang	N/A	0,00	1,200,00	2,500,00	3,000,00	3,200,00					
IKRO.2140.QDE.02.3	Jumlah calon pengantin Katolik yang mendapatkan bimbingan perkawinan	Catin	N/A	3,580,00	3,500,00	3,300,00	3,200,00	3,000,00					
RO.2140.QEI.009	Rumah ibadah Agama Katolik yang difasilitasi untuk meningkatkan layanan	Lembaga	N/A	112,00	123,00	136,00	149,00	164,00	59.600	60.000	72.000	82.805	96.422
IKRO.2140.QEI.009.1	Jumlah Rumah Ibadah Katolik yang Memperoleh Bantuan Sarana dan Prasarana Peribadatan	Lembaga	N/A	112,00	123,00	136,00	149,00	164,00					
RO.2140.QEI.011	Bantuan Operasional Pembinaan	Lembaga	N/A	11,00	14,00	19,00	24,00	30,00	1.200	1.755	2.739	3.979	5.719

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Baklat Katolik													
IKRO.2140.QEI.01.1 Jumlah Lembaga dana Amal Sosial Katolik yang meningkatkan kompetensi, tata kelola untuk mendukung penanggulangan kemiskinan dan memajukan kesejahteraan	Lembaga	N/A	11,00	14,00	19,00	24,00	30,00						
RO.2140.QEO.001 Bantuan Kitab Suci dan Sarana Peribadatan Agama Katolik yang disediakan	Unit	N/A	10,410,00	12,087,00	13,899,00	15,984,00	18,382,00	3.896	6.712	8.873	11.726	15.499	
IKRO.2140.QEO.001.1 Jumlah peningkatan Kitab Suci Katolik yang disediakan	Unit	N/A	7,065,00	8,125,00	9,343,00	10,745,00	12,357,00						
IKRO.2140.QEO.001.2 Jumlah buku keagamaan Katolik pendukung peribadatan sesuai kaidah	Unit	N/A	9,00	9,00	12,00	14,00	15,00						
2143 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu								97.176	124.058	150.375	146.394	156.269	[BIMAS HINDU] Direktorat Urusan Agama Hindu
SK.2143.1 Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat Hindu								0	0	0	0	0	
IKSK.2143.1.1 Persentase peningkatan dialog kerukunan agama Hindu yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	Persen	N/A	10,00	12,00	15,00	17,00	20,00						
IKSK.2143.1.2 Persentase peningkatan audiens Utsawa Dharma Gita	Persen	9,10	0,00	0,00	16,70	0,00	0,00						
IKSK.2143.1.3 Persentase peningkatan peserta event seni budaya agama Hindu	Persen	47,80	0,00	1,49	3,33	3,87	4,35						
IKSK.2143.1.4 Persentase peningkatan partisipan perayaan hari besar besar Hindu yang diselenggarakan Negara	Persen	1,23	1,23	3,03	3,53	3,60	3,84						
IKSK.2143.1.5 Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan Hindu yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	Persen	28,30	31,30	34,80	38,30	41,80	45,30						
RO.2143 PEG 001 Event dan Seni Budaya Keagamaan Hindu (Utsawa Dharma Gita)	Kegiatan	34	22	22	22	22	22	2.322	2.775	20.000	5.500	5.500	
IKRO.2143 PEG 001.1 Jumlah audiens penyelenggaraan Utsawa Dharma Gita	Orang	12.000	0	0	15.000	0	0						
IKRO.2143 AEG 001 Event seni budaya dan Hari Besar Keagamaan Hindu	Kegiatan	22	22	22	22	22	22	5.000	6.000	7.000	8.000	8.000	
IKRO.2143 AEG 001.1 Jumlah peserta event seni budaya agama	Orang	1.478	0	1.500	1.550	1.610	1.680						
IKRO.2143 AEG 001.2 Jumlah partisipan perayaan hari besar besar Hindu yang diselenggarakan Negara	Orang	16.300	16.500	17.000	17.600	18.250	18.950						
RO.2143.QDB.001 Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan Hindu	Lembaga	65	622	622	622	622	622	12.285	18.092	19.094	20.099	21.099	
IKRO.2143.QDB.001.1 Jumlah lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	Lembaga	203	225	250	275	300	325						
RO.2143.QDD.001 Kelompok Binaan Penyuluh Agama	Kelompok Masyarakat	N/A	183	0	0	0	0	1.553	60	0	0	0	

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1Hindu													
IKRO.2143.QDD.01.1Kelompok Binaan Penyuluh Agama Hindu	Kelompok	N/A	183	0	0	0	0						
RO.2143.QDD.002	Dialog Kerukunan Intern Umat Hindu	Kelompok Masya-rakat	1395	2116	2116	2116	2116	2116	7.253	8.602	8.602	8.602	8.602
IKRO.2143.QDD.02.1Jumlah dialog kerukunan agama Hindu difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	Kegiatan	10	10	12	15	17	20						
SK.2143.2	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan Hindu yg profesional, inklusif, dan berdampak												
IKSK.2143.2.1Persentase penyuluh agama Hindu yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	Persen	58,00	65,20	72,50	72,50	79,70	79,70						
IKSK.2143.2.2Rasio penyuluh agama Hindu dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Hindu	Rasio	1 : 8	1 : 8	1 : 8	1 : 8	1 : 8	1 : 8						
IKSK.2143.2.3Persentase fasilitator bimbingan perkawinan Agama Hindu yang tersertifikasi	Persen	N/A	51,00	54,00	58,00	62,00	65,00						
IKSK.2143.2.4Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh bimbingan pra nikah	Persen	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90						
IKSK.2143.2.5Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan	Persen	4,55	8,30	9,00	9,20	10,10	10,70						
IKSK.2143.2.6Persentase rumah ibadah Hindu yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan	Persen	56,96	59,30	63,30	56,96	56,96	56,96						
IKSK.2143.2.7Persentase peningkatan kitab suci agama Hindu yang disediakan	Persen	N/A	1,50	1,50	1,50	1,50	1,60						
IKSK.2143.2.8Persentase buku keagamaan agama Hindu pendukung peribadatan yang sesuai kaidah	Persen	N/A	1,50	1,50	1,50	1,50	1,60						
IKSK.2143.2.9Persentase jumlah calon penerima Dana Punia terintegrasi basis data terpadu nasional	Persen	0,08	0,16	0,24	0,33	0,41	0,50						
IKSK.2143.2.10Persentase Lembaga Dana Punia yang meningkat kompetensi tata kelola untuk mendukung penanggulangan kemiskinan dan memajukan kesejahteraan	Persen	100,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00						
RO.2143.QDC.001	Penyuluh Agama Hindu Non ASN Penerima Tunjangan	Orang	1.407	1.259	0	0	0	0	15.228	0	0	0	0
IKRO.2143.QDC.01.1Jumlah penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	Orang	80	90	0	0	0	0						
RO.2143.QDC.002	Penyuluh Agama Hindu yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	1.358	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.465	6.756	4.956	4.956	4.956
IKRO.2143.QDC.02.1Jumlah penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan	Orang	1450 & 11600	1450 & 11600	1450 & 11600	1450 & 11600	1450 & 11600	1450 & 11600						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
bimbingan agama													
RO.2143.QDC.003 Penyuluh Agama Hindu yang yang dibina menjadi <i>influencer</i> sosial media	Orang	0	100	150	150	150	150	937	937	937	937	937	
IKRO.2143.QDC.03.1 Jumlah Konten Digital Keagamaan Inklusif Transformatif yang dihasilkan	Konten	0	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000						
RO.2143.QDE.001 Bimbingan Keluarga Sukinah	Keluarga	1.684	2.573	3.870	4.140	4.140	3.210	4.284	10.198	11.198	12.698	13.198	
IKRO.2143.QDE.01.1 Jumlah keluarga mendapatkan bimbingan keluarga Sukinah	Keluarga	1.500	2.500	2.725	2.975	3.275	3.625						
RO.2143.QDE.002 Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Hindu	Keluarga	0	1.054	1.094	1.094	1.094	1.094	3.142	7.066	8.066	9.066	10.066	
IKRO.2143.QDE.02.1 Jumlah fasilitator bimbingan perkawinan yang tersertifikasi	Orang	0	70	75	80	85	90						
IKRO.2143.QDE.02.2 Jumlah remaja usia sekolah yang memperoleh bimbingan pra nikah	Orang	0	2.500	2.525	2.550	2.575	2.600						
IKRO.2143.QDE.02.3 Jumlah catin yang memperoleh bimbingan perkawinan	Orang	0	800	880	980	1.100	1.240						
RO.2143.QEO.001 Kitab suci dan sarana peribadatan agama Hindu yang disediakan	Unit	13.453	22.961	22.961	22.961	22.961	22.961	10.481	23.049	24.549	24.563	25.563	
IKRO.2143.QEO.01.1 Jumlah peningkatan kitab suci yang disediakan	Unit	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900						
IKRO.2143.QEO.01.2 Jumlah buku keagamaan agama Hindu pendukung peribadatan yang sesuai kaidah	Unit	6.953	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900						
RO.2143.QEI.003 Rumah ibadah Agama Hindu yang difasilitasi untuk meningkatkan layanan	Lembaga	389	407	410	416	416	421	21.728	26.934	32.384	38.384	44.759	
IKRO.2143.QEI.003.1 Jumlah rumah ibadah yang memperoleh bantuan sarana dan prasarana peribadatan	Lembaga	389	407	410	416	416	421						
RO.2143.QDB.003 Lembaga Agama yang dibantu	Lembaga	196	123	130	130	130	130	6.172	9.065	9.065	9.065	9.065	
IKRO.2143.QDB.03.1 Jumlah Lembaga Agama Hindu yang Profesional	Lembaga	300	225	250	275	300	325						
RO.2143.QEI.002 Prasarana lembaga agama dan keagamaan Hindu yang dibantu	Lembaga	15	8	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	
IKRO.2143.QEI.002.1 Jumlah Lembaga Agama Hindu yang Profesional	Lembaga	15	225	0	0	0	0						
RO.2143.QDB.002 Pembinaan Lembaga Dana Punia yang diperkuat literasi dengan Program Pengentasan Kemiskinan	Lembaga	8	2	10	10	10	10	625	4.025	4.025	4.025	4.025	
IKRO.2143.QDB.02.1 Jumlah calon penerima dana Dana punia terintegrasi basis data terpadu nasional	Orang	200	200	300	420	520	630						
IKRO.2143.QDB.02.2 Jumlah Lembaga Dana Punia yang dibina	Lembaga	N/A	2	10	10	10	10						
RO.2143.QEI.004 Bantuan Operasional Badan Dharma Dana Nasional (BDDN)	Lembaga	1	1	1	1	1	1	200	500	500	500	500	
IKRO.2143.QEI.004.1 Jumlah Lembaga Dharma Dana yang meningkat kompetensi tata kelola untuk mendukung penanggulangan kemiskinan dan memajukan	Lembaga	1	1	1	1	1	1						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	kesejahteraan												
2145 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha								82.226	113.123	119.060	125.244	131.688	[BIMAS BUDDHA] Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha
SK.2145.1 Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan Umat Buddha													
IKSK.2145.1.1 Persentase peningkatan dialog kerukunan agama Buddha yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	Persen	100,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00						
IKSK.2145.1.2 Persentase peningkatan audiens Swayamvara Tripitaka Gatha	Persen	40,00	0,00	50,00	0,00	0,00	60,00						
IKSK.2145.1.3 Persentase peningkatan peserta event seni budaya agama Buddha	Persen	15,38	0,00	15,00	0,00	0,00	15,07						
IKSK.2145.1.4 Persentase peningkatan partisipan perayaan hari besar Buddha yang diselenggarakan Negara	Persen	N/A	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50						
IKSK.2145.1.5 Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan Buddha yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	Persen	16,23	17,22	17,22	17,22	17,22	17,22						
RO.2145.PEG.00 Event Seni Budaya Keagamaan Buddha (Swayamvara Tripitaka Gatha)	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	9.010	30.000	31.500	33.075	34.729	
IKRO.2145.PEG.01.1 Jumlah audiens penyelenggaraan Swayamvara Tripitaka Gatha	Orang	700	850	1000	1150	1300	1500						
IKRO.2145.PEG.01.2 Jumlah peserta event seni budaya agama	Orang	500	500	1725	1810	1895	1985						
RO.2145.AEG.00 Event Hari Besar Keagamaan Buddha	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	
IKRO.2145.AEG.01.1 Jumlah partisipan perayaan hari besar Buddha yang diselenggarakan Negara	Orang	N/A	4.500	5.000	5.500	6.000	6.500						
RO.2145.QDD.00 Dialog Kerukunan Intern Umat Buddha dan Moderasi Beragama Buddha	Kelompok Masyarakat	N/A	272	272	272	272	272	7.894	9.737	10.224	10.735	11.272	
IKRO.2145.QDD.01.1 Jumlah dialog kerukunan agama Buddha difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	Kelompok Masyarakat	N/A	272	272	272	272	272						
RO.2145.QDB.00 Fasilitas dan Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan Buddha	Lembaga	N/A	364	364	364	364	364	1.132	1.185	1.244	1.306	1.372	
IKRO.2145.QDB.02.1 Jumlah lembaga sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	Lembaga	N/A	364	364	364	364	364						
SK.2145.2 Meningkatnya kualitas layanan keagamaan Buddha yang profesional, inklusif, dan berdampak													
IKSK.2145.2.1 Persentase penyuluh agama Buddha yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan Harian, Konten Digital, Kediklatan)	Persen	7,21	14,66	19,55	24,44	29,33	34,21						
IKSK.2145.2.2 Rasio penyuluh agama Buddha dengan kelompok sasaran yang mendapatkan	Rasio	1:4	1:6	1:6	1:6	1:6	1:6						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	bimbingan agama												
IKSK.2145.2.3	Persentase fasilitator bimbingan perkawinan Agama Buddha yang tersertifikasi	Persen	N/A	0,00	12,56	25,13	37,69	50,25					
IKSK.2145.2.4	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh bimbingan pra nikah Agama Buddha	Persen	N/A	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00					
IKSK.2145.2.5	Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga Agama Buddha yang disediakan	Persen	N/A	18,64	14,29	12,50	11,11	10,00					
IKSK.2145.2.6	Persentase rumah ibadah Agama Buddha yang memperoleh bantuan sarana dan prasarana peribadatan	Persen	3,28	4,24	4,36	4,57	4,75	5,10					
IKSK.2145.2.7	Persentase peningkatan kitab suci Agama Buddha yang disediakan	Persen	N/A	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00					
IKSK.2145.2.8	Persentase buku keagamaan Buddha pendukung peribadatan yang sesuai kaidah	Persen	N/A	3,88	4,63	5,51	6,51	7,63					
IKSK.2145.2.9	Persentase jumlah calon penerima Dana Paramita terintegrasi basis data terpadu nasional	Persen	N/A	5,00	7,00	10,00	12,00	15,00					
IKSK.2145.2.10	Persentase Lembaga Dana Paramita yang meningkat kompetensi tata kelola untuk mendukung penanggulangan kemiskinan dan memajukan kesejahteraan	Persen	100,00	92,00	94,00	96,00	98,00	99,00					
RO.2145.QDC.001	Penyuluh Agama Buddha Non ASN Penerima Tunjangan	Orang	1091	1081	0	0	0	0	12.972	0	0	0	0
IKRO.2145.QDC.001.1	Jumlah penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	Orang	1000	1000	0	0	0	0					
RO.2145.QDC.002	Penyuluh Agama Buddha yang Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	1261	1208	215	215	215	215	1.596	15.600	15.811	16.033	16.266
IKRO.2145.QDC.002.1	Jumlah penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Orang	1261	1208	215	215	215	215					
IKRO.2145.QDC.002.2	Jumlah penyuluh agama Buddha yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	Orang	0	215	215	215	215	215					
RO.2145.QDC.003	Penyuluh Agama Buddha yang Aktif dalam Konten Digital Keagamaan Inklusif Transformatif	Orang	N/A	305	305	305	305	305	1.724	1.835	1.927	2.023	2.124
IKRO.2145.QDC.003.1	Jumlah penyuluh agama Buddha yang dibina menjadi influenser sosial media	Orang	N/A	50	65	80	95	110					
IKRO.2145.QDC.003.2	Jumlah Konten Digital Penyuluh Agama Buddha Inklusif Transformatif yang dibuat dan dipublikasikan	Konten Digital	N/A	279	300	315	331	347					
RO.2145.QDE.001	Bimbingan Keluarga Hitta Sukkhaya	Keluarga	2000	1765	1765	1765	1765	1765	902	1.650	1.733	1.819	1.910

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKRO.2145.QDE.01.1 Jumlah layanan bimbingan Hitta Sukkhaya yang disediakan	Keluarga	2000	1765	1765	1765	1765	1765						
RO.2145.QDE.002 Calon Pengantin Buddha yang Memperoleh Bimbingan Perkawinan	Pasangan	N/A	765	765	765	765	765	765	500	525	551	579	
IKRO.2145.QDE.02.1 Jumlah fasilitator bimbingan perkawinan agama Buddha yang tersertifikasi	Orang	N/A	0	50	100	150	200						
IKRO.2145.QDE.02.2 Jumlah remaja usia sekolah yang memperoleh sertifikat kursus pra nikah agama Buddha	Remaja	N/A	1500	1500	1500	1500	1500						
IKRO.2145.QDE.02.3 Jumlah catin agama Buddha yang memperoleh bimbingan perkawinan	Pasangan	N/A	105,00	110,00	115,00	120,00	125,00						
RO.2145.QEO.001 Bantuan Kitab Suci dan Sarana Peribadatan Agama Buddha	Unit	N/A	13952	13952	13952	13952	13952	1.433	4.400	4.620	4.851	5.094	
IKRO.2145.QEO.01.1 Jumlah peningkatan kitab suci yang disediakan	Unit	N/A	10000	10000	10000	10000	10000						
IKRO.2145.QEO.01.2 Jumlah buku keagamaan Buddha pendukung peribadatan yang sesuai kaidah	Unit	N/A	1452	5000	5750	6538	7364						
IKRO.2145.QEO.01.3 Jumlah sarana peribadatan yang disediakan	Unit	N/A	1000	2000	3000	4000	5000						
RO.2145.QEI.002 Rumah Ibadah Agama Buddha yang Difasilitasi untuk Meningkatkan Layanan	Lembaga	186	241	248	260	273	287	34.915	36.025	37.827	39.718	41.704	
IKRO.2145.QEI.002.1 Jumlah rumah ibadah yang memperoleh bantuan sarana dan prasarana peribadatan	Lembaga	186	241	248	260	273	287						
RO.2145.QEI.001 Bantuan Lembaga Agama Buddha	Lembaga	100	8	9	10	11	12	6.582	6.291	6.605	6.935	7.282	
IKRO.2145.QEI.001.1 Jumlah Lembaga Agama Buddha yang Profesional	Lembaga	100	8	9	10	11	12						
RO.2145.QDD.002 Kelompok Masyarakat Buddha yang Memperoleh Penguatan Pemberdayaan Ekonomi	Kelompok Masyarakat	35	0	30	32	33	35	0	1.500	1.575	1.654	1.736	
IKRO.2145.QDD.002.1 Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan dan dikuatkan dalam pemberdayaan ekonomi	Kelompok Masyarakat	35	0	30	32	33	35						
RO.2145.QDB.001 Pembinaan Lembaga Dana Paramita yang Diperkuat Program Pengentasan Kemiskinan	Lembaga	N/A	9	9	9	9	9	900	1.000	1.050	1.103	1.158	
IKRO.2145.QDB.001.1 Jumlah calon penerima dana Dana Paramita terintegrasi basis data terpadu nasional	Orang	N/A	270	315	360	405	450						
IKRO.2145.QDB.001.2 Jumlah Lembaga Dana Paramita yang dibina	Lembaga	N/A	9	9	9	9	9						
RO.2145.QEI.001 Bantuan Operasional Pembinaan Lembaga Pengelola Dana Paramita	Lembaga	N/A	241	248	260	273	287	400	400	420	441	463	
IKRO.2145.QEI.001.2.1 Jumlah Lembaga dana Paramita yang meningkat kompetensi tata kelola untuk mendukung penanggulangan kemiskinan dan memajukan kesejahteraan	Lembaga	N/A	241	248	260	273	287						
2147 Pelayanan Haji Dalam Negeri								603.211	603.211	603.211	603.211		[DITJEN PHU] Direktorat Haji Dalam

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
													Negeri
SK.2147.1	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji												
IKSK.2147.1.1	Tingkat Kepuasan layanan Asrama Haji	Nilai	N/A	82	84	86	88	90					
IKSK.2147.1.2	Persentase calon jemaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota	Persen	N/A	5	5	5	5	5					
RO.2147.QAA.001	Layanan Administrasi Haji Dalam Negeri	Orang	N/A	476.615	0	0	0	0	20.224	20.224	20.224	20.224	0
IKRO.2147.QAA.001.1	Jumlah calon jemaah haji yang diberangkatkan	Jumlah	N/A	203.320	0	0	0	0					
IKRO.2147.QAA.001.2	Jumlah calon jemaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota	Layanan	N/A	11.050	0	0	0	0					
RO.2147.QAH.001	Asrama Haji yang Profesional Melayan	Layanan	N/A	33	0	0	0	0	4.704	4.704	4.704	4.704	0
IKRO.2147.QAH.001.1	Jumlah layanan asrama haji	Layanan	N/A	10	0	0	0	0					
RO.2147.QAH.003	Revitalisasi Asrama Haji - SBSN	Layanan	N/A	5	0	0	0	0	399.007	399.007	399.007	399.007	0
IKRO.2147.QAH.003.1	Jumlah Revitalisasi Asrama Haji - SBSN	Layanan	N/A	10	0	0	0	0					
SK.2147.2	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji												
IKSK.2147.2.1	Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	Persen	N/A	80	81	81	82	82					
IKSK.2147.2.2	Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu	Nilai	N/A	86	87	87	88	88					
RO.2147.QAH.002	Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu yang Profesional Melayani - SBSN	Layanan	N/A	54	0	0	0	0	179.276	179.276	179.276	179.276	0
IKRO.2147.QAH.002.1	Jumlah pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	Layanan	253	307	0	0	0	0					
IKRO.2147.QAH.002.2	Jumlah layanan pusat layanan haji dan umrah terpadu	Layanan	253	307	0	0	0	0					
2148 Pembinaan Haji									440.162	441.880	441.880	441.880	-
SK.2148.1	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji												
IKSK.2148.1.1	Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75	Persen	N/A	80,00	0	0	0	0					
IKSK.2148.1.2	Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	Persen	N/A	70,00	0	0	0	0					
RO.2148.QAH.001	Nilai Kerjasama dan Konsultasi haji	Layanan	N/A	3	0	0	0	0	1.631	3.349	3.349	3.349	0
IKRO.2148.QAH.001.1	Jumlah NSPK yang disusun	Layanan	N/A	7	0	0	0	0					
RO.2148.QDC.001	Petugas Haji yang Profesional	Orang	N/A	18.015	0	0	0	0	423.396	423.396	423.396	423.396	0
IKRO.2148.QDC.001.1	Jumlah petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75	Orang	N/A	4.420	0	0	0	0					
RO.2148.QDC.002	Jemaah Haji Reguler yang Terbina	Orang	N/A	117.670	0	0	0	0	15.134	15.134	15.134	15.134	0

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKRO.2148.QDC.02.1 Jumlah calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	Orang	N/A	221.000	0	0	0	0						
2149 Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji								26.173,383	26.173,383	26.173,383	26.173,383		[DITJEN PHU] Direktorat Pengelolaan Biaya Operasional Haji
SK.2149.1 Meningkatnya pemanfaatan dana operasional haji yang efektif													
IKSK.2149.1.1 Opini laporan pengelolaan dana operasional teraudit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Nilai	95	96	0	0	0	0						
RO.2149.UAH.001 Laporan Keuangan Haji yang akuntabel	Laporan	N/A	4	0	0	0	0	4.626	4.626	4.626	4.626	0	
IKRO.2149.UAH.001.1 Jumlah laporan pengelolaan dana operasional teraudit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Laporan	N/A	1	0	0	0	0						
SK.2149.2 Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu													
IKSK.2149.2.1 Tingkat kepuasan pengakses layanan website haji	Nilai	80	81	0	0	0	0						
RO.2149.QMA.001 Sistem Informasi Haji yang Handal	Layanan	N/A	15	0	0	0	0	21.547	21.547	21.547	21.547	0	
IKRO.2149.QMA.001.1 Jumlah pengakses layanan website haji	Layanan	N/A	8	0	0	0	0						
5310 Pelayanan Haji Luar Negeri								7.714	7.714	7.714	7.714	7.714	[DITJEN PHU] Direktorat Haji Luar Negeri
SK.5310.1 Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji													
IKSK.5310.1.1 Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar	Persen	N/A	88	0	0	0	0						
IKSK.5310.1.2 Persentase jumlah daging/dam yang disalurkan ke penduduk Indonesia	Persen	N/A	70	0	0	0	0						
RO.5310.QDC.001 Layanan Administrasi Haji Luar Negeri	Orang	N/A	221.000	0	0	0	0	7.099	7.099	7.099	7.099	7.099	
IKRO.5310.QDC.001.1 Jumlah pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar	Layanan	N/A	221.000	0	0	0	0						
RO.5310.QDC.002 Jemaah Haji yang terlayani penyaluran Daging Qurban	Orang	N/A	221.000	0	0	0	0	615	615	615	615	615	
IKRO.5310.QDC.002.1 Jumlah daging /Dam yang disalurkan ke penduduk Indonesia	Orang	N/A	221.000	0	0	0	0						
5620 Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama								79.593	147.437	210.426	205.806	205.806	[SETJEN] Pusat Kerukunan Umat Beragama
SK.5620.1 Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama													
IKSK.5620.1.1 Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	Persen	10,00	19,00	28,00	37,00	46,00	55,00						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) /SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /INDIKATOR		SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.5620.1.2	Persentase Provinsi yang memperoleh nilai kerukunan umat beragama dengan kategori sangat tinggi	Persen	18,79	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00						
IKSK.5620.1.3	Nilai Aspek Penerimaan terhadap Perbedaan Sosial (agama dan etnis)	Nilai	61,78	64,39	66,99	69,60	72,20	74,81						
RO.5620.QDB.001	FKUB Daerah yang Melakukan Pencegahan, Advokasi, dan Mitigasi Konflik	N/A	550	552	552	552	552	552	30.700	93.924	93.924	93.924	93.924	
IKRO.5620.QDB.01.1	Jumlah Provinsi yang memperoleh nilai kerukunan umat beragama dengan kategori sangat tinggi	Provinsi	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00						
IKRO.5620.QDB.01.2	Jumlah FKUB Kabupaten/ Kota yang memperoleh fasilitasi dialog kerukunan umat beragama	Jumlah	512	512	514	514	514	514						
RO.5620.QDC.002	Tokoh Masyarakat terlibat dalam Kerjasama Kerukunan Umat Agama Nasional dan Internasional								48.893	53.513	116.502	111.882	111.882	
IKRO.5620.QDC.02.1	Jumlah dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	Dialog	18	30	49	58	77	96						
IKRO.5620.QDC.02.2	Jumlah tokoh masyarakat yang terlibat dalam kerjasama kerukunan umat beragama	Orang	N/A	60	98	116	154	192						
7891 Pembinaan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal									1.000	4.500	5.000	5.500	6.000	[BIMAS ISLAM] Direktorat Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
SK.7891.1	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Islam dan Kualitas Pengawasan dalam Pemanfaatan Produk Halal													
IKSK.7891.1.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan	Persen	N/A	0,84	1,67	3,34	4,30	6,69						
IKSK.7891.1.2	Nilai literasi halal	Nilai	N/A	50	55	60	65	70						
RO.7891.PBN.001	Kebijakan Penjaminan Produk Halal	Rekomendasi Kebijakan	N/A	1	1	1	1	1	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
IKRO.7891.PBN.01.1	Jumlah hasil pemantauan pengawas halal yang diterbitkan	Dokumen	N/A	50	100	200	300	400						
RO.7891.QDC.001	Literasi Halal	Layanan	N/A	0	55	60	65	70	0	3.000	3.500	4.000	4.500	
IKRO.7891.QDC.01.1	Jumlah Literasi Halal	Layanan	N/A	0	55	60	65	70						
7892 Pembinaan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an									11.836	32.892	46.121	67.602	88.580	[BMBPSDM] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
SK.7892.1	Meningkatnya kualitas layanan pentashihan, pengkajian dan edukasi al- Qur'an													
IKSK.7892.1.1	Nilai layanan Pentashihan Al-Qur'an	Nilai	86	86	86	86	87	87						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) /SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /INDIKATOR		SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.7892.1.2	Tingkat kepatuhan penerbit pada regulasi penerbitan Al-Qur'an	Nilai	82	82	82	83	83	83						
IKSK.7892.1.3	Presentase Peningkatan Surat Tanda Tashih/Izin Edar Mushaf Al-Qur'an	Persen	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00						
IKSK.7892.1.4	Persentase Peningkatan Masyarakat yang mamfaatkan literasi Al-Qur'an digital	Persen	84,57	87,43	90,29	93,14	96,00	100,00						
IKSK.7892.1.5	Nilai Kualitas Pengembangan dan Pengkajian al-Qur'an	Nilai	N/A	77	78	78	79	79						
IKSK.7892.1.6	Nilai layanan Museum Bayt Al-Qur'an	Nilai	86	86	86	86	87	87						
IKSK.7892.1.7	Persentase Peningkatan Pengunjung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal	Persen	87,50	90,00	92,50	95,00	97,50	100,00						
RO.7892.BAA.00	Layanan Bayt Al-Quran Museum Istiqlal dan Dokumentasi	Orang	75.000	47.582	115.000	135.000	165.000	190.000	2.867	4.747	5.881	7.556	9.327	
IKRO.7892.BAA.01.1	Jumlah layanan Museum Bayt Al-Qur'an	Layanan	1	1	1	1	1	1						
IKRO.7892.BAA.01.2	Jumlah Pengunjung Bayt Al- Qur'an dan Museum Istiqlal	Orang	75.000	47.582	115.000	135.000	165.000	190.000						
RO.7892.BAA.00	Layanan Al-Quran dan Hasil Kajian Al Quran	Orang	367.000	333.075	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	961	9.247	14.333	24.604	32.478	
IKRO.7892.BAA.02.1	Jumlah Masyarakat yang mamfaatkan literasi Al-Qur'an digital	Orang	367.000	333.075	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000						
RO.7892.QAB.00	Lembaga Penerbit Al-Quran yang Mendapat Tanda Tashih	Lembaga	19	14	40	55	75	90	3.242	4.961	6.917	9.625	12.110	
IKRO.7892.QAB.01.1	Jumlah layanan Pentashihan Al-Qur'an	Layanan	1	1	1	1	1	1						
IKRO.7892.QAB.01.2	Jumlah Penerbit yang mematuhi regulasi penerbitan Al-Qur'an	Lembaga	19	14	40	55	75	90						
IKRO.7892.QAB.01.3	Jumlah Surat Tanda Tashih/Izin Edar Mushaf Al-Qur'an	Dokumen	19	14	40	55	75	90						
RO.7892.BDB.00	Layanan Bahan Bacaan Tafsir dan Literasi Al-Quran	Lembaga	16	13	32	42	55	70	4.766	13.937	18.990	25.817	34.665	
IKRO.7892.BDB.01.1	Jumlah lembaga penyedia Layanan Bahan Bacaan Tafsir dan Literasi Al-Quran	Lembaga	16	13	32	42	55	70						
IKRO.7892.BDB.01.2	Jumlah Bahan Bacaan Tafsir dan Literasi Al-Quran bermuatan ekoteologi	Bahan Bacaan	N/A	1	2	2	3	3						
7893 Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan dan Moderasi Beragama									69.916	125.647	167.028	223.765	299.573	[BMBPSDM] Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Kepemimpinan, dan Moderasi Beragama
SK.7893.1	Meningkatnya Kompetensi Manajemen Kepemimpinan dan Moderasi Beragama Bagi Sumber Daya Manusia Agama dan Keagamaan													
IKSK.7893.1.1	Nilai Pemanfaatan Kurikulum dan Sistem Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi SDM Agama dan Keagamaan	Nilai	90,70	90,90	91,10	91,30	91,50	91,70						
IKSK.7893.1.2	Nilai Kepuasan layanan penyelenggaraan pengembangan kompetensi	Nilai	88,00	88,20	88,40	88,60	88,80	89,00						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.7893.1.3	Nilai	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00						
IKSK.7893.1.4	Persen	76,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00						
IKSK.7893.1.5	Persen	55,00	57,00	57,00	61,00	63,00	65,00						
IKSK.7893.1.6	Persen	76,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00						
IKSK.7893.1.7	Persen	9,00	43,75	56,25	62,50	75,00	87,50						
RO.7893.AFA.00	Kurikulum dan Sistem Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi	NSPK	88	96	144	183	213	248	6.779	17.131	23.274	31.409	38.757
IKRO.7893.AFA.001.1	Jumlah Kurikulum dan Sistem Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi yang dihasilkan	NSPK	88	96	144	183	213	248					
IKRO.7893.AFA.001.2	Jumlah lembaga pengembangan kompetensi yang memperoleh akreditasi B untuk pelatihan kepemimpinan dan Latsar	Lembaga	5	7	10	11	13	15					
IKRO.7893.AFA.001.3	Jumlah muatan ekoteologi dalam materi pengembangan kompetensi	Konten	N/A	1	2	2	3	3					
RO.7893.SCJ.00	Peserta Pelatihan SDM Masyarakat yang Moderat dan Kompeten	Orang	1.670	4.260	3.100	4.600	6.600	8.600	15.310	12.702	19.483	28.928	39.719
IKRO.7893.SCJ.001.1	Jumlah Peserta Pelatihan moderasi beragama pada SDM Agama dan Keagamaan	Orang	1.670	4.260	3.100	4.600	6.600	8.600					
IKRO.7893.SCJ.001.2	Jumlah Peserta Pelatihan moderasi beragama yang menjadi sasaran evaluasi pasca pengembangan kompetensi	Orang	N/A	4.260	3.100	4.600	6.600	8.600					
RO.7893.EBC.00	Fasilitasi Penunjang Pengembangan Kompetensi	Layanan	12	17	20	30	40	50	8.392	6.890	6.914	6.962	8.473
IKRO.7893.EBC.001.1	Jumlah sarana dan prasarana layanan penyelenggaraan pengembangan kompetensi	Unit	N/A	17	20	30	40	50					
RO.7893.EBC.99	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Orang	19.675	11.950	26.291	32.211	45.300	58.389	39.435	88.924	117.356	156.466	212.624
IKRO.7893.EBC.996.1	Jumlah peserta peningkatan kompetensi manajemen dan kepemimpinan pada SDM Agama dan Keagamaan	Orang	19.675	11.950	26.291	32.211	45.300	58.389					
IKRO.7893.EBC.996.2	Jumlah peserta pengembangan kompetensi yang memanfaatkan platform digital	Orang	N/A	6.812	14.986	19.649	28.539	37.953					
7894 Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Keagamaan									40.957	71.952	93.919	122.736	150.388
													[BMBPSDM] Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
													Daya Manusia Pendidikan dan Keagamaan
SK.7894.1	Meningkatnya Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Keagamaan												
IKSK.7894.1.1	Nilai Pemanfaatan Kurikulum dan Sistem Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi SDM Keagamaan	Nilai	84,00	84,20	84,40	84,60	84,80	85,00					
IKSK.7894.1.2	Nilai Kepuasan layanan penyelenggaraan pengembangan kompetensi SDM keagamaan	Nilai	88,00	88,20	88,40	88,60	88,80	89,00					
IKSK.7894.1.3	Nilai kepuasan pengguna terhadap lulusan pengembangan kompetensi SDM keagamaan	Nilai	84,00	91	92	93	94	95,00					
IKSK.7894.1.4	Persentase lembaga pengembangan kompetensi SDM keagamaan yang memperoleh akreditasi A	Persen	70,59	70,59	76,47	76,47	82,35	88,24					
IKSK.7894.1.5	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM keagamaan	Persen	66,00	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00					
IKSK.7894.1.6	Persentase pengembangan kompetensi SDM keagamaan yang memanfaatkan platform digital	Nilai	76,00	77	78	79	80	81,00					
RO.7894.AFA.00	Kurikulum dan Sistem Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi SDM Keagamaan	NSPK	84,00	93	142	183	212	241	5.975	28.464	36.317	46.882	56.577
IKRO.7894.AFA.001.1	Jumlah Kurikulum dan Sistem Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi SDM Keagamaan yang dihasilkan	NSPK	84,00	93	142	183	212	241					
IKRO.7894.AFA.001.2	Jumlah sarana prasarana layanan penyelenggaraan pengembangan kompetensi SDM keagamaan	Layanan	1,00	1	1	1	1	1					
IKRO.7894.AFA.001.3	Jumlah lembaga pengembangan kompetensi SDM keagamaan yang memperoleh akreditasi A	Lembaga	N/A	12	13	14	15	16					
IKRO.7894.AFA.001.4	Jumlah muatan ekoteologi dalam materi pengembangan kompetensi SDM Keagamaan	Konten	N/A	1	2	2	3	3					
RO.7894.SCJ.00	SDM Keagamaan yang Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	14.310	321.220	342.310	424.810	509.810	594.810	34.982	43.487	57.602	75.854	93.811
IKRO.7894.SCJ.001.1	Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi SDM Keagamaan yang menjadi sasaran evaluasi pasca pengembangan kompetensi	Orang	14.310	321.220	342.310	424.810	509.810	594.810					
IKRO.7894.SCJ.001.2	Jumlah SDM Keagamaan yang Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	14.310	321.220	342.310	424.810	509.810	594.810					
IKRO.7894.SCJ.001.3	Jumlah peserta pengembangan kompetensi SDM keagamaan yang memanfaatkan platform digital	Orang	N/A	247.339	267.002	335.600	407.848	481.796					

[illegible]

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR		SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.7920.1.1	Persentase Peningkatan Buku Agama yang mendapat tanda layak terbit	Persen	N/A	0,00	30,00	35,00	35,00	40,00						
IKSK.7920.1.2	Persentase Peningkatan inovasi program literasi keagamaan dalam mendukung terwujudnya kerukunan umat beragama	Persen	N/A	0,00	20,00	20,00	25,00	25,00						
RO.7920.QAB.001	Layanan Penilaian Buku Agama, Lektur, dan Literasi Keagamaan	Lembaga	N/A	0	10	10	15	15	0	8	8	10	10	
IKRO.7920.QAB.01.1	Jumlah Buku Agama yang mendapat tanda layak terbit	Jumlah	N/A	0	10	10	15	15						
RO.7920.BDD.001	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat Melalui Lektur dan Literasi Keagamaan	Kelompok Masyarakat	N/A	0	4	6	6	6	0	6	6	9	9	
IKRO.7920.BDD.01.1	Jumlah Kelompok Masyarakat yang mendapatkan pembinaan melalui program inovasi literasi keagamaan	Kelompok Masyarakat	N/A	0	4	6	6	6						
025.DF - Program Wajib Belajar 13 Tahun									17.563.982	19.243.958	20.910.886	22.669.369	24.511.825	DITJEN PENDIS, DITJEN BIMAS KRISTEN, DITJEN BIMAS KATOLIK, DITJEN BIMAS HINDU, DITJEN BIMAS BUDDHA
SP.3	Meningkatnya pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah													
IKSP.3.1	Persentase siswa satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama dan pendidikan keagamaan penerima PIP dalam satu kohort yang lulus tepat waktu	Orang	70,00	80,00	85,00	88,00	90,00	94,00						
IKSP.3.2	Persentase satuan pendidikan keagamaan Kristen yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif	Persen	59,76	62,62	65,41	68,14	70,80	73,41						
IKSP.3.3	Persentase satuan pendidikan keagamaan katolik yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif	Persen	41,90	19,66	39,32	58,97	79,49	96,00						
IKSP.3.4	Persentase satuan pendidikan widyalaya dan pendidikan keagamaan hindu yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif	Persen	N/A	3,00	5,00	8,00	18,00	28,00						
IKSP.3.5	Persentase satuan pendidikan keagamaan Buddha yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif	Persen	N/A	13,33	15,56	17,78	20,00	22,22						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKSP.3.6	Persentase siswa madrasah dan pesantren dalam satu kohort yang lulus tepat waktu	Persen	79,00	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00						
IKSP.3.7	Persentase siswa pendidikan keagamaan Kristen dalam satu kohort yang lulus tepat waktu	Persen	92,00	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00						
IKSP.3.8	Persentase siswa widyalaya dan pendidikan keagamaan Hindu dalam satu kohort yang lulus tepat waktu	Persen	100,00	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00						
IKSP.3.9	Persentase siswa satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama dan pendidikan keagamaan penerima PIP dalam satu kohort yang lulus tepat waktu	Persen	N/A	80,00	85,00	88,00	90,00	94,00						
KSP.3.10	Persentase siswa pendidikan keagamaan Buddha dalam satu kohort yang lulus tepat waktu	Persen	N/A	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00						
IKSP.3.11	Persentase siswa pendidikan keagamaan Katolik dalam Satu Kohort yang lulus tepat waktu	Persen	N/A	97,47	97,99	98,18	98,33	98,57						
8067 Layanan Pembiayaan Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Kekhasan Agama, dan Pendidikan Keagamaan									0	2.160.663	2.272.634	2.392.575	2.518.615	[SETJEN] Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
SK.8067.1	Tersedianya Layanan Pembiayaan Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Kekhasan Agama, dan Pendidikan Keagamaan													
IKSK.8067.1.	Persentase Penerima Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Kekhasan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang tepat Sasaran	Persen	24,30	0,00	24,70	24,90	25,10	25,30						
RO.8067.QEN.001	Bantuan PIP Bagi MI/SD/Sederajat				748.107	785.032	823.745	824.550	0	497.491	520.993	545.592	571.287	
IKRO.8067.QEN.001.1	Jumlah Santri PPS Ula/Paket A/Hanya Mengaji/Muadalah yang Menerima PIP	Orang	0	0	24.133	24.779	25.425	26.071						
IKRO.8067.QEN.001.2	Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah yang Menerima PIP	Orang	N/A	0	719.746	755.734	793.520	793.520						
IKRO.8067.QEN.001.3	Jumlah Siswa SDTK yang Menerima PIP	Orang	2652	0	3.303	3.574	3.825	3.984						
IKRO.8067.QEN.001.4	Jumlah Siswa Tingkat Adi yang Menerima PIP	Orang	710	0	925	945	975	975						
RO.8067.QEN.002	Bantuan PIP Bagi MTs/SMP/Sederajat				1.068.963	1.135.243	1.205.684	1.280.558	0	801.722	851.432	904.263	960.418	
IKRO.8067.QEN.002.1	Jumlah Santri PPS Wustha/Paket B/Hanya Mengaji/Muadalah yang Menerima PIP	Orang	92.533	0	95.078	97.622	100.167	102.712						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKRO.8067.QEN.02.2	Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah yang Menerima PIP	Orang	N/A	0	967.360	1.030.646	1.098.071	1.169.907					
IKRO.8067.QEN.02.3	Jumlah Siswa SMP TK yang Menerima PIP	Orang	4895,00	0	6.173	6.563	6.954	7.447					
IKRO.8067.QEN.02.4	Jumlah Siswa Tingkat Madya yang Menerima PIP	Orang	260,00	0	352	412	492	492					
RO.8067.QEN.003	Bantuan PIP Bagi MA/SMA/Sederajat				478.292	499.644	523.039	547.450	0	860.925	899.359	941.470	985.410
IKRO.8067.QEN.03.1	Jumlah Santri PPS Ulya/Paket C/Hanya Mengaji/Muadalah yang Menerima PIP	Orang	45.571	0	46.824	48.077	49.331	50.584					
IKRO.8067.QEN.03.2	Jumlah Siswa Madrasah Aliyah yang Menerima PIP	Orang	N/A	0	413.168	431.861	452.426	473.970					
IKRO.8067.QEN.03.3	Jumlah Siswa SMTK/SMAK yang Menerima PIP	Orang	11337,00	0	13.018	14.127	15.330	16.633					
IKRO.8067.QEN.03.4	Jumlah Siswa SMAKAT yang Menerima PIP	Orang	N/A	0	4.650	4.927	5.220	5.531					
IKRO.8067.QEN.03.5	Jumlah Siswa Tingkat Utama yang Menerima PIP	Orang	502,00	0	632	652	732	732					
RO.8067.BAA.001	Layanan Penyaluran PIP Pendidikan Dasar dan Menengah								0	525	850	1.250	1.500
RO.8067.BAA.001.1	Jumlah PIP yang tersalurkan	Laporan	N/A	0	4	4	4	4					
2128 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam									1.101.542	1.028.585	1.117.703	1.206.910	1.296.200
SK.2128.1	Meningkatnya sarana dan prasarana Pesantren dan Satuan Pendidikan Keagamaan yang berkualitas												[DITJEN PENDIS] Direktorat Pesantren
IKSK.2128.1.1	Persentase satuan pendidikan pesantren dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras	Persen	N/A	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00					
IKSK.2128.1.2	Persentase pesantren yang menyelenggarakan program Pesantren berdaya berbasis sumber daya ekonomi yang kuat dan berkelanjutan	Persen	N/A	15,00	15,30	15,60	15,90	16,20					
IKSK.2128.1.3	Persentase satuan pendidikan pesantren dan satuan pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Persen	3,04	5,04	7,04	9,04	11,04	13,04					
IKSK.2128.1.4	Persentase peningkatan jumlah santri pada satuan pendidikan pesantren dan satuan pendidikan keagamaan	Persen	70,10	75,10	80,20	85,30	90,40	95,60					
IKSK.2128.1.5	Persentase peningkatan jumlah santri pada satuan pendidikan daerah 3 T	Persen	N/A	6,55	8,75	10,95	13,15	15,35					
IKSK.2128.1.6	Persentase Anak Kelas ula yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA)	Persen	N/A	7,00	9,00	11,00	13,00	15,00					
IKSK.2128.1.7	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah pada Madrasah	Persen	0,01	0,05	0,10	0,15	0,20	0,35					
IKSK.2128.1.8	Persentase satuan pendidikan nonformal Islam yang direvitalisasi	Persen	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00					

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) /SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.2128.1.9	Persentase peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal	Persen	56,00	65,00	75,00	84,00	93,00	100,00					
IKSK.2128.1.10	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti Pendidikan Kesetaraan pada Pesantren	Anak	261.197	261.297	261.397	261.497	261.597	261.697					
SK.2128.2	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan santri pesantren dan satuan pendidikan keagamaan												
IKSK.2128.2.1	Persentase santri pesantren dan satuan pendidikan keagamaan yang lulus dengan predikat jayyid jiddan	Persen	N/A	10	15	20	25	30					
RO 2128 QEN 001	Santri PPS Ula/ Paket A/ Hanya Mengaji/ Muadalah Penerima PIP	Orang	23.487	23.487	0	0	0	0	10.569	0	0	0	0
IKRO 2128 QEN 001.1	Jumlah Santri PPS Ula/ Paket A/ Hanya Mengaji/ Muadalah Penerima PIP	Orang	22.841	23.487	0	0	0	0					
RO 2128 QEI 002	Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana	Lembaga	1.545	1.547	1.624	1.706	1.791	1.880	19.500	20.429	21.401	22.420	23.488
IKRO 2128 QEI 002.1	Jumlah pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang memperoleh bantuan sarana dan Prasarana pembelajaran (peralatan belajar, pembangunan atau rehabilitasi rkb, laboratorium, perpustakaan, asrama, tempat ibadah, sanitasi dan penunjang digitalisasi)	Lembaga	1.545	1.547	1.624	1.706	1.791	1.880					
IKRO 2128 QEI 002.2	Jumlah satuan pendidikan pesantren dan satuan pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Lembaga	1.308	2.169	3.030	3.891	4.752	5.613					
RO 2128 QEI 003	Pendidikan Lifeskill dan Pengembangan Ekonomi Pesantren	Lembaga	1.500	4.500	4.514	4.527	4.541	4.554	280.000	285.600	291.200	296.800	302.400
IKRO 2128 QEI 003.1	Jumlah Pendidikan Lifeskill dan Pengembangan Ekonomi Pesantren	Lembaga	3.585	5.085	6.585	8.085	9.585	11.085					
IKRO 2128 QEI 003.2	Jumlah pesantren yang menyelenggarakan program Pesantren berdaya berbasis sumber daya ekonomi yang kuat dan berkelanjutan	Lembaga	N/A	N/A	1.000	2.000	3.000	4.000					
IKRO 2128 QEI 003.3	Jumlah Lembaga Yang Mendapatkan Bantuan Pendidikan Lifeskill dan Pengembangan Ekonomi Pesantren (Kemandirian Pesantren)	Lembaga	N/A	5.085	6.585	8.085	9.585	11.085					
RO 2128 QEN 002	Santri PPS Wustha/ Paket B/ Hanya Mengaji/ Muadalah Terima PIP	Orang	92.533	92.533	0	0	0	0	69.399	0	0	0	0
IKRO 2128 QEN 002.1	Jumlah Santri PPS Wustha/ Paket B/ Hanya Mengaji/ Muadalah Terima PIP	Orang	92.533	92.533	0	0	0	0					
RO 2128 QEN 003	Santri PPS Ulya/ Paket C/ Hanya Mengaji/ Muadalah Penerima PIP	Orang	45.571	45.571	0	0	0	0	82.027	0	0	0	0
IKRO 2128 QEN 003.1	Jumlah Santri PPS Ulya/ Paket C/ Hanya Mengaji/ Muadalah Penerima PIP	Orang	45.571	45.571	0	0	0	0					
RO 2128 QEN	Santri Tk. Ula/ Diniyah	Orang	31.130	36.621	42.112	47.603	53.094	58.585	34.905	40.322	45.739	51.157	56.573

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
005 Formal/Muadalah/PPS Penerima BOS													
IKRO 2128 QEN Jumlah Santri Tk. Ula/Diniyah	Orang	31.130	36.621	42.112	47.603	53.094	58.585						
005.1 Formal/Muadalah/PPS Penerima BOS													
IKRO 2128 QEN Jumlah Anak Kelas 1 Ula yang Pernah	Orang	2.028	2.528	3.028	3.528	4.028	4.528						
005.2 Mengikuti PAUD (TK/RA/BA)													
RO 2128 QEN Santri Tk. Wustha/Diniyah	Orang	162.700	205.024	247.348	289.672	331.996	374.320	222.834	257.058	291.282	325.507	359.730	
006 Formal/Muadalah/PPS Penerima BOS													
IKRO 2128 QEN Jumlah Santri Tk. Wustha/Diniyah	Orang	162.700	205.024	247.348	289.672	331.996	374.320						
006.1 Formal/Muadalah/PPS Penerima BOS													
RO 2128 QEN Santri Tk. Ulya/Diniyah	Orang	89.007	127.545	166.083	204.621	243.159	281.697	186.388	215.306	244.223	273.141	302.056	
007 Formal/Muadalah/PPS Penerima BOS													
IKRO 2128 QEN Jumlah Santri Tk. Ulya/Diniyah	Orang	89.007	127.545	166.083	204.621	243.159	281.697						
007.1.1 Formal/Muadalah/PPS Penerima BOS													
RO 2128 QEI Pesantren Penerima Bantuan	Lembaga	10.643	15.174	15.580	15.986	16.392	16.798	180.920	194.120	207.320	220.520	233.720	
001 Operasional Pendidikan (BOP)													
IKRO 2128 QEI Jumlah Pesantren Penerima Bantuan	Lembaga	9.554	9.824	10.094	10.364	10.634	10.905						
001.1 Operasional Pendidikan (BOP)													
IKRO 2128 QEI Jumlah pesantren yang mendapat	Lembaga	9.283	9.824	10.365	10.906	11.447	11.988						
001.2 pendampingan teknis dalam pemanfaatan dan pelaporan dana BOP													
IKRO 2128 QEI Jumlah satuan pendidikan nonformal	Lembaga	6.887	7.317	7.747	8.178	8.608	9.039						
001.3 yang direvitalisasi													
IKRO 2128 QEI Jumlah peserta didik yang mengikuti	Orang	N/A	67	101	134	168	202						
001.4 pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal													
IKRO 2128 QEI Jumlah anak tidak sekolah yang	Orang	161.591	161.591	177.624	179.578	181.553	183.550						
001.5 mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan keagamaan Islam													
RO 2128 BAA Layanan Legalitas Ijazah dan	Akta	2	2	4	4	4	4	15.000	15.750	16.538	17.364	18.233	
001 Pendirian Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam													
IKRO 2128 BAA Jumlah Layanan Legalitas Ijazah dan	Layanan	2	2	4	4	4	4						
001.1 Pendirian Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam													
2129 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah								16.144.733	15.735.331	17.157.147	18.659.251	20.242.245	[DITJEN PENDIS] Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan
SK.2129.1 Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa madrasah													
IKSK.2129.1.1 Persentase siswa madrasah yang lulus dengan predikat sangat baik	Persen	73,00	74,00	75,00	76,00	77,00	78,00						
RO.2129 QEN Siswa MI Penerima BOS	Orang	4.512.595	4.265.178	4.652.921	5.075.914	5.537.361	6.040.758	4.507.578	4.917.358	5.364.390	5.852.062	6.384.068	
IKRO.2129 QEN Jumlah Siswa Madrasah MI Penerima	Orang	N/A	4.254.742	4.652.921	5.075.914	5.537.361	6.040.758						
005.1 BOS													
IKRO.2129 QEN Jumlah Anak Kelas 1 MI yang Pernah	Orang	N/A	342.736	359.873	377.867	396.760	416.598						
005.2 Mengikuti PAUD (TK/RA/BA)													
RO.2129 QEN Siswa MTs Penerima BOS	Orang	3.245.429	3.270.479	3.540.519	3.832.855	4.149.329	4.491.934	4.233.819	4.583.400	4.961.846	5.371.540	5.815.061	

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKRO.2129 QEN 006.1	Jumlah Siswa Madrasah MTs Penerima BOS	Orang	N/A	3.270.479	3.540.519	3.832.855	4.149.329	4.491.934					
RO.2129 QEN 007	Siswa MA Penerima BOS	Orang	1.478.485	1.627.097	1.689.678	1.754.665	1.822.152	1.892.235	3.155.334	3.276.693	3.402.720	3.533.594	3.669.501
IKRO.2129 QEN 007.1	Jumlah Siswa Madrasah MA Penerima BOS	Orang	N/A	1.627.097	1.689.678	1.754.665	1.822.152	1.892.235					
IKRO.2129 QEN 007.2	Jumlah siswa madrasah yang lulus dengan predikat sangat baik	Orang	N/A	1.363.920	1.379.966	1.396.012	1.412.059	1.428.105					
RO.2129 QEN 008	Siswa RA Penerima BOP	Orang	1.353.594	1.362.526	1.439.650	1.521.140	1.607.242	1.698.218	1.024.346	1.082.328	1.143.592	1.208.323	1.276.719
IKRO.2129 QEN 008.1	Jumlah Siswa RA Penerima BOP	Orang	N/A	1.362.526	1.439.650	1.521.140	1.607.242	1.698.218					
SK.2129.2	Meningkatnya sarana dan prasarana Madrasah yang berkualitas												
IKSK.2129.2.1	Persentase madrasah yang memperoleh peningkatan sarana prasarana	Persen	42,08	46,23	50,23	54,21	58,21	62,19					
IKSK.2129.2.2	Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Persen	1,15	1,61	2,06	2,52	2,98	3,43					
IKSK.2129.2.3	Persentase peningkatan jumlah siswa madrasah pada satuan pendidikan	Persen	0,75	0,80	0,85	0,90	0,95	1,00					
IKSK.2129.2.4	Persentase peningkatan jumlah siswa madrasah pada satuan pendidikan daerah 3T	Persen	N/A	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25					
IKSK.2129.2.5	Persentase Anak Kelas 1 MI yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA)	Persen	N/A	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00					
IKSK.2129.5.6	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah pada Madrasah	Persen	26,92	28,64	30,35	32,06	33,77	35,49					
RO.2129.BAA.001	Layanan Legalitas Ijazah dan Pendirian Madrasah	Orang	1	0	1	1	2	2	0	1.500	1.500	1.575	1.575
IKRO.2129.BAA.001.1	Jumlah Layanan Legalitas Ijazah	Layanan	2	0	2	2	2	2					
IKRO.2129.BAA.001.2	Jumlah Layanan Pendirian Madrasah Negeri	Layanan	N/A	0	5	5	5	5					
IKRO.2129.BAA.001.3	Jumlah Layanan Pendirian Madrasah Swasta	Layanan	N/A	0	2	2	2	2					
IKRO.2129.BAA.001.4	Jumlah Layanan Penegrian Madrasah	Layanan	N/A	0	2	2	2	2					
RO.2129 RBI 001	Prasarana Madrasah Pemenuhan SPM	Lembaga	32	37	42	47	52	57	5.051	5.253	5.463	5.682	6
IKRO.2129 RBI 001.1	Jumlah madrasah yang memperoleh bantuan Prasarana pembelajaran (pembangunan atau rehabilitasi ruang kelas baru, laboratorium, perpustakaan, asrama siswa, tempat ibadah, sanitasi dan fasilitas penunjang digitalisasi)	Lembaga	32	37	42	47	52	57					
RO.2129 RBI 002	Prasarana Madrasah yang ditingkatkan (SBSN)	Lembaga	313	179	187	197	207	227	871.927	1.238.584	1.605.242	1.971.899	2.338.557
IKRO.2129 RBI 002.1	Jumlah madrasah yang ditingkatkan prasarananya melalui sumber pembiayaan SBSN	Lembaga	N/A	177	184	191	199	207					
IKRO.2129 RBI 002.2	Jumlah madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Lembaga	N/A	177	184	191	199	207					

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO.2129.RAA.001 Sarana Madrasah Menunjang Pembelajaran	Unit	101	5.255	5.457	5.667	5.885	6.111	516.448	526.449	536.449	546.449	556.449	
IKRO.2129.RAA.01.1 Jumlah madrasah yang memperoleh sarana penunjang pembelajaran (peralatan belajar, laboratorium, ekstrakurikuler dan multimedia)	Unit	N/A	200	208	216	225	234						
RO.2129.QEI.003 Bantuan Pengembangan Madrasah Inklusif	Lembaga	12	5	10	10	10	11	2.500	2.550	2.601	2.653	2.706	
IKRO.2129.QEI.003.1 Jumlah madrasah yang memperoleh pengadaan sarana untuk siswa berkebutuhan khusus sesuai standar pendidikan inklusif	Lembaga	N/A	5	800	816	832	849						
RO.2129.QEI.002 Bantuan Madrasah Daerah 3T	Lembaga	40	40	73	74	76	77	1.500	1.530	1.561	1.592	1.624	
IKRO.2129.QEI.002.1 Jumlah Siswa Daerah 3T yang Memperoleh Bantuan Pendidikan	Lembaga	N/A	22	120	122	125	127						
RO.2129.QEN.001 Siswa Madrasah MI Penerima PIP	Orang	939.607	1.028.209	0	0	0	0	462.694	0	0	0	0	
IKRO.2129.QEN.01.1 Jumlah Siswa Madrasah MI Penerima PIP	Orang	N/A	1.028.209	0	0	0	0						
RO.2129.QEN.002 Siswa Madrasah MTs Penerima PIP	Orang	745.086	907.961	0	0	0	0	680.971	0	0	0	0	
IKRO.2129.QEN.02.1 Jumlah Siswa Madrasah MTs Penerima PIP	Orang	N/A	907.961	0	0	0	0						
RO.2129.QEN.003 Siswa Madrasah MA Penerima PIP	Orang	320.372	393.493	0	0	0	0	614.976	0	0	0	0	
IKRO.2129.QEN.03.1 Jumlah Siswa Madrasah MA Penerima PIP	Orang	N/A	393.493	0	0	0	0						
RO.2129.QEI.004 Bantuan Pengembangan Peningkatan Mutu UKS/M	Lembaga	N/A	200	211	223	236	249	1.500	1.531	1.561	1.592	1.622	
IKRO.2129.QEI.004.1 Jumlah madrasah yang menerima bantuan sarana prasarana UKS sesuai standar layanan kesehatan dasar	Lembaga	N/A	100	106	112	118	125						
IKRO.2129.QEI.004.2 Jumlah madrasah yang melakukan penguatan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan UKS/M (puskesmas, komite sekolah, dinas kesehatan)	Lembaga	N/A	100	106	111	118	124						
RO.2129.SBB.001 Penyelenggaraan Madrasah Unggulan	Lembaga	7924	12.188	13.651	15.289	17.123	19.178	66.088	98.155	130.222	162.290	194.357	
IKRO.2129.SBB.01.1 Jumlah Penyelenggaraan Madrasah Unggulan	Lembaga	N/A	12.188	13.651	15.289	17.123	19.178						
2136 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen								105.552	145.092	166.534	193.931	221.459	[BIMAS KRISTEN] Direktorat Pendidikan Agama Kristen
SK.2136.1 Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan Kristen													
IKSK.2136.1.1 Persentase siswa satuan pendidikan keagamaan Kristen yang lulus dengan predikat sangat baik	Persen	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00						
RO.2136.QEN.004 Bantuan Operasional Siswa (BOS) SMTK/SMAK	Orang	13.258	13.333	14.096	14.483	14.839	15.268	23.758	30.559	27.256	28.256	29.256	

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) /SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKRO.2136.QEN.04 Jumlah Siswa SMTK/SMAK Penerima BOS	Orang	13.258	13.333	14.096	14.483	14.839	15.268						
RO.2136.QEN.005 Bantuan Operasional Siswa (BOS) SMPK	Orang	6.270	6.627	7.251	7.754	8.302	8.883	8.946	9.257	10.220	10.942	11.140	
IKRO.2136.QEN.05.1 Jumlah Siswa SMPK Penerima BOS	Orang	6.270	6.627	7.251	7.754	8.302	8.883						
IKRO.2136.QEN.05.2 Jumlah siswa satuan pendidikan keagamaan Kristen yang lulus dengan predikat sangat baik	Orang	1.216	1.527	1.925	2.302	2.675	3.120						
RO.2136.QEN.006 Bantuan Operasional Siswa (BOS) SDTK	Orang	4.807	5.490	6.154	6.547	6.584	7.056	5.641	6.276	6.808	7.233	8.938	
IKRO.2136.QEN.06 Jumlah Siswa SDTK Penerima BOS	Orang	4.807	5.490	6.154	6.547	6.584	7.056						
SK.2136.2 Meningkatnya sarana dan prasarana Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen yang berkualitas													
IKSK.2136.2.1 Persentase satuan pendidikan keagamaan Kristen yang memperoleh peningkatan sarana prasarana	Persen	59,76	62,62	65,41	68,14	70,80	73,41						
IKSK.2136.2.2 Persentase satuan pendidikan keagamaan Kristen yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Persen	59,76	62,62	65,41	68,14	70,80	73,41						
IKSK.2136.2.3 Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan keagamaan Kristen	Persen	5,16	5,17	5,18	5,19	5,20	5,21						
IKSK.2136.2.4 Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan keagamaan Kristen daerah 3 T	Persen	N/A	4,88	4,91	5,29	5,45	5,56						
IKSK.2136.2.5 Persentase Anak Kelas 1 SDTK yang Pernah Mengikuti PAUD/TK	Persen	N/A	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00						
IKSK.2136.2.6 Persentase satuan pendidikan keagamaan Kristen yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	Persen	N/A	20,46	22,09	25,58	34,88	41,86						
RO.2136.QEI.001 Bantuan Peralatan Sarana Penunjang Pembelajaran Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen tingkat Dasar dan Menengah Swasta	Lembaga	1	1	50	100	150	200	7.571	9.000	13.000	15.000	20.000	
IKRO.2136.QEI.001.1 Jumlah lembaga pendidikan Keagamaan Kristen yang menerima Bantuan Sarana Penunjang Pembelajaran	Lembaga	1	1	50	100	150	200						
IKRO.2136.QEI.001.2 Jumlah peningkatan siswa pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen	Orang	1.165	1.228	1.293	1.363	1.436	1.514						
IKRO.2136.QEI.001.3 Jumlah peningkatan siswa pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen daerah 3T	Orang	N/A	468	530	600	650	700						
IKRO.2136.QEI.001.4 Jumlah Anak Kelas 1 SDTK yang Pernah Mengikuti PAUD	Orang	N/A	372	425	492	575	683						
RO.2136.QEI.002 Bantuan Pengembangan Prasarana Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen tingkat Dasar dan Menengah Swasta	Lembaga	1	10	20	25	30	40	19.850	25.000	28.000	35.000	40.000	

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKRO.2136.QEI.002.1	Jumlah lembaga pendidikan keagamaan Kristen yang mendapatkan bantuan pengembangan prasarana	Lembaga	1	10	20	25	30	40					
IKRO.2136.QEI.002.2	Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	Lembaga	N/A	88	95	110	150	180					
RO.2136.RAA.001	Sarana Pendukung Pembelajaran Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen tingkat Dasar dan Menengah Negeri	Unit	N/A	N/A	30	50	75	100	-	13.000	16.250	19.500	22.425
IKRO.2136.RAA.001	Jumlah Sarana Lembaga Pendidikan Keagamaan Dasar dan Menengah	Unit	N/A	N/A	30	50	75	100					
RO.2136.RBI.001	Prasarana Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Menengah Negeri	Unit	13	13	26	39	39	52	12.831	52.000	65.000	78.000	89.700
IKRO.2136.RBI.001	Jumlah Prasarana Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Keagamaan Kristen Negeri	Unit	NA	13	26	39	39	52					
RO.2136.QEN.001	Bantuan Program Indonesia Pintar 1 (PIP) Siswa SMTK/SMAK		11.337	12.166	0	0	0	0	21.285	-	-	-	-
IKRO.2136.QEN.001	Jumlah Siswa SMTK/SMAK Penerima PIP	Orang	11.337	12.166	0	0	0	0					
RO.2136.QEN.002	Bantuan Program Indonesia Pintar 2 (PIP) Siswa SMP TK		4.895	5.729	0	0	0	0	4.297	-	-	-	-
IKRO.2136.QEN.002	Jumlah Siswa SMP TK Penerima PIP	Orang	4.895	5.729	0	0	0	0					
RO.2136.QEN.003	Bantuan Program Indonesia Pintar 3 (PIP) Siswa SD TK		2.652	3.053	0	0	0	0	1.374	-	-	-	-
IKRO.2136.QEN.003	Jumlah Siswa SD TK Penerima PIP	Orang	2.652	3.053	0	0	0	0					
2139 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik									75.449	83.578	102.963	119.187	132.229
SK.2139.1	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan Katolik												
IKSK.2139.1.1	Persentase siswa satuan pendidikan keagamaan Katolik yang lulus dengan predikat sangat baik	Persen	N/A	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00					
RO.2139.QEN.006	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMAK Katolik	Orang	N/A	6.396	7.441	8.222	9.085	10.680	11.480	14.712	19.456	25.728	34.028
IKRO.2139.QEN.006.1	Jumlah Siswa SMAK Katolik Penerima BOS	Orang	N/A	6.396	7.441	8.222	9.085	10.680					
IKRO.2139.QEN.006.2	Jumlah siswa satuan pendidikan keagamaan Katolik yang lulus dengan predikat sangat baik	Orang	N/A	470	650	805	1.000	1.170					
SK.2139.2	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan Katolik yang berkualitas												
IKSK.2139.2.1	Persentase satuan pendidikan keagamaan Katolik yang memperoleh peningkatan sarana prasarana	Persen	41,90	19,66	39,32	58,97	79,49	80,00					
IKSK.2139.2.2	Persentase satuan pendidikan	Persen	41,90	18,60	37,21	58,00	79,07	80,00					

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR		SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	keagamaan Katolik yang menyelenggarakan pendidikan inklusif													
IKSK.2139.2.3	Persentase Peningkatan Jumlah Siswa pada Satuan Pendidikan Keagamaan Katolik	Persen	13,80	5,32	12,34	9,26	9,32	9,43						
IKSK.2139.2.4	Persentase Peningkatan Jumlah Siswa pada Satuan Pendidikan Keagamaan Katolik Daerah 3 T	Persen	N/A	96,30	5,01	4,99	5,00	5,00						
IKSK.2139.2.5	Persentase Satuan Pendidikan Keagamaan Katolik yang Menyelenggarakan Layanan Kesehatan Sekolah	Persen	N/A	10,87	23,91	45,65	76,09	80,00						
IKSK.2139.2.6	Persentase Anak Kelas 1 SD Keagamaan Katolik yang Pernah Mengikuti PAUD/TK	Persen	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00						
RO.2139.QEI.007	Lembaga Pendidikan Keagamaan Katolik yang diberikan bantuan	Lembaga	N/A	282	282	282	282	282	2.211	2.352	2.493	2.634	2.775	
IKRO.2139.QEI.007.1	Jumlah lembaga pendidikan keagamaan Katolik yang menerima bantuan penguatan kelembagaan	Lembaga	N/A	68	68	90	95	117						
IKRO.2139.QEI.007.2	Jumlah lembaga Katolik yang memperoleh pendampingan teknis atau supervisi dalam pengelolaan bantuan	Lembaga	N/A	68	68	90	95	117						
IKRO.2139.QEI.007.3	Jumlah anak Kelas 1 SD Keagamaan Katolik yang pernah mengikuti PAUD/TK/Taman Seminari	Orang	N/A	0	0	0	0	14						
IKRO.2139.QEI.007.4	Jumlah lembaga pendidikan keagamaan Katolik yang memperoleh sarana penunjang pembelajaran (peralatan belajar, laboratorium, ekstrakurikuler dan multimedia)	Lembaga	N/A	23	23	23	24	24						
IKRO.2139.QEI.007.5	Jumlah satuan pendidikan Katolik yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	Lembaga	N/A	5	14	18	22	20						
IKRO.2139.QEI.007.6	Jumlah satuan pendidikan keagamaan Katolik swasta yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Lembaga	N/A	8	8	9	9	9						
IKRO.2139.QEI.007.7	Jumlah peningkatan siswa pada satuan pendidikan keagamaan Katolik	Orang	N/A	409	470	540	622	715						
IKRO.2139.QEI.007.8	Jumlah peningkatan siswa pada satuan pendidikan keagamaan Katolik daerah 3 T	Orang	N/A	95	109	125	144	166						
RO.2139.QEI.008	Prasarana SMAK Swasta Katolik	Lembaga	N/A	26	30	30	30	30	21.461	22.500	25.875	29.756	34.220	
IKRO.2139.QEI.008.1	Jumlah layanan pendirian satuan pendidikan keagamaan Katolik swasta	Lembaga	N/A	0	0	0	1	1						
IKRO.2139.QEI.008.2	Jumlah ruang kelas satuan pendidikan Katolik swasta yang direhabilitasi atau dibangun baru sesuai standar ruang belajar	Lembaga	N/A	26	30	30	30	30						
RO.2139.QEN.005	Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) pada Taman Seminari	Orang	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IKRO.2139.QEN.005.1	Jumlah Siswa pada Satuan Pendidikan Katolik Penerima BOP	Orang	N/A	0	0	0	0	0						

[illegible]

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	keagamaan Hindu yang berkualitas												
IKSK.2142.2.1	Persentase widyalaya dan satuan pendidikan keagamaan Hindu yang memperoleh peningkatan sarana prasarana	Persen	3,00	5	8	11	18	28					
IKSK.2142.2.2	Persentase widyalaya dan satuan pendidikan keagamaan Hindu yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Persen	2,60	3	8	11	18	28					
IKSK.2142.2.3	Persentase peningkatan jumlah siswa pada widyalaya dan satuan pendidikan keagamaan Hindu	Persen	3,45	4	4	4	4	5					
IKSK.2142.2.4	Persentase peningkatan jumlah siswa pada widyalaya dan satuan pendidikan keagamaan Hindu daerah 3 T	Persen	7,00	7	7	7	7	7					
IKSK.2142.2.5	Persentase satuan pendidikan keagamaan Hindu nonformal yang direvitalisasi	Persen	N/A	0	3	5	8	10					
IKSK.2142.2.6	Persentase widyalaya dan satuan pendidikan keagamaan Hindu yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	Persen	N/A	40	44	48	52	56					
RO.2142.QEO.001	Sarana Lembaga pendidikan Widyalaya dan Penyelenggara Pendidikan Agama dan keagamaan Hindu	Unit	3.420	4.230	6.346	7.346	9.346	9,346,00	4.199	7.588	7.588	7.588	7.588
IKRO.2142.QEO.001.1	Jumlah Lembaga Pendidikan Widyalaya dan satuan pendidikan keagamaan Hindu yang memperoleh sarana penunjang pembelajaran	Lembaga	4	6	10	15	25	40					
IKRO.2142.QEO.001.2	Jumlah widyalaya dan satuan pendidikan keagamaan Hindu yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	Lembaga	30	50	52	54	56	58					
IKRO.2142.QEO.001.3	Jumlah satuan pendidikan keagamaan Hindu nonformal yang direvitalisasi	Lembaga	N/A	0	1	2	3	4					
IKRO.2142.QEO.001.4	Jumlah siswa pada widyalaya dan satuan pendidikan keagamaan Hindu daerah 3 T	Orang	N/A	907	1.081	1.186	1.326	1.326					
IKRO.2142.QEO.001.5	Jumlah peningkatan siswa pada satuan widyalaya dan satuan pendidikan keagamaan Hindu	Orang	N/A	150	155	160	165	170					
RO.2142.QEI.001	Lembaga Pendidikan Widyalaya yang diberikan bantuan	Lembaga	110	458	118	131	155	191	36.427	11.741	12.041	12.341	12.641
IKRO.2142.QEI.001.1	Jumlah lembaga pendidikan widyalaya yang menerima bantuan penguatan kelembagaan	Lembaga	10	10	30	40	50	60					
IKRO.2142.QEI.001.2	Jumlah lembaga pendidikan widyalaya yang memperoleh pendampingan teknis atau supervisi dalam pengelolaan bantuan	Lembaga	40	40	42	45	50	55					
IKRO.2142.QEI.001.3	Jumlah Layanan Legalitas Ijazah widyalaya	Layanan	N/A	1	1	1	1	1					
IKRO.2142.QEI.001.4	Jumlah widyalaya yang memperoleh pembinaan kelembagaan secara berkala	Lembaga	N/A	125	125	125	125	125					

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) /SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /INDIKATOR		SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO.2142.QEI.002	Pasraman Keagamaan dan sekolah minggu yang diberikan bantuan	Lembaga	365	859,1	365	365	365	365	27.830	15.233	15.243	15.243	15.243	
IKRO.2142.QEI.002.1	Jumlah Layanan Pendirian Satuan Pendidikan Hindu	Layanan	1	1	1	1	1	1						
IKRO.2142.QEI.002.2	Jumlah ruang kelas satuan pendidikan Hindu yang direhabilitasi atau dibangun baru sesuai standar ruang belajar	Unit	30	0	20	40	60	80						
RO.2142.QEN.004	Siswa penerima PIP Tk Adi	Orang	651	745	0	0	0	0	1.656	0	0	0	0	
IKRO.2142.QEN.004.1	Jumlah Siswa penerima PIP Tk Adi	Orang	651	799	0	0	0	0						
RO.2142.QEN.005	Siswa penerima PIP Tk Madyama	Orang	261	302	0	0	0	0	1.179	0	0	0	0	
IKRO.2142.QEN.005.01	Jumlah Siswa penerima PIP Tk Madyama	Orang	261	304	0	0	0	0						
RO.2142.QEN.006	Siswa penerima PIP Tk Utama	Orang	276	540	0	0	0	0	3.807	0	0	0	0	
IKRO.2142.QEN.006.01	Jumlah Siswa penerima PIP Tk Utama	Orang	276	398	0	0	0	0						
4012 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha									38.989	52.333	54.950	57.697	60.581	[BIMAS BUDDHA] Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha
SK.4012.1	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan Buddha													
IKSK.4012.1.1	Persentase siswa satuan pendidikan keagamaan Buddha yang lulus dengan predikat sangat baik	Persen	0	10	10	10	10	10						
IKSK.4012.1.2	Persentase anak kelas 1 Mula Dhammasekha yang pernah mengikuti Nava Dhammasekha	Persen	0	60	75	80	85	90						
RO.4012.QEN.001	BOP Nava Dhammasekha	Orang	1.004	1.157	1.190	1.250	1.312	1.932	695	714	750	787	827	
IKRO.4012.QEN.001.1	Jumlah Siswa Nava Dhammasekha penerima BOP	Orang	1.004	1.157	1.190	1.250	1.312	1.932						
IKRO.4012.QEN.001.2	Jumlah Anak Kelas 1 Mula Dhammasekha yang pernah mengikuti Nava Dhammasekha	Orang	502	579	595	625	656	966						
RO.4012.QEN.002	BOS Mula Dhammasekha	Orang	53	85	90	95	99	142	76	81	85	89	94	
IKRO.4012.QEN.002.1	Jumlah Siswa Mula Dhammasekha penerima BOS	Orang	53	85	90	95	99	142						
RO.4012.QEN.003	BOS Utama Dhammasekha	Orang	N/A	60	70	74	77	81	51	105	110	116	122	
IKRO.4012.QEN.003.1	Jumlah Siswa Utama Dhammasekha penerima BOS	Orang	N/A	60	70	74	77	81						
IKRO.4012.QEN.003.2	Jumlah siswa satuan pendidikan keagamaan Buddha yang lulus dengan predikat sangat baik	Orang	N/A	107	110	112	113	115						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) /SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK.4012.2 Meningkatkan sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan Buddha yang berkualitas													
IKSK.4012.2.1 Persentase satuan pendidikan keagamaan Buddha yang memperoleh peningkatan sarana prasarana	Persen	64,44	88,89	92,00	94,00	96,00	98,00						
IKSK.4012.2.2 Persentase satuan pendidikan keagamaan Buddha yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Persen	0,00	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11						
IKSK.4012.2.3 Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan keagamaan Buddha	Persen	23,27	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00						
IKSK.4012.2.4 Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan keagamaan Buddha daerah 3T	Persen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00						
IKSK.4012.2.5 Persentase satuan pendidikan keagamaan Buddha nonformal yang direvitalisasi	Persen	2,33	2,48	3,00	4,00	5,00	6,00						
IKSK.4012.2.6 Persentase satuan pendidikan keagamaan Buddha yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	Persen	4,44	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00						
RO.4012.QEI.001 Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha yang diberikan Bantuan Operasional	Lembaga	893	817	817	817	817	817	8.573	17.120	17.976	18.875	19.819	
IKRO.4012.QEI.001.1 Jumlah lembaga pendidikan keagamaan Buddha yang menerima bantuan penguatan kelembagaan	Lembaga	893	817	817	817	817	817						
IKRO.4012.QEI.001.2 Jumlah lembaga pendidikan keagamaan Buddha yang memperoleh pendampingan teknis atau supervisi dalam pengelolaan bantuan	Lembaga	N/A	24	25	26	27	28						
IKRO.4012.QEI.001.3 Jumlah satuan pendidikan keagamaan Buddha nonformal yang direvitalisasi	Lembaga	30	32	39	52	64	77						
IKRO.4012.QEI.001.4 Jumlah peningkatan siswa pada satuan pendidikan keagamaan daerah 3 T	Orang	N/A	22	24	27	29	32						
IKRO.4012.QEI.001.5 Jumlah peningkatan siswa pada satuan pendidikan keagamaan	Orang	246	325	407	508	635	794						
RO.4012.QEI.002 Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha yang diberikan Bantuan Prasarana	Lembaga	0	40	117	123	129	135	14.969	17.784	18.674	19.607	20.588	
IKRO.4012.QEI.002.1 Jumlah Layanan Pendirian Satuan Pendidikan Buddha	Layanan	0	2	2	2	2	2						
IKRO.4012.QEI.002.2 Jumlah ruang kelas satuan pendidikan Buddha swasta yang direhabilitasi atau dibangun baru sesuai standar ruang belajar	Lembaga	0	3	4	5	6	7						
IKRO.4012.QEI.002.3 Jumlah Layanan Penegrian Satuan Pendidikan Buddha	Layanan	0	1	1	1	1	1						
IKRO.4012.QEI.002.4 Jumlah Layanan Legalitas Ijazah	Layanan	0	2	2	2	2	2						
IKRO.4012.QEI.002.5 Jumlah satuan pendidikan agama Buddha yang memperoleh pembinaan kelembagaan secara berkala	Lembaga	0	53	53	53	53	53						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO.4012.RAA.001 Sarana Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha	Lembaga	220	506	506	506	506	506	14.626	16.528	17.355	18.222	19.133	
IKRO.4012.RAA.01.1 Jumlah satuan Pendidikan Keagamaan buddha yang memperoleh sarana penunjang pembelajaran (peralatan belajar, laboratorium, ekstrakurikuler dan multimedia)	Lembaga	220	506	506	506	506	506						
025.DI - Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran								9.331.151	14.362.768	19.110.261	24.147.403	28.517.660	SETJEN, DITJEN PENDIS, DITJEN BIMAS KRISTEN, DITJEN BIMAS KATOLIK, DITJEN BIMAS HINDU, DITJEN BIMAS BUDDHA
SP.4 Meningkatnya Kualitas pengajaran dan Pembelajaran													
IKSP.4.1 Persentase peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan pendidikan keagamaan yang memenuhi standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional :													
a. literasi membaca	Persen	58,07	59,30	59,71	60,04	60,10	60,15						
b. numerasi	Persen	50,91	52,55	52,97	53,80	53,80	54,21						
IKSP.4.2 Persentase peserta didik pada satuan pendidikan Kristen yang memenuhi standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional:													
a. literasi membaca	Persen	44,24	44,46	44,68	44,91	45,13	45,36						
b. numerasi	Persen	43,75	43,97	44,19	44,41	44,63	44,85						
IKSP.4.3 Persentase peserta didik pada satuan pendidikan Katolik yang memenuhi standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional:													
a. literasi membaca	Persen	41,60	51,57	52,58	53,59	54,60	55,61						
b. numerasi	Persen	39,68	49,29	50,30	51,31	52,32	55,33						
IKSP.4.4 Persentase peserta didik pada satuan pendidikan Hindu yang memenuhi standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional:													
a. literasi membaca	Persen	56,75	57,00	57,30	57,50	57,70	58,00						
b. numerasi	Persen	62,08	62,20	62,40	62,60	62,80	63,00						
IKSP.4.5 Persentase peserta didik pada satuan pendidikan Buddha yang memenuhi standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional:													
a. literasi membaca	Persen	70,00	70,00	71,50	73,00	74,00	75,00						
b. numerasi	Persen	70,00	70,00	71,50	73,00	74,00	75,00						
IKSP.4.6 Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	Persen	41,79	42,50	43,40	45,90	50,90	55,90						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKSP.4.7 Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Kristen, dan satuan pendidikan keagamaan Kristen formal dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	Persen	34,30	36,26	38,45	41,79	43,25	45,00						
IKSP.4.8 Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Katolik, dan satuan pendidikan keagamaan Katolik formal dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	Persen	N/A	90,74	90,74	92,59	96,30	97,30						
IKSP.4.9 Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Hindu, dan satuan pendidikan keagamaan Hindu formal dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	Persen	N/A	0,00	43,40	45,90	50,90	55,90						
IKSP.4.10 Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Buddha, dan satuan pendidikan keagamaan Buddha formal dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	Persen	63,64	70,45	77,27	84,09	90,91	95,00						
IKSP.4.11 Persentase satuan pendidikan Islam yang memiliki indeks karakter pada kategori baik	Persen	84,91	85,49	86,07	86,05	87,23	87,81						
IKSP.4.12 Persentase satuan pendidikan Kristen yang memiliki indeks karakter pada kategori baik	Persen	52,83	54,41	56,05	57,73	59,46	61,24						
IKSP.4.13 Persentase satuan pendidikan Katolik yang memiliki indeks karakter pada kategori baik	Persen	N/A	4,08	4,08	8,00	1,92	11,11						
IKSP.4.14 Persentase satuan pendidikan Hindu yang memiliki indeks karakter pada kategori baik	Persen	88,00	89,00	90,00	91,00	92,00	93,00						
IKSP.4.15 Persentase satuan pendidikan Buddha yang memiliki indeks karakter pada kategori baik	Persen	63,64	70,45	77,27	84,09	90,91	95,00						
IKSP.4.16 Persentase satuan pendidikan Islam yang memiliki:													
a. iklim keamanan sekolah;	Persen	43,15	45,32	47,50	49,68	51,86	54,04						
b. iklim inklusivitas;	Persen	34,67	38,29	40,27	41,58	44,23	46,20						
c. iklim kebhinekaan pada kategori baik	Persen	42,94	50,18	52,50	54,81	57,13	59,44						
IKSP.4.17 Persentase satuan pendidikan Kristen yang memiliki:													
a. iklim keamanan sekolah;	Persen	66,50	67,17	67,84	68,52	69,20	70,00						
b. iklim inklusivitas;	Persen	54,90	55,45	56,00	56,56	57,13	57,70						
c. iklim kebhinekaan pada kategori baik	Persen	63,98	64,62	65,27	65,92	66,58	67,24						
IKSP.4.18 Persentase satuan pendidikan keagamaan Katolik yang memiliki:													
a. iklim keamanan sekolah;	Persen	N/A	13,04	23,91	45,65	78,26	96,00						
b. iklim inklusivitas;	Persen	N/A	13,04	23,91	45,65	78,26	96,00						
c. iklim kebhinekaan pada kategori baik	Persen	N/A	13,04	23,91	45,65	78,26	96,00						
IKSP.4.19 Persentase satuan pendidikan Hindu yang memiliki:													
a. iklim keamanan sekolah;	Persen	70,00	72,00	73,00	74,00	75,00	76,00						
b. iklim inklusivitas;	Persen	57,24	58,00	58,25	58,50	58,75	59,00						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
c.iklim kebhinekaan pada kategori baik	Persen	66,76	67,00	67,25	67,50	67,75	68,00						
IKSP.4.20 Persentase satuan pendidikan keagamaan Buddha yang memiliki:													
a.iklim keamanan sekolah;	Persen	N/A	18,37	36,73	55,10	73,47	89,80						
b.iklim inklusivitas;	Persen	N/A	18,37	36,73	55,10	73,47	89,80						
c.iklim kebhinekaan pada kategori baik	Persen	N/A	18,37	36,73	55,10	73,47	89,80						
IKSP.4.21 Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang ramah anak	Persen	10,08	20,05	30,02	40,00	49,97	59,93						
IKSP.4.22 Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Kristen, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang ramah anak	Persen	N/A	43,00	45,00	47,00	49,00	50,00						
IKSP.4.23 Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Katolik, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang ramah anak	Persen	N/A	0,00	0,00	33,33	66,67	96,00						
IKSP.4.24 Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Hindu, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang ramah anak	Persen	N/A	16,00	46,13	53,33	55,56	65,00						
IKSP.4.25 Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Buddha, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang ramah anak	Persen	88,68	88,68	88,89	89,09	89,29	89,47						
IKSP.4.26 Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial	Persen	N/A	53,52	55,21	56,92	58,63	60,33						
IKSP.4.27 Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Kristen, dan satuan pendidikan keagamaan Kristen yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial	Persen	17,59	36,14	48,19	60,24	72,29	84,34						
IKSP.4.28 Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Katolik, dan satuan pendidikan keagamaan Katolik yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial	Persen	N/A	25,53	47,06	70,59	94,12	96,00						
IKSP.4.29 Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Hindu, dan satuan pendidikan keagamaan Hindu yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial	Persen	100,00	96,00	97,00	98,00	99,00	99,00						

[illegible]

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) /SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR		SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Kependidikan yang Profesional, Kompeten, dan Merata													
IKSP.5.1	Persentase provinsi yang memiliki indeks pemerataan guru madrasah dengan kategori baik	Persen	N/A	80,85	81,70	82,55	83,40	84,22						
IKSP.5.2	Persentase provinsi yang memiliki indeks pemerataan guru Kristen dengan kategori baik	Persen	N/A	28,60	57,10	78,57	81,43	84,29						
IKSP.5.3	Persentase provinsi yang memiliki indeks pemerataan guru Katolik dengan kategori baik	Persen	N/A	80,85	81,70	82,55	83,40	84,22						
IKSP.5.4	Persentase provinsi yang memiliki indeks pemerataan guru Hindu dengan kategori baik	Persen	N/A	26,00	28,00	34,00	36,00	39,00						
IKSP.5.5	Persentase provinsi yang memiliki indeks pemerataan guru Buddha dengan kategori baik	Persen	N/A	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00						
IKSP.5.6	Persentase provinsi yang memiliki indeks pemerataan guru Khonghucu dengan kategori baik	Persen	N/A	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00						
IKSP.5.7	Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	41,96	54,93	63,94	75,91	87,87	98,84						
IKSP.5.8	Persentase guru agama Kristen yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	30,48	35,28	40,07	44,87	52,06	59,25						
IKSP.5.9	Persentase guru agama Katolik yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	N/A	71,46	91,63	93,37	95,10	96,66						
IKSP.5.10	Persentase guru agama Hindu yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	41,50	83,50	84,80	85,20	85,60	86,00						
IKSP.5.11	Persentase guru agama Buddha yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	55,96	73,12	80,36	86,29	92,23	98,00						
IKSP.5.12	Persentase pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama pada satuan pendidikan	Persen	54,67	62,08	70,35	77,83	85,30	90,40						
IKSP.5.13	Persentase pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama Kristen pada satuan pendidikan	Persen	30,00	35,00	35,00	40,00	40,00	45,00						
IKSP.5.14	Persentase pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama Katolik pada satuan pendidikan	Persen	N/A	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00						
IKSP.5.15	Persentase pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama Hindu pada satuan pendidikan	Persen	N/A	59,17	62,16	65,25	68,35	72,00						
IKSP.5.16	Persentase pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama Buddha pada satuan pendidikan	Persen	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60						
2127 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam									1.322.883	1.859.270	2.381.814	2.903.277	2.876.330	[DITJEN PENDIS] Direktorat Pendidikan Agama Islam
SK.2127.1	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan keagamaan islam													
IKSK.2127.1.1	Nilai keberagamaan siswa keagamaan islam pada satuan pendidikan umum	Nilai	69,00	70,50	71,80	73,00	74,00	75,00						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.2127.1.2	Nilai	69,00	70,50	71,80	73,00	74,00	75,00						
IKSK.2127.1.3	Nilai	N/A	71,00	72,30	73,50	74,50	75,50						
RO.2127.SCI.003	Orang	1.000	1.000	1.013	1.025	1.035	1.046	2.000	2.026	2.050	2.071	2.092	
IKRO.2127.SCI.003.1	Nilai	69	70,5	71,8	73	74	75						
IKRO.2127.SCI.003.2	Nilai	N/A	71	72,30	73,50	74,50	75,50						
RO.2127.SBA.002	Orang	1.125	250	253	256	259	261	2.500	2.574	2.605	2.631	2.698	
IKRO.2127.SBA.002.1	Nilai	69,00	70,50	71,80	73	74	75						
SK.2127.2													
IKSK.2127.2.1	Persen	N/A	30,00	60,00	80,00	90,00	100,00						
IKSK.2127.2.2	Persen	N/A	30,00	60,00	80,00	90,00	100,00						
RO.2127.PBH.001	Rekomendasi Kebijakan	5	2	3	3	3	4	1.000	1.024	1.040	1.060	1.080	
IKRO.2127.PBH.001.1	Kurikulum	N/A	10	12	14	16	18						
IKRO.2127.PBH.001.2	Dokumen	N/A	3	5	7	9	11						
IKRO.2127.PBH.001.3	Lembaga	N/A	160	208	250	275	302						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO.2127.QEI.001 Sekolah yang Menerima Bantuan Sarana Penguatan Pendidikan Agama Islam	Unit	10.643	160	208	250	275	302	3.000	3.060	3.120	3.180	3.252	
IKRO.2127.QEI.001.1.1 Jumlah satuan pendidikan umum yang memperoleh peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan melalui dukungan sarana ibadah dan fasilitas pendidikan keagamaan	Lembaga	10.643	15.174	19.726	23.671	26.039	28.642						
SK.2127.3 Meningkatkan kualitas guru agama pada satuan pendidikan umum													
IKSK.2127.3.1 Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama Islam	Persen	47,00	89,00	95,00	100,00	100,00	100,00						
RO.2127.PDG.001 Guru PAI yang Tersertifikasi	Orang	5.000	5.000	5.300	5.565	5.565	5.565	33.575	34.260	34.945	35.630	36.315	
IKRO.2127.PDG.001.1.1 Jumlah Guru PAI yang Tersertifikasi	Orang	N/A	5.000	5.300	5.565	5.565	5.565						
RO.2127.QEA.001 Tunjangan Profesi Guru PAI Non PNS	Orang	23.487	27.619	52.305	76.991	101.676	126.362	1.119.826	1.633.165	2.135.564	2.637.963	2.601.547	
IKRO.2127.QEA.001.1.1 Jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama Islam	Orang	27.619	27.619	30.619	33.619	36.619	39.619						
SK.2127.4 Meningkatkan kualitas guru agama dan dosen agama													
IKSK.2127.4.1 Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru dan tenaga kependidikan PAI berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	Persen	32,30	37,30	42,30	47,30	52,30	57,30						
IKSK.2127.4.2 Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan dosen agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	Persen	10,08	13,08	16,08	19,08	22,08	25,08						
IKSK.2127.4.3 Persentase guru agama, dosen agama, dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	Persen	20,00	30,00	40,00	60,00	80,00	100,00						
RO.2127.SCI.004 Guru dan Pengawas PAI yang Mendapat Penguatan Pemahaman Moderasi Beragama	Orang	200	200	220	264	317	380	200	204	208	212	216	
IKRO.2127.SCI.004.1.1 Jumlah guru agama dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	Orang	200	250	300	350	400	450						
RO.2127.SBA.003 Dosen PAI yang Mendapat Penguatan Pemahaman Moderasi Beragama	Orang	1.000	400	412	424	437	450	1.000	1.020	1.041	1.061	1.082	
IKRO.2127.SBA.003.2 Jumlah dosen agama yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	Orang	400	250	300	350	400	450						
RO.2127.QEA.002 Insentif Guru PAI Non PNS	Orang	22.120	32.765	34.403	36.123	37.930	39.826	132.000	134.326	136.653	138.979	141.306	
IKRO.2127.QEA.002.1 Jumlah rekomendasi pengadaan dan pemerataan tenaga kependidikan PAI berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	Orang	44.000	44.000	50.000	56.000	62.000	68.000						
IKRO.2127.QEA.002.1.1 Jumlah Guru PAI Non PNS yang	Orang	1.425	1.849	2.274	2.698	3.122	3.546						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
02.2 memperoleh insentif													
SK.2127.5 Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada sekolah umum													
IKSK.2127.5.1 Persentase guru agama yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil pada pendidikan keagamaan islam	Persen	N/A	60,00	62,50	65,00	67,50	70,00						
IKSK.2127.5.2 Persentase pengawas agama yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP) minimal predikat terampil pada pendidikan keagamaan islam	Persen	N/A	45,00	47,50	50,00	52,50	55,00						
IKSK.2127.5.3 Persentase guru agama yang meningkat jenjang karir pada pendidikan keagamaan islam	Persen	N/A	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12						
IKSK.2127.5.4 Persentase pengawas agama yang meningkat jenjang karir pada pendidikan keagamaan islam	Persen	N/A	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27						
RO.2127.QDC.00 Guru yang Difasilitasi dalam Penyelenggaraan Ujian PAI	Orang	2.457	1.000	1.025	1.051	1.077	1.104	2.000	5.450	5.501	5.554	2.208	
IKRO.2127.QDC.02.1 Jumlah guru agama yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	Orang	N/A	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000						
RO.2127.QEI.002 Lembaga Profesi/Mitra yang Mendapatkan Bantuan Pemberdayaan Kualitas Guru PAI	Unit	880	300	308	315	323	331	5.000	5.125	5.253	5.384	5.519	
IKRO.2127.QEI.002.1 Jumlah guru agama yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	Orang	N/A	6.000	8.000	10.000	12.000	14.000						
IKRO.2127.QEI.002.2 Jumlah pengawas agama yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP) minimal predikat terampil	Orang	N/A	675	713	750	788	825						
RO.2127.SCI.001 Guru PAI yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi	Orang	1.012	68	69	70	71	72	14.600	28.289	42.519	55.668	62.558	
IKRO.2127.SCI.001.1.1 Jumlah Guru PAI yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi	Orang	N/A	41.041	42.041	43.041	44.041	45.041						
RO.2127.QAA.001 Pendidik dan Tenaga kependidikan PAI yang mendapat Pembinaan Karir	Orang	400	400	500	600	700	800	1.182	1.892	2.602	3.312	4.021	
IKRO.2127.QAA.001.1 Jumlah guru agama yang meningkat jenjang karir	Orang	N/A	400	500	600	700	800						
RO.2127.QDC.003 Guru yang mendapatkan Pemberdayaan Kualitas Guru PAI	Orang	200	1.000	1.025	1.051	1.077	1.104	4.000	4.100	4.203	4.308	4.415	
IKRO.2127.QDC.003.1 Jumlah Guru yang mendapatkan Pemberdayaan Kualitas Guru PAI	Orang	N/A	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000						
RO.2127.SCI.002 Pengawas PAI yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi	Orang	491	200	205	210	215	221	1.000	2.755	4.510	6.265	8.021	
IKRO.2127.SCI.002.1 Jumlah Pengawas PAI yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi	Orang	N/A	490	590	690	790	890						
2133 Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas								7.157.079	11.262.669	15.368.320	19.474.004	23.579.703	[DITJEN PENDIS]

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah													Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan
SK.1.2133.1 Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada madrasah													
IKSK.1.2133.1 Rasio guru madrasah terhadap siswa yang memenuhi SNP	Rasio	1 : 13	1 : 13	1 : 13	1 : 14	1 : 14	1 : 15						
IKSK.1.2133.2 Persentase tenaga kependidikan madrasah lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	Persen	30,58	31,45	32,45	33,95	35,95	38, 45						
IKSK.1.2133.3 Persentase guru madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	Persen	40,63	41,63	46,00	51,00	56,00	61,00						
IKSK.1.2133.4 Persentase Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	Persen	79,68	82,00	83,00	86,00	89,00	92,00						
IKSK.1.2133.5 Persentase guru dan tenaga kependidikan Madrasah yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	Persen	49,17	51,17	53,17	55,17	57,17	59,17						
IKSK.1.2133.6 Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP) minimal predikat terampil	Persen	86,00	87,00	89,00	92,00	95,00	98,00						
IKSK.1.2133.7 Persentase guru madrasah yang meningkat jenjang karir	Persen	0,07	0,15	0,17	0,19	0,21	0,23						
IKSK.1.2133.8 Persentase Pengawas Madrasah yang meningkat jenjang karir	Persen	0,67	0,68	0,69	0,70	0,71	0,72						
RO.2133.QEA.004 Guru Non-PNS Penerima Insentif	Orang	217.780	607.780	216.500	216.500	216.500	216.500	731.007	745.922	760.838	775.753	790.670	
IKRO.2133.QEA.004.1 Jumlah Guru Non-PNS Penerima Insentif	Orang	217.780	607.780	216.500	216.500	216.500	216.500						
RO.2133.QEA.005 Guru Non-PNS Penerima Tunjangan Profesi	Orang	422.781	195.551	211.005	211.005	211.005	211.005	6.222.467	10.293.762	14.365.058	18.436.353	22.507.648	
IKRO.2133.QEA.005.1 Jumlah Guru Non-PNS penerima Tunjangan Profesi	Orang	422.781	195.551	211.005	211.005	211.005	211.005						
RO.2133.QEA.006 Guru Non-PNS dan Tendik penerima Tunjangan Khusus	Orang	9.043	9.043	9.043	9.689	10.380	11.073	126.442	129.022	131.602	134.182	136.763	
IKRO.2133.QEA.006.1 Jumlah Guru Non-PNS dan Tendik penerima Tunjangan Khusus	Orang	9.043	9.043	9.043	9.689	10.380	11.073						
RO.2133.PDG.001 Guru Madrasah yang Tersertifikasi	Orang	9.000	9.101	9.801	10.501	11.250	12.001	57.362	73.434	89.505	105.577	121.650	
IKRO.2133.PDG.001.1 Jumlah Guru Madrasah yang Tersertifikasi	Orang	9.000	9.101	9.801	10.501	11.250	12.001						
RO.2133.QEI.001 Lembaga Profesi/Mitra yang mendapatkan bantuan pemberdayaan kualitas Guru	Lembaga	703	550	592	635	680	725	7.900	8.061	8.222	8.383	8.545	
IKRO.2133.QEI.001.1 Jumlah Lembaga Profesi/Mitra yang mendapatkan bantuan pemberdayaan kualitas Guru	Lembaga	703	550	592	635	680	725						
RO.2133.SCI.001 Guru Madrasah yang Memperoleh	Orang	3.271	3.700	3.848	4.040	4.242	4.455	4.958	5.156	5.414	5.685	5.969	

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) /SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR		SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Peningkatan Kompetensi													
IKRO.2133.SCI.001.1	Jumlah Guru Madrasah yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi	Orang	N/A	2.725	2.752	2.807	2.892	3.007						
RO.2133.QDC.001	Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah dan RA Berprestasi	Orang	2.220	100	108	115	124	132	3.500	3.769	4.038	4.327	4.615	
IKRO.2133.QDC.001.1	Jumlah guru madrasah terhadap siswa yang memenuhi SNP	Orang	N/A	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00						
IKRO.2133.QDC.001.2	Jumlah tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi	Orang	N/A	25,00	26,00	27,00	28,00	29,00						
RO.2133.QAA.001	Pendidik dan Tenaga kependidikan Madrasah yg mendapat Pembinaan Karir	Orang	2.000	1.300	1.303	1.305	1.308	1.310	2.442	2.522	2.602	2.683	2.761	
IKRO.2133.QAA.001.1	Jumlah guru madrasah yang meningkat jenjang karir	Orang	104	1.300	1.303	1.305	1.308	1.310						
IKRO.2133.QAA.001.2	Jumlah pengawas madrasah yang meningkat jenjang karir	Orang	21	260	261	261	262	262						
RO.2133.SCI.003	Guru dan Pengawas Madrasah yang Mendapat Penguatan Pemahaman Moderasi Beragama	Orang	500	500	510	520	531	541	1.000	1.020	1.040	1.061	1.082	
IKRO.2133.SCI.003.1	Jumlah Guru dan Pengawas Madrasah yang Mendapat Penguatan Pemahaman Moderasi Beragama	Orang	N/A	500	505	515	531	552						
4422 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah									32.896	34.029	34.611	35.191	35.915	[DITJEN PENDIS] Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan
SK.4422.1	Meningkatnya kualitas penilaian Pendidikan													
IKSK.4422.1.1	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional pada madrasah untuk:													
	a literasi membaca	Persen	90,23	90,25	90,38	90,50	90,63	90,75						
	b numerasi	Persen	93,69	93,82	93,94	94,07	94,19	94,32						
IKSK.4422.1.2	Nilai keberagamaan siswa pada madrasah	Nilai	50,40	50,94	51,48	52,02	52,56	53,10						
IKSK.4422.1.3	Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa pada madrasah	Nilai	N/A	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00						
IKSK.4422.1.4	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas pada madrasah	Persen	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00	99,00						
IKSK.4422.1.5	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran pada madrasah	Persen	80,68	82,68	84,68	86,68	88,68	90,68						
IKSK.4422.1.6	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler pada satuan madrasah	Jumlah	N/A	52.456	52.849	53.378	54.045	54.856						
IKSK.4422.1.7	Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	Persen	N/A	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50						
RO.4422 QDB 001	Madrasah yang dibina dalam Pelaksanaan Penilaian Hasil Pembelajaran	Lembaga	1	5.600	5.656	5.712	5.766	5.822	7.576	7.652	7.728	7.801	7.877	

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKRO.4422.QDB.01.1	Jumlah rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional pada madrasah untuk: a literasi membaca b numerasi	Nilai	90,2393,69	90,25 93,82	90,38 93,94	90,5 94,07	90,63 94,19	90,75 94,32					
IKRO.4422.QDB.01.2	Jumlah satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas pada madrasah	Lembaga	78.818	80.570	82.321	84.073	85.824	86.700					
IKRO.4422.QDB.01.3	Jumlah satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran pada madrasah	Lembaga	70.656	72.408	74.159	75.911	77.662	70.849					
IKRO.4422.QDB.01.4	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler pada madrasah	Orang	N/A	52.456	52.849	53.378	54.045	54.856					
IKRO.4422.QDB.01.5	Jumlah nilai rata-rata karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab) pada madrasah	Nilai	N/A	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00					
RO.4422.SCI.001	Siswa Madrasah mendapat Penguatan Pemahaman Moderasi Beragama	Orang	500	1500	1560	1622	1687	1755	4.000	4.082	4.163	4.245	4.326
IKRO.4422.SCI.001.1	Jumlah rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa pada madrasah	Nilai	N/A	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00					
IKRO.4422.SCI.001.2	Jumlah rata-rata Nilai keberagamaan siswa pada madrasah	Nilai	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40					
SK.4422.2	Meningkatnya kualitas perangkat kurikulum												
IKSK.4422.2.1	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan pada madrasah	Persen	N/A	92,00	94,00	96,00	98,00	99,00					
IKSK.4422.2.2	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran pada madrasah	Persen	N/A	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50					
RO.4422.PBH.001	Model Pembelajaran Madrasah yang Dikembangkan	Rekomen dasi Kebijaka n	4	5	6	7	8	9	6.555	6.689	6.823	6.956	7.090
IKRO.4422.PBH.001.1	Jumlah Model Pembelajaran Madrasah yang Dikembangkan	Model	8	8	9	10	11	12					
IKRO.4422.PBH.001.2	Jumlah Materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran)	Dokumen	6	94	100	105	110	115					
SK.4422.3	Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu												
IKSK.4422.3.1	Persentase PAUD/RA yang terakreditasi minimal B	Persen	44,00	47,20	50,40	53,60	56,80	60,10					
IKSK.4422.3.2	Persentase MI yang terakreditasi minimal B	Persen	77,70	80,30	82,90	85,50	88,10	90,70					
IKSK.4422.3.3	Persentase MTs yang terakreditasi	Persen	70,90	74,00	77,10	80,20	83,30	86,40					

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	minimal B												
IKSK.4422.3.4	Persentase MA yang terakreditasi minimal B	Persen	66,00	68,90	71,90	74,80	77,80	80,80					
IKSK.4422.3.5	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara pada madrasah	Persen	0,91	0,98	1,04	1,06	1,08	1,11					
IKSK.4422.3.6	Persentase Madrasah yang menerapkan program pendidikan bilingual	Persen	0,57	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00					
IKSK.4422.3.7	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional pada madrasah	Persen	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70					
IKSK.4422.3.8	Persentase madrasah dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	Persen	62,80	65,80	66,90	68,00	69,20	70,30					
IKSK.4422.3.9	Persentase MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri	Persen	14,07	15,07	16,07	17,07	18,07	19,07					
IKSK.4422.3.10	Persentase MA Kejuruan dan MA Program Keterampilan yang meningkatkan life skill melalui program magang	Persen	N/A	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00					
IKSK.4422.3.11	Persentase lulusan MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang mendapatkan pekerjaan / bekerja dalam waktu kurang dari 1 tahun	Persen	N/A	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00					
RO.4422 QIC 001	Madrasah yang mendapat Supervisi Pembelajaran	Lembaga	181	190	191	192	193	194	201	202	203	204	205
IKRO.4422.QIC.001.1	Jumlah PAUD/RA yang terakreditasi minimal B	Lembaga	13.720	14.720	15.720	16.720	17.720	18.720					
IKRO.4422.QIC.001.2	Jumlah MI yang terakreditasi minimal B	Lembaga	20.811	21.511	22.211	22.911	23.611	24.311					
IKRO.4422.QIC.001.3	Jumlah MTs yang terakreditasi minimal B	Lembaga	13.787	14.387	14.987	15.587	16.187	16.787					
IKRO.4422.QIC.001.4	Jumlah MA yang terakreditasi minimal B	Lembaga	6.695	6.995	7.295	7.595	7.895	8.195					
IKRO.4422.QIC.001.5	Jumlah satuan pendidikan unggul yang terselenggara pada madrasah	Lembaga	797	858	911	928	946	972					
IKRO.4422.QIC.001.6	Jumlah RA yang menerapkan program Holistik-Integratif	Lembaga	426	6.426	12.426	18.426	24.426	30.426					
IKRO.4422.QIC.001.7	Jumlah madrasah dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	Lembaga	447	876	1.752	2.627	3.503	4.379					
IKRO.4422.QIC.001.8	Jumlah MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri	Lembaga	76	80	90	100	110	120					
IKRO.4422.QIC.001.9	Jumlah MA Kejuruan dan MA Program Keterampilan yang meningkatkan life skill melalui program magang	Lembaga	N/A	186	199	212	224	237					
IKRO.4422.QIC.001.10	Jumlah lulusan MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang mendapatkan pekerjaan / bekerja dalam waktu kurang	Orang	N/A	16	17	18	19	20					

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) /SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /INDIKATOR		SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	dari 1 tahun													
RO.4422.QDC.001	Siswa Madrasah Berprestasi	Orang	1.900	2.000	2.115	2.155	2.195	2.255	14.564	15.404	15.694	15.985	16.417	
IKRO.4422.QDC.01.1	Jumlah Madrasah yang menerapkan program pendidikan bilingual	Lembaga	499	876	876	1.752	1.752	1.752						
IKRO.4422.QDC.01.2	Jumlah siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional pada madrasah	Orang	20.982	31.474	41.965	52.456	62.947	73.439						
4433 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam									182.600	308.727	334.856	560.983	687.114	[DITJEN PENDIS] Direktorat Pesantren
SK.4433.1	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan keagamaan dan pesantren													
IKSK.4433.1.1	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional pada satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan islam untuk:													
	a literasi membaca	Nilai	N/A	62,80	65,70	68,60	71,50	74,40						
	b numerasi	Nllai	N/A	66,80	69,70	72,60	75,50	78,40						
IKSK.4433.1.2	Persentase santri yang mengikuti Imtihan Wathani (IW)	Persen	32,00	46,82	61,82	76,82	81,00	92,00						
IKSK.4433.1.3	Nilai keberagamaan santri pada satuan pendidikan pesantren	Nilai	N/A	77,00	80,85	84,89	89,14	93,59						
IKSK.4433.1.4	Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama santri	Nilai	N/A	78,00	81,90	86,00	90,29	94,81						
RO.4433.QDB.001	Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam mendapat Penguatan Pemahaman Moderasi Beragama	Lembaga	1,00	1.000	1.042	1.083	1.125	1.166	2.000	2.041	2.082	2.122	2.163	
IKRO.4433.QDB.01.1	Jumlah santri satuan pendidikan keagamaan Islam dan pesantren yang memperoleh nilai literasi membaca dan numerasi pada asesmen kompetensi tingkat nasional dengan kategori baik	Orang	N/A	273.068	300.596	330.656	363.563	399.951						
IKRO.4433.QDB.01.2	Jumlah santri yang mengikuti Imtihan Wathani (IW)	Orang	N/A	15.500	17.500	19.500	22.500	24.500						
IKRO.4433.QDB.01.3	Jumlah santri satuan pendidikan keagamaan Islam dan pesantren yang difasilitasi dalam survei indeks keberagamaan	Orang	N/A	2.224.414	2.281.369	2.338.324	2.395.279	2.452.234						
IKRO.4433.QDB.01.4	Jumlah santri satuan pendidikan keagamaan Islam dan pesantren yang memperoleh penguatan moderasi beragama	Orang	N/A	506.268	537.909	569.551	601.193	632.835						
SK.4433.2	Meningkatnya kualitas perangkat kurikulum													
IKSK.4433.2.1	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan pada satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan islam	Persen	N/A	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) /SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.4433.2.2	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran pada satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan islam	Persen	N/A	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50					
IKSK.4433.2.3	Persentase peningkatan jumlah publikasi dakwah yang diterbitkan	Persen	1,29	1,39	1,49	1,59	1,69	1,79					
RO.4433.PBH.001	Model Pembelajaran Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam dikembangkan	Kajian	5	5	5	5	6	6	1.000	1.020	1.041	1.061	1.082
IKRO.4433.PBH.01.1	Jumlah materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran pada satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan islam	Dokumen	N/A	276	290	304	320	335					
IKRO.4433.PBH.01.2	Jumlah perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan pada satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan islam	Dokumen	N/A	28	42	56	70	84					
IKRO.4433.PBH.01.3	Jumlah peningkatan jumlah publikasi dakwah yang diterbitkan	Kajian	56	60	64	68	72	76					
SK.4433.3	Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu												
IKSK.4433.3.1	Persentase PAUDQU yang terakreditasi minimal B	Persen	N/A	4,91	5,20	5,45	5,75	6,00					
IKSK.4433.3.2	Persentase Satuan pendidikan formal pesantren yang memperoleh hasil asesmen minimal jayyid	Persen	N/A	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00					
IKSK.4433.3.3	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara pada satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan islam	Persen	N/A	0,23	0,26	0,27	0,28	0,29					
IKSK.4433.3.4	Persentase santri yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Persen	20,00	21,00	23,00	24,00	26,00	28,00					
IKSK.4433.3.5	Persentase satuan Pendidikan pesantren dan Pendidikan keagamaan yang dinilai dan dievaluasi mutunya	Persen	N/A	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00					
IKSK.4433.3.6	Persentase satuan Pendidikan pesantren dan Pendidikan keagamaan yang mendapatkan pendampingan	Persen	N/A	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00					
IKSK.4433.3.7	Persentase satuan pendidikan Pesantren yang menerapkan program pendidikan bilingual	Persen	8,00	12,00	17,00	23,00	30,00	38,00					
IKSK.4433.3.8	Persentase peningkatan jumlah lulusan pesantren Internasional	Persen	N/A	0,00	0,00	0,00	0,25	0,30					
RO.4433.QEI.002	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Pesantren	Lembaga	1	1	1	1	2	2	20.000	25.500	31.000	36.500	42.000

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) /SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKRO.4433.QEI.00 2.1	Jumlah PAUDQU yang memperoleh hasil asesmen minimal B	Lembaga	N/A	170	180	189	199	208					
IKRO.4433.QEI.00 2.2	Jumlah satuan pendidikan unggul yang terselenggara pada satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan islam	Lembaga	N/A	791	895	929	963	998					
IKRO.4433.QEI.00 2.3	Jumlah santri yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Orang	N/A	624.604	684.091	713.834	773.320	832.806					
IKRO.4433.QEI.00 2.4	Jumlah satuan Pendidikan pesantren dan Pendidikan keagamaan yang dinilai dan dievaluasi mutunya	Lembaga	N/A	12.683	16.911	21.139	25.367	29.595					
IKRO.4433.QEI.00 2.5	Jumlah satuan Pendidikan pesantren dan Pendidikan keagamaan yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	N/A	4.228	6.342	8.456	10.570	12.683					
IKRO.4433.QEI.00 2.6	Jumlah satuan pendidikan Pesantren yang menerapkan program pendidikan bilingual	Lembaga	N/A	5.073	7.187	9.724	12.683	16.066					
IKRO.4433.QEI.00 2.7	Jumlah peningkatan lulusan pesantren Internasional	Lembaga	N/A	0	0	0	864	864					
RO.4433.PDG.003	Ustadz yang Tersertifikasi	Orang	1.100	1.100	1.424	1.795	2.214	2.680	2.000	10.000	18.000	26.000	34.000
IKRO.4433.PDG.003.1	Jumlah Ustadz yang Tersertifikasi	Orang	1.100	1.100	1.424	1.795	2.214	2.680					
RO.4433.QEA.001	Ustadz pada Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Penerima Insentif	Orang	20.000	35.700	43.814	52.879	62.883	73.819	143.100	145.285	47.470	149.656	151.842
IKRO.4433.QEA.001.1	Jumlah Ustadz pada Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Penerima Insentif	Orang	20.000	35.700	43.814	52.879	62.883	73.819					
RO.4433.QEA.002	Guru pada Pendidikan Diniyah Formal dan Muadalah Penerima TPG	Orang	500	500	614	741	881	1.034	9.000	115.800	222.600	329.400	436.200
IKRO.4433.QEA.002.1	Jumlah Guru pada Pendidikan Diniyah Formal dan Muadalah Penerima TPG	Orang	500	35.700	43.814	52.879	62.883	73.819					
RO.4433.SCI.001	Ustadz yang ditingkatkan Kompetensinya	Orang	200	200	245	296	352	414	2.000	5.510	9.020	12.530	16.041
IKRO.4433.SCI.001.1	Jumlah Ustadz yang ditingkatkan Kompetensinya	Orang	200	200	245	296	352	414					
SK.4433.4	Meningkatnya layanan rekognisi pendidikan												
IKSK.4433.4.1	Persentase lulusan yang mendapatkan pengakuan atas kualifikasinya oleh lembaga pemerintah, pendidikan umum, atau lembaga profesi pada satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan islam	Persen	75	77	79	80	85	90					
RO.4433.QEI.001	Jumlah Lembaga Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas	Lembaga	35	35	36	36	38	41	3.500	3.571	3.643	3.714	3.786
IKRO.4433.QEI.001.1	Jumlah lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapatkan pengakuan atas kualifikasinya oleh lembaga pemerintah,	Lembaga	35	35	36	37	38	39					

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
pendidikan umum, atau lembaga profesi													
4434 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Kristen								78.808	267.490	292.743	334.260	376.691	[BIMAS KRISTEN] Direktorat Pendidikan Agama Kristen
SK.4434.1 Meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan													
IKSK.4434.1.1 Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk:													
a literasi membaca	Nilai	44,24	44,46	44,68	44,91	45,13	45,36						
b numerasi	Nilai	43,75	43,97	44,19	44,41	44,63	44,85						
IKSK.4434.1.2 Nilai keberagamaan siswa pada satuan pendidikan Kristen	Nilai	82,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00						
IKSK.4434.1.3 Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa pada satuan pendidikan Kristen	Nilai	82,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00						
IKSK.4434.1.4 Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	Persen	83,93	84,93	85,93	86,93	87,93	88,93						
IKSK.4434.1.5 Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Persen	100,00	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00						
IKSK.4434.1.6 Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	Prestasi	49	67	70	75	80	85						
IKSK.4434.1.7 Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	Persen	82,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00						
IKSK.4434.1.8 Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	Persen	82,79	83,49	84,42	85,12	86,05	86,98						
IKSK.4434.1.9 Persentase SDTK Kristen yang terakreditasi minimal B	Persen	43,42	43,42	59,21	76,32	82,89	92,11						
IKSK.4434.1.10 Persentase SMPTK Kristen yang terakreditasi minimal B	Persen	30,60	30,60	41,79	58,96	69,40	79,10						
IKSK.4434.1.11 Persentase SMTK/SMAK Kristen yang terakreditasi minimal B	Persen	27,27	27,27	37,27	42,73	50,91	59,09						
IKSK.4434.1.12 Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara	Persen	1,86	1,86	2,09	2,33	2,79	3,09						
IKSK.4434.1.13 Persentase satuan pendidikan Kristen yang menerapkan program pendidikan bilingual	Persen	0,47	0,70	1,63	2,79	3,49	4,65						
IKSK.4434.1.14 Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Persen	0,25	1,81	1,86	1,91	1,96	2,07						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) /SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.4434.1.15	Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	Persen	41,63	41,63	43,26	44,88	46,98	50,00					
IKSK.4434.1.16	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	Persen	49,68	52,90	58,20	62,85	66,54	71,96					
RO.4434.PEF.001	Sosialisasi/Pendampingan Pemahaman Moderasi Beragama dan Pendidikan Karakter pada Siswa Sekolah Keagamaan Kristen	Orang	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	1.987	2.618	3.952	5.426	6.240
IKRO.4434.PEF.01.1	Jumlah Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Lembaga	430	430	430	430	430	430					
RO.4434.QDB.001	Pembinaan Kualitas Manajemen Tata Kelola Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen	Lembaga	100	130	135	140	145	150	4.522	5.040	6.300	7.560	8.694
IKRO.4434.QDB.01.1	Jumlah SDTK yang Terakreditasi Minimal B	Lembaga	33	33	45	58	63	70					
IKRO.4434.QDB.01.2	Jumlah SMPTK yang Terakreditasi Minimal B	Lembaga	41	41	56	79	93	106					
IKRO.4434.QDB.01.3	Jumlah SMTK/SMAK yang Terakreditasi Minimal B	Lembaga	60	60	82	94	112	130					
IKRO.4434.QDB.01.4	Jumlah Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen Unggul yang terselenggara	Lembaga	8	8	9	10	11	12					
IKRO.4434.QDB.01.5	Jumlah satuan pendidikan keagamaan Kristen yang menerapkan program pendidikan bilingual	Lembaga	2	3	7	10	12	15					
IKRO.4434.QDB.01.6	Jumlah siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Orang	8	8	12	14	16	20					
IKRO.4434.QDB.01.7	Jumlah satuan pendidikan keagamaan Kristen dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	Lembaga	180	180	186	193	202	215					
IKRO.4434.QDB.01.8	Jumlah Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen Yang Ditingkatkan Mutunya	Lembaga	100	130	135	140	145	150					
RO.4434.PBH.001	Rekomendasi Kebijakan Terhadap Kurikulum dan Bahan Ajar Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen	Kajian	N/A	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	2.873	7.500	9.375	11.250	12.938
IKRO.4434.PBH.01.1	Jumlah rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk:												
	a literasi membaca	Nilai	44,24	44,46	44,68	44,91	45,13	45,36					
	b numerasi	Nilai	43,75	43,97	44,19	44,41	44,63	44,85					
IKRO.4434.PBH.01.2	Nilai keberagamaan siswa pada satuan pendidikan keagamaan Kristen	Nilai	82,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00					
IKRO.4434.PBH.01.3	Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa pada satuan pendidikan Kristen	Nilai	82,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00					
IKRO.4434.PBH.01.4	Jumlah satuan pendidikan keagamaan Kristen yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	Lembaga	360	365	370	373	378	382					
IKRO.4434.PBH.01.5	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	Prestasi	N/A	67,00	70,00	75,00	80,00	85,00					

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) /SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKRO.4434.PBH.01.6	Jumlah nilai rata-rata karakter siswa satuan pendidikan keagamaan Kristen melalui kegiatan kepramukaan	Nilai	N/A	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00					
IKRO.4434.PBH.01.7	Jumlah perangkat kurikulum satuan pendidikan keagamaan Kristen yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	Modul	N/A	80	80	80	80	80					
IKRO.4434.PBH.01.8	Jumlah Materi/Bahan Ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	Modul	N/A	10	20	30	40	50					
SK.4434.2	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan keagamaan Kristen												
IKSK.4434.2.1	Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP	Rasio	N/A	01:20	01:20	01:20	01:20	01:20					
IKSK.4434.2.2	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	Persen	N/A	35,00	40,00	55,00	60,00	70,00					
IKSK.4434.2.3	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	Persen	N/A	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10					
IKSK.4434.2.4	Persentase Kepala satuan pendidikan Kristen yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	Persen	N/A	0,00	0,00	0,10	0,20	0,80					
IKSK.4434.2.5	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	Persen	N/A	10,00	10,50	11,03	11,58	12,16					
IKSK.4434.2.6	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas satuan pendidikan Kristen (AKP) minimal predikat terampil	Persen	N/A	0,00	0,00	0,10	0,40	0,60					
IKSK.4434.2.7	Persentase guru yang meningkat jenjang karir	Persen	N/A	1,31	1,32	1,34	1,35	1,36					
IKSK.4434.2.8	Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir	Persen	N/A	1,31	1,31	1,35	1,35	1,36					
IKSK.4434.2.9	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama Kristen	Persen	N/A	98,00	98,70	99,10	99,40	99,70					
IKSK.4434.2.10	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	Persen	N/A	0,00	98,00	98,50	98,70	99,00					
RO.4434.PDI.001	Sertifikasi Guru pada Sekolah Keagamaan Kristen dan Guru Pendidikan Agama Kristen pada Sekolah Umum	Orang	2.500	10.841	11.000	1.000	0	0	8.760	13.849	1.000	0	0
IKRO.4434.PDI.001.1	Jumlah Guru Pendidikan Agama Kristen dan Guru Mapel Umum Sekolah Keagamaan Kristen yang Tersertifikasi	Orang	2.500	10.841	11.000	1.000	0	0					
IKRO.4434.PDI.001	Jumlah lulusan Pendidikan Profesi	Orang	2.500	10.841	11.000	1.000	0	0					

[illegible]

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	a literasi membaca	Nilai	59,72	60,00	62,00	65,00	68,00	70,00					
	b numerasi	Nilai	50,60	51,00	53,00	55,00	58,00	60,00					
IKSK.4435.1.2	Nilai keberagamaan siswa pada satuan pendidikan Katolik	Nilai	N/A	65,00	70,00	80,00	90,00	95,00					
IKSK.4435.1.3	Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa Katolik	Nilai	N/A	80,00	80,00	82,00	85,00	87,00					
IKSK.4435.1.4	Persentase satuan pendidikan Keagamaan Katolik yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	Persen	N/A	30,00	50,00	70,00	90,00	91,00					
IKSK.4435.1.5	Persentase satuan pendidikan Keagamaan Katolik yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Persen	N/A	90,74	90,74	92,59	96,30	97,30					
IKSK.4435.1.6	Jumlah prestasi Siswa Katolik yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	Penghar-gaan	N/A	0	5	7	8	10					
IKSK.4435.1.7	Persentase peningkatan nilai karakter siswa Katolik melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	Persen	N/A	2,00	5,00	10,00	15,00	20,00					
IKSK.4435.1.8	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan Keagamaan Katolik berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	Persen	N/A	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00					
IKSK.4435.1.9	Persentase Taman Seminari yang terakreditasi minimal B	Persen	16,18	41,18	50,00	58,82	72,06	80,88					
IKSK.4435.1.10	Persentase SD Katolik yang terakreditasi minimal B	Persen	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29					
IKSK.4435.1.11	Persentase SMP Katolik yang terakreditasi minimal B	Persen	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29					
IKSK.4435.1.12	Persentase SMA Katolik yang terakreditasi minimal B	Persen	N/A	73,47	77,55	83,67	85,71	88,00					
IKSK.4435.1.13	Persentase satuan pendidikan Keagamaan Katolik unggul yang terselenggara	Persen	N/A	2,04	6,12	10,00	13,46	16,67					
IKSK.4435.1.14	Persentase satuan pendidikan Katolik yang menerapkan program pendidikan bilingual	Persen	N/A	0,00	2,04	2,04	2,04	2,04					
IKSK.4435.1.15	Persentase siswa Katolik yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Persen	N/A	0,15	0,46	0,77	1,23	1,54					
IKSK.4435.1.16	Persentase satuan pendidikan Katolik dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	Persen	N/A	18,37	36,73	55,10	73,47	91,84					
IKSK.4435.1.17	Persentase materi ajar digital Keagamaan Katolik (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	Persen	N/A	11,76	23,53	47,06	70,59	88,24					
RO.4435.PBH.001	Kebijakan Kurikulum Pendidikan Keagamaan Katolik Tingkat Dasar	Rekomen-dasi	N/A	0	2	2	2	2	0	1.000	1.150	1.323	1.521

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	dan Menengah	Kebijakan											
IKRO.4435.PBH.01	Jumlah perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan Keagamaan Katolik berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	Kurikulum	N/A	0	2	2	2	2					
RO.4435.PDE.001	Akreditasi Lembaga Pendidikan Keagamaan Katolik	Lembaga	N/A	3	3	3	3	3	150	300	324	500	700
IKRO.4435.PDE.01.1	Jumlah SMAK Katolik yang terakreditasi minimal B	Lembaga	N/A	0	2	6	6	14					
IKRO.4435.PDE.01.2	Jumlah SMP Katolik yang terakreditasi minimal B	Lembaga	N/A	0	0	0	0	1					
IKRO.4435.PDE.01.3	Jumlah SD Katolik yang terakreditasi minimal B	Lembaga	N/A	0	0	0	0	1					
IKRO.4435.PDE.01.4	Jumlah Taman Seminari Katolik yang terakreditasi minimal B	Lembaga	N/A	3	6	6	6	6					
IKRO.4435.PDE.01.5	Jumlah satuan pendidikan Katolik unggul yang terselenggara	Lembaga	N/A	4	5	6	8	10					
IKRO.4435.PDE.01.6	Jumlah satuan pendidikan Katolik yang menerapkan program pendidikan bilingual	Lembaga	N/A	0	1	1	1	1					
IKRO.4435.PDE.01.7	Jumlah satuan pendidikan Katolik dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	Lembaga	N/A	1	2	3	4	5					
IKRO.4435.PDE.01.8	Jumlah siswa Katolik yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Orang	N/A	10	30	50	80	100					
RO.4435.PEF.001	Sosialisasi dan Diseminasi Pendidikan Karakter dan Kewarganegaraan pada Siswa Katolik	Orang	N/A	0	5.000	5.750	6.613	7.604	0	5.000	5.750	6.613	7.604
IKRO.4435.PEF.01.1	Jumlah satuan pendidikan katolik yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Lembaga	N/A	0	49	50	52	54					
RO.4435.PEF.002	Siswa SMAKN Katolik yang mendapat pendidikan karakter dan kewarganegaraan	Orang	N/A	892	892	892	892	892	2.556	560	643	740	853
IKRO.4435.PEF.02.1	Jumlah Siswa SMAKN Katolik yang mendapat pendidikan karakter dan kewarganegaraan	Orang	N/A	892	892	892	892	892					
RO.4435.PEF.003	Pembinaan Siswa melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan Katolik	Orang	N/A	0	6.250	7.000	7.250	7.500	0	5.000	5.600	5.800	6.000
IKRO.4435.PEF.03.1	Jumlah nilai rata-rata karakter siswa Katolik melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	Nilai	N/A	0	80	80,5	81	81,5					
IKRO.4435.PEF.03.2	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan pada satuan pendidikan katolik yang bermuatan moderasi beragama	Kegiatan	N/A	49	49	50	52	54					
IKRO.4435.PEF.03.3	Jumlah gugus depan pramuka pada satuan pendidikan katolik yang dibina	Lembaga	N/A	49	49	50	52	54					
RO.4435.PEF.004	Pembinaan Kompetensi Siswa pada	Orang	N/A	0	3	5	7	10	0	1.000	1.150	1.323	1.521

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
4 Satuan Pendidikan Keagamaan Katolik													
IKRO.4435.PEF.004.1 Jumlah lulusan satuan pendidikan Katolik yang mendapatkan pengakuan atas kualifikasinya oleh Lembaga Pemerintah, Pendidikan Umum, atau Lembaga Profesi	Orang	N/A	0	3	5	7	10						
RO.4435.QEI.006 SMAK Katolik yang mendapat Bantuan pendidikan karakter dan kewarganegaraan	Lembaga	N/A	37	0	0	0	0	4.511	0	0	0	0	
IKRO.4435.QEI.006.1 Jumlah satuan pendidikan Keagamaan Katolik yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Lembaga	N/A	37	0	0	0	0						
RO.4435.QEI.007 Lembaga Pendidikan Keagamaan Katolik yang Ditingkatkan Mutunya	Lembaga	N/A	12	12	12	12	12	145	177	213	255	303	
IKRO.4435.QEI.007.1 Jumlah rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional Siswa Katolik untuk: a literasi membaca b numerasi	Nilai	N/A	55,5	57,5	60	63	62						
IKRO.4435.QEI.007.2 Nilai keberagamaan siswa Katolik	Nilai	N/A	65	70	80	90	95						
IKRO.4435.QEI.007.3 Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa Katolik	Nilai	N/A	80	80	82	85	87						
IKRO.4435.QEI.007.4 Jumlah satuan pendidikan Keagamaan Katolik yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	Lembaga	N/A	0	44	70	71	72						
IKRO.4435.QEI.007.5 Jumlah prestasi Siswa Katolik yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	Prestasi	N/A	0	5	7	8	10						
IKRO.4435.QEI.007.6 Jumlah materi ajar digital Keagamaan Katolik (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	Materi	N/A	2	4	8	12	15						
RO.4435.QGC.001 Fasilitas dan Pembinaan Kualitas Tata Kelola pada Satuan Pendidikan Keagamaan Katolik	Lembaga	N/A	0	2	3	4	5	0	1.000	1.150	1.323	1.521	
IKRO.4435.QGC.001.1 Jumlah Satuan Pendidikan Katolik dengan Nilai Pengelolaan yang Partisipatif pada Kategori Baik	Lembaga	N/A	0	2	3	4	5						
SK.4435.2 Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan keagamaan Katolik													
IKSK.4435.2.1 Rasio guru satuan pendidikan Keagamaan Katolik terhadap siswa yang memenuhi SNP	Rasio	N/A	1:8	1:8	1:8	1:8	1:8						
IKSK.4435.2.2 Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal pada Satuan Pendidikan Keagamaan Katolik	Persen	N/A	0,00	0,00	0,00	14,89	29,79						
IKSK.4435.2.3 Persentase guru agama Katolik yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	N/A	39,82	71,52	92,00	93,00	96,00						
IKSK.4435.2.4 Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi	Persen	N/A	0,00	0,00	31,65	64,98	75,00						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Guru satuan pendidikan Katolik (AKG) minimal predikat terampil												
IKSK.4435.2.5	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas satuan pendidikan Katolik (AKP) minimal predikat terampil	Persen	N/A	0,00	0,00	33,18	66,36	75,00					
IKSK.4435.2.6	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama Katolik	Persen	N/A	80,21	28,55	1,89	1,90	1,90					
IKSK.4435.2.7	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama Katolik berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	Persen	N/A	0,00	80,00	85,00	90,00	95,00					
RO.4435.PDI.001	Sertifikasi Kompetensi Guru Katolik	Orang	N/A	0	1.212	1.388	1.589	1.827	0	970	1.110	1.271	1.462
IKRO.4435.PDI.001.1	Jumlah Guru yang lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama Katolik	Orang	N/A	0	1.212	1.388	1.589	1.827					
RO.4435.QEA.001	Guru Agama Katolik Non ASN Penerima Insentif	Orang	N/A	2.373	2.960	3.405	3.922	4.511	7.122	8.880	10.215	11.767	13.533
IKRO.4435.QEA.001.1	Jumlah guru pada satuan pendidikan Keagamaan Katolik sesuai SNP	Orang	N/A	17.546	17.546	17.546	17.546	17.546					
IKRO.4435.QEA.001.2	Jumlah Guru Agama Katolik Non ASN Penerima Insentif	Orang	N/A	2.373	2.960	3.405	3.922	4.511					
RO.4435.QEA.002	Guru SMAK Katolik Non ASN Penerima Insentif	Orang	N/A	512	153	153	200	230	1.536	459	459	600	690
IKRO.4435.QEA.002.1	Jumlah guru pada satuan pendidikan Keagamaan Katolik sesuai SNP	Orang	N/A	17.546	17.546	17.546	17.546	17.546					
IKRO.4435.QEA.002.2	Jumlah Guru SMAK Katolik Non ASN Penerima Insentif	Orang	N/A	512	153	153	200	230					
RO.4435.QEA.003	Guru Agama Katolik Non ASN penerima Tunjangan Profesi	Orang	N/A	1.094	1.945	2.115	2.375	2.736	29.247	46.680	50.760	57.000	65.664
IKRO.4435.QEA.003.1	Jumlah rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama Katolik berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	Rekomen-dasi	N/A	0	1	1	1	1					
RO.4435.QEA.004	Guru SMAK Katolik Non ASN penerima Tunjangan Profesi	Orang	N/A	4	500	500	500	500	87	12.000	12.000	12.000	12.000
IKRO.4435.QEA.004.1	Jumlah guru SMAK Katolik non ASN yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	Orang	N/A	0	0	300	316	332					
RO.4435.QEA.006	Guru Agama Katolik Non ASN penerima Tunjangan Khusus (3T)	Orang	N/A	884	187	210	235	257	14.321	3.096	3.461	3.880	4.230
IKRO.4435.QEA.006.1	Jumlah guru satuan pendidikan Keagamaan Katolik yang memenuhi SNP	Rasio	N/A	17.546	17.546	17.546	17.546	17.546					
IKRO.4435.QEA.006.2	Jumlah rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama Katolik berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	Rekomen-dasi	N/A	0	1	1	1	1					
RO.4435.QEA.007	Guru SMAK Katolik Non ASN penerima Tunjangan Khusus (3T)	Orang	N/A	245	234	234	234	234	3.969	4.212	4.212	4.212	4.212
IKRO.4435.QEA.007.1	Jumlah guru satuan pendidikan Keagamaan Katolik terhadap siswa yang memenuhi SNP	Rasio	N/A	17.546	17.546	17.546	17.546	17.546					
IKRO.4435.QEA.0	Jumlah rekomendasi pengadaan dan	Rekomen-	N/A	0	1	1	1	1					

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
07.2 pemerataan guru agama Katolik berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	dasi												
RO.4435.QEA.008 Guru Taman Seminari Katolik Non ASN penerima Tunjangan Profesi	Orang	N/A	1	21	21	21	21	18	504	504	504	504	
IKRO.4435.QEA.008.1 Jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama Katolik	Orang	N/A	5.970	5.830	0	0	0						
RO.4435.QEA.009 Bantuan Tunjangan Khusus (3T) bagi Guru Taman Seminari Katolik Non ASN	Orang	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IKRO.4435.QEA.009.1 Jumlah pemenuhan kebutuhan guru Taman Seminari di daerah 3T	Orang	N/A	0	34	34	34	34						
RO.4435.QEA.010 Bantuan Tunjangan Khusus (3T) bagi Guru Agama Katolik Non ASN Tingkat Dasar	Orang	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IKRO.4435.QEA.010.1 Jumlah pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama Katolik pada satuan pendidikan tingkat dasar di daerah 3T	Orang	N/A	0	0	0	0	0						
RO.4435.QEA.011 Bantuan Tunjangan Khusus (3T) bagi Guru Agama Katolik Non ASN Tingkat Menengah	Orang	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IKRO.4435.QEA.011.1 Jumlah pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama Katolik pada satuan pendidikan tingkat menengah di daerah 3T	Orang	N/A	0	0	0	0	0						
RO.4435.QEA.012 Bantuan Tunjangan Khusus (3T) bagi Guru SMAK Katolik Non ASN	Orang	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IKRO.4435.QEA.012.1 Jumlah pemenuhan kebutuhan guru SMAK Katolik di daerah 3T	Orang	N/A	0	0	0	0	0						
RO.4435.QEI.005 POKJAWAS/KKM/KKG/MGMP Katolik penerima bantuan	Lembaga	N/A	575	575	575	575	575	9.660	10.054	10.054	10.054	10.054	
IKRO.4435.QEI.005.1 Jumlah tenaga kependidikan Keagamaan Katolik lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	Orang	N/A	0	0	0	14	28						
IKRO.4435.QEI.005.2 Jumlah guru Agama Katolik yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	Orang	N/A	0	0	300	616	948						
IKRO.4435.QEI.005.3 Jumlah Kepala Sekolah Keagamaan Katolik yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	Orang	N/A	10	20	30	40	50						
IKRO.4435.QEI.005.4 Jumlah guru dan tenaga kependidikan Keagamaan Katolik yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	Orang	N/A	0	0	300	616	948						
IKRO.4435.QEI.005.5 Jumlah pengawas Keagamaan Katolik yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP) minimal predikat terampil	Orang	N/A	0	0	73	73	74						
IKRO.4435.QEI.005.6 Jumlah guru Agama Katolik yang meningkat jenjang karir	Orang	N/A	50	100	300	450	650						
IKRO.4435.QEI.005.6 Jumlah Pengawas Keagamaan Katolik	Orang	N/A	5	10	15	20	25						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
5.7 yang meningkat jenjang karir													
IKRO.4435.QEI.00 Jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama Katolik	Orang	N/A	5.970	5.830	0	0	0						
RO.4435.SCI.001 Pendidik dan Tenaga kependidikan Katolik yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	N/A	16.960	16.960	16.960	16.960	16.960	19.073	11.746	14.795	18.727	22.399	
IKRO.4435.SCI.00 Jumlah Pendidik dan Tenaga kependidikan Katolik yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	N/A	4.714	4.220	4.852	5.580	6.417						
IKRO.4435.SCI.00 Jumlah guru Agama Katolik yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	Orang	N/A	0	0	300	316	332						
IKRO.4435.SCI.00 Jumlah pengawas Agama Katolik yang memperoleh nilai rapor AKP minimal predikat terampil	Orang	N/A	0	0	73	73	74						
4436 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Hindu								231.800	101.016	89.254	144.622	161.822	[BIMAS HINDU] Direktorat Pendidikan Hindu
SK.4436.1 Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan													
IKSK.4436.1.1 Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional Pendidikan Hindu untuk:													
a literasi membaca	Nilai	66,32	67,00	67,50	68,00	68,50	69,00						
b numerasi	Nilai	58,87	59,00	59,50	59,60	59,70	59,80						
IKSK.4436.1.2 Nilai keberagamaan siswa pada satuan pendidikan Hindu	Nilai	N/A	67,00	67,25	67,50	67,75	68,00						
IKSK.4436.1.3 Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa Pendidikan Hindu	Nilai	N/A	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00						
IKSK.4436.1.4 Persentase satuan pendidikan Hindu yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	Persen	N/A	1,60	4,80	8,00	10,40	12,00						
IKSK.4436.1.5 Persentase satuan pendidikan Hindu yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Persen	100,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00						
IKSK.4436.1.6 Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler Pendidikan Hindu	Jumlah	N/A	1	2	3	4	5						
IKSK.4436.1.7 Persentase peningkatan nilai karakter siswa Pendidikan Hindu melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	Persen	N/A	0,30	0,50	0,75	0,85	0,95						
IKSK.4436.1.8 Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu	Persen	N/A	40,00	55,00	65,00	70,00	85,00						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR		SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	pendidikan Hindu berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan													
IKSK.4436.1.9	Persentase Pratama Widyalyaya yang terakreditasi minimal B	Persen	62,50	64,58	66,00	67,62	68,18	70,43						
IKSK.4436.1.10	Persentase Adhi Widyalyaya yang terakreditasi minimal B	Persen	53,85	56,25	58,82	61,11	63,16	65,00						
IKSK.4436.1.11	Persentase Madyama Widyalyaya yang terakreditasi minimal B	Persen	50,00	50,00	55,56	60,00	63,64	66,67						
IKSK.4436.1.12	Persentase Utama Widyalyaya yang terakreditasi minimal B	Persen	80,00	80,00	83,00	83,00	86,00	88,00						
IKSK.4436.1.13	Persentase satuan pendidikan Hindu unggul yang terselenggara	Persen	8,77	9,60	10,77	11,33	11,76	12,50						
IKSK.4436.1.14	Persentase satuan pendidikan Hindu yang menerapkan program pendidikan bilingual	Persen	N/A	1,60	2,31	2,67	2,94	3,00						
IKSK.4436.1.15	Persentase siswa Pendidikan Hindu yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Persen	0,08	0,13	0,17	0,21	0,25	0,30						
IKSK.4436.1.16	Persentase satuan pendidikan Hindu dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	Persen	N/A	0,00	43,40	45,90	50,90	55,90						
IKSK.4436.1.17	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran Pendidikan Hindu	Persen	N/A	25,00	50,00	75,00	80,00	100,00						
RO.4436.PBH.001	Kurikulum dan Bahan ajar yang dikembangkan Pendidikan Hindu	Rekomendasi Kebijakan	12	12	12	12	12	12	6.012	1.649	1.649	1.649	1.649	
IKRO.4436.PBH.01.1	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional Pendidikan Hindu untuk: a. literasi membaca b. numerasi	Nilai	65,5; 56,5	67; 59	67,5; 59,5	68; 59,6	68,5; 59,7	69; 59,8						
IKRO.4436.PBH.01.2	Jumlah siswa yang memperoleh penguatan moderasi beragama siswa Pendidikan Hindu	Orang	2.500	3.421	3.591	3.772	3.967	4.177						
IKRO.4436.PBH.01.3	Jumlah satuan pendidikan Hindu yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	Lembaga	2	2	6	10	13	15						
IKRO.4436.PBH.01.4	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler Pendidikan Hindu	Prestasi	N/A	1	2	3	4	5						
IKRO.4436.PBH.01.5	Jumlah nilai rata-rata karakter siswa Pendidikan Hindu melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	Nilai	N/A	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00						
IKRO.4436.PBH.01.6	Jumlah perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan Hindu berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	Kurikulum	N/A	3	6	7	8	9						
IKRO.4436.PBH.01.7	Jumlah materi ajar digital Pendidikan Hindu (modul, video, e-book) yang	Materi	N/A	45	50	75	80	100						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran												
RO.4436.PEF.001	Siswa yang mendapat pendidikan karakter dan kewarganegaraan	Orang	3.972	3.427	4.098	4.098	4.098	22.684	6.860	6.871	6.859	6.859	
IKRO.4436.PEF.01.1	Jumlah satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Lembaga	110	125	125	125	125						
RO.4436.QDB.001	Lembaga Pendidikan Widyalyaya, Pasraman dan Sekolah Minggu yang ditingkatkan mutunya	Lembaga	574	1.768	1.174	1.174	1.174	6.510	11.667	12.302	65.397	65.397	
IKRO.4436.QDB.01.1	Jumlah Pratama Widyalyaya yang terakreditasi minimal B	Lembaga	45	62	63	65	66						
IKRO.4436.QDB.01.2	Jumlah Adhi Widyalyaya yang terakreditasi minimal B	Lembaga	5	9	10	10	11						
IKRO.4436.QDB.01.3	Jumlah Madyama Widyalyaya yang terakreditasi minimal B	Lembaga	3	4	5	5	6						
IKRO.4436.QDB.01.4	Jumlah Utama Widyalyaya yang terakreditasi minimal B	Lembaga	3	4	4	4	4						
IKRO.4436.QDB.01.5	Jumlah satuan pendidikan unggul yang terselenggara	Lembaga	0	12	13	14	16						
IKRO.4436.QDB.01.6	Jumlah saruan pendidikan Hindu yang menerapkan program pendidikan bilingual	Lembaga	0	2	3	3	4						
IKRO.4436.QDB.01.7	Jumlah siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Orang	2	2	3	3	4						
IKRO.4436.QDB.01.8	Jumlah satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	Lembaga	0	0	54	57	64						
RO 4436.QDB.002	Fasilitasi Penjaminan mutu Pendidikan Widyalyaya dan pasraman	Lembaga	0	0	20	20	20	0	1.000	2.000	3.000	4.000	
IKRO 4436.QDB.002.1	Jumlah Fasilitasi Penjaminan mutu Pendidikan Widyalyaya dan pasraman	Lembaga	0	20	20	20	20						
RO 4436.QDB.003	Satuan Pendidikan Hindu yang melaksanakan ekstrakurikuler Moderasi beragama dan Pembinaan gugus depan Pramuka	Lembaga	0	0	20	20	20	0	1.000	2.000	3.000	4.000	
IKRO 4436.QDB.003.1	Jumlah Satuan Pendidikan Hindu yang melaksanakan Pembinaan gugus depan Pramuka	Lembaga	0	10	10	10	10						
IKRO 4436.QDB.003.2	Jumlah Satuan Pendidikan Hindu yang melaksanakan ekstrakurikuler Moderasi beragama	Lembaga	0	10	10	10	10						
RO 4436.QDB.004	Even Nasional Kompetensi Seni, Sains Dan Teknologi Bagi Pasraman Dan Widyalyaya	Lembaga	0	0	1	1	1	0	20.000	5.000	5.000	20.000	
IKRO 4436.QDB.004.1	Jumlah Even Nasional Kompetensi Seni, Sains Dan Teknologi Bagi Pasraman Dan Widyalyaya	Lembaga	0	0	1	1	1						
RO 4436.QDB.005	Fasilitasi Penyelenggaraan PAUD Holistik dan terintegrasi pada Pratama Widyalyaya	Lembaga	0	0	10	10	10	0	500	600	700	800	
IKRO 4436.QDB.005.1	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan PAUD Holistik dan terintegrasi pada	Lembaga	0	10	10	10	10						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Pratama Widyalyaya													
RO.4436.QDB.006 Penyelenggaraan sekolah Hindu Unggulan	Lembaga	0	0	0	1	1	2	0	100	200	200	300	
IKRO.4436.QDB.006.1 Jumlah Satuan Pendidikan Widyalyaya Unggulan	Lembaga	0	0	0	1	1	2						
SK.4436.2 Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Hindu													
IKSK.4436.2.1 Persentase guru satuan pendidikan Hindu yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	N/A	48,83	63,48	68,36	73,24	78,13						
IKSK.4436.2.2 Rasio guru satuan pendidikan Hindu terhadap siswa yang memenuhi SNP	Rasio	N/A	01:08	01:08	01:09	01:10	01:10						
IKSK.4436.2.3 Persentase tenaga kependidikan Hindu lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	Persen	N/A	80,00	85,00	90,00	95,00	99,00						
IKSK.4436.2.4 Persentase guru agama Hindu yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	41,49	45,54	73,58	82,01	88,64	95,46						
IKSK.4436.2.5 Persentase guru Agama Hindu yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	Persen	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00						
IKSK.4436.2.6 Persentase Kepala satuan pendidikan Hindu yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	Persen	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00						
IKSK.4436.2.7 Persentase guru dan tenaga kependidikan Hindu yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	Persen	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00						
IKSK.4436.2.8 Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas satuan pendidikan Hindu (AKP) minimal predikat terampil	Persen	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00						
IKSK.4436.2.9 Persentase pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama pada satuan pendidikan	Persen	N/A	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00						
IKSK.4436.2.10 Persentase guru Agama Hindu yang meningkat jenjang karir	Persen	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00						
IKSK.4436.2.11 Persentase Pengawas Agama Hindu yang meningkat jenjang karir	Persen	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00						
IKSK.4436.2.12 Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama Hindu	Persen	N/A	55,00	60,00	62,00	63,00	64,00						
IKSK.4436.2.13 Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama Hindu berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	Persen	N/A	0,00	0,00	0,15	0,50	1,00						
RO.4436.QEA.001 Guru Non ASN penerima Tunjangan Profesi	Orang	176	175	1.670	1.670	1.670	1.670	28.450	33.033	33.395	33.433	33.433	
IKRO.4436.QEA.01.1 Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP	Rasio	1:8	1:8	1:9	01:10	01:10	1670,00						
IKRO.4436.QEA.01.1 Jumlah guru yang meningkat jenjang	Orang	0	0	0	0	0	26						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
01.2 karir													
IKRO.4436.QEA.01.2 Jumlah Pengawas yang meningkat jenjang karir	Orang	0	0	0	0	0	1						
IKRO.4436.QEA.01.4 Jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama Hindu	Orang	357	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
IKRO.4436.QEA.01.5 Jumlah Guru Non ASN Penerima Tunjangan Profesi	Orang	176	239	1.350	1.400	1.450	1.500						
RO.4436.QEA.02 Guru Non ASN Penerima Insentif	Orang	1.673	2.040	1.028	1.028	1.028	1.028	6.160	6.858	6.888	7.026	7.026	
IKRO.4436.QEA.02.1 Jumlah Guru Non ASN Penerima Insentif	Orang	1.673	1.784	1.800	1.900	2.000	2.100						
RO.4436.SCI.001 Guru Agama Hindu dan Guru pada Satuan Pendidikan Widyalyaya yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	3.748	3.736	5.520	5.520	5.520	5.520	129.661	11.158	11.158	11.167	11.167	
IKRO.4436.SCI.001.1 Jumlah tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	Orang	70	90	96	101	107	113						
IKRO.4436.SCI.001.2 Jumlah rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	Persen	N/A	0,00	0,00	0,15	0,50	1,00						
RO.4436.QEI.001 POKJAWAS/KKM/KKG/MGMP penerima bantuan	Lembaga	209	231	231	231	231	231	32.323	7.190	7.190	7.190	7.190	
IKRO.4436.QEI.001.1 Jumlah guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	Orang	0	0	0	0	0	26						
IKRO.4436.QEI.001.2 Jumlah Kepala Sekolah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	Orang	0	0	0	0	0	6						
IKRO.4436.QEI.001.3 Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	Orang	0	0	0	0	0	31						
IKRO.4436.QEI.001.4 Jumlah pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP) minimal predikat terampil	Orang	0	0	0	0	0	1						
4437 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Buddha								33.536	53.154	55.814	58.542	61.534	[BIMAS BUDDHA] Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha
SK.4437.1 Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan													
IKSK.4437.1.1 Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional sekolah keagamaan Buddha untuk:													
a literasi membaca	Persen	30,54	32,00	35,00	35,00	35,00	35,00						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	b numerasi	Persen	30,54	32,00	35,00	35,00	35,00						
IKSK.4437.1.2	Nilai Keberagamaan siswa pada satuan pendidikan keagamaan Buddha	Nilai	N/A	70,00	72,00	75,00	77,00	80,00					
IKSK.4437.1.3	Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa pada satuan pendidikan keagamaan Buddha	Rerata	N/A	75	78	80	81	82					
IKSK.4437.1.4	Persentase satuan pendidikan keagamaan Buddha yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	Persen	N/A	11,11	22,22	22,22	22,22	22,22					
IKSK.4437.1.5	Persentase satuan pendidikan keagamaan Buddha yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Persen	N/A	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00					
IKSK.4437.1.6	Jumlah prestasi yang diraih siswa agama Buddha dari kegiatan ekstrakurikuler	Jumlah	N/A	0	1	2	3	4					
IKSK.4437.1.7	Persentase peningkatan nilai karakter siswa agama Buddha melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	Persen	N/A	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00					
IKSK.4437.1.8	Persentase perangkat kurikulum Pendidikan Agama dan Keagamaan Buddha yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	Persen	N/A	0,00	92,00	94,00	96,00	98,00					
IKSK.4437.1.9	Persentase Nava Dhammasekha yang terakreditasi minimal B	Persen	52,50	70,00	80,00	80,00	80,00	90,00					
IKSK.4437.1.10	Persentase Mula Dhammasekha yang terakreditasi minimal B	Persen	N/A	50,00	50,00	50,00	80,00	90,00					
IKSK.4437.1.11	Persentase Muda Dhammasekha yang terakreditasi minimal B	Persen	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
IKSK.4437.1.12	Persentase Utama Dhammasekha yang terakreditasi minimal B	Persen	95,00	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00					
IKSK.4437.1.13	Persentase satuan pendidikan keagamaan Buddha unggul yang terselenggara	Persen	N/A	0,00	4,44	6,67	8,89	11,11					
IKSK.4437.1.14	Persentase satuan pendidikan Keagamaan Buddha yang menerapkan program pendidikan bilingual	Persen	N/A	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00					
IKSK.4437.1.15	Persentase siswa Pendidikan Keagamaan Buddha yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Persen	N/A	0,09	0,00	0,50	0,00	0,52					
IKSK.4437.1.16	Persentase satuan pendidikan keagamaan Buddha dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	Persen	66,67	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00					
IKSK.4437.1.17	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan	Persen	90,00	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00					

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR		SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	digunakan dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama dan Keagamaan Buddha													
RO.4437.PBH.001	Kurikulum dan Bahan Ajar Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Buddha yang Dikembangkan	Kajian	100	7	7	7	7	7	604	634	666	699	734	
IKRO.4437.PBH.001.1	Jumlah rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional sekolah keagamaan Buddha untuk: a literasi membaca b numerasi	Nilai	100100	7070	71,571,5	7373	7474	7575						
IKRO.4437.PBH.001.2	Jumlah siswa pendidikan keagamaan Buddha yang memperoleh penguatan moderasi beragama	Orang	0	0	3400	3570	3749	3936						
IKRO.4437.PBH.001.3	Jumlah satuan pendidikan keagamaan Buddha yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	Lembaga	0	5	10	10	10	10						
IKRO.4437.PBH.001.4	Jumlah perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan agama dan keagamaan Buddha berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	Dokumen	4	4	4	4	4	4						
RO.4437.PEF.001	Pendidikan Karakter dan Kewarganegaraan Siswa Agama Buddha	Orang	N/A	11.012	11.012	11.012	11.012	11.012	10.898	20.000	21.000	22.050	23.153	
IKRO.4437.PEF.001.1	Jumlah siswa agama Buddha yang mendapat pendidikan karakter dan kewarganegaraan	Orang	N/A	1.069	1.100	1.150	1.200	1.220						
IKRO.4437.PEF.001.2	Jumlah satuan pendidikan keagamaan Buddha yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Lembaga	N/A	32	34	36	38	41						
RO.4437.PEF.002	Pembinaan Pelaksanaan Penilaian Pelaksanaan Hasil Belajar Siswa Pendidikan Agama Buddha	Orang	N/A	0	1.700	1.785	1.874	1.968	-	3.400	3.570	3.749	3.936	
IKRO.4437.PEF.002.1	Jumlah siswa pendidikan keagamaan Buddha yang dibina dalam pelaksanaan penilaian pelaksanaan hasil belajar siswa	Orang	N/A	0	1.700	1.785	1.874	1.968						
RO.4437.QDB.001	Lembaga Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Buddha yang Ditingkatkan Mutunya	Lembaga	45	2.293	2.293	2.293	2.293	2.293	1.441	1.513	1.589	1.668	1.752	
IKRO.4437.QDB.001.1	Jumlah prestasi yang diraih siswa Agama Buddha dari kegiatan ekstrakurikuler	Prestasi	N/A	1	1	1	1	1						
IKRO.4437.QDB.001.2	Jumlah nilai rata-rata karakter siswa Agama Buddha melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	Nilai	N/A	80	82	83	84	85						
IKRO.4437.QDB.001.3	Jumlah Nava Dhammasekha yang terakreditasi minimal B	Lembaga	21	28	32	32	32	40						
IKRO.4437.QDB.001.4	Jumlah Mula Dhammasekha yang terakreditasi minimal B	Lembaga	N/A	2	2	2	4	4						

[illegible]

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.4437.9.1	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan pada satuan pendidikan Buddha yang bermuatan moderasi beragama	Jumlah	5	5	5	5	5						
IKSK.4437.9.2	Jumlah gugus depan pramuka pada satuan pendidikan Buddha yang dibina	Jumlah	5	5	5	5	5						
SK.4437.10	Menguatnya Implementasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik- Integratif (PAUD-HI)												
IKSK.4437.10.1	Persentase Nava Dhamaseka yang menerapkan program Holistik-Integratif	Persen	N/A	30	38	43	50	55					
SK.4437.2	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Buddha												
IKSK.4437.11.1	Persentase guru satuan pendidikan Buddha yang memiliki sertifikat pendidik	Persen											
IKSK.4437.11.3	Persentase guru agama Hindu yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	N/A	54,93	63,94	75,91	87,87	98,80					
IKSK.4437.2.1	Rasio guru satuan pendidikan agama Buddha terhadap siswa yang memenuhi SNP	Rasio	1:90	1:80	1:80	1:70	1:70	1:70					
IKSK.4437.2.2	Persentase tenaga kependidikan Buddha lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	Persen	N/A	95,59	90,91	92,00	94,55	96,67					
IKSK.4437.2.3	Persentase guru Agama Buddha yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	Persen	N/A	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00					
IKSK.4437.2.4	Persentase Kepala satuan pendidikan Buddha yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	Persen	N/A	0,00	2,80	4,17	6,25	8,33					
IKSK.4437.2.5	Persentase guru dan tenaga kependidikan Buddha yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	Persen	N/A	5,93	11,87	17,80	23,74	29,67					
IKSK.4437.2.6	Persentase Pengawas satuan pendidikan Buddha yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP) minimal predikat terampil	Persen	N/A	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00					
IKSK.4437.2.7	Persentase Guru Agama Buddha yang meningkat jenjang karir	Persen	N/A	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00					
IKSK.4437.2.8	Persentase Pengawas Pendidikan Agama Buddha yang meningkat jenjang karir	Persen	N/A	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00					
IKSK.4437.2.9	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Agama Buddha	Persen	N/A	75,46	80,00	0,00	0,00	0,00					
IKSK.4437.2.10	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama Buddha berbasis rencana kebutuhan yang	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
diterbitkan													
RO.4437.QEA.001 Bantuan Insentif Guru Pendidikan Agama Buddha Non ASN	Orang	2.900	2.932	2.850	2.993	3.142	3.299	8.796	8.550	8.978	9.426	9.898	
IKRO.4437.QEA.001.1 Jumlah guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP	Nilai	1:90	1:80	1:80	1:70	1:70	1:70						
IKRO.4437.QEA.001.2 Jumlah Guru Pendidikan Buddha Non ASN Penerima Insentif	Orang	2.900	2.932	2.850	2.993	3.142	3.299						
IKRO.4437.QEA.001.3 Jumlah rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama dan keagamaan Buddha berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	Rekomen-dasi	N/A	1	1	1	1	1						
RO.4437.QEA.002 Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama Buddha Non ASN	Orang	310	236	236	236	236	236	6.756	12.859	13.502	14.117	14.886	
IKRO.4437.QEA.002.1 Jumlah Guru Pendidikan Buddha Non ASN Penerima Tunjangan Profesi	Orang	231	231	515	515	515	515						
IKRO.4437.QEA.002.2 Jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama Buddha	Orang	0	372	200	0	0	0						
RO.4437.QEA.003 Tunjangan Khusus (3T) Guru Pendidikan Agama Buddha Non ASN	Orang	45	45	45	45	45	45	810	756	794	833	875	
IKRO.4437.QEA.003.1 Jumlah Guru Pendidikan Agama Buddha Non ASN Penerima Tunjangan Khusus (3T)	Orang	45	45	43	44	46	49						
IKRO.4437.QEA.003.2 Jumlah rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama Buddha berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	Rekomen-dasi	N/A	1	1	1	1	1						
RO.4437.SCI.001 Pelatihan Kompetensi Guru Pendidikan Agama Buddha	Orang	1.773	100	100	100	100	100	879	1.923	2.019	2.120	2.226	
IKRO.4437.SCI.001.1 Jumlah guru pendidikan agama Buddha yang meningkat jenjang karir	Orang	1.773	100	100	100	100	100						
RO.4437.SCI.002 Pelatihan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Keagamaan Buddha	Orang	162	197	197	197	197	197	986	1.035	1.087	1.141	1.198	
IKRO.4437.SCI.002.1 Jumlah tenaga kependidikan agama Buddha lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	Orang	162	145	152	160	168	176						
IKRO.4437.SCI.002.2 Jumlah Pengawas pendidikan agama Buddha yang meningkat jenjang karir	Orang	N/A	0	21	21	21	21						
RO.4437.QEI.001 Bantuan POKJAWAS/ KKM/ KKG/ MGMP Agama Buddha	Lembaga	149	141	141	141	141	141	2.366	2.484	2.609	2.738	2.876	
IKRO.4437.QEI.001.1 Jumlah guru pendidikan agama Buddha yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	Orang	N/A	674	758	843	927	1.011						
IKRO.4437.QEI.001.2 Jumlah Kepala Sekolah Keagamaan Buddha yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	Orang	N/A	0	0	0	0	0						
IKRO.4437.QEI.001.3 Jumlah guru dan tenaga kependidikan agama dan keagamaan Buddha yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi	Orang	N/A	100	200	300	400	500						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) /SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /INDIKATOR		SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	minimal baik													
IKRO.4437.QEI.001.4	Jumlah pengawas pendidikan agama Buddha yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP) minimal predikat terampil	Orang	N/A	13	15	17	19	21						
5621 Pembinaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu									33.160	37.085	43.075	49.763	58.302	[SETJEN] Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu
SK.5621.1	Meningkatnya layanan pendidikan Khonghucu yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum													
IKSK.5621.1.1	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	Persen	N/A	35,00	45,00	55,00	65,00	75,00						
RO.5621.QDC.001	Lembaga Pendidikan Khonghucu yang Berkualitas	Tim	N/A	8	12	16	20	24	24.650	26.650	28.650	30.650	32.662	
IKRO.5621.QDC.001.1	Jumlah perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan agama dan keagamaan Khonghucu berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	Jumlah	N/A	8	12	16	20	24						
SK.5621.2	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan khonghucu													
IKSK.5621.1.1	Persentase guru agama khonghucu yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	0,00	0,00	1,00	2,00	4,00	7,00						
IKSK.5621.1.2	Persentase guru agama khonghucu yang meningkat jenjang karir	Persen	0,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00						
IKSK.5621.1.3	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama Khonghucu	Persen	0,00	0,00	1,00	2,00	4,00	7,00						
RO.5621.QEI.001	Guru Agama Khonghucu Non PNS Penerima Insentif	Lembaga	N/A	187	199	208	217	226	8.510	10.435	14.425	19.113	25.640	
IKRO.5621.QEI.001.1	Jumlah Guru Agama Khonghucu NON PNS Penerima Insentif	Jumlah	178	170	170	170	170	170						
IKRO.5621.QEI.001.2	Jumlah guru agama khonghucu yang mendapatkan sertifikat pendidik	Jumlah	0	0	2	4	6	8						
IKRO.5621.QEI.001.3	Jumlah guru agama khonghucu yang meningkat jenjang karir	Jumlah	0	17	25	30	35	40						
IKRO.5621.QEI.001.4	Jumlah peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama Khonghucu	Jumlah	0	0	2	4	6	8						
7896 Pengembangan Strategi Kebijakan Pendidikan									25.012	44.583	55.593	70.964	84.753	[BMBPSDM] Pusat Strategi Kebiiakan

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR		SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Agama dan Pendidikan Keagamaan														Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
SK.7896.1	Meningkatnya kualitas penguatan moderasi beragama dan kebijakan pendidikan agama dan keagamaan													
IKSK.7896.1.1	Persentase Naskah kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan yang dihasilkan	Persen	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00						
IKSK.7896.1.2	Tingkat Moderasi Beragama pada Pendidik, Tenaga Kependidikan dan peserta didik yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama	Nilai	N/A	76	78	80	82	84						
RO.7896.PBH.001	Naskah Kebijakan Strategis Pembangunan Pendidikan	Rekomen-dasi Kebijakan	40	29	60	70	85	95	21.858	41.583	50.593	63.964	75.966	
IKRO.7896.PBH.01.1	Jumlah rekomendasi kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan yang dihasilkan	Rekomen-dasi Kebijakan	40	28	58	68	82	92						
IKRO.7896.PBH.01.2	Jumlah Rekomendasi kebijakan ekoteologi di lembaga pendidikan yang dihasilkan	Rekomen-dasi Kebijakan	N/A	1	2	2	3	3						
RO.7896.QDD.001	Kelompok Masyarakat pada Lembaga Pendidikan yang Memperoleh Wawasan Penguatan Moderasi Beragama	Kelompok Masyarakat	N/A	13	18	22	27	32	3.154	3.000	5.000	7.000	8.787	
IKRO.7896.QDD.01.2	Jumlah Pendidik, Tenaga Kependidikan dan peserta didik yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama	Kelompok Masyarakat	N/A	13	18	22	27	32						
7897 Pengembangan Kompetensi Manajemen, Kepemimpinan, dan Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan									188	1.759	3.021	4.782	6.795	[BMBPSPDM] Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan dan Moderasi Beragama
SK.7897.1	Meningkatnya Kompetensi Manajemen, Kepemimpinan dan Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan													
IKSK.7897.1.1	Nilai Kepuasan layanan penyelenggaraan pengembangan kompetensi	Nilai	88,00	88,20	88,40	88,60	88,80	89,00						
IKSK.7897.1.2	Nilai kepuasan pengguna terhadap lulusan pengembangan kompetensi	Nilai	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00						
IKSK.7897.1.3	Persentase Peningkatan Kompetensi moderasi beragama pada SDM di lembaga pendidikan.	Persen	76,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00						
IKSK.7897.1.4	Persentase Peningkatan Kompetensi manajemen dan kepemimpinan pada SDM di lembaga pendidikan	Persen	76,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00						
RO.7897.DCI.001	Pengembangan Kompetensi SDM Agama dan Keagamaan yang Kompeten di Lembaga Pendidikan	Orang	60	30	2.200	3.700	5.700	7.700	188	1.759	3.021	4.782	6.795	
IKRO.7897.DCI.001.1	Jumlah peserta pengembangan Kompetensi manajemen dan kepemimpinan	Orang	60	30	1.100	1.850	2.850	3.850						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	pada SDM di lembaga pendidikan												
IKRO.7897.DCI.00	Jumlah peserta pengembangan kompetensi moderasi beragama pada SDM di lembaga pendidikan	Orang	60	30	1.100	1.850	2.850	3.850					
IKRO.7897.DCI.00	Jumlah layanan penyelenggaraan pengembangan kompetensi	Layanan	1	1	1	1	1	1					
IKRO.7897.DCI.00	Jumlah alumni pengembangan kompetensi yang menjadi sasaran evaluasi pasca pengembangan kompetensi	Orang	60	30	2.200	3.700	5.700	7.700					
7898 Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pendidikan								137.400	276.310	323.570	368.278	429.084	[BMBPSDM] Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Keagamaan
SK.7898.1	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Pendidikan												
IKSK.7898.1.1	Nilai Pemanfaatan Kurikulum dan Sistem Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi SDM Pendidikan	Nilai	84,00	84,20	84,40	84,60	84,80	85,00					
IKSK.7898.1.2	Nilai Kepuasan layanan penyelenggaraan pengembangan kompetensi SDM pendidikan	Nilai	88,00	88,20	88,40	88,60	88,80	89,00					
IKSK.7898.1.3	Nilai kepuasan pengguna terhadap lulusan pengembangan kompetensi SDM pendidikan	Nilai	81,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00					
IKSK.7898.1.4	Persentase lembaga pengembangan kompetensi SDM pendidikan yang memperoleh akreditasi A	Persen	70,59	70,59	76,47	76,47	82,35	88,24					
IKSK.7898.1.5	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Pendidikan.	Persen	85,00	85,50	86,00	86,50	87,00	87,50					
IKSK.7898.1.6	Persentase pengembangan kompetensi SDM pendidikan yang memanfaatkan platform digital	Persen	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00					
RO.7898.PFA.00	Kurikulum dan Sistem Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi SDM Pendidikan	NSPK	141	256	576	616	676	736	2.955	21.716	31.197	28.353	32.855
IKRO.7898.PFA.0	Jumlah Kurikulum dan Sistem Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi SDM Pendidikan yang dihasilkan	NSPK	141	256	576	616	676	736					
IKRO.7898.PFA.0	Jumlah lembaga pengembangan kompetensi SDM pendidikan yang memperoleh akreditasi A	Lembaga	N/A	12	13	14	15	16					
IKRO.7898.PFA.0	Jumlah muatan ekoteologi dalam materi pengembangan kompetensi SDM Pendidikan	Konten	N/A	1	2	2	3	3					
RO.7898.SCI.01	SDM Pendidikan yang Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	48.745	938.577	1.251.925	1.470.388	1.723.338	1.976.288	134.444	254.593	292.372	339.924	396.228

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKRO.7898.SCI.001.1	Jumlah SDM Pendidikan yang Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	48.745	938.577	1.251.925	1.470.388	1.723.338	1.976.288						
IKRO.7898.SCI.001.2	Jumlah SDM Pendidikan yang Ditingkatkan Kompetensinya melalui platform pembelajaran digital	Orang	N/A	722.704	976.502	1.161.607	1.378.670	1.600.793						
IKRO.7898.SCI.001.3	Jumlah SDM Pendidikan alumni pengembangan kompetensi yang menjadi sasaran evaluasi pasca pengembangan kompetensi	Orang	48.745	938.577	1.251.925	1.470.388	1.723.338	1.976.288						
IKRO.7898.SCI.001.4	Jumlah sarana dan prasarana penunjang pengembangan kompetensi	Layanan	1	1	1	1	1	1						
7921 Peningkatan Layanan Penilaian Buku Pendidikan Agama dan Keagamaan									3.394	4.040	4.040	4.848	4.848	[SETJEN] Pusat Penilaian Buku Agama, Lektur, dan Literasi Keagamaan
SK.7921.1	Meningkatnya kualitas Layanan Perbukuan Pendidikan Agama dan Keagamaan													
IKSK.7921.1.1	Persentase Peningkatan Buku Pendidikan Agama dan Keagamaan yang mendapat tanda layak terbit	Persen	N/A	4,00	3,85	3,70	3,57	3,45						
RO.7921.BAB.001	Layanan Penilaian Buku Pendidikan Agama dan Keagamaan	Lembaga	21	25	25	30	30	35	3.394	4.040	4.040	4.848	4.848	
IKRO.7921.BAB.001.1	Jumlah Lembaga penerbit yang mendapatkan tanda layak terbit	Lembaga	21	25	25	30	30	35						
025.DK - Program Pendidikan Tinggi									9.185.587	12.786.598	13.427.578	13.799.409	14.205.034	SETJEN, DITJEN PENDIS, DITJEN BIMAS KRISTEN, DITJEN BIMAS KATOLIK, DITJEN BIMAS HINDU, DITJEN BIMAS BUDDHA
SP.6	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada PTK/Ma'had Aly													
IKSP.6.1	Persentase peningkatan jumlah mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan	Persen	N/A	0,25	0,34	0,43	0,52	0,61						
IKSP.6.2	Persentase peningkatan jumlah mahasiswa pada PTK Islam/Ma'had Aly	Persen	0,16	0,23	0,30	0,37	0,44	0,51						
IKSP.6.3	Persentase peningkatan jumlah mahasiswa pada PTK Kristen	Persen	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00						
IKSP.6.4	Persentase peningkatan jumlah mahasiswa pada PTK Katolik	Persen	3,00	2,81	3,99	5,01	6,00	7,01						
IKSP.6.5	Persentase peningkatan jumlah mahasiswa pada PTK Hindu	Persen	3,65	4,04	4,47	4,84	5,15	5,40						
IKSP.6.6	Persentase peningkatan jumlah mahasiswa pada PTK Buddha	Persen	35,78	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00						
IKSP.6.7	Persentase peningkatan jumlah mahasiswa pada PTK Khonghucu	Persen	25,00	25,00	35,00	45,00	55,00	65,00						
SP.7	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu													
IKSP.7.1	Persentase PTK Khonghucu yang terakreditasi	Persen	50,00	50,00	50,00	50,00	98,00	99,00						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR		SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKSP.7.2	Persentase PTK Islam/Ma'had Aly yang terakreditasi	Persen	57,62	58,12	58,62	59,12	59,62	60,12						
IKSP.7.3	Persentase PTK Kristen yang terakreditasi	Persen	2,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00						
IKSP.7.4	Persentase PTK Katolik yang Terakreditasi	Persen	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00						
IKSP.7.5	Persentase PTK Hindu yang terakreditasi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
IKSP.7.6	Persentase PTK Buddha yang terakreditasi	Persen	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
SP.8 Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas														
IKSP.8.1	Persentase dosen dan tenaga kependidikan PTK Khonghucu yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi	Persen	N/A	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00						
IKSP.8.2	Persentase dosen dan tenaga kependidikan PTK Islam/Ma'had Aly yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi	Persen	43,61	53,43	63,91	74,40	84,88	95,37						
IKSP.8.3	Persentase dosen dan tenaga kependidikan PTK Kristen yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi	Persen	24,52	26,21	27,95	29,45	32,52	36,18						
IKSP.8.4	Persentase dosen dan tenaga kependidikan PTK Katolik yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi	Persen	79,00	85,00	87,04	90,14	95,00	99,86						
IKSP.8.5	Persentase dosen dan tenaga kependidikan PTK Hindu yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi	Persen	31,35	51,00	54,00	57,00	60,00	63,00						
IKSP.8.6	Persentase dosen dan tenaga kependidikan PTK Buddha yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi	Persen	24,31	80,00	85,00	90,00	100,00	100,00						
SP.9 Meningkatnya daya saing lulusan PTK/Ma'had Aly														
IKSP.9.1	Rata-rata masa tunggu lulusan PTK Islam untuk mendapatkan pekerjaan	Bulan	N/A	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00						
IKSP.9.2	Rata-rata masa tunggu lulusan PTK Kristen untuk mendapatkan pekerjaan	Bulan	N/A	12,00	12,00	11,00	11,00	10,00						
IKSP.9.3	Rata-rata masa tunggu lulusan PTK Katolik untuk mendapatkan pekerjaan	Bulan	N/A	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00						
IKSP.9.4	Rata-rata masa tunggu lulusan PTK Hindu untuk mendapatkan pekerjaan	Bulan	12,00	12,00	11,00	11,00	10,00	10,00						
IKSP.9.5	Rata-rata masa tunggu lulusan PTK Buddha untuk mendapatkan pekerjaan	Bulan	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00						
SP.10 Meningkatnya relevansi pendidikan tinggi keagamaan melalui penguatan kemitraan strategis														
IKSP.10.1	Persentase kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu	Persen	N/A	70,00	75,00	80,00	82,00	85,00						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
PTK Islam													
IKSP.10.2 Persentase kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK Kristen	Persen	5,00	35,00	50,00	60,00	70,00	85,00						
IKSP.10.3 Persentase kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK Katolik	Persen	N/A	65.56	68.06	68.89	69.44	70,00						
IKSP.10.4 Persentase kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK Hindu	Persen	42.86	42.86	50,00	57.14	64.29	71.43						
IKSP.10.5 Persentase kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK Buddha	Persen	N/A	30,00	50,00	60,00	70,00	75,00						
SP.11 Meningkatkan kualitas karakter keagamaan mahasiswa yang ramah, inklusif, dan selaras dengan nilai-nilai kebangsaan													
IKSP.11.1 Indeks Keberagamaan Mahasiswa Islam	Nilai	N/A	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00						
IKSP.11.2 Indeks Keberagamaan Mahasiswa Kristen	Nilai	N/A	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00						
IKSP.11.3 Indeks Keberagamaan Mahasiswa Katolik	Nilai	N/A	52,00	53,00	54,00	55,00	56,00						
IKSP.11.4 Indeks Keberagamaan Mahasiswa Hindu	Nilai	N/A	70,00	72,00	75,00	77,00	80,00						
IKSP.11.5 Indeks Keberagamaan Mahasiswa Buddha	Nilai	N/A	80,00	85,00	85,00	85,00	88,00						
SP.12 Meningkatkan produktivitas dan daya saing Pendidikan Tinggi Keagamaan													
IKSP.12.1 Jumlah perguruan tinggi keagamaan Islam yang masuk ke dalam peringkat THE Impact SDGs	Jumlah	N/A	1	2	2	3	3						
IKSP.12.2 Jumlah perguruan tinggi keagamaan Kristen yang masuk ke dalam peringkat THE Impact SDGs	Jumlah	N/A	0	0	0	0	1						
IKSP.12.3 Jumlah perguruan tinggi keagamaan Katolik yang masuk ke dalam peringkat THE Impact SDGs	PT	N/A	0	0	0	0	1						
IKSP.12.4 Jumlah perguruan tinggi keagamaan Hindu yang masuk ke dalam peringkat THE Impact SDGs	PT	N/A	0	0	0	0	1						
IKSP.12.5 Jumlah perguruan tinggi keagamaan Buddha yang masuk ke dalam peringkat THE Impact SDGs	PT	N/A	0	0	0	0	1						
2132 Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam								8.286.534	10.150.765	10.642.375	10.886.519	11.063.755	[DITJEN PENDIS] Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
SK.2132.1 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana PTK Islam													
IKSK.2132.1.1 Persentase PTK Islam yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan	Persen	N/A	65,14	66,23	67,32	68,42	69,51						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Tinggi												
IKSK.2132.1.2	Persentase PTK Islam yang menyediakan fasilitas yang mendukung Pendidikan Tinggi berbasis gender dan inklusif	Persen	N/A	6,00	6,25	6,50	6,75	7,00					
RO.2132.CAA.001	Sarana PTKI	Unit	3	3	3	3	3	3	32.606	32.606	32.606	32.606	32.606
IKRO.2132.CAA.01.1	Jumlah PTK Islam yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi	Lembaga	N/A	3.682	3.703	3.900	3.921	3.943					
IKRO.2132.CAA.01.2	Jumlah Layanan Disabilitas (ULD) yang disediakan	Lembaga	N/A	60	65	70	75	80					
RO.2132.CAA.002	Sarana PTKIN PNPB/BLU	Unit	4.935	3.365	3.422	3.479	3.536	3.593	287.784	292.580	297.377	302.173	306.970
IKRO.2132.CAA.02.1	Jumlah PTKIN PNPB/BLU yang memperoleh peningkatan sarana pembelajaran	Lembaga	N/A	58	59	60	61	62					
RO.2132.CAN.001	Pengadaan Sarana Bidang TIK	Unit	2.382	2.227	2.382	2.537	2.692	2.847	76	81	86	91	96
IKRO.2132.CAN.01.1	Jumlah pengadaan sarana bidang TIK	Unit	2.382	2.227	2.382	2.537	2.692	2.847					
RO.2132.CBJ.005	Prasarana PTKIN (PNBP/BLU)	Unit	140	184	228	272	316	360	481.534	574.462	667.389	760.317	853.244
IKRO.2132.CBJ.05.1	Jumlah aset prasarana PTKIN (PNBP/BLU)	Unit	N/A	58	58	58	58	58					
RO.2132.CBT.001	Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Unit	9	4	5	5	5	6	1.310	1.629	1.656	1.683	1.709
IKRO.2132.CBT.01.1	Jumlah PTKI yang memperoleh bantuan pengadaan fasilitas penunjang digitalisasi kampus	Lembaga	25	40	59	60	61	62					
RO.2132.RBJ.001	Pembangunan Gedung Pendidikan Tinggi Melalui PHLN	Unit	1	1	1	1	1	1	380.376	380.376	380.376	380.376	380.376
IKRO.2132.RBJ.01.1	Jumlah Gedung Pendidikan Tinggi Yang Dibangun Melalui PHLN	Unit	N/A	1	1	7	7	7					
RO.2132.RBJ.002	Pembangunan Gedung Pendidikan Tinggi Melalui SBSN	Lembaga	29	17	23	24	25	26	801.002	1.167.700	695.951	734.951	731.951
IKRO.2132.RBJ.02.1	Jumlah PTKI yang dibangun Melalui SBSN	Lembaga	29	17	23	24	25	26					
RO.2132.BEI.005	PTKIS Penerima Bantuan Sarana Pembelajaran	Lembaga	30	30	31	32	33	34	1.000	1.032	1.065	1.097	1.129
IKRO.2132.BEI.05.1	Jumlah PTKIS yang memperoleh peningkatan sarana pembelajaran	Lembaga	N/A	200	206	213	219	226					
RO.2132.BEI.006	PTKIS Penerima Bantuan Prasarana Pembelajaran	Lembaga	50	50	59	70	81	91	1.000	1.153	1.334	1.515	1.681
IKRO.2132.BEI.06.1	Jumlah PTKIS penerima bantuan prasarana pembelajaran	Lembaga	50	50	59	70	81	91					
RO.2132.ACD.001	Pendirian Ijin Lembaga	Institusi	10	10	10	11	11	11	1.700	1.700	1.855	1.855	1.855
IKRO.2132.ACD.01.1	Jumlah layanan ijin pendirian lembaga	Institusi	N/A	10	10	11	11	11					
RO.2132.PDD.007	Unit Layanan Disabilitas Perguruan Tinggi Islam	Lembaga	N/A	0	1	2	3	4	-	1.600	3.200	4.800	6.400
IKRO.2132.PDD.07.1	Jumlah PTKI yang mempunyai Layanan Unit Disabilitas	Unit	N/A	0	1	2	3	4					

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO.2132.PDD.008 Pengembangan Unit Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Perguruan Tinggi Islam	Unit	N/A	0	1	2	3	4	-	1.600	3.200	4.800	6.400	
IKRO.2132.PDD.008.1 Jumlah Lembaga Pengembangan Unit Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Perguruan Tinggi Islam	Lembaga	N/A	0	14	16	20	24						
RO.2132.QEI.004 Revitalisasi LPTK di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam	Lembaga	3	26	30	35	40	45	-	-	-	-	-	
IKRO.2132.QEI.004.1 Jumlah LPTK yang direvitalisasi	Lembaga	3	26	30	35	40	45						
SK.2132.2 Meningkatnya layanan pendidikan tinggi keagamaan Islam yang terjangkau													
IKSK.2132.2.1 Persentase mahasiswa PTK Islam penerima beasiswa	Persen	3,40	3,50	3,60	3,70	3,80	3,90						
IKSK.2132.2.2 Persentase mahasiswa baru yang berkuliah di perguruan tinggi keagamaan Islam berkualitas	Persen	N/A	16,78	17,12	17,48	17,86	18,25						
IKSK.2132.2.3 Persentase mahasiswa baru PTK Islam berkuliah di Prodi STEM terakreditasi unggul	Persen	N/A	14,29	14,64	14,79	15,08	15,38						
RO.2132.PBH.001 Pemetaan Keunggulan dan Diferensiasi Misi Perguruan Tinggi Keagamaan	Rekomen-dasi Kebijakan	N/A	0	0	0	0	1	-	-	-	-	4.000	
IKRO.2132.PBH.001.1 Jumlah keunggulan dan diferensiasi misi PTKI yang dipetakan	Rekomen-dasi Kebijakan	N/A	0	0	0	0	1						
RO.2132.SBA.001 Pengembangan Kapasitas Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam	Orang	N/A	0	2200	2300	2400	2500	-	9.362	9.787	10.213	10.638	
IKRO.2132.SBA.001.1 Jumlah Mahasiswa Penerima Pengembangan Kapasitas Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam	Orang	N/A	0	2200	2300	2400	2500						
RO.2132.SBA.002 Program mobilitas internasional mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam	Orang	N/A	0	4649	4865	5081	5405	-	4.649	4.865	5.081	5.405	
IKRO.2132.SBA.002.1 Jumlah Mahasiswa Penerima Program mobilitas internasional mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam	Orang	N/A	0	43	45	47	50						
RO.2132.QEN.004 Mahasiswa PTKI Penerima Beasiswa Afiriasi	Orang	200	200	205	207	211	215	2.312	2.367	2.391	2.437	2.485	
IKRO.2132.QEN.004.1 Jumlah Mahasiswa PTKI Penerima Beasiswa Afiriasi	Orang	200	200	200	200	200	200						
RO.2132.QEN.007 Mahasiswa PTKI Penerima KIP	Orang	85.595	112.393	118.013	123.913	130.109	133.700	1.236.921	1.298.767	1.363.705	1.431.891	1.471.411	
IKRO.2132.QEN.007.1 Jumlah Mahasiswa PTKI Penerima KIP Kuliah	Orang	N/A	112.393	118.013	123.913	130.109	133.700						
RO.2132.BEI.003 BOPTN Non Penelitian	Lembaga	1	58	58	58	58	58	523.520	785.280	1.543.481	1.543.481	1.543.481	
IKRO.2132.BEI.003.1 Jumlah mahasiswa yang menerima beasiswa	Orang	7.843	8.074	8.305	8.535	8.766	8.997						
RO.2132.BEI.004 Lembaga Penyelenggaraan Seleksi Nasional Mahasiswa Baru	Lembaga	2	3	3	4	4	5	3.000	4.000	4.000	5.000	5.000	

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKRO.2132.BEI.004.1	Jumlah Mahasiswa Baru PTKI	Orang	131800	131800	135754	139827	144021	148342					
IKRO.2132.BEI.004.2	Jumlah peserta yang mendaftar dan mengikuti seleksi nasional	Orang	77.224	77.340	77.456	77.572	77.688	77.805					
RO.2132.BEN.001	Mahasiswa Asing Penerima Beasiswa di PTKI	Orang	50	50	52	55	59	63	3.534	3.670	3.870	4.132	4.395
IKRO.2132.BEN.001.1	Jumlah mahasiswa asing penerima beasiswa	Orang	50	50	52	55	59	63					
RO.2132.BEN.002	Mahasiswa Penerima Beasiswa Peningkatan Prestasi dan Akademik (PPA)	Orang	100	100	100	105	107	110	200	200	210	213	219
IKRO.2132.BEN.002.1	Jumlah mahasiswa penerima beasiswa PPA	Orang	100	100	100	105	107	110					
SK.2132.3	Meningkatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi PTK Islam												
IKSK.2132.3.1	Jumlah perguruan tinggi keagamaan Islam yang terpetakan berdasarkan keunggulannya	Jumlah		289	299	309	318	328					
IKSK.2132.3.2	Persentase Prodi PTK Islam yang mendapatkan akreditasi unggul	Persen	10,50	13,00	15,50	18,00	20,50	23,00					
IKSK.2132.3.3	Persentase Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) PTK Islam yang terakreditasi	Persen	59,00	72,34	76,47	77,36	86,79	96,23					
IKSK.2132.3.4	Persentase program studi Program Profesi Guru (PPG) PTK Islam yang terakreditasi unggul	Persen	26,09	46,81	62,75	69,81	79,25	89,00					
RO.2132.BEI.001	Bantuan Operasional Kopertais	Lembaga	36	36	37	38	40	41	6.395	6.603	6.792	7.000	7.207
IKRO.2132.BEI.001.1	Jumlah perguruan tinggi keagamaan Islam yang terpetakan berdasarkan keunggulannya	Lembaga	N/A	205	212	218	224	231					
IKRO.2132.BEI.001.2	Jumlah PTK Islam yang mendapatkan pembinaan standar mutu	Lembaga	58	58	59	59	59	59					
IKRO.2132.BEI.001.3	Jumlah Kopertais yang memperoleh Bantuan Operasional Pada PTK Islam	Lembaga	N/A	15	15	15	15	15					
RO.2132.PDE.001	Akreditasi Prodi/Lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Negeri	Lembaga	3.195	523	550	600	700	723	7.387	7.768	8.474	9.886	10.211
IKRO.2132.PDE.001.1	Jumlah Prodi PTK Islam yang mendapatkan akreditasi unggul	Lembaga	444	548	654	760	865	971					
IKRO.2132.PDE.001.2	Jumlah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasi pada PTK Islam	Lembaga	27	34	35	36	40	45					
IKRO.2132.PDE.001.3	Jumlah program studi Program Profesi Guru (PPG) yang terakreditasi unggul pada PTK Islam	Lembaga	12	22	29	33	37	42					
IKRO.2132.PDE.001.4	Jumlah PTK Islam yang mendapatkan Akreditasi	Lembaga	58	58	59	59	59	59					
RO.2132.PDD.001	Penguatan RPL di PTK Islam	Lembaga	N/A	0	2	2	2	2	-	1.818	1.818	1.818	1.818
IKRO.2132.PDD.001.1	Jumlah PTKI yang menyelenggarakan layanan RPL	Lembaga	N/A	0	92	97	101	107					
RO.2132.PDD.002	Penguatan Kurikulum dan Pembelajaran di PTK Islam	Lembaga	N/A	0	8	8	9	10	-	1.818	3.636	5.455	9.091

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKRO.2132.PDD.02.1 Jumlah PTKI yang melaksanakan evaluasi dan pengembangan Kurikulum	Lembaga	N/A	0	275	330	396	475						
RO.2132.PDD.003 Penyelenggaraan Pembelajaran digital/daring di PTK Islam	Lembaga	N/A	0	14	16	18	20	-	8.235	9.412	10.588	11.765	
IKRO.2132.PDD.03.1 Jumlah PTKI yang menyelenggarakan Pembelajaran digital/daring	Lembaga	N/A	0	480	492	504	517						
RO.2132.PDD.004 Matakuliah Kolaborasi Interdisiplin	Lembaga	N/A	0	1	3	4	5	-	1.538	4.615	6.154	7.692	
IKRO.2132.PDD.04.1 Jumlah PTKI yang menyelenggarakan integrasi Matakuliah berbasis Interdisiplin	Lembaga	N/A	0	82	86	90	94						
RO.2132.PDD.005 Pembentukan prodi Interdisipliner kolaboratif di PTK Islam	Lembaga	N/A	0	1	1	1	1	-	10.000	10.000	10.000	10.000	
IKRO.2132.PDD.05.1 Jumlah PTKI yang memiliki prodi Interdisipliner kolaboratif	Lembaga	N/A	0	40	42	43	45						
RO.2132.PDD.006 Pembinaan Standar Mutu Prodi PTK Islam	Lembaga	N/A	0	140	160	180	200	-	12.353	14.118	15.882	17.647	
IKRO.2132.PDD.06.1 Jumlah PTKI yang memperoleh pendampingan dan Pembinaan Standar Mutu	Lembaga	N/A	0	300	320	340	360						
SK.2132.4 Terpenuhinya kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan PTK Islam sesuai dengan standar minimal													
IKSK.2132.4.1 Persentase dosen PTK Islam berkualifikasi akademik S3													
a. Total	Persen	16,39	16,89	17,40	17,90	18,41	18,91						
b. STEM	Persen	1,10	1,13	1,17	1,20	1,24	1,27						
c. Non STEM	Persen	15,29	15,76	16,23	16,70	17,17	17,65						
IKSK.2132.4.2 Persentase dosen PTK Islam yang mempunyai pengalaman di luar kampus	Persen	N/A	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40						
IKSK.2132.4.3 Persentase dosen PTK Islam yang menduduki jabatan lektor/lektor kepala/guru besar	Persen	40,13	42,76	45,39	49,02	50,64	53,27						
IKSK.2132.4.4 Persentase dosen dan tenaga kependidikan PTK Islam yang mendapatkan program peningkatan kompetensi	Persen	N/A	10,00	10,20	10,40	10,60	10,80						
IKSK.2132.4.5 Persentase dosen PTK Islam yang menjadi Narasumber Konferensi nasional maupun internasional	Persen	N/A	0,76	0,78	0,80	0,82	0,84						
IKSK.2132.4.6 Rasio dosen asing PTK Islam dengan dosen dalam negeri	Rasio	N/A	1:572	1:556	1:540	1:534	1:508						
IKSK.2132.4.7 Persentase pemenuhan jumlah tenaga kependidikan PTK Islam pada jenjang jabatan fungsional	Persen	N/A	75	76	77	78	79						
RO.2132.BEA.001 Tunjangan Profesi Dosen Non ASN	Orang	91.656	8.170	8.313	8.313	8.313	8.457	6.359	6.505	6.505	6.505	6.616	
IKRO.2132.BEA.01.1 Jumlah Dosen Non ASN PTK Islam Penerima Tunjangan Profesi	Orang	N/A	8.170	8.313	8.313	8.313	8.457						
RO.2132.BEA.008 Tunjangan Fungsional Dosen Non ASN	Orang	1.809	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	11.261	11.261	11.261	11.261	11.261	
IKRO.2132.BEA.08.1 Jumlah Dosen Non ASN PTK Islam penerima Tunjangan Fungsional	orang	1.809	1.507	8.913	8.913	8.913	8.913						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO.2132.PDI.001 Dosen yang Tersertifikasi	Orang	1.000	1.020	1.040	1.061	1.082	1.104	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
IKRO.2132.PDI.001.1 Jumlah dosen yang menduduki jabatan lektor/lektor kepala/guru besar Pada PTK Islam	Orang	20.484	18.565	19.707	21.283	21.986	23.128						
IKRO.2132.PDI.001.2 Jumlah Dosen yang Tersertifikasi Pada PTK Islam	Orang	24.864	27.364	29.864	32.364	34.864	37.364						
RO.2132.PDG.001 Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi	Orang	N/A	50	57	69	80	91	807	925	1.108	1.292	1.475	
IKRO.2132.PDG.001.1 Jumlah dosen berkualifikasi akademik S3 (a) total (b) STEM (c) non STEM	Orang	06b) 543c) 7.563	a) 8.356 b) 560 c) 7.796	a) 8.606 b) 577 c) 8.029	a) 8.856 b) 611 c) 8.495	a) 9.106 b) 628 c) 8.728							
IKRO.2132.PDG.001.2 Jumlah dosen PTK Islam yang mempunyai pengalaman di luar kampus	Orang	N/A	495	544	594	643	692						
IKRO.2132.PDG.001.3 Jumlah dosen PTK Islam yang mengikuti program peningkatan kompetensi	Orang	N/A	4.946	5.045	5.144	5.243	5.342						
IKRO.2132.PDG.001.4 Jumlah Dosen PTK Islam yang mendapatkan fasilitasi menjadi Narasumber Konferensi nasional maupun intern	Orang	N/A	376	386	396	406	415						
IKRO.2132.PDG.001.5 Jumlah dosen asing PTK Islam yang difasilitasi dalam pembelajaran pendidikan tinggi	Orang	N/A	89	92	95	97	100						
IKRO.2132.PDG.001.6 Rasio dosen asing dengan dosen dalam negeri	Orang	N/A	1:508	1:524	1:540	1:556	1:572						
IKRO.2132.PDG.001.7 Jumlah pemenuhan tenaga kependidikan PTK Islam pada jenjang jabatan fungsional	Orang	1.000	833	4.927	4.927	4.927	4.927						
Jumlah dosen yang menduduki jabatan lektor/lektor kepala/guru besar	Orang	19.850	21.151	22.452	24.247	25.049	26.349						
RO.2132.DBA.001 Tenaga Kependidikan yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi	Orang	120	1	1	2	2	2	1.000	1.000	1.001	1.001	1.002	
IKRO.2132.DBA.001.1 Jumlah Tenaga Kependidikan PTK Islam yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	Orang	136	137	138	139	140	141						
SK.2132.5 Meningkatnya kualitas lulusan PTK Islam yang diterima di dunia kerja													
IKSK.2132.5.1 Persentase lulusan perguruan tinggi (berkualifikasi S1) dengan pengalaman 1 (satu) semester di luar kampus	Persen	N/A	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00						
IKSK.2132.5.2 Persentase PTK Islam yang memiliki Pusat Pengembangan Karir	Persen	N/A	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00						
IKSK.2132.5.3 Persentase lulusan PTK Islam yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan													
a. Total	Persen	N/A	83,59	84,15	84,71	85,27	85,83						
b. Karyawan / Wirausaha	Persen	N/A	83,59	84,15	84,71	85,27	85,83						
IKSK.2132.5.4 Persentase tenaga kerja lulusan PTK Islam bidang STEM	Persen	N/A	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.2132.5.5	Persentase peningkatan mahasiswa PTK Islam yang mendapatkan sertifikasi kompetensi/profesi	Persen	N/A	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00					
IKSK.2132.5.6	Rasio Outbound per Inbound mahasiswa PTK Islam	Rasio	1:0,95	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1					
IKSK.2132.5.7	Persentase mahasiswa yang berkegiatan di luar program studi	Persen	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06					
IKSK.2132.5.8	Persentase mahasiswa PTK Islam yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Persen	N/A	0,27	0,41	0,55	69,00	0,83					
IKSK.2132.5.9	Persentase PTK yang mendapatkan pembinaan standar mutu	Persen	N/A	3,17	3,28	3,38	3,49	3,60					
RO.2132.BEI.002	Bantuan Pendanaan PTN-BH	Lembaga	N/A	64	149	154	158	162	524.853	824.839	852.452	876.511	900.572
IKRO.2132.BEI.00	Jumlah peningkatan mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi	Orang	N/A	205	212	218	224	231					
IKRO.2132.BEI.00	Jumlah mahasiswa yang memperoleh layanan program Outbound per Inbound	Orang	N/A	58	59	59	59	59					
IKRO.2132.BEI.00	Jumlah mahasiswa yang berkegiatan di luar program studi	Orang	N/A	15	15	15	15	15					
RO.2132.BGC.00	PTKIN yang meningkat kualitas layanan pendidikannya melalui PNPB	Lembaga	37	30	29	29	29	28	544.318	670.954	670.954	670.954	670.954
IKRO.2132.BGC.0	Jumlah lulusan perguruan tinggi (berkualifikasi S1) dengan pengalaman 1	Orang	N/A	2.884	3.460	4.037	4.614	5.190					
IKRO.2132.BGC.0	Jumlah PTK Islam yang memiliki Pusat Pengembangan Karir	Lembaga	58	58	58	58	58	58					
RO.2132.UAB.00	Tracer study terpadu lintas Perguruan Tinggi Keagamaan	Sistem Informasi	N/A	0	1	1	1	1	-	5.000	5.000	5.000	5.000
IKRO.2132.UAB.0	Jumlah lulusan PTK Islam yang berhasil memiliki pekerjaan:												
	a. Karyawan	Orang	N/A	16.979	17.105	17.232	17.365	17.492					
	b. Wirausaha	Orang	N/A	31.229	31.425	31.621	31.812	32.008					
RO.2132.BGC.00	PTKIN yang meningkat kualitas layanan pendidikannya melalui BLU	Lembaga	21	28	29	30	31	32	3.413.535	3.842.301	3.842.301	3.842.301	3.842.301
IKRO.2132.BGC.0	Jumlah tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi keagamaan bidang STEM	Orang	N/A	1.153	1.269	1.384	1.499	1.615					
IKRO.2132.BGC.0	Jumlah lulusan yang mendapat sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi bereputasi	Orang	N/A	13.841	14.995	16.148	17.302	18.455					
IKRO.2132.BGC.0	Jumlah prodi yang menyelenggarakan sertifikasi profesi	Lembaga	N/A	21	23	25	27	29					
RO.2132.QEI.002	Bantuan Pendanaan PTN-BH	Jumlah	1	1	2	3	4	5	1.333	2.667	4.000	5.333	6.667
IKRO.2132.QEI.00	Jumlah mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa	Rasio	2.192	2.307	2.330	2.353	2.376	2.399					
IKRO.2132.QEI.00	Jumlah mahasiswa yang berkegiatan di luar program studi	Orang	23	46	69	92	115	138					
SK.2132.6	Meningkatnya kualitas pemanfaatan kerjasama PTK Islam												
IKSK.2132.6.1	Persentase PTK Islam yang bekerjasama dengan dunia	Persen	5,02	5,07	5,12	5,17	5,22	5,27					

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	kerja/industri/pemerintah/ Lembaga Masyarakat / Internasional												
IKSK.2132.6.1	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti dibidang: a. Pendidikan dan pengajaran b. Penelitian dan publikasi c. Pengabdian kepada masyarakat	Persen	,93;b. 8,35;c. 1,5	a. 12,33; b. 8,36; c. 2,00	a. 12,72; b. 8,37; c. 2,01	a. 13,12; b. 8,38; c. 2,02	a. 13,52; b. 8,39; c. 2,03	a. 13,92; b. 8,40; c. 2,04					
RO.2132.PEC.001	Kerjasama Pengembangan PT	Kesepakat an	N/A	4	4	4	5	5	727	727	727	909	909
IKRO.2132.PEC.001.1	Jumlah PTK Islam yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri/pemerintah/ Lembaga Masyarakat / Internasional	Lembaga	46	46	47	47	48	48					
IKRO.2132.PEC.001.2	Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti di bidang pendidikan dan pengajaran	Kesepakat an	60	62	63	65	68	70					
IKRO.2132.PEC.001.3	Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti di bidang penelitian dan publikasi	Kesepakat an	42	44	46	48	50	52					
IKRO.2132.PEC.001.4	Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti di bidang pengabdian kepada masyarakat	Kesepakat an	8	9	10	11	12	13					
SK.2132.7	Meningkatnya budaya akademik yang religious dan toleran Pada PTK Islam												
IKSK.2132.7.1	Persentase mahasiswa PTKI yang mengikuti program peningkatan literasi Kitab Suci	Persen	N/A	3,00	3,05	3,10	3,15	3,20					
IKSK.2132.7.2	Persentase Prodi PTKI yang mengimplementasikan integrasi keilmuan	Persen	N/A	3,28	3,78	4,28	4,78	5,28					
IKSK.2132.7.3	Persentase PTKI yang mendapatkan bantuan pengembangan pusat-pusat kajian keagamaan sesuai kebutuhan lokal	Persen	N/A	2,90	3,40	3,90	4,40	4,90					
IKSK.2132.7.4	Persentase PTK Islam yang mengembangkan literasi keagamaan	Persen	N/A	3,55	4,16	4,73	5,22	5,85					
RO.2132.SBA.003	Mahasiswa yg Mendapat Penguatan Pemahaman Moderasi Beragama	Orang	N/A	1.000	1.016	1.033	1.049	1.066	9.682	9.841	10.000	10.159	10.317
IKRO.2132.SBA.003.1	Jumlah mahasiswa yang mengikuti program peningkatan literasi Kitab Suci	Orang	N/A	17.128	17.413	17.699	17.984	18.270					
IKRO.2132.SBA.003.2	Jumlah prodi yang mengimplementasikan integrasi keilmuan	Lembaga	N/A	139	160	181	202	223					
IKRO.2132.SBA.003.3	Jumlah PTKI yang mengembangkan pusat-pusat kajian keagamaan sesuai kebutuhan lokal	Lembaga	N/A	27	31	36	40	45					
	Nilai keagamaan mahasiswa (pemahaman, pengamalan dan sikap)	Nilai	N/A	80,0	80,5	81,0	81,5	82,0					
SK.2132.8	Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Penelitian PTK Islam												
IKSK.2132.8.1	Persentase publikasi ilmiah bereputasi internasional PTK Islam yang disitasi	Persen	72,81	75,61	78,59	81,75	85,08	88,42					
IKSK.2132.8.2	Jumlah karya tulis ilmiah berorientasi SDGs yang terpublikasi di Jurnal Internasional bereputasi	Jumlah	N/A	5	6	7	8	9					

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.2132.8.3 Rasio produktifitas publikasi ilmiah dengan jumlah dosen	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1						
IKSK.2132.8.3 Jumlah <i>Paten Granted</i> karya tulis ilmiah PTK Islam	Jumlah	11	12	13	14	15	16						
IKSK.2132.8.4 Jumlah hasil riset dan inovasi PTK Islam yang dimanfaatkan DUDI/Masyarakat	Jumlah	4	3	4	4	5	5						
IKSK.2132.8.5 Persentase Lembaga Penelitian dan Pengabdian ke Masyarakat (LPPM) yang ditingkatkan kapasitasnya	Persen	9,00	88,00	92,00	95,00	99,00	103,00						
RO.2132.QEI.001 BOPTN Penelitian PTKI	Lembaga	N/A	58	58	58	58	58	-	158.797	158.797	158.797	158.797	
IKRO.2132.QEI.00 Jumlah karya tulis ilmiah yang bereputasi nasional	Judul	N/A	203	206	213	214	216						
IKRO.2132.QEI.00 Jumlah publikasi ilmiah bereputasi internasional PTK Islam yang disitasi	Judul	415	431	448	466	485	504						
IKRO.2132.QEI.00 Jumlah karya tulis ilmiah berorientasi SDGs yang terpublikasi di jurnal internasional bereputasi	Judul	N/A	5	6	7	8	9						
IKRO.2132.QEI.00 Jumlah dosen yang menerbitkan karya tulis ilmiah	Orang												
IKRO.2132.QEI.00 Jumlah <i>Paten Granted</i> karya tulis ilmiah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam	Hak Paten	11	12	13	14	15	16						
IKRO.2132.QEI.00 Jumlah hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan DUDI/Masyarakat	Layanan	4	5	6	7	8	9						
IKRO.2132.QEI.00 Jumlah Lembaga Penelitian dan Pengabdian ke Masyarakat (LPPM) yang ditingkatkan kapasitasnya	Lembaga	82	805	842	869	906	942						
4438 Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Ma'had Aly								36.216	40.851	52.179	55.322	58.840	[DITJEN PENDIS] Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
SK.4438.1 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Ma'had Aly													
IKSK.4438.1.1 Persentase Ma'had Aly yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi	Persen	N/A	0,00	1,10	1,10	1,10	2,20						
IKSK.4438.1.2 Persentase Ma'had Aly yang menyediakan fasilitas yang mendukung Pendidikan Tinggi inklusif	Persen	N/A	0,00	1,10	1,10	1,10	2,20						
IKSK.4438.1.3 Persentase Ma'had Aly yang memiliki Unit Layanan Disabilitas (ULD)	Persen	N/A	6,00	6,30	6,60	6,90	7,10						
RO.4438.BEI.001 Ma'had Aly Penerima Bantuan Sarana	Lembaga	N/A	0	12	15	18	22	-	4.150	4.980	5.810	6.866	
IKRO.4438.BEI.00 Jumlah Ma'had Aly yang memperoleh peningkatan sarana pembelajaran	Lembaga	N/A	100	100	101	101	101						
RO.4438.BEI.002 Ma'had Aly Penerima Bantuan Prasarana	Lembaga	4	4	4	4	4	4	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
IKRO.4438.BEI.00 Jumlah Ma'had Aly yang memperoleh bantuan Prasarana pembelajaran (pembangunan atau rehabilitasi ruang kelas perkuliahan, laboratorium, perpustakaan, asrama mahasantri, tempat ibadah, sanitasi dan fasilitas	Lembaga	4	4	4	4	4	4						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) /SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /INDIKATOR		SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	penunjang digitalisasi)													
RO.4438.CBJ.001	Prasarana Pendidikan Tinggi Ma'had Aly	Unit	N/A	4	4	4	4	4	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
IKRO.4438.CBJ.001.1	Jumlah Prasarana Pendidikan Mah'ad Aly	Unit	N/A	4	4	4	4	4						
SK.4438.2	Meningkatnya layanan Ma'had Aly yang terjangkau													
IKSK.4438.2.1	Persentase mahasiswa penerima beasiswa	Persen	1,04	1,10	1,15	1,20	1,25	1,30						
IKSK.4438.2.2	Persentase mahasiswa kategori UKT kelompok I	Persen	N/A	0.00	0,00	1,00	1.27	1,50						
RO.4438.BEN.001	Mahasantri Penerima Beasiswa PPA	Orang	2.200	2.500	2.513	2.525	2.538	2.550	25.044	25.169	25.295	25.422	25.549	
IKRO.4438.BEN.001.1	Jumlah Mahasantri Penerima Beasiswa PPA	Orang	N/A	2.500	2.513	2.525	2.538	2.550						
IKRO.4438.BEN.001.2	Jumlah Mahasantri kategori UKT kelompok I	Orang	N/A	0	244	383	407	427						
RO.4438.CAA.001	Peningkatan Sarana Pendidikan M a'had Aly	Paket	N/A	74	76	78	80	82	1.399	1.403	1.407	1.412	1.416	
IKRO.4438.CAA.001.1	Jumlah Sarana Pendidikan Tinggi Ma'had Aly	Paket	N/A	74	76	78	80	82						
SK.4438.3	Terpenuhinya kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan Ma'had Aly sesuai dengan standar minimal	Jumlah												
IKSK.4438.3.1	Persentase dosen Ma'had Aly berkualifikasi akademik S3	Persen	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00						
IKSK.4438.3.2	Persentase dosen Ma'had Aly yang mempunyai pengalaman di luar kampus	Persen	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00						
IKSK.4438.3.3	Persentase dosen dan tenaga kependidikan Ma'had Aly yang mengikuti program peningkatan kompetensi	Persen	N/A	0,00	2,68	5,20	7,73	10,25						
RO.4438.BEN.002	Dosen Non PNS Ma'had Aly Penerima Insentif dan Tunjangan Profesi	Orang	1.041	1.000	1.050	1.103	1.158	1.216	3.000	3.150	3.308	3.473	3.647	
IKRO.4438.BEN.002.1	Jumlah dosen Ma'had Aly berkualifikasi akademik S3	Orang	130	140	150	160	170	180						
IKRO.4438.BEN.002.2	Jumlah dosen Ma'had Aly yang mempunyai pengalaman di luar kampus	Orang	25	40	55	70	85	100						
IKRO.4438.BEN.002.3	Jumlah dosen Ma'had Aly yang mengikuti program peningkatan kompetensi	Orang	25	40	55	70	85	100						
IKRO.4438.BEN.002.4	Jumlah tenaga kependidikan Ma'had Aly yang mendapatkan peningkatan kompetensi	Orang	100	125	150	180	200	250						
SK.4438.4	Meningkatnya kualitas lulusan Ma'had Aly yang diterima di dunia kerja													
IKSK.4438.4.1	Persentase peningkatan mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi	Persen	N/A	0	1,00	1,50	2,00	2,50						
IKSK.4438.4.2	Persentase mahasiswa yang berkegiatan di luar program studi	Persen	20	25	30	35	40	50						
RO.4438.BGC.001	Ma'had Aly yang meningkat kualitas	Lembaga	N/A	0	0	18	21	24	0	0	2.000	2.333	2.800	

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1.layanan pendidikannya													
IKRO.4438.BGC.0 Jumlah peningkatan mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi	Orang	N/A	0	0	232	348	464						
IKRO.4438.BGC.0 Jumlah mahasiswa yang berkegiatan di luar program studi	Orang	N/A	0	0	5.801	6.962	8.122						
IKRO.4438.BGC.0 Persentase lulusan Ma'had Aly (berkualifikasi S1) dengan pengalaman 1 (satu) semester di luar kampus	Persen	N/A	N/A	N/A	0,01	0,02	0,03						
IKRO.4438.BGC.0 Persentase Ma'had Aly yang memiliki Pusat Pengembangan Karir	Persen	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00						
IKRO.4438.BGC.0 Persentase lulusan Ma'had Aly yang berhasil memiliki pekerjaan :	Persen												
a. Karyawan	Persen	N/A	33,44	33,66	33,88	34,11	34,33						
b. Wirausaha	Persen	N/A	50,15	50,49	50,83	51,16	51,50						
IKRO.4438.BGC.0 Persentase lulusan yang mendapat sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi bereputasi	Persen	N/A	N/A	N/A	0,01	0,02	0,03						
RO.4438.DBA.00 Jumlah Tenaga Kependidikan yang 1 Memeroleh Peningkatan Kompetensi	Orang	N/A	100	110	120	135	150	1.000	1.100	1.200	1.350	1.500	
IKRO.4438.DBA.00 Jumlah Tenaga Kependidikan yang 01.1 Memeroleh Peningkatan Kompetensi	Orang	N/A	100	110	120	135	150						
SK.4438.5 Meningkatnya kualitas pemanfaatan kerjasama di Ma'had Aly													
IKSK.4438.5.1 Persentase Ma'had Aly yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri/pemerintah/ Lembaga Masyarakat /Internasional	Persen	N/A	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50						
IKSK.4438.5.1 Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti di bidang pendidikan dan pengajaran	Persen	N/A	4,4	4,40	4,40	5,50	6,60						
IKSK.4438.5.2 Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti di bidang penelitian dan publikasi	Persen	N/A	4,4	4,4	4,4	5,5	6,60						
IKSK.4438.5.3 Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti di bidang pengabdian kepada masyarakat	Persen	N/A	1,10	1,10	1,10	2,20	2,20						
RO.4438.PEC.00 Persentase Kerjasama yang 1 Ditindaklanjuti di Bidang Pendidikan dan Pengajaran	Kesepaka-tan	N/A	0	0	11	14	17	0	0	3.847	4.431	5.014	
IKRO.4438.PEC.0 Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti 01 .1 di bidang pendidikan dan pengajaran	Kesepaka-tan	N/A	0	0	3	4	5						
IKRO.4438.PEC.0 Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti 01 .2 di bidang penelitian dan publikasi	Kesepaka-tan	N/A	0	0	5	6	7						
IKRO.4438.PEC.0 Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti 01 .3 di bidang kepada masyarakat	Kesepaka-tan	N/A	0	0	3	4	5						
SK.4438.6 Meningkatnya budaya akademik yang religius dan toleran di Ma'had Aly													
IKSK.4438.6.1 Persentase mahasiswa yang mengikuti program peningkatan literasi Kitab Suci	Persen	N/A	1,00	1,02	1,03	1,05	1,07						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO.4438.SBA.002 Mahasantri yang mendapat Penguatan Pemahaman Moderasi Beragama	Orang	1.000	1.000	1.060	1.124	1.191	1.262	1.773	1.879	1.992	2.111	2.238	
IKRO.4438.SBA.002.1 Jumlah mahasantri yang mengikuti program peningkatan literasi Kitab Suci	Orang	N/A	232	237	239	244	248						
IKRO.4438.SBA.002.2 Jumlah prodi Ma'had Aly yang difasilitasi integrasi keilmuan	Lembaga	N/A	5	6	7	8	9						
IKRO.4438.SBA.002.3 Jumlah Ma'had Aly yang difasilitasi dalam mengembangkan pusat-pusat kajian keagamaan sesuai kebutuhan lokal	Lembaga	N/A	10	13	15	20	25						
SK.4438.7 Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian di Ma'had Aly													
IKSK.4438.7.1 Persentase karya tulis ilmiah Ma'had Aly yang bereputasi nasional	Persen	3,00	5,00	6,00	7,00	8,00	10,00						
IKSK.4438.7.2 Jumlah Paten Granted karya tulis ilmiah Ma'had Aly	Jumlah	N/A	0	0	3	4	5						
IKSK.4438.7.3 Jumlah hasil riset dan inovasi Ma'had Aly yang dimanfaatkan DUDI/Masyarakat	Produk	N/A	10	12	14	16	18						
IKSK.4438.7.4 Jumlah Lembaga Penelitian dan Pengabdian ke Masyarakat (LPPM) Ma'had Aly yang ditingkatkan kapasitasnya	Lembaga	N/A	9	18	27	36	45						
RO.4438.DDD.001 Penelitian Ma'had Aly yang berkualitas	Kekayaan Intelektual	N/A	0	0	12	15	18	-	-	4.150	4.980	5.810	
IKRO.4438.DDD.001.1 Jumlah artikel yang bereputasi nasional	Judul	N/A	0	0	3	6	7						
IKRO.4438.DDD.001.2 Rasio produktifitas publikasi ilmiah dengan jumlah dosen	Rasio	N/A	0	0	1/70	1/60	1/50						
IKRO.4438.DDD.001.3 Jumlah Paten Granted Perguruan Tinggi Keagamaan	Jumlah	N/A	0	0	3	4	5						
IKRO.4438.DDD.001.4 Jumlah hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan Masyarakat	Judul	N/A	0	0	4	6	8						
IKSK.4438.6.4 Indeks keagamaan mahasiswa (pemahaman, pengamalan dan sikap)	Persen	N/A	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00						
5101 - Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Kristen								347.307	471.191	568.806	647.808	828.627	[BIMAS KRISTEN] Direktorat Pendidikan Kristen
SK.5101.1 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana PTK Kristen													
IKSK.5101.1.1 Persentase PTK Kristen yang memenuhi standar sarana prasarana	Persen	5,00	10,00	10,00	15,00	20,00	20,00						
IKSK.5101.1.2 Persentase PTK Kristen yang menyediakan fasilitas yang mendukung Pendidikan Tinggi berbasis gender dan inklusif	Persen	5,00	7,00	10,00	12,00	15,00	20,00						
RO.5101.BEI.003 Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Swasta	Lembaga	N/A	10	150	180	225	270	85.820	90.200	102.500	118.000	222.500	
IKRO.5101.BEI.003.1 Jumlah PTK Kristen yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi	Lembaga	N/A	10	150	180	225	270						
RO.5101.CAA.001 Sarana Bidang Pendidikan	Paket	45	8	8	8	8	8	8.124	9.000	9.500	10.000	11.000	
IKRO.5101.CAA.001.1 Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan	Paket	45	54	60	65	70	80						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
01.1 Kristen yang memperoleh peningkatan sarana pembelajaran													
RO.5101.CBJ.00 Prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri	Unit	7	8	8	8	8	8	73.262	140.494	180.988	200.482	221.976	
IKRO.5101.CBJ.0 Jumlah PTKKN yang mengembangkan prasarana pembelajaran	Unit	7	7	8	16	21	32						
RO.5101.PDD.00 Pengembangan Pusat 3 Pengarusutamaan Gender dan Unit Layanan Disabilitas Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen	Lembaga	N/A	0	50	76	110	158	-	2.000	3.000	4.000	5.000	
IKRO.5101.PDD.0 Jumlah PTK Kristen yang menyediakan fasilitas yang mendukung Pendidikan Tinggi berbasis gender dan inklusif	Lembaga	N/A	0	25	38	55	79						
IKRO.5101.PDD.0 Jumlah PTK yang memiliki Unit Layanan Disabilitas	Lembaga	N/A	0	25	38	55	79						
SK.5101.2 Meningkatnya layanan pendidikan tinggi keagamaan Kristen yang terjangkau													
IKSK.5101.2.1 Persentase mahasiswa PTK Kristen penerima beasiswa	Persen	10,00	15,00	20,00	30,00	35,00	40,00						
IKSK.5101.2.2 Persentase mahasiswa baru PTK Kristen yang berkuliah di perguruan tinggi berkualitas	Persen	5,00	7,00	10,00	12,00	15,00	20,00						
RO.5101.QEN.00 Mahasiswa PTK Kristen Penerima KIP 1 Kuliah	Orang	8.358	9.819	0	0	0	0	5.709	-	-	-	-	
IKRO.5101.QEN.0 Jumlah mahasiswa penerima beasiswa kuliah (KIP)	Orang	8.358	9.819	0	0	0	0						
RO.5101.BEN.00 Bantuan Beasiswa PPA Mahasiswa PTK Kristen	Orang	2.151	562	1.800	2.340	3.042	3.955	3.360	8.640	11.232	14.601	18.984	
IKRO.5101.QEN.0 Jumlah mahasiswa PTK Kristen Penerima beasiswa PPA	Orang	2.151	562	1.800	2.340	3.042	3.955						
RO.5101.BEN.00 Bantuan Beasiswa Afirmasi 2 Mahasiswa Orang Asli Papua (OAP)	Orang	150	150	187	275	365	450	5.142	5.500	6.875	8.250	13.182	
IKRO.5101.BEN.0 Jumlah mahasiswa penerima beasiswa afirmasi OAP pada PTKKN	Orang	100	100	150	250	350	450						
IKRO.5101.BEN.0 Jumlah mahasiswa penerima beasiswa afirmasi OAP pada PTU	Orang	50	50	37	25	15	0						
RO.5101.DBA.00 Layanan Seleksi Nasional Penerimaan 1 Mahasiswa Baru	Orang	3.165	0	3.724	4.170	4.795	5.754	-	500	600	700	800	
IKRO.5101.DBA.0 Jumlah mahasiswa baru yang diterima lewat jalur Seleksi Nasional	Orang	3.165	3.386	3.724	4.170	4.795	5.754						
SK.5101.3 Meningkatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi PTK Kristen													
IKSK.5101.3.1 Jumlah PTK Kristen yang terpetakan berdasarkan keunggulannya	Lembaga	205,00	205,00	205,00	210,00	210,00	215,00						
IKSK.5101.3.2 Persentase prodi pada PTK Kristen yang mendapatkan akreditasi unggul	Persen	0,05	0,05	2,90	4,15	5,19	6,74						
IKSK.5101.3.3 Persentase Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) pada PTK Kristen yang terakreditasi	Persen	42,86	42,86	50,00	50,00	62,50	62,50						
IKSK.5101.3.4 Persentase program studi Program Profesi Guru (PPG) yang pada PTK Kristen yang terakreditasi unggul	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	16,66	33,33						
RO.5101.PDE.00 Perguruan Tinggi Keagamaan Yang	Lembaga	213	217	240	258	269	289	3.808	7.564	10.000	12.500	14.000	

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1 Terakreditasi													
IKRO.5101.PDE.0 Jumlah pemetaan keunggulan PTK Kristen	Lembaga	205	205	205	210	210	215						
IKRO.5101.PDE.01.2 Jumlah Program Studi yang Terakreditasi Unggul	Prodi	5	5	28	40	50	65						
IKRO.5101.PDE.01.3 Jumlah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) pada PTK Kristen yang terakreditasi	Lembaga	3	3	4	4	5	5						
IKRO.5101.PDE.01.4 Jumlah program studi Program Profesi Guru (PPG) pada PTK Kristen yang terakreditasi unggul	Prodi	0	0	0	0	1	2						
RO.5101.PDD.001 Penguatan Standar Mutu Kelembagaan Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen	Lembaga	N/A	90	119	145	150	198	7.500	8.000	9.000	11.000	13.000	
IKRO.5101.PDD.01.1 Jumlah PTK Kristen yang mendapatkan Penguatan Standar Mutu Kelembagaan	Lembaga	N/A	90	119	145	150	198						
SK.5101.4 Terpenuhiya kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan PTK Kristen sesuai dengan standar minimal													
IKSK.5101.4.1 Persentase dosen PTK Kristen berkualifikasi akademik S3													
a. Total	Persen	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00						
b. STEM	Persen	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00						
c. Non STEM	Persen	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00						
IKSK.5101.4.2 Persentase dosen PTK Kristen yang mempunyai pengalaman di luar kampus	Persen	N/A	0,00	1,02	3,21	3,92	5,01						
IKSK.5101.4.3 Persentase dosen PTK Kristen yang menduduki jabatan lektor/lektor kepala/guru besar	Persen	30,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00						
IKSK.5101.4.4 Persentase dosen dan tenaga kependidikan PTK Kristen yang mendapatkan program peningkatan kompetensi	Persen	1,00	41,20	51,08	52,10	57,19	62,68						
IKSK.5101.4.5 Rasio dosen asing dengan dosen dalam negeri pada PTK Kristen	-	1:6000	1:6000	1:6000	2:6000	2:6000	3:6000						
IKSK.5101.4.6 Persentase pemenuhan jumlah tenaga kependidikan PTK Kristen pada jenjang jabatan fungsional	Persen	1,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00						
RO.5101.QEN.002 Dosen PTK Kristen Penerima Beasiswa Gelar S3			48	100	102	104	106	24.879	21.400	26.800	27.000	28.000	
IKRO.5101.QEN.02.1 Jumlah Dosen PTK Kristen Penerima Beasiswa Gelar S3	Orang		48	100	102	104	106						
a. Total	Orang	30	48	100	102	104	106						
b. STEM	Orang	1	2	3	4	5	6						
c. Non STEM	Orang	30	46	97	98	99	100						
IKRO.5101.QEN.02.2 Jumlah dosen yang memperoleh kenaikan jabatan akademik	Orang	N/A	1.914	2.233	2.552	2.871	3.191						
RO.5101.SCI.001 Dosen dan Tenaga Kependidikan pada PTK Kristen yang mengikuti peningkatan kompetensi	Orang	N/A	2.680	3.260	3.325	3.650	4.000	9.704	11.899	11.638	12.775	14.000	
IKRO.5101.SCI.001.1 Jumlah dosen yang difasilitasi berkegiatan di luar kampus	Orang	N/A	0	65	205	250	320						
IKRO.5101.SCI.001 Jumlah dosen PTK Kristen yang	Orang	N/A	2.680	3.260	3.325	3.650	4.000						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1.2 mengikuti program peningkatan Kompetensi													
IKRO.5101.SCI.001.3 Jumlah dosen yang mendapatkan fasilitasi menjadi Narasumber Konferensi Nasional maupun Internasional	Orang	N/A	0	5	10	15	20						
IKRO.5101.SCI.001.4 Jumlah dosen asing yang difasilitasi dalam penguatan layanan Pendidikan Tinggi	Orang	1	1	1	2	2	3						
IKRO.5101.SCI.001.5 Jumlah tenaga kependidikan yang mendapatkan peningkatan kompetensi	Orang	N/A	0	100	125	150	200						
IKRO.5101.SCI.001.6 Jumlah pemenuhan jumlah tenaga kependidikan pada jenjang jabatan fungsional	Orang	N/A	0	100	125	150	200						
RO.5101.DCI.001 Pelatihan Peningkatan Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan pada PTK Kristen	Orang	N/A	2.680	3.360	3.450	3.800	4.200	123	2.000	2.200	2.400	2.600	
IKRO.5101.DCI.001.1 Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti peningkatan Kompetensi	Orang	N/A	2.680	3.360	3.450	3.800	4.200						
RO.5101.PDI.001 Sertifikasi Kompetensi Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen	Orang	100	300	500	600	700	800	900	1.500	1.800	2.100	2.400	
IKRO.5101.PDI.001.1 Jumlah Dosen PTK Kristen yang mengikuti Sertifikasi Kompetensi	Orang	100	300	500	600	700	800						
RO.5101.BEA.001 Tunjangan Profesi Dosen Non ASN Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen	Orang	1.040	1.063	1.125	1.463	1.901	2.472	25.992	27.000	35.100	45.630	59.328	
IKRO.5101.BEA.001.1 Jumlah Dosen Non ASN PTK Kristen Penerima Tunjangan Profesi	Orang	1.040	1.063	1.125	1.463	1.901	2.472						
SK.5101.5 Meningkatnya kualitas lulusan PTK Kristen yang diterima di dunia kerja													
IKSK.5101.5.1 Persentase lulusan PTK Kristen (berkualifikasi S1) dengan pengalaman 1 (satu) semester di luar kampus	Persen	5,00	7,00	9,00	10,00	11,00	12,00						
IKSK.5101.5.2 Persentase PTK Kristen yang memiliki Pusat Pengembangan Karir	Persen	N/A	0,00	0,26	0,51	0,77	1,02						
IKSK.5101.5.3 Persentase lulusan PTK Kristen yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	Persen												
a. Total	Persen	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00						
b. Karyawan atau Wirausaha	Persen	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00						
IKSK.5101.5.4 Persentase peningkatan mahasiswa PTK Kristen yang mengikuti program sertifikasi kompetensi/profesi	Persen	N/A	0,00	0,00	10,00	20,00	25,00						
IKSK.5101.5.5 Rasio Outbound per Inbound mahasiswa pada PTK Kristen	-	N/A	0,00	0,00	1:1	1:1	1:1						
IKSK.5101.5.6 Persentase mahasiswa PTK Kristen yang berkegiatan di luar program studi	Persen	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00						
RO.5101.BGC.001 Tata Kelola PTKKN melalui PNB	Lembaga	N/A	7	8	8	8	8	48.280	53.208	59.592	65.552	70.796	
IKRO.5101.BGC.001.1 Jumlah PTK yang memiliki Pusat Pengembangan Karir	Lembaga	N/A	0	1	2	3	4						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKRO.5101.BGC.01.2	Jumlah prodi yang menyelenggarakan sertifikasi profesi	Prodi	1	3	3	3	3						
RO.5101.SBA.001	Pengembangan Kegiatan Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Mahasiswa	Orang	0	0	900	1.111	1.304	1.908	-	6.480	7.500	10.000	12.500
IKRO.5101.SBA.01.1	Jumlah lulusan perguruan tinggi (berkualifikasi S1) dengan pengalaman 1 (satu) semester di luar kampus	Orang	100	140	180	200	220	240					
IKRO.5101.SBA.01.2	Jumlah lulusan PTK yang berhasil memiliki pekerjaan												
	a. Total	Orang	N/A	300	400	500	600	1.100					
	b. Karyawan atau Wirausaha	Orang	N/A	300	400	500	600	1.100					
IKRO.5101.SBA.01.4	Jumlah Mahasiswa PTK Kristen yang mengikuti sertifikat profesi atau kompetensi	Orang	N/A	0	100	110	132	165					
IKRO.5101.SBA.01.5	Jumlah mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa	Orang	N/A	0	0	1	2	3					
IKRO.5101.SBA.01.6	Jumlah mahasiswa PTK Kristen yang berkegiatan di luar program studi	Orang	N/A	0	220	300	350	400					
RO.5101.BEI.001	BOPTN Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen	Lembaga	7	8	8	8	8	8	40.190	48.431	54.531	60.693	67.031
IKRO.5101.BEI.001.1	Jumlah PTK yang mendapatkan BOPTN	Lembaga	7	8	8	8	8	8					
RO.5101.BEI.002	Bantuan Operasional PTK Kristen Swasta/Lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen	Lembaga	N/A	0	100	120	150	180	-	5.000	6.000	7.500	9.000
IKRO.5101.BEI.002.1	Jumlah PTK Swasta/Lembaga PTK Kristen yang mendapat Bantuan Operasional	Lembaga	N/A	0	100	120	150	180					
SK.5101.6	Meningkatnya kualitas pemanfaatan kerjasama PTK Kristen												
IKSK.5101.6.1	Persentase kerjasama PTK Kristen yang ditindaklanjuti di bidang												
	(a) Pendidikan dan pengajaran	Persen	5,00	10,00	30,00	50,00	70,00	85,00					
	(b) Penelitian dan publikasi	Persen	5,00	10,00	30,00	50,00	70,00	85,00					
	(c) Pengabdian kepada masyarakat	Persen	5,00	10,00	30,00	50,00	70,00	85,00					
RO.5101.AEC.051	Kerjasama Pengembangan Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen	Dokumen	5	30	30	30	30	30	1.301	2.000	3.000	4.000	5.000
IKRO.5101.AEC.051.1	Jumlah PTK Kristen yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri/pemerintah/lembaga masyarakat/internasional	Lembaga	5	5	15	26	35	42					
IKRO.5101.AEC.051.2	Jumlah kerjasama di bidang pendidikan dan pengajaran	Kerjasama	5	20	20	20	20	20					
IKRO.5101.AEC.051.3	Jumlah kerjasama di bidang penelitian dan publikasi	Kerjasama	5	10	10	10	10	10					
RO.5101.DCI.003	Pengabdian Masyarakat	Kegiatan	N/A	20	20	20	20	20	2.712	3.375	4.050	4.725	5.030
IKRO.5101.DCI.003.1	Jumlah kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat	Kerjasama	N/A	20	20	20	20	20					
SK.5101.7	Meningkatnya budaya akademik PTK Kristen yang religious dan toleran												
IKSK.5101.7.1	Persentase mahasiswa PTK Kristen yang	Orang	0,00	12,00	15,00	18,00	20,00	25,00					

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	mengikuti program peningkatan literasi Kitab Suci													
RO.5101.SBA.002	Mahasiswa PTK Kristen yang mendapatkan Pendidikan Karakter dan Kewarganegaraan dalam Program Peningkatan Literasi Kitab Suci	Orang	N/A	0	880	1.056	1.173	1.467	-	5.500	8.800	9.200	10.500	
IKRO.5101.SBA.002.1	Jumlah mahasiswa PTK Kristen yang mengikuti kegiatan literasi Kitab Suci	Orang	N/A	0	880	1.056	1.173	1.467						
RO.5101.PDD.002	Pengembangan Kurikulum Pembelajaran dan Pusat Kajian Keagamaan Kristen pada Satuan Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen	Lembaga	N/A	0	8	10	12	14	-	3.000	3.500	4.000	6.000	
IKRO.5101.PDD.002.1	Jumlah prodi pada PTK Kristen yang mengimplementasikan integrasi keilmuan	Prodi	96	115	144	173	192	241						
IKRO.5101.PDD.002.2	Jumlah PTK Kristen yang mengembangkan pusat-pusat kajian keagamaan sesuai kebutuhan lokal	Lembaga	N/A	0	8	10	12	14						
SK.5101.8	Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian PTK Kristen													
IKSK.5101.8.1	Persentase publikasi ilmiah bereputasi internasional PTK Kristen yang disitasi	Persen	N/A	10,00	10,00	10,00	15,00	20,00						
IKSK.5101.8.2	Jumlah karya tulis ilmiah PTK Kristen berorientasi SDGs yang terpublikasi di Jurnal Internasional bereputasi	Karya Tulis	N/A	0,00	2,00	4,00	6,00	8,00						
IKSK.5101.8.3	Jumlah Paten Granted PTK Kristen	Paten	5,00	8,00		12,00	15,00	20,00						
IKSK.5101.8.4	Jumlah hasil riset dan inovasi PTK Kristen yang dimanfaatkan DUDI/Masyarakat	Produk	3,00	5,00	7,00	8,00	10,00	12,00						
IKSK.5101.8.5	Jumlah Lembaga Penelitian dan Pengabdian ke Masyarakat (LPPM) PTK Kristen yang ditingkatkan kapasitasnya	Lembaga	7,00	7,00	7,00	8,00	8,00	8,00						
RO.5101.DCI.002	Penelitian	Orang	N/A	128	137	147	157	172	500	500	600	700	1.000	
IKRO.5101.DCI.002.1	Jumlah karya tulis ilmiah yang bereputasi nasional	Karya Tulis	N/A	5	10	15	20	25						
IKRO.5101.DCI.002.2	Jumlah publikasi ilmiah PTK Kristen bereputasi internasional	Publikasi	N/A	10	10	20	40	50						
IKRO.5101.DCI.002.3	Jumlah karya tulis ilmiah PTK Kristen berorientasi SDGs untuk dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi	Karya Tulis	N/A	0	2	4	6	8						
IKRO.5101.DCI.002.4	Jumlah Kekayaan Intelektual PTK Kristen yang didaftarkan	Dokumen	N/A	0	2	4	6	8						
IKRO.5101.DCI.002.5	Jumlah hasil riset dan inovasi PTK Kristen	Dokumen	N/A	0	2	4	6	8						
RO.5101.QEI.001	BOPTN Penelitian PTK Kristen	Lembaga	N/A	7	7	8	8	8	-	8.000	10.000	12.000	15.000	
IKRO.5101.QEI.001.1	Jumlah Lembaga Penelitian dan Pengabdian ke Masyarakat (LPPM) yang ditingkatkan kapasitasnya	Lembaga	7,00	7	7	8	8	8						
2131 Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Katolik									91.514	114.855	132.354	152.426	176.105	[BIMAS KATOLIK] Direktorat Pendidikan

[illegible]

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.2131.2.1	Persentase mahasiswa PTK Katolik penerima beasiswa	Persen	9,39	29,68	29,68	31,03	32,38	33,72					
IKSK.2131.2.2	Persentase mahasiswa PTK Katolik kategori UKT kelompok I	Persen	N/A	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00					
IKSK.2131.2.3	Persentase mahasiswa baru PTK Katolik yang berkuliah di perguruan tinggi berkualitas	Persen	44,00	45,00	46,02	47,02	47,99	48,98					
RO.2131.BEN.001	Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) Mahasiswa PTK Katolik	Orang	N/A	2.150	2.473	2.843	3.270	3.760	5.160	5.935	6.823	7.848	9.024
IKRO.2131.BEN.01.1	Jumlah mahasiswa pada PTK Katolik penerima Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)	Orang	N/A	2.150	2.473	2.843	3.270	3.760					
IKRO.2131.BEN.01.2	Jumlah mahasiswa baru yang berkuliah di PTK Katolik berkualitas	Orang	N/A	550	577	606	697	732					
RO.2131.BEN.002	Beasiswa Prestasi Mahasiswa PTK Negeri Katolik	Orang	N/A	9	10	12	14	16	405	450	540	630	720
IKRO.2131.BEN.02.1	Jumlah mahasiswa PTK negeri Katolik penerima Beasiswa Prestasi	Orang	N/A	9	12	15	18	21					
IKRO.2131.BEN.02.2	Jumlah mahasiswa PTK negeri Katolik kategori UKT Kelompok I	Orang	N/A	604	705	805	902	1.005					
RO.2131.QEN.004	Mahasiswa penerima KIP Kuliah PTK Katolik	Orang	N/A	2.769	0	0	0	0	18.968	0	0	0	0
IKRO.2131.QEN.04.1	Jumlah Mahasiswa PTK Katolik penerima KIP Kuliah	Orang	N/A	2.769	0	0	0	0					
SK.2131.3	Meningkatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi PTK Katolik												
IKSK.2131.3.1	Jumlah PTK Katolik yang terpetakan berdasarkan keunggulannya	Lembaga	N/A	0	2	2	2	2					
IKSK.2131.3.2	Persentase Prodi PTK Katolik yang mendapatkan akreditasi unggul	Persen	N/A	0,00	0,00	0,00	2,78	5,56					
IKSK.2131.3.3	Persentase Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Katolik yang terakreditasi	Persen	100,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00					
IKSK.2131.3.4	Persentase Prodi Pendidikan Profesi Guru (PPG) Katolik yang terakreditasi unggul	Persen	N/A	0,00	0,00	0,00	25,00	50,00					
RO.2131.BEI.001	Lembaga PTK Katolik yang ditingkatkan mutunya	Lembaga	N/A	49	23	23	23	23	10.311	6.450	8.050	9.718	11.463
IKRO.2131.BEI.001.1	Jumlah pemetaan keunggulan PTK Katolik	Dokumen	N/A	0	1	1	1	1					
RO.2131.BEI.005	Fasilitasi Perubahan Status PTK Swasta Katolik	Lembaga	N/A	0	3	3	3	3	0	1.000	1.150	1.323	1.521
IKRO.2131.BEI.005.1	Jumlah PTK Katolik yang mendapatkan pembinaan standar mutu untuk perubahan status	Lembaga	N/A	0	1	0	2	3					
RO.2131.PDD.002	Pembinaan Standar Mutu Prodi PTK Katolik	Lembaga	N/A	0	23	23	23	25	0	2.645	3.042	3.498	4.373
IKRO.2131.PDD.02.1	Jumlah PTK Katolik yang mendapat pembinaan standar mutu	Lembaga	N/A	0	23	23	23	25					
RO.2131.PDE.001	Akreditasi Prodi/lembaga PTK Katolik	Lembaga	N/A	11	11	11	11	11	1.550	2.885	3.450	3.968	4.563
IKRO.2131.PDE.01.1	Jumlah Prodi pada PTK Katolik yang mendapatkan akreditasi	Prodi	N/A	0	0	0	1	2					

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) /SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKRO.2131.PDE.01.2	Jumlah PTK Katolik yang mendapatkan akreditasi	Lembaga	N/A	24	24	24	24	24					
IKRO.2131.PDE.01.3	Jumlah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) PTK Katolik yang terakreditasi	Lembaga	N/A	2	4	5	6	7					
IKRO.2131.PDE.01.4	Jumlah program studi Program Profesi Guru (PPG) PTK Katolik yang terakreditasi	Prodi	N/A	0	0	0	1	2					
IKRO.2131.PDE.01.5	Jumlah PTK Katolik yang mendapatkan pembinaan standar mutu	Lembaga	N/A	24	24	24	24	24					
SK.2131.4	Terpenuhinya kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan PTK Katolik sesuai dengan standar minimal												
IKSK.2131.4.1	Persentase dosen PTK Katolik berkualifikasi akademik S3	Persen	N/A	28,53	28,73	29,32	30,40	32,21					
IKSK.2131.4.2	Persentase dosen PTK Katolik yang mempunyai pengalaman di luar kampus	Persen	N/A	4,41	8,45	12,33	16,00	19,48					
IKSK.2131.4.3	Persentase dosen PTK Katolik yang menduduki jabatan lektor/lektor kepala/guru besar	Persen	61,00	63,82	66,76	70,41	73,87	79,74					
IKSK.2131.4.4	Persentase dosen dan tenaga kependidikan PTK Katolik yang mengikuti program peningkatan kompetensi	Persen	40,00	18,45	47,18	56,89	66,60	76,31					
IKSK.2131.4.5	Rasio dosen asing dengan dosen dalam negeri pada PTK Katolik	-	N/A	01:26	01:23	01:21	01:19	01:18					
IKSK.2131.4.6	Persentase pemenuhan jumlah tenaga kependidikan pada PTK Katolik jenjang jabatan fungsional	Persen	22,40	20,00	25,00	33,33	50,00	66,67					
RO.2131.ADG.001	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Dosen PTK Negeri Katolik	Orang	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IKRO.2131.ADG.01.1	Jumlah dosen PTK Negeri Katolik yang mengikuti program peningkatan kompetensi	Orang	N/A	0	0	0	0	0					
RO.2131.ADG.002	Dosen dan Tenaga Kependidikan PTK Katolik yang mengikuti peningkatan Kompetensi	Orang	N/A	76	76	101	116	133	1.545	1.700	1.955	2.248	2.585
IKRO.2131.ADG.02.1	Jumlah dosen PTK Katolik Negeri yang mempunyai pengalaman di luar kampus	Orang	N/A	2	5	7	9	11					
IKRO.2131.ADG.02.2	Jumlah dosen dan tenaga kependidikan PTK Katolik Negeri yang mengikuti program peningkatan kompetensi	Orang	N/A	40	45	45	45	45					
IKRO.2131.ADG.02.3	Jumlah dosen PTK Katolik Negeri yang menjadi Narasumber Konferensi nasional maupun internasional	Orang	N/A	2	2	2	2	2					
IKRO.2131.ADG.02.4	Jumlah dosen asing yang difasilitasi dalam penguatan lembaga PTK Katolik Negeri	Orang	N/A	2	2	2	2	2					
RO.2131.BEA.001	Tunjangan Profesi Dosen Non ASN pada PTK Katolik	Orang	N/A	206	237	272	313	360	8.137	9.362	10.744	12.364	14.220
IKRO.2131.BEA.01.1	Jumlah dosen Non ASN penerima Tunjangan Profesi pada PTK Katolik	Orang	N/A	206	237	272	313	360					
RO.2131.PDG.00	Dosen PTK Katolik yang tersertifikasi	Orang	N/A	20	22	22	22	22	80	88	88	88	88

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1													
IKRO.2131.PDG.01.1Jumlah dosen PTK Katolik yang tersertifikasi	Orang	N/A	20	23	26	30	35						
RO.2131.PDG.002Dosen dan Tenaga Kependidikan PTK Katolik yang mengikuti peningkatan Kompetensi	Orang	N/A	200	200	200	200	120	4.065	3.450	3.960	4.560	5.250	
IKRO.2131.PDG.02.1Jumlah dosen asing dalam rangka penguatan lembaga PTK Katolik	Orang	N/A	11	11	11	11	11						
IKRO.2131.PDG.02.2Jumlah dosen dan tenaga kependidikan PTK Katolik Swasta yang mendapatkan peningkatan kompetensi	Orang	N/A	55	198	248	298	348						
IKRO.2131.PDG.02.3Jumlah dosen PTK Katolik Swasta yang difasilitasi kegiatan di luar kampus	Orang	N/A	15	30	45	60	75						
RO.2131.QEN.002Dosen PTK Katolik penerima Beasiswa gelar S3	Orang	N/A	65	68	72	75	77	2.810	3.128	3.600	4.125	4.620	
IKRO.2131.QEN.02.1Jumlah dosen PTK Katolik penerima beasiswa gelar S3	Orang	N/A	65	68	72	75	77						
RO.2131.SCI.001Pelatihan Peningkatan Kompetensi Dosen PTK Katolik	Orang	N/A	0	115	132	152	175	0	1.725	1.980	2.280	2.625	
IKRO.2131.SCI.001.1Jumlah dosen PTK Katolik mengikuti program peningkatan kompetensi	Orang	N/A	0	130	180	230	280						
IKRO.2131.SCI.001.2Jumlah dosen PTK Katolik negeri yang difasilitasi berkegiatan di luar kampus	Orang	N/A	0	30	35	40	45						
IKRO.2131.SCI.001.3Jumlah dosen PTK Katolik yang menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional	Orang	N/A	0	48	72	96	120						
IKRO.2131.SCI.001.4Jumlah dosen PTK Katolik yang memperoleh kenaikan jabatan akademik	Orang	N/A	0	35	40	45	50						
IKRO.2131.SCI.001.5Jumlah dosen asing PTK Katolik yang difasilitasi dalam layanan peningkatan pendidikan tinggi	Orang	N/A	0	15	17	19	21						
RO.2131.SCI.002Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan PTK Katolik	Orang	N/A	0	115	132	152	175	0	1.725	1.980	2.280	2.625	
IKRO.2131.SCI.002.1Jumlah tenaga kependidikan PTK Katolik yang mendapatkan peningkatan kompetensi	Orang	N/A	0	48	48	48	48						
IKRO.2131.SCI.002.2Jumlah tenaga kependidikan PTK Katolik pada jenjang jabatan fungsional	Orang	N/A	0	18	27	36	45						
SK.2131.5Meningkatnya kualitas lulusan PTK Katolik yang diterima di dunia kerja													
IKSK.2131.5.1Persentase PTK Katolik yang memiliki Pusat Pengembangan Karir	Persen	N/A	5,00	20,00	35,00	50,00	65,00						
IKSK.2131.5.2Persentase lulusan PTK Katolik yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan:	Persen												
a. Total	Persen	N/A	90,72	92,59	93,95	95,00	95,03						
b. Karyawan atau Wirausaha	Persen	N/A	80,00	82,00	83,00	84,00	85,00						
IKSK.2131.5.3Persentase mahasiswa PTK Katolik yang mendapat sertifikat profesi atau kompetensi	Persen	97,81	95,00	96,00	96,00	96,50	97,00						
IKSK.2131.5.4Rasio Outbound per Inbound mahasiswa PTK Katolik	-	N/A	0,00	0,00	0,00	1:1	2:1						
IKSK.2131.5.5Persentase mahasiswa PTK Katolik yang	Persen	N/A	0,00	9,31	10,86	12,41	13,96						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) /SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /INDIKATOR		SATUAN	BASE- LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	berkegiatan di luar program studi/ Kampus													
RO.2131.PEF.002	Pembinaan Kompetensi Mahasiswa pada lembaga PTK Katolik	Orang	N/A	0	240	240	240	240	0	1.000	1.150	1.323	1.521	
IKRO.2131.PEF.02.1	Jumlah PTK Katolik yang memiliki Pusat Pengembangan Karir	Lembaga	N/A	0	4	7	10	13						
IKRO.2131.PEF.02.2	Jumlah lulusan PTK Katolik yang berhasil memiliki pekerjaan	Orang	N/A	0	900	916	931	936						
IKRO.2131.PEF.02.3	Jumlah mahasiswa PTK Katolik yang mengikuti sertifikasi kompetensi/profesi	Orang	N/A	5.500	4.992	420	455	490						
IKRO.2131.PEF.02.4	Jumlah mahasiswa PTK Katolik yang mengikuti program pertukaran mahasiswa	Orang	N/A	0	0	0	0	1						
IKRO.2131.PEF.02.5	Jumlah mahasiswa PTK Katolik yang berkegiatan di luar program studi	Orang	N/A	0	20	20	20	20						
RO.2131.SBA.001	Pengembangan Kapasitas Mahasiswa PTK Katolik	Orang	N/A	0	170	196	225	250	0	1.000	1.150	1.323	1.521	
IKRO.2131.SBA.01.1	Jumlah mahasiswa PTK Katolik yang mendapat pembinaan untuk pengembangan kapasitas	Orang	N/A	0	170	196	225	250						
SK.2131.6	Meningkatnya kualitas pemanfaatan kerjasama PTK Katolik													
IKSK.2131.6.1	Persentase PTK Katolik yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri/pemerintah/ Lembaga Masyarakat /Internasional	Persen	30,00	45,00	60,00	75,00	90,00	95,00						
IKSK.2131.6.2	Persentase kerjasama PTK Katolik yang ditindaklanjuti di bidang:													
	a. pendidikan dan pengajaran	Persen	N/A	43,47	53,33	64,10	74,07	83,33						
	b. penelitian dan publikasi	Persen	N/A	24,31	45,33	65,38	80,25	86,90						
	c. Pengabdian kepada masyarakat	Persen	N/A	33,19	44,00	55,13	71,60	80,95						
RO.2131.DDC.002	Pengabdian Kepada Masyarakat pada PTK Katolik	Desain	N/A	30	53	53	53	53	900	3.335	3.490	3.669	3.874	
IKRO.2131.DDC.02.1	Jumlah PTK Katolik yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri/pemerintah/ Lembaga Masyarakat /Internasional	Lembaga	N/A	3	6	9	12	14						
IKRO.2131.DDC.02.2	Jumlah PTK Katolik melakukan kerjasama di bidang: a) pendidikan dan pengajaran, b) penelitian dan publikasi, c) pengabdian kepada masyarakat	Lembaga	N/A	24	24	24	24	24						
SK.2131.7	Meningkatnya budaya akademik yang religious dan toleran pada PTK Katolik													
IKSK.2131.7.1	Persentase mahasiswa PTK Katolik yang mengikuti program peningkatan literasi Kitab Suci	Persen	N/A	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00						
IKSK.2131.7.2	Persentase PTK Katolik yang mengembangkan literasi keagamaan	Persen	N/A	20,83	29,17	37,50	45,83	54,17						
RO.2131.PDD.001	Penguatan Kurikulum dan Pembelajaran PTK Katolik	Lembaga	N/A	0	1	2	3	5	0	1.500	1.725	1.984	2.281	
IKRO.2131.PDD.01.1	Jumlah PTK Katolik yang melakukan Penguatan Kurikulum dan	Lembaga	N/A	0	23	23	23	23						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) /SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Pembelajaran													
RO.2131.PEF.001 Mahasiswa PTK Katolik yang mendapat pendidikan karakter dan kewarganegaraan	Orang	N/A	500	625	781	977	1.200	2.200	4.513	5.345	6.332	5.793	
IKRO.2131.PEF.01.1 Jumlah mahasiswa PTK Katolik yang mengkaji dan mempraktikkan nilai-nilai Kitab Suci	Orang	N/A	7.413	8.916	10.540	12.315	14.278						
IKRO.2131.PEF.01.2 Jumlah Prodi PTK Katolik yang difasilitasi integrasi keilmuan	Prodi	N/A	6	12	18	24	30						
IKRO.2131.PEF.01.3 Jumlah PTK Katolik yang mengembangkan pusat-pusat kajian keagamaan sesuai kebutuhan lokal	Lembaga	N/A	3	6	10	14	20						
SK.2131.8 Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian pada PTK Katolik													
IKSK.2131.8.1 Persentase publikasi ilmiah bereputasi internasional PTK Katolik yang disitasi	Persen	18	18	18	25	25	31						
IKSK.2131.8.2 Jumlah karya tulis ilmiah PTK Katolik berorientasi SDGs yang terpublikasi di Jurnal Internasional bereputasi	Karya Tulis	N/A	1	3	4	5	6						
IKSK.2131.8.3 Jumlah Paten Granted PTK Katolik	Paten	98	100	102	104	106	108						
IKSK.2131.8.4 Jumlah hasil riset dan inovasi PTK Katolik yang dimanfaatkan DUDI/Masyarakat	Produk	N/A	1	2	3	4	5						
IKSK.2131.8.5 Jumlah Lembaga Penelitian dan Pengabdian ke Masyarakat (LPPM) PTK Katolik yang ditingkatkan kapasitasnya	Lembaga	N/A	24	24	24	24	24						
RO.2131.BEI.004 BOPTN Non Penelitian PTK Katolik	Lembaga	N/A	50	1	1	1	1	3.083	6.000	7.000	8.000	9.200	
IKRO.2131.BEI.004.1 Jumlah Lembaga Penelitian dan Pengabdian ke Masyarakat (LPPM) PTK Katolik Negeri yang ditingkatkan kapasitasnya	Lembaga	N/A	1	1	1	1	1						
RO.2131.DDC.001 Model Penelitian Perguruan Tinggi Keagamaan Katolik	Model	N/A	50	50	50	50	50	2.000	2.300	2.645	3.042	3.498	
IKRO.2131.DDC.01.1 Jumlah karya tulis ilmiah berorientasi SDGs PTK Katolik yang terpublikasi di jurnal internasional bereputasi yang disitasi	Karya Tulis	N/A	1	1	2	2	3						
IKRO.2131.DDC.01.2 Jumlah Kekayaan Intelektual PTK Katolik yang didaftarkan	HAKI	N/A	88	89	90	91	92						
IKRO.2131.DDC.01.3 Jumlah hasil riset dan inovasi PTK Katolik	Riset	N/A	1	2	3	4	5						
RO.2131.DDC.003 Model Penelitian PTK Katolik Berorientasi SDGS	Desain	N/A	0	23	23	23	23	0	2.300	2.500	3.000	3.100	
IKRO.2131.DDC.03.1 Jumlah Penelitian PTK Katolik Berorientasi SDGS	Karya Ilmiah	N/A	0	2	3	4	5						
RO.2131.QEI.001 BOPTN Penelitian PTK Katolik	Lembaga	N/A	0	1	1	1	1	0	1.965	2.260	2.599	2.989	
IKRO.2131.QEI.001.1 Jumlah publikasi ilmiah dosen PTK Katolik Negeri	Karya Ilmiah	N/A	0	2	2	2	2						
IKRO.2131.QEI.001.2 Jumlah kekayaan intelektual PTK Katolik Negeri yang didaftarkan	HAKI	N/A	0	1	1	1	1						
IKRO.2131.QEI.001.3 Jumlah hasil riset dan inovasi PTK Katolik Negeri	Riset	N/A	0	1	1	1	1						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
5104 Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Hindu									206.332	289.647	302.693	316.939	322.999	[BIMAS HINDU] Direktorat Pendidikan Hindu
SK.5104.1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana PTK Hindu													
IKSK.5104.1.1	Persentase PTK Hindu yang memenuhi standar sarana prasarana	Persen	N/A	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00						
IKSK.5104.1.3	Persentase PTK Hindu yang menyediakan fasilitas yang mendukung Pendidikan Tinggi inklusif	Persen	N/A	29	36	43	50	57						
RO.5104.BEO.001	Sarana PTKH Swasta	Lembaga	4	8	8	8	8	8	900	4.000	5.000	5.000	5.000	
IKRO.5104.BEO.01.01	Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu swasta yang memperoleh peningkatan sarana pembelajaran	Lembaga	N/A	3	4	5	6	7						
IKRO.5104.BEO.01.02	Jumlah Layanan Disabilitas (ULD) yang disediakan	Layanan	N/A	3	4	5	6	7						
RO.5104.CAA.001	Pengadaan Sarana Pendidikan Tinggi Keagamaan Hindu	Unit	400	860	810	810	810	810	5.100	7.100	8.100	8.100	8.100	
IKRO.5104.CAA.01.01	Jumlah pengadaan Sarana Pendidikan Tinggi Keagamaan Hindu	Unit	400	860	810	810	810	810						
RO.5104.CAN.001	Pengadaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	Unit	10	14	55	55	55	55	505	2.000	2.000	2.000	2.000	
IKRO.5104.CAN.01.01	Jumlah pengadaan Sarana Teknologi Informasi yang di sediakan PTK Hindu	Unit	10	14	55	55	55	55						
RO.5104.CBJ.001	Prasarana Pendidikan Tinggi Keagamaan Hindu	Unit	2	11	11	11	11	11	80.429	180.000	180.000	185.000	190.000	
IKRO.5104.CBJ.01.01	Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu yang memperoleh bantuan Prasarana pembelajaran (pembangunan atau rehabilitasi ruang kelas perkuliahan, laboratorium, perpustakaan, asrama mahasiswa, tempat ibadah, sanitasi dan fasilitas penunjang digitalisasi)	Lembaga	2	4	6	6	6	6						
SK.5104.2	Meningkatnya layanan PTK Hindu yang terjangkau													
IKSK.5104.2.1	Persentase mahasiswa penerima beasiswa	Persen	47,51	48,56	48,60	48,65	48,69	48,73						
IKSK.5104.2.2	Persentase mahasiswa baru PTK Hindu yang Berkuliah di Perguruan Tinggi Berkualitas	Persen	N/A	33,43	34,00	35,00	36,00	37,00						
RO.5104.BEN.002	Mahasiswa penerima beasiswa PPA	Orang	1.800	2.050	2.170	2.260	2.350	2.440	4.125	5.425	5.650	5.875	6.100	
IKRO.5104.BEN.02.01	Jumlah Mahasiswa PTK Hindu penerima beasiswa PPA	Orang	1.800	2.070	2.200	2.300	2.400	2.500						
IKRO.5104.BEN.02.02	Persentase mahasiswa baru yang berkuliah di perguruan tinggi berkualitas	Persen	N/A	33,43	34,00	35,00	36,00	37,00						
RO.5104.QEN.001	Mahasiswa penerima KIP Kuliah	Orang	3.955	3.981	0	0	0	0	41.356	0	0	0	0	
IKRO.5104.QEN.01.01	Jumlah Mahasiswa penerima KIP Kuliah	Orang	3.955	4.021	0	0	0	0						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) /SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK.5104.3 Meningkatkan kapasitas dan akselerasi akreditasi PTK Hindu													
IKSK.5104.3.1 Jumlah perguruan tinggi Hindu yang terpetakan berdasarkan keunggulannya	Lembaga	N/A	1	1	2	2	2						
IKSK.5104.3.2 Persentase Prodi pada PTK Hindu yang mendapatkan akreditasi unggul	Persen	12,96	13,89	14,81	15,74	16,67	17,59						
IKSK.5104.3.3 Persentase Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) pada PTK Hindu yang terakreditasi	Persen	100,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00						
IKSK.5104.3.4 Persentase program studi Program Profesi Guru (PPG) pada PTK Hindu yang terakreditasi unggul	Persen	N/A	0,00	0,00	25,00	25,00	50,00						
RO.5104.ADE.00 Akreditasi Prodi/lembaga Pendidikan 1 Tinggi Keagamaan Negeri	Lembaga	24	29	23	23	23	23	3.413	3.500	3.500	3.700	3.850	
IKRO.5104.ADE.0 01.01 Jumlah perguruan tinggi keagamaan yang terpetakan berdasarkan keunggulannya	Lembaga	1	1	1	2	2	2						
IKRO.5104.ADE.0 01.02 Jumlah Prodi yang mendapatkan akreditasi unggul	Prodi	14	14	14	14	14	14						
IKRO.5104.ADE.0 01.03 Jumlah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasi	Lembaga	2	4	4	4	4	4						
IKRO.5104.ADE.0 01.04 Jumlah program studi Program Profesi Guru (PPG) yang terakreditasi unggul	Prodi	0	0	0	0	1	1						
IKRO.5104.ADE.0 01.05 Jumlah PTK yang mendapatkan pembinaan standar mutu	Lembaga	14	14	14	14	14	14						
SK.5104.4 Terpenuhinya kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan PTK Hindu sesuai dengan standar minimal													
IKSK.5104.4.1 Persentase dosen berkualifikasi akademik S3													
a. Total	Persen	N/A	20,00	20,65	21,94	22,58	23,23						
b. STEM	Persen	N/A	4,80	5,00	7,00	9,00	11,00						
c. Non STEM	Persen	N/A	15,19	16,00	18,00	20,00	22,00						
IKSK.5104.4.2 Persentase dosen PTK Hindu yang mempunyai pengalaman di luar kampus	Persen	N/A	3,23	4,52	5,81	7,10	8,39						
IKSK.5104.4.3 Persentase dosen PTK Hindu yang menduduki jabatan lektor/lektor kepala/guru besar	Persen	N/A	71,70	71,96	72,23	72,50	72,76						
IKSK.5104.4.4 Persentase dosen dan tenaga kependidikan PTK Hindu yang mendapatkan program peningkatan kompetensi	Persen	N/A	22,20	23,29	24,38	25,47	26,56						
IKSK.5104.4.5 Rasio dosen asing dengan dosen dalam negeri pada PTK Hindu	-	N/A	1:774	1:387	1:387	1:387	1:258						
IKSK.5104.4.6 Persentase pemenuhan jumlah tenaga kependidikan PTK Hindu pada jenjang jabatan fungsional	Persen	N/A	66,15	66,73	67,70	68,67	69,63						
RO.5104.BEA.003 Tunjangan Profesi Dosen Non PNS	Orang	100	74	58	65	70	80	2.490	2.500	2.650	2.800	3.475	
IKRO.5104.BEA.0 03.01 Jumlah dosen yang menduduki jabatan lektor/lektor kepala/guru besar	Orang	430	536	545	555	565	575						
RO.5104.SCI.001 Dosen dan Tenaga Kependidikan	Orang	99	99	145	190	270	360	1.324	1.650	1.950	2.250	2.700	

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	PTKH yang di tingkatkan kompetensi												
IKRO.5104.SCI.001.01	Jumlah dosen PTK Hindu yang tersertifikasi	Orang	480	589	600	610	620	630					
IKRO.5104.SCI.001.02	Jumlah dosen PTK Hindu yang mempunyai pengalaman di luar kampus	Orang	312	324	334	345	355	365					
IKRO.5104.SCI.001.03	Jumlah dosen PTK Hindu yang menduduki jabatan lektor/lektor kepala/guru besar	Orang	524	536	545	555	565	575					
IKRO.5104.SCI.001.04	Jumlah dosen PTK Hindu yang mengikuti program peningkatan kompetensi	Orang	275	283	295	305	315	325					
IKRO.5104.SCI.001.05	Jumlah Dosen PTK Hindu yang menjadi Narasumber Konferensi nasional maupun internasional	Orang	50	53	55	60	65	70					
IKRO.5104.SCI.001.06	Jumlah Dosen asing yang difasilitasi dalam penguatan layanan pendidikan tinggi Hindu	Orang	1	1	1	1	1	1					
RO.5104.SCI.003	Tenaga Kependidikan PTKH yang ditingkatkan Kompetensinya	Orang	N/A	0	5	5	5	5	0	50	50	50	50
IKRO.5104.SCI.003.01	Jumlah Tenaga Kependidikan PTK Hindu yang ditingkatkan Kompetensinya	Orang	N/A	0	5	5	5	5					
RO.5104.DCI.001	Dosen dan Tenaga Kependidikan PTKH yang di tingkatkan kompetensi-PNPB	Orang	275	315	359	394	424	444	1	201	301	352	402
IKRO.5104.DCI.001.01	Jumlah pemenuhan jumlah tenaga kependidikan pada jenjang jabatan fungsional	Orang	300	355	355	355	355	355					
IKRO.5104.DCI.001.02	Jumlah tenaga kependidikan yang mendapatkan peningkatan kompetensi	Orang	300	22	25	30	35	40					
RO.5104.DCI.003	Tenaga Kependidikan PTKH yang ditingkatkan Kompetensinya	Orang	N/A	15	26	27	27	27	150	265	270	270	270
IKRO.5104.DCI.003.01	Jumlah Tenaga Kependidikan PTKH yang ditingkatkan Kompetensinya	Orang	N/A	20	20	20	20	20					
RO.5104.QEN.006	Dosen PTKH penerima Beasiswa gelar S3	Orang	46	30	19	15	15	15	1.615	950	772	772	772
IKRO.5104.QEN.006.01	Jumlah dosen berkualifikasi akademik S3 (a) total (b) STEM (c) non STEM		23132 28	2313 228	23332 30	2354 231	237423 3	240523 5					
SK.5104.5	Meningkatnya kualitas lulusan PTK Hindu yang diterima di dunia kerja												
IKSK.5104.5.1	Persentase lulusan perguruan tinggi (berkualifikasi S1) dengan pengalaman 1 (satu) semester di luar kampus	Persen	8,00	11,6 7	17,50	23,3 3	29,17	35,00					
IKSK.5104.5.2	Persentase PTK yang memiliki Pusat Pengembangan Karir	Persen	N/A	0,00	7,14	21,4 3	28,57	35,71					
IKSK.5104.5.3	Persentase lulusan Pendidikan Tinggi Keagamaan Hindu yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 Tahun setelah kelulusan	Persen											
a. Total		Persen	N/A	90,0	90,00	90,0	90,00	90,00					

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) /SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	b. Karyawan/Wirusaha	Persen	N/A	0 80,0 0	80,00	0 80,0 0	80,00	80,00					
IKSK.5104.5.4	Persentase peningkatan mahasiswa PTK Hindu yang mendapatkan sertifikasi kompetensi/profesi	Persen	10,00	10,7 7	11,54	12,3 1	13,08	13,85					
IKSK.5104.5.5	Rasio Outbound per Inbound mahasiswa PTK Hindu	Rasio	N/A	5:1	4:1	4:1	3:1	3:1					
IKSK.5104.5.6	Persentase mahasiswa PTK Hindu yang berkegiatan di luar program studi	Persen	N/A	11,4 9	13,92	17,9 6	22,01	26,05					
RO.5104.BEI.002	Lembaga Pendidikan tinggi keagamaan yang ditingkatkan mutunya	Lembaga	14	17	17	17	17	17	10.659	17.100	20.100	21.500	21.500
IKRO.5104.BEI.002.01	Jumlah lulusan PTK Hindu (berkualifikasi S1) dengan pengalaman 1 (satu) semester di luar kampus	Orang	80	93	100	110	120	130					
IKRO.5104.BEI.002.02	Jumlah PTK Hindu yang memiliki Pusat Pengembangan Karir	Lembaga	6	6	7	8	8	9					
IKRO.5104.BEI.002.03	Jumlah lulusan PTK Hindu yang berhasil memiliki pekerjaan : a. Karyawan b. Wirusaha	Orang	542 108	553 113	555 115	555 115	555 115	555 115					
IKRO.5104.BEI.002.04	Jumlah lulusan PTK Hindu yang mendapat sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi bereputasi	Orang	150	183	185	187	190	195					
IKRO.5104.BEI.002.05	Jumlah prodi yang menyelenggarakan sertifikasi profesi	Lembaga	2	4	4	4	4	5					
IKRO.5104.BEI.002.06	Jumlah peningkatan mahasiswa PTK Hindu yang mengikuti program sertifikasi profesi	Orang	10	10	10	10	10	10					
IKRO.5104.BEI.002.07	Jumlah mahasiswa PTK Hindu yang mengikuti program <i>outbond</i> per <i>inbound</i>	Orang	10	23	24	25	27	30					
IKRO.5104.BEI.002.08	Jumlah mahasiswa PTK Hindu yang berkegiatan di luar program studi	Orang	1.300	1.34 6	1.350	1.36 0	1.370	1.380					
RO.5104.DBA.002	Mahasiswa yang mengikuti Kompetisi Olimpiade Sains dan Teknologi	Orang	N/A	360	360	360	360	360	8.800	8.850	8.900	8.900	8.900
IKRO.5104.DBA.002.01	Jumlah Mahasiswa PTK Hindu yang mengikuti Kompetisi Olimpiade Sains dan Teknologi	Orang	N/A	300	300	300	300	300					
SK.5104.6	Meningkatnya kualitas pemanfaatan kerjasama PTK Hindu												
IKSK.5104.6.1	Persentase PTK Hindu yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri/pemerintah/ Lembaga Masyarakat /Internasional yang ditindaklanjuti dibidang : a. pendidikan dan pengajaran	Persen	N/A	45,6 9	46,90	48,4 1	49,92	51,44					
	b. penelitian dan publikasi		N/A	21,6 3	22,69	23,4 5	24,21	24,96					
	c. pengabdian kepada masyarakat		N/A	40,0 9	40,85	41,6 0	42,36	43,12					

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) /SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
RO.5104.DCI.002	Pengabdian Masyarakat-PNBP	Orang	550	1.520	1.700	1.860	2.020	2.180	3.347	3.650	3.960	4.270	4.580	
IKRO.5104.DCI.002.01	Jumlah PTK Hindu yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri/pemerintah/ Lembaga Masyarakat /Internasional	Lembaga	8	11	11	12	12	13						
IKRO.5104.DCI.002.02	Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti di bidang pendidikan dan pengajaran pada PTK Hindu	Orang	220	250	255	260	265	270						
IKRO.5104.DCI.002.03	Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti di bidang penelitian dan publikasi pada PTK Hindu	Orang	120	150	155	160	165	170						
IKRO.5104.DCI.002.04	Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti di bidang pengabdian kepada masyarakat pada PTK Hindu	Orang	110	140	145	150	155	160						
	SK.5104.7Meningkatnya budaya akademik yang religious dan toleran pada PTK Hindu													
IKSK.5104.7.1	Persentase mahasiswa PTK Hindu yang mengikuti program peningkatan literasi Kitab Suci	Persen	N/A	64,29	64,29	71,43	78,57	85,71						
RO.5104.DBA.001	mahasiswa penerima layanan pendidikan	Orang	7.006	13.200	14.250	14.700	15.150	15.700	18.799	21.000	25.000	29.000	27.600	
IKRO.5104.DBA.001.01	Jumlah mahasiswa PTK Hindu yang mengikuti program peningkatan literasi Kitab Suci	Orang	1.205	1.427	1.450	1.465	1.475	1.500						
IKRO.5104.DBA.001.02	Jumlah prodi PTK Hindu yang mengimplementasikan integrasi keilmuan	Lembaga	52	60	62	65	67	70						
IKRO.5104.DBA.001.03	Jumlah PTK Hindu yang mengembangkan pusat-pusat kajian keagamaan sesuai kebutuhan lokal	Lembaga	13	13	14	14	14	14						
RO.5104.SCI.002	Pengabdian Masyarakat	Orang	N/A	0	416	441	466	466	0	3.020	2.780	2.890	2.890	
IKRO.5104.SCI.002.01	Jumlah Pengabdian Masyarakat yang dilakukan PTK Hindu	Orang		860	900	900	900	900						
	SK.5104.8Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian PTK Hindu													
IKSK.5104.8.1	Persentase publikasi ilmiah bereputasi internasional PTK Hindu yang disitasi	Persen	75,00	77,60	80,60	83,60	86,60	89,60						
IKSK.5104.8.2	Jumlah karya tulis ilmiah PTK Hindu berorientasi SDGs yang terpublikasi di Jurnal Internasional bereputasi	Jumlah Karya Tulis	N/A	29	36	43	50	57						
IKSK.5104.8.3	Jumlah Paten Granted Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu	Paten	N/A	2	3	4	5	6						
IKSK.5104.8.4	Persentase riset dan inovasi yang dimanfaatkan DUDI/masyarakat PTK Hindu	Produk	N/A	23	27	31	35	39						
IKSK.5104.8.5	Jumlah Lembaga Penelitian dan Pengabdian ke Masyarakat (LPPM) pada PTK Hindu yang ditingkatkan kapasitasnya	Lembaga	N/A	8	9	10	11	12						
RO.5104.BEI.001	BOPTN	Lembaga	4	5	5	5	5	5	15.422	16.475	17.150	17.600	17.900	
IKRO.5104.BEI.001	Jumlah Lembaga Penelitian dan	Lembaga	10	10	10	11	11	12						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) /SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR		SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1.1	Pengabdian ke Masyarakat (LPPM) PTK Hindu yang ditingkatkan kapasitasnya													
RO.5104.QEI.001	BOPTN Penelitian PTK Hindu Negeri	Lembaga	N/A	0	5	5	5	5	0	810	1.010	1.210	1.460	
IKRO.5104.QEI.001	Jumlah PTK Hindu yang mendapatkan BOPTN Penelitian	Lembaga	N/A	0	5	5	5	5						
RO.5104.DDD.001	Penelitian yang berkualitas	Kekayaan Intelektual	140	191	227	296	301	301	7.899	11.100	13.550	15.400	15.450	
IKRO.5104.DDD.001.01	Jumlah karya tulis ilmiah PTK Hindu yang bereputasi nasional	Karya Tulis Ilmiah	75	100	110	120	130	150						
IKRO.5104.DDD.001.02	Jumlah publikasi ilmiah bereputasi internasional PTK Hindu yang disitas	Publikasi Ilmiah	15	20	22	25	27	30						
IKRO.5104.DDD.001.03	Jumlah karya tulis ilmiah berorientasi SDGs yang terpublikasi di jurnal internasional bereputasi	Karya Tulis Ilmiah	2	5	5	5	5	5						
IKRO.5104.DDD.001.04	Jumlah Paten Granted karya tulis ilmiah Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu	Paten Granted	5	10	12	14	16	18						
IKRO.5104.DDD.001.05	Jumlah hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan DUDI/Masyarakat	Riset dan Inovasi	20	39	42	45	47	50						
5106 Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Buddha									110.389	98.631	103.559	108.661	114.162	[BIMAS BUDDHA] Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha
SK.5106.1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana PTK Buddha													
IKSK.5106.1.1	Persentase PTK Buddha yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
IKSK.5106.1.3	Persentase PTK Buddha yang menyediakan fasilitas yang mendukung Pendidikan Tinggi berbasis gender dan inklusif	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
RO.5106.CBJ.001	Bangunan/ Gedung PTK Buddha Negeri	Unit	2	2	2	2	2	2	74.000	72.000	75.600	79.380	83.349	
IKRO.5106.CBJ.001.1	Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha yang memperoleh bantuan Prasarana pembelajaran	Unit	2	2	2	2	2	2						
IKRO.5106.CBJ.001.2	Jumlah PTK Buddha yang memiliki Unit Layanan Disabilitas (ULD)	Lembaga	N/A	3	5	7	9	12						
SK.5106.2	Meningkatnya layanan PTK Buddha yang terjangkau													
IKSK.5106.2.1	Persentase mahasiswa PTK Buddha penerima beasiswa	Persen	43,98	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00						
IKSK.5106.2.2	Persentase mahasiswa baru pada PTK Buddha yang berkuliah di perguruan tinggi berkualitas	Persen	N/A	5,00	7,00	9,00	11,00	13,00						
RO.5106.QEN.001	Beasiswa KIPK PTK Buddha	Orang	1.117	1.273	0	0	0	0	13.286	-	-	-	-	
IKRO.5106.QEN.001.1	Jumlah Mahasiswa PTKB Penerima KIP Kuliah	Orang	1.117	1.273	0	0	0	0						
RO.5106.BEN.001	Mahasiswa PTKB Penerima Beasiswa PPA	Orang	121	167	133	140	147	154	802	638	670	704	739	
IKRO.5106.BEN.001.1	Jumlah Mahasiswa PTKB Penerima Beasiswa PPA	Orang	121	167	133	140	147	154						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO.5106.DBA.001 Layanan Pengelolaan Fasilitas Beasiswa Pendidikan Tinggi	Layanan	N/A	0	1	1	1	1	-	100	100	100	100	
IKRO.5106.DBA.001.1 Jumlah layanan pengelolaan fasilitas beasiswa pendidikan tinggi	Layanan	N/A	0	1	1	1	1						
SK.5106.3 Meningkatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi PTK Buddha													
IKSK.5106.3.1 Jumlah PTK Buddha yang terpetakan berdasarkan keunggulannya	Lembaga	N/A	2	2	2	2	2						
IKSK.5106.3.2 Persentase Prodi PTK Buddha yang mendapatkan Akreditasi Unggul	Persen	13,51	16,22	18,92	21,62	24,32	27,03						
IKSK.5106.3.3 Persentase Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) pada PTK Buddha yang terakreditasi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
IKSK.5106.3.4 Persentase program studi Program Profesi Guru (PPG) pada PTK Buddha yang terakreditasi Unggul	Persen	N/A	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00						
RO.5106.PDE.001 Akreditasi Prodi/ Lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Buddha	Lembaga	17	128	31	33	34	50	3.178	3.223	3.384	3.553	3.731	
IKRO.5106.PDE.001.1 Jumlah perguruan tinggi keagamaan yang terpetakan berdasarkan keunggulannya	Lembaga	12	12	12	12	12	12						
IKRO.5106.PDE.001.2 Jumlah Prodi yang mendapatkan akreditasi unggul	Prodi	5	5	5	5	5	5						
IKRO.5106.PDE.001.3 Jumlah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasi	Lembaga	2	2	2	2	2	2						
IKRO.5106.PDE.001.4 Jumlah program studi Program Profesi Guru (PPG) yang terakreditasi unggul	Prodi	N/A	0	0	0	0	0						
IKRO.5106.PDE.001.5 Jumlah PTK yang mendapatkan akreditasi unggul	Lembaga	N/A	0	0	1	2	3						
IKRO.5106.PDE.001.6 Jumlah PTK yang mendapatkan pembinaan standar mutu	Lembaga	12	12	12	12	12	12						
SK.5106.4 Terpenuhiya kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan PTK Buddha sesuai dengan standar minimal													
IKSK.5106.4.1 Persentase dosen PTK Buddha berkualifikasi akademik S3:													
a. Total	Persen	19,61	19,61	20,00	20,00	20,00	20,00						
b. STEM	Persen	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c. Non STEM	Persen	19,61	19,61	20,00	20,00	20,00	20,00						
IKSK.5106.4.2 Persentase dosen PTK Buddha yang mempunyai pengalaman di luar kampus	Persen	N/A	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00						
IKSK.5106.4.3 Persentase dosen PTK Buddha yang menduduki jabatan lektor/lektor kepala/guru besar	Persen	36,08	38,00	40,00	43,00	45,00	50,00						
IKSK.5106.4.4 Persentase dosen dan tenaga kependidikan PTK Buddha yang mengikuti program peningkatan kompetensi	Persen	57,25	N/A	78,43	78,43	100,00	100,00						
IKSK.5106.4.5 Rasio dosen asing dengan dosen dalam negeri pada PTK Buddha	-	N/A	1 : 257	1 : 257	1 : 257	1 : 257	1 : 257						
IKSK.5106.4.6 Persentase pemenuhan jumlah tenaga kependidikan PTK Buddha pada	Persen	12,79	12,79	34,00	34,00	34,00	34,00						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) /SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	jenjang jabatan fungsional													
RO.5106.QEA.001	Beasiswa Gelar S3 Dosen PTK Buddha	Orang	N/A	19	20	21	22	57	1.049	1.152	1.210	1.270	1.334	
IKRO.5106.QEA.01.1	Jumlah dosen berkualifikasi akademik S3 (a) total (b) STEM (c) non STEM	Orang	50n/a 50	50 n / a 5 0	51 n/ a 51	51 n / a 51	51 n/ a 51	51 n/ a 51						
IKRO.5106.QEA.01.2	Jumlah pemenuhan tenaga kependidikan pada jenjang jabatan fungsional	Orang	26	70	70	70	70	70						
IKRO.5106.QEA.01.3	Jumlah dosen yang menduduki jabatan lektor/lektor kepala/guru besar	Orang	36	37	40	43	45	50						
RO.5106.SCI.001	Pelatihan Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan PTK Buddha	Orang	372	381	585	614	645	811	2.593	2.800	2.940	3.087	3.241	
IKRO.5106.SCI.001.1	Jumlah dosen yang mempunyai pengalaman di luar kampus	Orang	N/A	251	251	251	251	251						
IKRO.5106.SCI.001.2	Jumlah dosen yang mengikuti program peningkatan kompetensi	Orang	146	150	200	200	255	255						
IKRO.5106.SCI.001.3	Jumlah Dosen yang menjadi Narasumber Konferensi nasional maupun internasional	Orang	N/A	5	6	7	8	8						
IKRO.5106.SCI.001.4	Jumlah dosen asing yang difasilitasi dalam penguatan layanan pendidikan tinggi	Orang	N/A	n/a	0	0	0	0						
IKRO.5106.SCI.001.5	Jumlah tenaga kependidikan yang mendapatkan peningkatan kompetensi	Orang	N/A	40	49	49	59	69						
RO.5106.BEA.001	Tunjangan Profesi Dosen Non ASN PTK Buddha	Orang	N/A	49	46	48	51	53	2.240	2.266	2.379	2.428	2.623	
IKRO.5106.BEA.001.1	Jumlah Dosen Non ASN Penerima Tunjangan Profesi pada PTK Buddha	Orang	127	127	127	127	127	127						
SK.5106.5	Meningkatnya kualitas lulusan PTK Buddha yang diterima di dunia kerja													
IKSK.5106.5.1	Persentase PTK Buddha yang memiliki Pusat Pengembangan Karir	Persen	N/A	16,67	25,00	33,33	41,67	50,00						
IKSK.5106.5.2	Persentase lulusan PTK Buddha yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan:	Persen												
	a. Total	Persen	N/A	30,00	35,00	37,00	40,00	45,00						
	b. Karyawan atau Wirausaha	Persen	N/A	5,00	10,00	10,00	15,00	15,00						
IKSK.5106.5.3	Persentase mahasiswa PTK Buddha yang mendapat sertifikat profesi dan kompetensi	Persen	N/A	5,00	5,00	10,00	15,00	20,00						
IKSK.5106.5.4	Rasio Outbound per Inbound mahasiswa PTK Buddha	-	N/A	1 : 153	1 : 153	1 : 153	1 : 153	1 : 153						
IKSK.5106.5.5	Persentase mahasiswa PTK Buddha yang berkegiatan di luar program studi	Persen	N/A	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00						
IKSK.5106.5.6	Persentase lulusan perguruan tinggi (berkualifikasi S1) keagamaan Buddha dengan pengalaman 1 (satu) semester di luar kampus	Persen	N/A	50,00	60,00	70,00	70,00	70,00						
RO.5106.BGC.001	Tatakelola PTKBN yang meningkat	Lembaga	2	2	2	2	2	2	3.757	4.481	4.705	4.941	5.188	

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1. Kualitas layanan pendidikannya melalui PNB													
IKRO.5106.BGC.01.1 Jumlah lulusan perguruan tinggi (berkualifikasi S1) dengan pengalaman 1 (satu) semester di luar kampus	Orang	N/A	154	189	245	280	294						
IKRO.5106.BGC.01.2 Jumlah PTK Buddha yang memiliki Pusat Pengembangan Karir	Lembaga	N/A	2	3	4	5	6						
IKRO.5106.BGC.01.3 Jumlah lulusan PTK Buddha yang berhasil memiliki pekerjaan : a. Karyawan b. Wirausaha	Orang	N/A	903 16	111 31	130 35	160 60	189 63						
IKRO.5106.BGC.01.4 Jumlah tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi keagamaan Buddha bidang STEM	Orang	N/A	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a						
IKRO.5106.BGC.01.5 Jumlah lulusan PTK Buddha yang mendapat sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi bereputasi	Orang	N/A	16	48	35	60	84						
IKRO.5106.BGC.01.6 Jumlah prodi yang menyelenggarakan sertifikasi profesi	Prodi	2	2	2	2	2	2						
IKRO.5106.BGC.01.7 Jumlah peningkatan mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi	Orang	N/A	372	421	171	0	0						
IKRO.5106.BGC.01.8 Jumlah mahasiswa yang memperoleh layanan program Outbound per Inbound	Orang	N/A	0	0	0	0	0						
IKRO.5106.BGC.01.9 Jumlah mahasiswa yang berkegiatan di luar program studi	Orang	N/A	331	596	954	1.431	2.061						
SK.5106.6 Meningkatnya kualitas pemanfaatan kerjasama PTK Buddha													
IKSK.5106.6.1 Persentase kerja sama PTK Buddha yang ditindaklanjuti di bidang:													
a. Pendidikan dan Pengajaran	Persen	N/A	50,00	60,00	70,00	80,00	85,00						
b. Penelitian dan Publikasi	Persen	N/A	50,00	60,00	70,00	85,00	85,00						
c. Pengabdian kepada Masyarakat	Persen	N/A	45,00	55,00	65,00	75,00	80,00						
RO.5106.DDD.00 Kekayaan Intelektual Pengabdian Masyarakat PTK Buddha	Kekayaan Intelektual	6	3	4	4	4	5	302	318	333	350	368	
IKRO.5106.DDD.02.1 Jumlah PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri/pemerintah/ Lembaga Masyarakat /Internasional	Lembaga	11	5	5	6	6	6						
IKRO.5106.DDD.02.2 Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti di bidang pendidikan dan pengajaran	Kerjasama	N/A	111	148	185	185	185						
IKRO.5106.DDD.02.3 Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti di bidang penelitian dan publikasi	Kerjasama	N/A	111	148	185	185	185						
IKRO.5106.DDD.02.4 Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti di bidang pengabdian kepada masyarakat	Kerjasama	N/A	111	129	148	166	166						
SK.5106.7 Meningkatnya budaya akademik yang religious dan toleran PTK Buddha													
IKSK.5106.7.1 Persentase mahasiswa PTK Buddha yang mengikuti program peningkatan	Persen	N/A	12,44	22,00	32,00	37,00	42,00						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	literasi kitab suci												
IKSK.5106.7.2	Persentase PTK Buddha yang mengembangkan literasi keagamaan	Persen	N/A	41,67	58,33	66,67	83,33	100,00					
RO.5106.PEF.001	Pendidikan Karakter dan Kewarganegaraan Mahasiswa PTK Buddha	Orang	1.688	1.140	1.525	1.601	1.681	515	4.090	4.307	4.523	4.749	4.986
IKRO.5106.PEF.001.1	Jumlah mahasiswa yang mengikuti program peningkatan literasi Kitab Suci	Orang	N/A	500	600	700	800	900					
IKRO.5106.PEF.001.2	Jumlah prodi yang mengimplementasikan integrasi keilmuan	Prodi	N/A	36	36	36	36	36					
IKRO.5106.PEF.001.3	Jumlah PTK yang mengembangkan pusat-pusat kajian keagamaan sesuai kebutuhan lokal	Lembaga	N/A	2	3	3	4	5					
IKRO.5106.PEF.001.4	Jumlah PTK Buddha yang mengembangkan literasi keagamaan	Lembaga	N/A	5	7	8	10	12					
SK.5106.8	Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian PTK Buddha												
IKSK.5106.8.1	Persentase publikasi ilmiah bereputasi internasional PTK Buddha yang disitasi	Persen	N/A	5,00	7,00	10,00	13,00	15,00					
IKSK.5106.8.2	Jumlah karya tulis ilmiah PTK Buddha berorientasi SDGs yang terpublikasi di Jurnal Internasional bereputasi	Karya Tulis	N/A	5	6	7	8	9					
IKSK.5106.8.3	Jumlah Paten Granted karya tulis ilmiah PTK Buddha	Paten	N/A	1	2	3	4	5					
IKSK.5106.8.4	Persentase hasil riset dan inovasi PTK Buddha yang dimanfaatkan DUDI/Masyarakat	Produk	0	8	8	25	33	42					
IKSK.5106.8.5	Jumlah Lembaga Penelitian dan Pengabdian ke Masyarakat (LPPM) PTK Buddha yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah	12	12	12	12	12	12					
RO.5106.BEI.001	BOPTN Non Penelitian PTK Buddha	Lembaga	2	2	2	2	2	2	4.521	4.747	4.984	5.234	5.495
IKRO.5106.BEI.001.1	Jumlah Lembaga Penelitian dan Pengabdian ke Masyarakat (LPPM) yang ditingkatkan kapasitasnya	Lembaga	12	12	12	12	12	12					
RO.5106.DDD.001	Kekayaan Intelektual Penelitian PTK Buddha	Kekayaan Intelektual	86	13	17	18	19	20	570	599	630	660	693
IKRO.5106.DDD.001.1	Jumlah karya tulis ilmiah yang bereputasi nasional	Karya Tulis Ilmiah	6	10	12	15	15	20					
IKRO.5106.DDD.001.2	Jumlah publikasi ilmiah bereputasi internasional PTK yang disitasi	Jumlah	0	257	270	290	310	330					
RO.5106.QEI.001	BOPTN Penelitian PTK Buddha	Lembaga	2	0	0	2	2	2	-	2.000	2.100	2.205	2.315
IKRO.5106.QEI.001.1	Jumlah publikasi ilmiah bereputasi internasional PTK yang disitasi	Karya Tulis Ilmiah	0	1	1	2	2	3					
IKRO.5106.QEI.001.2	Jumlah karya tulis ilmiah berorientasi SDGs yang terpublikasi di jurnal internasional bereputasi	Karya Tulis Ilmiah	0	1	1	2	2	3					
IKRO.5106.QEI.001.3	Jumlah Paten Granted karya tulis ilmiah Perguruan Tinggi Keagamaan	Paten	0	1	2	3	4	5					
IKRO.5106.QEI.001.4	Jumlah hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan DUDI/Masyarakat	Riset	0	5	6	7	7	10					

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) /SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /INDIKATOR		SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
7884 Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi Keagamaan									103.758	1.592.840	1.593.962	1.595.083	1.596.878	[SETJEN] Pusat Pembiayaan Pendidikan Keagamaan
SK.7884.1	Meningkatnya layanan pendidikan tinggi keagamaan yang terjangkau													
IKSK.7884.1.1	Persentase mahasiswa penerima beasiswa	Persen	5,25	5,83	6,42	7,00	7,58	8,17						
IKSK.7884.1.2	Persentase mahasiswa yang berkuliah di perguruan tinggi berkualitas	Persen	16,12	16,78	17,12	17,48	17,86	18,25						
RO.7884.BAA.00	Mahasiswa yang mendapatkan fasilitas layanan Beasiswa	Laporan	7	7	12	17	22	30	1.570	2.691	3.813	4.934	6.729	
IKRO.7884.BAA.01.1	Jumlah Mahasiswa yang mendapatkan fasilitas layanan Beasiswa penyelesaian pendidikan	Orang	8,674	8,674	12,441	13,402	15,581	18,511						
RO.7884.QEN.00	Mahasiswa PTK Swasta Islam penerima KIP Kuliah	Orang	4.890	4.890	0	0	0	0	64.548	0	0	0	0	
IKRO.7884.QEN.01.1.1	Jumlah Mahasiswa PTK Swasta Islam penerima KIP Kuliah	Orang	4.890	4.890	0	0	0	0						
RO.7884.QEN.00	Mahasiswa PTK Swasta Kristen penerima KIP Kuliah	Orang	140	187	0	0	0	0	6.917	0	0	0	0	
IKRO.7884.QEN.03.2.1	Jumlah Mahasiswa PTK Swasta Kristen Penerima KIP Kuliah	Orang	140	187	0	0	0	0		0	0	0	0	
RO.7884.QEN.00	Mahasiswa PTK Swasta Katolik penerima KIP Kuliah	Orang	549	620	0	0	0	0	16.592	0	0	0	0	
IKRO.7884.QEN.03.3.1	Jumlah Mahasiswa PTK Swasta Katolik Penerima KIP Kuliah	Orang	550	620	0	0	0	0		0	0	0	0	
RO.7884.QEN.00	Mahasiswa PTK Swasta Hindu penerima KIP Kuliah	Orang	784	250	0	0	0	0	11.405	0	0	0	0	
IKRO.7884.QEN.04.4.1	Jumlah Mahasiswa PTK Swasta Hindu penerima KIP Kuliah	Orang	785	250	0	0	0	0		0	0	0	0	
RO.7884.QEN.00	Mahasiswa PTK Swasta Buddha penerima KIP Kuliah	Orang	235	65	0	0	0	0	2.726	0	0	0	0	
IKRO.7884.QEN.05.5.1	Jumlah Mahasiswa PTK Swasta Buddha penerima KIP Kuliah	Orang	235	65	0	0	0	0						
RO.7884.QEN.00	Mahasiswa PTK Islam/Ma'had Aly penerima KIP Kuliah	Orang	4.890	0	129.762	129.762	129.762	129.762	0	1.398.599	1.398.599	1.398.599	1.398.599	
IKRO.7884.QEN.06.6.1	Jumlah Mahasiswa PTK Islam/Ma'had Aly Penerima KIP Kuliah	Orang	0	0	129.762	129.762	129.762	129.762						
RO.7884.QEN.00	Mahasiswa PTK Kristen Penerima KIP Kuliah	Orang	0	0	9.658	9.658	9.658	9.658	0	107.870	107.870	107.870	107.870	
IKRO.7884.QEN.07.7.1	Jumlah Mahasiswa PTK Kristen Penerima KIP Kuliah	Orang	0	0	9.658	9.658	9.658	9.658						
RO.7884.QEN.00	Mahasiswa PTK Katolik Penerima KIP Kuliah	Orang	0	0	1.872	1.872	1.872	1.872	0	25.878	25.878	25.878	25.878	
IKRO.7884.QEN.08.8.1	Jumlah Mahasiswa PTK Katolik Penerima KIP Kuliah	Orang	0	0	1.872	1.872	1.872	1.872						
RO.7884.QEN.00	Mahasiswa PTK Hindu Penerima KIP Kuliah	Orang	0	0	3.981	3.981	3.981	3.981	0	43.018	43.018	43.018	43.018	
IKRO.7884.QEN.09.9.1	Jumlah Mahasiswa PTK Hindu Penerima KIP Kuliah	Orang	0	0	3.981	3.981	3.981	3.981						
RO.7884.QEN.01	Mahasiswa PTK Buddha Penerima KIP Kuliah	Orang	0	0	4.164	4.164	4.164	4.164	0	14.784	14.784	14.784	14.784	
IKRO.7884.QEN.01.10.1	Jumlah Mahasiswa PTK Buddha Penerima KIP Kuliah	Orang	0	0	4.164	4.164	4.164	4.164						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
7885 Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Khonghucu									3.537	27.818	31.650	36.650	43.667	[SETJEN] Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu
SK.7885.1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana PTK Khonghucu													
IKSK.7885.1.1	Persentase PTK Khonghucu yang memenuhi standar sarana prasarana	Persen	N/A	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00						
IKSK.7885.1.2	Persentase prodi Khonghucu yang memenuhi sarana prasarananya	Persen	N/A	25,00	50,00	60,00	70,00	80,00						
RO.7885.CAA.001	Sarana Bidang Pendidikan Pendidikan 1 Khonghucu	Paket	N/A	2	5	6	7	9	1.732	16.589	18.248	20.073	22.081	
IKRO.7885.CAA.001.1	Jumlah PTK Khonghucu yang memperoleh peningkatan sarana pembelajaran	Jumlah	N/A	1	2	2	2	2						
IKRO.7885.CAA.001.2	Jumlah prodi Khonghucu yang memperoleh peningkatan sarana pembelajaran	Jumlah	N/A	1	2	3	4	5						
IKRO.7885.CAA.001.3	Jumlah Layanan Disabilitas (ULD) Khonghucu yang disediakan	Jumlah	N/A	0	1	1	1	2						
RO.7885.CBJ.001	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi 1 Khonghucu	Unit	N/A	1	1	1	1	2	1.805	7.110	7.821	8.603	9.463	
IKRO.7885.CBJ.001.1	Jumlah Pendidikan Tinggi Keagamaan Khonghucu yang memperoleh bantuan pembangunan atau rehabilitasi Prasarana pembelajaran	Jumlah	N/A	1	1	1	1	2						
SK.7885.2	Meningkatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi PTK Khonghucu													
IKSK.7885.1	Persentase Prodi Khonghucu yang mendapatkan akreditasi unggul	Persen	0,00	0,00	20,00	20,00	40,00	60,00						
RO.7885.PDE.001	Akreditasi Prodi/Lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Khonghucu	Lembaga	0	0	0	0	0	1	0	798	1.596	3.192	6.385	
IKRO.7885.PDE.001.1	Jumlah Prodi Khonghucu yang mendapatkan akreditasi unggul	Lembaga	0	0	0	0	0	1						
SK.7885.3	Terpenuhinya kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan Khonghucu sesuai dengan standar minimal													
IKSK.7885.3.1	Persentase dosen berkualifikasi akademik S3 Khonghucu	Persen	0,00	0,00	7,00	9,00	10,00	12,00						
IKSK.7885.3.2	Persentase dosen Khonghucu yang mempunyai pengalaman di luar kampus	Persen	0,00	0,00	20,00	30,00	40,00	50,00						
IKSK.7885.3.3	Persentase dosen dan tenaga kependidikan Khonghucu yang mengikuti program peningkatan kompetensi	Persen	0,00	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00						
RO.7885.SCI.001	Dosen dan tenaga kependidikan PTK Khonghucu yang berkualitas	Persen	0	0	23	33	47	62	0	3.321	3.985	4.782	5.738	
IKRO.7885.SCI.001.1	Jumlah dosen Khonghucu penerima beasiswa akademik S3	Orang	0	0	5	5	5	6						
IKRO.7885.SCI.001.2	Jumlah dosen Khonghucu yang mempunyai pengalaman di luar kampus	Orang	0	0	6	6	10	14						
IKRO.7885.SCI.001.3	Jumlah dosen Khonghucu yang mengikuti program peningkatan kompetensi	Orang	0	0	8	16	24	32						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
025.WA - Program Dukungan Manajemen								9.739.692	17.786.645	17.320.494	11.472.204	11.947.935	SETJEN, ITJEN, BALITBANG DAN DIKLAT, DITJEN PHU, DITJEN PENDIS, DITJEN BIMAS ISLAM, DITJEN BIMAS KRISTEN, DITJEN BIMAS KATOLIK, DITJEN BIMAS HINDU, DITJEN BIMAS BUDDHA, BPJPH
SP.13 Meningkatkan Tata kelola Organisasi yang efektif dan akuntabel													
IKSP.13.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Jenderal	Nilai	74,28	76,00	78,00	80,00	82,00	85,00						
IKSP.13.2 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Pendidikan Islam	Nilai	89,25	89,50	89,75	90,00	90,25	90,50						
IKSP.13.3 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam	Nilai	82,00	82,20	82,40	82,60	82,80	83,00						
IKSP.13.4 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen	Nilai	78,69	83,00	83,83	84,67	85,51	86,37						
IKSP.13.5 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Bimas Katolik	Nilai	90,00	81,21	81,21	81,22	81,23	81,24						
IKSP.13.6 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu	Nilai	83,60	83,70	83,80	83,90	84,00	84,10						
IKSP.13.7 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha	Nilai	82,60	82,80	83,00	83,10	83,20	83,30						
IKSP.13.8 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah	Nilai	76,50	81,00	81,30	81,50	81,80	82,00						
IKSP.13.9 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	Nilai	92,75	92,80	92,85	92,90	92,95	93,00						
IKSP.13.10 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai	74,28	82,00	82,10	82,20	82,30	82,50						
SP.14 Meningkatkan Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal atas Akuntabilitas Keuangan, Kinerja dan Integritas SDM aparatur Kementerian Agama													
IKSP.14.1 Nilai Kapabilitas APIP (IACM)	Nilai	3,32	3,40	3,50	3,60	3,70	3,80						
IKSP.14.2 Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Nilai	3,32	3,40	3,50	3,60	3,70	3,80						
2098 Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN								10.155	13.476	13.999	14.574	15.207	[SETJEN] Biro Hukum dan KLN

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK.2098.1 Meningkatkan kualitas layanan dan bantuan hukum													
IKSK.2098.1.1 Indeks Reformasi Hukum	Nilai	99,46	99,47	99,48	99,49	99,50	99,51						
IKSK.2098.1.2 Persentase harmonisasi regulasi dan penyelesaian produk hukum	Persen	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00						
IKSK.2098.1.3 Persentase rancangan peraturan yang diselesaikan sesuai perencanaan	Persen	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00						
IKSK.2098.1.4 Persentase kasus hukum yang terselesaikan	Persen	96,00	96,50	97,00	97,50	98,00	98,50						
IKSK.2098.1.5 Persentase rekomendasi izin rohaniwan, pengajar dan pelajar asing	Persen	98,25	98,50	98,75	99,00	99,25	99,50						
RO.2098.AEC.964 Hasil Kesepakatan Kerja Sama Internasional	Layanan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.908	5.229	5.752	6.327	6.960	
IKRO.2098.AEC.964.1 Jumlah rekomendasi rohaniwan, pengajar dan pelajar yang diterbitkan	Jumlah	3.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000						
RO.2098.EBA.957 Layanan Hukum	Layanan	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	2.971	2.971	2.971	2.971	2.971	
IKRO.2098.EBA.957.1 Jumlah penyusun rancangan perundangan yang ditingkatkan kompetensi	Orang	N/A	90,00	95,00	100,00	105,00	110,00						
IKRO.2098.EBA.957.2 Jumlah harmonisasi regulasi dan penyelesaian produk hukum	Jumlah	20	20	22	24	25	26						
IKRO.2098.EBA.957.3 Jumlah naskah urgensi rancangan peraturan perundang-undangan yang dihasilkan	Jumlah	20	20	22	24	25	26						
IKRO.2098.EBA.957.4 Jumlah rancangan peraturan yang diterbitkan sesuai perencanaan	Jumlah	20	20	22	24	25	26						
RO.2098.EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	Layanan	2	2	2	2	2	2	5.276	5.276	5.276	5.276	5.276	
IKRO.2098.EBA.969.1 Jumlah Layanan Bantuan Hukum	Jumlah	70	70	70	70	70	70						
2099 Pembinaan Administrasi Kepegawaian								14.871	14.871	14.871	14.871	14.871	[SETJEN] Biro Sumber Daya Manusia
SK.2099.1 Meningkatkan kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)													
IKSK.2099.1.1 Indeks Sistem Merit	Nilai	261,00	266,00	271,00	276,00	281,00	286,00						
IKSK.2099.1.2 Indeks Profesionalisme ASN	Nilai	75,24	77,24	78,24	79,24	80,24	81,24						
IKSK.2099.1.3 Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	Persen	N/A	55,00	65,00	75,00	85,00	95,00						
IKSK.2099.1.4 Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	Orang	N/A	0	0	0,000158	0,000164	0,000170						
IKSK.2099.1.5 Persentase ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi	Persen	4,00	0	6,00	7,00	9,00	10,00						
RO.2099.EBC.954 Layanan Manajemen SDM	Orang	N/A	186.675	186.675	186.675	186.675	186.675	14.871	14.871	14.871	14.871	14.871	
IKRO.2099.EBC.954.1 Jumlah Satuan Kerja dengan indeks sistem merit berkategori baik	Nilai	261,00	266,00	271,00	276,00	281,00	286,00						
IKRO.2099.EBC.954.2 Jumlah ASN yang memperoleh Nilai Profesionalisme ASN dengan kategori sedang	Nilai	75,24	77,24	78,24	79,24	80,24	81,24						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKRO.2099.EBC.954.3Jumlah satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	Jumlah	N/A	2.750	3.250	3.750	4.250	4.750						
IKRO.2099.EBC.954.4Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	Orang	N/A	0	0	2	4	6						
IKRO.2099.EBC.954.5Jumlah ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi	Jumlah	1.523	0	1.614	1.629	1.660	1.675						
2100 Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN								127.838	5.328.819	5.346.015	233.804	254.611	[SETJEN] Biro Keuangan dan BMN
SK.2100.1 Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan BMN													
IKSK.2100.1.1Predikat Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
IKSK.2100.1.2Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	94,88	95,00	95,50	96,00	96,50	97,00						
IKSK.2100.1.3Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Persen	40,00	50,00	55,00	60,00	65,00	75,00						
IKSK.2100.1.4Persentase Laporan Keuangan Semester I dan Semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Persen	100,00	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00						
IKSK.2100.1.5Persentase pencapaian dan penetapan target PNPB dan BLU	Persen	100,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00						
IKSK.2100.1.6Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	Persen	73,00	75,00	78,00	81,00	90,00	95,00						
IKSK.2100.1.7Nilai Indikator Pengelolaan Aset	Nilai	2,90	3,00	3,10	3,20	3,50	3,70						
IKSK.2100.1.8Persentase satuan kerja yang menerapkan pengendalian intern atas pelaporan keuangan (PIPK)	Persen	100,00	99,91	99,92	99,93	99,94	99,95						
RO.2100.EBA.956 Layanan BMN	Layanan	1	1	1	1	1	1	1.694	4.375	4.610	2.846	3.130	
IKRO.2100.EBA.956.1Jumlah Aset yang tercatat dalam SIMAK BMN	Aset	72.630	72.730	72.830	72.930	73.030	73.130						
IKRO.2100.EBA.956.2Jumlah Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	Jumlah	4.434	4.543	4.633	4.211	4.422	4.643						
RO.2100.EBA.994 Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	1	110.034	5.285.052	5.302.013	205.230	225.753	
IKRO.2100.EBA.994.1Jumlah ASN yang menerima layanan operasional perkantoran	Jumlah	1,714	1,714	1,814	1,914	2,014	2,114						
RO.2100.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	Layanan	1	1	1	1	1	1	16.110	39.392	39.392	25.728	25.728	
IKRO.2100.EBD.955.1Jumlah Opini Laporan Keuangan	Opini	1	1	1	1	1	1						
IKRO.2100.EBD.955.2Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Jumlah	2	2	2	2	2	2						
IKRO.2100.EBD.955.3Jumlah Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	Jumlah	4883	5000	5076	5190	5250	5365						
IKRO.2100.EBD.955.4Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Dokumen	2	2	2	2	2	2						
IKRO.2100.EBD.955.5Jumlah Hasil Pengawasan/Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	Jumlah	109	95	94	93	92	91						

[illegible]

[illegible]

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /INDIKATOR		SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	dokumentasi													
IKSK.7887.1.1	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	Nilai	94,52	95,00	95,53	95,55	95,58	96,00						
IKSK.7887.1.2	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	Persen	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00						
RO.7887.EBA.95.8	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	1	1	1	1	1	1	5.641	8.641	11.641	14.641	17.641	
IKRO.7887.EBA.95.1	Jumlah satuan Kerja dengan penyelenggaraan PPID	Satker	107	107	107	107	107	107						
IKRO.7887.EBA.95.2	Jumlah pemberitaan negatif tentang Kemenag yang dicounter	Pemberitaan	200	200	200	200	200	200						
IKRO.7887.EBA.95.3	Jumlah peningkatan konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	Konten	260	300	340	380	420	460						
7888 Peningkatan Layanan Data dan Teknologi Informasi									62.139	920.375	1.090	1.293	1.537	[SETJEN] Pusat Data dan Teknologi Informasi
SK.7888.1	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi													
IKSK.7888.1.1	Indeks Pemerintahan Digital	Nilai	4,63	3,50	3,60	3,75	3,80	4,00						
IKSK.7888.1.2	Indeks Pembangunan Statistik	Nilai	2,72	2,72	3,00	3,00	3,50	3,50						
IKSK.7888.1.3	Indeks Implementasi Pelaksanaan Transformasi Digital	Nilai	N/A	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00						
RO.788.EBA.963	Layanan Data dan Teknologi Informasi	Layanan	1	1	1	1	1	1	62.139	920.375	1.090	1.293	1.537	
IKRO.7888.EBA.963.1	Jumlah layanan keagamaan dan pendidikan berbasis digital	Layanan	25	35	45	55	65	85						
IKRO.7888.EBA.963.2	Jumlah data Statistik yang dipublikasi	Dataset	3	5	7	9	12	15						
IKRO.7888.EBA.963.3	Jumlah satuan kerja yang menerapkan transformasi digital	Satker	N/A	4.590	4.590	4.590	4.590	4.590						
6708 Dukungan Manajemen Pendidikan									840.948	938.821	994.566	1.050.556	1.106.817	Biro Hukum dan KLN, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Keuangan dan BMN, Biro Organisasi dan Tata Laksana, Biro Perencanaan Dan Penganggaran, Biro Umum, Biro Humas dan Komunikasi Publik Dan Pusat Data dan Teknologi Informasi
SK 6708.1	Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan													
IKSK 6708.1.1	Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output	Persen	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00						
IKSK 6708.1.2	Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama	Persen	1,36	1,67	1,97	2,00	2,14	2,20						
IKSK 6708.1.3	Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	Persen	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00						
IKSK 6708.1.4	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi	Persen	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media													
IKSK 6708.1.5	Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK	Persen	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00						
IKSK 6708.1.6	Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra	Persen	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00						
IKSK 6708.1.7	Rerata nilai akreditasi lembaga pada Unit Penilaian Kompetensi Kementerian Agama oleh BKN minimal 85	Nilai	N/A	87,88	88,50	88,50	90,00	90,00						
IKSK 6708.1.8	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	92,72	92,84	93	93,17	93,34	93,51						
IKSK 6708.1.9	Persentase rancangan peraturan bidang pendidikan yang diselesaikan sesuai perencanaan	Persen	20	20	22	24	25	26						
RO.6708.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2.917	2.917	2.917	2.917	2.917	
IKRO.6708.EBD.952.1	Jumlah satuan kerja yang memiliki realisasi anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output	Unit	28,00	29,00	30,00	31,00	32,00	33,00						
RO.6708.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.674	1.674	1.674	1.674	1.674	
IKRO.6708.EBA.960.1	Jumlah satuan kerja yang memperoleh nilai peningkatan kinerja	Layanan	2238,00	2240,00	2242,00	2243,00	2246,00	2246,00						
RO.6708.EBA.958	6708 EBA 958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	24.321	27.821	31.321	34.821	38.321	
IKRO.6708.EBA.958.1	Jumlah kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	Jumlah	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00						
RO.6708.CAN.001	6708 CAN 001 Sarana Bidang TIK	Unit	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	58.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
IKRO.6708.CAN.001.1	Jumlah infrastruktur dari layanan dukungan TIK yang terpenuhi	Jumlah	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00						
RO.6708.EBA.963	6708 EBA 963 Layanan Data dan Informasi	Jumlah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100.000	150.000	200.000	250.000	300.000	
IKRO.6708.EBA.963.1	Jumlah satuan kerja yang memperoleh layanan peningkatan akses informasi dan publikasi program	Jumlah	1527,00	1532,00	1536,00	1539,00	1543,00	1548,00						
RO.6708.EBC.954	6708 EBC 954 Layanan Manajemen SDM	Orang	N/A	87,88	88,50	88,50	90,00	90,00	3.310	20.523	22.576	24.833	27.317	
IKRO.6708.EBC.954.1	Rerata nilai akreditasi lembaga pada Unit Penilaian Kompetensi Kementerian Agama oleh BKN minimal 85	Nilai	N/A	87,88	88,50	88,50	90,00	90,00						
RO.6708.EBD.955	6708 EBD 955 Layanan Manajemen Keuangan	Persen	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	800	960	1.152	1.385	1.662	
IKRO.6708.EBD.955.1	Persentase Jabatan Fungsional Keuangan Negara yang memenuhi standar	Jumlah	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00						
RO.6708.EBA.957	6708 EBA 957 Layanan Hukum	Jumlah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.391	2.391	2.391	2.391	2.391	
IKRO.6708.EBA.957.1	Jumlah layanan Hukum yang diselenggarakan sesuai standar	Jumlah	6	6	6	6	6	6						
IKRO.6708.EBA.957.2	Jumlah rancangan peraturan bidang pendidikan yang diselesaikan sesuai	Jumlah	20	20	22	24	25	26						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) /SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	perencanaan													
RO.6708.EBA.956	6708.EBA.956 Layanan BMN	Layanan	1	1	1	1	1	1	1.578	1.578	1.578	1.578	1.578	
IKRO.6708.EBA.956.1	Jumlah Layanan BMN	Jumlah	1	1	1	1	1	1						
RO.6708.EBA.994	6708.EBA.994 Layanan Perkantoran	Layanan	4	4	4	4	4	4	645.957	645.957	645.957	645.957	645.957	
IKRO.6708.EBA.994.1	Jumlah Layanan Pengadaan yang diselenggarakan	Layanan	4	4	4	4	4	4						
2113 PENGAWASAN FUNGSIONAL PENDIDIKAN									56.965	58.959	61.907	65.002	68.252	Inspektorat I-IV
SK.2113.1	Meningkatnya Peran dan Layanan Pengawasan intern atas Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja													
IKSK.2113.1.1	Persentase Efektivitas dan Efisiensi Program yang mencapai tujuan	Persen	N/A	75,00	78,00	82,00	86,00	90,00						
IKSK.2113.1.2	Nilai SAKIP satuan kerja	Nilai	71.50	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00						
IKSK.2113.1.3	Persentase Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan yang efektif	Persen	N/A	75,00	78,00	82,00	86,00	90,00						
RO.2113.EBD.965	Layanan Audit Internal	Rekomendasi	N/A	14	15	18	22	25	56.965	58.959	61.907	65.002	68.253	
IKRO.2113.EBD.965.1	Jumlah program yang mencapai efektivitas dan efisiensi sesuai tujuan	Jumlah	N/A	20	21	22	23	24						
IKRO.2113.EBD.965.2	Jumlah satuan kerja yang dievaluasi AKIP	Jumlah	N/A	100	110	120	130	140						
IKRO.2113.EBD.965.3	Jumlah satuan kerja yang memperoleh hasil reviu PIPK dengan kesimpulan Efektif	Jumlah	N/A	10	10	10	10	10						
2115 PENGAWASAN FUNGSIONAL INSPEKTORAT I - IV									23.775	26.205	27.515	28.891	30.335	Inspektorat I-IV
SK.2115.1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Intern yang Andal, Independen, dan Berdampak													
IKSK.2115.1.1	Nilai telaah seawat	Nilai	82,00	83,00	83,00	84,00	85,00	86,00						
IKSK.2115.1.2	Persentase kegiatan pengawasan berbasis risiko dan sesuai standar	Persen	N/A	80,00	90,00	95,00	98,00	100,00						
RO.2115.EBD.965	Layanan Audit Internal	Rekomen-dasi	N/A	15	15	15	16	17	23.775	26.205	27.515	28.891	30.335	
IKRO.2115.EBD.965.1	Jumlah laporan telaah seawat dengan simpulan "Baik"	Nilai	5	5	5	5	5	5						
IKRO.2115.EBD.965.2	Jumlah kegiatan pengawasan berbasis risiko dan sesuai standar	Jumlah	15	15	15	15	16	17						
2119 PENGAWASAN FUNGSIONAL INSPEKTORAT V									2.699	2.834	2.976	3.125	3.281	Inspektorat V
SK.2119.1	Meningkatnya upaya pencegahan dan penanganan korupsi													
IKSK.2119.1.1	Persentase pengendalian risiko kecurangan	Persen	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00						
IKSK.2119.1.2	Persentase penanganan risiko kecurangan	Persen	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00						
IKSK.2119.1.3	Persentase Pengamanan Aset Negara	Persen	N/A	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00						
IKRO.2119.EBD.U01	Layanan Audit Investigasi	Dokumen	N/A	55	60	68	76	84	2.699	2.834	2.976	3.125	3.281	
IKRO.2119.EBD.U01.1	Jumlah Pengawasan Pengendalian Risiko Kecurangan	Dokumen	N/A	15	15	16	16	17						
IKRO.2119.EBD.U01.2	Jumlah Pengawasan Penanganan Risiko Kecurangan	Dokumen	N/A	36	41	47	55	61						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
IKRO.2119.EBD.U01.3Negara	Jumlah Pengawasan Pengamanan Aset	Dokumen	N/A	4	4	5	5	6						
2120 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA									95.173	114.746	121.351	127.394	133.741	Sekretariat Inspektorat Jenderal
SK.2120.1	Meningkatnya peran dan layanan dukungan manajemen pengawasan yang inovatif, transparan dan berintegritas													
IKSK.2120.1.1	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	88.77	88,80	88.85	88,90	88.95	89,00						
IKSK.2120.1.2	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	Persen	100,00	85,00	90,00	95,00	98,00	99,00						
IKSK.2120.1.3	Persentase laporan kinerja sesuai standar	Persen	100,00	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00						
IKSK.2120.1.4	Persentase rancangan peraturan dan kajian kebijakan yang diselesaikan	Jumlah	N/A	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00						
IKSK.2120.1.5	Persentase tindaklanjut hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat yang diverifikasi	Persen	100,00	93,50	94,00	94,50	95,00	96,00						
IKSK.2120.1.6	Indeks Profesionalisme ASN	Nilai	85.70	85.75	85.80	85.85	85.90	85.95						
IKSK.2120.1.7	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	Nilai	N/A	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00						
IKSK.2120.1.8	Indeks Pembangunan Statistik	Nilai	N/A	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00						
IKSK.2120.1.9	Indeks Implementasi Pelaksanaan Transformasi Digital	Nilai	N/A	1,00	45778,00	2,00	45779,00	3,00						
RO.2120.EBA.956	Layanan BMN	Layanan	N/A	1	1	1	1	1	480	480	480	480	480	
IKRO.2120.EBA.956.1	Jumlah Laporan RKBMN yang disusun tepat waktu	Dokumen	1	1	1	1	1	1						
RO.2120.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	N/A	18	18	18	18	18	12.589	12.369	13.879	14.573	15.302	
IKRO.2120.EBA.960.1	Jumlah laporan kinerja perencanaan anggaran dengan kategori baik	Jumlah	1	1	1	1	1	1						
IKRO.2120.EBA.960.2	Jumlah laporan kinerja pelaksanaan anggaran dengan kategori sangat baik	Jumlah	1	1	1	1	1	1						
IKRO.2120.EBA.960.3	Jumlah kajian kebijakan yang dimanfaatkan	Jumlah	N/A	2	2	2	3	3						
IKRO.2120.EBA.960.4	Jumlah laporan kinerja sesuai standar	Jumlah	5	5	5	5	5	5						
IKRO.2120.EBA.960.5	Jumlah rancangan peraturan yang diselesaikan	Jumlah	N/A	4	4	4	4	4						
IKRO.2120.EBA.960.6	Jumlah kajian hukum yang diselesaikan	Jumlah	N/A	18	18	18	18	18						
IKRO.2120.EBA.960.7	Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan yang diverifikasi	Jumlah	N/A	200	200	200	200	200						
IKRO.2120.EBA.960.8	Jumlah tindaklanjut pengaduan masyarakat yang diverifikasi	Jumlah	700	700	710	720	730	740						
IKRO.2120.EBA.960.9	Jumlah ASN yang memperoleh nilai profesionalisme tinggi	Jumlah	N/A	405	432	459	486	513						
IKRO.2120.EBA.960.10	Jumlah laporan PPID menuju informatif	Jumlah	N/A	1	1	1	1	1						
IKRO.2120.EBA.960.11	Jumlah laporan Pembangunan Statistik dengan kategori baik	Jumlah	N/A	1	1	1	1	1						
IKRO.2120.EBA.9	Jumlah laporan Pelaksanaan	Jumlah	N/A	1	1	1	1	1						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
60.12 Transformasi Digital dengan kategori baik													
IKRO.2120.EBA.9 Jumlah Digitalisasi Arsip dan mudah di akses	Jumlah	N/A	50	70	75	80	85						
60.13 RO.2120.EBA.99 Layanan Perkantoran	Layanan	2	2	2	2	2	2	70.731	89.955	94.452	99.175	104.135	
4 IKRO.2120.EBA.9 Jumlah layanan gaji dan operasional perkantoran tepat waktu	Layanan	2	2	2	2	2	2						
94.1 RO.2120.EBB.95 Layanan Sarana Internal	Unit	1	1	1	1	1	1	4.434	4.656	4.888	5.133	5.390	
1 IKRO.2120.EBB.9 Jumlah sarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	Unit	1	1	1	1	1	1						
51.1 RO.2120.EBB.97 Layanan Prasarana Internal	Paket	5	5	5	5	5	5	6.940	7.287	7.651	8.033	8.435	
1 IKRO.2120.EBB.9 Jumlah prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	Paket	5	5	5	5	5	5						
71.1 2125 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam								502.460	622.853	668.600	669.100	669.600	[BIMAS ISLAM] Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
SK.2125.1 Meningkatnya Kualitas Layanan Tata Kelola Dukungan Manajemen Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam													
IKSK.2125.1.1 Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Bimas Islam	Nilai	93,47	88,00	90,00	90,50	91,00	91,50						
IKSK.2125.1.2 Persentase laporan kinerja satuan kerja Ditjen Bimas Islam yang sesuai standar	Persen	100,00	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00						
IKSK.2125.1.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Bimas Islam	Nilai	93,75	94,00	94,00	94,50	95,00	95,00						
IKSK.2125.1.4 Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Ditjen Bimas Islam	Persen	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00						
IKSK.2125.1.5 Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II Ditjen Bimas Islam yang sesuai standar dan tepat waktu	Jumlah	62	62	62	62	62	62						
IKSK.2125.1.6 Persentase pemenuhan target dan realisasi PNPB Ditjen Bimas Islam	Persen	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00						
IKSK.2125.1.7 Persentase Satuan Kerja Ditjen Bimas Islam yang menyusun RKBMN tepat waktu	Persen	85,00	88,00	90,00	95,00	97,00	98,00						
IKSK.2125.1.8 Indeks Profesionalisme ASN Ditjen Bimas Islam	Nilai	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00	82,00						
IKSK.2125.1.9 Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan Ditjen Bimas Islam	Persen	0,00	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00						
IKSK.2125.1.10 Persentase ASN Ditjen Bimas Islam yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	Persen	0,00	30,00	31,00	32,00	33,00	34,00						
IKSK.2125.1.11 Persentase ASN Ditjen Bimas Islam yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi	Persen	0,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.2125.1.12	Persentase rancangan peraturan yang diselesaikan sesuai perencanaan	Persen	N/A	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00					
IKSK.2125.1.13	Persentase kasus hukum Ditjen Bimas Islam yang terselesaikan	Persen	N/A	80,00	85,00	87,00	89,00	90,00					
IKSK.2125.1.14	Persentase rekomendasi tokoh agama asing yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam	Persen	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00					
IKSK.2125.1.15	Persentase Digitalisasi Arsip Ditjen Bimas Islam yang mudah di akses	Persen	15,00	25,00	50,00	75,00	85,00	95,00					
IKSK.2125.1.16	Persentase sarana dan prasarana perkantoran Ditjen Bimas Islam yang dikembangkan berbasis roadmap	Persen	15,00	25,00	50,00	75,00	85,00	95,00					
IKSK.2125.1.17	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID Ditjen Bimas Islam	Nilai	94,52	95,00	95,53	95,55	95,58	96,00					
IKSK.2125.1.18	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan Ditjen Bimas Islam yang dipublikasi	Persen	50,00	33,33	70,00	80,00	90,00	99,00					
IKSK.2125.1.19	Indeks Pembangunan Statistik Ditjen Bimas Islam	Nilai	1,40	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60					
IKSK.2125.1.20	Indeks Impelementasi Pelaksanaan Transformasi Digital Ditjen Bimas Islam	Nilai	60,00	65,00	70,00	80,00	90,00	95,00					
RO.2125.EBD.95	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	N/A	3	3	3	3	3	7.715	8.500	8.500	8.500	8.500
IKRO.2125.EBD.95.1	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	Dokumen	3	3	3	3	3	3					
RO.2125.EBD.95.3	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	1	1	1	1	1	1	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
IKRO.2125.EBD.95.3.1	Jumlah laporan evaluasi yang disusun tepat waktu	Dokumen	1	1	1	1	1	1					
RO.2125.EBA.96.0	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	N/A	1	1	1	1	1	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
IKRO.2125.EBA.96.0.1	Jumlah laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	Layanan	N/A	1	1	1	1	1					
RO.2125.EBD.96.1	Layanan Reformasi Kinerja	Dokumen	N/A	1	1	1	1	1	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500
IKRO.2125.EBD.96.1.1	Jumlah kegiatan penyusunan laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	Dokumen	N/A	1	1	1	1	1					
RO.2125.EBD.95.5	Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	N/A	1	1	1	1	1	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
IKRO.2125.EBD.95.5.1	Jumlah satuan kerja yang memiliki nilai indikator pelaksanaan anggaran diatas 90	Dokumen	N/A	1	1	1	1	1					
IKRO.2125.EBD.95.5.2	Jumlah penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Dokumen	N/A	1	1	1	1	1					
IKRO.2125.EBD.95.5.3	Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Dokumen	N/A	1	1	1	1	1					
IKRO.2125.EBD.95.5.4	Jumlah Penerimaan PNPB	Dokumen	N/A	1	1	1	1	1					
IKRO.2125.EBD.95.5.5	Jumlah Realisasi PNPB	Dokumen	N/A	1	1	1	1	1					
RO.2125.EBA.95.6	Layanan BMN	Layanan	N/A	1	1	1	1	1	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
IKRO.2125.EBA.95.6.1	Jumlah Satuan Kerja yang menyusun	Dokumen	1	1	1	1	1	1					

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
56.1 RKBMN tepat waktu													
RO.2125.EBC.954 Layanan Manajemen SDM	Orang	N/A	300	300	300	300	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
IKRO.2125.EBC.954.1 Jumlah ASN yang memperoleh Nilai Profesionalisme ASN	Orang	N/A	300	300	300	300	300						
IKRO.2125.EBC.954.2 Jumlah satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	Lembaga	N/A	3	3	3	3	3						
IKRO.2125.EBC.954.3 Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	Orang	N/A	5	5	5	5	5						
IKRO.2125.EBC.954.4 Jumlah ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi	Orang	N/A	300	300	300	300	300						
RO.2125.EBA.957 Layanan Hukum	Layanan	N/A	1	1	1	1	1	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
IKRO.2125.EBA.957.1 Jumlah rancangan peraturan yang diselesaikan sesuai perencanaan	Dokumen	N/A	1	1	1	1	1						
IKRO.2125.EBA.957.2 Jumlah rekomendasi tokoh agama asing yang diterbitkan	Dokumen	N/A	5	5	5	5	5						
RO.2125.EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	Layanan	N/A	1	1	1	1	1	500	1.500	1.500	1.500	1.500	
IKRO.2125.EBA.969.1 Jumlah kasus hukum yang terselesaikan	Layanan	N/A	1	1	1	1	1						
RO.2125.EBD.974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Dokumen	N/A	1	1	1	1	1	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
IKRO.2125.EBD.974.1 Jumlah Arsip Digitalisasi dan mudah diakses	Dokumen	N/A	1	1	1	1	1						
RO.2125.EBB.951 Layanan Sarana Internal	Unit	N/A	1	1	1	1	1	4.933	5.100	5.100	5.100	5.100	
IKRO.2125.EBB.951.1 Jumlah sarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	Unit	N/A	1	1	1	1	1						
RO.2125.EBB.971 Layanan Prasarana Internal	Unit	N/A	1	1	1	1	1	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
IKRO.2125.EBB.971.1 Jumlah prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	Unit	N/A	1	1	1	1	1						
RO.2125.EBA.959 Layanan Protokoler	Layanan	N/A	2	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	
IKRO.2125.EBA.959.1 Jumlah tamu pimpinan yang difasilitasi	Layanan	N/A	2	0	0	0	0						
RO.2125.EBA.962 Layanan Umum	Layanan	N/A	1	1	1	1	1	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
IKRO.2125.EBA.962.1 Jumlah pengadaan barang dan jasa yang diselesaikan	Layanan	N/A	1	1	1	1	1						
RO.2125.EBA.994 Layanan Perkantoran	Layanan	N/A	1	1	1	1	1	447.312	565.753	610.000	610.000	610.000	
IKRO.2125.EBA.994.1 Jumlah ASN yang menerima layanan Operasional Perkantoran	Layanan	N/A	1	1	1	1	1						
RO.2125.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	N/A	1	1	1	1	1	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
IKRO.2125.EBA.958.1 Jumlah konten keagamaan yang dipublikasi	Layanan	N/A	1	1	1	1	1						
IKRO.2125.EBA.958.2 Jumlah satuan kerja yang menyelenggarakan PPID	Layanan	N/A	1	1	1	1	1						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO.2125.EBA.963 Layanan Data dan Informasi	Layanan	N/A	1	1	1	1	1	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
IKRO.2125.EBA.963.1 Jumlah Data Statistik yang di publikasi	Layanan	N/A	1	1	1	1	1						
IKRO.2125.EBA.963.2 Jumlah Layanan Keagamaan Berbasis Transformasi IT	Layanan	N/A	1	1	1	1	1						
2135 Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam								5.502.778	6.407.125	6.580.668	6.417.715	6.612.482	[PENDIS] Sekretariat Ditjen Pendis
SK.2135.1 Meningkatnya kualitas layanan tata kelola dukungan manajemen Ditjen Pendidikan Islam													
IKSK.2135.1.1 Nilai Kinerja Anggaran di Ditjen Pendidikan Islam	Nilai	82,50	83,00	83,50	84,00	84,50	85,00						
IKSK.2135.1.2 Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar di Ditjen Pendidikan Islam	Persen	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00						
IKSK.2135.1.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Ditjen Pendidikan Islam	Nilai	N/A	90,10	90,25	90,50	91,00	91,25						
IKSK.2135.1.4 Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di Ditjen Pendidikan Islam	Persen	80,97	81,02	81,07	81,12	81,17	81,22						
IKSK.2135.1.5 Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu di Ditjen Pendidikan Islam	Jumlah	N/A	90,50	91,25	92,00	92,75	93,25						
IKSK.2135.1.6 Persentase pemenuhan target dan realisasi PNPB dan BLU di Ditjen Pendidikan Islam	Persen	37,93	39,66	41,38	43,10	44,83	46,55						
IKSK.2135.1.7 Persentase satuan kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu di Ditjen Pendidikan Islam	Persen	43,00	43,00	43,00	44,00	45,00	46,00						
IKSK.2135.1.8 Indeks Profesionalisme ASN di Ditjen Pendidikan Islam	Nilai	N/A	70,60	73,27	75,73	77,27	78,04						
IKSK.2135.1.9 Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan di Ditjen Pendidikan Islam	Persen	80,00	81,00	82,00	83,00	88,00	89,00						
IKSK.2135.1.10 Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif di Ditjen Pendidikan Islam	Persen	N/A	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00						
IKSK.2135.1.11 Persentase ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi di Ditjen Pendidikan Islam	Persen	N/A	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00						
IKSK.2135.1.12 Jumlah rancangan peraturan yang diselesaikan sesuai perencanaan di Ditjen Pendidikan Islam	Jumlah	2	1	1	1	1	1						
IKSK.2135.1.13 Persentase kasus hukum yang terselesaikan di Ditjen Pendidikan Islam	Persen	70,00	75,00	76,00	77,00	78,00	78,50						
IKSK.2135.1.14 Persentase rekomendasi izin orang asing di Ditjen Pendidikan Islam	Persen	N/A	75,00	77,00	79,00	81,00	83,00						
IKSK.2135.1.15 Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah diakses di Ditjen Pendidikan Islam	Persen	10,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00						

KODE	SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.2135.1.16	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis <i>roadmap</i> di Ditjen Pendidikan Islam	Persen	N/A	5,00	8,00	10,00	12,00	15,00						
IKSK.2135.1.17	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID di Ditjen Pendidikan Islam	Nilai	N/A	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00						
IKSK.2135.1.18	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi di Ditjen Pendidikan Islam	Persen	46,72	55,00	64,00	74,50	86,00	98,30						
IKSK.2135.1.19	Indeks Pembangunan Statistik di Ditjen Pendidikan Islam	Nilai	N/A	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30						
IKSK.2135.1.20	Indeks Implementasi Pelaksanaan Transformasi Digital di Ditjen Pendidikan Islam	Nilai	47,40	46,32	49,30	52,29	55,27	58,25						
RO.2135.EBD.95.2	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	9	10	10	11	11	12	4.345	4.720	4.923	5.148	5.383	
IKRO.2135.EBD.95.2.1	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan di Ditjen Pendidikan Islam	Dokumen	9	10	10	11	11	12						
RO.2135.EBD.95.3	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	1	16	16	17	18	19	4.433	378.800	378.800	401.082	423.365	
IKRO.2135.EBD.95.3.1	Jumlah kegiatan pengukuran capaian Nilai Kinerja Anggaran di Ditjen Pendidikan Islam	Kegiatan	7	7	7	7	7	7						
IKSK.2135.2.1	Nilai Pembangunan Zona Integritas	Nilai	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65						
RO.2135.EBA.96.0	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1	2	2	2	3	3	2.000	2.000	2.000	2.667	2.667	
IKRO.2135.EBA.96.0.1	Jumlah laporan kinerja satuan kerja sesuai standar di Ditjen Pendidikan Islam	Dokumen	4	4	4	4	4	4						
RO.2135.EBD.96.1	Layanan Reformasi Kinerja	Dokumen	3	3	5	7	8	10	2.000	2.800	3.600	4.050	4.860	
IKRO.2135.EBD.96.1.1	Jumlah kegiatan penyusunan laporan kinerja satuan kerja sesuai standar di Ditjen Pendidikan Islam	Laporan	4	4	4	4	4	4						
RO.2135.EBD.95.5	Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	N/A	642	668	694	722	751	13.730	16.164	16.785	17.431	18.101	
IKRO.2135.EBD.95.5.1	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu di Ditjen Pendidikan Islam	Laporan	N/A	2	2	2	2	2						
IKRO.2135.EBD.95.5.2	Jumlah hasil pemeriksaan yang ditindak lanjut di Ditjen Pendidikan Islam	Jumlah	288.165	290.000	291.000	292.000	293.000	294.000						
IKRO.2135.EBD.95.5.3	Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu di Ditjen Pendidikan Islam	Laporan	2	2	2	2	2	2						
IKRO.2135.EBD.95.5.4	Jumlah Penerimaan PNPB di Ditjen Pendidikan Islam	Jumlah	N/A	668.341.977.000	668.341.977.000	668.341.977.000	668.341.977.000	668.341.977.000						
IKRO.2135.EBD.95.5.5	Jumlah Realisasi PNPB di Ditjen Pendidikan Islam	Jumlah	N/A	566.799.351.369	566.799.351.369	566.799.351.369	566.799.351.369	566.799.351.369						
RO.2135.EBA.95.6	Layanan BMN	Layanan	N/A	515	525	536	547	557	6.864	6.999	7.136	7.276	7.418	

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKRO.2135.EBA.956.1Jumlah Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu di Ditjen Pendidikan Islam	Lembaga	2.453	2.453	2.453	2.497	2.553	2.610						
RO.2135.EBC.954 Layanan Manajemen SDM	Layanan	N/A	100	101	102	103	104	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040	
IKRO.2135.EBC.954.1Jumlah ASN yang memperoleh Nilai Profesionalisme ASN di Ditjen Pendidikan Islam	Orang	N/A	21.576	21.680	21.790	21.900	22.010						
IKRO.2135.EBC.954.2Jumlah satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan di Ditjen Pendidikan Islam	Lembaga	N/A	2.932	2.932	2.932	2.932	2.932						
IKRO.2135.EBC.954.3Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif di Ditjen Pendidikan Islam	Orang	N/A	20	24	28	32	36						
RO.2135.EBC.996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Orang	N/A	500	505	510	515	520	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040	
IKRO.2135.EBC.996.1Jumlah ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi di Ditjen Pendidikan Islam	Orang	N/A	365	369	373	377	381						
IKSK.2135.4.5Nilai kepuasan layanan kepegawaian	Nilai	N/A	70,00	72,50	75,00	77,50	80,00						
RO.2135.EBA.957 Layanan Hukum	Layanan	N/A	46	47	48	49	50	1.000	1.020	1.040	1.060	1.081	
IKRO.2135.EBA.957.1Jumlah rancangan peraturan yang diselesaikan sesuai perencanaan di Ditjen Pendidikan Islam	Layanan	2	1	1	1	1	1						
IKRO.2135.EBA.957.2Jumlah rekomendasi izin orang asing di Ditjen Pendidikan Islam	Dokumen	1.570	1.670	1.770	1.870	1.970	2.070						
RO.2135.EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	Layanan	N/A	48	49	50	51	52	1.000	1.020	1.040	1.060	1.081	
IKRO.2135.EBA.969.1Jumlah kasus hukum yang terselesaikan di Ditjen Pendidikan Islam	Layanan	N/A	5	5	5	5	5						
RO.2135.EBA.958 Jumlah kasus hukum yang terselesaikan di Ditjen Pendidikan Islam	Layanan	75	76	78	81	84	88	16.610	17.036	17.667	18.298	19.130	
IKRO.2135.EBA.958.1Jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi di Ditjen Pendidikan Islam	Konten	2.336	2.786	3.311	3.886	4.501	5.131						
IKRO.2135.EBA.958.2Jumlah satuan kerja yang menyelenggarakan PPID di Ditjen Pendidikan Islam	Lembaga	N/A	110	113	116	119	121						
RO.2135.EBA.963 Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	1	1	2	2	2	3.494	3.494	5.241	5.241	5.241	
IKRO.2135.EBA.963.1Jumlah data Statistik yang dipublikasi di Ditjen Pendidikan Islam	Dokumen	N/A	3	3	4	4	5						
IKRO.2135.EBA.963.2Jumlah layanan keagamaan dan pendidikan berbasis digital	Layanan	N/A	3	3	4	4	5						
RO.2135.EBD.974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan di Ditjen Pendidikan Islam	Dokumen	1	1	1	2	2	3	1.000	1.000	1.500	1.500	2.000	
IKRO.2135.EBD.974.1Jumlah Arsip Digitalisasi dan mudah diakses di Ditjen Pendidikan Islam	Dokumen	2.487	2.487	3.730	4.974	6.217	7.461						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO.2135.EBB.971 Layanan Prasarana Internal di Ditjen Pendidikan Islam	Layanan	N/A	414	422	431	439	448	54.609	55.680	56.772	57.885	59.020	
IKRO.2135.EBB.971.1 Jumlah Layanan Prasarana Internal di Ditjen Pendidikan Islam	Layanan	1	1	1	1	1	1						
RO.2135.EBB.951 Layanan Sarana Internal di Ditjen Pendidikan Islam	Unit	N/A	31	33	34	36	38	14.976	15.689	16.436	17.219	18.039	
IKRO.2135.EBB.951.1 Jumlah sarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap di Ditjen Pendidikan Islam	Unit	8.957	8.960	8.965	8.970	8.975	8.980						
RO.2135.EBA.959 Layanan Protokol di Ditjen Pendidikan Islam	Layanan	1	6	7	8	9	10	1.000	1.143	1.286	1.429	1.571	
IKRO.2135.EBA.959.1 Jumlah tamu pimpinan yang difasilitasi di Ditjen Pendidikan Islam	Layanan	72	50	50	50	50	50						
RO.2135.EBA.962 Layanan Umum di Ditjen Pendidikan Islam	Layanan	669	667	704	744	785	829	45.044	47.433	49.948	52.597	55.386	
IKRO.2135.EBA.962.1 Jumlah pengadaan barang dan jasa yang diselesaikan di Ditjen Pendidikan Islam	Layanan	56	40	40	40	40	40						
RO.2135.EBA.994 Layanan Perkantoran di Ditjen Pendidikan Islam	Layanan	4.442	4.305	4.442	4.579	4.716	4.853	5.328.673	5.850.109	6.014.455	5.821.713	5.986.060	
IKRO.2135.EBA.994.1 Jumlah prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap di Ditjen Pendidikan Islam	Unit	30.414	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000						
2138 Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen								223.734	271.839	310.429	354.980	415.381	[BIMAS KRISTEN] Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen
SK.2138.1 Meningkatnya Kualitas Layanan Tata Kelola Dukungan Manajemen Ditjen Bimas Kristen													
IKSK.2138.1.1 Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Bimas Kristen	Nilai	70,00	83,00	83,83	84,67	85,51	86,37						
IKSK.2138.1.2 Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	Persen	97,00	97,00	97,50	98,00	98,50	99,00						
IKSK.2138.1.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Bimas Kristen	Nilai	94,73	95,20	95,68	96,16	96,64	97,12						
IKSK.2138.1.4 Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Ditjen Bimas Kristen	Persen	64,23	65,69	68,61	71,53	74,45	80,29						
IKSK.2138.1.5 Persentase Laporan Keuangan Ditjen Bimas Kristen Semester I dan II yang sesuai standar dan tepat waktu	Jumlah	90	92	93	94	95	96,00						
IKSK.2138.1.6 Persentase pemenuhan target dan realisasi PNPB dan BLU Ditjen Bimas Kristen	Persen	92,86	94,00	94,50	95,00	95,50	96,00						
IKSK.2138.1.7 Persentase Satuan Kerja pada Ditjen Bimas Kristen yang menyusun RKBMN tepat waktu	Persen	N/A	36,36	45,45	68,18	90,91	99,00						
IKSK.2138.1.8 Indeks Profesionalisme ASN Ditjen Bimas Kristen	Nilai	71	72	73	74	75	76,00						
IKSK.2138.1.9 Persentase satuan kerja pada Ditjen Bimas Kristen yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana	Persen	36,36	36,36	45,45	54,55	68,18	90,91						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan												
IKSK.2138.1.10	Persentase ASN Ditjen Bimas Kristen yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	Persen	N/A	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00					
IKSK.2138.1.11	Persentase ASN Ditjen Bimas Kristen yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi	Persen	N/A	5,00	7,00	8,00	9,00	10,00					
IKSK.2138.1.12	Persentase Rancangan Peraturan Ditjen Bimas Kristen yang diselesaikan sesuai perencanaan	Jumlah	N/A	87,50	90	92,50	95	97,50					
IKSK.2138.1.13	Persentase kasus hukum pada Ditjen Bimas Kristen yang terselesaikan	Persen	80,00	91,00	83,00	83,00	83,00	83,00					
IKSK.2138.1.14	Persentase rekomendasi rohaniwan, pengajar dan pelajar asing yang diterbitkan oleh Ditjen Bimas Kristen	Persen	95,00	73,60	73,68	73,77	73,86	73,95					
IKSK.2138.1.15	Persentase Digitalisasi Arsip Ditjen Bimas Kristen dan mudah di akses	Persen	80,00	82,00	85,00	88,00	90,00	92,00					
IKSK.2138.1.16	Persentase sarana dan prasarana perkantoran Ditjen Bimas Kristen yang dikembangkan berbasis roadmap	Persen	75,00	80,00	85,00	88,00	90,00	95,00					
IKSK.2138.1.17	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID Ditjen Bimas Kristen	Nilai	N/A	80	81	82	83	84					
IKSK.2138.1.18	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi oleh Ditjen Bimas Kristen	Persen	N/A	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00					
IKSK.2138.1.19	Indeks Pembangunan Statistik Ditjen Bimas Kristen	Nilai	N/A	2,72	3,00	3,00	3,00	3,50					
IKSK.2138.1.20	Indeks Implementasi Pelaksanaan Transformasi Digital Ditjen Bimas Kristen	Nilai	N/A	50,00	60,00	70,00	75,00	80,00					
RO.2138.EBD.95	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	1	1	1	1	1	1	898	1.500	2.200	3.191	4.514
IKRO.2138.EBD.95.1	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Ditjen Bimas Kristen	Dokumen	1	1	1	1	1	1					
IKRO.2138.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	4	4	4	4	4	4	984	1.131	1.301	1.496	1.720
IKRO.2138.EBD.953.1	Jumlah dokumen evaluasi dan laporan Ditjen Bimas Kristen	Dokumen	4	4	4	4	4	4					
RO.2138.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1	1	1	1	1	1	1.834	2.109	2.425	2.789	3.207
IKRO.2138.EBA.960.1	Jumlah laporan kinerja satuan kerja pada Ditjen Bimas Kristen yang disusun sesuai standar	Dokumen	1	1	1	1	1	1					
RO.2138.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	Layanan	1	1	1	1	1	1	250	1.000	1.000	1.000	1.000
IKRO.2138.EBD.961	Jumlah kegiatan penyusunan laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	Kegiatan	4	4	4	4	4	4					
RO.2138.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	Layanan	1	1	1	1	1	1	2.502	2.877	3.309	3.805	4.376
IKRO.2138.EBD.955.1	Jumlah satuan kerja yang memiliki nilai indikator pelaksanaan anggaran diatas 90	Nilai	7	7	7	7	8	8					
IKRO.2138.EBD.9	Jumlah penyelesaian tindak lanjut hasil	Jumlah	88	90	94	98	102	110					

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
55.2 pemeriksaan pada Ditjen Bimas Kristen													
IKRO.2138.EBD.9 Jumlah Laporan Keuangan Ditjen Bimas Kristen semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Dokumen	2	2	2	2	2	2						
55.3 IKRO.2138.EBD.9 Jumlah Penerimaan PNPB dan BLU Ditjen Bimas Kristen	Rupiah	46.154.191.000	52.673.430.000	53.517.839.000	54.900.000.000	57.484.047.000	60.186.466.000						
55.4 IKRO.2138.EBD.9 Jumlah Realisasi PNPB dan BLU Ditjen Bimas Kristen	Rupiah	47.606.191.000	49.513.024.200	50.574.357.855	52.155.000.000	54.897.264.885	57.779.007.360						
RO.2138.EBA.956 Layanan BMN	Layanan	1	1	1	1	1	1	300	1.000	1.000	1.000	1.000	
IKRO.2138.EBA.9 Jumlah satuan kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	Satker	N/A	8	10	15	20	22						
IKRO.2138.EBC.954 Layanan Manajemen SDM	Layanan	1,00	1	1	1	1	1	200	2.000	2.000	2.000	2.000	
IKRO.2138.EBC.9 Jumlah ASN Ditjen Bimas Kristen yang memperoleh Nilai Profesionalisme ASN	Orang	N/A	60	80	100	120	140						
IKRO.2138.EBC.9 Jumlah satuan kerja pada Ditjen Bimas Kristen memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	Satker	8,00	8	10	12	15	20						
IKRO.2138.EBC.9 Jumlah ASN Ditjen Bimas Kristen yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	Orang	N/A	3	10	15	20	25						
IKRO.2138.EBC.9 Jumlah ASN Ditjen Bimas Kristen yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi	Orang	N/A	53	63	74	85	95						
IKRO.2138.EBC.996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Layanan	1,00	1	0	0	0	0	149	0	0	0	0	
IKRO.2138.EBC.9 Jumlah Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Layanan	N/A	1	0	0	0	0						
RO.2138.EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	Layanan	1,00	1	1	1	1	1	280	1.000	1.000	1.000	10.000	
IKRO.2138.EBA.9 Jumlah kasus hukum Ditjen Bimas Kristen yang terselesaikan	Jumlah	5,00	5	5	5	5	5						
RO.2138.EBA.957 Layanan Hukum	Layanan	1,00	1	1	1	1	1	250	300	300	300	300	
IKRO.2138.EBA.9 Jumlah rancangan peraturan yang diselesaikan sesuai perencanaan Ditjen Bimas Kristen	Rancangan	400	350	360	370	380	390						
IKRO.2138.EBA.9 Jumlah rekomendasi rohaniwan, pengajar dan pelajar asing yang diterbitkan oleh Ditjen Bimas Kristen	Rekomen-dasi	1140	839	840	841	842	843						
RO.2138.CAN.951 Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Unit	N/A	88	90	100	120	150	1.168	1.343	1.545	1.776	2.043	
IKRO.2138.CAN.9 Jumlah Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keagamaan Kristen yang tersedia	Unit	N/A	88	90	100	120	150						
RO.2138.CAN.97 Prasarana Bidang Teknologi Informasi	Unit	N/A	1	1	1	1	1	100	7.500	7.500	7.500	7.500	

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) /SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1 dan Komunikasi													
IKRO.2138.CAN.9 Prasarana Internal Keagamaan Kristen Bidang Teknologi Informasi	Unit	N/A	1	1	1	1	1						
RO.2138.EBB.951 Layanan Sarana Internal	Unit	1	1	1	1	1	1	500	600	700	800	900	
IKRO.2138.EBB.951.1 Jumlah Layanan Sarana Internal	Unit	1	1	1	1	1	1						
RO.2138.EBB.971 Layanan Prasarana Internal	Unit	1	1	1	1	1	1	250	500	500	500	500	
IKRO.2138.EBB.971.1 Jumlah Layanan Prasarana Internal	Unit	1	1	1	1	1	1						
RO.2138.EBA.962 Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	1	380	500	500	500	500	
IKRO.2138.EBA.962.1 Jumlah pengadaan barang dan jasa yang diselesaikan	Pengadaan	N/A	16	18	18	18	18						
RO.2138.EBA.994 Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	1	212.590	244.478	281.150	323.323	371.821	
IKRO.2138.EBA.994.1 Jumlah layanan perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	1						
IKRO.2138.EBA.994.2 Jumlah ASN yang menerima layanan operasional perkantoran	Orang	N/A	168	168	175	182	200						
RO.2138.EBD.974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Layanan	1	1	1	1	1	1	300	1.000	1.000	1.000	1.000	
IKRO.2138.EBD.974.1 Jumlah Arsip Digitalisasi dan mudah diakses Pada Ditjen Bimas Kristen	Jumlah	160	164	170	176	180	184						
RO.2138.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	1	1	1	1	1	1	500	500	500	500	500	
IKRO.2138.EBA.958.2 Nilai kematangan penyelenggaraan PPID Ditjen Bimas Kristen	Nilai	N/A	80	81	82	83	84						
IKRO.2138.EBA.958.3 Jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi oleh Ditjen Bimas Kristen	Konten	24	26	30	36	46	60						
RO.2138.EBA.963 Layanan Data dan Informasi	Layanan	1,00	1	1	1	1	1	300	2.500	2.500	2.500	2.500	
IKRO.2138.EBA.963.1 Jumlah data Statistik Ditjen Bimas Kristen yang di publikasi	Jumlah	N/A	1	2	3	4	5						
IKRO.2138.EBA.963.2 Jumlah layanan keagamaan Kristen dan pendidikan keagamaan Kristen berbasis digital	Layanan	N/A	2	2	2	2	2						
2141 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik								42.749	49.075	56.437	64.902	74.638	[BIMAS KATOLIK] Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik
SK.2141.1 Meningkatnya kualitas layanan tata kelola dukungan manajemen Ditjen Bimas Katolik													
IKSK.2141.1.1 Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Bimas Katolik	Nilai	N/A	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00						
IKSK.2141.1.2 Persentase laporan kinerja satuan kerja Ditjen Bimas Katolik sesuai standar	Persen	N/A	80,00	85,00	90,00	95,00	96,00						
IKSK.2141.1.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Bimas Katolik	Nilai	93,30	94,00	95,00	96,00	97,00	97,00						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.2141.1.4	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Ditjen Bimas Katolik	Persen	N/A	5,88	11,76	17,65	23,53	29,41					
IKSK.2141.1.5	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II Ditjen Bimas Katolik yang sesuai standar dan tepat waktu	Persen	213,00	80,00	85,00	90,00	95,00	96,00					
IKSK.2141.1.6	Persentase pemenuhan target dan realisasi PNBPN dan BLU Ditjen Bimas Katolik	Persen	78,92	85,00	89,00	93,00	95,00	96,00					
IKSK.2141.1.7	Persentase Satuan Kerja Ditjen Bimas Katolik yang menyusun RKBMN tepat waktu	Persen	N/A	20,00	40,00	60,00	80,00	85,00					
IKSK.2141.1.8	Indeks Profesionalisme ASN Ditjen Bimas Katolik	Nilai	79,64	79,64	79,64	79,64	79,64	79,64					
IKSK.2141.1.9	Persentase satuan kerja Ditjen Bimas Katolik yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	Persen	N/A	80,00	85,00	90,00	95,00	96,00					
IKSK.2141.1.10	Persentase ASN Ditjen Bimas Katolik yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	Persen	N/A	0,00	4,27	8,55	12,82	17,09					
IKSK.2141.1.11	Persentase ASN Ditjen Bimas Katolik yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi	Persen	N/A	64,10	72,65	81,20	90,60	95,00					
IKSK.2141.1.12	Persentase rancangan peraturan pada Ditjen Bimas Katolik yang diselesaikan sesuai perencanaan	Persen	N/A	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00					
IKSK.2141.1.13	Persentase rekomendasi tokoh agama/rohaniwan, pendidik, dan pelajar asing yang diterbitkan Ditjen Bimas Katolik	Persen	N/A	23,33	43,33	63,33	83,33	85,00					
IKSK.2141.1.14	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses pada Ditjen Bimas Katolik	Persen	N/A	18,62	23,73	32,22	49,18	50,00					
IKSK.2141.1.15	Persentase sarana dan prasarana perkantoran Ditjen Bimas Katolik yang dikembangkan berbasis roadmap	Persen	N/A	20,00	25,00	33,35	50,03	60,00					
IKSK.2141.1.16	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID Ditjen Bimas Katolik	Nilai	N/A	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00					
IKSK.2141.1.17	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan Ditjen Bimas Katolik yang dipublikasi	Persen	N/A	18,26	37,39	57,39	78,26	80,00					
IKSK.2141.1.18	Indeks Pembangunan Statistik Ditjen Bimas Katolik	Nilai	N/A	1,80	1,90	2,10	2,30	2,60					
IKSK.2141.1.19	Indeks Implementasi Pelaksanaan Transformasi Digital Ditjen Bimas Katolik	Nilai	N/A	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00					
RO.2141.CAN.997	Pengadaan Perangkat TIK	Unit	31	29	35	40	46	53	396	525	690	913	1.209
IKRO.2141.CAN.997.1	Jumlah pengadaan perangkat TIK pada Ditjen Bimas Katolik yang dikembangkan berbasis roadmap	Unit	31	29	35	40	46	53					
RO.2141.EBA.956	Layanan BMN	Layanan	N/A	1	1	1	1	1	70	100	115	132	152

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) /SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKRO.2141.EBA.956.1Jumlah Satuan Kerja Ditjen Bimas Katolik yang menyusun RKBMN tepat waktu	Satker	N/A	213	213	213	213	213						
RO.2141.EBA.957Layanan Hukum	Layanan	N/A	1	1	1	1	1	75	86	99	114	131	
IKRO.2141.EBA.957.1Jumlah rancangan peraturan pada Ditjen Bimas Katolik yang diselesaikan sesuai perencanaan	Dokumen	N/A	2	2	1	1	1						
IKRO.2141.EBA.957.2Jumlah rekomendasi tokoh agama, pendidik dan pelajar asing yang diterbitkan Ditjen Bimas Katolik	Rekomendasi	N/A	350	300	300	300	250						
RO.2141.EBA.958Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	N/A	3	1	1	1	1	1.374	1.400	1.610	1.852	2.129	
IKRO.2141.EBA.958.1Jumlah satuan kerja Ditjen Bimas Katolik yang menyelenggarakan PPID	Satker	N/A	1	1	1	1	1						
RO.2141.EBA.959Layanan Protokoler	Layanan	N/A	1	1	1	1	1	75	0	0	0	0	
IKRO.2141.EBA.959.1Jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	Konten	N/A	420	0	0	0	0						
RO.2141.EBA.960Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	N/A	1	1	1	1	1	75	86	99	114	131	
IKRO.2141.EBA.960.1Jumlah kegiatan penyusunan laporan kinerja pada Ditjen Bimas Katolik	Kegiatan	1,00	1	1	1	1	1						
RO.2141.EBA.962Layanan Umum	Layanan	30,00	1	1	1	1	1	33	38	44	50	58	
IKRO.2141.EBA.962.1Jumlah pengadaan barang dan jasa pada Ditjen Bimas Katolik yang diselesaikan	Paket	N/A	1	1	1	1	1						
RO.2141.EBA.963Layanan Data dan Informasi	Layanan	N/A	1	1	1	1	1	90	104	119	137	157	
IKRO.2141.EBA.963.1Jumlah data Statistik Ditjen Bimas Katolik yang di publikasi	Data	N/A	21	21	21	21	21						
IKRO.2141.EBA.963.2Jumlah layanan keagamaan dan pendidikan Ditjen Bimas Katolik berbasis digital	Layanan	N/A	5	5	5	5	5						
RO.2141.EBA.994Layanan Perkantoran	Layanan	119,00	193	209	209	209	209	37.426	43.353	49.397	56.509	64.801	
IKRO.2141.EBA.994.1Jumlah ASN Ditjen Bimas Katolik yang menerima layanan operasional perkantoran	Orang	N/A	117	117	117	117	117						
RO.2141.EBB.951Layanan Sarana Internal	Unit	109,00	187	200	230	265	304	1.529	1.589	2.011	2.233	2.296	
IKRO.2141.EBB.951.1Jumlah sarana internal Ditjen Bimas Katolik yang disediakan	Unit	N/A	187	200	230	265	304						
RO.2141.EBB.971Layanan Prasarana Internal	Unit	N/A	2	2	1	1	1	371	400	460	529	608	
IKRO.2141.EBB.971.1Jumlah prasarana perkantoran Ditjen Bimas Katolik yang dikembangkan berbasis roadmap	Unit	N/A	2	2	1	1	1						
RO.2141.EBC.954Layanan Manajemen SDM	Orang	N/A	157	157	157	157	157	75	86	99	114	131	
IKRO.2141.EBC.954.1Jumlah ASN Ditjen Bimas Katolik yang	Orang	N/A	65	70	75	80	85						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
54.1 memperoleh Nilai Profesionalisme ASN													
IKRO.2141.EBC.9 Jumlah satuan kerja Ditjen Bimas Katolik yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	Satker	N/A	1	1	1	1	1						
54.2													
IKRO.2141.EBC.9 Jumlah ASN Ditjen Bimas Katolik yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	Orang	N/A	0	5	10	15	20						
54.3													
IKRO.2141.EBC.9 Jumlah ASN Ditjen Bimas Katolik yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi	Orang	N/A	75	85	95	106	117						
54.4													
RO.2141.EBD.95 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	N/A	15	17	20	23	26	556	595	805	1.065	1.384	
IKRO.2141.EBD.9 Jumlah dokumen perencanaan Ditjen Bimas Katolik yang dihasilkan	Dokumen	N/A	4	4	4	4	4						
52.1													
RO.2141.EBD.95 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	N/A	1	1	1	1	1	37	42	48	56	64	
3													
IKRO.2141.EBD.9 Jumlah laporan evaluasi Ditjen Bimas Katolik yang disusun tepat waktu	Dokumen	N/A	12	12	12	12	12						
53.1													
RO.2141.EBD.95 Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	N/A	13	15	17	20	23	375	450	587	794	1.049	
5													
IKRO.2141.EBD.9 Jumlah satuan kerja Ditjen Bimas Katolik yang memiliki Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran diatas 90	Satker	93,30	178	185	190	207	213						
55.1													
IKRO.2141.EBD.9 Jumlah penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Ditjen Bimas Katolik	Dokumen	N/A	0	1	2	3	4						
55.2													
IKRO.2141.EBD.9 Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II Ditjen Bimas Katolik yang sesuai standar dan tepat waktu	Dokumen	213.00	213	213	213	213	213						
55.3													
IKRO.2141.EBD.9 Jumlah Penerimaan PNPB dan BLU Ditjen Bimas Katolik	Nilai	1.815.855,69	1.544.750,00	1.920.650,00	1.927.750,00	1.943.300,00	1.956.450,00						
55.4													
IKRO.2141.EBD.9 Jumlah Realisasi PNPB dan BLU Ditjen Bimas Katolik	Nilai	1.205.489,17	1.529.302,50	1.901.443,50	1.908.472,50	1.923.867,00	1.936.885,50						
55.5													
RO.2141.EBD.96 Layanan Reformasi Kinerja	Dokumen	N/A	1	1	1	1	1	75	86	99	114	131	
1													
IKRO.2141.EBD.9 Jumlah laporan kinerja satuan kerja Ditjen Bimas Katolik yang disusun sesuai standar	Dokumen	N/A	1	1	1	1	1						
61.1													
RO.2141.EBD.97 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Dokumen	1,00	1	1	1	1	1	117	134	155	178	205	
4													
IKRO.2141.EBD.9 Jumlah Arsip Ditjen Bimas Katolik yang Digitalisasi dan mudah di akses	Dokumen	N/A	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100						
74.1													
2144 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu								38.680	56.844	56.247	57.539	57.536	[BIMAS HINDU] Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu
SK.2144.1 Meningkatnya kualitas layanan tata kelola dukungan manajemen Ditjen Bimas Hindu													
IKSK.2144.1.1 Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Bimas Hindu	Nilai	71,00	85,00	86,00	88,00	89,00	90,00						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO.2144.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	28	86	122	122	110	108	2.529	4.103	4.203	4.203	4.203	
IKRO.2144.EBD.952.1 Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan Ditjen Bimas Hindu	Dokumen	6	6	6	6	6	6						
RO.2144.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	7	7	7	7	7	7	402	633	633	633	633	
IKRO.2144.EBD.953.1 Jumlah kegiatan pengukuran capaian Nilai Kinerja Anggaran Dirjen Bimas Hindu	Kegiatan	4	4	4	4	4	4						
IKSK.2144.1.2 persentase satuan kerja yang memperoleh nilai pembangunan zona integritas minimal 75	Persen	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00						
IKSK.2144.1.3 Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	Persen	75,00	75,00	77,00	79,00	81,00	82,00						
RO.2144.EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja	Dokumen	4	4	4	4	4	4	300	500	50	50	50	
IKRO.2144.EBD.961.1 Jumlah laporan kinerja satuan kerja Ditjen Bimas Hindu sesuai standar	Dokumen	4	4	4	4	4	4						
IKRO.2144.EBD.961.2 Jumlah satuan kerja yang memperoleh nilai pembangunan zona integritas minimal 75	Dokumen	0	0	0	1	1	1						
IKSK.2144.1.4 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	95,00	95,00	96,00	96,00	96,00	96,00						
IKSK.2144.1.5 Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Persen	100,00	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00						
IKSK.2144.1.6 Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Persen	100,00	96,00	97,00	98,00	99,00	99,00						
IKSK.2144.1.7 Persentase pemenuhan target dan realisasi PNPB dan BLU	Persen	N/A	96,00	97,00	98,00	99,00	99,00						
IKSK.2144.1.8 Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	Persen	100,00	96,00	97,00	98,00	99,00	99,00						
RO.2144.EBA.956 Layanan BMN	Layanan	20	20	30	40	50	60	200	260	260	260	260	
IKRO.2144.EBA.956.1 Jumlah Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	Dokumen	20	20	30	40	50	60						
RO.2144.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	5	5	5	5	5	5	580	700	700	700	700	
IKRO.2144.EBD.955.1 Jumlah penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Ditjen Bimas Hindu	Dokumen	10	10	11	12	13	14						
IKRO.2144.EBD.955.2 Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Dokumen	4	4	4	4	4	4						
IKRO.2144.EBD.955.3 Jumlah Penerimaan PNPB dan BLU Ditjen Bimas Hindu	Lembaga	5	5	5	5	5	5						
IKRO.2144.EBD.955.4 Jumlah Realisasi PNPB dan BLU Ditjen Bimas Hindu	Lembaga	5	5	5	5	5	5						
IKRO.2144.EBD.955.5 Jumlah satuan kerja Ditjen Bimas Hindu yang menerapkan pengendalian intern atas pelaporan keuangan (PIPK)	Dokumen	1	1	1	1	1	1						
IKSK.2144.1.9 Indeks Profesionalisme ASN	Nilai	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00						
IKSK.2144.1.10 Persentase satuan kerja yang memiliki	Persen	N/A	75,00	80,00	82,00	85,00	90,00						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan												
IKSK.2144.1.11	Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	Persen	N/A	5,00	6,00	8,00	9,00	10,00					
IKSK.2144.1.12	Persentase ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi	Persen	60,00	0,00	63,00	0,00	65,00	0,00					
RO.2144.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	Dokumen	20	20	20	20	20	20	793	1.000	1.000	1.000	1.000
IKRO.2144.EBC.954.1	Jumlah ASN yang memperoleh Nilai Profesionalisme ASN dengan kategori minimal sedang	Orang	65	65	65	70	70	75					
IKRO.2144.EBC.954.2	Jumlah satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	Dokumen	1	1	1	1	1	1					
IKRO.2144.EBC.954.3	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	Orang	6	6	7	8	9	10					
IKSK.2144.1.13	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	Persen	100,00	96,00	97,00	98,00	99,00	99,00					
IKSK.2144.1.14	Persentase rekomendasi izin tokoh agama, tenaga pendidik dan pelajar asing Ditjen Bimas Hindu	Persen	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00					
IKSK.2144.1.15	Persentase rancangan peraturan yang diselesaikan sesuai perencanaan	Persen	90,00	92,00	93,00	94,00	95,00	95,00					
RO.2144.EBA.957	Layanan Hukum	Layanan	N/A	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0
IKRO.2144.EBA.957.1	Jumlah rancangan peraturan yang diselesaikan sesuai perencanaan	Rancangan Peraturan	487	100	110	120	130	140					
IKRO.2144.EBA.957.2	Jumlah kasus hukum yang terselesaikan	Kasus Hukum	2	2	2	2	2	2					
IKRO.2144.EBA.957.3	Jumlah rekomendasi izin tokoh agama, tenaga pendidik dan pelajar asing Ditjen Bimas Hindu	Rekomendasi	37	20	22	23	24	25					
IKSK.2144.1.16	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	Nilai	80,00	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00					
IKSK.2144.1.17	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	Persen	100,00	10,00	25,00	30,00	40,00	50,00					
RO.2144.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	3	3	3	3	3	3	2.400	2.500	3.000	3.000	3.000
IKRO.2144.EBA.958.1	Jumlah satuan kerja yang menyelenggarakan PPID Ditjen Bimas Hindu	Satuan Kerja	6	6	6	6	6	6					
IKRO.2144.EBA.958.2	Jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi Ditjen Bimas Hindu	Konten	80	100	125	165	230	345					
IKSK.2144.1.18	Indeks Pembangunan Statistik	Nilai	N/A	1.80	2.00	2.20	2.40	2.60					
IKSK.2144.1.19	Indeks Implementasi Pelaksanaan Transformasi Digital	Nilai	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00					
RO.2144.EBA.96	Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
3													
IKRO.2144.EBA.9 63.1 Jumlah data statistik yang dipublikasi Ditjen Bimas Hindu	Data	6	6	6	6	6	6						
IKRO.2144.EBA.9 63.2 Jumlah layanan keagamaan dan pendidikan berbasis digital Ditjen Bimas Hindu	Layanan	3	3	3	3	3	3						
IKSK.2144.1.20 Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses	Persen	86,00	93,00	95,00	95,00	95,00	95,00						
IKSK.2144.1.21 Persentase sarana dan prasaran perkantoran yang dikembangkan berbasis <i>roadmap</i>	Persen	N/A	75,00	80,00	85,00	88,00	90,00						
RO.2144.CAN.95 1 Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang disediakan	Kab/Kota	31	67	48	60	48	48	750	1.545	1.800	1.760	1.760	
IKRO.2144.CAN.9 51.1 Jumlah Pengadaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	Unit	31	60	70	80	90	100						
RO.2144.EBA.96 2 Layanan Umum	Layanan	30	48	49	49	49	49	1.878	3.879	2.938	2.858	2.858	
IKRO.2144.EBA.9 62.1 Jumlah pengadaan barang dan jasa yang diselesaikan Ditjen Bimas Hindu	Unit	N/A	50	60	70	80	90						
RO.2144.EBA.99 4 Layanan Perkantoran	Layanan	120	112	115	122	112	112	26.316	36.724	36.664	38.076	38.073	
IKRO.2144.EBA.9 94.2 Jumlah pegawai yang difasilitasi	Orang	104	128	128	128	128	128						
RO.2144.EBB.95 1 Layanan Sarana Internal	Layanan	109	131	207	207	207	207	1.456	3.700	3.700	3.700	3.700	
IKRO.2144.EBB.9 51.1 Jumlah sarana perkantoran yang dikembangkan berbasis <i>roadmap</i>	Unit	350	500	550	600	650	700						
RO.2144.EBB.97 1 Layanan Prasarana Internal	Layanan	N/A	2	2	2	2	2	876	1.000	1.000	1.000	1.000	
IKRO.2144.EBB.9 71.1 Jumlah prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis <i>roadmap</i>	Unit	N/A	10	12	14	16	20						
RO.2144.EBD.97 4 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Layanan	2	2	2	2	2	2	100	200	200	200	200	
IKRO.2144.EBD.9 74.1 Jumlah Arsip Digitalisasi dan mudah di akses	Dokumen	100	2000	2500	3000	3500	4000						
2146 Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha								24.369	32.567	34.189	35.890	37.679	[BIMAS BUDDHA] Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
SK.2146.1 Meningkatnya kualitas layanan tata kelola dukungan manajemen Ditjen Bimas Buddha													
IKSK.2146.1.1 Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Bimas Buddha	Nilai	81,84	85,00	87,00	90,00	91,00	92,00						
RO 2146 EBD 952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Layanan	1	1	1	1	1	1	1.116	1.250	1.313	1.378	1.447	
IKRO 2146 EBD 952.1 Jumlah dokumen perencanaan Ditjen Bimas Buddha yang dihasilkan	Dokumen	3	3	3	3	3	3						
RO 2146 EBD 953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan	1	1	1	1	1	1	20	150	158	165	174	
IKRO 2146 EBD 953.1 Jumlah laporan evaluasi Ditjen Bimas Buddha yang disusun tepat waktu	Dokumen	4	4	4	4	4	4						
IKSK.2146.1.2 Persentase laporan kinerja satuan kerja	Persen	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00	99,00						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	sesuai standar												
IKRO.2146.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1	1	1	1	1	1	71	75	79	83	87	
IKRO.2146.EBA.960.1 Jumlah laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	Dokumen	2	2	2	2	2	2						
IKSK.2146.1.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Bimas Buddha	Nilai	97,74	95,00	95,50	96,00	96,50	97,00						
IKSK.2146.1.4 Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Ditjen Bimas Buddha	Persen	79,38	79,50	80,00	82,00	85,00	87,00						
IKSK.2146.1.5 Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II Ditjen Bimas Buddha yang sesuai standar dan tepat waktu	Jumlah	95	95	96	97	98	99						
IKSK.2146.1.6 Persentase pemenuhan target dan realisasi PNPB dan BLU Ditjen Bimas Buddha	Persen	111,04	91,00	93,00	95,00	97,00	99,00						
IKSK.2146.1.7 Persentase Satuan Kerja Ditjen Bimas Buddha yang menyusun RKBMN tepat waktu	Persen	75,00	75,00	75,00	77,00	80,00	85,00						
IKRO.2146.EBA.956 Layanan BMN	Layanan	1	1	1	1	1	1	20	50	53	55	58	
IKRO.2146.EBA.956.1 Jumlah Satuan Kerja Ditjen Bimas Buddha yang menyusun RKBMN tepat waktu	Satuan Kerja	105	105	105	108	112	119						
RO.2146.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	Layanan	1	2	2	2	2	2	40	100	105	110	116	
IKRO.2146.EBD.955.1 Jumlah satuan kerja Ditjen Bimas Buddha yang memiliki nilai indikator pelaksanaan anggaran diatas 90	Dokumen		105	105	108	112	119						
IKRO.2146.EBD.955.2 Jumlah penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Ditjen Bimas Buddha		135	197	198	203	211	216						
IKRO.2146.EBD.955.3 Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II Ditjen Bimas Buddha yang sesuai standar dan tepat waktu	Dokumen	6	6	6	6	6	6						
IKRO.2146.EBD.955.4 Jumlah Penerimaan PNPB dan BLU Ditjen Bimas Buddha	Rupiah	4.064.000.700	4.473.700.000	4.499.600.000	4.599.350.000	4.799.800.000	4.868.750.000						
IKRO.2146.EBD.955.5 Jumlah Realisasi PNPB dan BLU Ditjen Bimas Buddha	Rupiah		4.427.428.500	4.453.812.000	4.553.356.500	4.751.802.000	4.820.062.500						
IKSK.2146.1.8 Indeks Profesionalisme ASN (Ditjen Bimas Buddha)	Nilai	82,50	71,00	74,00	77,00	80,00	81,00						
IKSK.2146.1.9 Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	Persen	N/A	70,00	73,00	76,00	79,00	80,00						
IKSK.2146.1.10 Persentase ASN Ditjen Bimas Buddha yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	Persen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00						
IKSK.2146.1.11 Persentase ASN Ditjen Bimas Buddha yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi	Persen	93,14	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00						
IKRO.2146.EBC.954 Layanan Manajemen SDM	Layanan	110	30	50	53	55	58	80	150	158	165	174	
IKRO.2146.EBC.954.1 Jumlah ASN Ditjen Bimas Buddha yang memperoleh Nilai Profesionalisme	Orang	66	70	75	80	85	90						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
ASN minimal kategori sedang													
IKRO.2146.EBC.954.2Jumlah satuan kerja Ditjen Bimas Buddha yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	Satker	n/a	59	62	65	67	69						
IKRO.2146.EBC.954.3Jumlah ASN Ditjen Bimas Buddha yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	Orang	2	2	2	2	2	2						
IKRO.2146.EBC.954.4Jumlah ASN Ditjen Bimas Buddha yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi	Orang	95	33	40	46	53	60						
IKSK.2146.1.12Persentase rancangan peraturan Ditjen Bimas Buddha yang diselesaikan sesuai perencanaan	Persen	90,00	90,00	92,00	94,00	96,00	99,00						
IKSK.2146.1.13Persentase kasus hukum Ditjen Bimas Buddha yang terselesaikan	Persen	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00						
IKSK.2146.1.14Persentase rekomendasi tokoh agama, pendidik dan pelajar asing yang diterbitkan Ditjen Bimas Buddha	Persen	100,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00						
RO.2146.EBA.957Layanan Hukum	Layanan	1	1	1	1	1	1	71	75	79	83	87	
IKRO.2146.EBA.957.1Jumlah rancangan peraturan Ditjen Bimas Buddha yang diselesaikan sesuai perencanaan	Dokumen	203	125	127	129	130	130						
IKRO.2146.EBA.957.2Jumlah kasus hukum Ditjen Bimas Buddha yang terselesaikan	Kasus	3	3	3	3	3	3						
IKRO.2146.EBA.957.3Jumlah rekomendasi tokoh agama, pendidik dan pelajar asing yang diterbitkan Ditjen Bimas Buddha	Dokumen	150	142	142	142	142	142						
IKSK.2146.1.15Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID Ditjen Bimas Buddha	Nilai	N/A	70,00	72,00	75,00	78,00	80,00						
IKSK.2146.1.16Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi Ditjen Bimas Buddha	Persen	36,74	40,00	45,00	50,00	50,00	50,00						
RO.2146.EBA.958Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	1	4	4	4	4	4	993	1.043	1.095	1.150	1.207	
IKRO.2146.EBA.958.1Jumlah satuan kerja Ditjen Bimas Buddha yang menyelenggarakan PPID	Satuan Kerja	3	3	3	3	3	3						
IKRO.2146.EBA.958.2Jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi Ditjen Bimas Buddha		1150	1576	2174	3022	4231	5966						
IKSK.2146.1.17Indeks Pembangunan Statistik Ditjen Bimas Buddha	Nilai	1,44	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60						
IKSK.2146.1.18Indeks Implementasi Pelaksanaan Transformasi Digital Ditjen Bimas Buddha	Nilai	21,74	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00						
RO.2146.EBA.959Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	1	1	1	1	1	373	392	411	430	451	
IKRO.2146.EBA.963.1Jumlah data statistik Ditjen Bimas Buddha yang dipublikasi	Dokumen	5	5	6	6	6	6						
IKRO.2146.EBA.9Jumlah layanan keagamaan dan	Layanan	3	3	3	3	3	3						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
63.2 pendidikan berbasis digital Ditjen Bimas Buddha													
IKSK.2146.1.19 Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses Ditjen Bimas Buddha	Persen	95,00	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00						
IKSK.2146.1.20 Persentase sarana dan prasarana perkantoran Ditjen Bimas Buddha yang dikembangkan berbasis roadmap	Persen	N/A	35,00	40,00	45,00	47,00	50,00						
RO.2146.EBB.97.1 Layanan Prasarana Internal	Unit	N/A	1	1	1	1	1	553	581	609	638	668	
IKRO.2146.EBB.97.1.1 Jumlah prasarana perkantoran Ditjen Bimas Buddha yang dikembangkan berbasis roadmap	Unit	N/A	1	1	1	1	1						
RO.2146.CAN.00.1 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Unit	N/A	10	10	10	10	10	115	121	127	133	139	
IKRO.2146.CAN.00.1.1 Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi Ditjen Bimas Buddha	Unit	N/a	10	10	10	10	10						
RO.2146.EBA.96.2 Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	1	20	21	22	23	24	
IKRO.2146.EBA.96.2.1 Jumlah pengadaan barang dan jasa Ditjen Bimas Buddha yang diselesaikan		N/A	10	15	20	25	25						
RO.2146.EBD.97.4 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	18	50	51	53	56	
IKRO.2146.EBD.97.4.1 Jumlah Arsip Digital dan mudah di akses Ditjen Bimas Buddha	Dokumen	N/A	4432	2216	2000	2000	2000						
RO.2146.EBA.99.4 Layanan Perkantoran	Layanan	25	129	129	129	129	129	19.569	27.102	28.457	29.880	31.374	
IKRO.2146.EBA.99.4.2 Jumlah ASN Ditjen Bimas Buddha yang menerima layanan operasional perkantoran	Orang	99	129	129	129	129	129						
RO.2146.EBB.95.1 Layanan Sarana Internal	Layanan	76	57	59	62	65	68	1.290	1.357	1.421	1.489	1.560	
IKRO.2146.EBB.95.1.1 Jumlah sarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap		0	0	30	40	50	60						
IKSK.2146.1.21 Persentase satuan kerja yang memperoleh nilai pembangunan zona integritas minimal 75	Persen	90,00	90,00	92,00	94,00	96,00	99,00						
RO.2146.EBD.96.1 Layanan Reformasi Kinerja	Layanan	1	1	1	1	1	1	20	50	53	55	58	
IKRO.2146.EBD.96.1.1 Jumlah kegiatan penyusunan laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	Jumlah	4	4	4	4	4	4						
IKRO.2146.EBD.96.1.2 Jumlah satuan kerja yang memperoleh nilai pembangunan zona integritas minimal 75	Dokumen	0	2	2	2	2	2						
2150 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah								420.018	13.659	13.659	13.659	13.659	[DITJEN PHU] Sekretariat Ditjen PHU
SK.2150.1 Meningkatkan Kualitas Layanan Tata Kelola Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah													
IKSK.2150.1.1 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Nilai	N/A	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IKSK.2150.1.2 Persentase Laporan Kinerja Satuan	Persen	N/A	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Kerja Sesuai Standar												
IKSK.2150.1.3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	N/A	94,25	0,00	0,00	0,00	0,00					
IKSK.2150.1.4	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Persen	N/A	90,50	0,00	0,00	0,00	0,00					
IKSK.2150.1.5	Persentase Laporan Keuangan Semester I dan Semester II yang Sesuai Standar dan Tepat Waktu	Persen	N/A	80,95	0,00	0,00	0,00	0,00					
IKSK.2150.1.6	Persentase pemenuhan target dan realisasi PNPB	Persen	N/A	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
IKSK.2150.1.7	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	Persen	N/A	80,95	0,00	0,00	0,00	0,00					
IKSK.2150.1.8	Indeks Profesionalisme ASN	Indeks	N/A	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
IKSK.2150.1.9	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	Persen	N/A	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
IKSK.2150.1.10	Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	Persen	N/A	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
IKSK.2150.1.11	Persentase ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi	Persen	N/A	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
IKSK.2150.1.12	Persentase rancangan peraturan yang diselesaikan sesuai perencanaan	Persen	N/A	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
IKSK.2150.1.13	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	Persen	N/A	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
IKSK.2150.1.14	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses	Persen	N/A	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
IKSK.2150.1.15	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	Persen	N/A	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
IKSK.2150.1.16	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	Nilai	N/A	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
IKSK.2150.1.17	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	Persen	N/A	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
RO.2150.EBD.95	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	N/A	621	0	0	0	0	14.001	0	0	0	0
IKRO.2150.EBD.952.1	Nilai Kinerja Anggaran	Dokumen	N/A	6	0	0	0	0					
RO.2150.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	N/A	590	0	0	0	0	6.311	0	0	0	0
IKRO.2150.EBD.953.1	Jumlah laporan evaluasi yang disusun tepat waktu	Laporan	N/A	4	0	0	0	0					
RO.2150.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	N/A	7	0	0	0	0	1.263	0	0	0	0
IKRO.2150.EBA.960.1	Jumlah laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	Jumlah	N/A	4	0	0	0	0					
RO.2150.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	N/A	596	0	0	0	0	19.460	0	0	0	0
IKRO.2150.EBD.955.1	Jumlah satuan kerja yang memiliki nilai indikator pelaksanaan anggaran di atas 90	Satker	N/A	250	0	0	0	0					
IKRO.2150.EBD.955.1	Jumlah penyelesaian tindak lanjut hasil	Satker	N/A	17	0	0	0	0					

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) /SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
55.2 pemeriksaan													
IKRO.2150.EBD.9 55.3 Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Satker	N/A	250	0	0	0	0						
IKRO.2150.EBD.9 55.4 Jumlah Penerimaan PNPB	Satker	N/A	28	0	0	0	0						
IKRO.2150.EBD.9 55.5 Jumlah Realisasi PNPB	Satker	N/A	28	0	0	0	0						
RO.2150.EBA.95 6 Layanan BMN	Layanan	N/A	9	0	0	0	0	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033	
IKRO.2150.EBA.9 56.1 Jumlah Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	Satker	N/A	250	0	0	0	0						
RO.2150.EBC.95 4 Layanan Manajemen SDM	Orang	N/A	745	0	0	0	0	1.627	0	0	0	0	
IKRO.2150.EBC.9 54.1 Jumlah ASN yang memperoleh Nilai Profesionalisme ASN dengan kategori sedang	Orang	N/A	300	0	0	0	0						
IKRO.2150.EBC.9 54.2 Jumlah satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatus (ASN) sesuai kebutuhan	Satker	N/A	11	0	0	0	0						
IKRO.2150.EBC.9 54.3 Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/inspirasi	Orang	N/A	1	0	0	0	0						
IKRO.2150.EBC.9 54.4 Jumlah ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi	Orang	N/A	300	0	0	0	0						
RO.2150.EBA.95 7 Layanan Hukum	Layanan	N/A	2	0	0	0	0	1.629	1.629	1.629	1.629	1.629	
IKRO.2150.EBA.9 57.1 Jumlah rancangan peraturan yang diselesaikan sesuai perencanaan	Jumlah	N/A	10	0	0	0	0						
IKRO.2150.EBA.9 57.2 Jumlah kasus hukum yang terselesaikan	Jumlah	N/A	1	0	0	0	0						
IKRO.2150.EBA.9 58 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	N/A	25	0	0	0	0	9.878	9.841	9.841	9.841	9.841	
IKRO.2150.EBA.9 58.1 Jumlah satuan kerja yang menyelenggarakan PPID	Jumlah	N/A	385	0	0	0	0						
IKRO.2150.EBA.9 58.2 Jumlah konten keagamaan yang dipublikasi	Satker	N/A	48	0	0	0	0						
RO.2150.EBB.95 1 Layanan Sarana Internal	Unit	N/A	881	0	0	0	0	11.186	0	0	0	0	
IKRO.2150.EBB.9 51.1 Jumlah Layanan Sarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	Jumlah	N/A	24	0	0	0	0						
RO.2150.EBB.97 1 Layanan Prasarana Internal	Unit	N/A	1	0	0	0	0	640	640	640	640	640	
IKRO.2150.EBB.9 71.1 Jumlah Layanan Prasarana yang dikembangkan sesuai dengan roadmap	Layanan	N/A	12	0	0	0	0						
RO.2150.EBA.96 2 Layanan Umum	Layanan	N/A	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.513	516	516	516	516	
IKRO.2150.EBA.9 62.1 Jumlah pengadaan barang dan jasa yang diselesaikan	Jumlah	N/A	24	0	0	0	0						
RO.2150.EBA.99 4 Layanan Perkantoran	Layanan	N/A	36	0	0	0	0	320.477	0	0	0	0	
IKRO.2150.EBA.9 94.1 Jumlah ASN yang menerima layanan operasional perkantoran	Jumlah	N/A	287	0	0	0	0						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
2156 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM								301.813	404.789	425.834	448.420	480.423	[BMBPSDM] Sekretariat BMBPSDM
SK.2156.1	Meningkatnya peran dan layanan dukungan manajemen organisasi yang inovatif, transparan dan berintegritas BMBPSDM												
IKSK.2156.1.1	Nilai Kinerja Anggaran BMBPSDM	Nilai	97,65	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00					
IKSK.2156.1.2	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar BMBPSDM	Persen	N/A	75,00	77,00	79,00	80,00	81,00					
IKSK.2156.1.3	Persentase Satuan Kerja yang memperoleh nilai pembangunan zona integritas minimal 75 BMBPSDM	Persen	N/A	15	20	25	30	35					
IKSK.2156.1.4	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BMBPSDM	Nilai	94,00	94,25	94,50	94,75	95,00	95,25					
IKSK.2156.1.5	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BMBPSDM	Persen	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00					
IKSK.2156.1.6	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu BMBPSDM	Persen	80,00	80,95	81,00	82,00	83,00	84,00					
IKSK.2156.1.7	Persentase pemenuhan target dan realisasi PNPB dan BLU BMBPSDM	Persen	N/A	70	71	72	73	74					
IKSK.2156.1.8	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN sesuai standar dan tepat waktu BMBPSDM	Persen	73	80,95	85,71	90,48	95,24	96,00					
IKSK.2156.1.9	Indeks Profesionalisme ASN BMBPSDM	Nilai	77,00	77,10	77,15	77,20	77,25	77,30					
IKSK.2156.1.10	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan BMBPSDM	Persen	50,00	51,00	52,00	53,00	54,00	55,00					
IKSK.2156.1.11	Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif BMBPSDM	Persen	N/A	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00					
IKSK.2156.1.12	Persentase ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi BMBPSDM	Persen	N/A	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00					
IKSK.2156.1.13	Jumlah rancangan peraturan yang diselesaikan sesuai perencanaan BMBPSDM	Rancangan	2	2	2	2	2	2					
IKSK.2156.1.14	Persentase kasus hukum yang terselesaikan BMBPSDM	Persen	100,00	80,00	85,00	87,00	89,00	90,00					
IKSK.2156.1.15	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses BMBPSDM	Persen	5,00	15,00	25,00	35,00	45,00	55,00					
IKSK.2156.1.16	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan sesuai roadmap BMBPSDM	Persen	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00					
IKSK.2156.1.17	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID BMBPSDM	Nilai	N/A	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00					
IKSK.2156.1.18	Indeks Pembangunan Statistik BMBPSDM	Nilai	N/A	2,49	2,59	2,69	2,79	2,89					
IKSK.2156.1.19	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi BMBPSDM	Persen	5,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00					

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.2156.1.20	Indeks Implementasi Pelaksanaan Transformasi Digital BMBPSDM	Nilai	N/A	1,00	1,50	2,00	2,50	2,89					
IKSK.2156.1.21	Persentase koleksi digital perpustakaan yang dapat diakses secara online BMBPSDM	Persen	5,00	15,00	25,00	35,00	45,00	50,00					
IKSK.2156.1.22	Nilai Akreditasi Perpustakaan BMBPSDM	Nilai	C	B	B	B	A	A					
RO.2156.EBA.956	Layanan BMN	Layanan	N/A	1	1	1	1	1	680	680	680	680	680
IKRO.2156.EBA.956.1	Jumlah Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	Satker	N/A	15	16	17	18	19					
RO.2156.EBA.962	Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	1	34.508	37.680	39.571	41.579	44.552
IKRO.2156.EBA.962.1	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	Dokumen	5	5	5	5	5	5					
IKRO.2156.EBA.962.2	Jumlah laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	Laporan	N/A	15	16	16	17	17					
IKRO.2156.EBA.962.3	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Laporan	15	16	17	18	19	20					
IKRO.2156.EBA.962.4	Jumlah penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Satker	N/A	17	18	19	20	21					
IKRO.2156.EBA.962.5	Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Satker	N/A	17	18	19	20	21					
IKRO.2156.EBA.962.6	Jumlah Penerimaan PNPB	Satker	1	12	13	13	13	13					
IKRO.2156.EBA.962.7	Jumlah Realisasi PNPB	Satker	1	1	2	2	2	2					
IKRO.2156.EBA.962.8	Jumlah ASN yang memperoleh Nilai Profesionalisme ASN dengan kategori sedang	Orang	992	993	994	995	996	997					
IKRO.2156.EBA.962.9	Jumlah satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	Satker	N/A	11	12	13	14	15					
IKRO.2156.EBA.962.10	Jumlah koleksi digital perpustakaan yang dipublikasikan secara online	Buku	5	15	25	35	35	50					
IKRO.2156.EBA.962.11	Jumlah perpustakaan yang memperoleh akreditasi	Perpustakaan	1	1	1	1	1	1					
RO.2156.EBA.994	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	1	262.832	300.449	315.472	331.245	355.030
IKRO.2156.EBA.994.1	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	Orang	N/A	37	50	62	75	87					
IKRO.2156.EBA.994.2	Jumlah ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi	Orang	N/A	37	50	62	75	87					
IKRO.2156.EBA.994.3	Jumlah rancangan peraturan yang diselesaikan sesuai perencanaan	Rancangan	N/A	2	2	2	2	2					
IKRO.2156.EBA.994.4	Jumlah kasus hukum yang terselesaikan	Kasus Hukum	N/A	1	1	1	1	1					
IKRO.2156.EBA.994.5	Jumlah Arsip digital dan mudah diakses	Dokumen	N/A	0	18	18	18	18					
IKRO.2156.EBA.994.6	Jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	Konten	N/A	80	81	82	83	84					

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) /SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKRO.2156.EBA.94.7Jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	Layanan	N/A	1	1	1	1	1						
IKRO.2156.EBA.94.8Jumlah data statistik yang dipublikasi	Data	N/A	14	15	16	17	18						
IKRO.2156.EBA.94.9Jumlah layanan keagamaan dan pendidikan berbasis digital	Layanan	N/A	1	1	1	1	1						
IKRO.2156.EBA.94.10Jumlah satuan kerja yang memperoleh nilai pembangunan zona integritas minimal 75	Satker	N/A	3	5	7	9	12						
RO.2156.EBB.951Layanan Sarana Internal	Unit	249	326	406	506	656	706	3.005	3.381	4.383	5.901	6.315	
IKRO.2156.EBB.951.1Jumlah sarana perkantoran yang dikembangkan sesuai roadmap	Unit	249	326	406	506	656	706						
RO.2156.EBB.971Layanan Prasarana Internal	Unit	0	0	27	27	27	27	788	62.599	65.728	69.015	73.846	
IKRO.2156.EBB.971.1Jumlah prasarana perkantoran yang dikembangkan sesuai roadmap	Unit	0	0	27	27	27	27						
5100 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen								264.565	416.416	477.189	546.100	623.852	[BIMAS KRISTEN] Sekretariat Ditjen Bimas Kristen
SK.5100.1Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan													
IKSK.5100.1.1Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output	Persen	61.31	85.69	86.07	87.07	87.44	88.82						
IKSK.5100.1.2Persentase peningkatan kinerja	Persen	48.05	23.36	23.51	23.79	23.92	24.20						
IKSK.5100.1.3Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	Persen	40.22	54.56	52.60	52.27	52.56	53.88						
IKSK.5100.1.4Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK	Persen	61.02	52.92	52.46	52.88	55.08	55.64						
IKSK.5100.1.5Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra	Persen	24.92	72.86	75.48	77.48	80.73	82.11						
IKSK.5100.1.6Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	80.33	84.80	84.39	84.65	85.41	85.92						
IKSK.5100.1.7Persentase peningkatan layanan pengadaan barang dan jasa	Persen	49.33	30.88	31.27	31.41	32.29	32,55						
RO.5100.CAN.951Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Unit	N/A	2	4	6	8	10	1.000	4.470	4.470	4.470	4.470	
IKRO.5100.CAN.951.1Dukungan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Unit	N/A	2	4	6	8	10						
RO.5100.CAN.971Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Unit	N/A	1	1	1	1	1	500	5.000	5.000	5.000	5.000	
IKRO.5100.CAN.971.1Dukungan Layanan Prasarana Internal Bidang Teknologi Informasi	Unit	N/A	1	1	1	1	1						
RO.5100.EBA.956Layanan BMN	Layanan	1	1	1	1	1	1	500	1.000	1.500	2.000	2.300	
IKRO.5100.EBA.956.1Jumlah satuan kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	Satker	N/A	8	10	15	20	22						
RO.5100.EBA.957Layanan Hukum	Layanan	1	1	1	1	1	1	500	1.500	1.800	2.000	2.500	
IKRO.5100.EBA.957.1Dukungan Layanan Hukum Ditjen	Layanan	1	1	1	1	1	1						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
57.1 Bimas Kristen													
RO.5100.EBA.95 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	1	1	1	1	1	1	500	2.000	2.300	2.645	3.000	
IKRO.5100.EBA.95.1 Dukungan Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Ditjen Bimas Kristen	Layanan	1	1	1	1	1	1						
RO.5100.EBA.96 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1	1	1	1	1	1	750	1.500	2.250	3.000	3.450	
IKRO.5100.EBA.96.1 Jumlah laporan kinerja satuan kerja Ditjen Bimas Kristen yang disusun sesuai standar	Dokumen	1	1	1	1	1	1						
RO.5100.EBA.96.2 Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	1	500	750	1.000	1.500	2.000	
IKRO.5100.EBA.96.2.1 Dukungan Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	1						
RO.5100.EBA.96.3 Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	1	1	1	1	1	300	750	1.000	1.500	2.000	
IKRO.5100.EBA.96.3.1 Dukungan Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	1	1	1	1	1						
RO.5100.EBA.99.4 Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	1	239.454	299.317	345.200	396.980	456.527	
IKRO.5100.EBA.99.4.1 Jumlah ASN satuan pendidikan satker daerah Ditjen Bimas Kristen yang menerima layanan operasional perkantoran	Layanan	976	1.382	1.457	1.537	1.627	1.747						
RO.5100.EBB.95.1 Layanan Sarana Internal	Unit	7	8	8	8	8	8	7.740	8.901	10.236	11.772	13.537	
IKRO.5100.EBB.95.1.1 Dukungan Layanan Sarana Internal	Unit	7	8	8	8	8	8						
RO.5100.EBB.97.1 Layanan Prasarana Internal	Unit	1	1	1	1	1	1	2.276	58.028	66.733	76.743	88.254	
IKRO.5100.EBB.97.1.1 Dukungan Layanan Prasarana Internal	Unit	1	1	1	1	1	1						
RO.5100.EBC.95.4 Layanan Manajemen SDM	Layanan	1	1	1	1	1	1	500	7.000	7.000	7.000	7.000	
IKRO.5100.EBC.95.4.1 Dukungan Layanan Manajemen SDM	Layanan	1	1	1	1	1	1						
RO.5100.EBC.99.6 Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Layanan	1	1	1	1	1	1	500	7.000	7.000	7.000	7.000	
IKRO.5100.EBC.99.6.1 Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Layanan	1	1	1	1	1	1						
IKRO.5100.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	3	3	3	3	3	3	5.805	7.500	7.700	8.191	8.514	
IKRO.5100.EBD.952.1 Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Ditjen Bimas Kristen	Dokumen	3	3	3	3	3	3						
IKRO.5100.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	4	4	4	4	4	4	1.000	5.000	5.500	6.000	7.000	
IKRO.5100.EBD.953.1 Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan Ditjen Bimas Kristen	Dokumen	4	4	4	4	4	4						
RO.5100.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2.029	3.500	4.000	4.500	5.000	
IKRO.5100.EBD.955.1 Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan	Dokumen	2	2	2	2	2	2						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /INDIKATOR		SATUAN	BASE- LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	tepat waktu													
RO.5100.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	Layanan	1	1	1	1	1	1	711	3.200	4.500	5.800	6.300	
IKRO.5100.EBD.961.1	Dukungan Layanan Reformasi Kinerja	Layanan	1	1	1	1	1	1						
5102 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik									30.023	34.527	39.706	45.662	52.511	[BIMAS KATOLIK] Sekretariat Ditjen Bimas Katolik
SK.5102.1	Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan Ditjen Bimas Katolik													
IKSK 5102.1.1	Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan Ditjen Bimas Katolik yang sesuai dengan capaian output	Persen	N/A	99,57	99,67	99,73	99,77	99,78						
IKSK 5102.1.2	Persentase peningkatan kinerja Ditjen Bimas Katolik	Persen	N/A	0,00	0,10	0,20	0,30	0,40						
IKSK 5102.1.3	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media Ditjen Bimas Katolik	Persen	N/A	88,00	92,00	95,00	95,00	98,00						
IKSK 5102.1.4	Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK Ditjen Bimas Katolik	Persen	N/A	88,00	94,00	96,00	98,00	99,00						
IKSK 5102.1.5	Persentase ketersediaan data prioritas Ditjen Bimas Katolik yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra	Persen	N/A	80,00	82,00	85,00	90,00	95,00						
IKSK 5102.1.6	Rerata nilai ASN Ditjen Bimas Katolik Kementerian Agama yang mengikuti Pelatihan Manajerial Kepemimpinan minimal 80	Nilai	N/A	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00						
IKSK 5102.1.7	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Bimas Katolik	Nilai	N/A	95,00	95,00	96,00	96,00	97,00						
IKSK 5102.1.8	Persentase peningkatan layanan pengadaan barang dan jasa Ditjen Bimas Katolik	Persen	N/A	95,00	95,00	96,00	96,00	97,00						
RO.5102.CAN.997	Pengadaan Perangkat TIK	Unit	N/A	15	17	20	23	23	280	255	345	456	525	
IKRO.5102.CAN.997.1	Jumlah pemenuhan infrastruktur TIK Ditjen Bimas Katolik	Unit	N/A	15	17	20	23	23						
RO.5102.EBA.956	Layanan BMN	Layanan	N/A	20	23	26	30	35	270	357	464	616	826	
IKRO.5102.EBA.956.1	Jumlah peningkatan kinerja layanan BMN Ditjen Bimas Katolik	Layanan	N/A	20	23	26	30	35						
RO.5102.EBA.957	Layanan Hukum	Layanan	N/A	1	1	1	1	1	75	86	99	114	131	
IKRO.5102.EBA.957.1	Jumlah peningkatan kinerja layanan hukum Ditjen Bimas Katolik	Layanan	N/A	1	2	3	4	5						
RO.5102.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	N/A	2	1	1	1	1	580	667	767	882	1.014	
IKRO.5102.EBA.958.1	Jumlah layanan peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang	Layanan	N/A	2	3	4	5	6						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) /SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /INDIKATOR		SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	pendidikan Ditjen Bimas Katolik yang disampaikan melalui media													
RO.5102.EBA.959	Layanan Protokoler	Layanan	N/A	1	1	1	1	1	169	195	224	258	296	
IKRO.5102.EBA.959.1	Jumlah peningkatan kinerja layanan Protokoler Ditjen Bimas Katolik	Layanan	N/A	1	2	3	4	5						
RO.5102.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	N/A	1	1	1	1	1	75	86	99	114	131	
IKRO.5102.EBA.960.1	Jumlah peningkatan kinerja layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Ditjen Bimas Katolik	Layanan	N/A	1	2	3	4	5						
RO.5102.EBA.962	Layanan Umum	Layanan	N/A	0	1	1	1	1	-	50	58	66	76	
IKRO.5102.EBA.962.1	Jumlah peningkatan kinerja Layanan Umum Ditjen Bimas Katolik	Layanan	N/A	0	1	2	3	4						
RO.5102.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	Layanan	N/A	1	1	1	1	100	69	79	91	105	121	
IKRO.5102.EBA.963.1	Jumlah ketersediaan data prioritas bidang pendidikan Ditjen Bimas Katolik yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra	Data	N/A	4	4	4	4	4						
RO.5102.EBA.994	Layanan Perkantoran	Layanan	N/A	419	419	419	419	419	23.911	27.473	31.488	36.070	41.362	
IKRO.5102.EBA.994.1	Jumlah ASN satuan pendidikan dan satker daerah Ditjen Bimas Katolik yang menerima layanan operasional perkantoran	Oarng	N/A	419	419	419	419	419						
RO.5102.EBB.951	Layanan Sarana Internal	Unit	N/A	227	232	233	233	233	1.909	2.137	2.457	2.826	3.250	
IKRO.5102.EBB.951.1	Jumlah peningkatan layanan sarana internal pada Ditjen Bimas Katolik	Layanan	N/A	1	2	3	4	5						
RO.5102.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	Orang	N/A	118	118	118	118	118	75	86	99	114	131	
IKRO.5102.EBC.954.1	Jumlah ASN Ditjen Bimas Katolik yang mengikuti pelatihan manajerial	Orang	N/A	1	2	3	4	5						
RO.5102.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	N/A	35	38	38	38	38	1.672	1.900	2.185	2.513	2.890	
IKRO.5102.EBD.952.1	Jumlah ketersediaan data prioritas Ditjen Bimas Katolik yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra	Dokumen	N/A	1	2	3	4	5						
RO.5102.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	N/A	1	1	1	1	1	163	188	216	248	286	
IKRO.5102.EBD.953.1	Jumlah satuan kerja Ditjen Bimas Katolik yang memiliki Nilai Kinerja Anggaran di atas 85	Satker	N/A	120	150	170	200	213						
RO.5102.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	N/A	84	84	84	84	84	634	756	869	1.000	1.150	
IKRO.5102.EBD.955.1	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Ditjen Bimas Katolik	Nilai	N/A	94	95	96	97	97						
IKRO.5102.EBD.955.2	Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II Ditjen Bimas Katolik yang sesuai standar dan tepat waktu	Laporan	213	213	213	213	213	213						
RO.5102.EBD.966	Layanan Reformasi Kinerja	Dokumen	N/A	0	1	1	1	1	0	50	58	66	76	

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) /SASARAN PROGRAM (OUTCOME) /SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) /INDIKATOR		SATUAN	BASE- LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1														
IKRO.5102.EBD.9 61.1	Jumlah dokumen bidang pendidikan Ditjen Bimas Katolik yang sesuai capaian output	Dokumen	N/A	0	1	2	3	4						
RO.5102.EBD.97 4	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Dokumen	N/A	1	1	1	1	1	141	162	186	214	246	
IKRO.5102.EBD.9 74.1	Jumlah dokumen kinerja Penyelenggaraan Kearsipan Ditjen Bimas Katolik	Dokumen	N/A	1	2	3	4	5						
5103 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu									151.336	198.212	205.552	211.767	211.797	[BIMAS HINDU] Sekretariat Ditjen Bimas Hindu
SK.5103.1	Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan													
IKSK.5103.1.1	Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output	Persen	N/A	96,00	97,00	98,00	99,00	99,00						
IKSK.5103.1.2	Persentase peningkatan kinerja Ditjen Bimas Hindu	Persen	N/A	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25						
IKSK.5103.1.3	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media pada Ditjen Bimas Hindu	Persen	N/A	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50						
IKSK.5103.1.4	Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK pada Ditjen Bimas Hindu	Persen	N/A	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00						
IKSK.5103.1.5	Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra pada Ditjen Bimas Hindu	Persen	N/A	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00						
IKSK.5103.1.6	Rerata nilai ASN Kementerian Agama yang mengikuti Pelatihan Manajerial (Kepemimpinan) minimal 80	Nilai	N/A	82,00	83,00	84,00	84,00	85,00						
IKSK.5103.1.7	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Ditjen Bimas Hindu	Nilai	N/A	95,25	95,50	95,75	96,00	96,25						
IKSK.5103.1.8	Persentase peningkatan layanan pengadaan barang dan jasa Ditjen Bimas Hindu	Persen	30,00	31.50	32.22	33.40	34.30	32.44						
IKSK.5103.1.9	Persentase PTKHN yang memperoleh nilai pembangunan zona integritas minimal 75	Persen	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00						
RO.5103.CAN.95 1	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang disediakan	Unit	55	80	112	112	112	112	3.129	3.129	3.129	3.129	3.129	
IKRO.5103.CAN.9 51.01	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang disediakan Ditjen Bimas Hindu	Unit	55	80	112	112	112	112						
RO.5103.EBA.95 6	Layanan BMN	Layanan	15	20	20	20	20	20	62	300	300	300	300	
IKRO.5103.EBA.9 56.1	Jumlah Layanan BMN Ditjen Bimas Hindu	Layanan	15	20	20	20	20	20						
RO.5103.EBA.95 8	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	10	50	50	50	50	50	104	790	790	790	790	

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKRO.5103.EBA.958.1Jumlah Layanan Dokumen Kehumasan Ditjen Bimas Hindu	Layanan	10	50	50	50	50	50						
RO.5103.EBA.962Layanan Umum	Layanan	36	36	38	38	38	38	1.967	4.543	4.543	4.543	4.543	
IKRO.5103.EBA.962.1Jumlah layanan Dokumen umum Ditjen Bimas Hindu	Layanan	36	36	38	38	38	38						
RO.5103.EBA.963Layanan Data dan Informasi	Layanan	-	-	10	10	10	10	-	600	600	600	600	
IKRO.5103.EBA.963.1Jumlah Layanan Dokumen Data dan Sistem Infomasi Ditjen Bimas Hindu	Layanan	0	0	10	10	10	10						
RO.5103.EBA.994Layanan Perkantoran	Layanan	690	90	101	101	101	101	139.908	170.993	178.113	184.113	184.113	
IKRO.5103.EBA.994.1Jumlah ASN Ditjen Bimas Hindu yang menerima layanan operasional perkantoran	Layanan	690	909	1005	1025	1050	1080						
RO.5103.EBB.951Layanan Sarana Internal	Unit	286	286	360	361	361	361	2.755	8.371	8.481	8.526	8.526	
IKRO.5103.EBB.951.1Jumlah Sarana Perkantoran yang diadakan Ditjen Bimas Hindu	Unit	286	286	360	361	361	361						
RO.5103.EBB.971Layanan Prasarana Internal	Unit	1	-	2	2	2	2	-	2.550	2.550	2.550	2.550	
IKRO.5103.EBB.971.1Jumlah prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap Ditjen Bimas Hindu	Unit	1	0	2	2	2	2						
RO.5103.EBC.954Layanan Manajemen SDM	Orang	34	41	84	114	124	134	359	630	630	630	630	
IKRO.5103.EBC.954.1Jumlah Layanan Manajemen SDM Ditjen Bimas Hindu	Orang	34	8	8	8	8	8						
RO.5103.EBC.996Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	-	10	12	22	24	-	150	160	230	260	
IKRO.5103.EBC.996.1Jumlah SDM yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Ditjen Bimas Hindu	Orang	0	0	10	12	22	24						
RO.5103.EBD.952Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	47	62	64	64	64	64	2.542	3.846	3.946	4.046	4.046	
IKRO.5103.EBD.952.1Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Bimas Hindu	Dokumen	47	62	64	64	64	64						
RO.5103.EBD.953Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	6	11	16	16	16	16	152	688	688	688	688	
IKRO.5103.EBD.953.1Jumlah Layanan Dokumen Pemantauan dan evaluasi Ditjen Bimas Hindu	Dokumen	6	11	16	16	16	16						
RO.5103.EBD.955Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	3	5	8	8	8	8	211	552	552	552	552	
IKRO.5103.EBD.955.1Jumlah Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	3	5	8	8	8	8						
RO.5103.EBD.961Layanan Reformasi Kinerja	Dokumen	1	1	4	5	5	5	52	800	800	800	800	
IKRO.5103.EBD.961.1Jumlah Layanan Reformasi Kinerja	Dokumen	1	1	4	5	5	5						
RO.5103.EBD.974Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Dokumen	-	2	2	2	2	2	95	270	270	270	270	
IKRO.5103.EBD.974.1Jumlah Layanan Kearsipan Ditjen Bimas Hindu	Dokumen	0	2	2	2	2	2						
5105 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran								38.207	54.802	57.625	60.599	63.729	[BIMAS BUDDHA]

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Pendidikan Bimas Budha													Sekretariat Ditjen Bimas Buddha
SK.5105.1 Meningkatkan Layanan Prima Bidang Pendidikan Ditjen Bimas Buddha													
IKSK.5105.1 Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output Ditjen Bimas Buddha	Persen	99,30	62,00	70,00	75,00	77,00	80,00						
IKSK.5105.2 Persentase peningkatan kinerja Ditjen Bimas Buddha	Persen	92,71	0,31	0,38	0,43	0,48	0,53						
IKSK.5105.3 Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media pada Ditjen Bimas Buddha	Persen	33,33	25,00	10,00	9,09	8,33	7,69						
IKSK.5105.4 Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK pada Ditjen Bimas Buddha	Persen	50,00	92,00	94,00	96,00	97,00	98,00						
IKSK.5105.5 Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra pada Ditjen Bimas Buddha	Persen	25,00	38,03	49,30	56,34	77,46	90,00						
IKSK.5105.6 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Ditjen Bimas Buddha	Nilai	97,73	97,85	98,00	98,15	98,30	98,50						
IKSK.5105.7 Rerata nilai ASN Ditjen Bimas Buddha yang mengikuti Pelatihan Manajerial (Kepemimpinan) minimal 80	Nilai	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00						
IKSK.5105.8 Persentase peningkatan layanan pengadaan barang dan jasa Ditjen Bimas Buddha	Persen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00						
IKSK.5105.9 Persentase Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha Negeri yang memperoleh nilai pembangunan zona integritas minimal 75	Persen	0,00	0,00	50,00	50,00	90,00	90,00						
RO.5105.CAN.001 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Unit	0	33	40	40	50	50	688	757	832	916	1.007	
IKRO.5105.CAN.01.1 Jumlah layanan infrastruktur dari layanan dukungan TIK pada Ditjen Bimas Buddha	Unit	0	33	40	40	50	50						
RO.5105.EBA.957 Layanan Hukum	Layanan	1	1	1	1	1	1	62	68	75	83	91	
IKRO.5105.EBA.957.1 Jumlah rancangan peraturan yang diselesaikan sesuai perencanaan	Dokumen	10	20	20	20	20	20						
RO.5105.EBA.962 Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	1	482	530	583	642	706	
IKRO.5105.EBA.962.1 Jumlah pengadaan barang dan jasa yang diselesaikan	Paket	0	2	3	4	5	6						
RO.5105.EBA.994 Layanan Perkantoran	Layanan	357	357	357	357	357	357	34.281	50.576	53.105	55.760	58.548	
IKRO.5105.EBA.994.1 Jumlah ASN satuan pendidikan & satker daerah Ditjen Bimas Buddha yang menerima layanan operasional perkantoran	Orang	357	357	357	357	357	357						

SASARAN STRATEGIS (IMPACT) / SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR	SATUAN	BASE-LINE 2024	TARGET					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
RO.5105.EBB.95.1 Layanan Sarana Internal	Unit	0	0	30	40	50	60	1.573	1.652	1.734	1.821	1.912	
IKRO.5105.EBB.95.1.1 Jumlah sarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	Unit	0	0	30	40	50	60						
RO.5105.EBC.95.4 Layanan Manajemen SDM	Orang	250	250	250	250	250	250	835	900	945	992	1.042	
IKRO.5105.EBC.95.4.1 Jumlah ASN yang memperoleh Nilai Profesionalisme ASN minimal kategori sedang	Orang	66	70	75	80	85	90						
IKRO.5105.EBC.95.4.2 Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	Orang	1	1	1	1	1	1						
IKRO.5105.EBC.95.4.3 Jumlah ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi	Orang	93	25	30	35	40	45						
IKRO.5105.EBC.95.4.4 Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan manajerial (kepemimpinan)	Orang	2	1	5	5	5	5						
RO.5105.EBD.95.2 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	1	1	1	1	1	1	200	220	242	266	293	
IKRO.5105.EBD.95.2.1 Jumlah dokumen Perencanaan Ditjen Bimas Buddha yang dihasilkan	Nilai	0	3	3	3	3	3						
RO.5105.EBD.95.3 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan	1	1	1	1	1	1	50	55	61	67	73	
IKRO.5105.EBD.95.3.1 Jumlah kegiatan pengukuran capaian Nilai Kinerja Anggaran	Kegiatan	2	2	2	2	2	2						
RO.5105.EBD.97.4 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Layanan	1	1	1	1	1	1	35	40	44	48	53	
IKRO.5105.EBD.97.4.1 Jumlah Digitalisasi Arsip dan mudah diakses	Dokumen	0	4.432	2.216	2.000	2.000	2.000						
RO.5105.EBD.96.1 Layanan Reformasi Kinerja	Layanan	2	2	2	2	2	2	-	4	4	4	4	
IKRO.5105.EBD.96.1.1 Jumlah PTK Buddha Negeri yang memperoleh nilai pembangunan zona integritas minimal 75	Lembaga	0	0	1	1	2	2						

Matriks Sumber Pendanaan

	Kegiatan Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN					Alokasi Non APBN					Total (dalam jutaan rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
KP	Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif	Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif	46.08	50.08	54.06	58.06	62.04	15,092,329,007.00	15,669,125,000.00	16,245,920,000.00	16,822,716,000.00	17,399,511,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,092,329,007.00	15,669,125,000.00	16,245,920,000.00	16,822,716,000.00	17,399,511,000.00
Pro-p	Penyaluran Bantuan Pendidikan	Peserta didik penerima bantuan operasional pendidikan dasar	10,894,470.00	10,916,000.00	10,937,530.00	10,959,060.00	10,980,590.00	11,794,352,186.00	12,031,750,459.00	12,269,148,732.00	12,506,547,005.00	12,743,978.00	930,360,000.00	958,270,000.00	987,000,000.00	1,016,000,000.00	1,047,000,000.00	12,724,712,186.00	12,990,20,459.00	13,256,148,732.00	13,522,547,005.00	13,790,945,278.00
		Jumlah madrasah, satuan pendidikan keagamaan, pesantren yang mendapat bantuan operasional (BOP)	15,174.00	19,705.00	24,236.00	28,767.00	33,298.00	100,000.00	129,860,000.00	159,720,000.00	189,580,000.00	219,441,000.00	5,000,000,000.00	5,250,000,000.00	5,500,000,000.00	5,750,000,000.00	6,000,000,000.00	5,100,000,000.00	5,379,860,000.00	5,659,720,000.00	5,939,580,000.00	6,219,441,000.00

	Kegiatan Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN					Alokasi Non APBN					Total (dalam jutaan rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
KP	Tingkat Penyelesaian Pendidikan MA/Ulya/SMTK/S MAK/Utama Widyalyaya/Uttama Dhammasekha	Tingkat Penyelesaian Pendidikan MA/Ulya/SMTK/S MAK/Utama Widyalyaya/Uttama Dhammasekha																				
RO		4012.QEN.003 BOS Utama Dhammasekha	60.00	70.00	74.00	77.00	81.00	50,970.00	105,000.00	110,250.00	115,763.00	121,552.00	0.00	40,990,000.00	47,360,000.00	65,160,000.00	77,010,000.00	50,970.00	41,095,000.00	47,470,250.00	65,275,763.00	77,131,552.00
RO		4012.QEN.002 BOS Mula Dhammasekha	85.00	90.00	95.00	99.00	104.00	76,500.00	81,000.00	85,050.00	89,303.00	93,769.00						76,500.00	81,000.00	85,050.00	89,303.00	93,769.00
RO		4012.QEN.001 BOP Nava Dhammasekha	1,158.00	1,190.00	1,250.00	1,312.00	1,378.00	694,800.00	714,000.00	749,700.00	787,185.00	826,545.00						694,800.00	714,000.00	749,700.00	787,185.00	826,545.00
RO		2142.QEN.007 Siswa penerima BOP Tk Pratama	2,025.00	2,200.00	2,400.00	2,600.00	2,600.00	1,215.00	1,320,000.00	1,440.00	1,560.00	1,560.00						1,215,000.00	1,320.00	1,440,000.00	1,560,000.00	1,560,000.00
RO		2142.QEN.003 Siswa penerima BOS Tk Utama	605.00	710.00	760.00	810.00	810.00	907,500.00	1,065,000.00	1,140.00	1,080.00	1,080.00						907,500.00	1,065.00	1,140,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00
RO		2142.QEN.002 Siswa penerima BOS Tk Madya	282.00	352.00	412.00	492.00	492.00	314,400.00	392,800.00	460,200.00	549,600.00	549,600.00						314,400.00	392,800.00	460,200.00	549,600.00	549,600.00
RO		2142.QEN.001 Siswa penerima BOS Tk Adi	907.00	1,081.00	1,186.00	1,326.00	1,326.00	7,424.679.00	980,500.00	1,076.00	1,203.00	1,203.00						7,424,679.00	980,500.00	1,076,000.00	1,203,000.00	1,203,000.00

	Kegiatan Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN					Alokasi Non APBN					Total (dalam jutaan rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
RO		2139.QEN.006 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMAK Katolik	6,396.00	7,441.00	8,222.00	9,085.00	10,042.00	11,479,560.00	14,712,000.00	19,455,700.00	25,727,915.00	34,027,812.00						11,479,560.00	14,712,000.00	19,455,700.00	25,727,915.00	34,027,812.00
RO		2139.QEN.001 Siswa SMAK Katolik Penerima BOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RO		2136.QEN.006 Bantuan Operasional Siswa (BOS) SDTK	5,490.00	6,154.00	6,547.00	6,584.00	7,056.00	5,640,930.00	6,276,519.00	6,808,156.00	7,233,111.00	8,938,138.00						5,640,930.00	6,276,519.00	6,808,156.00	7,233,111.00	8,938,138.00
RO		2136.QEN.005 Bantuan Operasional Siswa (BOS) SMPTK	6,627.00	7,251.00	7,754.00	8,302.00	8,883.00	8,948,180.00	9,257,360.00	10,220,600.00	10,942,080.00	11,140,500.00						8,948,180.00	9,257,360.00	10,220,600.00	10,942,308.00	11,140,500.00
RO		2136.QEN.004 Bantuan Operasional Siswa (BOS) SMTK/SMAK	13,333.00	14,096.00	14,483.00	14,839.00	15,268.00	23,790,841.00	26,649,960.00	27,256,120.00	28,256,120.00	29,256,120.00						23,790,841.00	26,649,960.00	27,256,212.00	28,256,212.00	29,256,212.00
RO		2129.QEN.007 Siswa MA Penerima BOS	1,627.97	1,689.67	1,754.66	1,822.15	1,892.23	3,155,334.00	3,276,930.00	3,402,270.00	3,533,594.00	3,669,501.00						3,155,334.00	3,276,669.30	3,402,720.00	3,533,594.00	3,669,501.00

	Kegiatan Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN					Alokasi Non APBN					Total (dalam jutaan rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
RO		2129.QEN.006 Siswa MTs Penerima BOS	3,270,4 79.00	3,54 0,51 9.00	3,83 2,85 5.00	4,14 9,32 9.00	4,49 1,93 4.00	4,23 3,81 9.00	4,583,4 00.00	4,96 1,84 6.00	5,37 1,54 0.00	5,81 5,06 1.00						4,233,8 19.00	4,58 3,40 0.00	4,961,8 46.00	5,371,5 40.00	5,815,0 61.00
RO		2129.QEN.005 Siswa MI Penerima BOS	8,084,1 87.00	8,47 1,93 0.00	8,89 4,92 3.00	9,35 6,37 0.00	9,85 9,76 7.00	4,50 7,57 8.00	4,917,3 58.00	5,36 4,39 0.00	5,85 2,06 2.00	6,38 4,06 8.00						4,507,5 78.00	4,91 7,35 8.00	5,364,3 90.00	5,852,0 62.00	6,384,0 68.00
RO		2128.QEN.007 Santri Tk. Ulya/Diniyah Formal/Muadalah /PPS Penerima BOS	127,54 5.00	166, 083. 00	204, 621. 00	243, 159. 00	281, 697. 00	152, 230. 00	198,22 6.00	244, 223. 00	290, 220. 00	336, 216. 00						152,23 0.00	198, 226. 00	244,22 3.00	290,22 0.00	336,21 6.00
RO		2128.QEN.006 Santri Tk. Wustha/Diniyah Formal/Muadalah /PPS Penerima BOS	205,02 4.00	247, 348. 00	289, 672. 00	331, 996. 00	374, 320. 00	206, 164. 00	248,72 3.00	291, 283. 00	333, 842. 00	376, 401. 00						206,16 4.00	248, 723. 00	291,28 3.00	333,84 2.00	376,40 1.00
RO		2128.QEN.005 Santri Tk. Ula/Diniyah Formal/Muadalah /PPS Penerima BOS	36,621. 00	42,1 12.0 0	47,6 03.0 0	53,0 94.0 0	58,5 85.0 0	35,1 87.0 0	40,463. 00	45,7 39.0 0	51,0 15.0 0	56,2 92.0 0						35,187. 00	40,4 63.0 0	45,739. 00	51,015. 00	56,292. 00

	Kegiatan Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN					Alokasi Non APBN					Total (dalam jutaan rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
RO		2128.QEI.001 Pesantren Penerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)	15,174. 00	15,5 80.0 0	15,9 86.0 0	16,3 92.0 0	16,7 98.0 0	119, 978. 00	119,97 8.00	119, 978. 00	119, 978. 00	119, 978. 00						119,97 8.00	119, 978. 00	119,97 8.00	119,97 8.00	119,97 8.00
KP	Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI): Layanan haji dalam negeri; Layanan haji luar negeri	Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI): Layanan haji dalam negeri; Layanan haji luar negeri																0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Bantuan transportasi calon jamaah haji																0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RO		2148.QDC.002 Jemaah Haji Reguler yang Terbina	117,67 0.00	117, 670. 00	117, 670. 00	117, 670. 00		1,52 1,03 7.70	1,597,0 89.58	1,67 6,94 4.06	1,76 0,79 1.26	1,84 8,83 0.83	18,341, 243.53	19,258, 305.70	20,221, 220.99	21,232, 282.04	22,293, 896.14	19,862, 281.22	20,8 55,3 95.2 9	21,898, 165.05	22,993, 073.30	24,142, 726.97
		2148.QDC.001 Petugas Haji yang Profesional	18,015. 00	18,0 15.0 0	18,0 15.0 0	18,0 15.0 0		423, 396. 35	423,39 6.35	423, 396. 35	423, 396. 35	0.00						423,39 6.35	423, 396. 35	423,39 6.35	423,39 6.35	0.00
Pro- p	Penanganan Anak Tidak Sekolah	Satuan pendidikan yang mendapatkan pembinaan dalam pencegahan anak tidak sekolah																0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Kegiatan Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN					Alokasi Non APBN					Total (dalam jutaan rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Penanganan anak tidak sekolah																0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
KP	Penyelenggaraan event keagamaan	Penyelenggaraan event keagamaan																0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Bantuan Penyelenggaraan event keagamaan (MTQ, STQ, Pesparani, Pesparawi, Utsawa Dharmagita, Swayamvara Tripitaka Gatha)																0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RO		2123.PEG.001 - Event Seni Budaya Keagamaan Islam (MTQ)	582	601	601	601	601	31,0 64.0 0	98,510. 00	108, 361. 00	119, 197. 00	131, 117. 00	65,000. 00	66,000. 00	67,000. 00	68,000. 00	69,000. 00	96,064. 00	164, 510. 00	175,36 1.00	187,19 7.00	200,11 7.00
RO		2137.PEG.001 - Event Seni Budaya Keagamaan Kristen (PESPARAWI)	77.00	77.0 0	1.00	1.00	77.0 0	55,7 19.1 4	60,000. 00	15,0 00.0 0	20,0 00.0 0	75,5 00.0 0	0.00	69,000. 00	0.00	0.00	74,000. 00	55,719. 14	129, 000. 00	15,000. 00	20,000. 00	149,50 0.00
RO		2137.AEG.001 - Event Perayaan Hari Besar Agama Kristen	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	1,50 0.00	3,00 0.00	4,50 0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	1,700.0 0	3,200.0 0	4,700.0 0

	Kegiatan Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN					Alokasi Non APBN					Total (dalam jutaan rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
RO		2140.AEG.001 - Penyelenggaraan Event Seni Budaya dan Hari Besar Keagamaan Katolik	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1,000.00	1,150.00	1,322.50	1,520.88	0.00	1,000.00	1,150.00	1,322.50	1,520.88	0.00	2,000.00	2,300.00	2,645.00	3,041.75
RO		2140.QDB.001 - Lembaga Pengelola Dana Amal Kasih Katolik diperkuat literasi Program Pengentasan Kemiskinan	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	500.00	1,900.00	2,185.00	2,512.75	2,889.67	2,000.00	2,300.00	2,645.00	3,041.70	3,500.00	2,500.00	4,200.00	4,830.00	5,554.45	6,389.67
RO		2140.PEG.001 - Penyelenggaraan Event dan Seni Budaya Keagamaan Katolik (Pesparani)	39.00	39.00	38.00	38.00	39.00	1,900.00	10,000.00	2,185.70	2,512.75	11,500.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	11,900.00	2,185.70	2,512.75	13,400.00
RO		2143.AEG.001 - Penyelenggaraan Event Seni Budaya dan Hari Besar Keagamaan Hindu	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	5,000.00	6,000.00	7,000.00	8,000.00	8,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	7,000.00	8,000.00	9,000.00	9,000.00

	Kegiatan Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN					Alokasi Non APBN					Total (dalam jutaan rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
RO		2143 PEG 001 - Event seni budaya Keagamaan Hindu (Utsawa Dharma Gita)	22.00	22.00	35.00	35.00	35.00	2,322.00	2,775.00	20,000.00	5,500.00	5,500.00	500,000.00	500,000.00	2,000,000.00	500,000.00	500,000.00	502,322.00	502,775.00	2,020,000.00	505,500.00	505,500.00
RO		2143.QDB.002 - Lembaga Dana Punia dibina dan diperkuat literasi Program Pengentasan Kemiskinan	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	1,000.00	1,500.00	2,000.00	2,500.00	3,000.00	1,600.00	2,100.00	2,600.00	3,100.00	3,600.00
RO		2145 PEG 001 Event Seni Budaya Keagamaan Buddha (Swayamvara Tripitaka Gatha)	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	701,000.00	27,000.00	27,500.00	28,075.00	28,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,000.00	27,000.00	27,500.00	28,075.00	28,729.00
RO		2137.QDB.002 - Pembinaan/Pengutan Lembaga Amal Sosial Kristiani dalam Program Literasi Pengentasan Kemiskinan	1	1	2	2	2	600.00	1,500.00	1,875.00	2,250.00	2,587.50	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	600.00	1,600.00	1,975.00	2,350.00	2,687.50

	Kegiatan Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN					Alokasi Non APBN					Total (dalam jutaan rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2122.QEA.001 - Mustahiq yang diselaraskan dengan Data Kemiskinan (Regsosek/DT-SEN)	180	180	180	180	180	16,400.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	0.00	40,990,000.00	47,360,000.00	65,160,000.00	77,010,000.00	16,400.00	41,011,400.00	47,381,400.00	65,181,400.00	77,031,400.00
RO		2122.QEI.001 - Bantuan Operasional BWI	180	180	180	180	180	21,400.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	21,400.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00
RO		2122.QEI.002 - Bantuan Operasional BAZNAS	110	110	110	110	110	3,500.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	1,000.00	1,200.00	1,400.00	1,600.00	3,500.00	5,700.00	5,900.00	6,100.00	6,300.00
RO		2122.QEA.002 - Rumah Tangga Miskin diberdayakan melalui Kampung ZISWAF	2298	2298	2298	2298	2298	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,300,000.00	14,210,000.00	16,630,000.00	23,110,000.00	30,000.00	12,330,000.00	14,240,000.00	16,660,000.00	23,140,000.00

Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1.	Penyusunan RPP Perubahan atas Perpres Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama	1. Penajaman Fungsi Kementerian Agama; 2. Penataan Fungsi Direktorat Jendral Pendidikan Islam; 3. Pembentukan Direktorat Jendral Pesantren, dan 4. Penghapusan materi mengenai Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah	- Sekretaris Jenderal (Biro Hukum, Biro Ortala dan Biro Perencanaan) - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam; -	- Kementerian Haji dan Umrah	2025
2.	RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan	Perubahan ini perlu dilakukan dalam hal RUU Sisdiknas dilakukan perubahan, maka Peraturan Pelaksananya dimungkinkan untuk berubah.	- Sekretaris Jenderal (Biro Hukum) - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam; - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen; - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik; - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;	- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyele saian
			- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha; - Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Keagamaan - Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu.		
3.	<i>RPP perubahan atas PP No 39/2021 ttng Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal</i>	Amanat Perpres BPJPH	- Sekretaris Jenderal (Biro Hukum)	- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;	2025
4.	RPerpres tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama (KUB)	Penting untuk memperkuat upaya pemerintah dalam menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama, melalui regulasi yang mampu mendorong keterlibatan semua pihak—baik negara, tokoh agama, maupun masyarakat—dalam menyelesaikan potensi konflik keagamaan dan memperkuat toleransi di tengah keberagaman.	- Pusat Kerukunan Umat Beragama; - Sekretaris Jenderal (Biro Hukum)	- Kementerian Dalam Negeri - Komnas HAM	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
5.	Revisi Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama	Penyelerasan terhadap revisi Peraturan Presiden Nomor 152 terkait Direktorat Haji dan Umrah dengan penajaman revisi pada : • Penajaman Fungsi Kementerian Agama; • Penataan Fungsi Direktorat Jendral Pendidikan Islam; • Pembentukan Direktorat Jendral Pesantren, dan • Penghapusan materi mengenai Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah	- Sekretaris Jenderal (Biro Hukum, Biro Ortala dan Biro Perencanaan) - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;	- Sekretariat Jenderal - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Biro Hukum - Biro Organisasi dan Tata Laksana - Biro Perencanaan dan Penganggaran	2025
6.	RPMA tentang Perubahan atas PMA Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Kementerian Agama	Perlunya upaya perlindungan anak secara holistik dari berbagai bentuk kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, tidak terbatas pada kekerasan seksual saja.	- Sekjen	- Sekjen	2025
7.	RPMA tentang Perubahan atas PMA 16 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan	Penguatan pengelolaan pembelajaran dan standarisasi penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah umum	- Sekjen dan Pendis	- Sekjen; dan Pendis	2027

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyele saian
	Pendidikan Agama di Sekolah				
8.	RPMA tentang Perubahan PMA 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam	Penyesuaian ketentuan mengenai pengaturan pendidikan Keagamaan Islam berdasarkan PP 55 Tahun 2007 dan UU Pesantren. Penguatan penyelenggaraan Pendidikan Quran dan Pendidikan Diniyah Takmiliyah	- Sekjen dan Pendis	- Sekjen dan Pendis	2028
9.	RPMA tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau	Pengakuan kompetensi dan peningkatan efektifitas pembelajaran	- Sekjen, Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	- Sekjen, Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	2025
10.	Revisi PMA 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah	Harmonisasi kebijakan mengenai standar kompetensi kepala madrasah dan penambahan ketentuan seleksi kepala Madrasah Unggulan	- Sekjen dan Pendis	- Sekjen dan Pendis	2025
11.	RPMA tentang Perubahan atas PMA 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah	Penguatan pengelolaan dan peningkatan layanan madrasah	- Sekjen dan Pendis	- Sekjen dan Pendis	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
12.	RPMA tentang Organisasi dan Tata Kerja Madrasah	Penguatan organisasi dan kelembagaan madrasah	- Sekjen dan Pendis	- Sekjen dan Pendis	2026
13.	RPMA tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri	Standarisasi pembentukan organ Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dalam rangka Peningkatan Layanan dan Penguatan organisasi dan kelembagaan PTKN	- Sekjen, Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	- Sekjen, Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	2027
14.	RPMA tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Keagamaan	Standarisasi penyusunan statuta bagi PTK dalam rangka penguatan pengelolaan PTK	- Sekjen, Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	- Sekjen, Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	2026
15.	RPMA tentang Kemasjidan	<i>Masjid/Musala di Indonesia sangat banyak, beragam tipologinya, dan umumnya dikelola oleh masyarakat. Karena berkaitan dgn pelayanannya untuk umat/masyarakat, maka pengaturan tata kelolanya diperlukan. Pemerintah hadir membersamai transformasi masjid menjadi lebih profesional, moderat, berdaya, dan berdampak. Untuk itu, diperlukan regulasi yang lebih memadai dan dapat memayungi pembinaan tsb. Secara teknis, regulasi ini menjadi omnibus terhadap</i>	-	-	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		<i>intisari regulasi Dirjen Bimas yg ada, dan berupaya menjawab kondisi dan kebutuhan aktual dan faktual di masyarakat.</i>			
16.	Revisi Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama	Adanya pengurangan jumlah pusat pada Badan, yang semula 5 pusat menjadi hanya 4 pusat, sedangkan dalam naskah akademik yang diusulkan oleh BMBPSDM adalah sebanyak 5 Pusat Resetrukturisasi Pusat Penilaian Buku Agama, Lektur, dan Literasi Keagamaan dari Sekretariat Jenderal ke BMBPSDM	- BMBPSDM	- KemenPANRB, Kemenkum, Sekretariat Jenderal Kemenag, Pusbangkom	2025
17.	Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Keagamaan	Adanya perubahan nomenklatur serta tugas dan fungsi Badan Litbang dan Diklat menjadi Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berimplikasi terhadap perubahan nomenklatur serta tugas dan fungsi unit pelaksana teknis dibawahnya Memberikan kejelasan kedudukan, kewenangan, tugas, fungsi, serta tata kerja UPT pengembangan kompetensi SDM Keagamaan	- BMBPSDM	- KemenPANRB, Kemenkum, Sekretariat Jenderal Kemenag, Pusbangkom	2025
18.	Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata	Adanya perubahan nomenklatur serta tugas dan fungsi Badan Litbang dan Diklat menjadi Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber	- BMBPSDM	- KemenPANRB, Kemenkum, Sekretariat Jenderal	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	Kerja Balai Strategi Kebijakan Bidang Agama	Daya Manusia yang berimplikasi terhadap perubahan nomenklatur serta tugas dan fungsi unit pelaksana teknis dibawahnya Memberikan kejelasan kedudukan, kewenangan, tugas, fungsi, serta tata kerja Balai Litbang Agama pasca fungsi penelitian dan pengembangan sudah tidak boleh ada selain di BRIN		Kemenag, Pustrajak	
19.	Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an	Adanya perubahan nomenklatur serta tugas dan fungsi Badan Litbang dan Diklat menjadi Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berimplikasi terhadap perubahan nomenklatur serta tugas dan fungsi unit pelaksana teknis dibawahnya Memberikan kejelasan kedudukan, kewenangan, tugas, fungsi, serta tata kerja Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an	- BMBPSDM	- KemenPANRB, Kemenkum, Sekretariat Jenderal Kemenag, LPMQ	2025
20.	Perubahan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama	Adanya perubahan Nomenklatur Kementerian yang menjadi anggota Sekretariat Bersama Pembaharuan nomenklatur Kementerian/Lembaga sesuai dengan yang berlaku dalam Kabinet Merah Putih	- BMBPSDM	- Kemenkum, Sekretariat Jenderal Kemenag, Kemenko PMK	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
21.	Rancangan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Moderasi Beragama	Adanya ketentuan dalam KMA 450 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada RA, MI, MTs, MA, dan MAK bahwa Madrasah wajib memberikan kegiatan kokurikuler yang mengandung unsur moderasi beragama bagi peserta didik. Serta perlu penambahan bentuk pengembangan dalam kegiatan penguatan moderasi beragama yang berupa Film, Musik dan Kegiatan Kebudayaan Terciptanya regulasi yang harmonis dalam norma penguatan moderasi beragama	- BMBPSDM	- KemenPANRB, Kemenkum, Sekretariat Jenderal Kemenag	2025
22.	Rancangan Keputusan Menteri Agama tentang panduan pemantauan dan evaluasi penguatan moderasi beragama pada Kementerian/Lembaga	Sebagai tindak lanjut dari PMA Nomor 3 Tahun 2024 dan juga belum adanya pengaturan secara teknis tata cara pemantauan, dan evaluasi terhadap penguatan moderasi beragama pada K/L Terwujudnya keseragaman dalam proses pemantauan dan evaluasi implementasi moderasi beragama pada K/L	- BMBPSDM	- Sekretariat Jenderal Kemenag, Kemenko PMK	2025
23.	Rancangan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan KMA 455 Tahun 2024 tentang Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tim	Adanya perubahan Nomenklatur Kementerian yang menjadi anggota Sekretariat Bersama Pembaharuan nomenklatur sesuai dengan yang berlaku dalam Kabinet Merah Putih	- BMBPSDM	- Sekretariat Jenderal Kemenag, Kemenko PMK	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	Pelaksana Harian Sekretariat Bersama				
24.	Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Sumber Daya Manusia pada Kementerian Agama	1. Adanya beberapa perubahan substansi maupun nomenklatur pelatihan dari Instansi Pembina Pelatihan (LAN) Terbitnya PMA 15 Tahun 2021 yang mensyahkan adanya loka diklat keagamaan sebagai lembaga pelatihan pada Kementerian Agama Penyempurnaan dan substansi pelatihan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Instansi Pembina Pelatihan, yaitu Lembaga Administrasi Negara, serta penambahan loka diklat keagamaan sebagai lembaga penyelenggara pelatihan	- BMBPSDM	- KemenPANRB, Kemenkum, Sekretariat Jenderal Kemenag, Pusbangkom	2025
25.	Revisi Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penerbitan, Pentashihan, dan Peredaran Mushaf Al-Qur'an	1. Perlu ada penambahan secara rinci terkait pencetakan mushaf Al-Quran 2. Belum adanya ketentuan pengelolaan limbah bahan cetak mushaf Al-Quran 3. Sanksi administratif belum memberikan efek jera, sehingga perlu adanya sanksi pidana. Memberikan kepastian terhadap ketentuan pencetakan mushaf Al-Quran, tata Kelola pemusnahan limbah bahan cetak, akreditasi penerbit dan pencetak,	- BMBPSDM	- KemenPANRB, Kemenkum, Sekretariat Jenderal Kemenag, LPMQ	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		dan ketentuan sanksi pidana bagi yang melanggar ketentuan			
26.	Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Formasi JF Pentashih Mushaf Al-Qur'an	Amanat dari PerMenPAN-RB Nomor 19 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an Memberikan kepastian penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an	- BMBPSDM	- KemenPANRB, Kemenkum, Sekretariat Jenderal Kemenag, LPMQ	2025
27.	Perubahan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Satu Akun Angka Standar Buku Internasional dan Layanan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Adanya perubahan nomenklatur serta tugas dan fungsi Badan Litbang dan Diklat menjadi Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Memberikan kejelasan terhadap kedudukan dan tata kerja perpustakaan dibawah Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	- BMBPSDM	- Perpustnas, Sekretariat Jenderal Kemenag, Sekretariat BMBPSDM	2025
28.	Rancangan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Kebudayaan tentang		- BMBPSDM	- Kemenkum, Kemenbud, Sekretariat Jenderal,	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyele saian
	Relasi Agama dan Budaya			Sekretariat Badan, Pustrajak	
29.	Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang Penguatan Konsep Ekoteologi bagi Pengelola Rumah Ibadah		- BMBPSDM	- Kemenkum, Sekretariat Jenderal, Sekretariat Badan, Pustrajak, Ditjen Bimas semua Agama	2025
30.	Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang Pembinaan Lembaga Moderasi Beragama di Masyarakat		- BMBPSDM	- Kemenkum, Sekretariat Jenderal, Sekretariat Badan, Pustrajak	2025
31.	Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang tentang Standar Keluaran Kebijakan Pendidikan dan Keagamaan di lingkungan Kementerian Agama		- BMBPSDM	- Kemenkum, Sekretariat Jenderal, Sekretariat Badan, Pustrajak, LAN	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyele saian
32.	Rancangan Surat Edaran Menteri Agama tentang Koordinasi Penyusunan Dokumen Kebijakan pada Kementerian Agama		- BMBPSDM	- Kemenkum, Sekretariat Jenderal, Sekretariat Badan, Pustrajak	2025

Matriks Metadata/Rumusan Pengukuran Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025-2029

1

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Indeks Kerukunan Umat Beragama
3	Konsep/Definisi	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) merupakan indeks yang menyatakan kondisi hubungan umat beragama yang toleran, setara dalam menjalankan agama, serta bekerjasama dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
4	Interpretasi	Semakin tinggi capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama, maka semakin baik kondisi kehidupan intra dan antar umat beragama yang saling berinteraksi secara harmonis, toleran, damai, saling menghargai, serta menghormati perbedaan dan kebebasan menjalankan ibadah masing-masing.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$IKUB = (Nilai\ Dim.Toleransi + Nilai\ Dim.Kesetaraan + Nilai\ Dim.Kerjasama) / 3$
6	Nama Variabel Pembangun	1. Nilai Dimensi Toleransi 2. Nilai Dimensi Kesetaraan 3. Nilai Dimensi Kerjasama
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survei
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. 0,00 – 20,00 = rukun sangat rendah; 2. 20,01 – 40,00 = rukun rendah; 3. 40,01 – 60,00 = rukun sedang; 4. 60,01 – 80,00 = rukun tinggi; 5. 80,01 – 100,00 = rukun sangat tinggi.
11	Level Estimasi	Nasional dan Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	https://ppid.kemenag.go.id/v5/indeks_kub.php

2
3
4
5
6

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
2	Nama Indikator	Indeks Kesalehan Umat Beragama
3	Konsep/Definisi	Suatu ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kesalehan sosial individu atau kelompok dalam suatu komunitas agama. Indeks ini mencakup berbagai aspek kehidupan sosial yang mencerminkan implementasi ajaran agama dalam hubungan antarmanusia dan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat
4	Interpretasi	Semakin tinggi nilai Indeks Kesalehan Umat Beragama (IKS), dan indkes ritus individual semakin baik impelementasi ajaran agama pada aspek sosial dan peribadatan, dilakukan oleh umat beragama di Indonesia.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Indeks Kesalehan UB =(I.Peduli/Solidaritas Sosial + I. Relasi antar Manusia (Kebhinekaan) + I. Menjaga Etika dan Budi Pekerti + I. Menjaga Kelestarian Alam + I. Stabilitas Sosial)/5
6	Nama Variabel Pembangun	1. Indeks Peduli/Solidaritas Sosial 2. Indeks Relasi antar Manusia (Kebhinekaan) 3. Indeks Menjaga Etika dan Budi Pekerti 4. Indeks Menjaga Kelestarian Alam 5. Indeks Stabilitas Sosial
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survei Indeks Kesalehan Umat Beragama
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. 0-20 = Sangat rendah; 2. 20-30 = Rendah; 3. 30-50 = Sedang; 4. 50-75 = Tinggi; 5. 75-100 = Sangat tinggi.
11	Level Estimasi	Nasional dan Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
2	Nama Indikator	Indeks Layanan Keagamaan
3	Konsep/Definisi	Indeks layanan kementerian agama adalah indeks komposit dari 4 (empat) indeks layanan yang telah dilaksanakan di Kementerian Agama yaitu: indeks Layanan KUA, Indeks Layanan Haji, Indeks Layanan Sertifikasi Halal, dan Layanan Penyuluhan Agama
4	Interpretasi	Semakin tinggi ILK menggambarkan layanan publik keagamaan yang diberikan juga semakin baik
5	Metode / Rumus Perhitungan	$ILK = \sigma (xi * wi)$ di mana xi = indeks ke-i wi = Bobot indeks ke-I $i = 1,2,3,4$
6	Nama Variabel Pembangun	1. Indeks Kepuasan Layanan KUA 2. Indeks Kepuasan Jemaah Haji 3. Indeks Kepuasan Layanan Sertifikasi Halal 4. Indeks Kepuasan Layanan Penyuluh Agama
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survei Indeks Layanan Keagamaan
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Nilai Indeks 25-43,75 = D (Tidak baik); 2. Nilai Indeks 43,76-62,50 = C (Kurang baik); 3. Nilai Indeks 62,51-81,25 = B (Baik); 4. Nilai Indeks 81,26-100,0 = A (Sangat baik).
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Sistem metadata BMBPSDM

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase rekomendasi Early Warning System (keagamaan) yang ditindaklanjuti (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu)
3	Konsep/Definisi	Indikator yang mengukur tingkat responsivitas pemangku kepentingan terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) dalam isu keagamaan. Indikator ini merepresentasikan proporsi rekomendasi yang telah ditindaklanjuti melalui langkah konkret seperti verifikasi lapangan, fasilitasi penyelesaian, mediasi sosial-keagamaan, maupun intervensi kebijakan. Penilaian dilakukan berdasarkan data hasil pemantauan, laporan pelaksanaan tindak lanjut, serta dokumentasi koordinasi antar lembaga, yang mencerminkan efektivitas sistem deteksi dini dalam mendukung stabilitas dan kerukunan kehidupan beragama di tingkat nasional maupun daerah.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase rekomendasi Early Warning System (Keagamaan) yang ditindaklanjuti, semakin baik efektivitas respons dan koordinasi dalam mencegah potensi gangguan kehidupan beragama. Peningkatan indikator ini mencerminkan berfungsinya sistem deteksi dini, kesiapsiagaan kelembagaan, dan komitmen bersama dalam menjaga kerukunan dan stabilitas sosial keagamaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah rekomendasi EWS yang ditindaklanjuti b = Jumlah rekomendasi EWS yang dikeluarkan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah Rekomendasi EWS Keagamaan yang Ditindaklanjuti 2. Jumlah Total Rekomendasi EWS Keagamaan yang Dikeluarkan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendataan dan Evaluasi Rekomendasi Early Warning System (Keagamaan)
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan status tindak lanjut: Ditindaklanjuti, Belum Ditindaklanjuti
11	Level Estimasi	Nasional

NO	Atribut	Keterangan
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
2	Nama Indikator	Indeks kesalehan Umat Beragama (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu)
3	Konsep/Definisi	Indeks Kesalehan Sosial mengukur sejauh mana masyarakat memiliki kesalehan sosial yang dapat diukur melalui beberapa dimensi seperti kepedulian sosial, relasi antar manusia, etika dan budi pekerti, serta pemeliharaan lingkungan. Penilaian ini dilakukan melalui survei yang melibatkan berbagai kelompok agama di Indonesia
4	Interpretasi	Indeks Kesalehan Sosial mengukur sejauh mana masyarakat memiliki kesalehan sosial yang dapat diukur melalui beberapa dimensi seperti kepedulian sosial, relasi antar manusia, etika dan budi pekerti, serta pemeliharaan lingkungan. Penilaian ini dilakukan melalui survei yang melibatkan berbagai kelompok agama di Indonesia
5	Metode / Rumus Perhitungan	$IKS = [(a + b + c + d + e) / 5] \times 100\%$ Keterangan: a = Nilai dimensi kepedulian sosial b = Nilai dimensi relasi antar manusia c = Nilai dimensi etika dan budi pekerti d = Nilai dimensi pelestarian lingkungan e = Nilai dimensi relasi dengan negara
6	Nama Variabel Pembangun	1. Kesalehan Sosial Masyarakat 2. Dimensi Kepedulian Sosial 3. Relasi Antar Manusia 4. Menjaga Etika dan Budi Pekerti 5. Melestarikan Lingkungan 6. Relasi dengan Negara dan Pemerintah.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Survei tingkat kepatuhan umat dalam menjalankan ibadah wajib dan sunnah 2. Pembinaan keagamaan melalui majelis taklim, pesantren, dan lembaga dakwah 3. Kegiatan sosial keagamaan seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) 4. Penguatan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat melalui pendidikan dan dakwah 5. Evaluasi dan penelitian mengenai praktik keberagamaan umat Islam
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan

10	Klasifikasi	1. Sangat Rendah =0-20 2. Rendah = 20-30 3. Sedang = 30-50 2. Tinggi = 70-75 3 Sangat Tinggi = 75=100.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
2	Nama Indikator	Persentase lembaga agama dan Lembaga sosial keagamaan yang memenuhi standar pengelolaan (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu)
3	Konsep/Definisi	Persentase lembaga agama dan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang memenuhi standar pengelolaan mengukur proporsi lembaga dan ormas keagamaan yang telah mencapai atau melampaui standar pengelolaan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama atau otoritas terkait. Standar pengelolaan ini mencakup aspek administratif, operasional, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam menjalankan program keagamaan. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila serta terdaftar di Kementerian Agama. Tokoh agama adalah setiap pemuka agama di Indonesia yang mengajarkan nilai-nilai agama dan berceramah serta ditetapkan Kementerian agama
4	Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa mayoritas lembaga dan ormas keagamaan telah memenuhi standar pengelolaan yang ditetapkan, mencerminkan kualitas manajemen yang baik dan profesionalisme dalam operasionalnya. Sebaliknya, persentase yang rendah mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas dan pembinaan lebih lanjut untuk memastikan standar pengelolaan terpenuhi
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumusan = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah lembaga agama dan lembaga sosial keagamaan yang memenuhi standar pengelolaan b = Jumlah lembaga agama dan lembaga sosial keagamaan yang terdaftar
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lembaga agama yang memenuhi standar pengelolaan 2. Jumlah lembaga sosial keagamaan yang memenuhi standar pengelolaan 3. Jumlah lembaga agama dan lembaga sosial keagamaan

7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. administratif (tanda daftar) 2. operasional (jenis layanan keagamaan dan pendidikan) 3. transparansi (laporan penggunaan anggaran) 4. akuntabilitas (opini kelembagaan-akreditasi) 5. efektivitas
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Triwulan
10	Klasifikasi	1. Lembaga agama 2. Lembaga sosial keagamaan
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kab/Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM
2	Nama Indikator	Persentase naskah kebijakan pembangunan bidang agama yang dimanfaatkan
3	Konsep/Definisi	Persentase naskah kebijakan pembangunan di bidang agama yang memenuhi kriteria moderasi beragama, maslahat bagi masyarakat, dan berdampak positif sesuai hasil penilaian resmi
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase, menunjukkan semakin banyak naskah kebijakan pembangunan bidang agama yang disusun dan dinyatakan moderat, maslahat, serta berdaya guna bagi masyarakat. Indikator ini mencerminkan kualitas perumusan kebijakan bidang agama untuk membangun kehidupan beragama yang rukun, damai, dan berkeadilan
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a : Jumlah naskah kebijakan pembangunan bidang agama yang dinilai moderat/maslahat dan berdampak b : Jumlah total naskah kebijakan pembangunan bidang agama yang dihasilkan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah naskah kebijakan pembangunan bidang agama yang dimanfaatkan 2. Jumlah seluruh naskah kebijakan pembangunan bidang agama yang dihasilkan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Penilaian Moderasi, Maslahat, dan Dampak Naskah Kebijakan Bidang Agama
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan status pemanfaatan: Dimanfaatkan, Belum Dimanfaatkan
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM
2	Nama Indikator	Indeks Moderasi Beragama
3	Konsep/Definisi	Indeks Moderasi Beragama adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat penerimaan, toleransi, keseimbangan, dan sikap saling menghargai antarumat beragama di Indonesia. Indeks ini disusun berdasarkan pengukuran persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap nilai-nilai moderasi beragama.
4	Interpretasi	Nilai indeks menunjukkan sejauh mana masyarakat atau kelompok sasaran mempraktikkan prinsip moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Semakin tinggi nilai indeks (mendekati 100), semakin tinggi pula tingkat moderasi beragama, yang berarti masyarakat lebih inklusif, toleran, dan mampu menjaga kerukunan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Indeks} = (\Sigma \text{ skor indikator} / \text{ skor maksimum}) \times 100$ Keterangan: 1. Skor indikator dihasilkan dari hasil survei atau asesmen terkait aspek moderasi beragama. 2. Skor maksimum adalah skor tertinggi yang mungkin dicapai berdasarkan instrumen pengukuran.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Skor toleransi antarumat beragama 2. Skor penerimaan terhadap perbedaan 3. Skor penolakan terhadap kekerasan atas nama agama 4. Skor komitmen kebangsaan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survei Indeks Moderasi Beragama
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan aspek penilaian: toleransi, penerimaan, penolakan, komitmen kebangsaan
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data?	-

	(Disebutkan nama publikasinya	

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM
2	Nama Indikator	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Agama dan Keagamaan.
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan tingkat peningkatan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang agama dan keagamaan, yang diperoleh melalui pelatihan, pendidikan, pendampingan, atau kegiatan pengembangan kapasitas lainnya.
4	Interpretasi	Angka ini menunjukkan efektivitas program peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh lembaga terkait. Semakin tinggi persentasenya, semakin besar proporsi SDM agama dan keagamaan yang mengalami peningkatan kompetensi dibandingkan periode sebelumnya.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah SDM agama dan keagamaan yang kompetensinya meningkat pada tahun berjalan b = Jumlah SDM agama dan keagamaan yang kompetensinya meningkat pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah SDM agama dan keagamaan yang mengikuti asesmen kompetensi 2. Jumlah SDM agama dan keagamaan yang memperoleh skor kompetensi lebih tinggi dibanding asesmen sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Program Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi SDM Agama dan Keagamaan
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan bentuk kegiatan: Pelatihan, Bimbingan Teknis, Sertifikasi, Pendidikan dan Pelatihan
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
2	Nama Indikator	Nilai Layanan Penyuluh Agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu
3	Konsep/Definisi	Mengukur tingkat kepuasan kelompok sasaran terhadap kinerja layanan penyuluh agama dan pemetaan pelibatan stakeholder dalam bimbingan dan penyuluhan agama
4	Interpretasi	Semakin tinggi indeks layanan menunjukkan kinerja penyuluh agama telah memenuhi ekspektasi kelompok sasaran
5	Metode / Rumus Perhitungan	Survey (Gap antara ekspektasi dan persepsi pelayanan yang diterima)
6	Nama Variabel Pembangun	1. Persyaratan 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya/Tarif *) 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana **) 7. Perilaku Pelaksana **) 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 9. Sarana dan prasarana
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Rekrutmen dan penempatan penyuluh agama Islam 2. Pelatihan dan peningkatan kapasitas penyuluh agama Islam 3. Monitoring dan evaluasi kinerja penyuluh agama Islam 4. Penyediaan materi dakwah dan bimbingan keagamaan 5. Pendampingan dan konsultasi keagamaan bagi masyarakat
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Persyaratan =10% 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur =10% 3. Waktu Penyelesaian =10% 4. Biaya/Tarif *) =10% 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan =10% 6. Kompetensi Pelaksana **) =10% 7. Perilaku Pelaksana **) =10% 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan =10% 9. Sarana dan prasarana =20%
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi

12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
2	Nama Indikator	Persentase Calon Pengantin yang Mendapatkan Bimbingan Perkawinan Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu
3	Konsep/Definisi	Persentase catin yang mendapatkan bimbingan perkawinan merujuk pada persentase dari calon pengantin (catin) yang telah menerima panduan atau bimbingan khusus mengenai perkawinan sebelum melangsungkan pernikahan. Bimbingan perkawinan dapat mencakup aspek-aspek seperti kesiapan mental, tanggung jawab dalam pernikahan, keseimbangan peran suami-istri, serta informasi hukum dan agama terkait pernikahan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi partisipasi Catin dalam Blmwin, menandakan semakin besar peran pemerintah dalam memfasilitasi bimwin bagi para Catin
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumusan = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah calon pengantin yang mendapatkan Bimwin b = Jumlah calon pengantin yang terdaftar
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan 2. Jumlah calon pengantin yang terdaftar
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pengembangan kurikulum dan modul bimbingan perkawinan 2. Pelatihan dan sertifikasi tenaga pembimbing perkawinan 3. Evaluasi efektivitas program bimbingan perkawinan 4. Survei kepuasan peserta bimbingan perkawinan 5. Penyediaan sarana dan media pendukung bimbingan perkawinan
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Bimbingan 2. Pembinaan
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data?	-

	(Disebutkan nama publikasinya	

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
2	Nama Indikator	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Bimbingan Keagamaan Keluarga Sakinah, Kristiani, Bahagia, Sukinah, Hitta Sukhaya, Anhe Jiating
3	Konsep/Definisi	Persentase rumah tangga yang mendapatkan bimbingan keagamaan keluarga merujuk pada proporsi atau persentase dari total rumah tangga dalam suatu komunitas atau wilayah yang telah menerima bimbingan atau panduan keagamaan secara khusus untuk keluarga. Bimbingan keagamaan keluarga mencakup aspek-aspek spiritual, etika, dan nilai-nilai keagamaan yang dapat memperkuat hubungan keluarga, meningkatkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip keagamaan, dan memberikan pedoman bagi kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan ajaran agama yang dianut.
4	Interpretasi	Semakin tinggi partisipasi rumah tangga dalam mendapatkan bimbingan keluarga keluarga, menandakan semakin besar peran pemerintah dalam memfasilitasi BK bagi rumah tangga Islam di Indonesia
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumusan = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bimbingan keagamaan b = Jumlah rumah tangga yang terdaftar
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bimbingan keagamaan 2. Jumlah rumah tangga yang terdaftar
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pengembangan materi dan metode bimbingan keagamaan keluarga 2. Pelatihan dan peningkatan kapasitas pembimbing keagamaan keluarga 3. Evaluasi dan monitoring efektivitas layanan bimbingan keagamaan 4. Survei kepuasan keluarga terhadap layanan bimbingan keagamaan 5. Penyediaan sarana dan media edukasi keagamaan bagi keluarga
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Bimbingan 2. Pembinaan
11	Level Estimasi	Nasional

12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
2	Nama Indikator	Persentase sarana dan prasarana layanan peribadatan (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu) yang memenuhi standar
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan proporsi sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan peribadatan (seperti masjid, musholla, gereja, pura, vihara, klenteng, dan fasilitas penunjang) yang telah memenuhi standar teknis, kenyamanan, keamanan, dan kelayakan sesuai ketentuan yang berlaku.
4	Interpretasi	Angka ini menunjukkan sejauh mana fasilitas peribadatan di wilayah tertentu sudah sesuai dengan standar pelayanan minimal. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik kualitas sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan ibadah umat beragama.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah sarana dan prasarana peribadatan yang memenuhi standar b = Total sarana dan prasarana peribadatan yang diidentifikasi/dinilai
6	Nama Variabel Pembangun	1. Data hasil penilaian kelayakan sarana dan prasarana peribadatan 2. Data jumlah total sarana dan prasarana peribadatan yang menjadi objek evaluasi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendataan dan Evaluasi Sarana dan Prasarana Layanan Peribadatan
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis rumah ibadah: Masjid, Gereja, Pura, Vihara, Klenteng
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
2	Nama Indikator	Indeks Literasi Kitab Suci Agama (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu)
3	Konsep/Definisi	Indeks Literasi Kitab Suci Agama adalah ukuran komposit yang menilai tingkat kemampuan individu (pemeluk agama) dalam memahami, menginterpretasikan, dan menerapkan ajaran fundamental yang terkandung dalam kitab suci agama masing-masing, sebagai landasan untuk mewujudkan kehidupan beragama yang toleran, inklusif, dan moderat.
4	Interpretasi	Nilai ini mencerminkan sejauh mana upaya Kementerian Agama (melalui program pendidikan, bimbingan, dan penyediaan lektur) berhasil meningkatkan kualitas pemahaman keagamaan masyarakat dari sumber primer (Kitab Suci). Indeks yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pemahaman kontekstual dan mendalam terhadap ajaran agama, yang menjadi modal penting bagi penguatan Moderasi Beragama dan kerukunan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$ILKSA = ((Wa \cdot a) + (Wb \cdot b) / (Wa + Wb))$ Keterangan: a. IPKKS b. IANKKS dihitung berdasarkan rata-rata skor item pertanyaan survei (yang telah dibakukan) untuk dimensi kognitif dan aplikatif. Skala yang digunakan umumnya adalah skala interval yang dinormalisasi. - Wa dan Wb : Bobot yang ditetapkan untuk setiap indeks variabel (misalnya, aspek aplikasi nilai sosial (Wb) sering diberi bobot yang sama atau sedikit lebih besar daripada pemahaman konten (Wa)). - Skor rata-rata ini kemudian dikonversi menjadi skala baku (misalnya, 0-100), di mana skor yang lebih tinggi menunjukkan tingkat literasi yang lebih baik.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Indeks Pemahaman Konten Kitab Suci (IPKKS) b. Indeks Aplikasi Nilai Kitab Suci dalam Kehidupan Sosial (IANKKS)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pelaksanaan Survei Nasional Literasi Keagamaan - Pengembangan Instrumen Pengukuran Literasi Kitab Suci oleh para ahli di bidang lektur dan riset keagamaan. - Pelaksanaan Program Bimbingan Keagamaan dan Pendidikan yang menekankan pada pemahaman kontekstual Kitab Suci

8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Berkala
10	Klasifikasi	1. Kualitas Kehidupan Beragama 2. Literasi Keagamaan dan Moderasi Beragama
11	Level Estimasi	- Nasional - Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
2	Nama Indikator	Persentase penduduk miskin yang menerima manfaat dana sosial/ dana punia/ Paramita/ Kebajikan keagamaan (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu) untuk peningkatan kesejahteraan
3	Konsep/Definisi	Persentase penduduk miskin yang menerima manfaat dana sosial keagamaan untuk peningkatan kesejahteraan adalah indikator yang mengukur proporsi penduduk miskin yang mendapatkan bantuan dari dana sosial keagamaan, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, dibandingkan dengan total penduduk miskin dalam suatu wilayah atau periode tertentu.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini, semakin luas jangkauan dan efektivitas distribusi dana sosial keagamaan dalam membantu penduduk miskin meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumusan: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a: Penerima manfaat bidang ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan b: Jumlah penduduk miskin pada Regsosek
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah Penerima manfaat bidang ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan 2. Jumlah penduduk miskin pada Regsosek
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) 2. Program bantuan sosial keagamaan bagi penduduk miskin 3. Pemberdayaan ekonomi berbasis dana sosial keagamaan 4. Monitoring dan evaluasi efektivitas penyaluran dana sosial keagamaan 5. Pendataan dan verifikasi penerima manfaat dana sosial keagamaan
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Penerima manfaat bidang ekonomi 2. Penerima manfaat bidang pendidikan 3. Penerima manfaat bidang kesehatan
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
2	Nama Indikator	Persentase lembaga dana sosial/ dana punia/ Paramita/ Kebajikan keagamaan (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu) yang akuntabel dan profesional
3	Konsep/Definisi	Lembaga dana sosial keagamaan yang akuntabel dan profesional adalah institusi yang bertugas mengelola dana sosial keagamaan (zakat, infak, sedekah (ZIS), wakaf) secara transparan, amanah, serta sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Profesionalisme dan akuntabilitas menjadi kunci keberhasilan lembaga ini dalam mencapai tujuan sosial dan keagamaan, yaitu mendistribusikan dana secara tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan umat.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase lembaga sosial keagamaan yang akuntabel dan profesional, makin membaik tata kelola dan pelayanan (pengumpulan dan distribusi dana sosial keagamaan) terhadap masyarakat
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumusan = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Lembaga dana sosial keagamaan dengan penilaian baik, akuntabel, profesional b = Jumlah populasi lembaga dana sosial keagamaan yang terdaftar
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah Lembaga Dana Sosial Keagamaan yang profesional dan akuntabel, 2. Jumlah Lembaga Dana Sosial Keagamaan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Standarisasi dan sertifikasi lembaga pengelola dana sosial keagamaan 2. Pelatihan dan peningkatan kapasitas tata kelola keuangan lembaga 3. Audit dan evaluasi transparansi serta akuntabilitas lembaga 4. Digitalisasi dan pelaporan keuangan berbasis teknologi 5. Pengawasan dan pendampingan kelembagaan oleh otoritas terkait
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Tanda daftar 2. Data hasil verifikasi dan validasi
11	Level Estimasi	Nasional

12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
2	Nama Indikator	Indeks Kepuasan Layanan KUA
3	Konsep/Definisi	Pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan umat Islam terhadap rangkaian kegiatan yang terkait dengan layanan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama di tingkat Kecamatan. Berdasarkan Permen PAN dan RB No 14/2017, unsur kepuasan masyarakat meliputi: Persyaratan; Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; Waktu Penyelesaian, Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana dan prasarana
4	Interpretasi	Semakin tinggi nilai kepuasan layanan KUA, semakin tinggi kualitas layanan KUA di tingkat kecamatan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$IKM\ KUA = (A+B+C+D+E+F+G+H+I) / 9$ Keterangan: A = Skor persyaratan B = Skor sistem, mekanisme, dan prosedur C = Skor waktu D = Skor biaya E = Skor spesifikasi produk F = Skor kompetensi pelaksana G = Skor perilaku pelaksana H = Skor penanganan aduan I = Skor sarana prasarana
6	Nama Variabel Pembangunan	1. Dimensi persyaratan 2. Dimensi sistem, mekanisme, dan prosedur 3. Dimensi waktu 4. Dimensi biaya 5. Dimensi spesifikasi produk 6. Dimensi kompetensi pelaksana 7. Dimensi perilaku pelaksana 8. Dimensi penanganan aduan 9. Dimensi sarana prasarana
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan	1. Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan KUA 2. Evaluasi dan monitoring kualitas layanan KUA 3. Peningkatan kapasitas SDM dan standar pelayanan di KUA 4. Digitalisasi dan inovasi layanan administrasi KUA 5. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung layanan KUA
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan

10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis layanan: Pernikahan, Rujuk, Bimbingan Perkawinan, Konsultasi Keluarga, Layanan Wakaf/Zakat, Layanan Administrasi Keagamaan
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Tidak

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM
2	Nama Indikator	Nilai Kepuasan Layanan Pentashihan al-Qur'an dan Edukasi al-Qur'an
3	Konsep/Definisi	Nilai ini mencerminkan tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan pentashihan mushaf Al-Qur'an (penilaian kelayakan, ketepatan, dan keaslian teks) serta kegiatan edukasi Al-Qur'an (penyuluhan, pelatihan, dan literasi). Penilaian kepuasan dilakukan melalui survei kepada pemohon, penerbit, lembaga pendidikan, dan masyarakat penerima layanan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi nilai kepuasan, semakin baik persepsi pengguna terhadap kualitas, ketepatan, aksesibilitas, dan profesionalitas layanan pentashihan serta program edukasi Al-Qur'an. Nilai ini dapat digunakan untuk memantau efektivitas pelayanan dan merumuskan strategi peningkatan mutu layanan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Nilai Kepuasan = $(\Sigma \text{ skor jawaban responden} / \text{skor maksimum}) \times 100$ Keterangan: 1. Skor jawaban responden diperoleh dari kuesioner kepuasan layanan 2. Skor maksimum adalah nilai tertinggi yang dapat dicapai berdasarkan jumlah pertanyaan dan bobot penilaian
6	Nama Variabel Pembangun	1. Data hasil survei kepuasan layanan pentashihan mushaf Al-Qur'an 2. Data hasil survei kepuasan edukasi Al-Qur'an
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Berdasarkan jenis layanan: Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Edukasi dan Sosialisasi Al-Qur'an
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
2	Nama Indikator	Indeks Kepuasan Layanan : Jamaah haji Indonesia (IKJHI) dalam negeri Jamaah haji Indonesia (IKJHI) luar negeri
3	Konsep/Definisi	Indeks Kepuasan Layanan Jamaah Haji Indonesia (IKJHI) adalah indikator yang menggambarkan tingkat kepuasan jamaah haji Indonesia terhadap pelayanan yang diberikan selama proses penyelenggaraan ibadah haji, baik di dalam negeri maupun di luar negeri (Arab Saudi)
4	Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik persepsi jamaah terhadap kualitas layanan yang diterima. Nilai indeks yang tinggi mencerminkan bahwa pelayanan telah memenuhi atau melampaui harapan jamaah
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumusan 1 : $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a : Jumlah jamaah haji yang menyatakan puas terhadap layanan haji (dalam negeri/luar negeri) b : Jumlah total jamaah haji yang menjadi responden survei IKJHI Rumusan 2 : $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a : Jumlah jamaah haji yang menyatakan puas terhadap layanan haji luar negeri b : Jumlah total jamaah haji yang menjadi responden survei IKJHI luar negeri
6	Nama Variabel Pembangun	IKJHI_DN : Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia Dalam Negeri IKJHI_LN : Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia Luar Negeri
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia Dalam Negeri 2. Survei Kepuasan Jamaah Haji Indonesia Luar Negeri
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan tahapan layanan: Pra-keberangkatan, Pelayanan di Arab Saudi, Pasca-keberangkatan
11	Level Estimasi	Nasional

12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Pada Situs BPS

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Indeks Kepuasan Layanan Penilaian Buku Agama
3	Konsep/Definisi	Indeks Kepuasan Layanan Penilaian Buku Agama adalah ukuran komposit yang menilai tingkat kepuasan penerbit, penulis, atau pemangku kepentingan lainnya (sebagai pengguna layanan) terhadap seluruh aspek pelayanan yang diberikan oleh unit kerja Kementerian Agama dalam proses penilaian atau telaah buku keagamaan untuk penerbitan Tanda Layak Terbit atau rekomendasi.
4	Interpretasi	Nilai ini mencerminkan persepsi pengguna layanan terhadap kualitas, kecepatan, transparansi, dan objektivitas proses penilaian buku agama. Indeks yang tinggi menunjukkan bahwa unit kerja telah menyelenggarakan layanan telaah buku yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan publik, yang pada akhirnya akan mendukung peredaran literatur keagamaan yang berkualitas.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$IKLPBA = ((Wa \cdot a) + (Wb \cdot b) / (Wa + Wb))$ Keterangan: a. IKPKL b. IKPHP dihitung berdasarkan rata-rata skor item survei kepuasan yang diukur menggunakan skala interval (misalnya, skala Likert 1-4 atau 1-5). - Wa dan Wb: Bobot yang ditetapkan untuk setiap dimensi indeks variabel (misalnya, kualitas hasil penilaian (Wb) sering diberi bobot yang lebih besar). - Skor rata-rata ini kemudian dikonversi menjadi skala baku (misalnya, 0-100) untuk memudahkan perbandingan.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Indeks Kepuasan terhadap Prosedur dan Kecepatan Layanan (IKPKL) b. Indeks Kepuasan terhadap Kualitas Hasil Penilaian dan Kompetensi Penilai (IKPHP)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pelaksanaan Penilaian dan Telaah Buku Keagamaan. - Survei Kepuasan Pengguna Layanan Penilaian Buku Agama - Pengelolaan Data dan Administrasi Penilaian Naskah
8	Ukuran/Satuan	Indeks (0-100)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	- Kualitas Pelayanan Publik - Kinerja Pelayanan Publik Bidang Lektur Keagamaan

NO	Atribut	Keterangan
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase calon pengantin yang mendapatkan Bimbingan Perkawinan Agama Islam
3	Konsep/Definisi	Persentase pasangan calon pengantin (Catin) Muslim yang mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang telah mengikuti atau mendapatkan layanan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang diselenggarakan atau difasilitasi oleh Kementerian Agama. Layanan ini bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada calon pengantin dalam membangun dan mengelola rumah tangga yang harmonis (sakinah), sekaligus menjadi salah satu upaya pencegahan stunting dan pengurangan angka perceraian.
4	Interpretasi	Persentase yang tinggi (mendekati 100%) menunjukkan keberhasilan program pemerintah, khususnya Kementerian Agama, dalam memastikan setiap pasangan yang akan menikah mendapatkan edukasi pranikah yang memadai. Hal ini mencerminkan komitmen terhadap pembinaan keluarga yang berkualitas. Persentase yang rendah mengindikasikan adanya kendala dalam pelaksanaan Bimwin, baik dari sisi kapasitas penyelenggara (KUA) maupun tingkat partisipasi dan kesadaran calon pengantin.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = ((a) / (b)) * 100% Keterangan: (a) = Jumlah Pasangan Calon Pengantin yang Mendapatkan Bimbingan Perkawinan (b) = Total Jumlah Pasangan Calon Pengantin yang Mendaftar dan Wajib Bimwin
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Pasangan Calon Pengantin Muslim yang Telah Mengikuti/Mendapatkan Bimbingan Perkawinan (Bimwin). b. Total Jumlah Pasangan Calon Pengantin Muslim yang Mendaftarkan Pernikahan dan Wajib Mengikuti Bimwin dalam Periode yang Sama.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pelaksanaan Pendaftaran Pernikahan di KUA. - Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) bagi Calon Pengantin (Catin) (Bimwin Tatap Muka atau Mandiri). - Pendataan dan Pelaporan Calon Pengantin yang Mengikuti Bimwin di setiap KUA. - Evaluasi Program Keluarga Sakinah dan Penurunan Angka Perceraian/Stunting.
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	- Bulanan - Triwulanan - Tahunan

NO	Atribut	Keterangan
10	Klasifikasi	- Berdasarkan Jenis Pelaksanaan Bimwin: Tatap Muka, Mandiri (E-Learning), Kombinasi. - Berdasarkan Usia Calon Pengantin: Usia Remaja (di bawah 21 tahun), Usia Dewasa. - Berdasarkan Wilayah: Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan (KUA).
11	Level Estimasi	- Nasional - Provinsi - Kabupaten atau Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
2	Nama Indikator	Persentase Lembaga Wakaf yang diawasi sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan profesional
3	Konsep/Definisi	Persentase Lembaga Wakaf yang Diawasi adalah rasio yang mengukur jumlah lembaga pengelola wakaf (Nazhir) yang telah menjalani proses pengawasan dan pembinaan secara berkala oleh Kementerian Agama atau Badan Wakaf Indonesia (BWI), di mana pengawasan tersebut mencakup aspek kepatuhan syariat, akuntabilitas pengelolaan dana/aset, dan profesionalisme tata kelola kelembagaan, dibandingkan dengan total lembaga wakaf terdaftar yang wajib diawasi.
4	Interpretasi	Nilai ini mencerminkan keberhasilan Kementerian Agama dalam memastikan tata kelola wakaf yang baik (Good Waqf Governance). Peningkatan persentase menunjukkan peningkatan kualitas dan frekuensi pengawasan, yang berdampak pada menurunnya risiko penyalahgunaan aset wakaf serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap instrumen wakaf, sehingga mendukung penguatan ekonomi umat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah Lembaga Wakaf yang Diawasi dan Dinilai Kepatuhan. b = Jumlah Lembaga Wakaf Terdaftar yang Wajib Diawasi.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Lembaga Wakaf (Nazhir) yang Diawasi dan Dinilai Kepatuhan b. Jumlah Lembaga Wakaf (Nazhir) Terdaftar yang Wajib Diawasi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Nazhir Wakaf secara periodik. - Audit Kepatuhan Syariat dan Keuangan Nazhir yang melibatkan auditor syariah dan akuntan publik. - Pendataan dan Registrasi Lembaga Wakaf (Nazhir). - Penyusunan dan Evaluasi Laporan Kinerja Nazhir.
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	- Tata Kelola Kelembagaan Keagamaan - Kinerja Pengelolaan Wakaf
11	Level Estimasi	- Nasional - Provinsi

12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
2	Nama Indikator	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Bimbingan Keagamaan Keluarga Sakinah
3	Konsep/Definisi	Rasio yang mengukur sejauh mana program pembinaan dan bimbingan keagamaan mengenai Keluarga Sakinah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama telah menjangkau dan diikuti oleh rumah tangga (pasangan suami istri yang sudah menikah), bukan hanya calon pengantin. Bimbingan ini meliputi materi seputar relasi suami-istri, pendidikan anak, kesehatan reproduksi, pengelolaan keuangan, dan penanggulangan konflik, dengan tujuan utama untuk meningkatkan ketahanan keluarga dan menekan angka perceraian (post-marital education).
4	Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan efektifnya program post-marital Kemenag (Sekolah Relasi Suami Istri/SERASI atau program Pusaka Sakinah) dalam membina dan memperkuat keluarga yang sudah berjalan. Hal ini mencerminkan keberhasilan Kemenag dalam meningkatkan kualitas hidup dan keharmonisan keluarga di masyarakat. Persentase yang rendah mengindikasikan bahwa program bimbingan masih berfokus pada calon pengantin dan kurang menjangkau pasangan yang sudah menikah yang juga rentan terhadap masalah keluarga.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $((a) / (b)) * 100\%$ Keterangan: (a) = Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Bimbingan Keagamaan Keluarga Sakinah (b) = Total Jumlah Rumah Tangga Target Bimbingan
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Rumah Tangga (Pasangan Suami Istri) yang Telah Mengikuti/Mendapatkan Bimbingan Keagamaan Keluarga Sakinah. b. Total Jumlah Rumah Tangga (Pasangan Suami Istri) yang Menjadi Target/Sasaran Bimbingan Keagamaan Keluarga Sakinah (Seringkali disasar pada usia perkawinan tertentu, misalnya 1-5 tahun).
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pelaksanaan Bimbingan Keluarga Sakinah (Post-marital) dan program pendukung (misalnya, Sekolah Relasi Suami Istri/SERASI, Pusaka Sakinah). - Pendataan Peserta Bimbingan Keluarga Sakinah. - Pemetaan Rumah Tangga Rentan dan Keluarga Muda sebagai Sasaran Bimbingan. - Monitoring dan Evaluasi Program Pembinaan Keluarga.
8	Ukuran/Satuan	Persentase

9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	- Berdasarkan Usia Pernikahan: Keluarga Muda (1-5 tahun), Keluarga Menengah (6-15 tahun). - Berdasarkan Jenis Bimbingan: Tatap Muka, Online, atau Konsultasi (Counselling). - Berdasarkan Wilayah: Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan (KUA).
11	Level Estimasi	- Nasional - Provinsi - Kabupaten atau Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
2	Nama Indikator	Persentase harta benda wakaf yang dikelola dan dikembangkan produktif
3	Konsep/Definisi	Rasio antara luas atau nilai harta benda wakaf (baik tanah, bangunan, maupun wakaf uang/bergerak) yang telah dikelola oleh Nazhir (pengelola wakaf) dan dikembangkan menjadi aset produktif (misalnya, menjadi klinik kesehatan, sekolah dengan unit usaha, pertanian, atau investasi syariah) dibandingkan dengan total seluruh harta benda wakaf yang ada di wilayah tertentu. Wakaf Produktif berarti harta wakaf yang menghasilkan nilai tambah atau keuntungan (return) yang hasilnya digunakan untuk kemaslahatan umat (mauquf 'alaih), bukan sekadar aset sosial (konsumtif).
4	Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan keberhasilan Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam mengubah aset wakaf yang awalnya bersifat pasif (misalnya, tanah kosong atau hanya digunakan untuk masjid/kuburan) menjadi aset yang aktif menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial berkelanjutan. Ini adalah indikator penting dalam modernisasi dan optimalisasi ekonomi syariah. Persentase yang rendah mengindikasikan bahwa sebagian besar aset wakaf masih bersifat pasif atau belum disentuh oleh manajemen profesional Nazhir
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = ((a) / (b)) * 100% Keterangan: (a) = Luas/Nilai Wakaf yang Dikelola Produktif (b) = Total Luas/Nilai Seluruh Harta Benda Wakaf Terdaftar
6	Nama Variabel Pembangun	a. Luas/Nilai Harta Benda Wakaf yang Dikelola dan Dikembangkan Secara Produktif. b. Total Luas/Nilai Seluruh Harta Benda Wakaf yang Terdaftar.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Program Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Nazhir Wakaf. - Program Inkubasi Wakaf Produktif dan Pelaksanaan Pilot Project Wakaf. - Pendataan dan Pemutakhiran Data Harta Benda Wakaf melalui Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kemenag. - Pengawasan dan Pelaporan Pengelolaan Harta Benda Wakaf.
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%), Luas (hektar/m ²), atau Nilai Rupiah (untuk Wakaf Uang/Bergerak)

9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	- Berdasarkan Jenis Harta: Wakaf Tanah/Tidak Bergerak, Wakaf Uang/Bergerak. - Berdasarkan Sektor Produktif: Pertanian, Kesehatan, Pendidikan, Jasa/Perdagangan. - Berdasarkan Wilayah: Provinsi, Kabupaten/Kota.
11	Level Estimasi	Nasional dan Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
2	Nama Indikator	Persentase lembaga Zakat dan Wakaf yang dibina
3	Konsep/Definisi	Rasio yang mengukur proporsi Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memiliki izin resmi dari Kemenag dan Nazhir Wakaf Badan Hukum yang terdaftar dan/atau memiliki sertifikasi profesional, yang telah menerima program pembinaan, bimbingan teknis, pelatihan, atau pengawasan secara langsung dari Kementerian Agama (Kemenag) dan/atau Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam periode waktu tertentu. Pembinaan ini mencakup aspek regulasi, tata kelola (governance), pelaporan, dan optimalisasi penghimpunan maupun pendayagunaan dana/aset.
4	Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan efektifnya peran Kemenag sebagai regulator dan fasilitator dalam meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan kepatuhan syariah dari Lembaga Zakat (BAZNAS/LAZ) dan Lembaga Wakaf (Nazhir Badan Hukum). Hal ini vital untuk meningkatkan kepercayaan publik dan optimalisasi potensi dana sosial keagamaan. Persentase yang rendah mengindikasikan masih banyak lembaga yang beroperasi tanpa pembinaan memadai, berpotensi kurang profesional atau tidak patuh pada regulasi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $((a) / (b)) * 100\%$ Keterangan: (a) = Jumlah Lembaga Zakat dan Wakaf yang Dibina (b) = Total Jumlah Lembaga Zakat dan Wakaf Terdaftar
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Lembaga Zakat (LAZ) dan Lembaga Wakaf (Nazhir Badan Hukum/LKS PWU) yang telah Menerima Pembinaan/Bimbingan Teknis. b. Total Jumlah Lembaga Zakat (LAZ) dan Lembaga Wakaf (Nazhir Badan Hukum/LKS PWU) yang Terdaftar dan Wajib Dibina.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Pelatihan Tata Kelola Zakat dan Wakaf (bagi amil dan nazhir). - Program Sertifikasi Profesional Amil dan Nazhir Wakaf. - Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pengawasan Rutin Lembaga Zakat dan Wakaf. - Penguatan Sistem Informasi Zakat (Sizakat) dan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) untuk pendataan dan pelaporan.
8	Ukuran/Satuan	Persentase

9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	- Berdasarkan Jenis Lembaga: Lembaga Amil Zakat (LAZ), Nazhir Wakaf Badan Hukum, LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). - Berdasarkan Skala Pembinaan: Pembinaan Nasional, Pembinaan Wilayah/Provinsi.
11	Level Estimasi	Nasional dan Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha - Sekretariat Jenderal"
2	Nama Indikator	Nilai Layanan Penyuluh Agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu
3	Konsep/Definisi	Nilai Layanan Penyuluh Keagamaan adalah ukuran komposit yang menilai efektivitas, kualitas, dan dampak pelaksanaan tugas-tugas penyuluhan keagamaan oleh Penyuluh Agama (PNS maupun Non-PNS) dalam membimbing dan memberikan pencerahan kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Nilai ini umumnya diukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atau Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
4	Interpretasi	Nilai yang tinggi (mendekati 100 atau kategori Sangat Baik) menunjukkan bahwa Penyuluh Agama telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, responsif, dan memberikan manfaat signifikan kepada masyarakat. Nilai yang rendah mengindikasikan perlunya perbaikan pada aspek-aspek pelayanan, kompetensi, dan/atau ketersediaan PA di lapangan
5	Metode / Rumus Perhitungan	$IKM = \sum_{i=1}^n (NRRi \times Bobot)$ Nilai Layanan PAI = IKM x Nilai Dasar (25) Keterangan: - NRRi: Nilai Rata-Rata Tertimbang per unsur pelayanan (a). - Bobot: Nilai penimbang setiap unsur pelayanan (1/(Jumlah Seluruh Unsur Layanan (b))).
6	Nama Variabel Pembangun	a. Nilai Terbobot dari Setiap Unsur Pelayanan PA (berdasarkan rata-rata skor persepsi responden). b. Jumlah Seluruh Unsur Pelayanan PA yang Dinilai (misalnya: persyaratan, waktu layanan, kompetensi petugas, kesopanan, penanganan pengaduan, dll.)

7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atau Survei Indeks Layanan secara periodik (Triwulan/Semester/Tahunan) terhadap layanan Penyuluh Agama. - Kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan yang dilaksanakan oleh PAI kepada kelompok sasaran. - Pengolahan Data Hasil Kuesioner IKM/SKM.
8	Ukuran/Satuan	- Angka Indeks/Poin (skala 25 - 100) - Kategori Mutu Pelayanan (Misal: A/Sangat Baik, B/Baik, C/Kurang Baik)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Periodik (Triwulan/Semester/Tahunan)
10	Klasifikasi	- Berdasarkan Kategori Nilai Mutu (Sangat Baik, Baik, Kurang Baik, dst.). - Berdasarkan Jenis Penyuluh (PNS/Non-PNS). - Berdasarkan Jenis Layanan/Program (Misal: Konsultasi Keagamaan, Pendampingan Keluarga Sakinah, Pencegahan Radikalisme, dll.).
11	Level Estimasi	Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase sarana prasarana peribadatan agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu yang memenuhi standar
3	Konsep/Definisi	Persentase Sarana Prasarana Peribadatan yang Memenuhi Standar adalah rasio yang mengukur jumlah rumah ibadah (Masjid, Gereja, Pura, Vihara, Klenteng, dan sejenisnya) dari setiap agama yang telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi kriteria standar fisik dan administratif yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, dibandingkan dengan total rumah ibadah yang terdata. Standar ini mencakup aspek kelayakan bangunan, keamanan, kelengkapan fasilitas dasar, dan legalitas pendirian.
4	Interpretasi	Nilai ini mencerminkan sejauh mana Kementerian Agama berhasil dalam upaya penjaminan mutu dan kelayakan fisik rumah ibadah. Peningkatan persentase menunjukkan efektivitas program bantuan, rehabilitasi, dan fasilitasi legalitas rumah ibadah, yang berdampak pada peningkatan kenyamanan, keamanan, dan ketertiban administrasi dalam pelaksanaan ibadah umat beragama
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $((a) / (b)) \times 100$ Keterangan: (a) = Jumlah Sarana Prasarana Peribadatan yang Memenuhi Standar (b) = Jumlah Sarana Prasarana Peribadatan yang Terdata
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Sarana Prasarana Peribadatan yang Memenuhi Standar b. Jumlah Sarana Prasarana Peribadatan yang Terdata

7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan	- Pendataan dan Registrasi Rumah Ibadah (berkelanjutan). - Verifikasi dan Audit Fisik Rumah Ibadah (oleh tim teknis dan Bimbingan Masyarakat). - Pemberian Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Ibadah (yang diikuti dengan verifikasi pemenuhan standar). - Penerbitan Izin Pendirian Rumah Ibadah (untuk aspek legalitas administrasi).
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	- Berdasarkan Jenis Rumah Ibadah (Masjid Raya, Masjid Jami', atau Gereja Paroki dan lainnya). - Berdasarkan Kategori Standar (Misal: Standar Ramah Difabel, Standar Kebersihan/Sanitasi, Standar Administrasi).
11	Level Estimasi	Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM
2	Nama Indikator	Nilai Pemanfaatan Kurikulum dan Sistem Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi SDM Keagamaan
3	Konsep/Definisi	Nilai Pemanfaatan ini mengukur tingkat keberhasilan materi pelatihan atau kurikulum dan efektivitas implementasi Sistem Penjaminan Mutu (SPM) dalam meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Keagamaan pasca-pelatihan. Intinya adalah melihat sejauh mana hasil diklat (pendidikan dan pelatihan) benar-benar diterapkan di tempat kerja.
4	Interpretasi	Nilai ini adalah nilai komposit yang mengukur seberapa jauh kurikulum yang telah dirancang dan proses pelatihan yang telah dijamin mutunya (mulai dari perencanaan hingga evaluasi) berdampak pada peningkatan kompetensi dan performa kerja pegawai di unit kerja masing-masing alumni pelatihan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$NA = ((Wa \cdot a) + (Wb \cdot b)) / (Wa + Wb)$ Keterangan a. PPHHP (Persentase Peserta Pelatihan yang Menerapkan Hasil Pelatihan): Dihitung dari hasil survei atau evaluasi pasca-pelatihan sebagai berikut: PPHHP = Jumlah alumni yang terbukti mengimplementasikan hasil pelatihan / Total Alumni yang dievaluasi b. PMP (Indeks Peningkatan Mutu Pelayanan): Dihitung berdasarkan rata-rata skor peningkatan kinerja/mutu layanan alumni pada aspek terkait kurikulum pelatihan. Penilaian biasanya menggunakan instrumen terstruktur (skala Likert) dari atasan atau tim penilai unit kerja c. Wa dan Wb: Bobot yang ditetapkan oleh unit kerja (misalnya, Pemanfaatan Kurikulum memiliki bobot lebih tinggi, $Wa=0.6$, dan Penjaminan Mutu/IPMP memiliki bobot $Wb = 0.4$).
6	Nama Variabel Pembangun	a. Persentase Peserta Pelatihan yang Menerapkan Hasil Pelatihan (PPHHP) b. Indeks Peningkatan Mutu Pelayanan (IPMP) di Unit Kerja Alumni
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pelaksanaan Pelatihan Teknis, Fungsional, dan Kepemimpinan untuk SDM Keagamaan. - Evaluasi Pasca-Pelatihan dan Survei Kinerja Alumni (Tracer Study) yang dilakukan secara berkala. - Evaluasi Kinerja Alumni Pelatihan oleh Atasan Langsung/Unit Kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen kinerja.
8	Ukuran/Satuan	Indeks (1-100)

9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	- Kurikulum dan Penjaminan Mutu Diklat - Kualitas Pengembangan Kompetensi SDM.
11	Level Estimasi	- Nasional - Provinsi - UPT Diklat
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM
2	Nama Indikator	Nilai Kepuasan layanan penyelenggaraan pengembangan kompetensi SDM keagamaan
3	Konsep/Definisi	Nilai Kepuasan Layanan ini merupakan ukuran tingkat kepuasan peserta (SDM Keagamaan) terhadap seluruh aspek pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara diklat (pendidikan dan pelatihan), mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pasca-pelatihan, dalam rangka pengembangan kompetensi.
4	Interpretasi	Nilai komposit yang mencerminkan persepsi dan penilaian peserta pelatihan terhadap kualitas layanan administrasi, ketersediaan dan kesiapan sarana/prasarana, kualitas pengajar/fasilitator, serta efektivitas materi/kurikulum pelatihan yang diselenggarakan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$NKL = ((W_a \cdot a) + (W_b \cdot b) / (W_a + W_b))$ Keterangan: a. IKPLP b. IKPKP dihitung berdasarkan rata-rata skor item survei kepuasan dengan menggunakan skala interval (misalnya, skala Likert 1-4 atau 1-5). - W_a dan W_b: Bobot yang ditetapkan untuk setiap indeks variabel (misalnya, bobot yang sama $W_a = 0.5$ dan $W_b = 0.5$). - Skor rata-rata ini kemudian dikonversi menjadi indeks dengan skala 0 hingga 100, atau 0 hingga 4 (skala baku IKM).
6	Nama Variabel Pembangun	a. Indeks Kepuasan Peserta terhadap Layanan Penyelenggara (IKPLP): Mengukur kepuasan terhadap aspek administratif, sarana, prasarana, dan dukungan teknis. b. Indeks Kepuasan Peserta terhadap Kualitas Pelaksanaan (IKPKP): Mengukur kepuasan terhadap kualitas kurikulum, metodologi pengajaran, kompetensi pengajar/widyaiswara, dan relevansi materi.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Survei Kepuasan Peserta Pelatihan (Evaluasi Penyelenggaraan/Evaluasi Widyaiswara): Survei yang dilakukan segera setelah atau pada akhir pelaksanaan pelatihan. - Penyelenggaraan Pelatihan Teknis, Fungsional, dan Kepemimpinan bagi SDM Keagamaan. - Pengolahan Data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal yang diadaptasi untuk layanan diklat.
8	Ukuran/Satuan	Nilai Indeks (0-100) atau Angka Rata-Rata Tertimbang (skala 1-4)

9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Triwulanan atau Tahunan
10	Klasifikasi	- Kualitas Pelayanan Publik - Evaluasi Kinerja Lembaga Diklat
11	Level Estimasi	- Nasional (agregat seluruh unit). - Unit Pelaksana Teknis (UPT) Diklat (per Pusdiklat atau BDK)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM
2	Nama Indikator	Nilai kepuasan pengguna terhadap lulusan pengembangan kompetensi SDM keagamaan
3	Konsep/Definisi	Nilai Kepuasan Pengguna adalah ukuran tingkat kesesuaian dan kepuasan atasan langsung atau unit kerja (sebagai pengguna) terhadap peningkatan kompetensi, kinerja, dan kontribusi lulusan pelatihan (SDM Keagamaan) setelah mereka kembali dan mengimplementasikan hasil pengembangan kompetensi di lingkungan kerja.
4	Interpretasi	Nilai komposit ini mencerminkan sejauh mana unit kerja merasakan adanya dampak positif dan relevansi dari program pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama terhadap kualitas kinerja lulusan. Nilai ini menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas eksternal dan relevansi kurikulum pelatihan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$NKP = ((W_a \cdot a) + (W_b \cdot b) / (W_a + W_b))$ Keterangan: a. IKPK dan b. IKPKin dihitung berdasarkan rata-rata skor item survei kepuasan yang dinilai oleh pengguna (atasan) dengan menggunakan skala interval (misalnya, skala Likert 1-5). - W_a dan W_b: Bobot yang ditetapkan untuk setiap indeks variabel (misalnya, peningkatan kinerja seringkali memiliki bobot yang lebih besar, $W_a = 0.4$ dan $W_b = 0.6$). - Skor rata-rata ini kemudian dikonversi menjadi indeks dengan skala 0 hingga 100 untuk memudahkan interpretasi.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Indeks Kepuasan Pengguna terhadap Peningkatan Kompetensi (IKPK) b. Indeks Kepuasan Pengguna terhadap Peningkatan Kinerja (IKPKin)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Survei Kepuasan Pengguna Lulusan (User Satisfaction Survey / Evaluasi Level 3) - Pelaksanaan Tracer Study Lulusan yang terintegrasi dengan unit kerja asal. - Evaluasi Dampak Pelatihan pada unit organisasi.
8	Ukuran/Satuan	Indeks (0-100)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	- Dampak Pelatihan - Efektivitas Program Pengembangan Kompetensi.

11	Level Estimasi	- Nasional (agregat seluruh unit). - Unit Pelaksana Teknis (UPT) Diklat
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM
2	Nama Indikator	Tingkat Moderasi Beragama pada Tokoh Agama/Masyarakat/Budaya yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama
3	Konsep/Definisi	Tingkat Moderasi Beragama adalah skor yang mengukur sejauh mana sikap dan perilaku Tokoh Agama/Masyarakat/Budaya yang telah mengikuti program penguatan (fasilitasi/pelatihan/sosialisasi) menunjukkan indikator-indikator kunci moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi lokal yang relevan dengan agama.
4	Interpretasi	Nilai komposit ini mencerminkan keberhasilan program penguatan Moderasi Beragama dalam menanamkan dan meningkatkan pemahaman, sikap, dan implementasi praktik moderat oleh para tokoh kunci yang memiliki pengaruh signifikan di masyarakat. Nilai ini menjadi indikator penting dalam mengukur dampak perubahan sosial yang diakibatkan oleh intervensi Kementerian Agama.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$TMB = ((W_a \cdot a) + (W_b \cdot b)) / (W_a + W_b)$ a. IPPSMB b. IPIMB dihitung berdasarkan rata-rata skor item survei yang diukur menggunakan skala interval (misalnya, skala Likert 1-5). Skala pengukuran ini biasanya telah dibakukan oleh Balitbang Diklat Kementerian Agama. - W_a dan W_b : Bobot yang ditetapkan untuk setiap indeks variabel (misalnya, implementasi perilaku di masyarakat mungkin diberi bobot lebih besar, $W_a = 0.4$ dan $W_b = 0.6$). - Skor rata-rata ini kemudian dikonversi menjadi skala baku (misalnya, 0-100) untuk mencerminkan tingkat moderasi.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Indeks Peningkatan Pemahaman dan Sikap Moderasi Beragama (IPPSMB) b. Indeks Perilaku dan Implementasi Moderasi Beragama di Masyarakat (IPIMB)

7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pelaksanaan Program Penguatan/Fasilitasi Moderasi Beragama bagi Tokoh Agama/Masyarakat/Budaya (misalnya, melalui Balai Diklat Keagamaan atau Pusdiklat). - Evaluasi Dampak Program (Evaluasi Level 3 & 4): Survei pre-test dan post-test, serta evaluasi pasca-program/observasi lapangan yang melibatkan pihak luar/komunitas. - Pengumpulan Data Kuantitatif dan Kualitatif terkait implementasi pesan moderasi beragama di wilayah dampingan tokoh.
8	Ukuran/Satuan	Indeks (0-100)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	- Moderasi Beragama - Dampak Program Keagamaan
11	Level Estimasi	- Nasional (agregat seluruh tokoh yang terfasilitasi). - Provinsi/Kanwil Kemenag (berdasarkan wilayah kerja). - Per Jenis Tokoh (misalnya, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, atau Tokoh Budaya).
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM
2	Nama Indikator	Nilai pemanfaatan naskah kebijakan ekoteologi yang dihasilkan
3	Konsep/Definisi	Nilai Pemanfaatan Naskah Kebijakan Ekoteologi adalah ukuran tingkat penggunaan dan adopsi rekomendasi yang terdapat dalam naskah kebijakan (dokumen hasil kajian/penelitian) tentang perspektif ekoteologi (hubungan teologi/ajaran agama dan lingkungan) oleh unit kerja/pemangku kepentingan di lingkungan Kementerian Agama maupun pihak eksternal.
4	Interpretasi	Nilai komposit ini mencerminkan keberhasilan Unit Penghasil dalam memproduksi naskah kebijakan yang relevan, berkualitas, dan aplikatif sehingga dapat diadopsi menjadi program, kegiatan, atau regulasi yang mendukung isu-isu lingkungan berbasis nilai-nilai agama. Nilai ini mengukur dampak riil dari hasil penelitian atau kajian.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$NP = ((Wa \cdot a) + (Wb \cdot b) / (Wa + Wb))$ Keterangan: a. IANK (Indeks Adopsi Naskah Kebijakan): Dihitung berdasarkan rasio: (Jumlah rekomendasi yang diadopsi secara formal / Total rekomendasi dalam naskah) atau (Jumlah unit kerja yang mengadopsi / Total unit kerja diseminasi) b. IIPE (Indeks Implementasi Program Ekoteologi) Dihitung berdasarkan persentase program/kegiatan yang dilaksanakan oleh unit pengguna (dibandingkan dengan yang direncanakan berdasarkan naskah) atau skor penilaian kualitatif atas implementasi. - Wa dn Wb : Bobot yang ditetapkan untuk setiap indeks variabel (misalnya, implementasi program (Wb) sering diberi bobot lebih besar daripada sekadar adopsi formal (Wa)). - Skor rata-rata ini kemudian dikonversi menjadi skala baku (misalnya, 0-100).
6	Nama Variabel Pembangun	a. Indeks Adopsi Naskah Kebijakan (IANK) b. Indeks Implementasi Program Ekoteologi (IIPE)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Kegiatan Penelitian dan Kajian Ekoteologi yang menghasilkan naskah/rekomendasi kebijakan. - Diseminasi dan Sosialisasi Naskah Kebijakan kepada unit eselon I/II dan instansi terkait. - Survei Pemanfaatan Hasil Litbang/Kajian (Tracer Study) yang ditujukan kepada unit kerja pengguna potensial. - Evaluasi Dampak Kebijakan yang dihasilkan dari naskah

8	Ukuran/Satuan	Indeks (0-100)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	- Kinerja Litbang - Dampak Kebijakan Berbasis Kajian
11	Level Estimasi	- Nasional - Per Naskah Kebijakan - Per Unit Pengguna
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM
2	Nama Indikator	Indeks Kualitas Kebijakan
3	Konsep/Definisi	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) adalah ukuran komposit yang menilai mutu keseluruhan proses dan hasil perumusan suatu kebijakan (regulasi, pedoman, standar, atau program) yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Kualitas diukur berdasarkan kriteria seperti kelengkapan naskah, kesesuaian prosedur, basis bukti (kajian/riset), dan responsivitas terhadap kebutuhan publik/pemangku kepentingan.
4	Interpretasi	Nilai ini mencerminkan sejauh mana kebijakan yang diterbitkan telah memenuhi standar tata kelola yang baik (Good Governance), didukung oleh data dan analisis yang kuat (Evidence-Based Policy), dan memiliki potensi tinggi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan serta meminimalisir dampak negatif. Indeks ini adalah alat ukur internal untuk mengevaluasi kinerja perumusan regulasi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$IKK = ((Wa \cdot a) + (Wb \cdot b)) / (Wa + Wb)$ Keterangan: a. IKPPK b. IKSK dihitung berdasarkan rata-rata skor penilaian (menggunakan instrumen checklist dan bobot) yang dilakukan oleh tim penilai kualitas kebijakan. Instrumen penilaian berisi kriteria yang disepakati (misalnya, 10-20 indikator untuk proses dan substansi). - Wa dan Wb : Bobot yang ditetapkan untuk setiap indeks variabel (misalnya, kualitas substansi (Wb) sering diberi bobot lebih besar, Wa =0.4 dan Wb =0.6). - Skor rata-rata ini kemudian dikonversi menjadi skala baku (misalnya, 0-100)
6	Nama Variabel Pembangun	a. Indeks Kualitas Proses Perumusan Kebijakan (IKPPK) b. Indeks Kualitas Substansi Kebijakan (IKSK)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Perumusan dan Pengesahan Peraturan/Regulasi (Peraturan Menteri Agama, Keputusan Menteri, Surat Edaran, atau Standar Teknis). - Telaah/Asistensi Hukum dan Kebijakan (oleh Biro Hukum atau tim policy analyst). - Evaluasi/Audit Kualitas Perumusan Kebijakan internal. - Kajian atau Penelitian yang mendasari perumusan kebijakan.
8	Ukuran/Satuan	Indeks (0-100)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan

10	Klasifikasi	- Tata Kelola Pemerintahan yang Baik - Kualitas Regulasi/Kebijakan
11	Level Estimasi	- Nasional - Unit Eselon I/II
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretaria Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase Peningkatan Buku Agama yang mendapat tanda layak terbit
3	Konsep/Definisi	Persentase Peningkatan Buku Agama yang Mendapat Tanda Layak Terbit adalah rasio yang mengukur pertumbuhan jumlah naskah atau buku-buku keagamaan yang telah melalui proses penilaian/telaah dan dinyatakan layak untuk diterbitkan (diberikan Tanda Layak Terbit/Rekomendasi) oleh unit kerja Kementerian Agama dalam suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya.
4	Interpretasi	Nilai ini mencerminkan keberhasilan dan efisiensi unit kerja dalam melakukan penjaminan mutu substansi buku-buku keagamaan yang beredar di masyarakat. Peningkatan persentase menunjukkan peningkatan kualitas naskah yang diajukan oleh penerbit, peningkatan kapasitas layanan telaah di Kementerian Agama, dan konsistensi penyediaan referensi keagamaan yang moderat dan akurat bagi publik.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = ((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah buku layak terbit pada periode t. b = Jumlah buku layak terbit pada periode t-1.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Buku Agama yang Mendapat Tanda Layak Terbit pada Periode t b. Jumlah Buku Agama yang Mendapat Tanda Layak Terbit pada Periode t-1
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pelaksanaan Penilaian dan Telaah Buku Keagamaan - Penerbitan Tanda Layak Terbit/Rekomendasi Publikasi untuk buku-buku keagamaan. - Pengelolaan Data Naskah Masuk dan Naskah Lulus.
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	- Kualitas Literatur Keagamaan - Kinerja Pelayanan Publik Bidang Lektur Keagamaan
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data?	-

	(Disebutkan nama publikasinya)	

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase Peningkatan inovasi program literasi keagamaan dalam mendukung terwujudnya kerukunan umat beragama
3	Konsep/Definisi	Persentase Peningkatan Inovasi Program Literasi Keagamaan adalah rasio yang mengukur pertumbuhan jumlah program, metode, atau platform baru (inovatif) yang secara spesifik dirancang dan diimplementasikan untuk meningkatkan pemahaman keagamaan, inklusivitas, dan keterampilan dialog, yang pada akhirnya bertujuan untuk mendukung dan memperkuat kerukunan umat beragama dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya.
4	Interpretasi	Nilai ini mencerminkan sejauh mana unit kerja Kementerian Agama berhasil menciptakan strategi dan pendekatan baru (tidak hanya mengulang program lama) dalam upaya mengedukasi publik mengenai isu-isu keagamaan dan kerukunan. Peningkatan persentase menunjukkan fleksibilitas, kreativitas, dan adaptabilitas Kemenag dalam merespons tantangan kerukunan umat beragama yang terus berkembang.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah inovasi program literasi keagamaan pada periode t. b = Jumlah inovasi program literasi keagamaan pada periode t-1.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Inovasi Program Literasi Keagamaan pada Periode t b. Jumlah Inovasi Program Literasi Keagamaan pada Periode t-1
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pengembangan Model/Metode Baru Literasi Keagamaan dan Uji Coba Lapangan. - Pelaksanaan Kompetisi/Lomba Inovasi Program Kerukunan Umat Beragama. - Diseminasi dan Implementasi Program Literasi Keagamaan yang berfokus pada dialog dan inklusivitas. - Pencatatan dan Verifikasi Inovasi oleh Tim Penilai Kinerja
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	- Inovasi Pelayanan Publik - Kinerja Program Kerukunan Umat Beragama
11	Level Estimasi	Nasional

12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
2	Nama Indikator	Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS
3	Konsep/Definisi	Persentase KUA penyelenggara Early Warning System (EWS) mengukur proporsi KUA yang aktif menjalankan deteksi dini konflik keagamaan, mencakup pemantauan isu, pelaporan potensi konflik, koordinasi lintas sektor, dan rekomendasi penanganan dini.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase KUA yang melaksanakan EWS, semakin kuat kapasitas kelembagaan di tingkat akar rumput dalam menjaga stabilitas dan kerukunan umat beragama
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a : Jumlah KUA yang aktif menyelenggarakan Early Warning System (EWS) b : Jumlah total KUA secara nasional
6	Nama Variabel Pembangun	Persentase KUA penyelenggara Early Warning System
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Implementasi Sistem Informasi EWS Berbasis KUA 2. Pelatihan Petugas KUA dalam Pemantauan Isu Keagamaan 3. Pembentukan Forum Komunikasi Keagamaan di Tingkat Kecamatan 4. Pemetaan Wilayah Rawan Konflik Keagamaan 5. Rekomendasi Tindak Lanjut atas Potensi Gangguan Keagamaan
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	1. KUA dengan Petugas Khusus EWS 2. KUA dengan Penyuluh/Penghulu 3. KUA yang Bekerja Sama dengan Lembaga Mitra
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
2	Nama Indikator	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh bimbingan pra nikah
3	Konsep/Definisi	BRUS adalah bimbingan yang diberikan kepada remaja dalam rangka membekali pengetahuan dan keterampilan yang bertujuan untuk membantu remaja dalam mengembangkan potensi diri dalam menghadapi tantangan dan membuat keputusan yang tepat. isu yang diangkat dari pelaksanaan bimbingan ini adalah cegah kawin anak, cegah seks pranikah, dan penyalahgunaan Napza serta kenakalan remaja lainnya. Berdasarkan data dari BPS 2024, Jumlah Remaja Usia 15-19 tahun adalah 22.122.887 anak. Catatan: Target Tahunan adalah jumlah target tahun lalu+tahun ini"
4	Interpretasi	Semakin tinggi partisipasi remaja mengikuti bimbingan, semakin besar peran pemerintah dalam ikut serta membangun ketahanan keluarga
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumusan: $(a/b) \times 100\%$ Keterangan: A: Jumlah remaja yang mendapatkan bimbingan B: Jumlah remaja usia 15-19 tahun berdasarkan data BPS
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah remaja usia sekolah yang memperoleh sertifikat kursus pra nikah 2. Jumlah penduduk usia 15-19 tahun berdasar data BPS
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Peningkatan SDM melalui Bimtek Fasilitator 2. Penyiapan Peer Educator bagi madrasah/sekolah 3. Model Bimbingan bekerjasama dengan madrasah/sekolah/pondok pesantren dan lembaga
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Eselon I
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan	-

	nama publikasinya)	

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
2	Nama Indikator	Persentase KUA Berdaya
3	Konsep/Definisi	Persentase ini mengukur proporsi Kantor Urusan Agama (KUA) yang memenuhi kategori "Berdaya" berdasarkan penilaian kinerja, pelayanan, dan inovasi. Kategori "Excellent" ditetapkan melalui evaluasi terhadap standar layanan administrasi, pembinaan umat, pemanfaatan teknologi, serta pemenuhan sarana dan prasarana.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase KUA yang berada pada kategori "Excellent", semakin baik kinerja KUA dalam memberikan layanan publik keagamaan yang profesional, responsif, dan inovatif. Angka ini juga menjadi indikator keberhasilan pembinaan dan penguatan kelembagaan KUA di berbagai daerah.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah KUA yang memperoleh kategori "Berdaya (Excellent)" berdasarkan hasil evaluasi b = Jumlah total KUA yang dievaluasi
6	Nama Variabel Pembangun	1. Data hasil evaluasi kinerja KUA berdasarkan instrumen penilaian berdaya (Excellent) 2. Jumlah total KUA yang dievaluasi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Evaluasi dan Penetapan KUA Berdaya
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan kategori hasil evaluasi: Excellent (Berdaya), Baik, Cukup, Kurang
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
2	Nama Indikator	Persentase KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana
3	Konsep/Definisi	Ketersediaan sekaligus perbaikan Sarana dan Prasarana sebagai penunjang kegiatan pelayanan yang dilakukan untuk mempermudah aktivitas sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana maka semakin mudah akses pelayanan dan kenyamanan untuk masyarakat
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumusan: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = KUA yang sesuai dengan standar sarana dan prasarana b = KUA seluruh Indonesia
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana 2. Jumlah KUA
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pembangunan KUA melalui SBSN 2. Revitalisasi KUA
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Perhitungan Prioritas : 1. Lahan Kosong milik Kemenag/Hibah sudah sertifikat Kemenag 2. Rusak Berat (Milik Kemenag) dan Tidak dapat ditanggulangi dengan anggaran Rehab 3. Rusak Ringan namun jumlah rata-rata peristiwa nikah tinggi
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan jumlah peristiwa nikah
3	Konsep/Definisi	Persentase peningkatan jumlah peristiwa nikah adalah indikator yang mengukur perubahan jumlah pernikahan yang tercatat dalam suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini, semakin besar kenaikan jumlah pernikahan yang terjadi dalam suatu wilayah atau periode tertentu. Sebaliknya, jika bernilai negatif, berarti terjadi penurunan jumlah pernikahan dibandingkan dengan periode sebelumnya.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$x = [(a - b) / b] \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah peristiwa nikah pada tahun/periode berjalan b = Jumlah peristiwa nikah pada tahun/periode sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah peristiwa nikah pada tahun/periode berjalan 2. Jumlah peristiwa nikah pada tahun/periode sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Sosialisasi Pernikahan Resmi 2. Kemudahan Akses Layanan Nikah 3. Revitalisasi Layanan KUA 4. Bimbingan Perkawinan 5. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan"
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
2	Nama Indikator	Persentase penghulu yang memperoleh sertifikat kompetensi
3	Konsep/Definisi	Persentase ini mengukur proporsi penghulu yang telah mengikuti uji kompetensi dan dinyatakan lulus, sehingga memperoleh sertifikat kompetensi sesuai standar yang ditetapkan. Sertifikasi ini bertujuan memastikan penghulu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam menjalankan tugas pelayanan pernikahan dan pembinaan masyarakat.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase penghulu bersertifikat kompetensi, semakin terjamin kualitas layanan pernikahan dan pembinaan keagamaan di masyarakat. Angka ini juga mencerminkan keberhasilan program peningkatan kapasitas dan profesionalisme penghulu.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah penghulu yang memperoleh sertifikat kompetensi b = Total jumlah penghulu yang terdata
6	Nama Variabel Pembangun	1. Data jumlah penghulu yang lulus uji kompetensi dan memperoleh sertifikat 2. Jumlah total penghulu yang terdata
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Program Sertifikasi Kompetensi Penghulu
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
2	Nama Indikator	Persentase jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan Islam terintegrasi basis data terpadu nasional
3	Konsep/Definisi	Integrasi pemanfaatan penerima manfaat penyaluran dana zakat, infak, sedekah dan pemanfaatan wakaf dengan dapat penduduk miskin yang ada pada sistem data kemiskinan di daerah. Jumlah data mustahiq yang selaras dengan data kemiskinan regsosek
4	Interpretasi	Semakin tinggi penerima manfaat dari dana sosial keagamaan, maka semakin produktif peran dana sosial keagamaan yang dikembangkan untuk pengentasan kemiskinan, dan data saling terintegrasi
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumusan = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan yang terintegrasi dengan Regsosek b = Jumlah penduduk miskin pada Regsosek
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan yang terintegrasi dengan Regsosek 2. Jumlah penduduk miskin pada Regsosek
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pendataan dan Verifikasi Mustahik 2. Integrasi Data dengan Basis Data Terpadu Nasional 3. Penyelarasan Kriteria Mustahik dengan Standar Nasional 4. Digitalisasi dan Pemutakhiran Data Mustahik 5. Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Dana Sosial
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Mustahik zakat 2. Calon penerima dana sosial keagamaan
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan	-

	nama publikasinya)	

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
2	Nama Indikator	Persentase kolaborasi program pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan
3	Konsep/Definisi	Jumlah program maupun lokus program kolaborasi pada bidang zakat dan wakaf, seperti kampung zakat, kota wakaf, inkubasi wakaf produktif, kua peu atau program di daerah
4	Interpretasi	Program kolaborasi zakat baznas, laz dan kemenag dan program kolaborasi wakaf bwi dan nazhir
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumusan total program kolaborasi zakat dan wakaf lintas kemenag, baznas, laz, bwi dan nazhir
6	Nama Variabel Pembangun	$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah program zakat dan/atau wakaf yang dilaksanakan secara kolaboratif dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan}}{\text{Jumlah total program zakat dan/atau wakaf}} \times 100\%$
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Sinkronisasi Program Zakat dan Wakaf 2. Kemitraan dengan Lembaga Pengelola Zakat dan Wakaf 3. Integrasi Data Mustahik dan Penerima Manfaat 4. Pengembangan Skema Investasi Wakaf Produktif 5. Monitoring dan Evaluasi Dampak Program
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis program: Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan Kesejahteraan
11	Level Estimasi	Tahunan
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
2	Nama Indikator	Persentase advokasi pengamanan Harta Benda Wakaf (mutasi, sengketa) yang ditindaklanjuti

3	Konsep/Definisi	Advokasi pengamanan Harta Benda Wakaf adalah tindakan pendampingan, fasilitasi, atau mediasi yang dilakukan oleh otoritas terkait (misalnya Kementerian Agama) dalam rangka menyelesaikan persoalan hukum atau administratif terhadap aset wakaf, baik berupa sengketa, mutasi, maupun permasalahan lainnya.
4	Interpretasi	Persentase ini menggambarkan tingkat respons dan efektivitas lembaga dalam menindaklanjuti persoalan-persoalan terkait aset wakaf. Semakin tinggi angkanya, semakin baik upaya penyelamatan aset wakaf dari segi legalitas dan fungsionalitasnya.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumusan = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah advokasi pengamanan harta benda wakaf yang ditindaklanjuti b = Jumlah kasus advokasi pengamanan harta benda wakaf
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah kasus wakaf yang ditindaklanjuti 2. Total kasus wakaf yang membutuhkan advokasi (mutasi/sengketa)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pendataan dan Verifikasi Aset Wakaf 2. Pengembangan Model Investasi Wakaf Produktif 3. Kemitraan dengan Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah 4. Pendampingan dan Peningkatan Kapasitas Nazhir 5. Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Wakaf
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis permasalahan: 1. Mutasi Nazir 2. Sengketa hukum (perdata atau pidana) 3. Konflik kepemilikan tanah wakaf 4. Permasalahan administrasi wakaf
11	Level Estimasi	Nasional, provinsi, kabupaten/kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
2	Nama Indikator	Persentase Lembaga Amil Zakat yang diawasi sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan professional
3	Konsep/Definisi	Persentase Lembaga Dana Sosial Keagamaan yang transparan, akuntabel dan profesional dalam penyaluran dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan
4	Interpretasi	Semakin tinggi lembaga dana sosial keagamaan yang sesuai dengan juknis menunjukkan semakin baik dan benar pengelolaan dana sosial keagamaan. sehingga tata kelola dana sosial keagamaan yang transparan, akuntabel dan profesional serta bermanfaat untuk pengentasan kemiskinan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumusan = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = lembaga dana sosial keagamaan, zakat, dan wakaf dengan penilaian baik, akuntabel, profesional b = jumlah lembaga dana sosial keagamaan, zakat, dan wakaf
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lembaga wakaf yang sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan profesional 2. Jumlah lembaga wakaf
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Sertifikasi dan Akreditasi Lembaga Wakaf 2. Penerapan Standar Syariah dan Tata Kelola Wakaf 3. Audit dan Evaluasi Kepatuhan Syariah 4. Peningkatan Kapasitas SDM Nazhir 5. Digitalisasi dan Transparansi Pengelolaan Wakaf
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis lembaga: Lembaga Amil Zakat, Badan Wakaf, Lembaga Dana Sosial Keagamaan Lainnya
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
2	Nama Indikator	Persentase layanan izin pembentukan lembaga amil zakat
3	Konsep/Definisi	Persentase ini mengukur proporsi permohonan izin pembentukan Lembaga Amil Zakat yang berhasil diproses dan diterbitkan izinnya oleh otoritas terkait dibandingkan dengan jumlah total permohonan yang diajukan pada periode tertentu. Indikator ini merefleksikan efektivitas layanan perizinan dalam mendukung tata kelola zakat yang profesional, transparan, dan sesuai regulasi.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase layanan izin yang diterbitkan, semakin baik kualitas layanan perizinan dalam memfasilitasi pembentukan Lembaga Amil Zakat. Hal ini juga menunjukkan tingkat kesiapan dan kepatuhan pemohon terhadap persyaratan yang berlaku.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah izin pembentukan LAZ yang diterbitkan b = Total jumlah permohonan izin pembentukan LAZ yang diterima
6	Nama Variabel Pembangun	1. Data jumlah izin pembentukan LAZ yang diterbitkan 2. Data jumlah permohonan izin pembentukan LAZ yang diterima
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendataan dan Evaluasi Layanan Perizinan Lembaga Amil Zakat
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
2	Nama Indikator	Persentase Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan
3	Konsep/Definisi	Persentase ini mengukur proporsi akta ikrar wakaf yang berhasil diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dibandingkan dengan total permohonan atau proses ikrar wakaf yang diajukan pada periode tertentu. Indikator ini mencerminkan efektivitas layanan administrasi wakaf dan dukungan terhadap legalisasi aset wakaf sesuai ketentuan perundang-undangan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase AIW yang diterbitkan, semakin baik kinerja layanan pencatatan dan legalisasi wakaf. Hal ini juga menunjukkan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk melegalkan perbuatan wakaf secara resmi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan b = Jumlah total proses ikrar wakaf yang diajukan/diproses
6	Nama Variabel Pembangun	1. Data jumlah AIW yang diterbitkan 2. Data jumlah permohonan/proses ikrar wakaf
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendataan dan Evaluasi Penerbitan Akta Ikrar Wakaf
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis peruntukan wakaf: Tanah, Bangunan, Uang, Aset Produktif Lainnya
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha
3	Konsep/Definisi	Persentase peningkatan jumlah audiens atau penonton kegiatan MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha yang diukur dari perbandingan jumlah audiens tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, baik secara langsung (luring) maupun daring (online streaming)
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan peningkatan minat dan partisipasi masyarakat dalam menyaksikan pelaksanaan MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha, baik di lokasi kegiatan maupun melalui media digital
5	Metode / Rumus Perhitungan	$((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a : Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun berjalan b : Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun berjalan 2. Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Penyelenggaraan MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha Tingkat Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Audiens Langsung (Luring) 2. Audiens Daring (Streaming) 3. Audiens Media Penyiaran (TV/Radio)
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan peserta event seni budaya agama (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha)
3	Konsep/Definisi	Suatu ukuran untuk menghitung jumlah peningkatan peserta pada event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/ perayaan agama dibandingkan dengan jumlah peserta pada tahun sebelumnya
4	Interpretasi	Semakin meningkat persentase jumlah peserta maka semakin luas syiar agama pada umat
5	Metode / Rumus Perhitungan	1. Jumlah peserta event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/ perayaan keagamaan 2. Jumlah peserta event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/ perayaan keagamaan tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	Rumusan = $[(a-b) / b] \times 100\%$ a = Jumlah peserta tahun ini b = Jumlah peserta tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Jumlah peserta tahun ini 2. Jumlah peserta tahun sebelumnya
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Pendataan dan Evaluasi Event Keagamaan dan Seni Budaya Keagamaan
10	Klasifikasi	1. Berkurang = < 0% 2. Meningkat = 0%-5% 3. Meningkat Pesat = >5%
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan partisipan perayaan hari besar Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu yang diselenggarakan Negara
3	Konsep/Definisi	Persentase Peningkatan Partisipan adalah rasio yang mengukur pertumbuhan jumlah individu yang berpartisipasi secara langsung (fisik atau daring) dalam acara atau kegiatan perayaan Hari Besar Keagamaan yang diselenggarakan dan difasilitasi oleh Negara (melalui Kementerian Agama atau instansi terkait) dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya.
4	Interpretasi	Nilai ini mencerminkan keberhasilan Kementerian Agama dalam memfasilitasi ekspresi keagamaan yang bersifat publik dan formal. Peningkatan persentase menunjukkan tingginya relevansi dan daya tarik acara yang diselenggarakan Negara, serta peningkatan inklusivitas dan aksesibilitas program perayaan Hari Besar Keagamaan, yang pada akhirnya memperkuat semangat kebersamaan umat beragama.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\frac{(a - b)}{b} \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah partisipan perayaan HBK pada tahun berjalan b = Jumlah partisipan perayaan HBK pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Partisipan Perayaan Hari Besar Keagamaan Periode t b. Jumlah Partisipan Perayaan Hari Besar Keagamaan Periode t-1
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Penyelenggaraan Perayaan Hari Besar Keagamaan Tingkat Nasional/Daerah untuk setiap agama (misalnya, Musabaqah Tilawatil Quran, Peringatan Natal Nasional, Hari Raya Waisak, Nyepi, atau Hari Besar lainnya). - Pendataan dan Dokumentasi Partisipan acara perayaan (baik secara manual maupun digital/daring).

		- Promosi dan Publikasi acara perayaan Hari Besar Keagamaan
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	1. ASN Kementerian Agama 2. Peserta dari Masyarakat Umum 3. Peserta dari Lembaga Mitra
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kab/Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan
3	Konsep/Definisi	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah mendapatkan program pembinaan atau pendampingan pemerintah untuk meningkatkan tata kelola kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak lembaga agama dan sosial keagamaan yang mendapatkan pembinaan kelembagaan untuk meningkatkan kapasitas, kinerja, serta akuntabilitas dalam menjalankan fungsi sosial-keagamaan
5	Metode / Rumus Perhitungan	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a : Jumlah lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan/pembinaan b : Jumlah total lembaga agama dan sosial keagamaan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan/pembinaan 2. Jumlah total lembaga agama dan sosial keagamaan yang terdaftar
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Program Pendampingan Tata Kelola Kelembagaan Keagamaan 2. Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Lembaga Keagamaan 3. Pelatihan Manajemen Kelembagaan Keagamaan
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan

10	Klasifikasi	1. Pelatihan Tata Kelola Kelembagaan Keagamaan 2. Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Lembaga Keagamaan 3. Pendampingan Administrasi dan Keuangan Lembaga Keagamaan 4. Workshop Penguatan Kapasitas Organisasi Keagamaan
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kab/Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase penyuluh agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)
3	Konsep/Definisi	Nilai Kinerja penyuluh agama mencerminkan capaian kinerja penyuluh dalam menjalankan tugasnya, yang dinilai melalui tiga aspek utama: 1. Laporan Harian: Kegiatan penyuluhan yang dilaporkan secara periodik. 2. Konten Digital: Produksi dan penyebaran konten dakwah/penyuluhan berbasis media digital. 3. Kediklatan: Partisipasi dalam pelatihan atau diklat peningkatan kapasitas.
4	Interpretasi	Angka ini menunjukkan proporsi penyuluh agama yang menunjukkan kinerja baik berdasarkan evaluasi dari tiga aspek tersebut. Semakin tinggi persentasenya, semakin efektif peran penyuluh agama dalam menyampaikan nilai-nilai keagamaan secara produktif dan profesional.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah penyuluh agama yang memperoleh nilai kinerja dengan kategori baik b = Total jumlah penyuluh agama yang dievaluasi kinerjanya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Data hasil evaluasi kinerja penyuluh agama (aspek laporan, konten digital, dan diklat) 2. Jumlah total penyuluh agama
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Evaluasi Kinerja Penyuluh Agama
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan agamanya: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu

11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Rasio penyuluh agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama
3	Konsep/Definisi	pengukuran data kelompok sasaran yang dimiliki Penyuluh Agama Islam PNS, PPPK dan Non PNS yang mendapatkan bimbingan penyuluhan
4	Interpretasi	bertambahnya jumlah penyuluh agama islam maka akan lebih banyak lagi kelompok sasaran masyarakat yang terbimbing dan mendapatkan layanan advokasi keagamaan
5	Metode / Rumus Perhitungan	$x = b / a$ sehingga rasionya menjadi 1:x Keterangan: a = Jumlah penyuluh agama yang aktif b = Jumlah kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah penyuluh agama yang aktif 2. Jumlah kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Layanan bimbingan penyuluhan 2. Layanan advokasi 3. Layanan keagamaan lainnya
8	Ukuran/Satuan	Rasio
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Kelompok sasaran umum, khusus dan medsos
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi, Kab/Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia	-

	publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan dialog kerukunan agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS
3	Konsep/Definisi	Dialog kerukunan yang difasilitasi oleh Kementerian Agama atau mitra strategis bertujuan untuk meredam potensi konflik dan memperkuat moderasi beragama. Dalam kegiatan ini, dihasilkan rekomendasi berbasis EWS (sistem peringatan dini) yang dapat digunakan dalam mitigasi konflik dan penguatan kohesi sosial.
4	Interpretasi	Persentase ini menunjukkan seberapa besar peningkatan jumlah dialog kerukunan yang terfasilitasi dari tahun sebelumnya. Makin tinggi persentasenya, makin kuat perhatian terhadap pencegahan dini konflik keagamaan di masyarakat Islam.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase peningkatan = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah dialog kerukunan agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu yang difasilitasi pada tahun berjalan b = Jumlah dialog kerukunan agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu yang difasilitasi pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah kegiatan dialog kerukunan Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu tahun berjalan 2. Jumlah kegiatan dialog kerukunan Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Fasilitasi Dialog Kerukunan Umat Beragama dan Perumusan Rekomendasi Early Warning System
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan

10	Klasifikasi	Berdasarkan lokasi dan skala kegiatan: 1. Tingkat lokal (kabupaten/kota) 2. Tingkat provinsi 3. Tingkat nasional
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan kitab suci agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha yang disediakan
3	Konsep/Definisi	Persentase peningkatan kitab suci yang disediakan adalah ukuran perubahan jumlah kitab suci yang tersedia dalam suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya. Indikator ini mencerminkan upaya peningkatan akses terhadap literatur kitab suci bagi masyarakat.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase peningkatan ini, semakin banyak buku keagamaan yang tersedia, yang dapat mendukung peningkatan pemahaman keagamaan dan literasi masyarakat. Jika persentase rendah atau negatif, hal ini menunjukkan stagnasi atau penurunan dalam penyediaan buku keagamaan, yang dapat berdampak pada keterbatasan akses terhadap sumber bacaan keagamaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumusan = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun berjalan b = Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun berjalan 2. Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pengadaan dan Distribusi Kitab Suci 2. Digitalisasi dan Akses Kitab Suci Online 3. Fasilitasi Cetak dan Penerjemahan Kitab Suci 4. Kemitraan dengan Penerbit dan Lembaga Keagamaan 5. Monitoring Kebutuhan dan Ketersediaan Kitab Suci
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan

10	Klasifikasi	Berdasarkan kitab suci masing-masing agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan naskah dan buku keagamaan Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha yang layak edar/ sesuai kaidah
3	Konsep/Definisi	Naskah dan buku keagamaan yang dinyatakan layak edar adalah naskah/buku yang telah melalui proses penilaian oleh lembaga atau otoritas berwenang (misalnya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Direktorat Urusan Agama, atau lembaga keagamaan masing-masing) dan dinyatakan sesuai dengan kaidah ajaran agama, nilai-nilai moderasi, serta peraturan perundangan.
4	Interpretasi	Indikator ini menunjukkan tingkat pertumbuhan tahunan jumlah naskah/buku keagamaan yang memenuhi standar kelayakan edar. Makin tinggi persentasenya, makin banyak literatur keagamaan yang berkualitas, sesuai kaidah, dan moderatif yang tersedia di masyarakat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase peningkatan = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah naskah/buku keagamaan yang dinyatakan layak edar pada tahun berjalan b = Jumlah naskah/buku keagamaan yang dinyatakan layak edar pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah naskah/buku keagamaan yang dinyatakan layak edar pada tahun berjalan 2. Jumlah naskah/buku keagamaan yang dinyatakan layak edar pada tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Penilaian Kelayakan Naskah dan Buku Keagamaan
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha
11	Level Estimasi	Nasional

12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan perpustakaan masjid yang sesuai standar
3	Konsep/Definisi	Standar perpustakaan masjid mengacu pada kriteria tertentu yang mencakup koleksi buku keagamaan, fasilitas pendukung, tata kelola, dan akses layanan bagi jamaah. Peningkatan merujuk pada pertumbuhan jumlah perpustakaan yang memenuhi standar tersebut dibandingkan periode sebelumnya.
4	Interpretasi	Angka ini mencerminkan tren peningkatan kualitas sarana literasi keagamaan di masjid. Semakin tinggi persentasenya, semakin besar upaya perbaikan mutu perpustakaan masjid dalam mendukung pembinaan keagamaan masyarakat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = ((a - b) / b) \times 100\%$ a = Jumlah perpustakaan masjid sesuai standar pada tahun berjalan b = Jumlah perpustakaan masjid sesuai standar pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah perpustakaan masjid sesuai standar pada tahun berjalan 2. Jumlah perpustakaan masjid sesuai standar pada tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendataan dan Evaluasi Perpustakaan Masjid
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis masjid: Masjid Negara, Masjid Nasional, Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Jami'.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
2	Nama Indikator	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat
3	Konsep/Definisi	Sertifikasi arah kiblat merupakan proses verifikasi dan penetapan arah kiblat oleh instansi berwenang untuk memastikan kesesuaian arah shalat di masjid atau musholla. Sertifikasi ini dilakukan berdasarkan metode hisab dan observasi yang akurat.
4	Interpretasi	Angka ini menunjukkan proporsi masjid/musholla yang telah memperoleh sertifikat arah kiblat. Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak masjid/musholla yang telah terstandarisasi arah kiblatnya secara sah dan ilmiah.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ a = Jumlah masjid/musholla yang bersertifikat arah kiblat b = Total jumlah masjid/musholla yang terdata
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah masjid/musholla bersertifikat arah kiblat 2. Jumlah total masjid/musholla
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Persentase
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis masjid: Masjid Negara, Masjid Nasional, Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Jami'.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan lembaga agama yang memperoleh manfaat layanan syariah dan hisab rukyat
3	Konsep/Definisi	Layanan syariah dan hisab rukyat mencakup pelayanan konsultasi, edukasi, dan verifikasi terkait pelaksanaan ibadah sesuai syariat serta penetapan kalender hijriyah dan arah kiblat. Indikator ini mengukur peningkatan proporsi lembaga agama yang mendapatkan manfaat dari layanan tersebut dibandingkan periode sebelumnya.
4	Interpretasi	Angka ini menunjukkan sejauh mana perluasan akses dan pemanfaatan layanan syariah dan hisab rukyat oleh lembaga agama. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik penyebaran layanan ini dalam mendukung praktik keagamaan yang sesuai standar syariah.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $((a - b) / b) \times 100\%$ a = Jumlah lembaga agama yang memperoleh manfaat layanan syariah dan hisab rukyat pada tahun berjalan b = Jumlah lembaga agama yang memperoleh manfaat layanan syariah dan hisab rukyat pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lembaga agama penerima layanan syariah dan hisab rukyat tahun berjalan 2. Jumlah lembaga agama penerima layanan syariah dan hisab rukyat tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendataan dan Evaluasi Layanan Syariah serta Hisab Rukyat
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis layanan: layanan syariah, hisab rukyat
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
2	Nama Indikator	Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A); a) Lembaga penyelenggara haji khusus; b) Lembaga penyelenggara umrah
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur proporsi lembaga penyelenggara haji khusus dan umrah yang memperoleh akreditasi predikat A sesuai standar yang ditetapkan oleh Kementerian Agama melalui mekanisme penilaian akreditasi berbasis kinerja, kepatuhan regulasi, serta kualitas layanan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, semakin besar proporsi lembaga yang memberikan layanan dengan standar prima, akuntabel, dan sesuai regulasi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a/b) \times 100$ Keterangan: a : Jumlah PIHK dan/atau PPIU yang memperoleh akreditasi A pada tahun berjalan b : Jumlah total PIHK dan/atau PPIU yang terdaftar aktif pada tahun berjalan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Persentase PIHK terakreditasi A 2. Persentase PPIU terakreditasi A
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Proses penilaian dan akreditasi PIHK dan PPIU 2. Monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah 3. Penerbitan sertifikat akreditasi 4. Pembinaan dan pengawasan reguler lembaga penyelenggara 5. Digitalisasi dan pelaporan akreditasi pada sistem informasi haji dan umrah
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Lembaga Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) Terakreditasi A 2. Lembaga Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Terakreditasi A
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan	-

	nama publikasinya)	

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
2	Nama Indikator	Tingkat Kepuasan layanan Asrama Haji
3	Konsep/Definisi	Persentase tingkat kepuasan jemaah haji atas layanan asrama haji sesuai standar pelayanan minimal sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan ibadah haji
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase tingkat kepuasan menunjukkan kualitas layanan asrama haji yang semakin memenuhi harapan dan kebutuhan jemaah haji
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a : Jumlah jemaah haji yang menyatakan puas b : Jumlah total responden survei
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah jemaah haji yang menyatakan puas terhadap layanan asrama haji 2. Jumlah total jemaah haji yang menjadi responden survei
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Survei Kepuasan Layanan Asrama Haji 2. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Asrama Haji
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Kualitas Akomodasi 2. Kualitas Konsumsi 3. Ketersediaan Fasilitas Umum 4. Pelayanan Petugas Asrama
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
2	Nama Indikator	Persentase calon jamaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota
3	Konsep/Definisi	Persentase calon jemaah haji kategori lanjut usia (lansia), yaitu berusia 65 tahun ke atas, yang berhasil diberangkatkan ke tanah suci sesuai alokasi kuota khusus lansia yang ditetapkan setiap tahun oleh Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
4	Interpretasi	Nilai yang tinggi menunjukkan keberhasilan sistem seleksi, alokasi kuota, dan kesiapan administratif dalam mewujudkan layanan haji yang inklusif dan berkeadilan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a/b) \times 100$ Keterangan: a : Jumlah calon jemaah lansia yang diberangkatkan pada tahun berjalan b : Total kuota jemaah lansia yang tersedia pada tahun berjalan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Persentase jemaah haji lansia yang diberangkatkan sesuai kuota tahunan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penetapan dan alokasi kuota jemaah lansia 2. Verifikasi administrasi dan kesehatan calon jemaah lansia 3. Pemantauan daftar antrean haji berdasarkan usia 4. Penyiapan dan pemberangkatan calon jemaah lansia 5. Evaluasi pelaksanaan kebijakan afirmasi lansia dalam penyelenggaraan haji
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Lansia Prioritas Berangkat (Usia 65 Tahun ke Atas) 2. Lansia dengan Pendamping 3. Lansia Mandiri 4. Lansia Gagal Berangkat (Pengganti Kuota)
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan	-

	nama publikasinya)	

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
2	Nama Indikator	Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan
3	Konsep/Definisi	Presentasi PLHUT yang telah memenuhi kriteria standar minimum sarana-prasarana dan standar pelayanan publik sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Agama. Standar ini mencakup fasilitas fisik, sistem layanan terintegrasi, serta kualitas SDM dan prosedur layanan kepada jemaah.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin optimal penyelenggaraan layanan haji dan umrah terpadu, yang berorientasi pada kemudahan, kecepatan, kenyamanan, dan kepastian layanan bagi masyarakat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a/b) \times 100$ Keterangan: a : Jumlah PLHUT yang telah memenuhi seluruh atau sebagian besar indikator standar pelayanan dan sarana-prasarana b : Jumlah total PLHUT yang terdaftar dan aktif
6	Nama Variabel Pembangun	1. Persentase PLHUT yang memenuhi standar pelayanan dan sarana-prasarana
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Verifikasi dan evaluasi standar pelayanan PLHUT 2. Monitoring pemenuhan standar sarana dan prasarana 3. Pembinaan teknis dan peningkatan kapasitas SDM PLHUT 4. Audit dan supervisi kualitas layanan publik keagamaan 5. Pengembangan sistem layanan digital PLHUT
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. PLHUT dengan Sarana dan Prasarana Lengkap 2. PLHUT dengan Pelayanan Terstandar 3. PLHUT yang Terintegrasi secara Digital 4. PLHUT dalam Proses Pemenuhan Standar
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kab/Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah	-

	tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
2	Nama Indikator	Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu
3	Konsep/Definisi	Persentase pengguna Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) yang menyatakan puas terhadap kualitas layanan administrasi haji dan umrah yang diterima, meliputi aspek kecepatan, ketepatan, kenyamanan, dan kemudahan layanan
4	Interpretasi	Semakin tinggi tingkat kepuasan menunjukkan bahwa kualitas layanan PLHUT memenuhi ekspektasi jamaah atau masyarakat dalam proses penyelenggaraan ibadah haji dan umrah
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a : Jumlah pengguna PLHUT yang menyatakan puas b : Jumlah total responden survei
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah pengguna PLHUT yang menyatakan puas 2. Jumlah total pengguna PLHUT yang menjadi responden survei
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Survei Kepuasan Layanan PLHUT 2. Monitoring dan Evaluasi Layanan PLHUT
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Kecepatan Layanan 2. Ketepatan Layanan 3. Kenyamanan Layanan 4. Kemudahan Akses Layanan
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
2	Nama Indikator	Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75
3	Konsep/Definisi	Persentase petugas haji yang mencapai skor kinerja di atas batas minimal 75 berdasarkan hasil penilaian atas pelaksanaan tugas pelayanan, pembimbingan, dan perlindungan jemaah haji selama operasional haji
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak petugas haji yang melaksanakan tugas dengan baik dan memenuhi standar kinerja yang telah ditetapkan
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah petugas haji yang memperoleh nilai kinerja di atas 75 b = Jumlah total petugas haji yang dievaluasi
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah petugas haji yang memperoleh nilai kinerja di atas 75 2. Total petugas haji yang dievaluasi kinerjanya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Evaluasi Kinerja Petugas Haji 2. Penilaian dan Pemantauan Pelaksanaan Tugas Petugas Haji
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Petugas Kloter (TKHI, TPHI, TPIHI) 2. Petugas Non-Kloter (PPIH Arab Saudi) 3. Petugas PPIH Embarkasi/Debakasi
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
2	Nama Indikator	Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji
3	Konsep/Definisi	Persentase calon jemaah haji yang telah mengikuti kegiatan bimbingan manasik haji dan memperoleh sertifikat sebagai bukti kelulusan pelatihan manasik haji
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak calon jemaah haji yang telah memahami tata cara pelaksanaan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai rukun dan ketentuan ibadah haji
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik b = Jumlah total calon jemaah haji
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji 2. Jumlah total calon jemaah haji pada tahun berjalan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji 2. Penerbitan Sertifikat Manasik Haji
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Jemaah Haji Reguler 2. Jemaah Haji Khusus
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Badan Pemeriksa Keuangan
2	Nama Indikator	Opini laporan pengelolaan dana operasional teraudit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

3	Konsep/Definisi	Pernyataan profesional auditor eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan - BPK) atas kewajaran laporan keuangan dana operasional berdasarkan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4	Interpretasi	Pencapaian opini WTP menunjukkan bahwa dana operasional dikelola secara tertib, taat azas, serta sesuai prinsip tata kelola yang baik.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Penilaian dilakukan berdasarkan opini tertinggi yang diberikan oleh auditor BPK atas laporan keuangan dana operasional dalam tahun anggaran tertentu. Jika opini yang diberikan adalah WTP, maka indikator dinyatakan tercapai.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Status Opini Laporan Keuangan Dana Operasional 2. Kategori Opini BPK (WTP, WDP, TW, TMP)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyusunan Laporan Keuangan Dana Operasional 2. Pelaksanaan Audit Eksternal oleh BPK 3. Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Audit 4. Peningkatan Sistem Pengendalian Intern 5. Penguatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan
8	Ukuran/Satuan	Predikat
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Unit Kerja dengan Opini WTP (Tercapai) 2. Unit Kerja dengan Opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) 3. Unit Kerja dengan Opini TMP (Tidak Memberikan Pendapat) 4. Unit Kerja dengan Opini Tidak Wajar
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
2	Nama Indikator	Tingkat kepuasan pengakses layanan website haji
3	Konsep/Definisi	Tingkat kepuasan pengakses layanan website haji adalah persentase pengguna website haji yang menyatakan puas terhadap kualitas informasi, kemudahan akses, dan kecepatan layanan yang disediakan dalam platform digital tersebut
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase kepuasan, menunjukkan bahwa layanan website haji dianggap efektif, informatif, dan memenuhi kebutuhan pengguna jemaah haji maupun masyarakat umum
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah pengakses website haji yang menyatakan puas b = Total responden survei kepuasan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah pengakses website haji yang menyatakan puas 2. Jumlah total responden survei kepuasan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survei Kepuasan Pengguna Layanan Website Haji
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Layanan Informasi Jadwal Keberangkatan Haji 2. Layanan Informasi Biaya dan Pembayaran Haji 3. Layanan Pendaftaran dan Verifikasi Dokumen Haji 4. Layanan Konsultasi dan Tanya Jawab Online Haji 5. Layanan Informasi Perjalanan dan Akomodasi Haji
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
2	Nama Indikator	Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar
3	Konsep/Definisi	Persentase unit layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi bagi jemaah haji yang telah memenuhi standar pelayanan minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kontrak layanan haji
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin baik kepatuhan penyedia layanan dalam memenuhi standar mutu layanan haji, yang berdampak pada kenyamanan, keselamatan, dan kepuasan jemaah haji
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a : Jumlah unit layanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) yang memenuhi standar b : Jumlah total unit layanan yang tersedia
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah unit layanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) yang sesuai standar 2. Jumlah total unit layanan yang disediakan untuk jemaah haji
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Verifikasi Kelayakan Akomodasi Jemaah Haji 2. Pemeriksaan Kualitas Konsumsi Jemaah Haji 3. Pemeriksaan Kelaikan Transportasi Jemaah Haji
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Pelayanan Akomodasi 2. Pelayanan Konsumsi 3. Pelayanan Transportasi
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
2	Nama Indikator	Persentase jumlah daging/dam yang disalurkan ke penduduk Indonesia
3	Konsep/Definisi	Persentase jumlah daging Dam hasil pelaksanaan ibadah haji yang berhasil disalurkan ke penduduk Indonesia dibandingkan dengan total daging Dam yang tersedia
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin optimalnya penyaluran daging Dam untuk kepentingan masyarakat Indonesia, khususnya kepada kelompok masyarakat penerima manfaat di dalam negeri
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah daging Dam yang disalurkan ke Indonesia b = Total daging Dam yang tersedia
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah daging Dam yang disalurkan ke penduduk Indonesia 2. Total daging Dam yang tersedia untuk penyaluran
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Distribusi Daging Dam ke Indonesia 2. Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Daging Dam
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Masyarakat Umum (Fakir/Miskin) 2. Lembaga Sosial/Keagamaan 3. Pondok Pesantren / Panti Asuhan
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase Provinsi yang memperoleh nilai kerukunan umat beragama dengan kategori sangat tinggi
3	Konsep/Definisi	Kanwil dan Kemenag Kabupaten/Kota mendapat nilai 80 dalam IKUB
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase Kanwil dan Kemenag Kab/Kota yang mendapat nilai IKUB diatas 80, maka semakin baik tingkat Kerukunan Umat beragama
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (\text{Jumlah provinsi dengan nilai kerukunan umat beragama kategori sangat tinggi} \div \text{Jumlah total provinsi}) \times 100\%$
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah provinsi dengan nilai kerukunan umat beragama kategori sangat tinggi 2. Jumlah total provinsi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survei Indeks Kerukunan Umat Beragama
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan kategori nilai: Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Nilai aspek penerimaan terhadap perbedaan sosial (agama dan Etnis)
3	Konsep/Definisi	Nilai aspek penerimaan terhadap perbedaan sosial (agama dan etnis) adalah skor yang mencerminkan tingkat kesediaan individu atau kelompok dalam menerima, menghormati, dan berinteraksi dengan orang lain yang memiliki latar belakang agama dan etnis yang berbeda. Indikator ini diukur berdasarkan survei atau asesmen dengan skala tertentu untuk menggambarkan tingkat toleransi dan keterbukaan masyarakat terhadap keberagaman.
4	Interpretasi	Semakin tinggi nilai penerimaan, semakin besar tingkat toleransi dan keterbukaan masyarakat dalam menerima perbedaan agama dan etnis. Nilai yang tinggi menunjukkan adanya sikap inklusif dan harmoni sosial yang kuat, sementara nilai yang rendah dapat mengindikasikan adanya eksklusivitas sosial atau potensi ketegangan akibat perbedaan identitas.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$X = (\sum Si) / N$ Keterangan: X = Nilai penerimaan terhadap perbedaan sosial Si = Skor penerimaan individu terhadap perbedaan agama dan etnis (berdasarkan skala tertentu, misalnya 1–5 atau 1–10) N = Jumlah individu yang disurvei
6	Nama Variabel Pembangun	a. Skor penerimaan individu terhadap perbedaan agama dan etnis b. Jumlah total individu yang disurvei
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survei Indeks Moderasi Beragama / Survei Sosial Keagamaan
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan dimensi sosial: Agama, Etnis
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan	-

	nama publikasinya)	

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama dan BPJPH - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
2	Nama Indikator	Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan
3	Konsep/Definisi	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Halal yang Diterbitkan adalah rasio yang mengukur jumlah dokumen rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut yang dikeluarkan oleh unit pengawasan halal Kementerian Agama/BPJPH sebagai respons atas kegiatan pengawasan lapangan di wilayah Kabupaten/Kota, dibandingkan dengan total temuan atau laporan pengawasan yang secara teknis memerlukan penerbitan rekomendasi.
4	Interpretasi	Nilai ini mencerminkan efisiensi administratif dan responsivitas sistem Jaminan Produk Halal (JPH) dalam menindaklanjuti temuan lapangan. Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa unit pengawasan (baik di pusat maupun daerah) secara cepat dan formal memproses hasil monitoring menjadi langkah perbaikan yang konkret bagi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), pelaku usaha, atau internal auditor halal di tingkat daerah.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Halal yang Diterbitkan. b = Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Halal yang Memerlukan Rekomendasi.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Halal yang Diterbitkan b. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Halal yang Memerlukan Rekomendasi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi Jaminan Produk Halal (JPH) (terhadap pelaku usaha, LPH, atau auditor halal) di tingkat Kabupaten/Kota. - Analisis Laporan Hasil Pengawasan dan Penyusunan Rekomendasi Resmi sebagai tindak lanjut temuan. - Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Halal untuk mencatat temuan, rekomendasi, dan status tindak lanjut.
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Per Kategori Obyek Pengawasan (misalnya, Pengawasan Pelaku Usaha, Pengawasan LPH, atau Pengawasan Auditor Halal)
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi

12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama dan BPJPH - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
2	Nama Indikator	Nilai literasi halal
3	Konsep/Definisi	Nilai literasi halal mencerminkan tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat atau pelaku usaha terhadap prinsip, regulasi, dan praktik produk halal. Nilai ini diukur melalui instrumen penilaian yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku terkait halal.
4	Interpretasi	Angka ini menunjukkan seberapa tinggi tingkat literasi masyarakat atau pelaku usaha terhadap isu halal. Semakin tinggi nilainya, semakin baik pemahaman dan penerapan konsep halal dalam kehidupan sehari-hari dan aktivitas ekonomi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Nilai dari BPJPH
6	Nama Variabel Pembangun	1. Skor jawaban responden pada aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku halal 2. Skor maksimum ideal yang dapat dicapai responden
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survei Literasi Halal
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan aspek literasi: Pengetahuan, Pemahaman, Sikap, Praktik
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM
2	Nama Indikator	Nilai layanan Pentashihan Al-Qur'an
3	Konsep/Definisi	Nilai layanan Pentashihan Al-Qur'an mencerminkan kualitas dan efektivitas layanan dalam proses penelaahan, koreksi, dan persetujuan terhadap naskah Al-Qur'an yang akan dicetak dan diedarkan. Penilaian dilakukan terhadap aspek ketepatan teks, kesesuaian tajwid, dan ketepatan rasm.
4	Interpretasi	Angka ini menunjukkan seberapa baik mutu layanan pentashihan dalam memastikan keotentikan dan kesesuaian naskah Al-Qur'an dengan standar yang ditetapkan. Nilai yang tinggi mengindikasikan keandalan proses pentashihan dalam menjaga kemurnian Al-Qur'an yang beredar di masyarakat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Nilai Layanan} = (\text{Skor total evaluasi layanan} / \text{Skor maksimum ideal}) \times 100$
6	Nama Variabel Pembangun	1. Skor hasil evaluasi terhadap layanan pentashihan (aspek ketepatan teks, tajwid, rasm) 2. Skor maksimum ideal
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survei Kepuasan Layanan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis layanan: Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Revisi/Pengesahan Mushaf
11	Level Estimasi	Tahunan
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM
2	Nama Indikator	Tingkat kepatuhan penerbit pada regulasi penerbitan Al-Qur'an
3	Konsep/Definisi	Tingkat kepatuhan penerbit pada regulasi penerbitan Al-Qur'an menunjukkan sejauh mana penerbit mengikuti ketentuan yang berlaku dalam menerbitkan naskah Al-Qur'an, termasuk keharusan pentashihan, pencantuman nomor tashih, dan kepatuhan terhadap standar teks, rasm, dan tajwid.
4	Interpretasi	Angka ini merepresentasikan tingkat kesesuaian penerbit dengan ketentuan regulasi yang ditetapkan pemerintah. Nilai yang tinggi mengindikasikan kesadaran dan tanggung jawab penerbit dalam menjaga akurasi dan legalitas penerbitan Al-Qur'an.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah penerbit yang patuh terhadap regulasi penerbitan Al-Qur'an b = Jumlah total penerbit Al-Qur'an yang terdata
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah penerbit yang mengikuti seluruh regulasi penerbitan Al-Qur'an 2. Jumlah total penerbit Al-Qur'an
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Penerbit Al-Qur'an terhadap Regulasi
8	Ukuran/Satuan	Predikat
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan status kepatuhan: Patuh, Cukup Patuh, Tidak Patuh
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM
2	Nama Indikator	Presentase Peningkatan Surat Tanda Tashih/Izin Edar Mushaf Al-Qur'an
3	Konsep/Definisi	Persentase peningkatan Surat Tanda Tashih/Izin Edar Mushaf Al-Qur'an mengukur tingkat pertumbuhan jumlah surat resmi yang dikeluarkan sebagai bukti legalitas mushaf Al-Qur'an yang telah melalui proses pentashihan dan dinyatakan layak edar.
4	Interpretasi	Angka ini menunjukkan efektivitas dan peningkatan layanan pentashihan dalam memberikan legalitas terhadap mushaf Al-Qur'an yang akan beredar. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik tingkat layanan dan kepatuhan penerbit terhadap proses perizinan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah Surat Tanda Tashih/Izin Edar tahun berjalan b = Jumlah Surat Tanda Tashih/Izin Edar tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah Surat Tanda Tashih/Izin Edar tahun berjalan 2. Jumlah Surat Tanda Tashih/Izin Edar tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendataan dan Evaluasi Penerbitan Surat Tanda Tashih/Izin Edar Mushaf Al-Qur'an
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan status penerbitan: Diterbitkan, Belum Diterbitkan
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM
2	Nama Indikator	Persentase Peningkatan Masyarakat yang memanfaatkan literasi Al-Qur'an digital
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan peningkatan jumlah individu yang mengakses dan menggunakan platform digital untuk mempelajari, memahami, dan mengamalkan isi Al-Qur'an.
4	Interpretasi	Angka ini menunjukkan sejauh mana adopsi teknologi digital dalam literasi Al-Qur'an meningkat di masyarakat. Kenaikan persentase mencerminkan efektivitas layanan literasi digital dan tingginya minat masyarakat terhadap pembelajaran Al-Qur'an secara daring.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah masyarakat yang memanfaatkan literasi Al-Qur'an digital pada tahun berjalan b = Jumlah masyarakat yang memanfaatkan literasi Al-Qur'an digital pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah pengguna platform literasi Al-Qur'an digital tahun berjalan 2. Jumlah pengguna tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendataan dan Evaluasi Pemanfaatan Literasi Al-Qur'an Digital
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan bentuk literasi digital: Aplikasi Al-Qur'an, E-Mushaf, Portal Pembelajaran Al-Qur'an Digital
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM
2	Nama Indikator	Nilai Kualitas Pengembangan dan Pengkajian al-Qur'an
3	Konsep/Definisi	Nilai ini mencerminkan mutu program yang dilakukan dalam rangka pengembangan dan pengkajian Al-Qur'an, mencakup kualitas kegiatan ilmiah, penerbitan, riset, dan inovasi dalam bidang studi Al-Qur'an.
4	Interpretasi	Angka yang tinggi menunjukkan bahwa kegiatan pengkajian dan pengembangan Al-Qur'an dilaksanakan dengan baik, berbasis ilmu, relevan dengan kebutuhan umat, dan berdampak nyata terhadap peningkatan pemahaman dan pengalaman keislaman.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Nilai Kualitas = (Skor total hasil evaluasi / Skor maksimum ideal) × 100
6	Nama Variabel Pembangun	1. Skor hasil evaluasi terhadap kegiatan pengembangan dan pengkajian Al-Qur'an 2. Skor maksimum ideal
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Evaluasi dan Penilaian Program Pengembangan serta Pengkajian Al-Qur'an
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan aspek: Pengembangan Mushaf, Kajian Tafsir, Riset Al-Qur'an, Inovasi Pembelajaran Al-Qur'an
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM
2	Nama Indikator	Nilai layanan Museum Bayt Al-Qur'an
3	Konsep/Definisi	Nilai ini menggambarkan tingkat kualitas layanan Museum Bayt Al-Qur'an yang dinilai berdasarkan kepuasan pengunjung terhadap berbagai aspek pelayanan, edukasi, dan fasilitas yang disediakan oleh museum.
4	Interpretasi	Angka ini mencerminkan seberapa baik museum dalam memenuhi ekspektasi dan kebutuhan pengunjung. Semakin tinggi nilai, semakin baik kualitas pelayanan dan pengalaman pengunjung di Museum Bayt Al-Qur'an.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Nilai = (Jumlah skor total dari seluruh responden) / (Jumlah responden) Keterangan: 1. Skor total diperoleh dari kuesioner evaluasi layanan (misalnya: keramahan petugas, kebersihan, informasi koleksi, fasilitas, dan pengalaman edukatif) 2. Skala penilaian biasanya 1–5 atau 1–10
6	Nama Variabel Pembangun	1. Skor penilaian dari survei kepuasan pengunjung 2. Jumlah responden survei
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survei Kepuasan Layanan Museum Bayt Al-Qur'an
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis layanan: Pameran Tetap, Pameran Temporer, Edukasi, Layanan Pengunjung
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM
2	Nama Indikator	Persentase Peningkatan Pengunjung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal
3	Konsep/Definisi	Persentase ini mengukur tingkat pertumbuhan jumlah pengunjung yang datang ke Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal dalam satu periode waktu dibandingkan dengan periode sebelumnya.
4	Interpretasi	Angka ini mencerminkan tren minat masyarakat terhadap kunjungan ke lembaga kultural dan edukatif berbasis keislaman. Semakin tinggi peningkatan, semakin baik daya tarik dan relevansi museum sebagai pusat informasi dan edukasi keislaman.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = ((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah pengunjung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal pada tahun berjalan b = Jumlah pengunjung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah pengunjung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal tahun berjalan 2. Jumlah pengunjung tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendataan dan Evaluasi Kunjungan Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis museum: Bayt Al-Qur'an, Museum Istiqlal
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM
2	Nama Indikator	Nilai Pemanfaatan Kurikulum dan Sistem Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi SDM Agama dan Keagamaan
3	Konsep/Definisi	ilai ini mencerminkan tingkat pemanfaatan sistem NSPK dalam mendukung peningkatan kompetensi manajemen, kepemimpinan, dan penguatan moderasi beragama bagi aparatur dan pemangku kepentingan terkait.
4	Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, semakin optimal pemanfaatan NSPK sebagai acuan dalam pelatihan, pengembangan kompetensi, dan penyusunan kebijakan berbasis standar. Hal ini menunjukkan keselarasan antara perencanaan kebijakan dengan kebutuhan penguatan moderasi dan tata kelola.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Nilai = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah kegiatan atau institusi yang mengadopsi dan menerapkan NSPK dalam program pengembangan kompetensi b = Total kegiatan atau institusi yang menjadi target pemanfaatan NSPK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah kegiatan pelatihan/kebijakan yang menggunakan NSPK 2. Total sasaran pengembangan kompetensi berbasis NSPK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Evaluasi Pemanfaatan Sistem Pengembangan Kompetensi ASN Bidang Manajemen, Kepemimpinan, dan Moderasi Beragama
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis kompetensi: Manajemen, Kepemimpinan, Moderasi Beragama
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM
2	Nama Indikator	Nilai Kepuasan layanan penyelenggaraan pengembangan kompetensi
3	Konsep/Definisi	Nilai ini mencerminkan tingkat kepuasan peserta terhadap layanan pelatihan atau program peningkatan kompetensi yang diselenggarakan, baik secara teknis, administratif, maupun substansi materi.
4	Interpretasi	Semakin tinggi nilai ini, semakin baik kualitas pelayanan yang dirasakan oleh peserta dalam kegiatan pengembangan kompetensi. Nilai ini menjadi ukuran penting dalam evaluasi kualitas penyelenggaraan pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Nilai Kepuasan = $(\sum \text{Skor Kepuasan} / \text{Jumlah Responden}) \times \text{Skala Penilaian Maksimal}$ Keterangan: 1. Skor Kepuasan diperoleh dari hasil survei peserta terhadap berbagai aspek layanan (fasilitas, materi, narasumber, teknis pelaksanaan, dll.) 2. Skala penilaian biasanya berbasis Likert (misalnya 1–5)
6	Nama Variabel Pembangun	1. Skor penilaian dari responden per aspek layanan 2. Jumlah responden survei
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survei Kepuasan Layanan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis pelatihan
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM
2	Nama Indikator	Nilai Kepuasan Pengguna terhadap Lulusan Pengembangan Kompetensi
3	Konsep/Definisi	Nilai ini mencerminkan tingkat kepuasan instansi/lembaga pengguna terhadap kualitas lulusan program pengembangan kompetensi, baik dari sisi keterampilan, etika kerja, maupun kontribusi kinerja di tempat kerja.
4	Interpretasi	Semakin tinggi nilai ini, semakin positif penilaian pengguna terhadap dampak dan efektivitas pelatihan yang telah diikuti oleh peserta. Ini menjadi indikator keberhasilan program pengembangan kompetensi dalam menyiapkan SDM yang andal.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Nilai Kepuasan = $(\sum \text{Skor Penilaian} / \text{Jumlah Responden}) \times \text{Skala Penilaian Maksimal}$ Keterangan: 1. Skor penilaian diperoleh dari survei pengguna (atasan/pihak institusi) terhadap lulusan program pengembangan kompetensi 2. Skala penilaian biasanya menggunakan skala Likert (misal 1–5)
6	Nama Variabel Pembangun	1. Skor kepuasan pengguna terhadap lulusan 2. Jumlah responden pengguna
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survei Kepuasan Pengguna terhadap Lulusan Program Pengembangan Kompetensi
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis kompetensi: Teknis, Manajerial, Fungsional
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM
2	Nama Indikator	Nilai Kepuasan Pengguna terhadap Lulusan Pengembangan Kompetensi
3	Konsep/Definisi	Nilai ini mencerminkan tingkat kepuasan instansi/lembaga pengguna terhadap kualitas lulusan program pengembangan kompetensi, baik dari sisi keterampilan, etika kerja, maupun kontribusi kinerja di tempat kerja.
4	Interpretasi	Semakin tinggi nilai ini, semakin positif penilaian pengguna terhadap dampak dan efektivitas pelatihan yang telah diikuti oleh peserta. Ini menjadi indikator keberhasilan program pengembangan kompetensi dalam menyiapkan SDM yang andal.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Nilai Kepuasan = $(\sum \text{Skor Penilaian} / \text{Jumlah Responden}) \times \text{Skala Penilaian Maksimal}$ Keterangan: 1. Skor penilaian diperoleh dari survei pengguna (atasan/pihak institusi) terhadap lulusan program pengembangan kompetensi 2. Skala penilaian biasanya menggunakan skala Likert (misal 1–5)
6	Nama Variabel Pembangun	1. Skor kepuasan pengguna terhadap lulusan 2. Jumlah responden pengguna
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survei Kepuasan Pengguna terhadap Lulusan Program Pengembangan Kompetensi
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis kompetensi: Teknis, Manajerial, Fungsional
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM
2	Nama Indikator	Persentase Peningkatan Kompetensi Manajemen dan Kepemimpinan pada SDM Agama dan Keagamaan
3	Konsep/Definisi	Persentase ini mengukur peningkatan jumlah SDM agama dan keagamaan yang menunjukkan peningkatan kompetensi dalam bidang manajemen dan kepemimpinan setelah mengikuti program pelatihan atau pengembangan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin efektif program pelatihan dalam meningkatkan kapasitas manajerial dan kepemimpinan SDM agama dan keagamaan. Hal ini menunjukkan penguatan kualitas aparatur dalam mendukung layanan keagamaan yang profesional.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah SDM yang menunjukkan peningkatan kompetensi manajemen dan kepemimpinan pada tahun berjalan b = Jumlah SDM yang menunjukkan kompetensi pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Hasil asesmen pasca pelatihan (tahun berjalan dan tahun sebelumnya) 2. Data keikutsertaan pelatihan 3. Hasil evaluasi peningkatan kompetensi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Program Pengembangan Kompetensi Manajemen dan Kepemimpinan SDM Agama dan Keagamaan
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis kompetensi: Manajemen, Kepemimpinan
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM
2	Nama Indikator	Persentase Pengembangan Kompetensi yang Memanfaatkan Platform Digital
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan proporsi kegiatan pengembangan kompetensi (pelatihan, diklat, workshop, dll.) yang diselenggarakan secara daring atau berbasis platform digital dibandingkan total seluruh kegiatan pengembangan kompetensi.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan semakin besar pemanfaatan teknologi dalam mendukung peningkatan kapasitas SDM secara fleksibel dan efisien.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan melalui platform digital b = Total jumlah kegiatan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Data kegiatan pengembangan kompetensi berbasis digital 2. Data seluruh kegiatan pengembangan kompetensi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Platform Digital dalam Pengembangan Kompetensi
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan bentuk platform: Learning Management System (LMS), Aplikasi Mobile, Webinar, E-Learning Interaktif
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM
2	Nama Indikator	Persentase Peningkatan Kompetensi moderasi beragama pada SDM Agama dan Keagamaan.
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan peningkatan jumlah SDM agama dan keagamaan yang telah mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi terkait moderasi beragama dibandingkan tahun sebelumnya.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase peningkatan, menunjukkan semakin luasnya cakupan penguatan pemahaman dan praktik moderasi beragama di kalangan SDM yang terlibat dalam pelayanan keagamaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah SDM agama dan keagamaan yang mengikuti pengembangan kompetensi moderasi beragama pada tahun berjalan b = Jumlah SDM agama dan keagamaan yang mengikuti pengembangan kompetensi moderasi beragama pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah peserta kegiatan peningkatan kompetensi moderasi beragama tahun berjalan 2. Jumlah peserta tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Program Pengembangan Kompetensi Moderasi Beragama bagi SDM Agama dan Keagamaan
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan aspek moderasi: Komitmen Kebangsaan, Toleransi, Anti-Kekerasan, Akomodatif terhadap Budaya Lokal
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM
2	Nama Indikator	Persentase Lembaga Pengembangan Kompetensi yang Memperoleh Akreditasi B untuk Pelatihan Kepemimpinan dan Latsar
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menunjukkan proporsi lembaga pengembangan kompetensi yang telah mendapatkan akreditasi minimal kategori B dalam menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan dan pelatihan dasar (Latsar) bagi ASN.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini, semakin banyak lembaga yang memenuhi standar mutu penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan dan Latsar, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas SDM aparatur.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah lembaga pengembangan kompetensi yang memperoleh akreditasi B atau lebih b = Total jumlah lembaga pengembangan kompetensi yang diverifikasi
6	Nama Variabel Pembangun	1. Data akreditasi lembaga penyelenggara pelatihan kepemimpinan dan Latsar 2. Daftar total lembaga pengembangan kompetensi yang terverifikasi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Akreditasi Lembaga Pengembangan Kompetensi untuk Pelatihan Kepemimpinan dan Latsar
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis pelatihan: Pelatihan Kepemimpinan, Pelatihan Dasar (Latsar)
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM
2	Nama Indikator	Persentase lembaga pengembangan kompetensi SDM keagamaan yang memperoleh akreditasi A
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan proporsi lembaga pengembangan kompetensi SDM di bidang keagamaan yang memperoleh akreditasi tertinggi (kategori A), berdasarkan penilaian dari lembaga yang berwenang.
4	Interpretasi	Angka ini mencerminkan tingkat kualitas penyelenggara pengembangan kompetensi keagamaan. Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak lembaga yang memenuhi standar mutu tertinggi dalam pendidikan dan pelatihan SDM keagamaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah lembaga pengembangan kompetensi SDM keagamaan yang memperoleh akreditasi A b = Total lembaga pengembangan kompetensi SDM keagamaan yang diakreditasi
6	Nama Variabel Pembangun	1. Data akreditasi lembaga pengembangan kompetensi SDM keagamaan 2. Jumlah total lembaga yang diakreditasi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Akreditasi Lembaga Pengembangan Kompetensi SDM Keagamaan
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan kategori akreditasi: A, B, C
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM
2	Nama Indikator	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM keagamaan

3	Konsep/Definisi	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Keagamaan adalah proporsi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang agama dan keagamaan (seperti penyuluh, guru, penghulu, pengelola rumah ibadah, dan tokoh agama) yang mengalami peningkatan kemampuan, pengetahuan, atau keterampilan melalui pelatihan, bimbingan teknis, sertifikasi, atau kegiatan peningkatan kapasitas lainnya dalam periode tertentu
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak SDM agama dan keagamaan yang berhasil meningkatkan kompetensi untuk mendukung pelayanan dan pembinaan umat secara profesional, moderat, dan berdampak positif
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a : Jumlah SDM agama dan keagamaan yang mengalami peningkatan kompetensi b : Jumlah total SDM agama dan keagamaan yang menjadi target pembinaan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah SDM agama dan keagamaan yang mengalami peningkatan kompetensi 2. Jumlah total SDM agama dan keagamaan yang menjadi target pembinaan atau pengembangan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelatihan SDM Keagamaan 2. Bimbingan Teknis (Bimtek) SDM Keagamaan 3. Sertifikasi SDM Keagamaan 4. Workshop/Pelatihan Moderasi Beragama
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. SDM Agama dan Keagamaan Bidang Pendidikan 2. SDM Agama dan Keagamaan Bidang Pelayanan Keagamaan 3. SDM Agama dan Keagamaan Bidang Sosial Kemasyarakatan
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM
2	Nama Indikator	Persentase pengembangan kompetensi SDM keagamaan yang memanfaatkan platform digital
3	Konsep/Definisi	Persentase ini mengukur sejauh mana program pengembangan kompetensi bagi SDM keagamaan dilaksanakan melalui atau dengan dukungan platform digital.
4	Interpretasi	Angka ini menunjukkan tingkat adaptasi teknologi dalam proses pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM keagamaan. Semakin tinggi persentasenya, semakin kuat pemanfaatan teknologi dalam transformasi pelatihan keagamaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi SDM keagamaan yang memanfaatkan platform digital b = Total kegiatan pengembangan kompetensi SDM keagamaan yang dilaksanakan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Data kegiatan pelatihan yang dilakukan melalui platform digital 2. Data seluruh kegiatan pelatihan SDM keagamaan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Platform Digital dalam Pengembangan Kompetensi SDM Keagamaan
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis platform digitalnya: Instagram, Youtube, Tiktok.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM
2	Nama Indikator	Persentase naskah kebijakan pembangunan bidang agama yang dihasilkan
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan capaian jumlah naskah kebijakan yang berhasil disusun dalam rangka mendukung pembangunan di bidang agama, dibandingkan dengan target atau rencana kerja yang ditetapkan.
4	Interpretasi	Angka ini menunjukkan tingkat produktivitas dalam penyusunan dokumen kebijakan yang relevan untuk mendukung tata kelola dan pembangunan sektor keagamaan. Semakin tinggi persentasenya, semakin optimal pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah naskah kebijakan pembangunan bidang agama yang dihasilkan b = Jumlah naskah kebijakan pembangunan bidang agama yang direncanakan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah naskah kebijakan aktual yang telah selesai dan terdokumentasi 2. Jumlah target naskah kebijakan dalam rencana tahunan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Penyusunan dan Evaluasi Naskah Kebijakan Pembangunan Bidang Agama
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan bidang kebijakan: Pendidikan Agama, Layanan Keagamaan, Moderasi Beragama, Pemberdayaan Umat, Urusan Haji dan Umrah, Zakat dan Wakaf
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi Keagamaan
3	Konsep/Definisi	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi adalah persentase jumlah penduduk yang sedang menempuh pendidikan tinggi (Diploma/Sarjana) terhadap jumlah penduduk usia 19–24 tahun. APK dapat melebihi 100% karena menghitung semua yang sedang bersekolah di jenjang tersebut, tanpa memperhitungkan apakah usianya sesuai.
4	Interpretasi	APK Pendidikan Tinggi memberikan gambaran tentang daya serap sistem pendidikan tinggi terhadap penduduk, termasuk mereka yang lebih tua atau lebih muda dari usia ideal pendidikan tinggi. Angka ini mencerminkan aksesibilitas dan keterjangkauan pendidikan tinggi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan/Ma'had Aly b = Jumlah penduduk usia 19–24 tahun
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan/Ma'had Aly b. Jumlah penduduk usia 19–24 tahun
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendataan Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis perguruan tinggi: PTKN, PTKS
11	Level Estimasi	Nasional, dan Perguruan Tinggi Keagamaan
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Persentase lulusan pendidikan tinggi Keagamaan/Ma'had Aly yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun
3	Konsep/Definisi	Persentase lulusan satuan pendidikan tinggi keagamaan, termasuk Ma'had Aly, yang memperoleh pekerjaan (formal/informal) dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan setelah kelulusan.
4	Interpretasi	Indikator ini mencerminkan daya serap lulusan pendidikan tinggi keagamaan terhadap dunia kerja. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik keterkaitan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan pasar kerja.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah lulusan PTK/Ma'had Aly yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun pada periode sebelumnya b = Jumlah lulusan PTK/Ma'had Aly pada periode sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah lulusan pendidikan tinggi keagamaan/Ma'had Aly yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu < 1 tahun setelah lulus b. Jumlah total lulusan pendidikan tinggi keagamaan/Ma'had Aly pada periode yang sama
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Tracer Studi oleh masing-masing Perguruan Tinggi Keagamaan/Ma'had Aly
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahun
10	Klasifikasi	Berdasarkan status kerja: Bekerja < 1 tahun, Bekerja ≥ 1 tahun, Belum Bekerja
11	Level Estimasi	Nasional, dan Perguruan Tinggi Keagamaan
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat THE Impact SDGs
3	Konsep/Definisi	Jumlah perguruan tinggi (PT) yang masuk dalam daftar Times Higher Education (THE) Impact Rankings pada peringkat kurang dari 1000 besar dunia, berdasarkan penilaian kontribusi PT terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).
4	Interpretasi	Indikator ini menunjukkan pengakuan internasional terhadap peran dan kontribusi perguruan tinggi Indonesia dalam mendukung SDGs melalui pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, tata kelola institusi, dan kemitraan. Semakin banyak PT yang masuk <1000 besar, semakin tinggi pengakuan terhadap kinerja keberlanjutan perguruan tinggi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Jumlah PTK/Ma'had Aly dalam peringkat THE Impact Rankings <1000
6	Nama Variabel Pembangun	Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan/Ma'had Aly yang masuk dalam THE Impact Rankings SDGs
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan/Ma'had Aly yang masuk dalam THE Impact Rankings SDGs
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan SDGs Goal
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan jumlah mahasiswa pada PTK/Ma'had Aly
3	Konsep/Definisi	Persentase peningkatan jumlah mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) dan Ma'had Aly adalah ukuran relatif yang menunjukkan perubahan jumlah mahasiswa yang terdaftar aktif pada institusi pendidikan tinggi keagamaan dari periode waktu tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. PTK meliputi Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), dan perguruan tinggi keagamaan swasta yang terakreditasi. Ma'had Aly adalah lembaga pendidikan tinggi pesantren yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesi dalam bidang keagamaan Islam.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur tingkat pertumbuhan partisipasi mahasiswa dalam pendidikan tinggi keagamaan. Nilai positif menunjukkan adanya peningkatan jumlah mahasiswa, sedangkan nilai negatif menunjukkan penurunan. Semakin tinggi persentase peningkatan, semakin baik kinerja dalam memperluas akses pendidikan tinggi keagamaan. Indikator ini mencerminkan daya tarik, kapasitas, dan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan serta efektivitas kebijakan pengembangan pendidikan tinggi keagamaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase peningkatan = $((a - b) / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = jumlah mahasiswa tahun berjalan; b = jumlah mahasiswa tahun sebelumnya.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah mahasiswa tahun berjalan b. Jumlah mahasiswa tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pendataan EMIS PTK dan Ma'had Aly - Verifikasi dan Validasi Data Mahasiswa oleh Setjen Kemenag dan Ditjen Pendis - Monitoring dan Evaluasi Data Mahasiswa
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan

10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri (UIN, IAIN, STAIN) - PTK Swasta - Ma'had Aly Berdasarkan Jenjang: - S1/Sarjana - S2/Magister - S3/Doktor
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Persentase PTK/Ma'had Aly yang terakreditasi
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur proporsi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) pada Ma'had Aly yang telah memiliki status akreditasi, baik akreditasi program studi maupun kelembagaan, oleh lembaga akreditasi yang diakui pemerintah.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase, menunjukkan bahwa semakin banyak PTK di Ma'had Aly yang telah melalui proses penjaminan mutu melalui sistem akreditasi formal, sehingga menjamin kompetensi, kualitas pendidikan, dan standar nasional pendidikan telah dipenuhi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a/b) \times 100\%$ Dengan: a = Jumlah Ma'had Aly/PTK di Ma'had Aly yang telah terakreditasi b = Jumlah total Ma'had Aly/PTK di Ma'had Aly
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah PTK/Ma'had Aly yang telah terakreditasi b. Jumlah total PTK/Ma'had Aly yang ada
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pelaksanaan akreditasi Ma'had Aly oleh BAN-PT atau LAMDIK/LAMEMBA (jika berlaku) - Pemutakhiran data EMIS dan SIKS-Diktis - Monitoring dan evaluasi mutu Ma'had Aly oleh Ditjen Pendis
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Mutu Pendidikan Keagamaan Tinggi
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi, dan/atau per lembaga Ma'had Aly
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Persentase dosen dan tenaga kependidikan PTK/Ma'had Aly yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi
3	Konsep/Definisi	Persentase dosen dan tenaga kependidikan Perguruan Tinggi Kejuruan (PTK) yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi sebagai bukti peningkatan keterampilan, pengetahuan, atau keahlian sesuai bidang keahliannya. Sertifikasi ini dapat berupa sertifikat pelatihan, uji kompetensi, atau program pengembangan profesional lainnya yang diakui secara nasional/internasional.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur sejauh mana dosen dan tenaga kependidikan PTK telah meningkatkan kompetensinya melalui program sertifikasi. Persentase yang tinggi menunjukkan komitmen institusi dalam pengembangan SDM dosen dan kualitas pengajaran.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan PTK yang memperoleh sertifikasi kompetensi b = Total Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan PTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah Dosen PTK Bersertifikasi Kompetensi 2. Jumlah Tenaga Kependidikan PTK Bersertifikasi Kompetensi 3. Jumlah Dosen PTK 4. Jumlah Tenaga Kependidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelatihan/sertifikasi dosen oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) atau badan sertifikasi terkait. 2. Program pengembangan dosen (e.g., Microcredential, pelatihan industri). 3. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan/Kebudayaan/Ristek atau mitra industri.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	- Bidang Keahlian: Sertifikasi diklasifikasikan berdasarkan bidang - Jenis Sertifikasi: Sertifikasi nasional (BNSP), internasional, atau pelatihan khusus.
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi	-

	data? (Disebutkan nama publikasinya)	

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Rata-rata masa tunggu lulusan pendidikan tinggi keagamaan untuk mendapatkan pekerjaan
3	Konsep/Definisi	Rata-rata waktu yang dibutuhkan lulusan pendidikan tinggi (sarjana/diploma) sejak kelulusan hingga memperoleh pekerjaan pertama yang dibayar (formal/non-formal)
4	Interpretasi	Indikator ini mencerminkan kecepatan transisi lulusan dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Semakin rendah nilai rata-rata masa tunggu, maka semakin baik daya serap lulusan oleh pasar kerja dan semakin relevan pendidikan yang diperoleh
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Rata-rata masa tunggu} = \frac{\sum \text{waktu tunggu semua lulusan yang bekerja}}{\text{jumlah lulusan yang bekerja}}$
6	Nama Variabel Pembangun	Rata-rata Masa Tunggu Lulusan Pendidikan Tinggi (Bulan)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) - Survei Penelusuran Alumni (Tracer Study) oleh perguruan tinggi - Survei Khusus terkait Ketenagakerjaan Lulusan
8	Ukuran/Satuan	Waktu (Bulan)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	- Tahunan (data Sakernas/BPS dirilis setiap tahun). - Periodik (tracer study perguruan tinggi biasanya 1-2 tahun setelah kelulusan)
10	Klasifikasi	Diploma, Sarjana, Magister, Doktor
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Sakernas

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Persentase kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur proporsi perjanjian kerja sama (MoU/MoA/perjanjian kerja lainnya) yang masih aktif dan telah memberikan output berupa program nyata dalam peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, seperti pelatihan, pendampingan, sertifikasi, magang, pertukaran dosen/guru, atau program kemitraan peningkatan kompetensi lainnya.
4	Interpretasi	Persentase kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a/b) \times 100\%$ Dengan: a = Jumlah kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK b = Jumlah total kerja sama aktif
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK b. Jumlah total kerja sama aktif yang terdata
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pendataan dan pemantauan kerja sama pendidikan oleh unit teknis - Evaluasi program kemitraan peningkatan mutu PTK - Pelaporan kinerja kelembagaan dan kerja sama
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Efektivitas Kemitraan dan Pengembangan SDM Pendidikan
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi, Jenis Lembaga (Madrasah, PTKIN, Satuan Pendidikan Keagamaan, Balai Diklat, dst.)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Indeks Keberagamaan Mahasiswa (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha)
3	Konsep/Definisi	Indeks Keberagamaan Mahasiswa adalah ukuran tingkat penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan mahasiswa pada masing-masing agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang mencakup aspek keyakinan, ibadah, pengetahuan agama, dan perilaku sosial keagamaan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan semakin kuatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan mahasiswa. Indeks dapat digunakan untuk melihat pola keberagamaan antaragama, antarwilayah, maupun antarperguruan tinggi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Indeks} = (\sum \text{skor aspek keagamaan individu} / \text{skor maksimum}) \times 100$
6	Nama Variabel Pembangun	1. Skor keyakinan keagamaan mahasiswa 2. Skor praktik ibadah mahasiswa 3. Skor pengetahuan ajaran agama 4. Skor perilaku sosial keagamaan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survei Indeks Keberagamaan Mahasiswa
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha.
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Jumlah perguruan tinggi keagamaan yang masuk ke dalam peringkat THE Impact SDGs
3	Konsep/Definisi	Persentase perguruan tinggi di tingkat nasional yang berhasil masuk dalam peringkat Times Higher Education (THE) Impact Rankings pada posisi 1000 teratas secara global, dengan fokus pada kontribusi perguruan tinggi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)
4	Interpretasi	Indikator ini mencerminkan sejauh mana perguruan tinggi di Indonesia secara kolektif diakui secara internasional atas dampak positifnya dalam mendukung pencapaian SDGs. Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak perguruan tinggi Indonesia yang memiliki kinerja unggul dan diakui secara global dalam kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan
5	Metode / Rumus Perhitungan	Jumlah = Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan yang masuk ke dalam peringkat THE Impact SDGs
6	Nama Variabel Pembangunan	Jumlah total perguruan tinggi yang berpotensi masuk THE Impact Rankings SDGs
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan	Pemeringkatan Times Higher Education (THE) Impact Rankings
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	THE 17 GOALS
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Times Higher Education

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Tinggi Islam
2	Nama Indikator	Persentase PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang memenuhi standar sarana prasarana
3	Konsep/Definisi	Persentase PTK yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi adalah proporsi perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang memiliki fasilitas akademik dan non-akademik sesuai ketentuan standar minimal sarana dan prasarana pendidikan tinggi.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak perguruan tinggi keagamaan yang memiliki sarana dan prasarana memadai sesuai standar nasional pendidikan tinggi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah PTK/Ma'had Aly yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi dalam periode tertentu; b = Jumlah total PTK/Ma'had Aly yang ada dalam periode yang sama;
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah PTK/Ma'had Aly yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi; 2. Jumlah total PTK/Ma'had Aly.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Verifikasi dan validasi data sarana prasarana melalui EMIS dan monitoring lapangan; - Fasilitasi pembangunan dan rehabilitasi sarpras PTK; - Evaluasi pemenuhan standar sarpras oleh Tim Penjaminan Mutu PTK.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang menyediakan fasilitas yang mendukung Pendidikan Tinggi berbasis gender dan inklusif
3	Konsep/Definisi	Persentase PTK yang menyediakan fasilitas pendidikan berbasis gender dan inklusif adalah ukuran proporsi perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang memiliki sarana, kebijakan, dan lingkungan fisik yang mendukung kesetaraan gender serta akses bagi seluruh kelompok tanpa diskriminasi.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini, semakin banyak PTK yang menyediakan dukungan terhadap pendidikan tinggi yang inklusif. Hal ini menunjukkan komitmen lembaga pendidikan dalam memenuhi hak-hak pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah PTK yang menyediakan fasilitas inklusif b = Jumlah PTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah PTK yang menyediakan fasilitas inklusif 2. Jumlah PTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendataan oleh EMIS
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase mahasiswa PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) penerima beasiswa
3	Konsep/Definisi	Persentase mahasiswa PTK penerima beasiswa adalah ukuran proporsi mahasiswa pada perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang memperoleh bantuan biaya pendidikan dari pemerintah, lembaga keagamaan, atau sumber lain yang sah.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase mahasiswa penerima beasiswa, menunjukkan semakin luasnya akses bantuan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa, baik dari pemerintah, institusi, maupun pihak swasta
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa penerima beasiswa b = Jumlah mahasiswa
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa 2. Jumlah Mahasiswa
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pencatatan oleh EMIS
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Jenis Beasiswa: Akademik, Non-Akademik (olahraga/seni), Kebutuhan Ekonomi, Prestasi, dll.
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase mahasiswa kategori UKT kelompok I
3	Konsep/Definisi	Persentase mahasiswa kategori Uang Kuliah Tunggal (UKT) Kelompok I adalah proporsi mahasiswa baru atau mahasiswa aktif di Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang ditetapkan dalam kelompok UKT paling rendah (Kelompok I). Kelompok UKT I ini diperuntukkan bagi mahasiswa dengan kondisi ekonomi paling membutuhkan dan/atau memiliki keterbatasan finansial, sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur tingkat keterjangkauan layanan pendidikan tinggi di PTK. Semakin tinggi persentase mahasiswa yang masuk dalam kategori UKT Kelompok I, menunjukkan semakin efektif upaya Kementerian Agama dan PTK dalam memastikan bahwa pendidikan tinggi dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa kategori UKT Kelompok I b = Jumlah total mahasiswa baru atau mahasiswa aktif
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah mahasiswa kategori UKT Kelompok I pada PTKN 2. Jumlah total mahasiswa baru atau mahasiswa aktif pada PTKN
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Penerapan sistem UKT berbasis data ekonomi mahasiswa - Verifikasi dan validasi ekonomi calon mahasiswa baru (UKT online/offline) - Sosialisasi dan pelaksanaan kebijakan afirmatif UKT
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Tahun Masuk: - Angkatan 202X; - Angkatan 202X-1, dst.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan animo mahasiswa baru
3	Konsep/Definisi	Persentase peningkatan animo mahasiswa baru adalah perubahan persentase jumlah pendaftar baru pada suatu institusi pendidikan tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya
4	Interpretasi	Variabel ini menunjukkan seberapa besar minat calon mahasiswa untuk mendaftar pada institusi tersebut. Peningkatan nilai menunjukkan daya tarik institusi yang meningkat, sedangkan penurunan mengindikasikan menurunnya minat calon mahasiswa
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = ((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah pendaftar tahun berjalan b = Jumlah pendaftar tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah pendaftar tahun berjalan 2. Jumlah pendaftar tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) atau Rekrutmen Calon Mahasiswa
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase mahasiswa baru yang berkuliah di perguruan tinggi keagamaan (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) berkualitas
3	Konsep/Definisi	Persentase mahasiswa baru yang berkuliah di perguruan tinggi berkualitas adalah rasio antara jumlah mahasiswa baru yang diterima dan terdaftar di Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang telah terakreditasi Unggul/A atau memiliki peringkat terbaik, dibandingkan dengan total seluruh mahasiswa baru yang diterima di PTK pada periode tertentu.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur ketersediaan akses dan pilihan pendidikan tinggi yang berkualitas bagi mahasiswa baru. Semakin tinggi proporsi mahasiswa baru yang memilih dan diterima di PTK berkualitas, menunjukkan semakin efektif upaya Kementerian Agama dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan tinggi dan penyediaan pilihan institusi yang terpercaya.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa baru yang diterima di PTK dengan akreditasi institusi Unggul/A atau peringkat terbaik. b = Jumlah mahasiswa baru yang diterima di seluruh PTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah mahasiswa baru yang diterima di PTK dengan akreditasi institusi Unggul/A atau peringkat terbaik. 2. Jumlah mahasiswa baru yang diterima di seluruh PTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Penghitungan oleh EMIS
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi	-

	data? (Disebutkan nama publikasinya)	

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase mahasiswa baru PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) berkuliah di Prodi STEM terakreditasi unggul
3	Konsep/Definisi	Persentase mahasiswa baru PTK yang berkuliah di program studi STEM terakreditasi unggul adalah ukuran proporsi mahasiswa baru pada perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang terdaftar di program studi bidang Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika (STEM) dengan status akreditasi “Unggul” dari BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak mahasiswa baru di PTK yang memilih program studi STEM dengan mutu akademik tinggi, mencerminkan peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi keagamaan terhadap kebutuhan iptek.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Proporsi} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa baru di Prodi STEM terakreditasi Unggul b = Jumlah total mahasiswa baru di seluruh Prodi STEM
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah mahasiswa baru di prodi STEM terakreditasi unggul 2. Jumlah total mahasiswa baru di prodi STEM
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pelaporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) oleh perguruan tinggi
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Ditjen Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Jumlah perguruan tinggi keagamaan (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang terpetakan berdasarkan keunggulannya
3	Konsep/Definisi	Jumlah perguruan tinggi keagamaan yang terpetakan berdasarkan keunggulannya adalah banyaknya PTK (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang telah diklasifikasikan menurut bidang atau capaian unggulan, seperti riset, inovasi, pengabdian masyarakat, tata kelola, dan mutu akademik.
4	Interpretasi	Semakin tinggi jumlah PTK yang terpetakan menunjukkan semakin baiknya pemetaan mutu dan diferensiasi perguruan tinggi keagamaan berdasarkan keunggulan spesifiknya, yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan kebijakan dan pembinaan mutu.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Jumlah = Banyaknya PTK yang telah dikategorikan sesuai hasil pemetaan keunggulan berdasarkan kriteria mutu dan capaian unggulan.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah PTK yang telah terpetakan berdasarkan keunggulannya.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Kegiatan pemetaan dan klasifikasi PTK oleh Kementerian Agama - Survei dan asesmen potensi unggulan PTK - Penyusunan profil kelembagaan PTK
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase Prodi PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang mendapatkan akreditasi unggul
3	Konsep/Definisi	Persentase Prodi PTK yang mendapatkan akreditasi unggul adalah ukuran proporsi program studi pada perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang memperoleh peringkat akreditasi “Unggul” dari BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak program studi di perguruan tinggi keagamaan yang telah mencapai mutu akademik tertinggi, mencerminkan peningkatan kualitas pendidikan dan tata kelola akademik di lingkungan PTK.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah PTK yang berakreditasi unggul b = Jumlah PTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah PTK yang berakreditasi unggul 2. Jumlah PTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendataan oleh EMIS
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Di PDDikti

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang terakreditasi
3	Konsep/Definisi	Persentase LPTK PTK yang terakreditasi adalah ukuran proporsi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan di lingkungan perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang telah memperoleh status akreditasi dari BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak LPTK di PTK yang memenuhi standar mutu kelembagaan dan tata kelola pendidikan, mencerminkan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan calon tenaga pendidik keagamaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase=(a / b) × 100 % Keterangan: a = Jumlah LPTK yang telah terakreditasi. b = Jumlah LPTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah LPTK yang telah terakreditasi. 2. Jumlah LPTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pendampingan dan fasilitasi akreditasi LPTK; - Penguatan sistem penjaminan mutu internal; - Verifikasi data akreditasi melalui EMIS dan BAN-PT/LAM.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Peringkat Akreditasi: - Unggul/A - Baik Sekali/B - Baik/C
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase program studi Program Profesi Guru (PPG) PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang terakreditasi unggul
3	Konsep/Definisi	Persentase program studi PPG PTK yang terakreditasi unggul adalah ukuran proporsi program studi Program Profesi Guru pada perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang memperoleh peringkat akreditasi “Unggul” dari BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak program studi PPG di PTK yang telah mencapai mutu akademik tertinggi, mencerminkan peningkatan kualitas pendidikan profesi guru keagamaan dan kesiapan lembaga dalam menghasilkan pendidik profesional.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah PTK yang telah terpetakan berdasarkan keunggulannya. b = Jumlah PTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah PTK yang telah terpetakan berdasarkan keunggulannya. 2. Jumlah PTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Peningkatan dan Fasilitasi Akreditasi Unggul Program Studi PPG (melalui pembinaan, pendampingan, workshop, penyusunan dokumen akreditasi, dan evaluasi diri). - Pendataan dan Rekapitulasi Program Studi PPG yang telah terakreditasi (termasuk status akreditasi aktif) di bawah Kementerian Agama
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi	-

	data? (Disebutkan nama publikasinya)	

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase dosen berkualifikasi akademik S3 a. Total b. STEM c. Non STEM
3	Konsep/Definisi	Persentase dosen berkualifikasi akademik S3 adalah rasio jumlah dosen bergelar doktor (S3) terhadap jumlah total dosen aktif di perguruan tinggi, baik secara keseluruhan (total), di bidang STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), maupun di bidang non-STEM.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin baik kualitas sumber daya dosen yang berperan dalam meningkatkan mutu tridharma perguruan tinggi, khususnya di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Total = $((a + b) / c) \times 100\%$ STEM = $(a / c) \times 100\%$ Non-STEM = $(b / c) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah dosen S3 STEM b = Jumlah dosen S3 non-STEM c = Jumlah dosen
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah dosen S3 STEM 2. Jumlah dosen S3 non-STEM 3. Jumlah dosen
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dan EMIS Perguruan Tinggi Keagamaan
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase dosen yang mempunyai pengalaman di luar kampus
3	Konsep/Definisi	Persentase dosen yang mempunyai pengalaman di luar kampus adalah rasio jumlah dosen tetap yang terlibat dalam aktivitas profesional di luar perguruan tinggi seperti industri, lembaga riset, pemerintahan, organisasi internasional, atau kegiatan pengabdian masyarakat, terhadap jumlah total dosen tetap.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin banyak dosen yang memiliki pengalaman praktis dan relevan di dunia luar kampus, yang diharapkan dapat meningkatkan relevansi pembelajaran dan penelitian di perguruan tinggi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah dosen yang memiliki pengalaman di luar kampus b = Jumlah dosen tetap
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah dosen yang memiliki pengalaman di luar kampus 2. Jumlah dosen tetap
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survei Aktivitas Dosen atau Pelaporan Beban Kerja Dosen (BKD)
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase dosen yang menduduki jabatan lektor/lektor kepala/guru besar
3	Konsep/Definisi	Persentase dosen yang menduduki jabatan akademik Lektor, Lektor Kepala, atau Guru Besar adalah rasio jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik tersebut terhadap jumlah total dosen tetap di perguruan tinggi.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin baik tingkat profesionalisme, kepakaran, dan kontribusi dosen dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat).
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = jumlah dosen dengan jabatan Lektor, Lektor Kepala, atau Guru Besar b = jumlah total dosen tetap
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah dosen dengan jabatan Lektor, Lektor Kepala, atau Guru Besar 2. Jumlah total dosen tetap
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dan EMIS Perguruan Tinggi Keagamaan
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Jenis Jabatan: Lektor, Lektor Kepala, Guru Besar
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti program peningkatan kompetensi
3	Konsep/Definisi	Persentase dosen dan tenaga kependidikan Perguruan Tinggi Kejuruan (PTK) yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi sebagai bukti peningkatan keterampilan, pengetahuan, atau keahlian sesuai bidang keahliannya. Sertifikasi ini dapat berupa sertifikat pelatihan, uji kompetensi, atau program pengembangan profesional lainnya yang diakui secara nasional/internasional.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur sejauh mana dosen PTK telah meningkatkan kompetensinya melalui program sertifikasi. Persentase yang tinggi menunjukkan komitmen institusi dalam pengembangan SDM dosen dan kualitas pengajaran.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah dosen dan tenaga kependidikan PTK yang memperoleh program peningkatan kompetensi b = Jumlah dosen dan tenaga kependidikan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang memperoleh program peningkatan kompetensi 2. Jumlah dosen dan tenaga kependidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelatihan/sertifikasi dosen oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) atau badan sertifikasi terkait. 2. Program pengembangan dosen (e.g., Microcredential, pelatihan industri). 3. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan/Kebudayaan/Ristek atau mitra industri.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Jenis Sertifikasi: Sertifikasi nasional (BNSP), internasional, atau pelatihan khusus.
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase dosen PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang menjadi Narasumber Konferensi nasional maupun internasional
3	Konsep/Definisi	Persentase dosen PTK yang menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional adalah ukuran proporsi dosen pada perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang berpartisipasi sebagai pembicara, pemakalah, atau panelis pada forum ilmiah tingkat nasional dan internasional.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin aktif dan diakui dosen PTK dalam jejaring ilmiah nasional dan global, mencerminkan peningkatan kapasitas akademik, reputasi, dan kontribusi ilmiah perguruan tinggi keagamaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah dosen yang menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional b = Jumlah dosen aktif yang ada di PTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah dosen yang menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional 2. Jumlah dosen aktif yang ada di PTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pendataan partisipasi dosen pada kegiatan ilmiah - Fasilitasi dan insentif publikasi ilmiah dan partisipasi konferensi - Evaluasi kegiatan tridarma dosen
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Konferensi: - Nasional - Internasional
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Rasio dosen asing PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) dengan dosen dalam negeri
3	Konsep/Definisi	Rasio dosen asing dengan dosen dalam negeri pada PTK adalah perbandingan antara jumlah dosen berkewarganegaraan asing dengan jumlah dosen warga negara Indonesia yang mengajar di perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha).
4	Interpretasi	Semakin tinggi rasio menunjukkan semakin besar keterlibatan dosen asing dalam kegiatan akademik PTK, yang mencerminkan peningkatan kolaborasi internasional dan pengakuan global terhadap mutu pendidikan tinggi keagamaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Rasio} = 1 : (b / a)$ Keterangan: a = Jumlah dosen asing aktif di PTK b = Jumlah dosen dalam negeri aktif di PTK
6	Nama Variabel Pembangun	a = Jumlah dosen asing aktif di PTK b = Jumlah dosen dalam negeri aktif di PTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Program visiting professor atau exchange lecturer - Skema rekrutmen dosen asing - Kerja sama internasional PTK (MoU/MoA)
8	Ukuran/Satuan	Rasio
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase pemenuhan jumlah tenaga kependidikan PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) pada jenjang jabatan fungsional
3	Konsep/Definisi	Persentase pemenuhan jumlah tenaga kependidikan PTK pada jenjang jabatan fungsional adalah ukuran tingkat kesesuaian antara jumlah tenaga kependidikan yang telah menduduki jabatan fungsional (misalnya arsiparis, pustakawan, pranata laboratorium, analis kepegawaian, dan sejenisnya) dengan jumlah formasi atau kebutuhan ideal di perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha).
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin terpenuhinya kebutuhan tenaga kependidikan sesuai jabatan fungsional yang dibutuhkan, mencerminkan efektivitas manajemen SDM dan profesionalitas tenaga kependidikan di lingkungan PTK.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah tenaga kependidikan eksisting pada jenjang jabatan fungsional b = Jumlah kebutuhan tenaga kependidikan pada jenjang jabatan fungsional
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah tenaga kependidikan eksisting pada jenjang jabatan fungsional 2. Jumlah kebutuhan tenaga kependidikan pada jenjang jabatan fungsional
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	a. Pendataan Tenaga Kependidikan oleh Dinas Pendidikan / Kementerian b. Analisis Kebutuhan Formasi oleh BKN / Kemdikbudristek / Pemerintah Daerah
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Data diperbarui secara berkala (tahunan) dengan cut-off per tanggal 30 Juni setiap tahun.
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase lulusan perguruan tinggi (berkualifikasi S1) dengan pengalaman 1 (satu) semester di luar kampus
3	Konsep/Definisi	Proporsi lulusan program sarjana (S1) dari Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang telah mengikuti program pembelajaran di luar kampus selama minimal satu semester penuh, relatif terhadap total lulusan program sarjana (S1) pada periode yang sama
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur keberhasilan Kementerian Agama dalam mendorong dan memfasilitasi lulusan S1 untuk memiliki pengalaman praktis dan relevan di luar lingkungan akademik. Semakin tinggi persentase lulusan dengan pengalaman di luar kampus, menunjukkan semakin kuatnya adaptasi kurikulum dan program pendidikan PTK terhadap kebutuhan dunia kerja dan dinamika masyarakat
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah lulusan PTK dengan pengalaman satu semester di luar kampus. b = Jumlah lulusan PTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lulusan PTK dengan pengalaman satu semester di luar kampus. 2. Jumlah lulusan PTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pelaksanaan dan Fasilitasi Program Pembelajaran di Luar Kampus (Magang, KKN, Pertukaran Mahasiswa, dll.) dan Pendataan Partisipan serta Lulusan dari Program Tersebut. - Proses Yudisium dan Pendataan Seluruh Lulusan Program Sarjana (S1)
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan

1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang memiliki Pusat Pengembangan Karir
3	Konsep/Definisi	Proporsi Perguruan Tinggi Keagamaan (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) di bawah Kementerian Agama yang memiliki unit atau fasilitas yang secara khusus memberikan layanan pengembangan karir kepada mahasiswa dan alumni, relatif terhadap total PTK yang ada
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur ketersediaan fasilitas dan layanan pengembangan karir di PTK. Semakin tinggi persentase PTK yang memiliki pusat pengembangan karir, menunjukkan semakin besar perhatian dan upaya Kementerian Agama dalam mempersiapkan lulusan PTK untuk memasuki dunia kerja atau berwirausaha
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah PTK yang memiliki pusat pengembangan karir b = Jumlah PTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah PTK yang telah terpetakan berdasarkan keunggulannya 2. Jumlah PTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Identifikasi dan verifikasi keberadaan pusat pengembangan karir di setiap PTK (melalui survei, pendataan, atau laporan dari PTK). - Pendataan dan rekapitulasi total PTK di bawah Kementerian Agama.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase lulusan PTK yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan: a. Total; b. Karyawan atau Wirausaha
3	Konsep/Definisi	Persentase lulusan PTK yang berhasil memiliki pekerjaan adalah proporsi lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang telah berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai karyawan atau merintis usaha (wirausaha) dalam periode waktu tertentu setelah kelulusan, dibandingkan dengan total lulusan yang lulus pada periode yang sama. Indikator ini mengukur keberhasilan PTK dalam mempersiapkan lulusannya untuk memasuki dunia kerja atau menciptakan lapangan kerja sendiri.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur keberhasilan PTK dalam menghasilkan lulusan yang relevan dan siap kerja atau siap berwirausaha. Semakin tinggi persentase lulusan yang berhasil memiliki pekerjaan, baik sebagai karyawan maupun wirausaha, menunjukkan semakin baik kualitas kurikulum, proses pembelajaran, dan pembinaan karir yang dilakukan oleh PTK. Ini mengindikasikan bahwa lulusan PTK memiliki daya saing yang tinggi dan mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja atau menciptakan peluang ekonomi sendiri. Peningkatan indikator ini berkontribusi pada peningkatan relevansi pendidikan tinggi keagamaan, peningkatan angka serapan lulusan, pengurangan pengangguran terdidik, serta peningkatan kontribusi PTK terhadap pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $\{ (a + b) / c \} \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah lulusan PTK yang berhasil menjadi karyawan dalam periode tertentu setelah kelulusan. b = Jumlah lulusan PTK yang berhasil menjadi wirausaha dalam periode tertentu setelah kelulusan. c = Jumlah total lulusan PTK yang lulus dalam periode yang sama.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lulusan PTK yang berhasil menjadi karyawan dalam periode tertentu setelah kelulusan. 2. Jumlah lulusan PTK yang berhasil menjadi wirausaha dalam periode tertentu setelah kelulusan. 3. Jumlah total lulusan PTK yang lulus dalam periode yang sama.

7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Tracer Study PTK - Program Career Center dan Alumni - Pelatihan kewirausahaan dan magang - Inkubator bisnis mahasiswa/alumni
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Pekerjaan: Karyawan, Wirausaha
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase tenaga kerja lulusan PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) bidang STEM
3	Konsep/Definisi	Proporsi angkatan kerja yang memiliki gelar pendidikan tinggi (D3, D4/Sarjana Terapan, S1, S2, S3) dari program studi di bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM), relatif terhadap total angkatan kerja lulusan pendidikan tinggi. Indikator ini mengukur ketersediaan SDM berkualitas di sektor-sektor kritis yang mendorong inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing bangs
4	Interpretasi	Indikator ini mencerminkan sejauh mana sistem pendidikan tinggi nasional mampu menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan industri dan sektor strategis di bidang STEM. Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan ketersediaan SDM STEM yang memadai untuk mendukung inovasi, riset dan pengembangan, transformasi digital, serta peningkatan produktivitas ekonomi. Ini juga mengindikasikan keberhasilan dalam mendorong minat dan kapasitas generasi muda pada disiplin ilmu yang penting untuk masa depan
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah lulusan PTK bidang STEM. b = Jumlah lulusan PTK.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lulusan PTK bidang STEM. 2. Jumlah lulusan PTK.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) atau survei ketenagakerjaan lainnya yang spesifik
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Bidang STEM: - Sains (Fisika, Kimia, Biologi, Matematika, Statistika, dll.) - Teknologi (Informatika, Sistem Informasi, dll.) - Teknik/Rekayasa (Sipil, Elektro, Mesin, dll.) - Matematika Murni & Aktuaria
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi	Sakernas

	data? (Disebutkan nama publikasinya)	

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan mahasiswa PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang mendapatkan sertifikasi kompetensi/profesi
3	Konsep/Definisi	Proporsi lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) di bawah Kementerian Agama yang berhasil memperoleh sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi yang diakui dan memiliki reputasi baik, relatif terhadap total lulusan pada periode yang sama. Indikator ini mencerminkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur keberhasilan PTK dalam menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan akademis, tetapi juga dibekali dengan keterampilan praktis dan pengakuan kompetensi yang diakui secara profesional. Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan bahwa program pendidikan di PTK semakin relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan lulusannya memiliki daya saing yang kuat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah lulusan PTK yang mendapat sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi bereputasi. b = Jumlah lulusan PTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lulusan PTK yang mendapat sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi bereputasi. 2. Jumlah lulusan PTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Fasilitasi program sertifikasi kompetensi bagi mahasiswa/lulusan, kerja sama dengan lembaga sertifikasi, dan pendataan lulusan yang bersertifikat kompetensi. - Pendataan dan rekapitulasi total lulusan PTK di bawah Kementerian Agama
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Lembaga Sertifikasi: - LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) terlisensi BNSP - Asosiasi Profesi - Lembaga Sertifikasi Internasional
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi	-

	data? (Disebutkan nama publikasinya)	

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Rasio Outbound per Inbound mahasiswa PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha)
3	Konsep/Definisi	Rasio outbound per inbound mahasiswa adalah perbandingan antara jumlah mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang mengikuti program mobilitas ke luar negeri (outbound) dengan jumlah mahasiswa asing yang mengikuti program mobilitas ke dalam PTK tersebut (inbound) dalam periode tertentu.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur tingkat internasionalisasi dan relevansi pendidikan tinggi keagamaan dengan dinamika global. Semakin seimbang rasio antara mahasiswa outbound dan inbound (mendekati 1:1), menunjukkan semakin kuatnya daya tarik dan kemampuan PTK dalam menciptakan ekosistem akademik yang inklusif secara internasional, serta semakin aktifnya mahasiswa PTK dalam mencari pengalaman global. Peningkatan rasio ini mencerminkan pengakuan PTK di kancah internasional, pengayaan perspektif multikultural di kampus, serta peningkatan kompetensi global mahasiswa. Hal ini berdampak pada peningkatan kualitas lulusan yang siap bersaing di pasar kerja global, pengembangan jejaring internasional, dan peningkatan reputasi PTK sebagai pusat keunggulan pendidikan keagamaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Rasio Outbound per Inbound} = 1 : (b / a)$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa outbound PTK b = Jumlah mahasiswa inbound PTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah mahasiswa outbound PTK 2. Jumlah mahasiswa inbound PTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Program mobilitas mahasiswa internasional (Erasmus+, IISMA, dll) - Student exchange antarlembaga PTKI dan mitra luar negeri - Program KKN internasional / transfer kredit luar negeri
8	Ukuran/Satuan	Rasio
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase mahasiswa yang berkegiatan di luar program studi
3	Konsep/Definisi	Persentase mahasiswa yang berkegiatan di luar program studi adalah proporsi mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang mengikuti kegiatan atau program di luar kurikulum inti program studi mereka, dibandingkan dengan total seluruh mahasiswa yang aktif di PTK dalam periode tertentu. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi tambahan, soft skills, dan pengalaman di luar bidang keilmuan utama.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur tingkat fleksibilitas kurikulum dan partisipasi mahasiswa dalam pengembangan diri di luar bidang utama, yang krusial untuk meningkatkan relevansi lulusan. Semakin tinggi persentase mahasiswa yang berkegiatan di luar prodi, menunjukkan semakin kuatnya upaya PTK dalam memberikan pengalaman belajar holistik dan kesempatan untuk mengembangkan soft skills, kemandirian, serta jejaring. Ini juga mencerminkan kesadaran mahasiswa akan pentingnya kompetensi lintas disiplin.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa aktif yang berkegiatan di luar program studi dalam periode tertentu. b = Jumlah mahasiswa aktif yang ada di PTK dalam periode yang sama.
6	Nama Variabel Pembangun	a: Jumlah mahasiswa aktif yang berkegiatan di luar program studi dalam periode tertentu. b: Jumlah mahasiswa aktif yang ada di PTK dalam periode yang sama.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Kegiatan organisasi kemahasiswaan (ormawa) - Magang (MBKM, kerja praktik, dll) - KKN, pengabdian masyarakat - Program pertukaran pelajar, riset kolaboratif, dan kompetisi mahasiswa
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Kegiatan: - Program MBKM (spesifik: Pertukaran Pelajar, Magang, Asistensi Mengajar, dll.) - Organisasi Kemahasiswaan (Internal/Eksternal) - Kompetisi/Lomba - Pengabdian Masyarakat

		- Karya Ilmiah/Kreativitas (di luar tugas akhir prodi)
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi
3	Konsep/Definisi	Persentase mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang berpartisipasi dalam kompetisi akademik, seni, atau olahraga yang diselenggarakan di tingkat nasional maupun internasional dalam periode waktu tertentu. Kompetisi ini mencakup, namun tidak terbatas pada, olimpiade sains, lomba inovasi, debat, kompetisi pemrograman, turnamen olahraga, dan festival seni.
4	Interpretasi	Indikator ini menggambarkan tingkat partisipasi dan daya saing mahasiswa PTK di kancah nasional dan internasional. Persentase yang tinggi menunjukkan lingkungan akademik yang kondusif untuk pengembangan potensi mahasiswa di luar kurikulum formal, serta reputasi PTK dalam menghasilkan talenta-talenta berdaya saing global.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase peningkatan = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi pada tahun berjalan b = Jumlah mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi pada tahun berjalan 2. Jumlah mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi pada tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendataan Partisipasi Mahasiswa dalam Kompetisi (PPMK)
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri/pemerintah/ Lembaga Masyarakat /Internasional
3	Konsep/Definisi	Proporsi jumlah PTK yang terlibat aktif dalam kolaborasi atau kemitraan dengan entitas eksternal (dunia usaha dan industri, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, atau lembaga internasional) dibandingkan dengan total keseluruhan PTK. Kerja sama ini dapat meliputi berbagai bentuk, seperti magang industri, proyek penelitian bersama, pengembangan kurikulum bersama, pelatihan, program pengabdian masyarakat, atau pertukaran keahlian.
4	Interpretasi	Indikator ini mencerminkan tingkat keterbukaan dan relevansi institusi pendidikan dengan kebutuhan eksternal. Semakin tinggi persentase ini, semakin kuat integrasi institusi pendidikan dengan lingkungan kerja, industri, dan masyarakat, yang berpotensi meningkatkan kualitas pendidikan dan relevansi lulusan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase PTK yang bekerjasama = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja, industri, pemerintah, lembaga masyarakat, atau internasional b = Jumlah PTK
6	Nama Variabel Pembangun	a = Jumlah PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja, industri, pemerintah, lembaga masyarakat, atau internasional b = Jumlah PTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survei Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendataan Potensi dan Kemitraan Institusi Pendidikan
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Jenis mitra: Industri, Pemerintah, LSM, Internasional
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti dibidang: a. Pendidikan dan pengajaran b. Penelitian dan publikasi c. Pengabdian kepada masyarakat
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur sejauh mana kerja sama yang telah disepakati dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kegiatan nyata. Kerja sama dimaksud mencakup perjanjian, nota kesepahaman, atau bentuk komitmen resmi antara perguruan tinggi/lembaga dengan mitra, yang kemudian dilaksanakan melalui kegiatan sesuai bidang.
4	Interpretasi	Nilai persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak kerja sama yang benar-benar ditindaklanjuti dan berdampak, sedangkan nilai rendah mengindikasikan adanya banyak kesepakatan yang belum terlaksana secara nyata.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase kerja sama bidang pendidikan dan pengajaran: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah kerja sama pendidikan dan pengajaran yang ditindaklanjuti b = Jumlah kerja sama pendidikan dan pengajaran yang disepakati Persentase kerjasama bidang penelitian dan publikasi: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah kerja sama penelitian dan publikasi yang ditindaklanjuti b = Jumlah kerja sama penelitian dan publikasi yang disepakati Persentase kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah kerja sama pengabdian kepada masyarakat yang ditindaklanjuti b = Jumlah kerja sama pengabdian kepada masyarakat yang disepakati

6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah kerja sama pendidikan dan pengajaran yang ditindaklanjuti 2. Jumlah kerja sama pendidikan dan pengajaran yang disepakati 3. Jumlah kerja sama penelitian dan publikasi yang ditindaklanjuti 4. Jumlah kerja sama penelitian dan publikasi yang disepakati 5. Jumlah kerja sama pengabdian kepada masyarakat yang ditindaklanjuti 6. Jumlah kerja sama pengabdian kepada masyarakat yang disepakati
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pencatatan dan Pemantauan Kerjasama (Monitoring and Evaluation of Partnerships) 2. Manajemen Kerjasama (Partnership Management) 3. Pelaporan Kinerja Kerjasama (Partnership Performance Reporting)
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Jenis mitra: Industri, Pemerintah, LSM, Internasional
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase mahasiswa yang mengikuti program peningkatan literasi Kitab Suci
3	Konsep/Definisi	Persentase mahasiswa pada perguruan tinggi keagamaan atau umum yang berpartisipasi dalam program peningkatan literasi Kitab Suci, baik melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler yang difasilitasi oleh lembaga pendidikan dan instansi keagamaan.
4	Interpretasi	Peningkatan nilai menunjukkan bahwa semakin banyak mahasiswa yang mendapatkan akses dan kesempatan dalam penguatan spiritualitas dan nilai-nilai kebajikan lintas agama.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa yang mengikuti program literasi Kitab Suci dalam satuan waktu tertentu b = Jumlah mahasiswa dalam satuan waktu yang sama
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah mahasiswa yang mengikuti program literasi Kitab Suci dalam satuan waktu tertentu 2. Jumlah mahasiswa dalam satuan waktu yang sama
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pengembangan dan pelaksanaan program literasi Kitab Suci di PTKI/PTU 2. Pelatihan dan workshop peningkatan pemahaman kitab suci 3. Kegiatan pembinaan keagamaan berbasis kitab suci 4. Kemitraan dengan ormas dan lembaga keagamaan dalam literasi kitab 5. Monitoring dan evaluasi program pembelajaran kitab suci
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase prodi yang mengimplementasikan integrasi keilmuan
3	Konsep/Definisi	Persentase prodi yang mengimplementasikan integrasi keilmuan adalah rasio jumlah program studi (prodi) di perguruan tinggi keagamaan yang telah menerapkan kurikulum, metode pembelajaran, atau penelitian berbasis integrasi keilmuan dibandingkan dengan total prodi yang diukur pada periode tertentu
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini, semakin banyak prodi yang berhasil menggabungkan ilmu agama dengan ilmu umum atau interdisipliner, untuk menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan holistik dan relevan dengan kebutuhan masyarakat
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah prodi yang mengimplementasikan integrasi keilmuan b = Jumlah prodi yang diukur
6	Nama Variabel Pembangun	a = Jumlah prodi yang mengimplementasikan integrasi keilmuan b = Jumlah prodi yang diukur
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Evaluasi kurikulum dan implementasi integrasi keilmuan 2. Workshop/pelatihan pengembangan kurikulum integratif 3. Pendampingan dan monitoring prodi
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase PTK yang mengembangkan pusat-pusat kajian keagamaan sesuai kebutuhan lokal
3	Konsep/Definisi	Persentase PTK yang membentuk dan mengembangkan pusat kajian keagamaan berbasis isu-isu lokal seperti moderasi beragama, toleransi, harmoni sosial, dan penguatan nilai keagamaan kontekstual sesuai kebutuhan masyarakat sekitar.
4	Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan keberhasilan PTK dalam merespons dinamika sosial-keagamaan di tingkat lokal dengan pendekatan berbasis riset dan advokasi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah PTK yang telah mengembangkan pusat kajian keagamaan berbasis isu dan kebutuhan lokal b = Jumlah PTK yang menjadi sasaran program
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah PTK yang telah mengembangkan pusat kajian keagamaan berbasis isu dan kebutuhan lokal 2. Jumlah PTK yang menjadi sasaran program
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pembentukan pusat studi keagamaan berbasis lokal 2. Penelitian berbasis kebutuhan sosial-keagamaan lokal 3. Pengabdian masyarakat berbasis hasil kajian keagamaan 4. Penerbitan hasil kajian tematik keagamaan 5. Kemitraan PTK dengan pemda/lembaga masyarakat dalam bidang keagamaan
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase karya tulis ilmiah yang bereputasi nasional
3	Konsep/Definisi	Persentase karya tulis ilmiah yang bereputasi nasional di Kementerian Agama adalah perbandingan jumlah karya tulis ilmiah ilmiah yang terakreditasi nasional (minimal SINTA 1 atau SINTA 2) yang dikelola oleh unit kerja atau perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama, terhadap total jumlah karya tulis ilmiah yang diterbitkan di lingkungan Kementerian Agama
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan kualitas dan pengakuan nasional atas karya tulis ilmiah-karya tulis ilmiah ilmiah di bawah pengelolaan Kementerian Agama
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah karya tulis ilmiah terakreditasi nasional (SINTA 1 atau 2) b = Total karya tulis ilmiah yang dikelola
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah karya tulis ilmiah yang terakreditasi nasional (SINTA 1 atau SINTA 2) 2. Total jumlah karya tulis ilmiah yang dikelola
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pengelolaan dan Akreditasi karya tulis ilmiah Ilmiah
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	1. SINTA 1 (Tertinggi) 2. SINTA 2 3. SINTA 3 4. SINTA 4 ke bawah
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Di Scopus

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase publikasi ilmiah bereputasi internasional PTK yang disitasi
3	Konsep/Definisi	Persentase artikel jurnal bereputasi internasional yang disitasi adalah proporsi artikel ilmiah yang dipublikasikan oleh dosen/peneliti PTK pada jurnal bereputasi internasional yang telah mendapat sitasi (citation) dari artikel lain dalam periode tertentu. Jurnal bereputasi internasional adalah jurnal yang terindeks dalam database internasional yang diakui seperti Scopus, Web of Science (WoS), atau database internasional lainnya yang memiliki sistem peer-review yang ketat. Sitasi adalah rujukan atau referensi yang dibuat oleh artikel lain terhadap artikel yang dimaksud, yang menunjukkan dampak dan kontribusi artikel tersebut terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Artikel yang disitasi menunjukkan kualitas, relevansi, dan pengaruh penelitian terhadap komunitas ilmiah internasional.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur dampak dan kualitas publikasi ilmiah PTK di tingkat internasional. Semakin tinggi persentase artikel yang disitasi, menunjukkan semakin baik kualitas dan relevansi penelitian yang dihasilkan oleh PTK.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100 \%$
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah artikel jurnal bereputasi internasional yang memperoleh sitasi; b. Jumlah total artikel jurnal bereputasi internasional yang diterbitkan oleh PTK.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Insentif Publikasi Ilmiah Internasional; - Bantuan Penulisan Artikel Bereputasi; - Pelatihan Sitasi dan Manajemen Referensi Ilmiah.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Quartile Jurnal (SJR/JCR): - Q1 (Quartile 1); - Q2 (Quartile 2); - Q3 (Quartile 3); - Q4 (Quartile 4).
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Jumlah karya tulis ilmiah berorientasi SDGs yang terpublikasi di Jurnal Internasional bereputasi
3	Konsep/Definisi	Persentase jumlah karya tulis ilmiah yang mendukung capaian Sustainable Development Goals (SDGs) dan berhasil terpublikasi di jurnal internasional bereputasi, dibandingkan dengan total karya tulis ilmiah yang dihasilkan dalam periode tertentu.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin kuat kontribusi akademik civitas akademika dalam mendukung target SDGs melalui publikasi yang diakui secara internasional.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus = Jumlah karya tulis ilmiah berorientasi SDGs yang terpublikasi di jurnal internasional bereputasi
6	Nama Variabel Pembangun	Jumlah karya tulis ilmiah berorientasi SDGs yang terpublikasi di jurnal internasional bereputasi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penelitian dosen dan mahasiswa berfokus SDGs 2. Workshop penulisan artikel ilmiah bereputasi 3. Pendampingan publikasi internasional
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan THE 17 GOALS
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Rasio produktifitas publikasi ilmiah dengan jumlah dosen
3	Konsep/Definisi	Rasio produktivitas publikasi jurnal dengan jumlah dosen adalah perbandingan antara jumlah artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal terakreditasi nasional atau internasional dengan jumlah dosen tetap di perguruan tinggi keagamaan di lingkungan Kementerian Agama dalam periode tertentu

4	Interpretasi	Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin produktif dosen dalam menghasilkan publikasi ilmiah, yang mencerminkan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan Kementerian Agama
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rasio: $1 : (b / a)$ Keterangan: a = Jumlah artikel ilmiah yang dipublikasikan b = Jumlah dosen tetap
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah artikel ilmiah yang dipublikasikan 2. Jumlah dosen tetap
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Kegiatan Penelitian dan Publikasi Ilmiah Dosen PTKIN/PTKIS 2. Program Insentif Publikasi Ilmiah 3. Program Peningkatan Mutu Penelitian Dosen
8	Ukuran/Satuan	Rasio
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Quartil Artikel: (Q1, Q2, Q3, dan Q4)
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Di Scopus

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Jumlah Paten Granted karya tulis ilmiah Perguruan Tinggi Keagamaan
3	Konsep/Definisi	Jumlah Paten Granted karya tulis ilmiah Perguruan Tinggi adalah total hak paten yang telah resmi diberikan (granted) oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) kepada Perguruan Tinggi Keagamaan di lingkungan Kementerian Agama dalam periode tertentu
4	Interpretasi	Semakin banyak jumlah paten yang granted, semakin menunjukkan meningkatnya kapasitas inovasi, riset terapan, dan kontribusi Perguruan Tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta pemanfaatannya untuk masyarakat
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: Jumlah Paten Granted (disetujui DJKI) dalam satu tahun
6	Nama Variabel Pembangun	Jumlah paten granted yang diperoleh oleh Perguruan Tinggi Keagamaan.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Inovasi di PTKIN/PTKIS 2. Program Pendaftaran dan Fasilitasi Paten Perguruan Tinggi
8	Ukuran/Satuan	Unit (paten)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Kategori Jumlah Paten Granted 1. Rendah (0 – 2 paten granted) 2. Sedang (3 – 5 paten granted) 3. Tinggi (> 5 paten granted)
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan DUDI/Masyarakat
3	Konsep/Definisi	Persentase hasil riset dan inovasi adalah rasio antara jumlah hasil riset dan inovasi yang telah dimanfaatkan oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) atau masyarakat terhadap total hasil riset dan inovasi yang dihasilkan perguruan tinggi keagamaan dalam periode tertentu
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak hasil riset dan inovasi yang aplikatif, relevan, dan bermanfaat bagi DUDI/masyarakat, menandakan peningkatan kualitas riset terapan di perguruan tinggi
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah hasil riset yang dimanfaatkan DUDI/Masyarakat b = Jumlah hasil riset
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah hasil riset yang dimanfaatkan DUDI/Masyarakat 2. Jumlah hasil riset
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Kegiatan Penelitian dan Inovasi Terapan 2. Program Hilirisasi Hasil Riset 3. Kemitraan Perguruan Tinggi dengan DUDI/Komunitas Masyarakat
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Pihak Pemanfaat: - Dunia Usaha (Perusahaan, Startup) - Dunia Industri - Masyarakat (Komunitas, Kelompok Tani, UMKM) - Pemerintah/Lembaga Publik
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase Lembaga Penelitian dan Pengabdian ke Masyarakat (LPPM) yang ditingkatkan kapasitasnya
3	Konsep/Definisi	Persentase LPPM yang mendapatkan program peningkatan kapasitas melalui pelatihan, workshop, pendampingan, atau sertifikasi dalam rangka penguatan fungsi riset dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan perguruan tinggi keagamaan
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan makin banyak LPPM yang ditingkatkan kapasitasnya, sebagai cerminan perbaikan kualitas manajemen riset dan pengabdian di perguruan tinggi
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah LPPM yang ditingkatkan kapasitasnya b = Jumlah LPPM PTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah LPPM yang ditingkatkan kapasitasnya 2. Jumlah LPPM PTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelatihan/Workshop Manajemen Riset dan Pengabdian Masyarakat 2. Sertifikasi Kompetensi Pengelola LPPM 3. Program Penguatan Tata Kelola LPPM 4. Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan LPPM
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis peningkatan kapasitasnya: 1. Pelatihan Pengelolaan LPPM 2. Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Kelola LPPM 3. Sertifikasi Kompetensi Pengelola LPPM 4. Pendampingan Penyusunan Roadmap Riset & Pengabdian
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Tingkat Penyelesaian Pendidikan MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widyalyaya/Uttama Dhammasekha
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur persentase siswa yang berhasil menyelesaikan pendidikan pada jenjang Madrasah Aliyah (MA), Ulya, Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK), Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK), Utama Widyalyaya, dan Uttama Dhammasekha dalam kurun waktu yang ditetapkan. Penyelesaian pendidikan tepat waktu mencerminkan efektivitas proses pembelajaran dan manajemen pendidikan di lembaga-lembaga tersebut.
4	Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa mayoritas siswa mampu menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu yang ditentukan, mengindikasikan kualitas pendidikan dan manajemen yang baik di satuan pendidikan tersebut.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan a = Jumlah Siswa yang Menyelesaikan Pendidikan Tepat Waktu b = Jumlah Total Siswa pada awal tahun MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widyalyaya/Uttama Dhammasekha
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah Siswa yang Menyelesaikan Pendidikan Tepat Waktu 2. Jumlah Total Siswa pada awal tahun MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widyalyaya/Uttama Dhammasekha
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survei Sosial Ekonomi Nasional
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis pendidikan: MA/sederajat, Ulya, SMTK, SMAK, Utama Widyalyaya, Uttama Dhammasekha
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Persentase peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan pendidikan keagamaan yang memenuhi standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional a. Literasi membaca b. Numerasi
3	Konsep/Definisi	Persentase peserta didik pada madrasah, satuan pendidikan umum berciri khas agama, dan satuan pendidikan keagamaan lainnya yang mencapai atau melampaui batas minimum kompetensi dalam Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) pada domain literasi membaca dan numerasi.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur seberapa banyak peserta didik di lingkungan pendidikan keagamaan yang telah mencapai kompetensi dasar yang dianggap penting untuk pembelajaran sepanjang hayat, yakni kemampuan memahami bacaan dan kemampuan berhitung dasar.
5	Metode / Rumus Perhitungan	1. Literasi Membaca Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah peserta didik yang memenuhi standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi bidang Literasi Membaca b = Jumlah peserta didik yang mengikuti asesmen kompetensi 2. Numerasi Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah peserta didik yang memenuhi standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi bidang Numerasi b = Jumlah peserta didik yang mengikuti asesmen kompetensi
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan pendidikan keagamaan yang memenuhi Standar Kompetensi Minimum bidang Literasi Membaca b. Jumlah peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan pendidikan keagamaan yang memenuhi Standar Kompetensi Minimum bidang Numerasi c. Jumlah peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan pendidikan keagamaan yang mengikuti AKM

7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Asesmen Nasional (AN) – Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan bidang: Literasi Membaca dan Numerasi
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Dalam Situs Rapor Pendidikan Kemendikdasmen

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang profesional pada madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan
3	Konsep/Definisi	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang telah memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terhadap total guru dan tenaga kependidikan pada madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan. Adapun syarat guru dan tenaga kependidikan (GTK) yang memenuhi kualifikasi profesional, yaitu: a. Lulusan S1/D4 dari perguruan tinggi terakreditasi dengan IPK minimal 3.00 b. Memiliki sertifikat pendidik
4	Interpretasi	Indikator ini menunjukkan kualitas sumber daya manusia pendidik di lingkungan pendidikan keagamaan. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik tingkat profesionalitas GTK dalam mendukung pembelajaran yang bermutu dan sesuai dengan standar pendidikan nasional.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang profesional b = Jumlah guru dan tenaga kependidikan
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang profesional b. Jumlah total guru dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan sasaran
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Peningkatan Kualifikasi dan Sertifikasi Guru dan Tenaga Kependidikan
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan profesi: Guru dan Tenaga Kependidikan
11	Level Estimasi	Nasional dan Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif
3	Konsep/Definisi	Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada komponen sarana dan prasarana. Termasuk di dalamnya pemenuhan fasilitas yang mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif, seperti akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana pendidikan pada madrasah, satuan pendidikan umum berciri khas agama, serta satuan pendidikan keagamaan. Persentase yang tinggi menunjukkan kesiapan penyelenggaraan proses belajar mengajar yang berkualitas dan ramah inklusi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan (madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan) yang memenuhi SNP sarpras dan memiliki fasilitas pendukung pendidikan inklusif b = Total jumlah satuan pendidikan (madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan)
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SNP sarpras dan memiliki fasilitas pendidikan inklusif 2. Total jumlah satuan pendidikan (madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penilaian atau audit pemenuhan SNP sarana dan prasarana oleh kementerian terkait 2. Verifikasi lapangan atau laporan pemenuhan fasilitas pendukung satuan pendidikan inklusif
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenjang Pendidikan: RA/ sederajat, MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia	-

	publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif
3	Konsep/Definisi	Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada komponen sarana dan prasarana. Termasuk di dalamnya pemenuhan fasilitas yang mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif, seperti akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana pendidikan pada madrasah, satuan pendidikan umum berciri khas agama, serta satuan pendidikan keagamaan. Persentase yang tinggi menunjukkan kesiapan penyelenggaraan proses belajar mengajar yang berkualitas dan ramah inklusi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan (madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan) yang memenuhi SNP sarpras dan memiliki fasilitas pendukung pendidikan inklusif b = Total jumlah satuan pendidikan (madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan)
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SNP sarpras dan memiliki fasilitas pendidikan inklusif 2. Total jumlah satuan pendidikan (madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penilaian atau audit pemenuhan SNP sarana dan prasarana oleh kementerian terkait 2. Verifikasi lapangan atau laporan pemenuhan fasilitas pendukung satuan pendidikan inklusif
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenjang Pendidikan: RA/ sederajat, MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia	-

	publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif
3	Konsep/Definisi	Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada komponen sarana dan prasarana. Termasuk di dalamnya pemenuhan fasilitas yang mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif, seperti akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana pendidikan pada madrasah, satuan pendidikan umum berciri khas agama, serta satuan pendidikan keagamaan. Persentase yang tinggi menunjukkan kesiapan penyelenggaraan proses belajar mengajar yang berkualitas dan ramah inklusi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan (madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan) yang memenuhi SNP sarpras dan memiliki fasilitas pendukung pendidikan inklusif b = Total jumlah satuan pendidikan (madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan)
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan yang memenuhi SNP sarpras dan memiliki fasilitas pendidikan inklusif 2. Total jumlah satuan pendidikan (madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penilaian atau audit pemenuhan SNP sarana dan prasarana oleh kementerian terkait 2. Verifikasi lapangan atau laporan pemenuhan fasilitas pendukung satuan pendidikan inklusif
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenjang Pendidikan: RA/ sederajat, MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia	-

	publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik
3	Konsep/Definisi	Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang memperoleh nilai pada aspek pengelolaan partisipatif dalam kategori baik berdasarkan hasil penilaian atau evaluasi penyelenggaraan pendidikan.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana satuan pendidikan melaksanakan pengelolaan yang melibatkan berbagai pihak (pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, komite, dan masyarakat) secara partisipatif. Persentase yang tinggi menunjukkan tata kelola satuan pendidikan yang terbuka dan melibatkan banyak pemangku kepentingan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang memperoleh kategori baik pada nilai pengelolaan partisipatif b = Total jumlah madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang dinilai
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan yang memperoleh nilai pengelolaan partisipatif kategori baik 2. Total jumlah satuan pendidikan yang dinilai
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Evaluasi diri madrasah/satuan pendidikan (EDM) atau instrumen penilaian pengelolaan partisipatif lain oleh kementerian/lembaga terkait 2. Hasil visitasi monitoring dan evaluasi pengelolaan satuan pendidikan
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan keagamaan yang memiliki indeks karakter pada kategori baik
3	Konsep/Definisi	Persentase satuan pendidikan yang memperoleh nilai indeks karakter dalam kategori baik berdasarkan hasil penilaian terhadap dimensi-dimensi karakter peserta didik, seperti religiusitas, integritas, nasionalisme, kemandirian, dan gotong royong.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana satuan pendidikan berhasil membentuk dan menginternalisasi nilai-nilai karakter pada peserta didik. Persentase yang tinggi menunjukkan efektivitas program pendidikan karakter yang diterapkan di satuan pendidikan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter pada kategori baik b = Total jumlah satuan pendidikan yang dinilai
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan dengan indeks karakter kategori baik 2. Total jumlah satuan pendidikan yang dinilai
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pengukuran indeks karakter melalui instrumen survei karakter atau evaluasi penanaman nilai karakter oleh kementerian/lembaga terkait 2. Hasil monitoring dan evaluasi program penguatan pendidikan karakter di satuan pendidikan
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan keagamaan yang memiliki: a. iklim keamanan sekolah; b. iklim inklusivitas; c. iklim kebhinekaan pada kategori baik.
3	Konsep/Definisi	Persentase satuan pendidikan yang mendapatkan kategori baik dalam penilaian terhadap iklim sekolah pada tiga dimensi utama, yaitu: a) iklim keamanan sekolah (merasa aman secara fisik, sosial, dan emosional di sekolah), b) iklim inklusivitas (kesetaraan layanan dan penghargaan pada keberagaman peserta didik), c) iklim kebhinekaan (praktik saling menghormati dan memperkuat persatuan dalam keberagaman).
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur kualitas lingkungan belajar di satuan pendidikan dalam menciptakan suasana aman, inklusif, dan menghargai kebhinekaan. Persentase yang tinggi menunjukkan satuan pendidikan telah berhasil membangun iklim belajar yang sehat dan mendukung perkembangan karakter peserta didik.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang memiliki kategori baik pada masing-masing dimensi (keamanan, inklusivitas, kebhinekaan) b = Total jumlah satuan pendidikan yang dinilai pada masing-masing dimensi
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan dengan kategori baik pada iklim keamanan sekolah 2. Jumlah satuan pendidikan dengan kategori baik pada iklim inklusivitas 3. Jumlah satuan pendidikan dengan kategori baik pada iklim kebhinekaan 4. Total jumlah satuan pendidikan yang dinilai
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Survei lingkungan belajar, asesmen iklim sekolah, atau instrumen pemetaan kondisi lingkungan belajar oleh kementerian/lembaga terkait 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter yang mencakup dimensi keamanan, inklusivitas, dan kebhinekaan
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat

11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan keagamaan yang memiliki: a. iklim keamanan sekolah; b. iklim inklusivitas; c. iklim kebhinekaan pada kategori baik.
3	Konsep/Definisi	Persentase satuan pendidikan yang mendapatkan kategori baik dalam penilaian terhadap iklim sekolah pada tiga dimensi utama, yaitu: a) iklim keamanan sekolah (merasa aman secara fisik, sosial, dan emosional di sekolah), b) iklim inklusivitas (kesetaraan layanan dan penghargaan pada keberagaman peserta didik), c) iklim kebhinekaan (praktik saling menghormati dan memperkuat persatuan dalam keberagaman).
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur kualitas lingkungan belajar di satuan pendidikan dalam menciptakan suasana aman, inklusif, dan menghargai kebhinekaan. Persentase yang tinggi menunjukkan satuan pendidikan telah berhasil membangun iklim belajar yang sehat dan mendukung perkembangan karakter peserta didik.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang memiliki kategori baik pada masing-masing dimensi (keamanan, inklusivitas, kebhinekaan) b = Total jumlah satuan pendidikan yang dinilai pada masing-masing dimensi
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan dengan kategori baik pada iklim keamanan sekolah 2. Jumlah satuan pendidikan dengan kategori baik pada iklim inklusivitas 3. Jumlah satuan pendidikan dengan kategori baik pada iklim kebhinekaan 4. Total jumlah satuan pendidikan yang dinilai
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Survei lingkungan belajar, asesmen iklim sekolah, atau instrumen pemetaan kondisi lingkungan belajar oleh kementerian/lembaga terkait 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter yang mencakup dimensi keamanan, inklusivitas, dan kebhinekaan
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat

11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang ramah anak
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan proporsi satuan pendidikan berbasis keagamaan yang memenuhi kriteria sekolah ramah anak sesuai pedoman nasional dan prinsip perlindungan anak.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak lembaga pendidikan berbasis agama yang mengadopsi prinsip ramah anak, mendukung lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan menghargai hak anak.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang memenuhi kriteria ramah anak b = Jumlah total satuan pendidikan yang menjadi target
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan ramah anak 2. Jumlah total satuan pendidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Evaluasi Implementasi Satuan Pendidikan Ramah Anak pada Madrasah, Satuan Pendidikan Umum dengan Kekhasan Agama, dan Satuan Pendidikan Keagamaan Formal
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, dan MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Tidak
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	-
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial
3	Konsep/Definisi	Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang telah mengimplementasikan kurikulum yang dirancang sesuai dengan konteks kebutuhan peserta didik dan lingkungan, mengedepankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta memprioritaskan penguatan karakter dan pencapaian kompetensi esensial.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana satuan pendidikan telah menerapkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan peserta didik dan tantangan zaman, yang tidak hanya menekankan aspek akademik tetapi juga membangun karakter dan kompetensi penting. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak satuan pendidikan yang mempraktikkan pendekatan pembelajaran transformatif.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang menerapkan kurikulum kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial b = Total jumlah madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang dinilai
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial 2. Total jumlah satuan pendidikan yang dinilai penerapan kurikulumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pemantauan dan evaluasi implementasi kurikulum oleh kementerian/lembaga atau pemerintah daerah 2. Laporan pelaksanaan kurikulum dari satuan pendidikan melalui sistem pelaporan akademik atau evaluasi kurikulum
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi

12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran
3	Konsep/Definisi	Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang menggunakan perangkat komputer dan koneksi internet secara rutin dalam kegiatan pembelajaran, baik untuk akses materi, penugasan, evaluasi, maupun interaksi belajar.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah diterapkan di lingkungan satuan pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran. Persentase yang tinggi menunjukkan kesiapan satuan pendidikan dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam praktik pengajaran.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran b = Total jumlah madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang didata
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan yang memanfaatkan komputer dan internet untuk pembelajaran 2. Total jumlah satuan pendidikan yang didata
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pendataan penggunaan TIK dalam pembelajaran melalui EMIS atau instrumen monitoring lain 2. Laporan hasil evaluasi pemanfaatan sarana TIK di satuan pendidikan
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia	-

	publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang diakreditasi sesuai SNP
3	Konsep/Definisi	Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang telah melalui proses akreditasi dan memperoleh status terakreditasi berdasarkan standar yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP).
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana satuan pendidikan telah memenuhi persyaratan mutu pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Standar Nasional Pendidikan. Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa semakin banyak satuan pendidikan yang kualitasnya telah diverifikasi dan diakui secara resmi melalui proses akreditasi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang telah diakreditasi sesuai SNP b = Total jumlah madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang menjadi objek akreditasi
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan yang telah diakreditasi sesuai Standar Nasional Pendidikan 2. Total jumlah satuan pendidikan yang menjadi objek akreditasi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelaksanaan visitasi dan evaluasi akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah atau lembaga akreditasi terkait 2. Pendataan hasil akreditasi yang dituangkan dalam sertifikat atau status akreditasi satuan pendidikan
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Persentase lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapatkan rekognisi
3	Konsep/Definisi	Persentase lulusan dari satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang memperoleh pengakuan formal atau rekognisi, baik melalui kesetaraan ijazah, sertifikasi kompetensi, pengakuan kualifikasi tertentu, atau bentuk rekognisi lain yang diakui oleh negara atau lembaga berwenang.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana lulusan pesantren dan pendidikan keagamaan memiliki hasil belajar yang diakui secara formal, sehingga dapat memperluas kesempatan mereka dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja. Persentase yang tinggi menunjukkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dalam memfasilitasi pengakuan kompetensi lulusan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapatkan rekognisi b = Total jumlah lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang memperoleh rekognisi 2. Total jumlah lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Program kesetaraan atau sertifikasi lulusan pesantren dan pendidikan keagamaan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait 2. Pendataan hasil kelulusan dan penerbitan ijazah kesetaraan atau sertifikat pengakuan kompetensi
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan pada pendidikan kesetaraan atau rekognisi yang dicapai: setara Paket A/ sederajat, Paket B/ sederajat, Paket C/ sederajat, atau jenjang kompetensi keagamaan lainnya yang diakui
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Persentase lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapatkan rekognisi
3	Konsep/Definisi	Persentase lulusan dari satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang memperoleh pengakuan formal atau rekognisi, baik melalui kesetaraan ijazah, sertifikasi kompetensi, pengakuan kualifikasi tertentu, atau bentuk rekognisi lain yang diakui oleh negara atau lembaga berwenang.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana lulusan pesantren dan pendidikan keagamaan memiliki hasil belajar yang diakui secara formal, sehingga dapat memperluas kesempatan mereka dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja. Persentase yang tinggi menunjukkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dalam memfasilitasi pengakuan kompetensi lulusan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapatkan rekognisi b = Total jumlah lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang memperoleh rekognisi 2. Total jumlah lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Program kesetaraan atau sertifikasi lulusan pesantren dan pendidikan keagamaan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait 2. Pendataan hasil kelulusan dan penerbitan ijazah kesetaraan atau sertifikat pengakuan kompetensi
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan pada pendidikan kesetaraan atau rekognisi yang dicapai: setara Paket A/ sederajat, Paket B/ sederajat, Paket C/ sederajat, atau jenjang kompetensi keagamaan lainnya yang diakui
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Nilai Layanan Penilaian Buku Pendidikan Agama dan Keagamaan
3	Konsep/Definisi	Nilai ini menggambarkan tingkat kualitas layanan yang diberikan dalam proses penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan agar sesuai dengan kaidah ajaran agama, kurikulum, dan standar penulisan yang ditetapkan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi nilai menunjukkan semakin baik kualitas layanan penilaian buku, termasuk dalam hal transparansi, ketepatan waktu, profesionalitas, dan kepuasan pengguna layanan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Nilai} = (\text{Jumlah skor aspek layanan} / \text{Skor maksimum}) \times 100$ Keterangan: 1. Aspek layanan mencakup ketepatan, kejelasan prosedur, profesionalitas penilai, dan kepuasan pengguna.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Skor per aspek layanan penilaian 2. Skor maksimum keseluruhan aspek
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Penilaian Buku Pendidikan Agama dan Keagamaan
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis buku: Pendidikan Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu, serta Pendidikan Keagamaan
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Nilai Layanan Penilaian Buku Pendidikan Agama dan Keagamaan
3	Konsep/Definisi	Nilai ini menggambarkan tingkat kualitas layanan yang diberikan dalam proses penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan agar sesuai dengan kaidah ajaran agama, kurikulum, dan standar penulisan yang ditetapkan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi nilai menunjukkan semakin baik kualitas layanan penilaian buku, termasuk dalam hal transparansi, ketepatan waktu, profesionalitas, dan kepuasan pengguna layanan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Nilai} = (\text{Jumlah skor aspek layanan} / \text{Skor maksimum}) \times 100$ Keterangan: 1. Aspek layanan mencakup ketepatan, kejelasan prosedur, profesionalitas penilai, dan kepuasan pengguna.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Skor per aspek layanan penilaian 2. Skor maksimum keseluruhan aspek
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Penilaian Buku Pendidikan Agama dan Keagamaan
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis buku: Pendidikan Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu, serta Pendidikan Keagamaan
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM
2	Nama Indikator	Persentase naskah kebijakan bidang pendidikan yang dimanfaatkan
3	Konsep/Definisi	Persentase naskah kebijakan (policy brief, kajian, atau rekomendasi kebijakan) dalam bidang pendidikan yang telah dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan atau pemangku kepentingan untuk penyusunan program, perumusan kebijakan, atau pengambilan keputusan lainnya.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana hasil penyusunan naskah kebijakan benar-benar digunakan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga menunjukkan efektivitas dan relevansi penyusunan kajian kebijakan tersebut.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah naskah kebijakan bidang pendidikan yang dimanfaatkan b = Total jumlah naskah kebijakan bidang pendidikan yang dihasilkan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah naskah kebijakan bidang pendidikan yang dimanfaatkan 2. Total jumlah naskah kebijakan bidang pendidikan yang dihasilkan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyusunan naskah kebijakan oleh unit kerja terkait (misalnya policy brief, kertas kerja, atau kajian strategis) 2. Monitoring pemanfaatan naskah kebijakan oleh pengambil keputusan melalui laporan tindak lanjut atau bukti penggunaan
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis kebijakan: kebijakan pendidikan umum, kebijakan pendidikan keagamaan, kebijakan pendidikan inklusif, atau kebijakan bidang pendidikan lainnya sesuai fokus kajian
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM
2	Nama Indikator	Nilai Moderasi Beragama pada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.
3	Konsep/Definisi	Nilai rata-rata tingkat moderasi beragama yang dimiliki oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berdasarkan hasil asesmen atau survei yang mengukur dimensi sikap keberagamaan yang moderat, seperti komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, serta penerimaan terhadap tradisi.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana internalisasi nilai-nilai moderasi beragama di lingkungan satuan pendidikan. Nilai yang tinggi menunjukkan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan memiliki sikap keagamaan yang moderat, toleran, serta mendukung kerukunan dan persatuan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Nilai Moderasi Beragama = Total skor asesmen moderasi beragama / Jumlah responden Keterangan: Skor diperoleh dari hasil pengisian instrumen survei moderasi beragama dengan skala tertentu (misalnya skala 1–5) yang kemudian dirata-ratakan.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Total skor hasil asesmen moderasi beragama pada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan 2. Jumlah responden (peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan) yang mengikuti asesmen
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelaksanaan asesmen atau survei moderasi beragama oleh kementerian/lembaga terkait di satuan pendidikan 2. Pengolahan hasil survei untuk menghasilkan skor rata-rata moderasi beragama
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan kelompok responden: peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM
2	Nama Indikator	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3	Konsep/Definisi	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang telah mengikuti program peningkatan kompetensi, baik melalui pelatihan, bimbingan teknis, workshop, sertifikasi, atau bentuk pengembangan profesional lainnya dalam periode tertentu.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidik dan tenaga kependidikan telah dilaksanakan. Persentase yang tinggi menunjukkan komitmen satuan pendidikan dan pemerintah dalam mengembangkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan guna mendukung mutu pembelajaran dan pengelolaan pendidikan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti program peningkatan kompetensi b = Total jumlah pendidik dan tenaga kependidikan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti program peningkatan kompetensi 2. Total jumlah pendidik dan tenaga kependidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelaksanaan program pelatihan, bimbingan teknis, workshop, atau sertifikasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, atau mitra terkait 2. Pendataan hasil kegiatan pengembangan kompetensi dari laporan satuan pendidikan atau sistem pendataan pendidik dan tenaga kependidikan
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan tempat pendidik dan tenaga kependidikan bertugas: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase provinsi yang memiliki indeks pemerataan guru agama dengan kategori baik
3	Konsep/Definisi	Persentase provinsi yang indeks pemerataan distribusi guru agamanya berada pada kategori baik. Indeks ini mengukur sejauh mana distribusi guru antar sekolah keagamaan di dalam satu provinsi sudah merata, sehingga setiap sekolah keagamaan memperoleh alokasi guru sesuai kebutuhan.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk menilai tingkat keadilan dan keseimbangan distribusi guru agama pada tingkat provinsi. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak provinsi yang telah mencapai pemerataan distribusi guru agama yang optimal, sehingga mendukung kualitas layanan pendidikan yang setara.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah provinsi dengan indeks pemerataan guru agama kategori baik b = Total jumlah provinsi
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah provinsi dengan indeks pemerataan guru agama kategori baik 2. Total jumlah provinsi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penghitungan indeks pemerataan guru agama melalui data kebutuhan dan ketersediaan guru di setiap sekolah keagamaan 2. Pendataan dan analisis distribusi guru agama yang dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan wilayah administratif: provinsi
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik
3	Konsep/Definisi	Persentase guru mata pelajaran agama pada satuan pendidikan umum, madrasah, dan satuan pendidikan keagamaan yang telah memiliki sertifikat pendidik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai bukti profesionalitas guru.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas guru agama melalui kepemilikan sertifikat pendidik. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak guru agama yang telah memenuhi standar kualifikasi profesional dan berhak memperoleh tunjangan profesi guru.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah guru agama yang memiliki sertifikat pendidik b = Total jumlah guru agama
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah guru agama yang memiliki sertifikat pendidik 2. Total jumlah guru agama
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Proses sertifikasi pendidik bagi guru agama yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait 2. Pendataan guru agama yang telah tersertifikasi dalam sistem informasi guru dan tenaga kependidikan
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang tempat guru mengajar: SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik
3	Konsep/Definisi	Persentase guru mata pelajaran agama pada satuan pendidikan umum, madrasah, dan satuan pendidikan keagamaan yang telah memiliki sertifikat pendidik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai bukti profesionalitas guru.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas guru agama melalui kepemilikan sertifikat pendidik. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak guru agama yang telah memenuhi standar kualifikasi profesional dan berhak memperoleh tunjangan profesi guru.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah guru agama yang memiliki sertifikat pendidik b = Total jumlah guru agama
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah guru agama yang memiliki sertifikat pendidik 2. Total jumlah guru agama
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Proses sertifikasi pendidik bagi guru agama yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait 2. Pendataan guru agama yang telah tersertifikasi dalam sistem informasi guru dan tenaga kependidikan
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang tempat guru mengajar: SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama pada satuan pendidikan
3	Konsep/Definisi	Persentase pemenuhan jumlah guru pendidikan agama pada satuan pendidikan dibandingkan dengan jumlah kebutuhan ideal berdasarkan rasio guru terhadap peserta didik atau beban mengajar yang ditetapkan.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kebutuhan guru pendidikan agama pada satuan pendidikan telah terpenuhi. Persentase yang tinggi menunjukkan distribusi dan ketersediaan guru pendidikan agama semakin memadai untuk memberikan layanan pembelajaran agama yang optimal kepada peserta didik.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah guru pendidikan agama yang tersedia pada satuan pendidikan b = Jumlah kebutuhan guru pendidikan agama berdasarkan standar rasio atau analisis kebutuhan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah guru pendidikan agama yang tersedia pada satuan pendidikan 2. Jumlah kebutuhan guru pendidikan agama pada satuan pendidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pendataan jumlah guru pendidikan agama yang bertugas di satuan pendidikan oleh kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah 2. Analisis kebutuhan guru pendidikan agama berdasarkan jumlah peserta didik dan beban mengajar
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang tempat guru mengajar: SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan keagamaan Kristen/Katolik/Hindu/Buddha yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif
3	Konsep/Definisi	Persentase satuan pendidikan keagamaan (Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) Sarana dan Prasarana (Sarpras), yang juga mencakup kriteria minimal penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase, menunjukkan semakin banyak satuan pendidikan keagamaan (Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang memiliki ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana minimal sesuai standar nasional, termasuk fasilitas yang mendukung peserta didik berkebutuhan khusus (pendidikan inklusif).
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan Keagamaan Kristen/Katolik/Hindu/Buddha yang Memenuhi SNP Sarpras dan Fasilitas Inklusif b = Total jumlah satuan pendidikan Keagamaan Kristen/Katolik/Hindu/Buddha
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen/Katolik/Hindu/Buddha yang Memenuhi SNP Sarpras dan Fasilitas Inklusif b. Jumlah Seluruh Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen/Katolik/Hindu/Buddha
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendataan/Verifikasi dan Validasi Pemenuhan SNP Sarpras Satuan Pendidikan Keagamaan (Kristen/Katolik/Hindu/Buddha)
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Satuan Pendidikan (misalnya: Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK), Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK), Pasraman, Sekolah Minggu Buddha, dll.) dan/atau Berdasarkan Wilayah (Provinsi/Kabupaten/Kota)
11	Level Estimasi	- Nasional - Provinsi - Kabupaten/Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Persentase siswa madrasah dan pesantren dalam satu kohort yang lulus tepat waktu
3	Konsep/Definisi	Persentase siswa (peserta didik) pada madrasah (MI/MTs/MA) dan pesantren (pada jenjang pendidikan formal yang dikelola/dibina) dalam satu kohort (kelompok angkatan masuk pada tahun ajaran yang sama) yang berhasil menyelesaikan seluruh program pembelajaran dan lulus tepat waktu sesuai dengan masa studi normatif.
4	Interpretasi	Indikator efisiensi dan efektivitas proses pendidikan. Semakin tinggi persentase, menunjukkan semakin baik manajemen pendidikan madrasah/pesantren dalam memastikan peserta didik menyelesaikan studinya sesuai target waktu.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a/b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah Siswa Madrasah/Pesantren (Kohort) yang Lulus Tepat Waktu b = Jumlah Siswa Madrasah/Pesantren pada Kohort Awal (Angkatan Masuk)
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Siswa Madrasah/Pesantren (Kohort) yang Lulus Tepat Waktu b. Jumlah Siswa Madrasah/Pesantren pada Kohort Awal (Angkatan Masuk)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pengolahan Data Kelulusan Berbasis Kohort/EMIS pada Madrasah dan Pesantren
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenjang Pendidikan (MI, MTs, MA, Satuan Pendidikan Formal di Pesantren), Jenis Kelamin, dan/atau Berdasarkan Wilayah (Provinsi/Kabupaten/Kota).
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Satuan Pendidikan
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase siswa satuan pendidikan keagamaan Kristen/Katolik/Hindu/Buddha dalam satu kohort yang lulus tepat waktu
3	Konsep/Definisi	Persentase siswa (peserta didik) pada satuan pendidikan keagamaan (misalnya SMTK, SMAK, Pasraman, Sekolah Minggu Buddha) dalam satu kohort (kelompok angkatan masuk pada tahun ajaran yang sama) yang berhasil menyelesaikan seluruh program pembelajaran dan lulus tepat waktu sesuai dengan masa studi normatif.
4	Interpretasi	Indikator yang mencerminkan efisiensi internal sistem pendidikan keagamaan. Persentase yang tinggi menunjukkan keberhasilan satuan pendidikan dalam memastikan peserta didiknya menyelesaikan program studi sesuai durasi yang ditetapkan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a/b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah Siswa Satuan Pendidikan Keagamaan (Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) Kohort yang Lulus Tepat Waktu b = Jumlah Siswa Satuan Pendidikan Keagamaan (Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) pada Kohort Awal (Angkatan Masuk)
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Siswa Satuan Pendidikan Keagamaan (Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) Kohort yang Lulus Tepat Waktu b. Jumlah Siswa Satuan Pendidikan Keagamaan (Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) pada Kohort Awal (Angkatan Masuk)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pengolahan Data Kelulusan Berbasis Kohort/EMIS pada Satuan Pendidikan Keagamaan
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Agama (Kristen, Katolik, Hindu, Buddha), Jenis Satuan Pendidikan (misalnya SMTK, SMAK, Pasraman), dan/atau Berdasarkan Wilayah (Provinsi/Kabupaten/Kota).
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Satuan Pendidikan
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah	-

	tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase siswa satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama dan pendidikan keagamaan penerima PIP dalam satu kohort yang lulus tepat waktu
3	Konsep/Definisi	Persentase siswa (peserta didik) penerima Program Indonesia Pintar (PIP) pada Satuan Pendidikan Umum dengan Kekhasan Agama (misalnya Madrasah) dan Pendidikan Keagamaan (misalnya SMTK, Pasraman) dalam satu kohort (angkatan masuk yang sama) yang berhasil menyelesaikan program studi dan lulus tepat waktu sesuai masa studi normatif.
4	Interpretasi	Indikator keberhasilan intervensi program afirmasi (PIP) dalam mendukung efisiensi internal pendidikan. Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa bantuan PIP efektif mencegah drop-out dan memastikan siswa dari keluarga kurang mampu dapat lulus tepat waktu.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a/b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah Siswa Satuan Pendidikan Umum dengan Kekhasan Agama dan Pendidikan Keagamaan Penerima PIP (Kohort) yang Lulus Tepat Waktu b = Jumlah Siswa Satuan Pendidikan Umum dengan Kekhasan Agama dan Pendidikan Keagamaan Penerima PIP pada Kohort Awal (Angkatan Masuk)
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Siswa Satuan Pendidikan Umum dengan Kekhasan Agama dan Pendidikan Keagamaan Penerima PIP (Kohort) yang Lulus Tepat Waktu b. Jumlah Siswa Satuan Pendidikan Umum dengan Kekhasan Agama dan Pendidikan Keagamaan Penerima PIP pada Kohort Awal (Angkatan Masuk)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Analisis dan Evaluasi Kinerja Program Indonesia Pintar (PIP) pada Satuan Pendidikan Kemenag Berbasis Kohort/EMIS
8	Ukuran/Satuan	Persen (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Satuan Pendidikan (Madrasah/Pendidikan Keagamaan), Jenjang (MI/MTs/MA/sejenis), dan/atau Berdasarkan Wilayah (Provinsi/Kabupaten/Kota).
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi, Jenis Satuan Pendidikan (Agama/Jenjang)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data?	-

	(Disebutkan nama publikasinya)	

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarana prasarana
3	Konsep/Definisi	Persentase madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada komponen sarana dan prasarana. Pemenuhan ini menunjukkan kesiapan infrastruktur dan fasilitas dasar untuk mendukung proses belajar mengajar sesuai standar yang ditetapkan secara nasional.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana pada madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan lainnya. Persentase yang tinggi mencerminkan kualitas layanan pendidikan yang lebih baik dan terpenuhinya kebutuhan ruang belajar, laboratorium, perpustakaan, serta fasilitas pendukung lainnya.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras b = Total jumlah madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras 2. Jumlah madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penilaian standar sarpras melalui akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Dasar Menengah 2. Verifikasi data lapangan atau laporan pemenuhan standar sarpras pendidikan
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenjang Pendidikan: RA/ sederajat, MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan	-

	nama publikasinya)	

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Persentase pesantren yang menyelenggarakan program Pesantren berdaya berbasis sumber daya ekonomi yang kuat dan berkelanjutan
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan proporsi pesantren yang aktif melaksanakan program pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal atau kewirausahaan guna menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa semakin banyak pesantren yang terlibat dalam penguatan ekonomi berbasis pesantren, mendukung ketahanan ekonomi dan kesejahteraan komunitas pesantren.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah pesantren yang menyelenggarakan program Pesantren Berdaya b = Jumlah total pesantren pada tahun berjalan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah pesantren dengan program Pesantren Berdaya 2. Jumlah total pesantren
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Evaluasi Program Pesantren Berdaya Berbasis Ekonomi
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis usaha ekonomi pesantren: Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perdagangan, Jasa, Industri Kreatif, Lainnya
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif
3	Konsep/Definisi	Persentase satuan pendidikan pesantren dan satuan pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, yaitu menyediakan layanan pendidikan yang mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dalam satu lingkungan pendidikan dengan peserta didik lainnya.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan telah menyediakan akses dan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Persentase yang tinggi menunjukkan komitmen terhadap prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam pendidikan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif b = Total jumlah madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif 2. Total jumlah madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pendataan atau survei penyelenggaraan pendidikan inklusif oleh kementerian/lembaga terkait 2. Laporan satuan pendidikan tentang penyelenggaraan layanan inklusif
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenjang Pendidikan: RA/ sederajat, MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan	-

	nama publikasinya)	

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan jumlah siswa madrasah, santri pada satuan pendidikan pesantren dan satuan pendidikan keagamaan
3	Konsep/Definisi	Persentase kenaikan jumlah peserta didik (siswa) yang terdaftar pada madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan dalam periode tertentu dibandingkan dengan jumlah siswa pada periode sebelumnya.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan partisipasi siswa pada madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan. Persentase yang positif menunjukkan adanya peningkatan minat, akses, atau keberlanjutan layanan pendidikan pada lembaga-lembaga pendidikan keagamaan tersebut.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = ((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan pada tahun berjalan b = Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan pada tahun berjalan 2. Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan pada tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pendataan siswa melalui EMIS, SIMPATIKA, atau sistem data pendidikan lainnya yang dikelola kementerian/lembaga terkait 2. Rekap laporan jumlah siswa dari satuan pendidikan keagamaan
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenjang Pendidikan: RA/ sederajat, MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan	-

	nama publikasinya)	

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan jumlah siswa madrasah, santri pada satuan pendidikan daerah 3 T
3	Konsep/Definisi	Persentase kenaikan jumlah peserta didik (siswa atau santri) yang terdaftar pada madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan yang berlokasi di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) dalam periode tertentu dibandingkan dengan jumlah siswa pada periode sebelumnya.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur pertumbuhan partisipasi siswa pada madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan khususnya di daerah 3T. Persentase yang positif menunjukkan adanya peningkatan akses dan keberlanjutan layanan pendidikan keagamaan di daerah dengan tantangan geografis, sosial, atau ekonomi yang lebih tinggi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = ((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan di daerah 3T pada tahun berjalan b = Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan di daerah 3T pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan di daerah 3T pada tahun berjalan 2. Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan di daerah 3T pada tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pendataan siswa melalui EMIS, SIMPATIKA, atau sistem data pendidikan lainnya yang memuat klasifikasi wilayah 3T 2. Rekap laporan jumlah siswa dari satuan pendidikan keagamaan yang terletak di wilayah 3T
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenjang Pendidikan: RA/ sederajat, MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia	-

	publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase Anak Kelas 1 ula/MI/SDTK/Adhi Widyalyaya/ Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD/TK/Pratama Widyalyaya/Nava Dhammasekha (TK/RA/BA)
3	Konsep/Definisi	Persentase peserta didik kelas 1 pada MI, SDTK, Adhi Widyalyaya, atau Mula Dhammasekha yang sebelumnya pernah mengikuti pendidikan anak usia dini (PAUD), baik formal maupun nonformal.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur capaian layanan PAUD sebagai fondasi kesiapan belajar anak sebelum memasuki pendidikan dasar. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak anak yang memperoleh stimulasi dan pembelajaran awal melalui PAUD.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah siswa kelas 1 MI, SDTK, Adhi Widyalyaya, atau Mula Dhammasekha yang pernah mengikuti PAUD b = Total jumlah siswa kelas 1 MI, SDTK, Adhi Widyalyaya, atau Mula Dhammasekha
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah siswa kelas 1 MI, SDTK, Adhi Widyalyaya, atau Mula Dhammasekha yang pernah mengikuti PAUD 2. Total jumlah siswa kelas 1 MI, SDTK, Adhi Widyalyaya, atau Mula Dhammasekha
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pendataan riwayat pendidikan anak melalui sistem EMIS, PPDB, atau instrumen pendataan siswa baru 2. Laporan satuan pendidikan mengenai latar belakang pendidikan anak sebelum masuk kelas 1
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan satuan pendidikan: MI, SDTK, Adhi Widyalyaya, Mula Dhammasekha
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah pada Madrasah/Satuan Keagamaan lainnya
3	Konsep/Definisi	Persentase satuan pendidikan yang menyediakan layanan kesehatan sekolah, meliputi kegiatan seperti pemeriksaan kesehatan berkala, UKS (Usaha Kesehatan Sekolah), pelayanan gizi, kesehatan reproduksi, dan layanan promotif atau preventif lainnya yang terintegrasi dalam program sekolah.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana satuan pendidikan telah mengimplementasikan layanan kesehatan bagi peserta didik di lingkungan sekolah. Persentase yang tinggi menunjukkan perhatian sekolah terhadap kesehatan fisik, mental, dan kesejahteraan peserta didik.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah b = Total jumlah satuan pendidikan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah 2. Total jumlah satuan pendidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pendataan melalui sistem EMIS, Dapodik, atau survei layanan kesehatan sekolah oleh kementerian/lembaga terkait 2. Laporan satuan pendidikan tentang kegiatan UKS dan layanan kesehatan lainnya
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: RA/ sederajat, MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat dan lainnya
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah pada Madrasah/Satuan Keagamaan lainnya
3	Konsep/Definisi	Persentase satuan pendidikan yang menyediakan layanan kesehatan sekolah, meliputi kegiatan seperti pemeriksaan kesehatan berkala, UKS (Usaha Kesehatan Sekolah), pelayanan gizi, kesehatan reproduksi, dan layanan promotif atau preventif lainnya yang terintegrasi dalam program sekolah.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana satuan pendidikan telah mengimplementasikan layanan kesehatan bagi peserta didik di lingkungan sekolah. Persentase yang tinggi menunjukkan perhatian sekolah terhadap kesehatan fisik, mental, dan kesejahteraan peserta didik.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah b = Total jumlah satuan pendidikan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah 2. Total jumlah satuan pendidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pendataan melalui sistem EMIS, Dapodik, atau survei layanan kesehatan sekolah oleh kementerian/lembaga terkait 2. Laporan satuan pendidikan tentang kegiatan UKS dan layanan kesehatan lainnya
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: RA/ sederajat, MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat dan lainnya
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan nonformal keagamaan Islam/Hindu/Buddha yang direvitalisasi
3	Konsep/Definisi	Persentase satuan pendidikan nonformal yang telah direvitalisasi melalui program pemerintah atau lembaga terkait untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan, sarana prasarana, tata kelola, atau kapasitas pendidik.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana upaya peningkatan mutu dilakukan pada satuan pendidikan nonformal. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak lembaga nonformal yang mendapat intervensi perbaikan sehingga diharapkan layanan pendidikannya lebih berkualitas.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan nonformal yang direvitalisasi b = Total jumlah satuan pendidikan nonformal
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan nonformal yang direvitalisasi 2. Total jumlah satuan pendidikan nonformal
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Program revitalisasi satuan pendidikan nonformal oleh kementerian/lembaga terkait 2. Pendataan hasil program revitalisasi dari laporan daerah atau satuan pendidikan nonformal
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikannya : ...
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Persentase santri pesantren dan satuan pendidikan keagamaan yang lulus dengan predikat jayyid jiddan
3	Konsep/Definisi	Persentase dari total santri/siswa pesantren (pada jenjang pendidikan formal yang dinilai) dan satuan pendidikan keagamaan yang lulus pada periode tertentu yang memperoleh predikat kelulusan "Jayyid Jiddan" (Sangat Baik/Bagus Sekali). Predikat ini mengacu pada sistem penilaian berbasis Islam/Arab yang biasanya setara dengan nilai B atau nilai di atas rata-rata yang sangat baik.
4	Interpretasi	Indikator kualitas hasil lulusan dari lembaga pendidikan keagamaan. Semakin tinggi persentase, menunjukkan semakin besar proporsi santri/siswa yang memiliki prestasi akademik dan/atau kompetensi keagamaan yang Sangat Baik saat kelulusan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a/b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah Santri/Siswa Lulus dengan Predikat Jayyid Jiddan b = Jumlah Total Santri/Siswa yang Lulus pada Periode yang Sama
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Santri/Siswa Lulus dengan Predikat Jayyid Jiddan b. Jumlah Total Santri/Siswa yang Lulus pada Periode yang Sama
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pengolahan Data Kelulusan dan Predikat Hasil Belajar Santri/Siswa Berbasis Data Rapor / Laporan Kelulusan
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Lembaga (Pesantren, Pendidikan Keagamaan Non-Islam), Jenjang Pendidikan, dan/atau Berdasarkan Wilayah (Provinsi/Kabupaten/Kota)
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi, Jenis Lembaga/Jenjang.
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti Pendidikan Kesetaraan pada Pesantren
3	Konsep/Definisi	Jumlah anak usia sekolah yang sebelumnya tidak bersekolah (drop out atau tidak pernah mengenyam pendidikan formal) yang kemudian mengikuti program Pendidikan Kesetaraan (setara Paket A, B, atau C) yang diselenggarakan oleh pesantren.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur peran pesantren dalam memperluas akses pendidikan bagi anak yang tidak sekolah melalui jalur Pendidikan Kesetaraan. Angka yang tinggi menunjukkan kontribusi pesantren dalam menekan angka anak tidak sekolah.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus = Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan
6	Nama Variabel Pembangun	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti Pendidikan Kesetaraan pada Pesantren
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pendataan peserta Pendidikan Kesetaraan di pesantren melalui EMIS atau sistem pendataan lembaga nonformal lainnya 2. Laporan program Pendidikan Kesetaraan dari pesantren penyelenggara
8	Ukuran/Satuan	Orang
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang kesetaraan yang diikuti: setara Paket A/ sederajat, Paket B/ sederajat, Paket C/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Nilai keberagamaan siswa keagamaan pada satuan pendidikan umum

3	Konsep/Definisi	Nilai rata-rata hasil pengukuran tingkat keberagamaan siswa pada satuan pendidikan umum yang mencakup dimensi pemahaman, sikap, dan praktik keberagamaan sesuai dengan agama yang dianut masing-masing peserta didik.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk melihat sejauh mana peserta didik pada satuan pendidikan umum memiliki pemahaman dan pengamalan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Nilai yang tinggi menunjukkan internalisasi nilai-nilai keagamaan yang baik dan praktik keberagamaan yang sesuai dengan norma agama serta kehidupan bermasyarakat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Nilai keberagamaan = Total skor hasil asesmen keberagamaan siswa / Jumlah siswa yang diukur Keterangan: Skor diperoleh dari instrumen penilaian keberagamaan yang dikembangkan kementerian/lembaga terkait, menggunakan skala tertentu (misalnya skala 1–5) yang kemudian dirata-ratakan.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Total skor hasil asesmen keberagamaan siswa pada satuan pendidikan umum 2. Jumlah siswa yang mengikuti asesmen keberagamaan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelaksanaan asesmen keberagamaan siswa pada satuan pendidikan umum oleh kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah 2. Pengolahan dan rekapitulasi hasil asesmen untuk menghasilkan nilai rata-rata tingkat keberagamaan siswa
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang satuan pendidikan umum: SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Nilai keberagamaan mahasiswa pada satuan pendidikan tinggi umum
3	Konsep/Definisi	Nilai rata-rata hasil pengukuran tingkat keberagamaan mahasiswa pada satuan pendidikan tinggi umum yang mencakup dimensi pengetahuan, pemahaman, sikap, dan praktik keberagamaan sesuai agama yang dianut masing-masing mahasiswa.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk melihat sejauh mana mahasiswa pada perguruan tinggi umum memiliki tingkat pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan akademik maupun sosial kemasyarakatan. Nilai yang tinggi menunjukkan internalisasi nilai-nilai keberagamaan yang baik, toleran, dan sesuai norma kehidupan beragama dalam masyarakat majemuk.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Nilai keberagamaan = Total skor hasil asesmen keberagamaan mahasiswa / Jumlah mahasiswa yang diukur Keterangan: Skor diperoleh dari instrumen penilaian keberagamaan yang dikembangkan kementerian/lembaga terkait, menggunakan skala tertentu (misalnya skala 1–5) yang kemudian dirata-ratakan.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Total skor hasil asesmen keberagamaan mahasiswa pada satuan pendidikan tinggi umum 2. Jumlah mahasiswa yang mengikuti asesmen keberagamaan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelaksanaan asesmen keberagamaan mahasiswa oleh kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, atau unit kegiatan di perguruan tinggi 2. Rekapitulasi hasil asesmen untuk menghasilkan nilai rata-rata tingkat keberagamaan mahasiswa
8	Ukuran/Satuan	Skor rata-rata (misalnya skala 1–5 atau sesuai instrumen yang digunakan)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang perguruan tinggi umum: diploma, sarjana, magister, doktoral
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa keagamaan
3	Konsep/Definisi	Nilai rata-rata hasil pengukuran tingkat moderasi beragama siswa pada satuan pendidikan yang mencakup dimensi komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi. Nilai ini diperoleh dari instrumen asesmen khusus yang dirancang untuk menilai sejauh mana siswa memiliki sikap keberagamaan yang moderat.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk menggambarkan tingkat internalisasi nilai-nilai moderasi beragama pada siswa. Nilai yang tinggi menunjukkan siswa memiliki sikap keberagamaan yang toleran, menghindari kekerasan, menghargai keragaman, serta memiliki komitmen terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rata-rata nilai = Total skor hasil asesmen penguatan moderasi beragama siswa / Jumlah siswa yang mengikuti asesmen Keterangan: Skor diperoleh dari instrumen survei atau asesmen moderasi beragama yang menggunakan skala tertentu (misalnya skala 1–5), kemudian dihitung rata-rata.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Total skor hasil asesmen penguatan moderasi beragama siswa 2. Jumlah siswa yang mengikuti asesmen moderasi beragama
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelaksanaan asesmen atau survei penguatan moderasi beragama oleh kementerian/lembaga atau pemerintah daerah pada satuan pendidikan 2. Pengolahan dan rekapitulasi hasil asesmen untuk menghasilkan rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa
8	Ukuran/Satuan	Skor Rata-rata
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia	-

	publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan umum yang menerapkan kurikulum agama bermuatan moderasi beragama dan pelestarian lingkungan
3	Konsep/Definisi	Persentase satuan pendidikan umum yang telah mengimplementasikan kurikulum pendidikan agama yang memuat penguatan nilai-nilai moderasi beragama (seperti komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, penerimaan terhadap tradisi) sekaligus memuat muatan pelestarian lingkungan hidup dalam proses pembelajaran.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana satuan pendidikan umum telah menerapkan kurikulum agama yang tidak hanya mengajarkan ajaran pokok agama, tetapi juga mengintegrasikan nilai moderasi beragama dan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak sekolah umum yang menanamkan sikap keberagamaan yang moderat sekaligus mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan hidup.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan umum yang menerapkan kurikulum agama bermuatan moderasi beragama dan pelestarian lingkungan b = Total jumlah satuan pendidikan umum yang menjadi objek penilaian
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan umum yang menerapkan kurikulum agama bermuatan moderasi beragama dan pelestarian lingkungan 2. Total jumlah satuan pendidikan umum yang dinilai penerapan kurikulumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pemantauan dan evaluasi implementasi kurikulum agama pada satuan pendidikan umum oleh kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah 2. Pendataan hasil pengembangan kurikulum pada laporan akademik satuan pendidikan
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang satuan pendidikan umum: SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan	-

	nama publikasinya)	

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan umum yang memperoleh peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan melalui dukungan sarana ibadah dan fasilitas pendidikan keagamaan
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan proporsi satuan pendidikan umum yang mengalami peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan karena adanya penguatan sarana ibadah dan fasilitas pendidikan keagamaan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak satuan pendidikan umum yang difasilitasi dan didukung dalam penguatan infrastruktur keagamaan guna meningkatkan mutu pembelajaran agama.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan umum yang memperoleh peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan melalui dukungan sarana b = Jumlah total satuan pendidikan umum
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan umum yang memperoleh dukungan sarana 2. Jumlah total satuan pendidikan umum
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Evaluasi Dukungan Sarana Ibadah dan Fasilitas Pendidikan Keagamaan pada Satuan Pendidikan Umum
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahun
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat, SMK/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama
3	Konsep/Definisi	Persentase pertumbuhan jumlah lulusan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk guru mata pelajaran agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu) dalam periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. PPG agama adalah program pendidikan setelah program sarjana yang mempersiapkan lulusan menjadi guru profesional pada bidang studi pendidikan agama.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa besar peningkatan jumlah lulusan program PPG agama dari tahun ke tahun. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak guru agama yang telah menempuh jalur profesional melalui PPG, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan agama pada semua jenjang satuan pendidikan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase peningkatan = $[(a - b) / b] \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah lulusan PPG agama pada tahun berjalan b = Jumlah lulusan PPG agama pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama pada tahun berjalan 2. Jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama pada tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyelenggaraan program Pendidikan Profesi Guru agama oleh perguruan tinggi penyelenggara PPG 2. Pendataan kelulusan PPG agama yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan	-

	nama publikasinya)	

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru dan tenaga kependidikan Pendidikan agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan
3	Konsep/Definisi	Persentase jumlah rekomendasi terkait pengadaan (penambahan) dan pemerataan distribusi guru pendidikan agama yang diterbitkan berdasarkan analisis rencana kebutuhan guru terhadap total rencana kebutuhan guru agama yang telah disusun.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah telah menindaklanjuti hasil perencanaan kebutuhan guru agama dengan menerbitkan rekomendasi formal untuk pengadaan dan pemerataan distribusi guru agama. Persentase yang tinggi menunjukkan proses perencanaan kebutuhan guru agama berjalan baik dan direspons dengan penerbitan rekomendasi kebijakan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama yang diterbitkan berbasis rencana kebutuhan b = Total rencana kebutuhan guru agama yang telah disusun dan siap ditindaklanjuti
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama yang diterbitkan berbasis rencana kebutuhan 2. Total rencana kebutuhan guru agama yang telah disusun
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyusunan rencana kebutuhan guru agama berdasarkan analisis data kebutuhan dan ketersediaan guru 2. Penerbitan rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama oleh kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah	-

	tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan dosen agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan proporsi rekomendasi pengadaan dan pemerataan tenaga kependidikan Pendidikan Agama Islam (PAI) yang disusun dan diterbitkan berdasarkan analisis kebutuhan riil satuan pendidikan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini mencerminkan semakin baik perencanaan dan pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan PAI secara tepat sasaran dan merata sesuai dengan kondisi lapangan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah rekomendasi yang diterbitkan berbasis rencana kebutuhan b = Jumlah total rekomendasi pengadaan dan pemerataan tenaga kependidikan PAI
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah rekomendasi berbasis rencana kebutuhan 2. Jumlah total rekomendasi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendataan dan Evaluasi Rekomendasi Pengadaan serta Pemerataan Tenaga Kependidikan PAI berbasis Rencana Kebutuhan
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan wilayah administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase guru agama, dosen agama, dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik
3	Konsep/Definisi	Persentase guru mata pelajaran agama dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang memperoleh nilai minimal kategori baik pada dimensi moderasi beragama dalam rapor hasil Asesmen Kompetensi. Nilai moderasi beragama ini menggambarkan sejauh mana guru agama dan tenaga kependidikan memiliki sikap keberagamaan yang moderat, toleran, anti-kekerasan, dan menghargai kebhinekaan.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat internalisasi nilai-nilai moderasi beragama pada guru agama dan tenaga kependidikan berdasarkan hasil asesmen kompetensi. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak guru agama dan tenaga kependidikan yang memiliki pandangan keagamaan yang inklusif, toleran, dan selaras dengan prinsip moderasi beragama.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah guru agama dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal kategori baik pada rapor hasil Asesmen Kompetensi b = Total guru agama dan tenaga kependidikan yang mengikuti Asesmen Kompetensi
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah guru agama dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal kategori baik 2. Total guru agama dan tenaga kependidikan yang mengikuti Asesmen Kompetensi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi oleh kementerian/lembaga terkait yang memuat penilaian moderasi beragama 2. Rekapitulasi hasil rapor Asesmen Kompetensi guru agama dan tenaga kependidikan
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Rasio guru madrasah terhadap siswa yang memenuhi SNP
3	Konsep/Definisi	Perbandingan jumlah guru pada madrasah dengan jumlah siswa di madrasah tersebut, yang menunjukkan sejauh mana rasio ini memenuhi ketentuan rasio ideal sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan untuk jenjang pendidikan tertentu.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur ketersediaan guru di madrasah dalam melayani siswa secara optimal sesuai standar minimal yang diatur dalam SNP. Rasio yang memenuhi SNP mencerminkan terpenuhinya standar layanan pendidikan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan efektif.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Rasio} = 1 : (\text{Jumlah siswa} / \text{Jumlah guru})$ (Hasil rasio kemudian dibandingkan dengan rasio maksimal sesuai SNP pada masing-masing jenjang)
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah guru madrasah 2. Jumlah siswa madrasah
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pendataan jumlah guru madrasah oleh kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah 2. Pendataan jumlah siswa madrasah pada sistem administrasi pendidikan
8	Ukuran/Satuan	Rasio
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan madrasah: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal
3	Konsep/Definisi	Persentase tenaga kependidikan selain guru, seperti kepala madrasah/sekolah, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga kebersihan, yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan dan kompetensi kerja sesuai ketentuan standar nasional atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan standar minimal kualifikasi pendidikan dan kompetensi bagi tenaga kependidikan lainnya di satuan pendidikan. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin baik kualitas SDM pendukung pendidikan dalam menjalankan tugas layanan administrasi, manajemen, dan teknis penunjang proses belajar mengajar.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah tenaga kependidikan lainnya yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 dan sertifikasi kompetensi b = Total jumlah tenaga kependidikan lainnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah tenaga kependidikan lainnya yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 dan sertifikasi kompetensi 2. Jumlah tenaga kependidikan lainnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Verifikasi data kualifikasi pendidikan dan kompetensi tenaga kependidikan melalui sistem informasi pendidikan 2. Pendataan dan penilaian kesesuaian dengan standar minimal yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga terkait 3. Pemberian bantuan pendidikan 4. Peningkatan pelatihan dan pendidikan administrasi dan teknis sesuai jabatan fungsional
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase guru agama yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil pada pendidikan keagamaan
3	Konsep/Definisi	Persentase guru pada satuan pendidikan yang memperoleh nilai minimal predikat terampil pada rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG). AKG adalah asesmen yang dilakukan untuk mengukur kompetensi pedagogik dan profesional guru sesuai standar kompetensi yang ditetapkan.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kualitas kompetensi guru dalam aspek pedagogik dan profesional telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak guru yang memiliki kemampuan mengajar, merencanakan pembelajaran, mengelola kelas, serta menguasai materi ajar dengan baik.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah guru yang memperoleh nilai rapor hasil AKG minimal predikat terampil b = Total jumlah guru yang mengikuti AKG
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah guru yang memperoleh nilai rapor hasil AKG minimal predikat terampil 2. Total jumlah guru yang mengikuti AKG
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Guru (AKG) oleh kementerian/lembaga terkait 2. Rekapitulasi dan publikasi hasil rapor AKG yang mencantumkan predikat kompetensi guru
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederaja
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan	-

	nama publikasinya)	

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Persentase Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) minimal predikat terampil
3	Konsep/Definisi	Persentase Kepala Madrasah yang mendapatkan nilai minimal pada kategori terampil dalam rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK). AKK adalah asesmen yang dilakukan untuk mengukur kompetensi manajerial, supervisi akademik, kewirausahaan, dan kompetensi lainnya yang wajib dimiliki oleh kepala madrasah.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk melihat sejauh mana kualitas kompetensi Kepala Madrasah telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak Kepala Madrasah yang memiliki kompetensi memadai dalam memimpin, mengelola satuan pendidikan, melakukan supervisi, serta mendorong inovasi di madrasah.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKK minimal predikat terampil b = Total Kepala Madrasah yang mengikuti AKK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKK minimal predikat terampil 2. Total Kepala Madrasah yang mengikuti AKK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) oleh kementerian/lembaga terkait 2. Rekapitulasi hasil rapor AKK yang memuat predikat kompetensi Kepala Madrasah
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang madrasah: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Persentase guru dan tenaga kependidikan Madrasah yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik
3	Konsep/Definisi	Persentase guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang memperoleh nilai minimal kategori baik pada dimensi moderasi beragama dalam rapor hasil Asesmen Kompetensi. Nilai moderasi beragama ini menggambarkan tingkat penguasaan sikap keberagamaan yang moderat, toleran, anti-kekerasan, dan menghargai kebhinekaan.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana guru dan tenaga kependidikan memiliki pemahaman dan sikap keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi beragama. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak guru dan tenaga kependidikan yang mampu menginternalisasi nilai-nilai keberagamaan yang moderat, serta dapat menjadi teladan dalam membangun lingkungan pendidikan yang inklusif dan harmonis.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal kategori baik pada rapor hasil Asesmen Kompetensi b = Total guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti Asesmen Kompetensi
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal kategori baik 2. Total guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti Asesmen Kompetensi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi oleh kementerian/lembaga terkait yang memuat dimensi penilaian moderasi beragama 2. Pengolahan dan publikasi hasil rapor Asesmen Kompetensi guru dan tenaga kependidikan
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data?	-

	(Disebutkan nama publikasinya)	

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase pengawas agama yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP) minimal predikat terampil pada pendidikan keagamaan
3	Konsep/Definisi	Persentase pengawas madrasah yang memperoleh nilai minimal pada kategori terampil dalam rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP). AKP adalah asesmen yang dilakukan untuk mengukur kompetensi pengawas dalam melaksanakan supervisi akademik dan manajerial, pembinaan guru dan kepala madrasah, serta pemantauan pelaksanaan standar nasional pendidikan di madrasah.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kompetensi pengawas madrasah telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak pengawas madrasah yang memiliki kemampuan memadai dalam melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan mutu madrasah.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah pengawas madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKP minimal predikat terampil b = Total pengawas madrasah yang mengikuti AKP
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah pengawas madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKP minimal predikat terampil 2. Total pengawas madrasah yang mengikuti AKP
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP) oleh kementerian/lembaga terkait 2. Pengolahan dan rekapitulasi hasil rapor AKP pengawas madrasah
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang madrasah binaan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase guru agama yang meningkat jenjang karir pada pendidikan keagamaan
3	Konsep/Definisi	Persentase guru pada satuan pendidikan yang mengalami peningkatan jenjang karir, yaitu naik dari jabatan fungsional lama ke jabatan fungsional yang lebih tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional guru. Jenjang karir guru umumnya meliputi: Guru Pertama, Guru Muda, Guru Madya, dan Guru Utama.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur perkembangan karir guru sebagai salah satu bentuk apresiasi terhadap peningkatan kompetensi, kinerja, dan pemenuhan angka kredit. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak guru yang terdorong untuk terus mengembangkan diri dan memenuhi persyaratan kenaikan pangkat/jabatan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah guru yang naik jenjang karir dalam periode tertentu b = Total guru pada periode yang sama
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah guru yang meningkat jenjang karir 2. Total jumlah guru
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penilaian dan penetapan angka kredit guru 2. Proses kenaikan pangkat/jabatan fungsional guru yang dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan	-

	nama publikasinya)	

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase pengawas agama yang meningkat jenjang karir pada pendidikan keagamaan
3	Konsep/Definisi	Persentase pengawas madrasah yang mengalami peningkatan jenjang karir, yaitu naik dari jabatan fungsional pengawas madrasah pada jenjang tertentu ke jenjang yang lebih tinggi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional pengawas.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur perkembangan karir pengawas madrasah sebagai bentuk penghargaan terhadap peningkatan kompetensi, kinerja, dan pemenuhan angka kredit. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak pengawas madrasah yang terdorong untuk meningkatkan kualitas diri dan memenuhi persyaratan kenaikan jabatan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah pengawas satuan pendidikan yang meningkat jenjang karir dalam periode tertentu b = Total pengawas satuan pendidikan pada periode yang sama
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah pengawas satuan pendidikan yang meningkat jenjang karir 2. Total pengawas satuan pendidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penilaian dan penetapan angka kredit pengawas pada satuan pendidikan 2. Proses kenaikan pangkat/jabatan fungsional pengawas madrasah oleh kementerian/lembaga terkait
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Pengawas pada Satuan Pendidikan Umum dengan kekhasan agama dan Satuan Pendidikan Keagamaan 2. Pengawas pada Satuan Pendidikan Umum
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data?	-

	(Disebutkan nama publikasinya)	

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: a literasi membaca b numerasi
3	Konsep/Definisi	Rata-rata skor capaian peserta didik pada asesmen kompetensi tingkat nasional (AKM) dalam aspek literasi membaca dan numerasi, yaitu kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan teks tertulis serta kemampuan berpikir menggunakan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari.
4	Interpretasi	Nilai rata-rata ini mencerminkan tingkat penguasaan kompetensi minimum siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Semakin tinggi skor rata-rata, semakin baik penguasaan literasi membaca dan numerasi siswa. Indikator ini berguna untuk melihat efektivitas pembelajaran dan kesetaraan hasil belajar di berbagai daerah dan jenjang pendidikan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Nilai rata-rata = $(\sum \text{ skor peserta didik}) / (\text{jumlah peserta didik})$
6	Nama Variabel Pembangun	1. Skor literasi membaca peserta didik 2. Skor numerasi peserta didik 3. Jumlah peserta didik yang mengikuti AKM
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Asesmen Nasional (AN) – Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Satuan Pendidikan
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Rapor Pendidikan Kemendikdasmen

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Nilai keberagamaan siswa pada satuan pendidikan agama
3	Konsep/Definisi	Nilai keberagamaan siswa mencerminkan tingkat internalisasi nilai-nilai ajaran agama dalam sikap dan perilaku siswa madrasah. Ini meliputi dimensi keimanan, ketaatan beribadah, akhlak, toleransi, serta tanggung jawab sosial sebagai bagian dari pengamalan ajaran agama.
4	Interpretasi	Semakin tinggi nilai keberagamaan menunjukkan semakin baik pemahaman dan implementasi nilai-nilai agama dalam kehidupan siswa sehari-hari, baik di lingkungan madrasah, rumah, maupun masyarakat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rata-rata nilai hasil asesmen keberagamaan siswa: Nilai rata-rata = $(\sum \text{nilai keberagamaan siswa}) / (\text{jumlah siswa asesmen})$ Nilai diukur melalui instrumen asesmen psikometrik, observasi, atau penilaian guru.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Skor individual keberagamaan siswa 2. Jumlah siswa responden
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Evaluasi dan Asesmen Keberagamaan Siswa Madrasah
8	Ukuran/Satuan	Skor (skala 0–100 atau kategori: rendah, sedang, tinggi)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama siswa pada satuan pendidikan agama
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur tingkat internalisasi nilai-nilai moderasi beragama pada siswa yang mencakup sikap toleran, anti-kekerasan, cinta tanah air, dan penghargaan terhadap perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi nilai penguatan moderasi beragama, maka semakin baik pemahaman dan pengamalan siswa terhadap prinsip-prinsip moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rata-rata skor hasil asesmen moderasi beragama: $\text{Nilai rata-rata} = (\Sigma \text{ skor penguatan moderasi beragama siswa}) / (\text{jumlah siswa yang diukur})$
6	Nama Variabel Pembangun	1. Nilai/skor penguatan moderasi beragama individu siswa 2. Jumlah siswa responden
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Asesmen dan Evaluasi Penguatan Moderasi Beragama Siswa
8	Ukuran/Satuan	Skor (rentang 0–100) atau skala kategori (rendah, sedang, tinggi)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi satuan pendidikan yang menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan melibatkan partisipasi aktif dari komunitas pendidikan (orang tua, komite sekolah, tokoh masyarakat, dll).
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan bahwa perencanaan program pendidikan di satuan pendidikan melibatkan pemangku kepentingan secara partisipatif, yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan relevansi program dengan kebutuhan lingkungan sekitar.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang menyusun RKT berbasis partisipasi komunitas b = Total jumlah satuan pendidikan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan yang menyusun RKT berbasis partisipasi komunitas 2. Jumlah total satuan pendidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Evaluasi Rencana Kerja Tahunan Satuan Pendidikan
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan proporsi satuan pendidikan yang menerapkan nilai-nilai pendidikan karakter ke dalam proses pembelajaran secara sistematis dan terstruktur.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak satuan pendidikan yang berkomitmen membentuk peserta didik berkarakter melalui integrasi dalam kurikulum dan kegiatan pembelajaran.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran b = Jumlah total satuan pendidikan yang menjadi sasaran
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter 2. Jumlah total satuan pendidikan sasaran
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Evaluasi Implementasi Kurikulum pada Satuan Pendidikan
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, dan MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan peningkatan capaian nilai-nilai karakter siswa yang diperoleh melalui partisipasi aktif dalam kegiatan kepramukaan.
4	Interpretasi	Angka ini mencerminkan seberapa besar pengaruh kegiatan kepramukaan dalam membentuk dan meningkatkan karakter siswa, terutama pada aspek disiplin, gotong royong, kepemimpinan, dan tanggung jawab.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = ((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Rata-rata nilai karakter siswa setelah mengikuti kegiatan kepramukaan b = Rata-rata nilai karakter siswa sebelum mengikuti kegiatan kepramukaan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Nilai karakter siswa pra-kegiatan kepramukaan 2. Nilai karakter siswa pasca-kegiatan kepramukaan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyelenggaraan pembelajaran berbasis pendidikan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila 2. Peningkatan kegiatan ekstrakurikuler dan kepramukaan 3. Fasilitasi peningkatan dan pendampingan kegiatan kepramukaan
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, dan MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan pada pendidikan keagamaan
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan proporsi perangkat kurikulum yang telah melalui proses evaluasi dan pengembangan agar selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian terhadap lingkungan.
4	Interpretasi	Angka ini menunjukkan komitmen dan upaya sistem pendidikan dalam merevisi dan menyempurnakan kurikulum agar mendukung pembentukan karakter siswa yang peduli sesama dan lingkungan hidup.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan dengan muatan cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan b = Jumlah total perangkat kurikulum yang ada
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan 2. Jumlah total perangkat kurikulum
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menunjukkan proporsi materi ajar digital yang telah dikembangkan dan secara aktif dimanfaatkan dalam kegiatan belajar mengajar.
4	Interpretasi	Angka ini mencerminkan kesiapan dan adopsi teknologi digital dalam mendukung proses pembelajaran, serta sejauh mana materi ajar digital digunakan oleh pendidik dan peserta didik.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah materi ajar digital yang digunakan dalam pembelajaran b = Jumlah total materi ajar digital yang tersedia
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah materi ajar digital yang tersedia 2. Jumlah materi ajar digital yang digunakan dalam pembelajaran
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Inventarisasi dan Evaluasi Pemanfaatan Materi Ajar Digital pada Satuan Pendidikan
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase PAUD/RA yang terakreditasi minimal B
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan Raudhatul Athfal (RA) yang telah memperoleh status akreditasi minimal peringkat B dari lembaga akreditasi yang berwenang.
4	Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyaknya PAUD/RA yang telah memenuhi standar mutu pendidikan minimal sesuai peringkat akreditasi B.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah PAUD/RA/Taman Seminari/Pratama Widyalyaya/Nava Dhammasekha yang terakreditasi minimal peringkat B b = Total jumlah PAUD/RA/Taman Seminari/Pratama Widyalyaya/Nava Dhammasekha
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah PAUD/RA/Taman Seminari/Pratama Widyalyaya/Nava Dhammasekha terakreditasi minimal B 2. Total jumlah PAUD/RA/Taman Seminari/Pratama Widyalyaya/Nava Dhammasekha
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Akreditasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini/RA
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis pendidikan: PAUD/RA/Taman Seminari/Pratama Widyalyaya/Nava Dhammasekha
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase MI/SDTK/Adhi Widyalyaya/Mula Dhammasekha yang terakreditasi minimal B
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi satuan pendidikan dasar berbasis keagamaan dan kepercayaan yang telah memperoleh akreditasi minimal peringkat B dari lembaga akreditasi pendidikan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak satuan pendidikan pada jenjang dasar tersebut yang telah memenuhi standar mutu pendidikan sesuai peringkat akreditasi minimal B.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah MI/SDTK/Adhi Widyalyaya/Muda Dhammasekha yang terakreditasi minimal peringkat B b = Total jumlah MI/SDTK/Adhi Widyalyaya/Muda Dhammasekha
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah MI/SDTK/Adhi Widyalyaya/Muda Dhammasekha yang terakreditasi minimal B 2. Total MI/SDTK/Adhi Widyalyaya/Muda Dhammasekha
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Akreditasi Satuan Pendidikan Dasar
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis pendidikan: MI/SDTK/Adhi Widyalyaya/Muda Dhammasekha
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase MTs/SMPTK/Madyama Widyalyaya/Muda Dhammasekha yang terakreditasi minimal B
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi satuan pendidikan menengah pertama berbasis keagamaan dan kepercayaan yang telah memperoleh akreditasi minimal peringkat B dari lembaga akreditasi pendidikan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak satuan pendidikan pada jenjang menengah pertama tersebut yang telah memenuhi standar mutu pendidikan sesuai peringkat akreditasi minimal B.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah MTs/SMPTK/Madyama Widyalyaya/Muda Dhammasekha yang terakreditasi minimal peringkat B b = Total jumlah MTs/SMPTK/Madyama Widyalyaya/Muda Dhammasekha
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah MTs/SMPTK/Madyama Widyalyaya/Muda Dhammasekha yang terakreditasi minimal B 2. Total MTs/SMPTK/Madyama Widyalyaya/Muda Dhammasekha
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Akreditasi Satuan Pendidikan Menengah Pertama
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis pendidikan: MTs/SMPTK/Madyama Widyalyaya/Muda Dhammasekha
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase MA/SMTK/SMAK/Utama Widyalyaya/Uttama Dhammasekha yang terakreditasi minimal B
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi Madrasah Aliyah (MA) yang telah memperoleh akreditasi minimal peringkat B dari lembaga akreditasi pendidikan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak MA yang telah memenuhi standar mutu pendidikan sesuai dengan kriteria minimal peringkat akreditasi B.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah MA/SMTK/SMAK/Utama Widyalyaya/Uttama Dhammasekha yang terakreditasi minimal peringkat B b = Total jumlah MA/SMTK/SMAK/Utama Widyalyaya/Uttama Dhammasekha
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah MA/SMTK/SMAK/Utama Widyalyaya/Uttama Dhammasekha yang terakreditasi minimal peringkat B 2. Total jumlah MA/SMTK/SMAK/Utama Widyalyaya/Uttama Dhammasekha
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Akreditasi Satuan Pendidikan Menengah Atas
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi satuan pendidikan yang telah memenuhi kriteria sebagai satuan pendidikan unggul berdasarkan standar yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga terkait.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan pendidikan dengan kualitas unggul sesuai indikator mutu dan keunggulan tertentu (akademik, karakter, inovasi, dll).
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang terselenggara sebagai satuan pendidikan unggul b = Total jumlah satuan pendidikan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan unggul 2. Total jumlah satuan pendidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Evaluasi dan Penetapan Satuan Pendidikan Unggul
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: PAUD/ sederajat, MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase Madrasah yang menerapkan program pendidikan bilingual
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi madrasah yang menyelenggarakan program pendidikan dengan dua bahasa pengantar, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa asing (umumnya bahasa Inggris atau bahasa Arab), dalam proses pembelajarannya.
4	Interpretasi	Persentase yang lebih tinggi menunjukkan semakin banyak madrasah yang memberikan layanan pendidikan bilingual, yang berpotensi meningkatkan kompetensi bahasa siswa dan daya saing lulusan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah madrasah yang menerapkan program pendidikan bilingual b = Total jumlah madrasah
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah madrasah dengan program pendidikan bilingual 2. Total jumlah madrasah
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Evaluasi Implementasi Program Pendidikan Bilingual pada Madrasah
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi siswa pada satuan pendidikan yang berpartisipasi dalam ajang kompetisi berskala nasional atau internasional di bidang akademik, non-akademik, atau keagamaan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak siswa yang aktif dan memiliki daya saing di tingkat nasional maupun internasional, mencerminkan kualitas pembinaan dan dukungan sekolah/madrasah.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional b = Total jumlah siswa
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah siswa peserta kompetisi nasional/internasional 2. Total jumlah siswa
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendataan dan Evaluasi Partisipasi Siswa dalam Ajang Kompetisi Nasional dan Internasional
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Persentase madrasah dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi madrasah yang menerapkan tata kelola satuan pendidikan secara partisipatif (melibatkan komunitas sekolah, komite, orang tua, dan pihak lain) dan memperoleh penilaian pada kategori baik dalam aspek pengelolaan tersebut.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak madrasah yang melaksanakan prinsip good governance dalam pengelolaan pendidikan, yang berkontribusi pada peningkatan mutu layanan pendidikan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah madrasah dengan nilai pengelolaan partisipatif kategori baik b = Total jumlah madrasah yang dinilai pengelolaannya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Nilai pengelolaan madrasah 2. Kategori penilaian pengelolaan 3. Jumlah madrasah dinilai
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Evaluasi Pengelolaan Madrasah
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Persentase MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi Madrasah Aliyah (MA) yang memiliki program kejuruan atau keterampilan dan menjalin kemitraan aktif dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran, magang, praktik kerja lapangan, atau penyaluran lulusan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang memiliki keterhubungan dengan kebutuhan dunia kerja, sehingga meningkatkan relevansi dan daya saing lulusan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang memiliki kerja sama aktif dengan dunia kerja/industri b = Total MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang ada
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah MA Kejuruan/MA Program Keterampilan 2. Status kerja sama dengan dunia kerja/industri
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendataan dan Evaluasi Kerjasama MA Kejuruan/MA Program Keterampilan dengan Dunia Kerja/Industri
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MA/sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Persentase MA Kejuruan dan MA Program Keterampilan yang meningkatkan life skill melalui program magang
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi Madrasah Aliyah (MA) Kejuruan dan MA Program Keterampilan yang menyelenggarakan program magang (praktik kerja lapangan) bagi peserta didik sebagai bagian dari pembelajaran untuk peningkatan keterampilan hidup (life skill), baik hard skill maupun soft skill.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini mencerminkan semakin banyak satuan pendidikan yang memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan kompetensi praktis dan kesiapan kerja melalui pengalaman langsung di dunia kerja.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah MA Kejuruan dan MA Program Keterampilan yang menyelenggarakan program magang untuk peningkatan life skill b = Total jumlah MA Kejuruan dan MA Program Keterampilan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah MA Kejuruan dan MA Program Keterampilan 2. Status pelaksanaan program magang yang bertujuan meningkatkan life skill
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Evaluasi Program Magang dan Pengembangan Life Skill pada MA Kejuruan/MA Program Keterampilan
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Persentase lulusan MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang mendapatkan pekerjaan /bekerja dalam waktu kurang dari 1 tahun
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi lulusan dari MA Kejuruan dan MA Program Keterampilan yang berhasil memperoleh pekerjaan atau bekerja (baik formal maupun informal) dalam kurun waktu kurang dari satu tahun setelah lulus.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin efektifnya pendidikan kejuruan/keterampilan dalam menyiapkan peserta didik untuk masuk ke dunia kerja secara cepat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah lulusan MA Kejuruan/MA Program Keterampilan yang bekerja dalam waktu < 1 tahun setelah lulus b = Total jumlah lulusan MA Kejuruan/MA Program Keterampilan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Status pekerjaan lulusan (< 1 tahun setelah lulus) 2. Total lulusan pada tahun berjalan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Tracer Study Lulusan MA Kejuruan/MA Program Keterampilan
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan jumlah publikasi dakwah yang diterbitkan
3	Konsep/Definisi	Publikasi dakwah merujuk pada berbagai bentuk media (cetak, digital, audiovisual) yang berisi pesan-pesan keagamaan Islam untuk tujuan pendidikan, pencerahan, dan penguatan nilai-nilai keagamaan di masyarakat.
4	Interpretasi	Indikator ini menunjukkan tren peningkatan jumlah karya dakwah yang diterbitkan dari tahun ke tahun. Kenaikan persentase mencerminkan aktivitas dakwah yang semakin aktif, produktif, dan luas jangkauannya.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah publikasi dakwah yang diterbitkan pada tahun berjalan b = Jumlah publikasi dakwah yang diterbitkan pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah publikasi dakwah tahun berjalan 2. Jumlah publikasi dakwah tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendataan dan Evaluasi Publikasi Dakwah
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Tidak diklasifikasikan berdasarkan jenjang pendidikan, tetapi bisa dikategorikan berdasarkan jenis media (misalnya: buku, jurnal, video, media sosial, dll) jika diperlukan.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Persentase Satuan pendidikan formal pesantren yang memperoleh hasil asesmen minimal jayyid
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menunjukkan proporsi satuan pendidikan formal di pesantren (seperti Mu'adalah, Ma'had Aly, dan pendidikan diniyah formal) yang telah menjalani asesmen mutu dan mendapat hasil minimal kategori jayyid (baik).
4	Interpretasi	Angka ini mencerminkan kualitas pendidikan formal di pesantren, menunjukkan efektivitas manajemen, kurikulum, dan proses pembelajaran yang sesuai dengan standar mutu pendidikan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan formal pesantren yang memperoleh hasil asesmen minimal jayyid b = Jumlah total satuan pendidikan formal pesantren yang diasesmen
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan formal pesantren yang diasesmen 2. Jumlah satuan pendidikan formal pesantren yang memperoleh hasil minimal jayyid
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Asesmen Kelembagaan Satuan Pendidikan Formal Pesantren oleh Majelis Masyayikh
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan tingkat pendidikan: Ula, Wustha, Ulya
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Persentase peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan proporsi peserta didik yang terdaftar dalam program pendidikan kesetaraan (setara SD, SMP, SMA) di lingkungan pesantren atau lembaga pendidikan keagamaan yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan tersebut.
4	Interpretasi	Angka ini menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program kesetaraan dalam mendukung hak pendidikan formal bagi santri atau peserta didik di lembaga keagamaan nonformal. Semakin tinggi angkanya, semakin efektif sistem pendidikan kesetaraan tersebut.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menyelesaikan pendidikan setara formal b = Jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada tahun berjalan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah peserta didik kesetaraan yang lulus 2. Jumlah peserta didik kesetaraan yang terdaftar
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Revitalisasi pendidikan formal dan non formal 2. Penjaringan peserta didik pada jalur pendidikan non formal 3. Pemberian bantuan pendidikan bagi siswa
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang kesetaraan: SD, SMP, dan SMA
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Persentase satuan Pendidikan pesantren dan Pendidikan keagamaan yang dinilai dan dievaluasi mutunya
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menunjukkan proporsi satuan pendidikan pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya yang telah menjalani proses penilaian dan evaluasi mutu pendidikan dalam periode tertentu.
4	Interpretasi	Angka ini mencerminkan tingkat pelaksanaan penjaminan mutu terhadap pendidikan keagamaan. Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak lembaga yang dipantau kualitasnya untuk peningkatan mutu pendidikan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan pesantren dan keagamaan yang telah dinilai dan dievaluasi mutunya b = Jumlah total satuan pendidikan pesantren dan keagamaan yang menjadi target evaluasi pada tahun berjalan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lembaga dinilai mutunya 2. Jumlah total lembaga sasaran evaluasi mutu
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Evaluasi Mutu Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan tingkat pendidikan: Ula, Wustha, Ulya
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Persentase satuan Pendidikan pesantren dan Pendidikan keagamaan yang mendapatkan pendampingan
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan proporsi lembaga pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menerima program pendampingan dalam aspek kelembagaan, kurikulum, manajemen, atau mutu pendidikan selama periode tertentu.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan semakin luas jangkauan intervensi pemerintah atau lembaga terkait dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas satuan pendidikan keagamaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan pesantren dan keagamaan yang mendapat pendampingan b = Jumlah total satuan pendidikan pesantren dan keagamaan yang menjadi target pendampingan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lembaga yang mendapat pendampingan 2. Jumlah total lembaga sasaran pendampingan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Program Pendampingan Satuan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan tingkat pendidikan: Ula, Wustha, Ulya
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan jumlah lulusan pesantren Internasional
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan tingkat pertumbuhan jumlah lulusan dari pesantren yang berstandar atau berorientasi internasional dalam periode tertentu.
4	Interpretasi	Kenaikan persentase menunjukkan peningkatan kapasitas penyelenggaraan pendidikan di pesantren internasional, sekaligus mencerminkan keberhasilan dalam menghasilkan lulusan yang siap bersaing di tingkat global.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah lulusan pesantren internasional pada tahun berjalan b = Jumlah lulusan pesantren internasional pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lulusan pesantren internasional tahun berjalan 2. Jumlah lulusan tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Tracer Study Lulusan Pendidikan Pesantren Internasional 2. Pemberian Bantuan Pendidikan pada Siswa Pesantren Internasional 3. Penguatan Kualitas Pembelajaran 4. Peningkatan Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional 5. Pengembangan dan Evaluasi Kurikulum/Bahan Ajar sesuai standar, esensial, relevan, dan selaras dengan kebijakan Nasional
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Jenjang Ula 2. Jenjang Wustho 3. Jenjang Ulya
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Persentase lulusan yang mendapatkan pengakuan atas kualifikasinya oleh lembaga pemerintah, pendidikan umum, atau lembaga profesi pada satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan islam
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan proporsi lulusan lembaga pendidikan keagamaan (termasuk pesantren) yang memperoleh pengakuan formal terhadap kompetensi atau kualifikasi mereka dari lembaga otoritatif seperti instansi pemerintah, lembaga pendidikan umum, atau organisasi profesi.
4	Interpretasi	Angka ini mencerminkan sejauh mana kualitas lulusan diakui dan dapat diintegrasikan dalam sistem pendidikan atau dunia kerja yang lebih luas. Semakin tinggi persentasenya, semakin besar penerimaan dan kesetaraan lulusan di ranah formal.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah lulusan yang memperoleh pengakuan formal atas kualifikasinya b = Jumlah total lulusan pada periode yang sama
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lulusan yang diakui secara formal 2. Jumlah total lulusan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Sertifikasi 2. Uji Kompetensi 3. Akreditasi
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis lembaganya: lembaga pemerintah, lembaga pendidikan umum, dan lembaga profesi
11	Level Estimasi	Tahunan
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM
2	Nama Indikator	Persentase Naskah kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan yang dihasilkan
3	Konsep/Definisi	Persentase naskah kebijakan (rekomendasi kebijakan) di bidang pendidikan agama dan keagamaan yang berhasil diselesaikan dan disampaikan oleh BMBPSDM (sebagai think tank Kemenag) dari total target naskah kebijakan yang ditetapkan dalam rencana kerja tahunan. Naskah ini berupa dokumen kajian, pemetaan, atau rekomendasi yang bertujuan mendukung penetapan regulasi atau program strategis di Ditjen terkait.
4	Interpretasi	Indikator yang mengukur efektivitas BMBPSDM dalam menjalankan fungsi perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan berbasis kajian/data, khususnya di sektor pendidikan agama dan keagamaan. Persentase yang tinggi menunjukkan kinerja yang baik dalam menyediakan landasan ilmiah/kajian untuk kebijakan Kemenag.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah Naskah Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan yang Dihasilkan dan Disampaikan b = Jumlah Target Naskah Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan yang Direncanakan (Target Tahunan)
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Naskah Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan yang Dihasilkan dan Disampaikan b. Jumlah Target Naskah Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan yang Direncanakan (Target Tahunan)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Pendidikan (Pendidikan Islam/Madrasah, Pendidikan Keagamaan Non-Islam, Pendidikan Tinggi Keagamaan), dan/atau Jenis Dokumen Kebijakan (Kajian, Pemetaan, Indeksasi).
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

N O	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM
2	Nama Indikator	Tingkat Moderasi Beragama pada Pendidik, Tenaga Kependidikan dan peserta didik yang terfasilitasi penguatan moderasi beragama
3	Konsep/Definisi	Tingkat Moderasi Beragama (MB) adalah hasil pengukuran (biasanya dalam bentuk skor atau indeks) yang mencerminkan cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang adil, seimbang, dan berpegang pada nilai-nilai kemanusiaan serta komitmen kebangsaan. Pengukuran ini dilakukan terhadap pendidik, tenaga kependidikan (GTK), dan peserta didik yang telah mengikuti program Penguatan Moderasi Beragama (PMB) yang difasilitasi oleh Kemenag/BMBPSDM.
4	Interpretasi	Nilai/skor/indeks yang lebih tinggi menunjukkan bahwa kelompok sasaran yang telah mengikuti program PMB memiliki pemahaman, sikap, dan praktik beragama yang lebih moderat, inklusif, dan berkomitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan Indonesia.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = (a / b) Keterangan: a = Total Skor Indeks Moderasi Beragama (IMB) Seluruh Individu Kelompok Sasaran b = Jumlah Individu yang diukur
6	Nama Variabel Pembangun	Rata-Rata Skor Indeks Moderasi Beragama (IMB) Kelompok Sasaran Pasca-PMB
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pengukuran Indeks Moderasi Beragama (IMB) Bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik Pasca-Penguatan Moderasi Beragama
8	Ukuran/Satuan	Indeks
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Periodik
10	Klasifikasi	Berdasarkan Kelompok Sasaran (Pendidik/Guru, Tenaga Kependidikan, Peserta Didik), Tingkat Pendidikan (Dasar/Menengah/Tinggi), dan/atau Wilayah (Provinsi/Balai).
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum,	-

	apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya a)	

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM
2	Nama Indikator	Nilai Kepuasan layanan penyelenggaraan pengembangan kompetensi
3	Konsep/Definisi	Nilai Kepuasan Layanan Pengembangan Kompetensi adalah skor rata-rata yang diperoleh dari hasil survei terhadap peserta (ASN, pendidik, atau pihak terkait lainnya) mengenai tingkat kepuasan mereka terhadap kualitas layanan dalam kegiatan pengembangan kompetensi (pendidikan dan pelatihan/diklat) yang diselenggarakan oleh BMBPSDM (melalui Balai Diklat Keagamaan/BDK atau Pusat). Kepuasan diukur dari aspek pelayanan, materi, fasilitas, dan narasumber/pengajar.
4	Interpretasi	Indikator yang mengukur mutu layanan publik yang diberikan oleh BMBPSDM. Skor yang lebih tinggi (mendekati 4.00 atau 100%) menunjukkan bahwa layanan pengembangan kompetensi yang disediakan memenuhi atau melampaui harapan peserta dan standar kualitas yang ditetapkan
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = (a / b) Keterangan: a = Total Skor Kumulatif Kepuasan dari Seluruh Responden b = Total Jumlah Responden yang Mengisi Survei Kepuasan
6	Nama Variabel Pembangun	a. Total Skor Kumulatif Kepuasan dari Seluruh Responden b. Total Jumlah Responden yang Mengisi Survei Kepuasan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelanggan/Peserta (Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM) Layanan Pengembangan Kompetensi
8	Ukuran/Satuan	Indeks
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Periodik
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Pengembangan Kompetensi (Diklat Teknis, Diklat Fungsional, Diklat Kepemimpinan), Kelompok Sasaran (Guru, Penyuluh, Staf Teknis), dan/atau UPT Pelaksana (Balai Diklat Keagamaan/BDK).
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM
2	Nama Indikator	Nilai kepuasan pengguna terhadap lulusan pengembangan kompetensi
3	Konsep/Definisi	Nilai Kepuasan Pengguna adalah skor rata-rata hasil survei yang mengukur tingkat kepuasan atasan langsung (sebagai pengguna/penerima manfaat) terhadap kompetensi dan kinerja lulusan (ASN, pendidik, atau pegawai lain) yang telah mengikuti program pengembangan kompetensi (pendidikan dan pelatihan/diklat) yang diselenggarakan oleh BMBPSDM. Kepuasan diukur dari aspek penerapan ilmu, perubahan perilaku, dan peningkatan kompetensi di tempat kerja.
4	Interpretasi	Indikator yang mengukur dampak dan efektivitas program pengembangan kompetensi BMBPSDM (Level 3 Kirkpatrick). Skor yang tinggi menunjukkan bahwa pelatihan yang diberikan berhasil meningkatkan kualitas dan kompetensi ASN Kemenag sesuai dengan kebutuhan organisasi/satuan kerja.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = (a / b) Keterangan: a = Total Skor Kumulatif Kepuasan dari Seluruh Atasan Pengguna (Responden) b = Total Jumlah Atasan Pengguna (Responden) yang Mengisi Survei Kepuasan
6	Nama Variabel Pembangun	a. Total Skor Kumulatif Kepuasan dari Seluruh Atasan Pengguna (Responden) b. Total Jumlah Atasan Pengguna (Responden) yang Mengisi Survei Kepuasan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pelaksanaan Survei Kepuasan dan Evaluasi Pasca-Pelatihan (Evaluasi Level 3) terhadap Lulusan Pengembangan Kompetensi
8	Ukuran/Satuan	Indeks
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Periodik
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Pengembangan Kompetensi (Diklat Teknis, Diklat Fungsional, Diklat Kepemimpinan), Kelompok Lulusan (Guru, Penyuluh, Staf Teknis), dan/atau UPT Penyelenggara (BDK).
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM
2	Nama Indikator	Persentase Peningkatan Kompetensi moderasi beragama pada SDM di lembaga pendidikan.
3	Konsep/Definisi	Persentase peningkatan kompetensi Moderasi Beragama (MB) adalah perbandingan antara tingkat pemahaman/sikap Moderasi Beragama yang dimiliki oleh Sumber Daya Manusia (SDM) di lembaga pendidikan (pendidik dan tenaga kependidikan) setelah mengikuti program penguatan MB yang difasilitasi oleh BMBPSDM, dibandingkan dengan kondisi mereka sebelum program. Peningkatan diukur melalui perbandingan skor post-test dan pre-test.
4	Interpretasi	Indikator yang mengukur efektivitas pelatihan/program yang diselenggarakan oleh BMBPSDM dalam mentransformasi pemahaman, sikap, dan praktik Moderasi Beragama di kalangan SDM Kemenag, khususnya yang bertugas di lembaga pendidikan. Persentase peningkatan yang tinggi menunjukkan bahwa program berhasil mencapai tujuan pembinaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a = Skor Rata-Rata Post-test – Skor Rata-Rata Pre-test b = Skor Maksimal Instrumen – Skor Rata-Rata Pre-test
6	Nama Variabel Pembangun	a. Rata-Rata Skor Peningkatan (Gain Score) Kompetensi Moderasi Beragama b. Rata-Rata Skor Maksimal yang Mungkin Dicapai
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Evaluasi Efektivitas Pelatihan/Penguatan Moderasi Beragama (Evaluasi Level 2: Pembelajaran)
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Periodik
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Program (Pelatihan Teknis, TOT, Workshop), Kelompok Sasaran (Pendidik Madrasah, Tenaga Kependidikan, ASN Pendidikan), dan/atau UPT Pelaksana (BDK).
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM
2	Nama Indikator	Persentase Peningkatan Kompetensi manajemen dan kepemimpinan pada SDM di lembaga pendidikan
3	Konsep/Definisi	Persentase peningkatan kompetensi manajemen dan kepemimpinan adalah perbandingan antara tingkat pengetahuan/keterampilan manajerial dan kepemimpinan yang dimiliki oleh SDM di lembaga pendidikan (seperti Kepala Madrasah, Kepala TU, atau pimpinan unit) setelah mengikuti program pengembangan kompetensi (diklat) yang diselenggarakan oleh BMBPSDM, dibandingkan dengan kondisi mereka sebelum program. Peningkatan diukur melalui perbandingan skor post-test dan pre-test (konsep normalized gain).
4	Interpretasi	Indikator yang mengukur efektivitas pelatihan/diklat yang diselenggarakan oleh BMBPSDM dalam mentransformasi kemampuan manajerial dan kepemimpinan SDM Kemenag yang berada di lembaga pendidikan. Persentase peningkatan yang tinggi menunjukkan bahwa program berhasil mencapai tujuan peningkatan kualitas tata kelola lembaga pendidikan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a = Skor Rata-Rata Post-test – Skor Rata-Rata Pre-test b = Skor Maksimal Instrumen – Skor Rata-Rata Pre-test
6	Nama Variabel Pembangun	a. Rata-Rata Skor Peningkatan (Gain Score) Kompetensi Manajemen dan Kepemimpinan (Post-test dikurangi Pre-test) b. Rata-Rata Skor Maksimal yang Mungkin Dicapai (Berdasarkan Skala Instrumen)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Evaluasi Efektivitas Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Pendidikan (Evaluasi Level 2: Pembelajaran)
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Periodik
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Diklat (PIM, Diklat Fungsional, Diklat Teknis), Kelompok Sasaran (Kepala Madrasah, Pengawas, Kepala TU), dan/atau UPT Pelaksana (BDK).
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan	-

	nama publikasinya)	

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM
2	Nama Indikator	Nilai Pemanfaatan Kurikulum dan Sistem Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi SDM Pendidikan
3	Konsep/Definisi	Nilai Pemanfaatan Kurikulum dan SPM adalah skor terukur yang mencerminkan tingkat penerapan dan penggunaan kurikulum pelatihan serta Sistem Penjaminan Mutu (SPM) yang telah ditetapkan oleh BMBPSDM dalam menyelenggarakan program pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pendidikan (misalnya pendidik, kepala madrasah, pengawas). Nilai ini diukur berdasarkan hasil audit internal, evaluasi implementasi, dan/atau survei tracer study.
4	Interpretasi	Indikator yang mengukur efisiensi dan kepatuhan BMBPSDM (Pusat dan Balai Diklat Keagamaan/BDK) terhadap standar operasional dan mutu yang telah ditetapkan, khususnya terkait kurikulum yang relevan dan sistem penjaminan mutu yang kredibel. Nilai yang tinggi menunjukkan konsistensi mutu penyelenggaraan diklat
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a = Total Skor Kepatuhan/Pemanfaatan Kurikulum dan SPM yang Terverifikasi. b = Total Skor Maksimal yang Mungkin Dicapai (Berdasarkan Kriteria Audit/Evaluasi).
6	Nama Variabel Pembangun	a. Total Skor Kepatuhan/Pemanfaatan Kurikulum dan SPM yang Terverifikasi b. Total Skor Maksimal yang Mungkin Dicapai (Berdasarkan Kriteria Audit/Evaluasi)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Audit/Evaluasi Mutu Internal dan Eksternal Pelaksanaan Program Pengembangan Kompetensi dan Kepatuhan SPM
8	Ukuran/Satuan	Indeks
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Program Pengembangan Kompetensi (Diklat Fungsional/Teknis Pendidikan), Jenis Komponen yang Dinilai (Kurikulum, Implementasi SPM), dan/atau UPT Pelaksana (Balai Diklat Keagamaan/BDK)
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Badan Moderasi Beragama dan PSDM
2	Nama Indikator	Persentase lembaga pengembangan kompetensi SDM pendidikan yang memperoleh akreditasi A
3	Konsep/Definisi	Persentase lembaga pengembangan kompetensi di bawah BMBPSDM (yaitu Pusat Pengembangan Kompetensi dan Balai Diklat Keagamaan/BDK) yang menyelenggarakan pelatihan SDM di bidang pendidikan, yang telah memperoleh Akreditasi A (Sangat Baik) dari lembaga akreditasi resmi yang berwenang (misalnya Lembaga Administrasi Negara/LAN atau lembaga akreditasi Diklat terkait). Akreditasi menilai mutu kelembagaan, kurikulum, SDM, sarana, dan pelaksanaan diklat.
4	Interpretasi	Indikator yang mencerminkan kualitas kelembagaan dan penjaminan mutu BMBPSDM dan unit pelaksanaannya. Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga diklat telah diakui secara nasional memiliki standar mutu penyelenggaraan pelatihan kategori terbaik
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah Lembaga Pengembangan Kompetensi SDM Pendidikan yang Memperoleh Akreditasi A b = Jumlah Total Lembaga Pengembangan Kompetensi SDM Pendidikan yang Wajib Akreditasi
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Lembaga Pengembangan Kompetensi SDM Pendidikan yang Memperoleh Akreditasi A b. Jumlah Total Lembaga Pengembangan Kompetensi SDM Pendidikan yang Wajib Akreditasi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pelaksanaan dan Pelaporan Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Lembaga (Pusat Pengembangan Kompetensi, Balai Diklat Keagamaan), dan/atau Wilayah (Balai Diklat Keagamaan per Provinsi/Wilayah Kerja).
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase Peningkatan Buku Pendidikan Agama dan Keagamaan yang mendapat tanda layak terbit
3	Konsep/Definisi	Persentase Peningkatan jumlah buku teks atau non-teks Pendidikan Agama dan Keagamaan (PA & K) yang berhasil memperoleh Tanda Layak Terbit (setelah melalui proses penilaian dan verifikasi) pada tahun berjalan, dibandingkan dengan jumlah buku yang sama pada tahun sebelumnya. Tanda Layak Terbit menunjukkan buku tersebut memenuhi standar substansi, metodologi, dan nilai moderasi beragama Kemenag.
4	Interpretasi	Indikator yang mengukur efisiensi dan produktivitas kinerja unit terkait (dahulu Puslitbang/sekarang di BMBPSDM) dalam melakukan penilaian dan penerbitan rekomendasi buku PA & K, atau mencerminkan peningkatan kualitas naskah buku yang diajukan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah lulusan yang memperoleh pengakuan formal atas kualifikasinya b = Jumlah total lulusan pada periode yang sama
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Buku PA & K Layak Terbit pada Tahun T b. Jumlah Buku PA & K Layak Terbit pada Tahun T-1
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pengolahan Data Penilaian dan Penetapan Kelayakan Terbit Buku Pendidikan Agama dan Keagamaan
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu), Jenis Buku (Teks, Non-Teks), dan Jenjang Pendidikan (Dasar, Menengah).
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase Penerima Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Kekhasan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang tepat Sasaran
3	Konsep/Definisi	Persentase dari total individu atau lembaga yang menerima Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Kekhasan Agama (misalnya Bantuan KIP/PIP Madrasah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah, atau Bantuan Afirmasi lainnya) yang telah terverifikasi sebagai tepat sasaran sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Agama dan/atau regulasi program bantuan.
4	Interpretasi	Indikator efektivitas dan akuntabilitas penyaluran bantuan pendidikan. Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa bantuan alokasi dana pemerintah disalurkan kepada sasaran yang benar-benar berhak dan membutuhkan (misalnya, siswa miskin/rentan atau lembaga yang memenuhi kriteria minimal).
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a/b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah Penerima Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Kekhasan Agama/Keagamaan) yang Dinyatakan Tepat Sasaran b = Jumlah Total Penerima Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Kekhasan Agama/Keagamaan)
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Penerima Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Kekhasan Agama/Keagamaan) yang Dinyatakan Tepat Sasaran b. Jumlah Total Penerima Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Kekhasan Agama/Keagamaan)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Monitoring, Evaluasi, dan Verifikasi Data Penyaluran Bantuan Pendidikan Berbasis Sasaran
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Bantuan (misalnya BOS, PIP, Afirmasi Khusus), Jenis Satuan Pendidikan (Madrasah, Pendidikan Keagamaan Kristen/Katolik/Hindu/Buddha), dan/atau Berdasarkan Wilayah (Provinsi/Kabupaten/Kota).
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi, Jenis Bantuan
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan	-

	nama publikasinya)	

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Persentase siswa madrasah, satuan pendidikan keagamaan Kristen/Katolik/Hindu/Buddha yang lulus dengan predikat sangat baik
3	Konsep/Definisi	Persentase siswa/peserta didik pada seluruh satuan pendidikan formal di bawah binaan Kemenag (meliputi madrasah, serta satuan pendidikan keagamaan Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang lulus pada periode tertentu dengan memperoleh predikat kelulusan "Sangat Baik". Predikat ini dapat mengacu pada istilah lokal (misalnya Mumtaz atau Jayyid Jiddan di madrasah/pesantren) atau kriteria nilai tertinggi yang ditetapkan oleh masing-masing Ditjen Bimas/satuan pendidikan.
4	Interpretasi	Indikator komprehensif yang mengukur kualitas luaran (output) pendidikan Kemenag dari berbagai jalur. Persentase yang tinggi menunjukkan keberhasilan sistem pendidikan dalam menghasilkan lulusan dengan prestasi akademik dan/atau kompetensi keagamaan yang unggul.
5	Metode / Rumus Perhitungan	
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Siswa/Peserta Didik Lulus dengan Predikat "Sangat Baik" b. Jumlah Total Siswa/Peserta Didik yang Lulus pada Tahun Ajaran yang Sama
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Konsolidasi dan Analisis Data Kelulusan Siswa/Peserta Didik Seluruh Satuan Pendidikan Kemenag
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Agama/Satuan Pendidikan (Madrasah / Kristen / Katolik / Hindu / Buddha), Jenjang Pendidikan (MI/MTs/MA/sejenis), dan/atau Wilayah (Provinsi/Kabupaten/Kota).
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi, Jenjang Madrasah
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan	-

	nama publikasinya)	

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
2	Nama Indikator	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler pada satuan keagamaan
3	Konsep/Definisi	Jumlah total penghargaan atau pengakuan (berupa medali, piala, sertifikat, atau sejenisnya) yang diperoleh oleh siswa/peserta didik dari satuan pendidikan keagamaan formal (Madrasah, SMTK/SMAK, Pasraman, Sekolah Minggu Buddha, dll.) dalam kompetisi atau ajang di luar kegiatan intrakurikuler (disebut kegiatan ekstrakurikuler). Prestasi dihitung pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional.
4	Interpretasi	Indikator yang mengukur mutu hasil kegiatan non-akademik/bakat minat dan kontribusi satuan pendidikan keagamaan terhadap pengembangan potensi siswa di bidang non-keagamaan maupun keagamaan (misalnya seni, olahraga, sains, atau lomba pidato keagamaan). Jumlah yang tinggi menunjukkan peran aktif lembaga dalam pembinaan siswa.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Jumlah Prestasi = Total Prestasi yang Dicapai
6	Nama Variabel Pembangun	Jumlah Prestasi yang Diraih Satuan Pendidikan Keagamaan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendataan dan Verifikasi Prestasi Siswa Satuan Pendidikan Keagamaan (Ekstrakurikuler)
8	Ukuran/Satuan	Jumlah (Satuan: Prestasi/Penghargaan)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Agama/Satuan Pendidikan (Madrasah / Kristen / Katolik / Hindu / Buddha), Tingkat Prestasi (Kab/Kota, Prov, Nas, Int), dan/atau Bidang Prestasi (Sains, Olahraga, Seni, Keagamaan).
11	Level Estimasi	Nasional, Jenis Satuan Pendidikan/Agama, Provinsi, Kabupaten/Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Persentase santri yang mengikuti Imtihan Wathani (IW)
3	Konsep/Definisi	Persentase santri yang terdaftar pada program pendidikan kesetaraan (Ula, Wustha, Ulya) di pondok pesantren yang berhak dan telah mengikuti Imtihan Wathani (IW) (Ujian Nasional/Ujian Akhir Berbasis Standar Nasional untuk pendidikan kesetaraan pesantren) pada periode pelaporan yang ditentukan.
4	Interpretasi	Indikator yang mencerminkan tingkat partisipasi santri dalam proses pengakuan negara terhadap pendidikan kesetaraan yang mereka tempuh di pesantren. Persentase yang tinggi menunjukkan efektivitas program dan kesiapan santri untuk mendapatkan ijazah/sertifikat kesetaraan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a - b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah Santri yang Mengikuti Imtihan Wathani (IW) b = Jumlah Santri yang Terdaftar pada Tingkat Akhir Pendidikan Kesetaraan Pesantren (Kohort Peserta IW)
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Santri yang Mengikuti Imtihan Wathani (IW) b. Jumlah Santri yang Terdaftar pada Tingkat Akhir Pendidikan Kesetaraan Pesantren (Kohort Peserta IW)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pelaksanaan, Monitoring, dan Pengolahan Data Hasil Imtihan Wathani (IW) Pesantren
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kesetaraan (Ula/setara SD, Wustha/setara SMP, Ulya/setara SMA) dan/atau Berdasarkan Wilayah (Provinsi/Kabupaten/Kota).
11	Level Estimasi	Nasional, Jenjang Pendidikan, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi Keagamaan
3	Konsep/Definisi	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi adalah persentase jumlah penduduk yang sedang menempuh pendidikan tinggi (Diploma/Sarjana) terhadap jumlah penduduk usia 19–24 tahun. APK dapat melebihi 100% karena menghitung semua yang sedang bersekolah di jenjang tersebut, tanpa memperhitungkan apakah usianya sesuai.
4	Interpretasi	APK Pendidikan Tinggi memberikan gambaran tentang daya serap sistem pendidikan tinggi terhadap penduduk, termasuk mereka yang lebih tua atau lebih muda dari usia ideal pendidikan tinggi. Angka ini mencerminkan aksesibilitas dan keterjangkauan pendidikan tinggi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan/Ma'had Aly b = Jumlah penduduk usia 19–24 tahun
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan/Ma'had Aly b. Jumlah penduduk usia 19–24 tahun
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendataan Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis perguruan tinggi: PTKN, PTKS
11	Level Estimasi	Nasional, dan Perguruan Tinggi Keagamaan
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam

2	Nama Indikator	Persentase lulusan pendidikan tinggi Keagamaan/Ma'had Aly yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun
3	Konsep/Definisi	Persentase lulusan satuan pendidikan tinggi keagamaan, termasuk Ma'had Aly, yang memperoleh pekerjaan (formal/informal) dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan setelah kelulusan.
4	Interpretasi	Indikator ini mencerminkan daya serap lulusan pendidikan tinggi keagamaan terhadap dunia kerja. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik keterkaitan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan pasar kerja.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah lulusan PTK/Ma'had Aly yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun pada periode sebelumnya b = Jumlah lulusan PTK/Ma'had Aly pada periode sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah lulusan pendidikan tinggi keagamaan/Ma'had Aly yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu < 1 tahun setelah lulus b. Jumlah total lulusan pendidikan tinggi keagamaan/Ma'had Aly pada periode yang sama
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Tracer Studi oleh masing-masing Perguruan Tinggi Keagamaan/Ma'had Aly
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahun
10	Klasifikasi	Berdasarkan status kerja: Bekerja < 1 tahun, Bekerja ≥ 1 tahun, Belum Bekerja
11	Level Estimasi	Nasional, dan Perguruan Tinggi Keagamaan
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat THE Impact SDGs

3	Konsep/Definisi	Jumlah perguruan tinggi (PT) yang masuk dalam daftar Times Higher Education (THE) Impact Rankings pada peringkat kurang dari 1000 besar dunia, berdasarkan penilaian kontribusi PT terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).
4	Interpretasi	Indikator ini menunjukkan pengakuan internasional terhadap peran dan kontribusi perguruan tinggi Indonesia dalam mendukung SDGs melalui pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, tata kelola institusi, dan kemitraan. Semakin banyak PT yang masuk <1000 besar, semakin tinggi pengakuan terhadap kinerja keberlanjutan perguruan tinggi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Jumlah PTK/Ma'had Aly dalam peringkat THE Impact Rankings <1000
6	Nama Variabel Pembangun	Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan/Ma'had Aly yang masuk dalam THE Impact Rankings SDGs
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan/Ma'had Aly yang masuk dalam THE Impact Rankings SDGs
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan SDGs Goal
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan jumlah mahasiswa pada PTK/Ma'had Aly

3	Konsep/Definisi	Persentase peningkatan jumlah mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) dan Ma'had Aly adalah ukuran relatif yang menunjukkan perubahan jumlah mahasiswa yang terdaftar aktif pada institusi pendidikan tinggi keagamaan dari periode waktu tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. PTK meliputi Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), dan perguruan tinggi keagamaan swasta yang terakreditasi. Ma'had Aly adalah lembaga pendidikan tinggi pesantren yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesi dalam bidang keagamaan Islam.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur tingkat pertumbuhan partisipasi mahasiswa dalam pendidikan tinggi keagamaan. Nilai positif menunjukkan adanya peningkatan jumlah mahasiswa, sedangkan nilai negatif menunjukkan penurunan. Semakin tinggi persentase peningkatan, semakin baik kinerja dalam memperluas akses pendidikan tinggi keagamaan. Indikator ini mencerminkan daya tarik, kapasitas, dan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan serta efektivitas kebijakan pengembangan pendidikan tinggi keagamaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase peningkatan = $((a - b) / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = jumlah mahasiswa tahun berjalan; b = jumlah mahasiswa tahun sebelumnya.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah mahasiswa tahun berjalan b. Jumlah mahasiswa tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pendataan EMIS PTK dan Ma'had Aly - Verifikasi dan Validasi Data Mahasiswa oleh Setjen Kemenag dan Ditjen Pendis - Monitoring dan Evaluasi Data Mahasiswa
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri (UIN, IAIN, STAIN) - PTK Swasta - Ma'had Aly Berdasarkan Jenjang: - S1/Sarjana - S2/Magister - S3/Doktor
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi

12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Persentase PTK/Ma'had Aly yang terakreditasi
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur proporsi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) pada Ma'had Aly yang telah memiliki status akreditasi, baik akreditasi program studi maupun kelembagaan, oleh lembaga akreditasi yang diakui pemerintah.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase, menunjukkan bahwa semakin banyak PTK di Ma'had Aly yang telah melalui proses penjaminan mutu melalui sistem akreditasi formal, sehingga menjamin kompetensi, kualitas pendidikan, dan standar nasional pendidikan telah dipenuhi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase= $(a/b) \times 100\%$ Dengan: a = Jumlah Ma'had Aly/PTK di Ma'had Aly yang telah terakreditasi b = Jumlah total Ma'had Aly/PTK di Ma'had Aly
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah PTK/Ma'had Aly yang telah terakreditasi b. Jumlah total PTK/Ma'had Aly yang ada
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pelaksanaan akreditasi Ma'had Aly oleh BAN-PT atau LAMDIK/LAMEMBA (jika berlaku) - Pemutakhiran data EMIS dan SIKS-Diktis - Monitoring dan evaluasi mutu Ma'had Aly oleh Ditjen Pendis
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Mutu Pendidikan Keagamaan Tinggi
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi, dan/atau per lembaga Ma'had Aly
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi	-

	data? (Disebutkan nama publikasinya)	
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Persentase dosen dan tenaga kependidikan PTK/Ma'had Aly yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi
3	Konsep/Definisi	Persentase dosen dan tenaga kependidikan Perguruan Tinggi Kejuruan (PTK) yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi sebagai bukti peningkatan keterampilan, pengetahuan, atau keahlian sesuai bidang keahliannya. Sertifikasi ini dapat berupa sertifikat pelatihan, uji kompetensi, atau program pengembangan profesional lainnya yang diakui secara nasional/internasional.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur sejauh mana dosen dan tenaga kependidikan PTK telah meningkatkan kompetensinya melalui program sertifikasi. Persentase yang tinggi menunjukkan komitmen institusi dalam pengembangan SDM dosen dan kualitas pengajaran.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan PTK yang memperoleh sertifikasi kompetensi b = Total Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan PTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah Dosen PTK Bersertifikasi Kompetensi 2. Jumlah Tenaga Kependidikan PTK Bersertifikasi Kompetensi 3. Jumlah Dosen PTK 4. Jumlah Tenaga Kependidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelatihan/sertifikasi dosen oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) atau badan sertifikasi terkait. 2. Program pengembangan dosen (e.g., Microcredential, pelatihan industri). 3. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan/Kebudayaan/Ristek atau mitra industri.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	- Bidang Keahlian: Sertifikasi diklasifikasikan berdasarkan bidang - Jenis Sertifikasi: Sertifikasi nasional (BNSP), internasional, atau pelatihan khusus.

11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Rata-rata masa tunggu lulusan pendidikan tinggi keagamaan untuk mendapatkan pekerjaan
3	Konsep/Definisi	Rata-rata waktu yang dibutuhkan lulusan pendidikan tinggi (sarjana/diploma) sejak kelulusan hingga memperoleh pekerjaan pertama yang dibayar (formal/non-formal)
4	Interpretasi	Indikator ini mencerminkan kecepatan transisi lulusan dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Semakin rendah nilai rata-rata masa tunggu, maka semakin baik daya serap lulusan oleh pasar kerja dan semakin relevan pendidikan yang diperoleh
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Rata-rata masa tunggu} = (\sum \text{waktu tunggu semua lulusan yang bekerja}) / \text{jumlah lulusan yang bekerja}$
6	Nama Variabel Pembangun	Rata-rata Masa Tunggu Lulusan Pendidikan Tinggi (Bulan)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) - Survei Penelusuran Alumni (Tracer Study) oleh perguruan tinggi - Survei Khusus terkait Ketenagakerjaan Lulusan
8	Ukuran/Satuan	Waktu (Bulan)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	- Tahunan (data Sakernas/BPS dirilis setiap tahun). - Periodik (tracer study perguruan tinggi biasanya 1–2 tahun setelah kelulusan)
10	Klasifikasi	Diploma, Sarjana, Magister, Doktor
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Sakernas
NO	Atribut	Keterangan

1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Persentase kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur proporsi perjanjian kerja sama (MoU/MoA/perjanjian kerja lainnya) yang masih aktif dan telah memberikan output berupa program nyata dalam peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, seperti pelatihan, pendampingan, sertifikasi, magang, pertukaran dosen/guru, atau program kemitraan peningkatan kompetensi lainnya.
4	Interpretasi	Persentase kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase= $(a/b) \times 100\%$ Dengan: a = Jumlah kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK b = Jumlah total kerja sama aktif
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK b. Jumlah total kerja sama aktif yang terdata
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pendataan dan pemantauan kerja sama pendidikan oleh unit teknis - Evaluasi program kemitraan peningkatan mutu PTK - Pelaporan kinerja kelembagaan dan kerja sama
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Efektivitas Kemitraan dan Pengembangan SDM Pendidikan
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi, Jenis Lembaga (Madrasah, PTKIN, Satuan Pendidikan Keagamaan, Balai Diklat, dst.)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Indeks Keberagamaan Mahasiswa (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha)

3	Konsep/Definisi	Indeks Keberagamaan Mahasiswa adalah ukuran tingkat penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan mahasiswa pada masing-masing agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang mencakup aspek keyakinan, ibadah, pengetahuan agama, dan perilaku sosial keagamaan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan semakin kuatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan mahasiswa. Indeks dapat digunakan untuk melihat pola keberagamaan antaragama, antarwilayah, maupun antarperguruan tinggi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Indeks} = (\sum \text{skor aspek keagamaan individu} / \text{skor maksimum}) \times 100$
6	Nama Variabel Pembangun	1. Skor keyakinan keagamaan mahasiswa 2. Skor praktik ibadah mahasiswa 3. Skor pengetahuan ajaran agama 4. Skor perilaku sosial keagamaan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survei Indeks Keberagamaan Mahasiswa
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha.
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Jumlah perguruan tinggi keagamaan yang masuk ke dalam peringkat THE Impact SDGs
3	Konsep/Definisi	Persentase perguruan tinggi di tingkat nasional yang berhasil masuk dalam peringkat Times Higher Education (THE) Impact Rankings pada posisi 1000 teratas secara global, dengan fokus pada kontribusi perguruan tinggi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)

4	Interpretasi	Indikator ini mencerminkan sejauh mana perguruan tinggi di Indonesia secara kolektif diakui secara internasional atas dampak positifnya dalam mendukung pencapaian SDGs. Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak perguruan tinggi Indonesia yang memiliki kinerja unggul dan diakui secara global dalam kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan
5	Metode / Rumus Perhitungan	Jumlah = Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan yang masuk ke dalam peringkat THE Impact SDGs
6	Nama Variabel Pembangun	Jumlah total perguruan tinggi yang berpotensi masuk THE Impact Rankings SDGs
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pemeringkatan Times Higher Education (THE) Impact Rankings
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	THE 17 GOALS
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Times Higher Education
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Tinggi Islam
2	Nama Indikator	Persentase PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang memenuhi standar sarana prasarana
3	Konsep/Definisi	Persentase PTK yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi adalah proporsi perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang memiliki fasilitas akademik dan non-akademik sesuai ketentuan standar minimal sarana dan prasarana pendidikan tinggi.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak perguruan tinggi keagamaan yang memiliki sarana dan prasarana memadai sesuai standar nasional pendidikan tinggi.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah PTK/Ma'had Aly yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi dalam periode tertentu; b = Jumlah total PTK/Ma'had Aly yang ada dalam periode yang sama;
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah PTK/Ma'had Aly yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi; 2. Jumlah total PTK/Ma'had Aly.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Verifikasi dan validasi data sarana prasarana melalui EMIS dan monitoring lapangan; - Fasilitasi pembangunan dan rehabilitasi sarpras PTK; - Evaluasi pemenuhan standar sarpras oleh Tim Penjaminan Mutu PTK.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang menyediakan fasilitas yang mendukung Pendidikan Tinggi berbasis gender dan inklusif
3	Konsep/Definisi	Persentase PTK yang menyediakan fasilitas pendidikan berbasis gender dan inklusif adalah ukuran proporsi perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang memiliki sarana, kebijakan, dan lingkungan fisik yang mendukung kesetaraan gender serta akses bagi seluruh kelompok tanpa diskriminasi.

4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini, semakin banyak PTK yang menyediakan dukungan terhadap pendidikan tinggi yang inklusif. Hal ini menunjukkan komitmen lembaga pendidikan dalam memenuhi hak-hak pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah PTK yang menyediakan fasilitas inklusif b = Jumlah PTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah PTK yang menyediakan fasilitas inklusif 2. Jumlah PTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendataan oleh EMIS
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase mahasiswa PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) penerima beasiswa
3	Konsep/Definisi	Persentase mahasiswa PTK penerima beasiswa adalah ukuran proporsi mahasiswa pada perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang memperoleh bantuan biaya pendidikan dari pemerintah, lembaga keagamaan, atau sumber lain yang sah.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase mahasiswa penerima beasiswa, menunjukkan semakin luasnya akses bantuan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa, baik dari pemerintah, institusi, maupun pihak swasta

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa penerima beasiswa b = Jumlah mahasiswa
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa 2. Jumlah Mahasiswa
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pencatatan oleh EMIS
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Jenis Beasiswa: Akademik, Non-Akademik (olahraga/seni), Kebutuhan Ekonomi, Prestasi, dll.
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase mahasiswa kategori UKT kelompok I
3	Konsep/Definisi	Persentase mahasiswa kategori Uang Kuliah Tunggal (UKT) Kelompok I adalah proporsi mahasiswa baru atau mahasiswa aktif di Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang ditetapkan dalam kelompok UKT paling rendah (Kelompok I). Kelompok UKT I ini diperuntukkan bagi mahasiswa dengan kondisi ekonomi paling membutuhkan dan/atau memiliki keterbatasan finansial, sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur tingkat keterjangkauan layanan pendidikan tinggi di PTK. Semakin tinggi persentase mahasiswa yang masuk dalam kategori UKT Kelompok I, menunjukkan semakin efektif upaya Kementerian Agama dan PTK dalam memastikan bahwa pendidikan tinggi dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa kategori UKT Kelompok I b = Jumlah total mahasiswa baru atau mahasiswa aktif
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah mahasiswa kategori UKT Kelompok I pada PTKN 2. Jumlah total mahasiswa baru atau mahasiswa aktif pada PTKN
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Penerapan sistem UKT berbasis data ekonomi mahasiswa - Verifikasi dan validasi ekonomi calon mahasiswa baru (UKT online/offline) - Sosialisasi dan pelaksanaan kebijakan afirmatif UKT
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Tahun Masuk: - Angkatan 202X; - Angkatan 202X-1, dst.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan animo mahasiswa baru
3	Konsep/Definisi	Persentase peningkatan animo mahasiswa baru adalah perubahan persentase jumlah pendaftar baru pada suatu institusi pendidikan tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya
4	Interpretasi	Variabel ini menunjukkan seberapa besar minat calon mahasiswa untuk mendaftar pada institusi tersebut. Peningkatan nilai menunjukkan daya tarik institusi yang meningkat, sedangkan penurunan mengindikasikan menurunnya minat calon mahasiswa

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah pendaftar tahun berjalan b = Jumlah pendaftar tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangunan	1. Jumlah pendaftar tahun berjalan 2. Jumlah pendaftar tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan	Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) atau Rekrutmen Calon Mahasiswa
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase mahasiswa baru yang berkuliah di perguruan tinggi keagamaan (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) berkualitas
3	Konsep/Definisi	Persentase mahasiswa baru yang berkuliah di perguruan tinggi berkualitas adalah rasio antara jumlah mahasiswa baru yang diterima dan terdaftar di Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang telah terakreditasi Unggul/A atau memiliki peringkat terbaik, dibandingkan dengan total seluruh mahasiswa baru yang diterima di PTK pada periode tertentu.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur ketersediaan akses dan pilihan pendidikan tinggi yang berkualitas bagi mahasiswa baru. Semakin tinggi proporsi mahasiswa baru yang memilih dan diterima di PTK berkualitas, menunjukkan semakin efektif upaya Kementerian Agama dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan tinggi dan penyediaan pilihan institusi yang terpercaya.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa baru yang diterima di PTK dengan akreditasi institusi Unggul/A atau peringkat terbaik. b = Jumlah mahasiswa baru yang diterima di seluruh PTK
6	Nama Variabel Pembangunan	1. Jumlah mahasiswa baru yang diterima di PTK dengan akreditasi institusi Unggul/A atau peringkat terbaik. 2. Jumlah mahasiswa baru yang diterima di seluruh PTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan	Penghitungan oleh EMIS
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase mahasiswa baru PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) berkuliah di Prodi STEM terakreditasi unggul
3	Konsep/Definisi	Persentase mahasiswa baru PTK yang berkuliah di program studi STEM terakreditasi unggul adalah ukuran proporsi mahasiswa baru pada perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang terdaftar di program studi bidang Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika (STEM) dengan status akreditasi “Unggul” dari BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak mahasiswa baru di PTK yang memilih program studi STEM dengan mutu akademik tinggi, mencerminkan peningkatan

		kualitas dan relevansi pendidikan tinggi keagamaan terhadap kebutuhan iptek.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Proporsi = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa baru di Prodi STEM terakreditasi Unggul b = Jumlah total mahasiswa baru di seluruh Prodi STEM
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah mahasiswa baru di prodi STEM terakreditasi unggul 2. Jumlah total mahasiswa baru di prodi STEM
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pelaporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) oleh perguruan tinggi
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Ditjen Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Jumlah perguruan tinggi keagamaan (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang terpetakan berdasarkan keunggulannya
3	Konsep/Definisi	Jumlah perguruan tinggi keagamaan yang terpetakan berdasarkan keunggulannya adalah banyaknya PTK (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang telah diklasifikasikan menurut bidang atau capaian unggulan, seperti riset, inovasi, pengabdian masyarakat, tata kelola, dan mutu akademik.

4	Interpretasi	Semakin tinggi jumlah PTK yang terpetakan menunjukkan semakin baiknya pemetaan mutu dan diferensiasi perguruan tinggi keagamaan berdasarkan keunggulan spesifiknya, yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan kebijakan dan pembinaan mutu.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Jumlah = Banyaknya PTK yang telah dikategorikan sesuai hasil pemetaan keunggulan berdasarkan kriteria mutu dan capaian unggulan.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah PTK yang telah terpetakan berdasarkan keunggulannya.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Kegiatan pemetaan dan klasifikasi PTK oleh Kementerian Agama - Survei dan asesmen potensi unggulan PTK - Penyusunan profil kelembagaan PTK
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase Prodi PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang mendapatkan akreditasi unggul
3	Konsep/Definisi	Persentase Prodi PTK yang mendapatkan akreditasi unggul adalah ukuran proporsi program studi pada perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang memperoleh peringkat akreditasi “Unggul” dari BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak program studi di perguruan tinggi keagamaan yang telah mencapai mutu akademik tertinggi, mencerminkan peningkatan kualitas pendidikan dan tata kelola akademik di lingkungan PTK.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah PTK yang berakreditasi unggul b = Jumlah PTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah PTK yang berakreditasi unggul 2. Jumlah PTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendataan oleh EMIS
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Di PDDikti
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang terakreditasi
3	Konsep/Definisi	Persentase LPTK PTK yang terakreditasi adalah ukuran proporsi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan di lingkungan perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang telah memperoleh status akreditasi dari BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak LPTK di PTK yang memenuhi standar mutu kelembagaan dan tata kelola pendidikan, mencerminkan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan calon tenaga pendidik keagamaan.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase= $(a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah LPTK yang telah terakreditasi. b = Jumlah LPTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah LPTK yang telah terakreditasi. 2. Jumlah LPTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pendampingan dan fasilitasi akreditasi LPTK; - Penguatan sistem penjaminan mutu internal; - Verifikasi data akreditasi melalui EMIS dan BAN-PT/LAM.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Peringkat Akreditasi: - Unggul/A - Baik Sekali/B - Baik/C
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase program studi Program Profesi Guru (PPG) PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang terakreditasi unggul
3	Konsep/Definisi	Persentase program studi PPG PTK yang terakreditasi unggul adalah ukuran proporsi program studi Program Profesi Guru pada perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang memperoleh peringkat akreditasi “Unggul” dari BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak program studi PPG di PTK yang telah mencapai mutu akademik tertinggi, mencerminkan peningkatan kualitas pendidikan profesi guru keagamaan dan kesiapan lembaga dalam menghasilkan pendidik profesional.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah PTK yang telah terpetakan berdasarkan keunggulannya. b = Jumlah PTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah PTK yang telah terpetakan berdasarkan keunggulannya. 2. Jumlah PTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Peningkatan dan Fasilitasi Akreditasi Unggul Program Studi PPG (melalui pembinaan, pendampingan, workshop, penyusunan dokumen akreditasi, dan evaluasi diri). - Pendataan dan Rekapitulasi Program Studi PPG yang telah terakreditasi (termasuk status akreditasi aktif) di bawah Kementerian Agama
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase dosen berkualifikasi akademik S3 a. Total b. STEM c. Non STEM
3	Konsep/Definisi	Persentase dosen berkualifikasi akademik S3 adalah rasio jumlah dosen bergelar doktor (S3) terhadap jumlah total dosen aktif di perguruan tinggi, baik secara keseluruhan (total), di bidang STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), maupun di bidang non-STEM.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin baik kualitas sumber daya dosen yang berperan dalam meningkatkan mutu tridharma perguruan tinggi, khususnya di bidang

		pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Total} = ((a + b) / c) \times 100\%$ $\text{STEM} = (a / c) \times 100\%$ $\text{Non-STEM} = (b / c) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah dosen S3 STEM b = Jumlah dosen S3 non-STEM c = Jumlah dosen
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah dosen S3 STEM 2. Jumlah dosen S3 non-STEM 3. Jumlah dosen
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dan EMIS Perguruan Tinggi Keagamaan
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase dosen yang mempunyai pengalaman di luar kampus
3	Konsep/Definisi	Persentase dosen yang mempunyai pengalaman di luar kampus adalah rasio jumlah dosen tetap yang terlibat dalam aktivitas profesional di luar perguruan tinggi seperti industri, lembaga riset, pemerintahan, organisasi internasional, atau kegiatan pengabdian masyarakat, terhadap jumlah total dosen tetap.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin banyak dosen yang memiliki pengalaman praktis dan relevan di dunia luar kampus, yang diharapkan dapat meningkatkan relevansi

		pembelajaran dan penelitian di perguruan tinggi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah dosen yang memiliki pengalaman di luar kampus b = Jumlah dosen tetap
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah dosen yang memiliki pengalaman di luar kampus 2. Jumlah dosen tetap
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survei Aktivitas Dosen atau Pelaporan Beban Kerja Dosen (BKD)
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase dosen yang menduduki jabatan lektor/lektor kepala/guru besar
3	Konsep/Definisi	Persentase dosen yang menduduki jabatan akademik Lektor, Lektor Kepala, atau Guru Besar adalah rasio jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik tersebut terhadap jumlah total dosen tetap di perguruan tinggi.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin baik tingkat profesionalisme, kepakaran, dan kontribusi dosen dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat).
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = jumlah dosen dengan jabatan Lektor, Lektor Kepala, atau Guru Besar b = jumlah total dosen tetap

6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah dosen dengan jabatan Lektor, Lektor Kepala, atau Guru Besar 2. Jumlah total dosen tetap
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dan EMIS Perguruan Tinggi Keagamaan
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Jenis Jabatan: Lektor, Lektor Kepala, Guru Besar
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti program peningkatan kompetensi
3	Konsep/Definisi	Persentase dosen dan tenaga kependidikan Perguruan Tinggi Kejuruan (PTK) yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi sebagai bukti peningkatan keterampilan, pengetahuan, atau keahlian sesuai bidang keahliannya. Sertifikasi ini dapat berupa sertifikat pelatihan, uji kompetensi, atau program pengembangan profesional lainnya yang diakui secara nasional/internasional.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur sejauh mana dosen PTK telah meningkatkan kompetensinya melalui program sertifikasi. Persentase yang tinggi menunjukkan komitmen institusi dalam pengembangan SDM dosen dan kualitas pengajaran.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah dosen dan tenaga kependidikan PTK yang memperoleh program peningkatan kompetensi b = Jumlah dosen dan tenaga kependidikan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang memperoleh program peningkatan kompetensi 2. Jumlah dosen dan tenaga kependidikan

7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelatihan/sertifikasi dosen oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) atau badan sertifikasi terkait. 2. Program pengembangan dosen (e.g., Microcredential, pelatihan industri). 3. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan/Kebudayaan/Ristek atau mitra industri.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Jenis Sertifikasi: Sertifikasi nasional (BNSP), internasional, atau pelatihan khusus.
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase dosen PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang menjadi Narasumber Konferensi nasional maupun internasional
3	Konsep/Definisi	Persentase dosen PTK yang menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional adalah ukuran proporsi dosen pada perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang berpartisipasi sebagai pembicara, pemakalah, atau panelis pada forum ilmiah tingkat nasional dan internasional.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin aktif dan diakui dosen PTK dalam jejaring ilmiah nasional dan global, mencerminkan peningkatan kapasitas akademik, reputasi, dan kontribusi ilmiah perguruan tinggi keagamaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah dosen yang menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional b = Jumlah dosen aktif yang ada di PTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah dosen yang menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional 2. Jumlah dosen aktif yang ada di PTK

7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pendataan partisipasi dosen pada kegiatan ilmiah - Fasilitasi dan insentif publikasi ilmiah dan partisipasi konferensi - Evaluasi kegiatan tridarma dosen
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Konferensi: - Nasional - Internasional
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Rasio dosen asing PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) dengan dosen dalam negeri
3	Konsep/Definisi	Rasio dosen asing dengan dosen dalam negeri pada PTK adalah perbandingan antara jumlah dosen berkewarganegaraan asing dengan jumlah dosen warga negara Indonesia yang mengajar di perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha).
4	Interpretasi	Semakin tinggi rasio menunjukkan semakin besar keterlibatan dosen asing dalam kegiatan akademik PTK, yang mencerminkan peningkatan kolaborasi internasional dan pengakuan global terhadap mutu pendidikan tinggi keagamaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Rasio} = 1 : (b / a)$ Keterangan: a = Jumlah dosen asing aktif di PTK b = Jumlah dosen dalam negeri aktif di PTK
6	Nama Variabel Pembangun	a = Jumlah dosen asing aktif di PTK b = Jumlah dosen dalam negeri aktif di PTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Program visiting professor atau exchange lecturer - Skema rekrutmen dosen asing - Kerja sama internasional PTK (MoU/MoA)
8	Ukuran/Satuan	Rasio

9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase pemenuhan jumlah tenaga kependidikan PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) pada jenjang jabatan fungsional
3	Konsep/Definisi	Persentase pemenuhan jumlah tenaga kependidikan PTK pada jenjang jabatan fungsional adalah ukuran tingkat kesesuaian antara jumlah tenaga kependidikan yang telah menduduki jabatan fungsional (misalnya arsiparis, pustakawan, pranata laboratorium, analis kepegawaian, dan sejenisnya) dengan jumlah formasi atau kebutuhan ideal di perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha).
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin terpenuhinya kebutuhan tenaga kependidikan sesuai jabatan fungsional yang dibutuhkan, mencerminkan efektivitas manajemen SDM dan profesionalitas tenaga kependidikan di lingkungan PTK.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah tenaga kependidikan eksisting pada jenjang jabatan fungsional b = Jumlah kebutuhan tenaga kependidikan pada jenjang jabatan fungsional
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah tenaga kependidikan eksisting pada jenjang jabatan fungsional 2. Jumlah kebutuhan tenaga kependidikan pada jenjang jabatan fungsional

7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	a. Pendataan Tenaga Kependidikan oleh Dinas Pendidikan / Kementerian b. Analisis Kebutuhan Formasi oleh BKN / Kemdikbudristek / Pemerintah Daerah
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Data diperbarui secara berkala (tahunan) dengan cut-off per tanggal 30 Juni setiap tahun.
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase lulusan perguruan tinggi (berkualifikasi S1) dengan pengalaman 1 (satu) semester di luar kampus
3	Konsep/Definisi	Proporsi lulusan program sarjana (S1) dari Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang telah mengikuti program pembelajaran di luar kampus selama minimal satu semester penuh, relatif terhadap total lulusan program sarjana (S1) pada periode yang sama
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur keberhasilan Kementerian Agama dalam mendorong dan memfasilitasi lulusan S1 untuk memiliki pengalaman praktis dan relevan di luar lingkungan akademik. Semakin tinggi persentase lulusan dengan pengalaman di luar kampus, menunjukkan semakin kuatnya adaptasi kurikulum dan program pendidikan PTK terhadap kebutuhan dunia kerja dan dinamika masyarakat
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah lulusan PTK dengan pengalaman satu semester di luar kampus. b = Jumlah lulusan PTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lulusan PTK dengan pengalaman satu semester di luar kampus. 2. Jumlah lulusan PTK

7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pelaksanaan dan Fasilitasi Program Pembelajaran di Luar Kampus (Magang, KKN, Pertukaran Mahasiswa, dll.) dan Pendataan Partisipan serta Lulusan dari Program Tersebut. - Proses Yudisium dan Pendataan Seluruh Lulusan Program Sarjana (S1)
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang memiliki Pusat Pengembangan Karir
3	Konsep/Definisi	Proporsi Perguruan Tinggi Keagamaan (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) di bawah Kementerian Agama yang memiliki unit atau fasilitas yang secara khusus memberikan layanan pengembangan karir kepada mahasiswa dan alumni, relatif terhadap total PTK yang ada
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur ketersediaan fasilitas dan layanan pengembangan karir di PTK. Semakin tinggi persentase PTK yang memiliki pusat pengembangan karir, menunjukkan semakin besar perhatian dan upaya Kementerian Agama dalam mempersiapkan lulusan PTK untuk memasuki dunia kerja atau berwirausaha
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah PTK yang memiliki pusat pengembangan karir b = Jumlah PTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah PTK yang telah terpetakan berdasarkan keunggulannya 2. Jumlah PTK

7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Identifikasi dan verifikasi keberadaan pusat pengembangan karir di setiap PTK (melalui survei, pendataan, atau laporan dari PTK). - Pendataan dan rekapitulasi total PTK di bawah Kementerian Agama.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase lulusan PTK yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan: a. Total; b. Karyawan atau Wirausaha
3	Konsep/Definisi	Persentase lulusan PTK yang berhasil memiliki pekerjaan adalah proporsi lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang telah berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai karyawan atau merintis usaha (wirausaha) dalam periode waktu tertentu setelah kelulusan, dibandingkan dengan total lulusan yang lulus pada periode yang sama. Indikator ini mengukur keberhasilan PTK dalam mempersiapkan lulusannya untuk memasuki dunia kerja atau menciptakan lapangan kerja sendiri.

4	Interpretasi	Indikator ini mengukur keberhasilan PTK dalam menghasilkan lulusan yang relevan dan siap kerja atau siap berwirausaha. Semakin tinggi persentase lulusan yang berhasil memiliki pekerjaan, baik sebagai karyawan maupun wirausaha, menunjukkan semakin baik kualitas kurikulum, proses pembelajaran, dan pembinaan karir yang dilakukan oleh PTK. Ini mengindikasikan bahwa lulusan PTK memiliki daya saing yang tinggi dan mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja atau menciptakan peluang ekonomi sendiri. Peningkatan indikator ini berkontribusi pada peningkatan relevansi pendidikan tinggi keagamaan, peningkatan angka serapan lulusan, pengurangan pengangguran terdidik, serta peningkatan kontribusi PTK terhadap pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $\{ (a + b) / c \} \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah lulusan PTK yang berhasil menjadi karyawan dalam periode tertentu setelah kelulusan. b = Jumlah lulusan PTK yang berhasil menjadi wirausaha dalam periode tertentu setelah kelulusan. c = Jumlah total lulusan PTK yang lulus dalam periode yang sama.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lulusan PTK yang berhasil menjadi karyawan dalam periode tertentu setelah kelulusan. 2. Jumlah lulusan PTK yang berhasil menjadi wirausaha dalam periode tertentu setelah kelulusan. 3. Jumlah total lulusan PTK yang lulus dalam periode yang sama.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Tracer Study PTK - Program Career Center dan Alumni - Pelatihan kewirausahaan dan magang - Inkubator bisnis mahasiswa/alumni
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Pekerjaan: Karyawan, Wirausaha
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase tenaga kerja lulusan PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) bidang STEM
3	Konsep/Definisi	Proporsi angkatan kerja yang memiliki gelar pendidikan tinggi (D3, D4/Sarjana Terapan, S1, S2, S3) dari program studi di bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM), relatif terhadap total angkatan kerja lulusan pendidikan tinggi. Indikator ini mengukur ketersediaan SDM berkualitas di sektor-sektor kritis yang mendorong inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing bangs
4	Interpretasi	Indikator ini mencerminkan sejauh mana sistem pendidikan tinggi nasional mampu menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan industri dan sektor strategis di bidang STEM. Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan ketersediaan SDM STEM yang memadai untuk mendukung inovasi, riset dan pengembangan, transformasi digital, serta peningkatan produktivitas ekonomi. Ini juga mengindikasikan keberhasilan dalam mendorong minat dan kapasitas generasi muda pada disiplin ilmu yang penting untuk masa depan
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah lulusan PTK bidang STEM. b = Jumlah lulusan PTK.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lulusan PTK bidang STEM. 2. Jumlah lulusan PTK.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) atau survei ketenagakerjaan lainnya yang spesifik
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Bidang STEM: - Sains (Fisika, Kimia, Biologi, Matematika, Statistika, dll.) - Teknologi (Informatika, Sistem Informasi, dll.)

		- Teknik/Rekayasa (Sipil, Elektro, Mesin, dll.) - Matematika Murni & Aktuaria
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Sakernas
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan mahasiswa PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang mendapatkan sertifikasi kompetensi/profesi
3	Konsep/Definisi	Proporsi lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) di bawah Kementerian Agama yang berhasil memperoleh sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi yang diakui dan memiliki reputasi baik, relatif terhadap total lulusan pada periode yang sama. Indikator ini mencerminkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur keberhasilan PTK dalam menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan akademis, tetapi juga dibekali dengan keterampilan praktis dan pengakuan kompetensi yang diakui secara profesional. Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan bahwa program pendidikan di PTK semakin relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan lulusannya memiliki daya saing yang kuat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah lulusan PTK yang mendapat sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi bereputasi. b = Jumlah lulusan PTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lulusan PTK yang mendapat sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi bereputasi. 2. Jumlah lulusan PTK

7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Fasilitasi program sertifikasi kompetensi bagi mahasiswa/lulusan, kerja sama dengan lembaga sertifikasi, dan pendataan lulusan yang bersertifikat kompetensi. - Pendataan dan rekapitulasi total lulusan PTK di bawah Kementerian Agama
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Lembaga Sertifikasi: - LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) terlisensi BNSP - Asosiasi Profesi - Lembaga Sertifikasi Internasional
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Rasio Outbound per Inbound mahasiswa PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha)
3	Konsep/Definisi	Rasio outbound per inbound mahasiswa adalah perbandingan antara jumlah mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang mengikuti program mobilitas ke luar negeri (outbound) dengan jumlah mahasiswa asing yang mengikuti program mobilitas ke dalam PTK tersebut (inbound) dalam periode tertentu.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur tingkat internasionalisasi dan relevansi pendidikan tinggi keagamaan dengan dinamika global. Semakin seimbang rasio antara mahasiswa outbound dan inbound (mendekati 1:1), menunjukkan semakin kuatnya daya tarik dan kemampuan PTK dalam menciptakan ekosistem akademik yang inklusif secara internasional, serta semakin aktifnya mahasiswa PTK dalam mencari pengalaman global. Peningkatan rasio ini mencerminkan pengakuan PTK di kancah internasional, pengayaan perspektif multikultural di kampus, serta peningkatan kompetensi global mahasiswa. Hal ini berdampak pada peningkatan kualitas lulusan yang siap bersaing di pasar kerja global, pengembangan

		jejaring internasional, dan peningkatan reputasi PTK sebagai pusat keunggulan pendidikan keagamaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rasio Outbound per Inbound = $1 : (b / a)$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa outbound PTK b = Jumlah mahasiswa inbound PTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah mahasiswa outbound PTK 2. Jumlah mahasiswa inbound PTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Program mobilitas mahasiswa internasional (Erasmus+, IISMA, dll) - Student exchange antarlembaga PTKI dan mitra luar negeri - Program KKN internasional / transfer kredit luar negeri
8	Ukuran/Satuan	Rasio
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase mahasiswa yang berkegiatan di luar program studi

3	Konsep/Definisi	Persentase mahasiswa yang berkegiatan di luar program studi adalah proporsi mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang mengikuti kegiatan atau program di luar kurikulum inti program studi mereka, dibandingkan dengan total seluruh mahasiswa yang aktif di PTK dalam periode tertentu. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi tambahan, soft skills, dan pengalaman di luar bidang keilmuan utama.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur tingkat fleksibilitas kurikulum dan partisipasi mahasiswa dalam pengembangan diri di luar bidang utama, yang krusial untuk meningkatkan relevansi lulusan. Semakin tinggi persentase mahasiswa yang berkegiatan di luar prodi, menunjukkan semakin kuatnya upaya PTK dalam memberikan pengalaman belajar holistik dan kesempatan untuk mengembangkan soft skills, kemandirian, serta jejaring. Ini juga mencerminkan kesadaran mahasiswa akan pentingnya kompetensi lintas disiplin.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa aktif yang berkegiatan di luar program studi dalam periode tertentu. b = Jumlah mahasiswa aktif yang ada di PTK dalam periode yang sama.
6	Nama Variabel Pembangun	a: Jumlah mahasiswa aktif yang berkegiatan di luar program studi dalam periode tertentu. b: Jumlah mahasiswa aktif yang ada di PTK dalam periode yang sama.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Kegiatan organisasi kemahasiswaan (ormawa) - Magang (MBKM, kerja praktik, dll) - KKN, pengabdian masyarakat - Program pertukaran pelajar, riset kolaboratif, dan kompetisi mahasiswa
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Kegiatan: - Program MBKM (spesifik: Pertukaran Pelajar, Magang, Asistensi Mengajar, dll.) - Organisasi Kemahasiswaan (Internal/Eksternal) - Kompetisi/Lomba - Pengabdian Masyarakat - Karya Ilmiah/Kreativitas (di luar tugas akhir prodi)
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi

12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi
3	Konsep/Definisi	Persentase mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang berpartisipasi dalam kompetisi akademik, seni, atau olahraga yang diselenggarakan di tingkat nasional maupun internasional dalam periode waktu tertentu. Kompetisi ini mencakup, namun tidak terbatas pada, olimpiade sains, lomba inovasi, debat, kompetisi pemrograman, turnamen olahraga, dan festival seni.
4	Interpretasi	Indikator ini menggambarkan tingkat partisipasi dan daya saing mahasiswa PTK di kancah nasional dan internasional. Persentase yang tinggi menunjukkan lingkungan akademik yang kondusif untuk pengembangan potensi mahasiswa di luar kurikulum formal, serta reputasi PTK dalam menghasilkan talenta-talenta berdaya saing global.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase peningkatan = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi pada tahun berjalan b = Jumlah mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi pada tahun berjalan 2. Jumlah mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi pada tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendataan Partisipasi Mahasiswa dalam Kompetisi (PPMK)
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan

10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri/pemerintah/ Lembaga Masyarakat /Internasional
3	Konsep/Definisi	Proporsi jumlah PTK yang terlibat aktif dalam kolaborasi atau kemitraan dengan entitas eksternal (dunia usaha dan industri, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, atau lembaga internasional) dibandingkan dengan total keseluruhan PTK. Kerja sama ini dapat meliputi berbagai bentuk, seperti magang industri, proyek penelitian bersama, pengembangan kurikulum bersama, pelatihan, program pengabdian masyarakat, atau pertukaran keahlian.
4	Interpretasi	Indikator ini mencerminkan tingkat keterbukaan dan relevansi institusi pendidikan dengan kebutuhan eksternal. Semakin tinggi persentase ini, semakin kuat integrasi institusi pendidikan dengan lingkungan kerja, industri, dan masyarakat, yang berpotensi meningkatkan kualitas pendidikan dan relevansi lulusan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase PTK yang bekerjasama = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja, industri, pemerintah, lembaga masyarakat, atau internasional b = Jumlah PTK
6	Nama Variabel Pembangun	a = Jumlah PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja, industri, pemerintah, lembaga masyarakat, atau internasional b = Jumlah PTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survei Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan

		Pendataan Potensi dan Kemitraan Institusi Pendidikan
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Jenis mitra: Industri, Pemerintah, LSM, Internasional
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti dibidang: a. Pendidikan dan pengajaran b. Penelitian dan publikasi c. Pengabdian kepada masyarakat
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur sejauh mana kerja sama yang telah disepakati dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kegiatan nyata. Kerja sama dimaksud mencakup perjanjian, nota kesepahaman, atau bentuk komitmen resmi antara perguruan tinggi/lembaga dengan mitra, yang kemudian dilaksanakan melalui kegiatan sesuai bidang.
4	Interpretasi	Nilai persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak kerja sama yang benar-benar ditindaklanjuti dan berdampak, sedangkan nilai rendah mengindikasikan adanya banyak kesepakatan yang belum terlaksana secara nyata.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase kerja sama bidang pendidikan dan pengajaran: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah kerja sama pendidikan dan pengajaran yang ditindaklanjuti b = Jumlah kerja sama pendidikan dan pengajaran yang disepakati Persentase kerjasama bidang penelitian dan publikasi: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah kerja sama penelitian dan publikasi yang ditindaklanjuti b = Jumlah kerja sama penelitian dan publikasi yang disepakati Persentase kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah kerja sama pengabdian kepada masyarakat yang ditindaklanjuti b = Jumlah kerja sama pengabdian kepada masyarakat yang disepakati
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah kerja sama pendidikan dan pengajaran yang ditindaklanjuti 2. Jumlah kerja sama pendidikan dan pengajaran yang disepakati 3. Jumlah kerja sama penelitian dan publikasi yang ditindaklanjuti 4. Jumlah kerja sama penelitian dan publikasi yang disepakati 5. Jumlah kerja sama pengabdian kepada masyarakat yang ditindaklanjuti 6. Jumlah kerja sama pengabdian kepada masyarakat yang disepakati
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pencatatan dan Pemantauan Kerjasama (Monitoring and Evaluation of Partnerships) 2. Manajemen Kerjasama (Partnership Management) 3. Pelaporan Kinerja Kerjasama (Partnership Performance Reporting)
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Jenis mitra: Industri, Pemerintah, LSM, Internasional
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase mahasiswa yang mengikuti program peningkatan literasi Kitab Suci
3	Konsep/Definisi	Persentase mahasiswa pada perguruan tinggi keagamaan atau umum yang berpartisipasi dalam program peningkatan literasi Kitab Suci, baik melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler yang difasilitasi oleh lembaga pendidikan dan instansi keagamaan.
4	Interpretasi	Peningkatan nilai menunjukkan bahwa semakin banyak mahasiswa yang mendapatkan akses dan kesempatan dalam penguatan spiritualitas dan nilai-nilai kebajikan lintas agama.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa yang mengikuti program literasi Kitab Suci dalam satuan waktu tertentu b = Jumlah mahasiswa dalam satuan waktu yang sama
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah mahasiswa yang mengikuti program literasi Kitab Suci dalam satuan waktu tertentu 2. Jumlah mahasiswa dalam satuan waktu yang sama
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pengembangan dan pelaksanaan program literasi Kitab Suci di PTKI/PTU 2. Pelatihan dan workshop peningkatan pemahaman kitab suci 3. Kegiatan pembinaan keagamaan berbasis kitab suci 4. Kemitraan dengan ormas dan lembaga keagamaan dalam literasi kitab 5. Monitoring dan evaluasi program pembelajaran kitab suci
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi

12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase prodi yang mengimplementasikan integrasi keilmuan
3	Konsep/Definisi	Persentase prodi yang mengimplementasikan integrasi keilmuan adalah rasio jumlah program studi (prodi) di perguruan tinggi keagamaan yang telah menerapkan kurikulum, metode pembelajaran, atau penelitian berbasis integrasi keilmuan dibandingkan dengan total prodi yang diukur pada periode tertentu
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini, semakin banyak prodi yang berhasil menggabungkan ilmu agama dengan ilmu umum atau interdisipliner, untuk menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan holistik dan relevan dengan kebutuhan masyarakat
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah prodi yang mengimplementasikan integrasi keilmuan b = Jumlah prodi yang diukur
6	Nama Variabel Pembangun	a = Jumlah prodi yang mengimplementasikan integrasi keilmuan b = Jumlah prodi yang diukur
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Evaluasi kurikulum dan implementasi integrasi keilmuan 2. Workshop/pelatihan pengembangan kurikulum integratif 3. Pendampingan dan monitoring prodi
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase PTK yang mengembangkan pusat-pusat kajian keagamaan sesuai kebutuhan lokal
3	Konsep/Definisi	Persentase PTK yang membentuk dan mengembangkan pusat kajian keagamaan berbasis isu-isu lokal seperti moderasi beragama, toleransi, harmoni sosial, dan penguatan nilai keagamaan kontekstual sesuai kebutuhan masyarakat sekitar.
4	Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan keberhasilan PTK dalam merespons dinamika sosial-keagamaan di tingkat lokal dengan pendekatan berbasis riset dan advokasi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah PTK yang telah mengembangkan pusat kajian keagamaan berbasis isu dan kebutuhan lokal b = Jumlah PTK yang menjadi sasaran program
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah PTK yang telah mengembangkan pusat kajian keagamaan berbasis isu dan kebutuhan lokal 2. Jumlah PTK yang menjadi sasaran program
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pembentukan pusat studi keagamaan berbasis lokal 2. Penelitian berbasis kebutuhan sosial-keagamaan lokal 3. Pengabdian masyarakat berbasis hasil kajian keagamaan 4. Penerbitan hasil kajian tematik keagamaan 5. Kemitraan PTK dengan pemda/lembaga masyarakat dalam bidang keagamaan
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase karya tulis ilmiah yang bereputasi nasional
3	Konsep/Definisi	Persentase karya tulis ilmiah yang bereputasi nasional di Kementerian Agama adalah perbandingan jumlah karya tulis ilmiah ilmiah yang terakreditasi nasional (minimal SINTA 1 atau SINTA 2) yang dikelola oleh unit kerja atau perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama, terhadap total jumlah karya tulis ilmiah yang diterbitkan di lingkungan Kementerian Agama
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan kualitas dan pengakuan nasional atas karya tulis ilmiah-karya tulis ilmiah ilmiah di bawah pengelolaan Kementerian Agama
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah karya tulis ilmiah terakreditasi nasional (SINTA 1 atau 2) b = Total karya tulis ilmiah yang dikelola
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah karya tulis ilmiah yang terakreditasi nasional (SINTA 1 atau SINTA 2) 2. Total jumlah karya tulis ilmiah yang dikelola
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pengelolaan dan Akreditasi karya tulis ilmiah Ilmiah
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	1. SINTA 1 (Tertinggi) 2. SINTA 2 3. SINTA 3 4. SINTA 4 ke bawah
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi	Di Scopus

	data? (Disebutkan nama publikasinya)	
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase publikasi ilmiah bereputasi internasional PTK yang disitasi
3	Konsep/Definisi	Persentase artikel jurnal bereputasi internasional yang disitasi adalah proporsi artikel ilmiah yang dipublikasikan oleh dosen/peneliti PTK pada jurnal bereputasi internasional yang telah mendapat sitasi (citation) dari artikel lain dalam periode tertentu. Jurnal bereputasi internasional adalah jurnal yang terindeks dalam database internasional yang diakui seperti Scopus, Web of Science (WoS), atau database internasional lainnya yang memiliki sistem peer-review yang ketat. Sitasi adalah rujukan atau referensi yang dibuat oleh artikel lain terhadap artikel yang dimaksud, yang menunjukkan dampak dan kontribusi artikel tersebut terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Artikel yang disitasi menunjukkan kualitas, relevansi, dan pengaruh penelitian terhadap komunitas ilmiah internasional.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur dampak dan kualitas publikasi ilmiah PTK di tingkat internasional. Semakin tinggi persentase artikel yang disitasi, menunjukkan semakin baik kualitas dan relevansi penelitian yang dihasilkan oleh PTK.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100 \%$
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah artikel jurnal bereputasi internasional yang memperoleh sitasi; b. Jumlah total artikel jurnal bereputasi internasional yang diterbitkan oleh PTK.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Insentif Publikasi Ilmiah Internasional; - Bantuan Penulisan Artikel Bereputasi; - Pelatihan Sitasi dan Manajemen Referensi Ilmiah.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Quartile Jurnal (SJR/JCR): - Q1 (Quartile 1); - Q2 (Quartile 2); - Q3 (Quartile 3); - Q4 (Quartile 4).

11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Jumlah karya tulis ilmiah berorientasi SDGs yang terpublikasi di Jurnal Internasional bereputasi
3	Konsep/Definisi	Persentase jumlah karya tulis ilmiah yang mendukung capaian Sustainable Development Goals (SDGs) dan berhasil terpublikasi di jurnal internasional bereputasi, dibandingkan dengan total karya tulis ilmiah yang dihasilkan dalam periode tertentu.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin kuat kontribusi akademik civitas akademika dalam mendukung target SDGs melalui publikasi yang diakui secara internasional.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus = Jumlah karya tulis ilmiah berorientasi SDGs yang terpublikasi di jurnal internasional bereputasi
6	Nama Variabel Pembangun	Jumlah karya tulis ilmiah berorientasi SDGs yang terpublikasi di jurnal internasional bereputasi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penelitian dosen dan mahasiswa berfokus SDGs 2. Workshop penulisan artikel ilmiah bereputasi 3. Pendampingan publikasi internasional
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan THE 17 GOALS
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan

1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Rasio produktifitas publikasi ilmiah dengan jumlah dosen
3	Konsep/Definisi	Rasio produktivitas publikasi jurnal dengan jumlah dosen adalah perbandingan antara jumlah artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal terakreditasi nasional atau internasional dengan jumlah dosen tetap di perguruan tinggi keagamaan di lingkungan Kementerian Agama dalam periode tertentu
4	Interpretasi	Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin produktif dosen dalam menghasilkan publikasi ilmiah, yang mencerminkan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan Kementerian Agama
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rasio: $1 : (b / a)$ Keterangan: a = Jumlah artikel ilmiah yang dipublikasikan b = Jumlah dosen tetap
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah artikel ilmiah yang dipublikasikan 2. Jumlah dosen tetap
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Kegiatan Penelitian dan Publikasi Ilmiah Dosen PTKIN/PTKIS 2. Program Insentif Publikasi Ilmiah 3. Program Peningkatan Mutu Penelitian Dosen
8	Ukuran/Satuan	Rasio
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Quartil Artikel: (Q1, Q2, Q3, dan Q4)
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Di Scopus
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Jumlah Paten Granted karya tulis ilmiah Perguruan Tinggi Keagamaan

3	Konsep/Definisi	Jumlah Paten Granted karya tulis ilmiah Perguruan Tinggi adalah total hak paten yang telah resmi diberikan (granted) oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) kepada Perguruan Tinggi Keagamaan di lingkungan Kementerian Agama dalam periode tertentu
4	Interpretasi	Semakin banyak jumlah paten yang granted, semakin menunjukkan meningkatnya kapasitas inovasi, riset terapan, dan kontribusi Perguruan Tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta pemanfaatannya untuk masyarakat
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: Jumlah Paten Granted (disetujui DJKI) dalam satu tahun
6	Nama Variabel Pembangun	Jumlah paten granted yang diperoleh oleh Perguruan Tinggi Keagamaan.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Inovasi di PTKIN/PTKIS 2. Program Pendaftaran dan Fasilitasi Paten Perguruan Tinggi
8	Ukuran/Satuan	Unit (paten)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Kategori Jumlah Paten Granted 1. Rendah (0 – 2 paten granted) 2. Sedang (3 – 5 paten granted) 3. Tinggi (> 5 paten granted)
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan DUDI/Masyarakat
3	Konsep/Definisi	Persentase hasil riset dan inovasi adalah rasio antara jumlah hasil riset dan inovasi yang telah dimanfaatkan oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) atau masyarakat terhadap total hasil riset dan inovasi yang dihasilkan perguruan tinggi keagamaan dalam periode tertentu

4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak hasil riset dan inovasi yang aplikatif, relevan, dan bermanfaat bagi DUDI/masyarakat, menandakan peningkatan kualitas riset terapan di perguruan tinggi
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah hasil riset yang dimanfaatkan DUDI/Masyarakat b = Jumlah hasil riset
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah hasil riset yang dimanfaatkan DUDI/Masyarakat 2. Jumlah hasil riset
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Kegiatan Penelitian dan Inovasi Terapan 2. Program Hilirisasi Hasil Riset 3. Kemitraan Perguruan Tinggi dengan DUDI/Komunitas Masyarakat
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Pihak Pemanfaat: - Dunia Usaha (Perusahaan, Startup) - Dunia Industri - Masyarakat (Komunitas, Kelompok Tani, UMKM) - Pemerintah/Lembaga Publik
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase Lembaga Penelitian dan Pengabdian ke Masyarakat (LPPM) yang ditingkatkan kapasitasnya
3	Konsep/Definisi	Persentase LPPM yang mendapatkan program peningkatan kapasitas melalui pelatihan, workshop, pendampingan, atau sertifikasi dalam rangka penguatan fungsi riset dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan perguruan tinggi keagamaan
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan makin banyak LPPM yang ditingkatkan kapasitasnya, sebagai cerminan perbaikan kualitas manajemen riset dan pengabdian di perguruan tinggi

5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah LPPM yang ditingkatkan kapasitasnya b = Jumlah LPPM PTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah LPPM yang ditingkatkan kapasitasnya 2. Jumlah LPPM PTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelatihan/Workshop Manajemen Riset dan Pengabdian Masyarakat 2. Sertifikasi Kompetensi Pengelola LPPM 3. Program Penguatan Tata Kelola LPPM 4. Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan LPPM
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis peningkatan kapasitasnya: 1. Pelatihan Pengelolaan LPPM 2. Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Kelola LPPM 3. Sertifikasi Kompetensi Pengelola LPPM 4. Pendampingan Penyusunan Roadmap Riset & Pengabdian
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur tingkat kecukupan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang tersedia untuk mendukung layanan digital dan operasional sistem informasi di lingkungan instansi pemerintah.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa kebutuhan infrastruktur TIK (seperti jaringan, server, perangkat keras, dan pusat data) telah terpenuhi secara optimal guna mendukung kelancaran layanan digital.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah kebutuhan infrastruktur TIK yang telah terpenuhi b. Jumlah total kebutuhan infrastruktur TIK yang direncanakan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah perangkat keras (hardware) yang tersedia 2. Jumlah kebutuhan jaringan dan konektivitas yang terpenuhi 3. Jumlah layanan server/cloud yang tersedia 4. Total kebutuhan infrastruktur yang diidentifikasi dalam perencanaan TIK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Infrastruktur TIK
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Teknologi Informasi dan Komunikasi / Infrastruktur Digital / Dukungan Layanan Pemerintah Digital
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur proporsi data prioritas yang telah tersedia dan sesuai dengan kebutuhan pengukuran indikator pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) instansi.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa instansi telah menyediakan data yang relevan dan selaras dengan perencanaan nasional dan sektoral, sehingga mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah data prioritas yang tersedia dan selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra b. Jumlah total data yang dibutuhkan untuk mengukur indikator RPJMN dan Renstra
6	Nama Variabel Pembangun	1. Daftar indikator RPJMN dan Renstra yang membutuhkan data 2. Jumlah data yang telah tersedia dalam format dan frekuensi yang sesuai 3. Kesesuaian metadata dan definisi operasional data
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan Data Prioritas Pembangunan
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Perencanaan Pembangunan / Satu Data Indonesia / Tata Kelola Data Pemerintah
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Badan Kepegawaian Negara
2	Nama Indikator	Rerata nilai akreditasi lembaga pada Unit Penilaian Kompetensi Kementerian Agama oleh BKN minimal 85
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur kualitas Unit Penilaian Kompetensi (UPK) di lingkungan Kementerian Agama berdasarkan hasil akreditasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Nilai akreditasi mencerminkan standar mutu dalam pelaksanaan penilaian kompetensi ASN.
4	Interpretasi	Semakin tinggi rerata nilai akreditasi, semakin menunjukkan bahwa UPK Kementerian Agama telah memenuhi standar mutu nasional. Nilai minimal 85 menunjukkan tingkat keandalan yang tinggi dalam pelaksanaan penilaian kompetensi.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Rerata = $(\Sigma a) / b$ Keterangan: a. Nilai akreditasi masing-masing Unit Penilaian Kompetensi b. Jumlah Unit Penilaian Kompetensi yang dinilai oleh BKN
6	Nama Variabel Pembangun	1. Nilai akreditasi masing-masing UPK oleh BKN 2. Jumlah UPK Kementerian Agama yang telah mengikuti proses akreditasi 3. Standar akreditasi dari BKN (misalnya aspek kelembagaan, SDM, sarana, dan metode asesmen)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Evaluasi dan Akreditasi Unit Penilaian Kompetensi ASN
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Manajemen ASN / Pengembangan Kompetensi / Reformasi Birokrasi
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Keuangan
2	Nama Indikator	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur kualitas pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja berdasarkan aspek kepatuhan, efektivitas penyerapan anggaran, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi penggunaan dana, sebagaimana dinilai oleh Kementerian Keuangan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi nilai kinerja, menunjukkan bahwa satuan kerja semakin baik dalam merencanakan dan merealisasikan anggarannya secara tertib, efisien, dan sesuai peraturan yang berlaku.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Nilai dari Kementerian Keuangan
6	Nama Variabel Pembangun	Nilai dari Kemenkeu

7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan aspek penilaian: Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Efektivitas, Efisiensi, dan Kepatuhan terhadap Regulasi
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase Efektivitas dan Efisiensi Program yang mencapai tujuan
3	Konsep/Definisi	Penilaian terhadap tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian target output/outcome dari program/kegiatan yang diawasi melalui Program Pengawasan Intern
4	Interpretasi	Mengukur seberapa efektif dan efisien suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah program yang dinilai efektif dan efisien serta mencapai tujuan b. Jumlah total program yang dilaksanakan
6	Nama Variabel Pembangun	Program yang Efektif, Anggaran
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Audit, Reviu, Pemantauan, Evaluasi
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Program yang efektif dan efisien mencapai target yang ditentukan
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian PAN-RB
2	Nama Indikator	Nilai SAKIP satuan kerja
3	Konsep/Definisi	Peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja dan anggaran dalam mencapai tujuan organisasi
4	Interpretasi	Mengukur seberapa baik satuan kerja dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja sesuai dengan SAKIP
5	Metode / Rumus Perhitungan	Peningkatan rata-rata nilai SAKIP satuan kerja = rata-rata nilai SAKIP satuan kerja yang dievaluasi
6	Nama Variabel Pembangun	1.Perencanaan Kinerja 2.Pengukuran Kinerja 3.Evaluasi Kinerja 4.Pelaporan Kinerja
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Penyusunan Dokumen Perencanaan kinerja, Laporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, Audit Kinerja
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Peningkatan rata-rata nilai SAKIP sesuai target yang ditetapkan
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan yang efektif
3	Konsep/Definisi	Penilaian efektivitas sistem pengendalian internal dalam memastikan integritas, keandalan, dan ketepatan waktu laporan keuangan

4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin baik fungsi pengendalian internal dalam mengelola risiko kesalahan atau kecurangan dalam pelaporan keuangan
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah satuan kerja dengan pengendalian intern pelaporan keuangan yang dinilai efektif b. Jumlah total satuan kerja yang dievaluasi
6	Nama Variabel Pembangun	Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pemantauan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Reviu PIPK
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan status efektivitas: Efektif, Cukup Efektif, Tidak Efektif
11	Level Estimasi	Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Inspektorat Jenderal
2	Nama Indikator	Nilai telaah sejawat
3	Konsep/Definisi	Pengukuran tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar melalui evaluasi sejawat internal
4	Interpretasi	Mengukur sejauh mana telaah sejawat efektif dalam memperbaiki kualitas audit dan pengawasan
5	Metode / Rumus Perhitungan	Nilai Telaah Sejawat =Jumlah (Bobot dari setiap komponen x Skor capaian komponen telaah sejawat)
6	Nama Variabel Pembangun	Proses Telaah Sejawat
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Evaluasi Sejawat
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan

10	Klasifikasi	Berdasarkan aspek penilaian: Kepatuhan terhadap standar akuntansi, Kualitas penyajian laporan, Sistem pengendalian intern, Kepatuhan regulasi, Kualitas dokumentasi
11	Level Estimasi	Tahunan
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Inspektorat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase kegiatan pengawasan berbasis risiko dan sesuai standar
3	Konsep/Definisi	Pengawasan yang berfokus pada identifikasi, penilaian, dan penanganan risiko yang berpotensi mempengaruhi kinerja suatu organisasi atau kegiatan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin efektif dan tepat sasaran kegiatan pengawasan dalam mengelola risiko dan memastikan kepatuhan pada standar yang berlaku
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus = $(a/b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah kegiatan pengawasan yang berbasis resiko dan sesuai standar b. Jumlah total kegiatan pengawasan
6	Nama Variabel Pembangun	Pengawasan Berbasis Risiko
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Penyusunan Audit Berbasis Risiko dan Pedoman Kerja Pengawasan Tahunan
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Bulanan
10	Klasifikasi	Berdasarkan pendekatan: Berbasis Risiko, Non-Risiko
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi	-

	data? (Disebutkan nama publikasinya)	
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Inspektorat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase pengendalian risiko kecurangan
3	Konsep/Definisi	Menilai keberhasilan pengendalian terhadap potensi risiko kecurangan dalam pengelolaan sumber daya publik
4	Interpretasi	Mengukur sejauh mana program/kegiatan telah dilengkapi dengan sistem dan prosedur pengendalian yang efektif untuk mencegah terjadinya kecurangan
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan pengendalian risiko kecurangan b. Jumlah total satuan kerja
6	Nama Variabel Pembangun	Pengendalian Risiko Kecurangan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Audit, Reviu, Pemantauan, Evaluasi
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Bulanan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis risiko: Penyalahgunaan Keuangan, Manipulasi Laporan, Penyalahgunaan Wewenang, Gratifikasi/Korupsi
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Inspektorat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase penanganan risiko kecurangan
3	Konsep/Definisi	Mengukur jumlah kasus yg memiliki risiko fraud yang ditindaklanjuti dan dibuktikan
4	Interpretasi	Mengukur sejauh mana upaya penanganan terhadap risiko kecurangan yang teridentifikasi telah dilakukan dengan baik

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah risiko kecurangan yang telah ditangani b. Jumlah total risiko kecurangan yang teridentifikasi
6	Nama Variabel Pembangun	Penanganan Risiko Kecurangan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Audit Investigasi, Audit Tujuan Tertentu
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Bulanan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis risiko: Penyalahgunaan Keuangan, Manipulasi Laporan, Penyalahgunaan Wewenang, Gratifikasi/Korupsi
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Inspektorat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase Pengamanan Aset Negara
3	Konsep/Definisi	Tingkat Pengamanan aset negara melalui capaian keamanan administrasi, keamanan hukum, dan keamanan fisik terhadap aset yang bermasalah
4	Interpretasi	Mengukur efektivitas pengamanan terhadap aset negara yang bermasalah (sebanyak 27 kasus) untuk mencegah kehilangan atau penyalahgunaan
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah aset negara yang telah diamankan b. Jumlah total aset negara yang dikuasai
6	Nama Variabel Pembangun	Pengamanan Aset Negara
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Audit Investigasi, Audit Tujuan Tertentu
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Bulanan

10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis aset: Tanah, Bangunan, Peralatan/Mesin, Aset Tak Berwujud
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase kajian kebijakan yang dimanfaatkan
3	Konsep/Definisi	Proporsi kajian yang digunakan dalam pengambilan keputusan
4	Interpretasi	Menggambarkan sejauh mana hasil kajian kebijakan digunakan dalam pengambilan keputusan atau penyusunan kebijakan oleh instansi
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah kajian kebijakan yang dimanfaatkan b. Jumlah total kajian kebijakan yang disusun
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah dokumen kajian yang digunakan sebagai dasar kebijakan/program 2. Jumlah seluruh dokumen kajian yang disusun dalam periode tertentu
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Penyusunan, Diseminasi, dan Monitoring Pemanfaatan Kajian Kebijakan
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Triwulan dan Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan substansi: Pengkajian dan Perumusan Kebijakan Pemerintah
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan

1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Inspektorat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase tindaklanjut hasil pengawasan yang diverifikasi
3	Konsep/Definisi	Rasio yang menunjukkan seberapa efektif suatu entitas atau lembaga dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi atau temuan yang dihasilkan dari kegiatan pengawasan (audit, inspeksi, atau evaluasi) oleh Badan Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atau lembaga pengawas eksternal, yang kemudian hasilnya telah diverifikasi dan dinyatakan selesai (sesuai/tuntas) oleh pihak pengawas
4	Interpretasi	Persentase yang tinggi (mendekati 100%) menunjukkan tingkat kepatuhan dan akuntabilitas yang baik dari entitas yang diawasi. Ini mencerminkan komitmen manajemen untuk memperbaiki kelemahan, meningkatkan kinerja, dan menuntaskan temuan pengawasan. Persentase yang rendah mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal, resistensi terhadap perbaikan, atau kurangnya komitmen manajemen dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan masalah yang ditemukan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $((a) / (b)) * 100\%$ Keterangan: (a) = Jumlah Rekomendasi/Temuan Hasil Pengawasan yang Telah Ditindaklanjuti dan Dinyatakan Selesai Diverifikasi: Angka ini merujuk pada temuan audit/pengawasan yang telah diperbaiki oleh unit yang diawasi, dan perbaikan tersebut sudah diperiksa ulang dan dinyatakan tuntas oleh lembaga pengawas (seperti Inspektorat atau BPK). (b) = Total Jumlah Rekomendasi/Temuan Hasil Pengawasan yang Wajib Ditindaklanjuti: Ini adalah jumlah seluruh rekomendasi atau temuan yang dikeluarkan oleh lembaga pengawas yang harus ditindaklanjuti oleh entitas yang diawasi.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Rekomendasi/Temuan Hasil Pengawasan yang Telah Ditindaklanjuti dan Dinyatakan Selesai Diverifikasi oleh Pihak Pengawas. b. Total Jumlah Rekomendasi/Temuan Hasil Pengawasan yang Wajib Ditindaklanjuti dalam Periode Pengawasan.

7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pelaksanaan Audit, Inspeksi, atau Evaluasi (Pengawasan). - Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan Rekomendasi. - Pelaksanaan Tindak Lanjut oleh Entitas yang Diawasi. - Kegiatan Verifikasi dan Monitoring Tindak Lanjut oleh Lembaga Pengawas (APIP/BPK/dll.).
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Triwulanan, dan Tahunan
10	Klasifikasi	- Berdasarkan Jenis Pengawasan: Audit Kinerja, Audit Keuangan, Audit Tujuan Tertentu (ATT), Reviu, Evaluasi. - Berdasarkan Status Tindak Lanjut: Selesai, Belum Sesuai, Belum Ditindaklanjuti. - Berdasarkan Entitas yang Diawasi: Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), Unit Kerja Teknis.
11	Level Estimasi	- Kementerian/Lembaga - Unit Eselon I/II
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase tindaklanjut pengaduan masyarakat yang diverifikasi
3	Konsep/Definisi	Persentase yang mengukur efektivitas dan responsivitas suatu instansi pemerintah dalam menanggapi dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan oleh masyarakat. Persentase ini secara spesifik dihitung dari jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti, dan penyelesaiannya telah diverifikasi serta dinyatakan tuntas oleh sistem atau pihak yang berwenang.

4	Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa instansi memiliki sistem penanganan pengaduan yang efektif, responsif, dan akuntabel. Hal ini mencerminkan komitmen instansi untuk melayani masyarakat dan memperbaiki pelayanan berdasarkan masukan/kritik. Persentase yang rendah mengindikasikan adanya kendala dalam proses penanganan, seperti lamanya waktu respons, kurangnya koordinasi, atau kegagalan dalam menyelesaikan masalah hingga tuntas dan terverifikasi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $((a) / (b)) * 100\%$ Keterangan: (a) = Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Telah Ditindaklanjuti dan Dinyatakan Selesai Diverifikasi/Tuntas: Ini adalah jumlah pengaduan yang tidak hanya direspons, tetapi juga masalahnya sudah diselesaikan, dan penyelesaian tersebut telah diverifikasi serta dikonfirmasi tuntas oleh sistem atau unit pengelola pengaduan resmi. (b) = Total Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Diterima dan Wajib Ditindaklanjuti: Ini adalah seluruh pengaduan sah yang masuk ke instansi atau sistem selama periode pelaporan dan memerlukan tindakan penyelesaian.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Telah Ditindaklanjuti dan Dinyatakan Selesai Diverifikasi/Tuntas dalam Periode Pelaporan. b. Total Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Diterima dan Wajib Ditindaklanjuti dalam Periode yang Sama.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Penerimaan dan Registrasi Pengaduan Masyarakat. - Proses Analisis, Disposisi, dan Tindak Lanjut Pengaduan oleh Unit Terkait. - Kegiatan Verifikasi, Monitoring, dan Penutupan Pengaduan oleh Petugas Pengelola Pengaduan
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Bulanan, Triwulanan dan tahunan
10	Klasifikasi	- Berdasarkan Status Pengaduan: Selesai (Diverifikasi/Tuntas), Sedang Diproses, Belum Ditindaklanjuti. - Berdasarkan Sektor/Isu Pengaduan: Pelayanan Publik, Infrastruktur, Hukum, Kepegawaian, dll. - Berdasarkan Kanal Penerimaan: LAPOR!, Surat Resmi, Langsung, Media Sosial.

11	Level Estimasi	- Kementerian/Lembaga - Unit Eselon I/II terkait pengaduan masyarakat
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase PTKN yang memperoleh nilai pembangunan zona integritas minimal 75
3	Konsep/Definisi	Rasio yang menunjukkan proporsi Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), baik di bawah Kementerian Agama maupun kementerian/lembaga lain, yang telah mencapai skor atau nilai evaluasi minimal 75 dalam proses Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Nilai 75 merupakan ambang batas kinerja minimal yang ditetapkan untuk menunjukkan komitmen dan keberhasilan signifikan dalam reformasi birokrasi, khususnya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
4	Interpretasi	Persentase yang tinggi mengindikasikan bahwa mayoritas PTKN telah berhasil mengimplementasikan program reformasi birokrasi yang efektif, dengan fokus kuat pada tata kelola yang bersih, transparan, dan pelayanan publik yang prima. Ini mencerminkan komitmen lembaga pendidikan keagamaan dalam membangun integritas. Persentase yang rendah menunjukkan perlunya peningkatan upaya dalam perbaikan manajemen risiko, pengendalian internal, dan penyediaan layanan yang bebas dari praktik korupsi.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = ((a) / (b)) * 100% Keterangan: (a) = Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) yang Memperoleh Nilai Pembangunan ZI ≥ 75: Ini adalah angka PTKN yang telah diukur dan skor penilaian Pembangunan Zona Integritas-nya mencapai minimal 75 (atau lebih tinggi), yang menunjukkan komitmen signifikan terhadap Reformasi Birokrasi, WBK, dan WBBM. (b) = Total Jumlah PTKN yang Wajib Melaksanakan Pembangunan ZI: Ini adalah keseluruhan jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (UIN, IAIN, STAIN, dll.) yang masuk dalam cakupan target pembangunan Zona Integritas.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) yang Memperoleh Nilai Pembangunan Zona Integritas ≥ 75. b. Total Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) yang Wajib Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan PTKN. - Survei dan Penilaian Mandiri (Internal) Pembangunan ZI oleh PTKN. - Evaluasi dan Penilaian Eksternal Pembangunan ZI oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) atau Tim Penilai Internal (TPI) Kementerian Agama/Kementerian terkait. - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kualitas Pelayanan Publik.
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	- Berdasarkan Jenis PTKN: UIN (Universitas Islam Negeri), IAIN (Institut Agama Islam Negeri), STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri), atau PTKN lainnya. - Berdasarkan Status Penetapan ZI: Belum Diusulkan, Diusulkan WBK, Ditetapkan WBK, Ditetapkan WBBM. - Berdasarkan Wilayah: Provinsi/Regional.
11	Level Estimasi	- Tingkat Kementerian Agama (agregasi nasional seluruh PTKN). - Dapat diturunkan hingga tingkat individu PTKN sesuai hasil penilaian Zona Integritas.
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan layanan pengadaan barang dan jasa
3	Konsep/Definisi	Ukuran kinerja yang mencerminkan peningkatan kualitas dan kematangan layanan yang diberikan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam memproses pengadaan barang/jasa. Peningkatan layanan ini diukur melalui perbandingan skor Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) atau Tingkat Kematangan UKPBJ dari tahun berjalan terhadap skor tahun sebelumnya. Semakin tinggi skor, semakin matang dan prima layanan pengadaan yang diselenggarakan.
4	Interpretasi	Nilai persentase yang positif menunjukkan adanya perbaikan kualitas layanan pengadaan, yang meliputi kecepatan, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Peningkatan ini selaras dengan upaya Reformasi Birokrasi dan pencegahan korupsi. Jika persentase negatif atau stagnan, ini mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap manajemen risiko, SDM, dan tata kelola pengadaan di lingkungan UKPBJ.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase Peningkatan = $\frac{((T_n) - (T_{n-1}))}{(T_{n-1})} \times 100\%$ Keterangan: - Nilai Indeks UKPBJ Tahun Berjalan (T_n): Nilai evaluasi kualitas layanan pengadaan barang/jasa (seringkali menggunakan skor Indeks Tata Kelola Pengadaan/ITKP atau Tingkat Kematangan UKPBJ) pada periode yang sedang dilaporkan. - Nilai Indeks UKPBJ Tahun Sebelumnya (T_{n-1}): Nilai evaluasi yang sama pada periode tahun sebelumnya, digunakan sebagai basis perbandingan. * 100%: Digunakan untuk mengubah hasil perubahan menjadi bentuk persentase, yang menunjukkan seberapa besar kenaikan (atau penurunan) kualitas layanan pengadaan dibandingkan tahun lalu.

6	Nama Variabel Pembangun	a. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) atau Tingkat Kematangan UKPBJ Tahun Berjalan (Tn). b. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) atau Tingkat Kematangan UKPBJ Tahun Sebelumnya (Tn-1).
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pelaksanaan Survei dan Penilaian Mandiri Kematangan UKPBJ. - Evaluasi Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) atau Penilaian Kematangan UKPBJ oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadaan. - Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Digitalisasi Layanan Pengadaan (LPSE).
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	- Berdasarkan Kriteria Penilaian ITKP/Kematangan (misalnya, Aspek Kebijakan, Aspek Proses Bisnis, Aspek SDM, Aspek Kelembagaan). - Berdasarkan Jenis UKPBJ (Pusat/Daerah/Perguruan Tinggi).
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Rerata nilai ASN Kementerian Agama yang mengikuti Pelatihan Manajerial (Kepemimpinan) minimal 80
3	Konsep/Definisi	Rata-rata (rerata) nilai evaluasi yang diperoleh oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama yang telah menyelesaikan program Pelatihan Manajerial atau Kepemimpinan (seperti Pelatihan Kepemimpinan Administrator/PKA, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas/PKP, atau sejenisnya). Nilai rerata ini hanya dihitung dari ASN yang mendapatkan skor akhir minimal 80, menunjukkan bahwa mereka telah mencapai standar kompetensi yang tinggi dalam pelatihan tersebut.

4	Interpretasi	Rerata nilai yang tinggi (mendekati 100) menunjukkan bahwa ASN peserta pelatihan memiliki kualitas penyerapan materi, keterampilan, dan kompetensi manajerial/kepemimpinan yang sangat baik dan melebihi ambang batas minimal (80). Hal ini mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan diklat dalam meningkatkan kapasitas kepemimpinan. Sebaliknya, rerata yang hanya sedikit di atas 80 mengindikasikan bahwa meskipun ASN tersebut lulus, kualitas kompetensinya masih perlu ditingkatkan lebih lanjut.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rerata Nilai = (a) / (b) Keterangan (a) = Total Kumulatif Nilai Akhir ASN yang Mendapat Nilai ≥ 80: Ini adalah jumlah total (akumulasi) dari semua nilai akhir yang didapatkan oleh para peserta pelatihan manajerial/kepemimpinan yang dinyatakan lulus dengan skor minimal 80 atau lebih. (b) = Jumlah ASN yang Mendapat Nilai ≥ 80: Ini adalah hitungan (frekuensi) jumlah individu ASN yang berhasil lulus pelatihan dengan skor akhir minimal 80.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Total Kumulatif Nilai Akhir ASN Kemenag yang Mengikuti Pelatihan Manajerial dan Memperoleh Nilai ≥ 80. b. Jumlah ASN Kemenag yang Mengikuti Pelatihan Manajerial dan Memperoleh Nilai ≥ 80.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial (PKA, PKP, atau Diklat Fungsional/Teknis Kepemimpinan). - Evaluasi Kompetensi Peserta Pelatihan (melalui ujian, penilaian proyek, atau studi kasus). - Pengolahan Data dan Sertifikasi Alumni Pelatihan ASN.
8	Ukuran/Satuan	Skor Numerik (0-100)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	- Berdasarkan Jenis Pelatihan: PKA, PKP, Pelatihan Fungsional Tertentu. - Berdasarkan Unit Penyelenggara: Balai Diklat Keagamaan (BDK), Pusat Pelatihan dan Pendidikan (Pusdiklat) Teknis. - Berdasarkan Kategori ASN: Eselon III, Eselon IV, Fungsional Tertentu.
11	Level Estimasi	- Nasional ' - Unit Eselon I atau Satuan Kerja

12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Rerata nilai ASN Kementerian Agama yang mengikuti Pelatihan Manajerial (Kepemimpinan) minimal 80
3	Konsep/Definisi	Rata-rata (rerata) nilai evaluasi yang diperoleh oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama yang telah menyelesaikan program Pelatihan Manajerial atau Kepemimpinan (seperti Pelatihan Kepemimpinan Administrator/PKA, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas/PKP, atau sejenisnya). Nilai rerata ini hanya dihitung dari ASN yang mendapatkan skor akhir minimal 80, menunjukkan bahwa mereka telah mencapai standar kompetensi yang tinggi dalam pelatihan tersebut.
4	Interpretasi	Rerata nilai yang tinggi (mendekati 100) menunjukkan bahwa ASN peserta pelatihan memiliki kualitas penyerapan materi, keterampilan, dan kompetensi manajerial/kepemimpinan yang sangat baik dan melebihi ambang batas minimal (80). Hal ini mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan diklat dalam meningkatkan kapasitas kepemimpinan. Sebaliknya, rerata yang hanya sedikit di atas 80 mengindikasikan bahwa meskipun ASN tersebut lulus, kualitas kompetensinya masih perlu ditingkatkan lebih lanjut.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rerata Nilai = (a) / (b) Keterangan (a) = Total Kumulatif Nilai Akhir ASN yang Mendapat Nilai ≥ 80: Ini adalah jumlah total (akumulasi) dari semua nilai akhir yang didapatkan oleh para peserta pelatihan manajerial/kepemimpinan yang dinyatakan lulus dengan skor minimal 80 atau lebih. (b) = Jumlah ASN yang Mendapat Nilai ≥ 80: Ini adalah hitungan (frekuensi) jumlah individu ASN yang berhasil lulus pelatihan dengan skor akhir minimal 80.

6	Nama Variabel Pembangun	a. Total Kumulatif Nilai Akhir ASN Kemenag yang Mengikuti Pelatihan Manajerial dan Memperoleh Nilai ≥ 80 . b. Jumlah ASN Kemenag yang Mengikuti Pelatihan Manajerial dan Memperoleh Nilai ≥ 80 .
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial (PKA, PKP, atau Diklat Fungsional/Teknis Kepemimpinan). - Evaluasi Kompetensi Peserta Pelatihan (melalui ujian, penilaian proyek, atau studi kasus). - Pengolahan Data dan Sertifikasi Alumni Pelatihan ASN.
8	Ukuran/Satuan	Skor Numerik (0-100)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	- Berdasarkan Jenis Pelatihan: PKA, PKP, Pelatihan Fungsional Tertentu. - Berdasarkan Unit Penyelenggara: Balai Diklat Keagamaan (BDK), Pusat Pelatihan dan Pendidikan (Pusdiklat) Teknis. - Berdasarkan Kategori ASN: Eselon III, Eselon IV, Fungsional Tertentu.
11	Level Estimasi	- Nasional '- Unit Eselon I atau Satuan Kerja
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase koleksi digital perpustakaan yang dapat diakses secara online
3	Konsep/Definisi	Rasio yang mengukur proporsi total koleksi perpustakaan (berbentuk e-book, e-journal, hasil penelitian, atau dokumen digital lainnya) yang dimiliki oleh unit perpustakaan Kementerian Agama dan telah tersedia, terindeks, dan dapat diakses secara penuh (full-text) atau sebagian oleh pengguna/masyarakat melalui platform daring (online), seperti repositori, e-library, atau aplikasi khusus.

4	Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa perpustakaan Kementerian Agama telah bertransformasi secara digital, mampu memberikan akses yang luas, mudah, dan merata terhadap kekayaan intelektual dan literasi keagamaan kepada publik. Hal ini mencerminkan peningkatan kualitas layanan dan dukungan terhadap pembelajaran jarak jauh. Persentase yang rendah mengindikasikan bahwa banyak koleksi digital masih tersimpan secara lokal (offline) atau belum berhasil diintegrasikan ke dalam sistem akses publik online.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $((a) / (b)) * 100\%$ Keterangan: (a) = Jumlah Koleksi Perpustakaan Digital yang Dapat Diakses Secara Online: Ini adalah hitungan (count) dari e-book, e-journal, atau dokumen digital lain yang dimiliki perpustakaan Kemenag dan sudah tersedia serta dapat diakses penuh melalui platform atau repositori online (seperti ELIPSKI). (b) = Total Jumlah Koleksi Perpustakaan Digital yang Dimiliki: Ini adalah seluruh hitungan (count) koleksi digital yang sudah dimiliki oleh perpustakaan Kemenag, termasuk yang mungkin masih tersimpan secara offline atau belum terindeks.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Koleksi Perpustakaan Digital yang Dapat Diakses Secara Online (Terindeks dan Tersedia di Platform Daring). b. Total Jumlah Koleksi Perpustakaan Digital yang Dimiliki (Termasuk yang belum diakses online).
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Akuisisi, Digitalisasi, dan Pengemasan Ulang (Repackaging) Koleksi Perpustakaan. - Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Perpustakaan Digital (E-Library/Repository). - Kegiatan Metadata Entry dan Indeksasi Koleksi. - Pelaporan Kinerja Layanan Perpustakaan.
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	- Berdasarkan Jenis Koleksi: E-book, E-Journal, Laporan Penelitian, Karya Ilmiah Dosen/Mahasiswa. - Berdasarkan Sektor Keagamaan: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. - Berdasarkan Unit Pengelola: Pusat, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), Balai Litbang Diklat.
11	Level Estimasi	- Nasional '- Satuan Kerja

12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Nilai Akreditasi Perpustakaan
3	Konsep/Definisi	Nilai numerik hasil penilaian resmi yang diberikan oleh lembaga akreditasi perpustakaan (Perpustakaan Nasional Republik Indonesia/Perpusnas) terhadap perpustakaan di lingkungan Kementerian Agama. Penilaian ini mencakup berbagai aspek, seperti koleksi, sarana/prasarana, pelayanan, sumber daya manusia (SDM), dan pengorganisasian, untuk menentukan kualitas dan standar operasional perpustakaan. Nilai akreditasi mencerminkan status mutu perpustakaan (misalnya: A/Unggul, B/Baik, C/Cukup, atau Tidak Terakreditasi).
4	Interpretasi	Nilai akreditasi yang tinggi (misalnya nilai A atau B) menunjukkan bahwa perpustakaan Kementerian Agama telah memenuhi standar nasional atau bahkan melampauinya, memiliki tata kelola yang baik, koleksi yang memadai, dan pelayanan yang prima. Nilai ini menjadi indikator penting kualitas infrastruktur pendukung pendidikan dan literasi di lingkungan Kemenag. Nilai yang rendah mengindikasikan perlunya perbaikan signifikan pada aspek-aspek pengelolaan perpustakaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Nilai Akreditasi = Skor Akhir Penilaian (diambil langsung dari Sertifikat Akreditasi)
6	Nama Variabel Pembangun	Nilai Akhir Akreditasi Perpustakaan yang Diberikan oleh Lembaga Akreditasi.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pengajuan dan Persiapan Permohonan Akreditasi Perpustakaan oleh UPT/Satuan Kerja Kemenag. - Asesmen Lapangan dan Penilaian oleh Asesor dari Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas). - Penerbitan Sertifikat Akreditasi dan Penetapan Nilai oleh Lembaga Akreditasi.
8	Ukuran/Satuan	Skor Numerik (Skala 0-100) atau Peringkat Mutu (A, B, C)

9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Berkala (3 - 5 Tahunan) sesuai masa berlaku akreditasi
10	Klasifikasi	- Berdasarkan Jenis Perpustakaan: Perpustakaan Perguruan Tinggi (UIN/IAIN), Perpustakaan Sekolah (Madrasah), Perpustakaan Khusus (Litbang/Arsip). - Berdasarkan Peringkat Mutu: A (Unggul), B (Baik), C (Cukup), Belum Terakreditasi.
11	Level Estimasi	Satuan Kerja Perpustakaan
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase rancangan peraturan yang diselesaikan sesuai perencanaan
3	Konsep/Definisi	Ukuran kinerja yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu lembaga dalam menyelesaikan penyusunan dan pengesahan rancangan peraturan (termasuk rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, rancangan peraturan daerah, atau jenis peraturan lainnya) dalam periode waktu yang telah direncanakan atau ditargetkan dalam Progam Legislasi Nasional (Prolegnas) atau Program Legislasi Daerah (Prolegda) atau rencana kerja sejenis
4	Interpretasi	Nilai persentase yang tinggi (mendekati 100%) menunjukkan bahwa lembaga tersebut sangat efektif dan efisien dalam manajemen proses legislasi/regulasi, dengan sedikit kendala atau penundaan. Hal ini mencerminkan kualitas perencanaan, koordinasi antar instansi, dan kepatuhan terhadap jadwal kerja. Persentase yang rendah mengindikasikan adanya masalah signifikan dalam proses legislasi, seperti penundaan, perubahan prioritas, atau kesulitan dalam mencapai konsensus.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $((a) / (b)) * 100\%$ Keterangan: (a) = Jumlah Rancangan Peraturan yang Berhasil Diselesaikan Sesuai Perencanaan: Ini adalah jumlah peraturan (seperti RUU, RPP, atau Perda) yang telah berhasil disahkan/ditetapkan tepat waktu sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Program Legislasi (Prolegnas/Prolegda) atau rencana kerja awal. (b) = Total Jumlah Rancangan Peraturan yang Direncanakan: Ini adalah total keseluruhan jumlah rancangan peraturan yang ditargetkan atau dimasukkan dalam daftar prioritas untuk diselesaikan dalam periode waktu tertentu.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Rancangan Peraturan yang Berhasil Diselesaikan (disahkan/ditetapkan) dalam Periode Perencanaan. b. Total Jumlah Rancangan Peraturan yang Direncanakan (ditargetkan) untuk Diselesaikan dalam Periode yang Sama.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Penyusunan program legislasi/peraturan. - Penyusunan, pembahasan, dan finalisasi rancangan peraturan. - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan.
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	- Berdasarkan Tingkat Peraturan: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri/Lembaga - Berdasarkan Sektor/Bidang: Ekonomi, Sosial, Hukum & Keamanan, Pemerintahan Daerah, dan lain-lain - Berdasarkan Jenis Program: Prolegnas Prioritas, Prolegnas Kumulatif Terbuka, Prolegda.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

N O	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi Keagamaan
3	Konsep/Definisi	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi adalah persentase jumlah penduduk yang sedang menempuh pendidikan tinggi (Diploma/Sarjana) terhadap jumlah penduduk usia 19–24 tahun. APK dapat melebihi 100% karena menghitung semua yang sedang bersekolah di jenjang tersebut, tanpa memperhitungkan apakah usianya sesuai.
4	Interpretasi	APK Pendidikan Tinggi memberikan gambaran tentang daya serap sistem pendidikan tinggi terhadap penduduk, termasuk mereka yang lebih tua atau lebih muda dari usia ideal pendidikan tinggi. Angka ini mencerminkan aksesibilitas dan keterjangkauan pendidikan tinggi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan/Ma'had Aly b = Jumlah penduduk usia 19–24 tahun
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan/Ma'had Aly b. Jumlah penduduk usia 19–24 tahun
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendataan Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis perguruan tinggi: PTKN, PTKS
11	Level Estimasi	Nasional, dan Perguruan Tinggi Keagamaan
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan	-

	nama publikasinya)	
N O	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Persentase lulusan pendidikan tinggi Keagamaan/Ma'had Aly yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun
3	Konsep/Definisi	Persentase lulusan satuan pendidikan tinggi keagamaan, termasuk Ma'had Aly, yang memperoleh pekerjaan (formal/informal) dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan setelah kelulusan.
4	Interpretasi	Indikator ini mencerminkan daya serap lulusan pendidikan tinggi keagamaan terhadap dunia kerja. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik keterkaitan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan pasar kerja.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah lulusan PTK/Ma'had Aly yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun pada periode sebelumnya b = Jumlah lulusan PTK/Ma'had Aly pada periode sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah lulusan pendidikan tinggi keagamaan/Ma'had Aly yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu < 1 tahun setelah lulus b. Jumlah total lulusan pendidikan tinggi keagamaan/Ma'had Aly pada periode yang sama
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Tracer Studi oleh masing-masing Perguruan Tinggi Keagamaan/Ma'had Aly
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahun
10	Klasifikasi	Berdasarkan status kerja: Bekerja < 1 tahun, Bekerja ≥ 1 tahun, Belum Bekerja
11	Level Estimasi	Nasional, dan Perguruan Tinggi Keagamaan
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
N O	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat THE Impact SDGs
3	Konsep/Definisi	Jumlah perguruan tinggi (PT) yang masuk dalam daftar Times Higher Education (THE) Impact Rankings pada peringkat kurang dari 1000 besar dunia, berdasarkan penilaian kontribusi PT terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).
4	Interpretasi	Indikator ini menunjukkan pengakuan internasional terhadap peran dan kontribusi perguruan tinggi Indonesia dalam mendukung SDGs melalui pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, tata kelola institusi, dan kemitraan. Semakin banyak PT yang masuk <1000 besar, semakin tinggi pengakuan terhadap kinerja keberlanjutan perguruan tinggi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Jumlah PTK/Ma'had Aly dalam peringkat THE Impact Rankings <1000
6	Nama Variabel Pembangun	Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan/Ma'had Aly yang masuk dalam THE Impact Rankings SDGs
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan/Ma'had Aly yang masuk dalam THE Impact Rankings SDGs
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan SDGs Goal
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
N O	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan jumlah mahasiswa pada PTK/Ma'had Aly
3	Konsep/Definisi	Persentase peningkatan jumlah mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) dan Ma'had Aly adalah ukuran relatif yang menunjukkan perubahan jumlah mahasiswa yang terdaftar aktif pada institusi pendidikan tinggi keagamaan dari periode waktu tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. PTK meliputi Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), dan perguruan tinggi keagamaan swasta yang terakreditasi. Ma'had Aly adalah lembaga pendidikan tinggi pesantren yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesi dalam bidang keagamaan Islam.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur tingkat pertumbuhan partisipasi mahasiswa dalam pendidikan tinggi keagamaan. Nilai positif menunjukkan adanya peningkatan jumlah mahasiswa, sedangkan nilai negatif menunjukkan penurunan. Semakin tinggi persentase peningkatan, semakin baik kinerja dalam memperluas akses pendidikan tinggi keagamaan. Indikator ini mencerminkan daya tarik, kapasitas, dan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan serta efektivitas kebijakan pengembangan pendidikan tinggi keagamaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase peningkatan = $((a - b) / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = jumlah mahasiswa tahun berjalan; b = jumlah mahasiswa tahun sebelumnya.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah mahasiswa tahun berjalan b. Jumlah mahasiswa tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pendataan EMIS PTK dan Ma'had Aly - Verifikasi dan Validasi Data Mahasiswa oleh Setjen Kemenag dan Ditjen Pendis - Monitoring dan Evaluasi Data Mahasiswa
8	Ukuran/Satuan	Persen

9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri (UIN, IAIN, STAIN) - PTK Swasta - Ma'had Aly Berdasarkan Jenjang: - S1/Sarjana - S2/Magister - S3/Doktor
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
N O	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Persentase PTK/Ma'had Aly yang terakreditasi
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur proporsi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) pada Ma'had Aly yang telah memiliki status akreditasi, baik akreditasi program studi maupun kelembagaan, oleh lembaga akreditasi yang diakui pemerintah.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase, menunjukkan bahwa semakin banyak PTK di Ma'had Aly yang telah melalui proses penjaminan mutu melalui sistem akreditasi formal, sehingga menjamin kompetensi, kualitas pendidikan, dan standar nasional pendidikan telah dipenuhi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a/b) \times 100\%$ Dengan: a = Jumlah Ma'had Aly/PTK di Ma'had Aly yang telah terakreditasi b = Jumlah total Ma'had Aly/PTK di Ma'had Aly
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah PTK/Ma'had Aly yang telah terakreditasi b. Jumlah total PTK/Ma'had Aly yang ada

7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pelaksanaan akreditasi Ma'had Aly oleh BAN-PT atau LAMDIK/LAMEMBA (jika berlaku) - Pemutakhiran data EMIS dan SIKS-Diktis - Monitoring dan evaluasi mutu Ma'had Aly oleh Ditjen Pendis
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Mutu Pendidikan Keagamaan Tinggi
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi, dan/atau per lembaga Ma'had Aly
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
N O	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Persentase dosen dan tenaga kependidikan PTK/Ma'had Aly yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi
3	Konsep/Definisi	Persentase dosen dan tenaga kependidikan Perguruan Tinggi Kejuruan (PTK) yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi sebagai bukti peningkatan keterampilan, pengetahuan, atau keahlian sesuai bidang keahliannya. Sertifikasi ini dapat berupa sertifikat pelatihan, uji kompetensi, atau program pengembangan profesional lainnya yang diakui secara nasional/internasional.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur sejauh mana dosen dan tenaga kependidikan PTK telah meningkatkan kompetensinya melalui program sertifikasi. Persentase yang tinggi menunjukkan komitmen institusi dalam pengembangan SDM dosen dan kualitas pengajaran.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan PTK yang memperoleh sertifikasi kompetensi b = Total Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan PTK

6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah Dosen PTK Bersertifikasi Kompetensi 2. Jumlah Tenaga Kependidikan PTK Bersertifikasi Kompetensi 3. Jumlah Dosen PTK 4. Jumlah Tenaga Kependidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelatihan/sertifikasi dosen oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) atau badan sertifikasi terkait. 2. Program pengembangan dosen (e.g., Microcredential, pelatihan industri). 3. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan/Kebudayaan/Ristek atau mitra industri.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	- Bidang Keahlian: Sertifikasi diklasifikasikan berdasarkan bidang - Jenis Sertifikasi: Sertifikasi nasional (BNSP), internasional, atau pelatihan khusus.
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Rata-rata masa tunggu lulusan pendidikan tinggi keagamaan untuk mendapatkan pekerjaan
3	Konsep/Definisi	Rata-rata waktu yang dibutuhkan lulusan pendidikan tinggi (sarjana/diploma) sejak kelulusan hingga memperoleh pekerjaan pertama yang dibayar (formal/non-formal)
4	Interpretasi	Indikator ini mencerminkan kecepatan transisi lulusan dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Semakin rendah nilai rata-rata masa tunggu, maka semakin baik daya serap lulusan oleh pasar kerja dan semakin relevan pendidikan yang diperoleh

5	Metode / Rumus Perhitungan	Rata-rata masa tunggu = ($\sum$ waktu tunggu semua lulusan yang bekerja) / jumlah lulusan yang bekerja
6	Nama Variabel Pembangun	Rata-rata Masa Tunggu Lulusan Pendidikan Tinggi (Bulan)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) - Survei Penelusuran Alumni (Tracer Study) oleh perguruan tinggi - Survei Khusus terkait Ketenagakerjaan Lulusan
8	Ukuran/Satuan	Waktu (Bulan)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	- Tahunan (data Sakernas/BPS dirilis setiap tahun). - Periodik (tracer study perguruan tinggi biasanya 1–2 tahun setelah kelulusan)
10	Klasifikasi	Diploma, Sarjana, Magister, Doktor
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Sakernas
N O	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Persentase kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur proporsi perjanjian kerja sama (MoU/MoA/perjanjian kerja lainnya) yang masih aktif dan telah memberikan output berupa program nyata dalam peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, seperti pelatihan, pendampingan, sertifikasi, magang, pertukaran dosen/guru, atau program kemitraan peningkatan kompetensi lainnya.
4	Interpretasi	Persentase kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase=(a/b)×100% Dengan: a = Jumlah kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK b = Jumlah total kerja sama aktif

6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK b. Jumlah total kerja sama aktif yang terdata
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pendataan dan pemantauan kerja sama pendidikan oleh unit teknis - Evaluasi program kemitraan peningkatan mutu PTK - Pelaporan kinerja kelembagaan dan kerja sama
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Efektivitas Kemitraan dan Pengembangan SDM Pendidikan
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi, Jenis Lembaga (Madrasah, PTKIN, Satuan Pendidikan Keagamaan, Balai Diklat, dst.)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
N O	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Indeks Keberagamaan Mahasiswa (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha)
3	Konsep/Definisi	Indeks Keberagamaan Mahasiswa adalah ukuran tingkat penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan mahasiswa pada masing-masing agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang mencakup aspek keyakinan, ibadah, pengetahuan agama, dan perilaku sosial keagamaan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan semakin kuatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan mahasiswa. Indeks dapat digunakan untuk melihat pola keberagamaan antaragama, antarwilayah, maupun antarperguruan tinggi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Indeks} = (\sum \text{skor aspek keagamaan individu} / \text{skor maksimum}) \times 100$

6	Nama Variabel Pembangun	1. Skor keyakinan keagamaan mahasiswa 2. Skor praktik ibadah mahasiswa 3. Skor pengetahuan ajaran agama 4. Skor perilaku sosial keagamaan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survei Indeks Keberagamaan Mahasiswa
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha.
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Jumlah perguruan tinggi keagamaan yang masuk ke dalam peringkat THE Impact SDGs
3	Konsep/Definisi	Persentase perguruan tinggi di tingkat nasional yang berhasil masuk dalam peringkat Times Higher Education (THE) Impact Rankings pada posisi 1000 teratas secara global, dengan fokus pada kontribusi perguruan tinggi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)
4	Interpretasi	Indikator ini mencerminkan sejauh mana perguruan tinggi di Indonesia secara kolektif diakui secara internasional atas dampak positifnya dalam mendukung pencapaian SDGs. Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak perguruan tinggi Indonesia yang memiliki kinerja unggul dan diakui secara global dalam kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan

5	Metode / Rumus Perhitungan	Jumlah = Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan yang masuk ke dalam peringkat THE Impact SDGs
6	Nama Variabel Pembangun	Jumlah total perguruan tinggi yang berpotensi masuk THE Impact Rankings SDGs
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pemeringkatan Times Higher Education (THE) Impact Rankings
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	THE 17 GOALS
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Times Higher Education
NO	Atribut	Keterangan
	1 Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Tinggi Islam
	2 Nama Indikator	Persentase PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang memenuhi standar sarana prasarana
	3 Konsep/Definisi	Persentase PTK yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi adalah proporsi perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang memiliki fasilitas akademik dan non-akademik sesuai ketentuan standar minimal sarana dan prasarana pendidikan tinggi.
	4 Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak perguruan tinggi keagamaan yang memiliki sarana dan prasarana memadai sesuai standar nasional pendidikan tinggi.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah PTK/Ma'had Aly yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi dalam periode tertentu; b = Jumlah total PTK/Ma'had Aly yang ada dalam periode yang sama;
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah PTK/Ma'had Aly yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi; 2. Jumlah total PTK/Ma'had Aly.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Verifikasi dan validasi data sarana prasarana melalui EMIS dan monitoring lapangan; - Fasilitasi pembangunan dan rehabilitasi sarpras PTK; - Evaluasi pemenuhan standar sarpras oleh Tim Penjaminan Mutu PTK.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
N O	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang menyediakan fasilitas yang mendukung Pendidikan Tinggi berbasis gender dan inklusif

3	Konsep/Definisi	Persentase PTK yang menyediakan fasilitas pendidikan berbasis gender dan inklusif adalah ukuran proporsi perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang memiliki sarana, kebijakan, dan lingkungan fisik yang mendukung kesetaraan gender serta akses bagi seluruh kelompok tanpa diskriminasi.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini, semakin banyak PTK yang menyediakan dukungan terhadap pendidikan tinggi yang inklusif. Hal ini menunjukkan komitmen lembaga pendidikan dalam memenuhi hak-hak pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah PTK yang menyediakan fasilitas inklusif b = Jumlah PTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah PTK yang menyediakan fasilitas inklusif 2. Jumlah PTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendataan oleh EMIS
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama

2	Nama Indikator	Persentase mahasiswa PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) penerima beasiswa
3	Konsep/Definisi	Persentase mahasiswa PTK penerima beasiswa adalah ukuran proporsi mahasiswa pada perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang memperoleh bantuan biaya pendidikan dari pemerintah, lembaga keagamaan, atau sumber lain yang sah.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase mahasiswa penerima beasiswa, menunjukkan semakin luasnya akses bantuan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa, baik dari pemerintah, institusi, maupun pihak swasta
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa penerima beasiswa b = Jumlah mahasiswa
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa 2. Jumlah Mahasiswa
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pencatatan oleh EMIS
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Jenis Beasiswa: Akademik, Non-Akademik (olahraga/seni), Kebutuhan Ekonomi, Prestasi, dll.
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase mahasiswa kategori UKT kelompok I

3	Konsep/Definisi	Persentase mahasiswa kategori Uang Kuliah Tunggal (UKT) Kelompok I adalah proporsi mahasiswa baru atau mahasiswa aktif di Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang ditetapkan dalam kelompok UKT paling rendah (Kelompok I). Kelompok UKT I ini diperuntukkan bagi mahasiswa dengan kondisi ekonomi paling membutuhkan dan/atau memiliki keterbatasan finansial, sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur tingkat keterjangkauan layanan pendidikan tinggi di PTK. Semakin tinggi persentase mahasiswa yang masuk dalam kategori UKT Kelompok I, menunjukkan semakin efektif upaya Kementerian Agama dan PTK dalam memastikan bahwa pendidikan tinggi dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa kategori UKT Kelompok I b = Jumlah total mahasiswa baru atau mahasiswa aktif
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah mahasiswa kategori UKT Kelompok I pada PTKN 2. Jumlah total mahasiswa baru atau mahasiswa aktif pada PTKN
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Penerapan sistem UKT berbasis data ekonomi mahasiswa - Verifikasi dan validasi ekonomi calon mahasiswa baru (UKT online/offline) - Sosialisasi dan pelaksanaan kebijakan afirmatif UKT
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Tahun Masuk: - Angkatan 202X; - Angkatan 202X-1, dst.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

N O	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan animo mahasiswa baru
3	Konsep/Definisi	Persentase peningkatan animo mahasiswa baru adalah perubahan persentase jumlah pendaftar baru pada suatu institusi pendidikan tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya
4	Interpretasi	Variabel ini menunjukkan seberapa besar minat calon mahasiswa untuk mendaftar pada institusi tersebut. Peningkatan nilai menunjukkan daya tarik institusi yang meningkat, sedangkan penurunan mengindikasikan menurunnya minat calon mahasiswa
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = ((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah pendaftar tahun berjalan b = Jumlah pendaftar tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah pendaftar tahun berjalan 2. Jumlah pendaftar tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) atau Rekrutmen Calon Mahasiswa
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

N O	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase mahasiswa baru yang berkuliah di perguruan tinggi keagamaan (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) berkualitas
3	Konsep/Definisi	Persentase mahasiswa baru yang berkuliah di perguruan tinggi berkualitas adalah rasio antara jumlah mahasiswa baru yang diterima dan terdaftar di Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang telah terakreditasi Unggul/A atau memiliki peringkat terbaik, dibandingkan dengan total seluruh mahasiswa baru yang diterima di PTK pada periode tertentu.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur ketersediaan akses dan pilihan pendidikan tinggi yang berkualitas bagi mahasiswa baru. Semakin tinggi proporsi mahasiswa baru yang memilih dan diterima di PTK berkualitas, menunjukkan semakin efektif upaya Kementerian Agama dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan tinggi dan penyediaan pilihan institusi yang terpercaya.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa baru yang diterima di PTK dengan akreditasi institusi Unggul/A atau peringkat terbaik. b = Jumlah mahasiswa baru yang diterima di seluruh PTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah mahasiswa baru yang diterima di PTK dengan akreditasi institusi Unggul/A atau peringkat terbaik. 2. Jumlah mahasiswa baru yang diterima di seluruh PTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Penghitungan oleh EMIS
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase mahasiswa baru PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) berkuliah di Prodi STEM terakreditasi unggul
3	Konsep/Definisi	Persentase mahasiswa baru PTK yang berkuliah di program studi STEM terakreditasi unggul adalah ukuran proporsi mahasiswa baru pada perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang terdaftar di program studi bidang Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika (STEM) dengan status akreditasi “Unggul” dari BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak mahasiswa baru di PTK yang memilih program studi STEM dengan mutu akademik tinggi, mencerminkan peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi keagamaan terhadap kebutuhan iptek.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Proporsi} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa baru di Prodi STEM terakreditasi Unggul b = Jumlah total mahasiswa baru di seluruh Prodi STEM
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah mahasiswa baru di prodi STEM terakreditasi unggul 2. Jumlah total mahasiswa baru di prodi STEM
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pelaporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) oleh perguruan tinggi
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan

10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
N O	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Ditjen Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Jumlah perguruan tinggi keagamaan (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang terpetakan berdasarkan keunggulannya
3	Konsep/Definisi	Jumlah perguruan tinggi keagamaan yang terpetakan berdasarkan keunggulannya adalah banyaknya PTK (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang telah diklasifikasikan menurut bidang atau capaian unggulan, seperti riset, inovasi, pengabdian masyarakat, tata kelola, dan mutu akademik.
4	Interpretasi	Semakin tinggi jumlah PTK yang terpetakan menunjukkan semakin baiknya pemetaan mutu dan diferensiasi perguruan tinggi keagamaan berdasarkan keunggulan spesifiknya, yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan kebijakan dan pembinaan mutu.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Jumlah = Banyaknya PTK yang telah dikategorikan sesuai hasil pemetaan keunggulan berdasarkan kriteria mutu dan capaian unggulan.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah PTK yang telah terpetakan berdasarkan keunggulannya.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Kegiatan pemetaan dan klasifikasi PTK oleh Kementerian Agama - Survei dan asesmen potensi unggulan PTK - Penyusunan profil kelembagaan PTK
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan

10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
N O	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase Prodi PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang mendapatkan akreditasi unggul
3	Konsep/Definisi	Persentase Prodi PTK yang mendapatkan akreditasi unggul adalah ukuran proporsi program studi pada perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang memperoleh peringkat akreditasi “Unggul” dari BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak program studi di perguruan tinggi keagamaan yang telah mencapai mutu akademik tertinggi, mencerminkan peningkatan kualitas pendidikan dan tata kelola akademik di lingkungan PTK.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah PTK yang berakreditasi unggul b = Jumlah PTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah PTK yang berakreditasi unggul 2. Jumlah PTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendataan oleh EMIS
8	Ukuran/Satuan	Persen

9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Di PDDikti
N O	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang terakreditasi
3	Konsep/Definisi	Persentase LPTK PTK yang terakreditasi adalah ukuran proporsi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan di lingkungan perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang telah memperoleh status akreditasi dari BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak LPTK di PTK yang memenuhi standar mutu kelembagaan dan tata kelola pendidikan, mencerminkan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan calon tenaga pendidik keagamaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah LPTK yang telah terakreditasi. b = Jumlah LPTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah LPTK yang telah terakreditasi. 2. Jumlah LPTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pendampingan dan fasilitasi akreditasi LPTK; - Penguatan sistem penjaminan mutu internal; - Verifikasi data akreditasi melalui EMIS dan BAN-PT/LAM.

8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Peringkat Akreditasi: - Unggul/A - Baik Sekali/B - Baik/C
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
N O	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase program studi Program Profesi Guru (PPG) PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang terakreditasi unggul
3	Konsep/Definisi	Persentase program studi PPG PTK yang terakreditasi unggul adalah ukuran proporsi program studi Program Profesi Guru pada perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang memperoleh peringkat akreditasi “Unggul” dari BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak program studi PPG di PTK yang telah mencapai mutu akademik tertinggi, mencerminkan peningkatan kualitas pendidikan profesi guru keagamaan dan kesiapan lembaga dalam menghasilkan pendidik profesional.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah PTK yang telah terpetakan berdasarkan keunggulannya. b = Jumlah PTK

6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah PTK yang telah terpetakan berdasarkan keunggulannya. 2. Jumlah PTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Peningkatan dan Fasilitasi Akreditasi Unggul Program Studi PPG (melalui pembinaan, pendampingan, workshop, penyusunan dokumen akreditasi, dan evaluasi diri). - Pendataan dan Rekapitulasi Program Studi PPG yang telah terakreditasi (termasuk status akreditasi aktif) di bawah Kementerian Agama
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
N O	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase dosen berkualifikasi akademik S3 a. Total b. STEM c. Non STEM
3	Konsep/Definisi	Persentase dosen berkualifikasi akademik S3 adalah rasio jumlah dosen bergelar doktor (S3) terhadap jumlah total dosen aktif di perguruan tinggi, baik secara keseluruhan (total), di bidang STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), maupun di bidang non-STEM.

4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin baik kualitas sumber daya dosen yang berperan dalam meningkatkan mutu tridharma perguruan tinggi, khususnya di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Total} = ((a + b) / c) \times 100\%$ $\text{STEM} = (a / c) \times 100\%$ $\text{Non-STEM} = (b / c) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah dosen S3 STEM b = Jumlah dosen S3 non-STEM c = Jumlah dosen
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah dosen S3 STEM 2. Jumlah dosen S3 non-STEM 3. Jumlah dosen
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dan EMIS Perguruan Tinggi Keagamaan
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
N O	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase dosen yang mempunyai pengalaman di luar kampus

3	Konsep/Definisi	Persentase dosen yang mempunyai pengalaman di luar kampus adalah rasio jumlah dosen tetap yang terlibat dalam aktivitas profesional di luar perguruan tinggi seperti industri, lembaga riset, pemerintahan, organisasi internasional, atau kegiatan pengabdian masyarakat, terhadap jumlah total dosen tetap.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin banyak dosen yang memiliki pengalaman praktis dan relevan di dunia luar kampus, yang diharapkan dapat meningkatkan relevansi pembelajaran dan penelitian di perguruan tinggi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah dosen yang memiliki pengalaman di luar kampus b = Jumlah dosen tetap
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah dosen yang memiliki pengalaman di luar kampus 2. Jumlah dosen tetap
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survei Aktivitas Dosen atau Pelaporan Beban Kerja Dosen (BKD)
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama

2	Nama Indikator	Persentase dosen yang menduduki jabatan lektor/lektor kepala/guru besar
3	Konsep/Definisi	Persentase dosen yang menduduki jabatan akademik Lektor, Lektor Kepala, atau Guru Besar adalah rasio jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik tersebut terhadap jumlah total dosen tetap di perguruan tinggi.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin baik tingkat profesionalisme, kepakaran, dan kontribusi dosen dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat).
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = jumlah dosen dengan jabatan Lektor, Lektor Kepala, atau Guru Besar b = jumlah total dosen tetap
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah dosen dengan jabatan Lektor, Lektor Kepala, atau Guru Besar 2. Jumlah total dosen tetap
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dan EMIS Perguruan Tinggi Keagamaan
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Jenis Jabatan: Lektor, Lektor Kepala, Guru Besar
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
N O	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti program peningkatan kompetensi

3	Konsep/Definisi	Persentase dosen dan tenaga kependidikan Perguruan Tinggi Kejuruan (PTK) yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi sebagai bukti peningkatan keterampilan, pengetahuan, atau keahlian sesuai bidang keahliannya. Sertifikasi ini dapat berupa sertifikat pelatihan, uji kompetensi, atau program pengembangan profesional lainnya yang diakui secara nasional/internasional.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur sejauh mana dosen PTK telah meningkatkan kompetensinya melalui program sertifikasi. Persentase yang tinggi menunjukkan komitmen institusi dalam pengembangan SDM dosen dan kualitas pengajaran.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah dosen dan tenaga kependidikan PTK yang memperoleh program peningkatan kompetensi b = Jumlah dosen dan tenaga kependidikan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang memperoleh program peningkatan kompetensi 2. Jumlah dosen dan tenaga kependidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelatihan/sertifikasi dosen oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) atau badan sertifikasi terkait. 2. Program pengembangan dosen (e.g., Microcredential, pelatihan industri). 3. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan/Kebudayaan/Ristek atau mitra industri.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Jenis Sertifikasi: Sertifikasi nasional (BNSP), internasional, atau pelatihan khusus.
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan

1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase dosen PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang menjadi Narasumber Konferensi nasional maupun internasional
3	Konsep/Definisi	Persentase dosen PTK yang menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional adalah ukuran proporsi dosen pada perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang berpartisipasi sebagai pembicara, pemakalah, atau panelis pada forum ilmiah tingkat nasional dan internasional.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin aktif dan diakui dosen PTK dalam jejaring ilmiah nasional dan global, mencerminkan peningkatan kapasitas akademik, reputasi, dan kontribusi ilmiah perguruan tinggi keagamaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah dosen yang menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional b = Jumlah dosen aktif yang ada di PTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah dosen yang menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional 2. Jumlah dosen aktif yang ada di PTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pendataan partisipasi dosen pada kegiatan ilmiah - Fasilitasi dan insentif publikasi ilmiah dan partisipasi konferensi - Evaluasi kegiatan tridarma dosen
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Konferensi: - Nasional - Internasional
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan	-

	nama publikasinya)	
N O	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Rasio dosen asing PTK (Islam/ Kristen/ Katolik/ Hindu/ Buddha) dengan dosen dalam negeri
3	Konsep/Definisi	Rasio dosen asing dengan dosen dalam negeri pada PTK adalah perbandingan antara jumlah dosen berkewarganegaraan asing dengan jumlah dosen warga negara Indonesia yang mengajar di perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha).
4	Interpretasi	Semakin tinggi rasio menunjukkan semakin besar keterlibatan dosen asing dalam kegiatan akademik PTK, yang mencerminkan peningkatan kolaborasi internasional dan pengakuan global terhadap mutu pendidikan tinggi keagamaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rasio = $1 : (b / a)$ Keterangan: a = Jumlah dosen asing aktif di PTK b = Jumlah dosen dalam negeri aktif di PTK
6	Nama Variabel Pembangun	a = Jumlah dosen asing aktif di PTK b = Jumlah dosen dalam negeri aktif di PTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Program visiting professor atau exchange lecturer - Skema rekrutmen dosen asing - Kerja sama internasional PTK (MoU/MoA)
8	Ukuran/Satuan	Rasio
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah	-

	tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	
N O	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase pemenuhan jumlah tenaga kependidikan PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) pada jenjang jabatan fungsional
3	Konsep/Definisi	Persentase pemenuhan jumlah tenaga kependidikan PTK pada jenjang jabatan fungsional adalah ukuran tingkat kesesuaian antara jumlah tenaga kependidikan yang telah menduduki jabatan fungsional (misalnya arsiparis, pustakawan, pranata laboratorium, analis kepegawaian, dan sejenisnya) dengan jumlah formasi atau kebutuhan ideal di perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha).
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin terpenuhinya kebutuhan tenaga kependidikan sesuai jabatan fungsional yang dibutuhkan, mencerminkan efektivitas manajemen SDM dan profesionalitas tenaga kependidikan di lingkungan PTK.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah tenaga kependidikan eksisting pada jenjang jabatan fungsional b = Jumlah kebutuhan tenaga kependidikan pada jenjang jabatan fungsional
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah tenaga kependidikan eksisting pada jenjang jabatan fungsional 2. Jumlah kebutuhan tenaga kependidikan pada jenjang jabatan fungsional
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	a. Pendataan Tenaga Kependidikan oleh Dinas Pendidikan / Kementerian b. Analisis Kebutuhan Formasi oleh BKN / Kemdikbudristek / Pemerintah Daerah
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Data diperbarui secara berkala (tahunan) dengan cut-off per tanggal 30 Juni setiap tahun.
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly

11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
N O	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase lulusan perguruan tinggi (berkualifikasi S1) dengan pengalaman 1 (satu) semester di luar kampus
3	Konsep/Definisi	Proporsi lulusan program sarjana (S1) dari Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang telah mengikuti program pembelajaran di luar kampus selama minimal satu semester penuh, relatif terhadap total lulusan program sarjana (S1) pada periode yang sama
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur keberhasilan Kementerian Agama dalam mendorong dan memfasilitasi lulusan S1 untuk memiliki pengalaman praktis dan relevan di luar lingkungan akademik. Semakin tinggi persentase lulusan dengan pengalaman di luar kampus, menunjukkan semakin kuatnya adaptasi kurikulum dan program pendidikan PTK terhadap kebutuhan dunia kerja dan dinamika masyarakat
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah lulusan PTK dengan pengalaman satu semester di luar kampus. b = Jumlah lulusan PTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lulusan PTK dengan pengalaman satu semester di luar kampus. 2. Jumlah lulusan PTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pelaksanaan dan Fasilitasi Program Pembelajaran di Luar Kampus (Magang, KKN, Pertukaran Mahasiswa, dll.) dan Pendataan Partisipan serta Lulusan dari Program Tersebut. - Proses Yudisium dan Pendataan Seluruh Lulusan Program Sarjana (S1)
8	Ukuran/Satuan	Persen

9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
N O	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang memiliki Pusat Pengembangan Karir
3	Konsep/Definisi	Proporsi Perguruan Tinggi Keagamaan (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) di bawah Kementerian Agama yang memiliki unit atau fasilitas yang secara khusus memberikan layanan pengembangan karir kepada mahasiswa dan alumni, relatif terhadap total PTK yang ada
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur ketersediaan fasilitas dan layanan pengembangan karir di PTK. Semakin tinggi persentase PTK yang memiliki pusat pengembangan karir, menunjukkan semakin besar perhatian dan upaya Kementerian Agama dalam mempersiapkan lulusan PTK untuk memasuki dunia kerja atau berwirausaha
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah PTK yang memiliki pusat pengembangan karir b = Jumlah PTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah PTK yang telah terpetakan berdasarkan keunggulannya 2. Jumlah PTK

7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan	- Identifikasi dan verifikasi keberadaan pusat pengembangan karir di setiap PTK (melalui survei, pendataan, atau laporan dari PTK). - Pendataan dan rekapitulasi total PTK di bawah Kementerian Agama.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase lulusan PTK yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan: a. Total; b. Karyawan atau Wirausaha
3	Konsep/Definisi	Persentase lulusan PTK yang berhasil memiliki pekerjaan adalah proporsi lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang telah berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai karyawan atau merintis usaha (wirausaha) dalam periode waktu tertentu setelah kelulusan, dibandingkan dengan total lulusan yang lulus pada periode yang sama. Indikator ini mengukur keberhasilan PTK dalam mempersiapkan lulusannya untuk memasuki dunia kerja atau menciptakan lapangan kerja sendiri.

4	Interpretasi	Indikator ini mengukur keberhasilan PTK dalam menghasilkan lulusan yang relevan dan siap kerja atau siap berwirausaha. Semakin tinggi persentase lulusan yang berhasil memiliki pekerjaan, baik sebagai karyawan maupun wirausaha, menunjukkan semakin baik kualitas kurikulum, proses pembelajaran, dan pembinaan karir yang dilakukan oleh PTK. Ini mengindikasikan bahwa lulusan PTK memiliki daya saing yang tinggi dan mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja atau menciptakan peluang ekonomi sendiri. Peningkatan indikator ini berkontribusi pada peningkatan relevansi pendidikan tinggi keagamaan, peningkatan angka serapan lulusan, pengurangan pengangguran terdidik, serta peningkatan kontribusi PTK terhadap pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $\{ (a + b) / c \} \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah lulusan PTK yang berhasil menjadi karyawan dalam periode tertentu setelah kelulusan. b = Jumlah lulusan PTK yang berhasil menjadi wirausaha dalam periode tertentu setelah kelulusan. c = Jumlah total lulusan PTK yang lulus dalam periode yang sama.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lulusan PTK yang berhasil menjadi karyawan dalam periode tertentu setelah kelulusan. 2. Jumlah lulusan PTK yang berhasil menjadi wirausaha dalam periode tertentu setelah kelulusan. 3. Jumlah total lulusan PTK yang lulus dalam periode yang sama.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Tracer Study PTK - Program Career Center dan Alumni - Pelatihan kewirausahaan dan magang - Inkubator bisnis mahasiswa/alumni
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Pekerjaan: Karyawan, Wirausaha
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi	-

	data? (Disebutkan nama publikasinya)	
N O	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase tenaga kerja lulusan PTK (Islam/ Kristen/ Katolik/ Hindu/ Buddha) bidang STEM
3	Konsep/Defini si	Proporsi angkatan kerja yang memiliki gelar pendidikan tinggi (D3, D4/ Sarjana Terapan, S1, S2, S3) dari program studi di bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM), relatif terhadap total angkatan kerja lulusan pendidikan tinggi. Indikator ini mengukur ketersediaan SDM berkualitas di sektor-sektor kritis yang mendorong inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing bangs
4	Interpretasi	Indikator ini mencerminkan sejauh mana sistem pendidikan tinggi nasional mampu menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan industri dan sektor strategis di bidang STEM. Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan ketersediaan SDM STEM yang memadai untuk mendukung inovasi, riset dan pengembangan, transformasi digital, serta peningkatan produktivitas ekonomi. Ini juga mengindikasikan keberhasilan dalam mendorong minat dan kapasitas generasi muda pada disiplin ilmu yang penting untuk masa depan
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah lulusan PTK bidang STEM. b = Jumlah lulusan PTK.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lulusan PTK bidang STEM. 2. Jumlah lulusan PTK.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) atau survei ketenagakerjaan lainnya yang spesifik
8	Ukuran/ Satua n	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Bidang STEM: - Sains (Fisika, Kimia, Biologi, Matematika, Statistika, dll.) - Teknologi (Informatika, Sistem Informasi, dll.) - Teknik/Rekayasa (Sipil, Elektro, Mesin, dll.) - Matematika Murni & Aktuaria

11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Sakernas
N O	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan mahasiswa PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang mendapatkan sertifikasi kompetensi/profesi
3	Konsep/Definisi	Proporsi lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) di bawah Kementerian Agama yang berhasil memperoleh sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi yang diakui dan memiliki reputasi baik, relatif terhadap total lulusan pada periode yang sama. Indikator ini mencerminkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur keberhasilan PTK dalam menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan akademis, tetapi juga dibekali dengan keterampilan praktis dan pengakuan kompetensi yang diakui secara profesional. Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan bahwa program pendidikan di PTK semakin relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan lulusannya memiliki daya saing yang kuat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah lulusan PTK yang mendapat sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi bereputasi. b = Jumlah lulusan PTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lulusan PTK yang mendapat sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi bereputasi. 2. Jumlah lulusan PTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Fasilitasi program sertifikasi kompetensi bagi mahasiswa/lulusan, kerja sama dengan lembaga sertifikasi, dan pendataan lulusan yang bersertifikat kompetensi. - Pendataan dan rekapitulasi total lulusan PTK di bawah Kementerian Agama

8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Lembaga Sertifikasi: - LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) terlisensi BNSP - Asosiasi Profesi - Lembaga Sertifikasi Internasional
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
N O	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Rasio Outbound per Inbound mahasiswa PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha)
3	Konsep/Definisi	Rasio outbound per inbound mahasiswa adalah perbandingan antara jumlah mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang mengikuti program mobilitas ke luar negeri (outbound) dengan jumlah mahasiswa asing yang mengikuti program mobilitas ke dalam PTK tersebut (inbound) dalam periode tertentu.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur tingkat internasionalisasi dan relevansi pendidikan tinggi keagamaan dengan dinamika global. Semakin seimbang rasio antara mahasiswa outbound dan inbound (mendekati 1:1), menunjukkan semakin kuatnya daya tarik dan kemampuan PTK dalam menciptakan ekosistem akademik yang inklusif secara internasional, serta semakin aktifnya mahasiswa PTK dalam mencari pengalaman global. Peningkatan rasio ini mencerminkan pengakuan PTK di kancah internasional, pengayaan perspektif multikultural di kampus, serta peningkatan kompetensi global mahasiswa. Hal ini berdampak pada peningkatan kualitas lulusan yang siap bersaing di pasar kerja global, pengembangan jejaring internasional, dan peningkatan reputasi PTK sebagai pusat keunggulan pendidikan keagamaan.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Rasio Outbound per Inbound = 1 : (b / a) Keterangan: a = Jumlah mahasiswa outbound PTK b = Jumlah mahasiswa inbound PTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah mahasiswa outbound PTK 2. Jumlah mahasiswa inbound PTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Program mobilitas mahasiswa internasional (Erasmus+, IISMA, dll) - Student exchange antarlembaga PTKI dan mitra luar negeri - Program KKN internasional / transfer kredit luar negeri
8	Ukuran/Satuan	Rasio
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase mahasiswa yang berkegiatan di luar program studi
3	Konsep/Definisi	Persentase mahasiswa yang berkegiatan di luar program studi adalah proporsi mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang mengikuti kegiatan atau program di luar kurikulum inti program studi mereka, dibandingkan dengan total seluruh mahasiswa yang aktif di PTK dalam periode tertentu. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi tambahan, soft skills, dan pengalaman di luar bidang keilmuan utama.

4	Interpretasi	Indikator ini mengukur tingkat fleksibilitas kurikulum dan partisipasi mahasiswa dalam pengembangan diri di luar bidang utama, yang krusial untuk meningkatkan relevansi lulusan. Semakin tinggi persentase mahasiswa yang berkegiatan di luar prodi, menunjukkan semakin kuatnya upaya PTK dalam memberikan pengalaman belajar holistik dan kesempatan untuk mengembangkan soft skills, kemandirian, serta jejaring. Ini juga mencerminkan kesadaran mahasiswa akan pentingnya kompetensi lintas disiplin.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa aktif yang berkegiatan di luar program studi dalam periode tertentu. b = Jumlah mahasiswa aktif yang ada di PTK dalam periode yang sama.
6	Nama Variabel Pembangun	a: Jumlah mahasiswa aktif yang berkegiatan di luar program studi dalam periode tertentu. b: Jumlah mahasiswa aktif yang ada di PTK dalam periode yang sama.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Kegiatan organisasi kemahasiswaan (ormawa) - Magang (MBKM, kerja praktik, dll) - KKN, pengabdian masyarakat - Program pertukaran pelajar, riset kolaboratif, dan kompetisi mahasiswa
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Kegiatan: - Program MBKM (spesifik: Pertukaran Pelajar, Magang, Asistensi Mengajar, dll.) - Organisasi Kemahasiswaan (Internal/Eksternal) - Kompetisi/Lomba - Pengabdian Masyarakat - Karya Ilmiah/Kreativitas (di luar tugas akhir prodi)
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan	-

	nama publikasinya)	
N O	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi
3	Konsep/Definisi	Persentase mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang berpartisipasi dalam kompetisi akademik, seni, atau olahraga yang diselenggarakan di tingkat nasional maupun internasional dalam periode waktu tertentu. Kompetisi ini mencakup, namun tidak terbatas pada, olimpiade sains, lomba inovasi, debat, kompetisi pemrograman, turnamen olahraga, dan festival seni.
4	Interpretasi	Indikator ini menggambarkan tingkat partisipasi dan daya saing mahasiswa PTK di kancah nasional dan internasional. Persentase yang tinggi menunjukkan lingkungan akademik yang kondusif untuk pengembangan potensi mahasiswa di luar kurikulum formal, serta reputasi PTK dalam menghasilkan talenta-talenta berdaya saing global.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase peningkatan = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi pada tahun berjalan b = Jumlah mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi pada tahun berjalan 2. Jumlah mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi pada tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendataan Partisipasi Mahasiswa dalam Kompetisi (PPMK)
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi

12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
N O	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri/pemerintah/ Lembaga Masyarakat /Internasional
3	Konsep/Definisi	Proporsi jumlah PTK yang terlibat aktif dalam kolaborasi atau kemitraan dengan entitas eksternal (dunia usaha dan industri, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, atau lembaga internasional) dibandingkan dengan total keseluruhan PTK. Kerja sama ini dapat meliputi berbagai bentuk, seperti magang industri, proyek penelitian bersama, pengembangan kurikulum bersama, pelatihan, program pengabdian masyarakat, atau pertukaran keahlian.
4	Interpretasi	Indikator ini mencerminkan tingkat keterbukaan dan relevansi institusi pendidikan dengan kebutuhan eksternal. Semakin tinggi persentase ini, semakin kuat integrasi institusi pendidikan dengan lingkungan kerja, industri, dan masyarakat, yang berpotensi meningkatkan kualitas pendidikan dan relevansi lulusan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase PTK yang bekerjasama = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja, industri, pemerintah, lembaga masyarakat, atau internasional b = Jumlah PTK
6	Nama Variabel Pembangun	a = Jumlah PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja, industri, pemerintah, lembaga masyarakat, atau internasional b = Jumlah PTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survei Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendataan Potensi dan Kemitraan Institusi Pendidikan

8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Jenis mitra: Industri, Pemerintah, LSM, Internasional
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
N O	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti dibidang: a. Pendidikan dan pengajaran b. Penelitian dan publikasi c. Pengabdian kepada masyarakat
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur sejauh mana kerja sama yang telah disepakati dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kegiatan nyata. Kerja sama dimaksud mencakup perjanjian, nota kesepahaman, atau bentuk komitmen resmi antara perguruan tinggi/lembaga dengan mitra, yang kemudian dilaksanakan melalui kegiatan sesuai bidang.
4	Interpretasi	Nilai persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak kerja sama yang benar-benar ditindaklanjuti dan berdampak, sedangkan nilai rendah mengindikasikan adanya banyak kesepakatan yang belum terlaksana secara nyata.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase kerja sama bidang pendidikan dan pengajaran: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah kerja sama pendidikan dan pengajaran yang ditindaklanjuti b = Jumlah kerja sama pendidikan dan pengajaran yang disepakati Persentase kerjasama bidang penelitian dan publikasi: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah kerja sama penelitian dan publikasi yang ditindaklanjuti b = Jumlah kerja sama penelitian dan publikasi yang disepakati Persentase kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah kerja sama pengabdian kepada masyarakat yang ditindaklanjuti b = Jumlah kerja sama pengabdian kepada masyarakat yang disepakati
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah kerja sama pendidikan dan pengajaran yang ditindaklanjuti 2. Jumlah kerja sama pendidikan dan pengajaran yang disepakati 3. Jumlah kerja sama penelitian dan publikasi yang ditindaklanjuti 4. Jumlah kerja sama penelitian dan publikasi yang disepakati 5. Jumlah kerja sama pengabdian kepada masyarakat yang ditindaklanjuti 6. Jumlah kerja sama pengabdian kepada masyarakat yang disepakati
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pencatatan dan Pemantauan Kerjasama (Monitoring and Evaluation of Partnerships) 2. Manajemen Kerjasama (Partnership Management) 3. Pelaporan Kinerja Kerjasama (Partnership Performance Reporting)
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Jenis mitra: Industri, Pemerintah, LSM, Internasional
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
N O	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase mahasiswa yang mengikuti program peningkatan literasi Kitab Suci
3	Konsep/Definisi	Persentase mahasiswa pada perguruan tinggi keagamaan atau umum yang berpartisipasi dalam program peningkatan literasi Kitab Suci, baik melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler yang difasilitasi oleh lembaga pendidikan dan instansi keagamaan.
4	Interpretasi	Peningkatan nilai menunjukkan bahwa semakin banyak mahasiswa yang mendapatkan akses dan kesempatan dalam penguatan spiritualitas dan nilai-nilai kebajikan lintas agama.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa yang mengikuti program literasi Kitab Suci dalam satuan waktu tertentu b = Jumlah mahasiswa dalam satuan waktu yang sama
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah mahasiswa yang mengikuti program literasi Kitab Suci dalam satuan waktu tertentu 2. Jumlah mahasiswa dalam satuan waktu yang sama
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pengembangan dan pelaksanaan program literasi Kitab Suci di PTKI/PTU 2. Pelatihan dan workshop peningkatan pemahaman kitab suci 3. Kegiatan pembinaan keagamaan berbasis kitab suci 4. Kemitraan dengan ormas dan lembaga keagamaan dalam literasi kitab 5. Monitoring dan evaluasi program pembelajaran kitab suci
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan

10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
N O	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase prodi yang mengimplementasikan integrasi keilmuan
3	Konsep/Definisi	Persentase prodi yang mengimplementasikan integrasi keilmuan adalah rasio jumlah program studi (prodi) di perguruan tinggi keagamaan yang telah menerapkan kurikulum, metode pembelajaran, atau penelitian berbasis integrasi keilmuan dibandingkan dengan total prodi yang diukur pada periode tertentu
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini, semakin banyak prodi yang berhasil menggabungkan ilmu agama dengan ilmu umum atau interdisipliner, untuk menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan holistik dan relevan dengan kebutuhan masyarakat
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah prodi yang mengimplementasikan integrasi keilmuan b = Jumlah prodi yang diukur
6	Nama Variabel Pembangun	a = Jumlah prodi yang mengimplementasikan integrasi keilmuan b = Jumlah prodi yang diukur
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Evaluasi kurikulum dan implementasi integrasi keilmuan 2. Workshop/pelatihan pengembangan kurikulum integratif 3. Pendampingan dan monitoring prodi
8	Ukuran/Satuan	Persen

9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
N O	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase PTK yang mengembangkan pusat-pusat kajian keagamaan sesuai kebutuhan lokal
3	Konsep/Definisi	Persentase PTK yang membentuk dan mengembangkan pusat kajian keagamaan berbasis isu-isu lokal seperti moderasi beragama, toleransi, harmoni sosial, dan penguatan nilai keagamaan kontekstual sesuai kebutuhan masyarakat sekitar.
4	Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan keberhasilan PTK dalam merespons dinamika sosial-keagamaan di tingkat lokal dengan pendekatan berbasis riset dan advokasi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah PTK yang telah mengembangkan pusat kajian keagamaan berbasis isu dan kebutuhan lokal b = Jumlah PTK yang menjadi sasaran program
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah PTK yang telah mengembangkan pusat kajian keagamaan berbasis isu dan kebutuhan lokal 2. Jumlah PTK yang menjadi sasaran program

7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pembentukan pusat studi keagamaan berbasis lokal 2. Penelitian berbasis kebutuhan sosial-keagamaan lokal 3. Pengabdian masyarakat berbasis hasil kajian keagamaan 4. Penerbitan hasil kajian tematik keagamaan 5. Kemitraan PTK dengan pemda/lembaga masyarakat dalam bidang keagamaan
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
N O	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase karya tulis ilmiah yang bereputasi nasional
3	Konsep/Definisi	Persentase karya tulis ilmiah yang bereputasi nasional di Kementerian Agama adalah perbandingan jumlah karya tulis ilmiah ilmiah yang terakreditasi nasional (minimal SINTA 1 atau SINTA 2) yang dikelola oleh unit kerja atau perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama, terhadap total jumlah karya tulis ilmiah yang diterbitkan di lingkungan Kementerian Agama
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan kualitas dan pengakuan nasional atas karya tulis ilmiah-karya tulis ilmiah ilmiah di bawah pengelolaan Kementerian Agama

5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: (a / b) x 100% Keterangan: a = Jumlah karya tulis ilmiah terakreditasi nasional (SINTA 1 atau 2) b = Total karya tulis ilmiah yang dikelola
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah karya tulis ilmiah yang terakreditasi nasional (SINTA 1 atau SINTA 2) 2. Total jumlah karya tulis ilmiah yang dikelola
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pengelolaan dan Akreditasi karya tulis ilmiah Ilmiah
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	1. SINTA 1 (Tertinggi) 2. SINTA 2 3. SINTA 3 4. SINTA 4 ke bawah
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Di Scopus
N O	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase publikasi ilmiah bereputasi internasional PTK yang disitasi

3	Konsep/Definisi	Persentase artikel jurnal bereputasi internasional yang disitasi adalah proporsi artikel ilmiah yang dipublikasikan oleh dosen/peneliti PTK pada jurnal bereputasi internasional yang telah mendapat sitasi (citation) dari artikel lain dalam periode tertentu. Jurnal bereputasi internasional adalah jurnal yang terindeks dalam database internasional yang diakui seperti Scopus, Web of Science (WoS), atau database internasional lainnya yang memiliki sistem peer-review yang ketat. Sitasi adalah rujukan atau referensi yang dibuat oleh artikel lain terhadap artikel yang dimaksud, yang menunjukkan dampak dan kontribusi artikel tersebut terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Artikel yang disitasi menunjukkan kualitas, relevansi, dan pengaruh penelitian terhadap komunitas ilmiah internasional.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur dampak dan kualitas publikasi ilmiah PTK di tingkat internasional. Semakin tinggi persentase artikel yang disitasi, menunjukkan semakin baik kualitas dan relevansi penelitian yang dihasilkan oleh PTK.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100 \%$
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah artikel jurnal bereputasi internasional yang memperoleh sitasi; b. Jumlah total artikel jurnal bereputasi internasional yang diterbitkan oleh PTK.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Insentif Publikasi Ilmiah Internasional; - Bantuan Penulisan Artikel Bereputasi; - Pelatihan Sitasi dan Manajemen Referensi Ilmiah.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Quartile Jurnal (SJR/JCR): - Q1 (Quartile 1); - Q2 (Quartile 2); - Q3 (Quartile 3); - Q4 (Quartile 4).
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
N O	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Jumlah karya tulis ilmiah berorientasi SDGs yang terpublikasi di Jurnal Internasional bereputasi
3	Konsep/Definisi	Persentase jumlah karya tulis ilmiah yang mendukung capaian Sustainable Development Goals (SDGs) dan berhasil terpublikasi di jurnal internasional bereputasi, dibandingkan dengan total karya tulis ilmiah yang dihasilkan dalam periode tertentu.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin kuat kontribusi akademik civitas akademika dalam mendukung target SDGs melalui publikasi yang diakui secara internasional.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus = Jumlah karya tulis ilmiah berorientasi SDGs yang terpublikasi di jurnal internasional bereputasi
6	Nama Variabel Pembangun	Jumlah karya tulis ilmiah berorientasi SDGs yang terpublikasi di jurnal internasional bereputasi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penelitian dosen dan mahasiswa berfokus SDGs 2. Workshop penulisan artikel ilmiah bereputasi 3. Pendampingan publikasi internasional
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan THE 17 GOALS
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi	-

	data? (Disebutkan nama publikasinya)	
N O	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Rasio produktifitas publikasi ilmiah dengan jumlah dosen
3	Konsep/Defini si	Rasio produktivitas publikasi jurnal dengan jumlah dosen adalah perbandingan antara jumlah artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal terakreditasi nasional atau internasional dengan jumlah dosen tetap di perguruan tinggi keagamaan di lingkungan Kementerian Agama dalam periode tertentu
4	Interpretasi	Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin produktif dosen dalam menghasilkan publikasi ilmiah, yang mencerminkan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan Kementerian Agama
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rasio: $1 : (b / a)$ Keterangan: a = Jumlah artikel ilmiah yang dipublikasikan b = Jumlah dosen tetap
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah artikel ilmiah yang dipublikasikan 2. Jumlah dosen tetap
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Kegiatan Penelitian dan Publikasi Ilmiah Dosen PTKIN/PTKIS 2. Program Insentif Publikasi Ilmiah 3. Program Peningkatan Mutu Penelitian Dosen
8	Ukuran/Satua n	Rasio
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Quartil Artikel: (Q1, Q2, Q3, dan Q4)
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan	Di Scopus

	nama publikasinya)	
N O	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Jumlah Paten Granted karya tulis ilmiah Perguruan Tinggi Keagamaan
3	Konsep/Definisi	Jumlah Paten Granted karya tulis ilmiah Perguruan Tinggi adalah total hak paten yang telah resmi diberikan (granted) oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) kepada Perguruan Tinggi Keagamaan di lingkungan Kementerian Agama dalam periode tertentu
4	Interpretasi	Semakin banyak jumlah paten yang granted, semakin menunjukkan meningkatnya kapasitas inovasi, riset terapan, dan kontribusi Perguruan Tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta pemanfaatannya untuk masyarakat
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: Jumlah Paten Granted (disetujui DJKI) dalam satu tahun
6	Nama Variabel Pembangun	Jumlah paten granted yang diperoleh oleh Perguruan Tinggi Keagamaan.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Inovasi di PTKIN/PTKIS 2. Program Pendaftaran dan Fasilitasi Paten Perguruan Tinggi
8	Ukuran/Satuan	Unit (paten)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Kategori Jumlah Paten Granted 1. Rendah (0 – 2 paten granted) 2. Sedang (3 – 5 paten granted) 3. Tinggi (> 5 paten granted)
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan	-

	nama publikasinya)	
N O	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan DUDI/Masyarakat
3	Konsep/Definisi	Persentase hasil riset dan inovasi adalah rasio antara jumlah hasil riset dan inovasi yang telah dimanfaatkan oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) atau masyarakat terhadap total hasil riset dan inovasi yang dihasilkan perguruan tinggi keagamaan dalam periode tertentu
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak hasil riset dan inovasi yang aplikatif, relevan, dan bermanfaat bagi DUDI/masyarakat, menandakan peningkatan kualitas riset terapan di perguruan tinggi
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah hasil riset yang dimanfaatkan DUDI/Masyarakat b = Jumlah hasil riset
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah hasil riset yang dimanfaatkan DUDI/Masyarakat 2. Jumlah hasil riset
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Kegiatan Penelitian dan Inovasi Terapan 2. Program Hilirisasi Hasil Riset 3. Kemitraan Perguruan Tinggi dengan DUDI/Komunitas Masyarakat
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Pihak Pemanfaat: - Dunia Usaha (Perusahaan, Startup) - Dunia Industri - Masyarakat (Komunitas, Kelompok Tani, UMKM) - Pemerintah/Lembaga Publik
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
N O	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase Lembaga Penelitian dan Pengabdian ke Masyarakat (LPPM) yang ditingkatkan kapasitasnya
3	Konsep/Definisi	Persentase LPPM yang mendapatkan program peningkatan kapasitas melalui pelatihan, workshop, pendampingan, atau sertifikasi dalam rangka penguatan fungsi riset dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan perguruan tinggi keagamaan
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan makin banyak LPPM yang ditingkatkan kapasitasnya, sebagai cerminan perbaikan kualitas manajemen riset dan pengabdian di perguruan tinggi
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah LPPM yang ditingkatkan kapasitasnya b = Jumlah LPPM PTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah LPPM yang ditingkatkan kapasitasnya 2. Jumlah LPPM PTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelatihan/Workshop Manajemen Riset dan Pengabdian Masyarakat 2. Sertifikasi Kompetensi Pengelola LPPM 3. Program Penguatan Tata Kelola LPPM 4. Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan LPPM
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis peningkatan kapasitasnya: 1. Pelatihan Pengelolaan LPPM 2. Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Kelola LPPM 3. Sertifikasi Kompetensi Pengelola LPPM 4. Pendampingan Penyusunan Roadmap Riset & Pengabdian
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator	Tidak

	dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
N O	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur tingkat kecukupan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang tersedia untuk mendukung layanan digital dan operasional sistem informasi di lingkungan instansi pemerintah.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa kebutuhan infrastruktur TIK (seperti jaringan, server, perangkat keras, dan pusat data) telah terpenuhi secara optimal guna mendukung kelancaran layanan digital.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah kebutuhan infrastruktur TIK yang telah terpenuhi b. Jumlah total kebutuhan infrastruktur TIK yang direncanakan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah perangkat keras (hardware) yang tersedia 2. Jumlah kebutuhan jaringan dan konektivitas yang terpenuhi 3. Jumlah layanan server/cloud yang tersedia 4. Total kebutuhan infrastruktur yang diidentifikasi dalam perencanaan TIK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Infrastruktur TIK
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan

10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Teknologi Informasi dan Komunikasi / Infrastruktur Digital / Dukungan Layanan Pemerintah Digital
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur proporsi data prioritas yang telah tersedia dan sesuai dengan kebutuhan pengukuran indikator pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) instansi.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa instansi telah menyediakan data yang relevan dan selaras dengan perencanaan nasional dan sektoral, sehingga mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah data prioritas yang tersedia dan selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra b. Jumlah total data yang dibutuhkan untuk mengukur indikator RPJMN dan Renstra
6	Nama Variabel Pembangunan	1. Daftar indikator RPJMN dan Renstra yang membutuhkan data 2. Jumlah data yang telah tersedia dalam format dan frekuensi yang sesuai 3. Kesesuaian metadata dan definisi operasional data
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan	Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan Data Prioritas Pembangunan

8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Perencanaan Pembangunan / Satu Data Indonesia / Tata Kelola Data Pemerintah
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
N O	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Badan Kepegawaian Negara
2	Nama Indikator	Rerata nilai akreditasi lembaga pada Unit Penilaian Kompetensi Kementerian Agama oleh BKN minimal 85
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur kualitas Unit Penilaian Kompetensi (UPK) di lingkungan Kementerian Agama berdasarkan hasil akreditasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Nilai akreditasi mencerminkan standar mutu dalam pelaksanaan penilaian kompetensi ASN.
4	Interpretasi	Semakin tinggi rerata nilai akreditasi, semakin menunjukkan bahwa UPK Kementerian Agama telah memenuhi standar mutu nasional. Nilai minimal 85 menunjukkan tingkat keandalan yang tinggi dalam pelaksanaan penilaian kompetensi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Rerata} = (\Sigma a) / b$ Keterangan: a. Nilai akreditasi masing-masing Unit Penilaian Kompetensi b. Jumlah Unit Penilaian Kompetensi yang dinilai oleh BKN

6	Nama Variabel Pembangun	1. Nilai akreditasi masing-masing UPK oleh BKN 2. Jumlah UPK Kementerian Agama yang telah mengikuti proses akreditasi 3. Standar akreditasi dari BKN (misalnya aspek kelembagaan, SDM, sarana, dan metode asesmen)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Evaluasi dan Akreditasi Unit Penilaian Kompetensi ASN
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Manajemen ASN / Pengembangan Kompetensi / Reformasi Birokrasi
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
N O	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Keuangan
2	Nama Indikator	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur kualitas pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja berdasarkan aspek kepatuhan, efektivitas penyerapan anggaran, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi penggunaan dana, sebagaimana dinilai oleh Kementerian Keuangan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi nilai kinerja, menunjukkan bahwa satuan kerja semakin baik dalam merencanakan dan merealisasikan anggarannya secara tertib, efisien, dan sesuai peraturan yang berlaku.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Nilai dari Kementerian Keuangan

6	Nama Variabel Pembangun	Nilai dari Kemenkeu
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan aspek penilaian: Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Efektivitas, Efisiensi, dan Kepatuhan terhadap Regulasi
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
N O	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase Efektivitas dan Efisiensi Program yang mencapai tujuan
3	Konsep/Definisi	Penilaian terhadap tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian target output/outcome dari program/kegiatan yang di awasi melalui Program Pengawasan Intern
4	Interpretasi	Mengukur seberapa efektif dan efisien suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah program yang dinilai efektif dan efisien serta mencapai tujuan b. Jumlah total program yang dilaksanakan
6	Nama Variabel Pembangun	Program yang Efektif, Anggaran

7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Audit, Reviu, Pemantauan, Evaluasi
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Program yang efektif dan efisien mencapai target yang ditentukan
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
N O	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian PAN-RB
2	Nama Indikator	Nilai SAKIP satuan kerja
3	Konsep/Definisi	Peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja dan anggaran dalam mencapai tujuan organisasi
4	Interpretasi	Mengukur seberapa baik satuan kerja dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja sesuai dengan SAKIP
5	Metode / Rumus Perhitungan	Peningkatan rata-rata nilai SAKIP satuan kerja = rata-rata nilai SAKIP satuan kerja yang dievaluasi
6	Nama Variabel Pembangun	1.Perencanaan Kinerja 2.Pengukuran Kinerja 3.Evaluasi Kinerja 4.Pelaporan Kinerja
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Penyusunan Dokumen Perencanaan kinerja, Laporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, Audit Kinerja
8	Ukuran/Satuan	Nilai

9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Peningkatan rata-rata nilai SAKIP sesuai target yang ditetapkan
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
N O	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan yang efektif
3	Konsep/Definisi	Penilaian efektivitas sistem pengendalian internal dalam memastikan integritas, keandalan, dan ketepatan waktu laporan keuangan
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin baik fungsi pengendalian internal dalam mengelola risiko kesalahan atau kecurangan dalam pelaporan keuangan
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah satuan kerja dengan pengendalian intern pelaporan keuangan yang dinilai efektif b. Jumlah total satuan kerja yang dievaluasi
6	Nama Variabel Pembangun	Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pemantauan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Reviu PIPK
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off	Tahunan

	Ketersediaan Data	
10	Klasifikasi	Berdasarkan status efektivitas: Efektif, Cukup Efektif, Tidak Efektif
11	Level Estimasi	Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
N O	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Inspektorat Jenderal
2	Nama Indikator	Nilai telaah sejawat
3	Konsep/Definisi	Pengukuran tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar melalui evaluasi sejawat internal
4	Interpretasi	Mengukur sejauh mana telaah sejawat efektif dalam memperbaiki kualitas audit dan pengawasan
5	Metode / Rumus Perhitungan	Nilai Telaah Sejawat =Jumlah (Bobot dari setiap komponen x Skor capaian komponen telaah sejawat)
6	Nama Variabel Pembangun	Proses Telaah Sejawat
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Evaluasi Sejawat
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan aspek penilaian: Kepatuhan terhadap standar akuntansi, Kualitas penyajian laporan, Sistem pengendalian intern, Kepatuhan regulasi, Kualitas dokumentasi
11	Level Estimasi	Tahunan
12	Apakah indikator	Tidak

	dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
N O	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Inspektorat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase kegiatan pengawasan berbasis risiko dan sesuai standar
3	Konsep/Definisi	Pengawasan yang berfokus pada identifikasi, penilaian, dan penanganan risiko yang berpotensi mempengaruhi kinerja suatu organisasi atau kegiatan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin efektif dan tepat sasaran kegiatan pengawasan dalam mengelola risiko dan memastikan kepatuhan pada standar yang berlaku
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus = $(a/b) * 100\%$ Keterangan: a. Jumlah kegiatan pengawasan yang berbasis resiko dan sesuai standar b. Jumlah total kegiatan pengawasan
6	Nama Variabel Pembangun	Pengawasan Berbasis Risiko
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Penyusunan Audit Berbasis Risiko dan Pedoman Kerja Pengawasan Tahunan
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Bulanan
10	Klasifikasi	Berdasarkan pendekatan: Berbasis Risiko, Non-Risiko
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Inspektorat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase pengendalian risiko kecurangan
3	Konsep/Definisi	Menilai keberhasilan pengendalian terhadap potensi risiko kecurangan dalam pengelolaan sumber daya publik
4	Interpretasi	Mengukur sejauh mana program/kegiatan telah dilengkapi dengan sistem dan prosedur pengendalian yang efektif untuk mencegah terjadinya kecurangan
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan pengendalian risiko kecurangan b. Jumlah total satuan kerja
6	Nama Variabel Pembangun	Pengendalian Risiko Kecurangan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Audit, Reviu, Pemantauan, Evaluasi
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Bulanan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis risiko: Penyalahgunaan Keuangan, Manipulasi Laporan, Penyalahgunaan Wewenang, Gratifikasi/Korupsi
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
N O	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Inspektorat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase penanganan risiko kecurangan
3	Konsep/Definisi	Mengukur jumlah kasus yg memiliki risiko fraud yang ditindaklanjuti dan dibuktikan
4	Interpretasi	Mengukur sejauh mana upaya penanganan terhadap risiko kecurangan yang teridentifikasi telah dilakukan dengan baik
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah risiko kecurangan yang telah ditangani b. Jumlah total risiko kecurangan yang teridentifikasi
6	Nama Variabel Pembangun	Penanganan Risiko Kecurangan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Audit Investigasi, Audit Tujuan Tertentu
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Bulanan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis risiko: Penyalahgunaan Keuangan, Manipulasi Laporan, Penyalahgunaan Wewenang, Gratifikasi/Korupsi
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi	-

	data? (Disebutkan nama publikasinya)	
N O	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Inspektorat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase Pengamanan Aset Negara
3	Konsep/Defini si	Tingkat Pengamanan aset negara melalui capaian keamanan administrasi, keamanan hukum, dan keamanan fisik terhadap aset yang bermasalah
4	Interpretasi	Mengukur efektivitas pengamanan terhadap aset negara yang bermasalah (sebanyak 27 kasus) untuk mencegah kehilangan atau penyalahgunaan
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah aset negara yang telah diamankan b. Jumlah total aset negara yang dikuasai
6	Nama Variabel Pembangun	Pengamanan Aset Negara
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Audit Investigasi, Audit Tujuan Tertentu
8	Ukuran/Satua n	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Bulanan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis aset: Tanah, Bangunan, Peralatan/Mesin, Aset Tak Berwujud
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
N O	Atribut	Keterangan

1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase kajian kebijakan yang dimanfaatkan
3	Konsep/Definisi	Proporsi kajian yang digunakan dalam pengambilan keputusan
4	Interpretasi	Menggambarkan sejauh mana hasil kajian kebijakan digunakan dalam pengambilan keputusan atau penyusunan kebijakan oleh instansi
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah kajian kebijakan yang dimanfaatkan b. Jumlah total kajian kebijakan yang disusun
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah dokumen kajian yang digunakan sebagai dasar kebijakan/program 2. Jumlah seluruh dokumen kajian yang disusun dalam periode tertentu
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Penyusunan, Diseminasi, dan Monitoring Pemanfaatan Kajian Kebijakan
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Triwulan dan Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan substansi: Pengkajian dan Perumusan Kebijakan Pemerintah
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
N O	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Inspektorat Jenderal

2	Nama Indikator	Persentase tindaklanjut hasil pengawasan yang diverifikasi
3	Konsep/Definisi	Rasio yang menunjukkan seberapa efektif suatu entitas atau lembaga dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi atau temuan yang dihasilkan dari kegiatan pengawasan (audit, inspeksi, atau evaluasi) oleh Badan Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atau lembaga pengawas eksternal, yang kemudian hasilnya telah diverifikasi dan dinyatakan selesai (sesuai/tuntas) oleh pihak pengawas
4	Interpretasi	Persentase yang tinggi (mendekati 100%) menunjukkan tingkat kepatuhan dan akuntabilitas yang baik dari entitas yang diawasi. Ini mencerminkan komitmen manajemen untuk memperbaiki kelemahan, meningkatkan kinerja, dan menuntaskan temuan pengawasan. Persentase yang rendah mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal, resistensi terhadap perbaikan, atau kurangnya komitmen manajemen dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan masalah yang ditemukan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $((a) / (b)) * 100\%$ Keterangan: (a) = Jumlah Rekomendasi/Temuan Hasil Pengawasan yang Telah Ditindaklanjuti dan Dinyatakan Selesai Diverifikasi: Angka ini merujuk pada temuan audit/pengawasan yang telah diperbaiki oleh unit yang diawasi, dan perbaikan tersebut sudah diperiksa ulang dan dinyatakan tuntas oleh lembaga pengawas (seperti Inspektorat atau BPK). (b) = Total Jumlah Rekomendasi/Temuan Hasil Pengawasan yang Wajib Ditindaklanjuti: Ini adalah jumlah seluruh rekomendasi atau temuan yang dikeluarkan oleh lembaga pengawas yang harus ditindaklanjuti oleh entitas yang diawasi.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Rekomendasi/Temuan Hasil Pengawasan yang Telah Ditindaklanjuti dan Dinyatakan Selesai Diverifikasi oleh Pihak Pengawas. b. Total Jumlah Rekomendasi/Temuan Hasil Pengawasan yang Wajib Ditindaklanjuti dalam Periode Pengawasan.

7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan	- Pelaksanaan Audit, Inspeksi, atau Evaluasi (Pengawasan). - Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan Rekomendasi. - Pelaksanaan Tindak Lanjut oleh Entitas yang Diawasi. - Kegiatan Verifikasi dan Monitoring Tindak Lanjut oleh Lembaga Pengawas (APIP/BPK/dll.).
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Triwulanan, dan Tahunan
10	Klasifikasi	- Berdasarkan Jenis Pengawasan: Audit Kinerja, Audit Keuangan, Audit Tujuan Tertentu (ATT), Reviu, Evaluasi. - Berdasarkan Status Tindak Lanjut: Selesai, Belum Sesuai, Belum Ditindaklanjuti. - Berdasarkan Entitas yang Diawasi: Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), Unit Kerja Teknis.
11	Level Estimasi	- Kementerian/Lembaga - Unit Eselon I/II
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase tindaklanjut pengaduan masyarakat yang diverifikasi
3	Konsep/Definisi	Persentase yang mengukur efektivitas dan responsivitas suatu instansi pemerintah dalam menanggapi dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan oleh masyarakat. Persentase ini secara spesifik dihitung dari jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti, dan penyelesaiannya telah diverifikasi serta dinyatakan tuntas oleh sistem atau pihak yang berwenang.

4	Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa instansi memiliki sistem penanganan pengaduan yang efektif, responsif, dan akuntabel. Hal ini mencerminkan komitmen instansi untuk melayani masyarakat dan memperbaiki pelayanan berdasarkan masukan/kritik. Persentase yang rendah mengindikasikan adanya kendala dalam proses penanganan, seperti lamanya waktu respons, kurangnya koordinasi, atau kegagalan dalam menyelesaikan masalah hingga tuntas dan terverifikasi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $((a) / (b)) * 100\%$ Keterangan: (a) = Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Telah Ditindaklanjuti dan Dinyatakan Selesai Diverifikasi/Tuntas: Ini adalah jumlah pengaduan yang tidak hanya direspons, tetapi juga masalahnya sudah diselesaikan, dan penyelesaian tersebut telah diverifikasi serta dikonfirmasi tuntas oleh sistem atau unit pengelola pengaduan resmi. (b) = Total Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Diterima dan Wajib Ditindaklanjuti: Ini adalah seluruh pengaduan sah yang masuk ke instansi atau sistem selama periode pelaporan dan memerlukan tindakan penyelesaian.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Telah Ditindaklanjuti dan Dinyatakan Selesai Diverifikasi/Tuntas dalam Periode Pelaporan. b. Total Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Diterima dan Wajib Ditindaklanjuti dalam Periode yang Sama.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Penerimaan dan Registrasi Pengaduan Masyarakat. - Proses Analisis, Disposisi, dan Tindak Lanjut Pengaduan oleh Unit Terkait. - Kegiatan Verifikasi, Monitoring, dan Penutupan Pengaduan oleh Petugas Pengelola Pengaduan
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Bulanan, Triwulanan dan tahunan
10	Klasifikasi	- Berdasarkan Status Pengaduan: Selesai (Diverifikasi/Tuntas), Sedang Diproses, Belum Ditindaklanjuti. - Berdasarkan Sektor/Isu Pengaduan: Pelayanan Publik, Infrastruktur, Hukum, Kepegawaian, dll. - Berdasarkan Kanal Penerimaan: LAPOR!, Surat Resmi, Langsung, Media Sosial.

11	Level Estimasi	- Kementerian/Lembaga - Unit Eselon I/II terkait pengaduan masyarakat
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
N O	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase PTKN yang memperoleh nilai pembangunan zona integritas minimal 75
3	Konsep/Definisi	Rasio yang menunjukkan proporsi Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), baik di bawah Kementerian Agama maupun kementerian/lembaga lain, yang telah mencapai skor atau nilai evaluasi minimal 75 dalam proses Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Nilai 75 merupakan ambang batas kinerja minimal yang ditetapkan untuk menunjukkan komitmen dan keberhasilan signifikan dalam reformasi birokrasi, khususnya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
4	Interpretasi	Persentase yang tinggi mengindikasikan bahwa mayoritas PTKN telah berhasil mengimplementasikan program reformasi birokrasi yang efektif, dengan fokus kuat pada tata kelola yang bersih, transparan, dan pelayanan publik yang prima. Ini mencerminkan komitmen lembaga pendidikan keagamaan dalam membangun integritas. Persentase yang rendah menunjukkan perlunya peningkatan upaya dalam perbaikan manajemen risiko, pengendalian internal, dan penyediaan layanan yang bebas dari praktik korupsi.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = ((a) / (b)) * 100% Keterangan: (a) = Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) yang Memperoleh Nilai Pembangunan ZI ≥ 75: Ini adalah angka PTKN yang telah diukur dan skor penilaian Pembangunan Zona Integritas-nya mencapai minimal 75 (atau lebih tinggi), yang menunjukkan komitmen signifikan terhadap Reformasi Birokrasi, WBK, dan WBBM. (b) = Total Jumlah PTKN yang Wajib Melaksanakan Pembangunan ZI: Ini adalah keseluruhan jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (UIN, IAIN, STAIN, dll.) yang masuk dalam cakupan target pembangunan Zona Integritas.
6	Nama Variabel Pembangunan	a. Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) yang Memperoleh Nilai Pembangunan Zona Integritas ≥ 75. b. Total Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) yang Wajib Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan	- Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan PTKN. - Survei dan Penilaian Mandiri (Internal) Pembangunan ZI oleh PTKN. - Evaluasi dan Penilaian Eksternal Pembangunan ZI oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) atau Tim Penilai Internal (TPI) Kementerian Agama/Kementerian terkait. - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kualitas Pelayanan Publik.
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	- Berdasarkan Jenis PTKN: UIN (Universitas Islam Negeri), IAIN (Institut Agama Islam Negeri), STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri), atau PTKN lainnya. - Berdasarkan Status Penetapan ZI: Belum Diusulkan, Diusulkan WBK, Ditetapkan WBK, Ditetapkan WBBM. - Berdasarkan Wilayah: Provinsi/Regional.
11	Level Estimasi	- Tingkat Kementerian Agama (agregasi nasional seluruh PTKN). - Dapat diturunkan hingga tingkat individu PTKN sesuai hasil penilaian Zona Integritas.
12	Apakah indikator	Tidak

	dapat diakses umum?	
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
N O	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan layanan pengadaan barang dan jasa
3	Konsep/Definisi	Ukuran kinerja yang mencerminkan peningkatan kualitas dan kematangan layanan yang diberikan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam memproses pengadaan barang/jasa. Peningkatan layanan ini diukur melalui perbandingan skor Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) atau Tingkat Kematangan UKPBJ dari tahun berjalan terhadap skor tahun sebelumnya. Semakin tinggi skor, semakin matang dan prima layanan pengadaan yang diselenggarakan.
4	Interpretasi	Nilai persentase yang positif menunjukkan adanya perbaikan kualitas layanan pengadaan, yang meliputi kecepatan, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Peningkatan ini selaras dengan upaya Reformasi Birokrasi dan pencegahan korupsi. Jika persentase negatif atau stagnan, ini mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap manajemen risiko, SDM, dan tata kelola pengadaan di lingkungan UKPBJ.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase Peningkatan = $\frac{((T_n) - (T_{n-1}))}{(T_{n-1})} \times 100\%$ Keterangan: - Nilai Indeks UKPBJ Tahun Berjalan (T_n): Nilai evaluasi kualitas layanan pengadaan barang/jasa (seringkali menggunakan skor Indeks Tata Kelola Pengadaan/ITKP atau Tingkat Kematangan UKPBJ) pada periode yang sedang dilaporkan. - Nilai Indeks UKPBJ Tahun Sebelumnya (T_{n-1}): Nilai evaluasi yang sama pada periode tahun sebelumnya, digunakan sebagai basis perbandingan. * 100%: Digunakan untuk mengubah hasil perubahan menjadi bentuk persentase, yang menunjukkan seberapa besar kenaikan (atau penurunan) kualitas layanan pengadaan dibandingkan tahun lalu.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) atau Tingkat Kematangan UKPBJ Tahun Berjalan (T_n). b. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) atau Tingkat Kematangan UKPBJ Tahun Sebelumnya (T_{n-1}).
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pelaksanaan Survei dan Penilaian Mandiri Kematangan UKPBJ. - Evaluasi Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) atau Penilaian Kematangan UKPBJ oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadaan. - Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Digitalisasi Layanan Pengadaan (LPSE).
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	- Berdasarkan Kriteria Penilaian ITKP/Kematangan (misalnya, Aspek Kebijakan, Aspek Proses Bisnis, Aspek SDM, Aspek Kelembagaan). - Berdasarkan Jenis UKPBJ (Pusat/Daerah/Perguruan Tinggi).
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia	-

	publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	
N O	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Rerata nilai ASN Kementerian Agama yang mengikuti Pelatihan Manajerial (Kepemimpinan) minimal 80
3	Konsep/Definisi	Rata-rata (rerata) nilai evaluasi yang diperoleh oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama yang telah menyelesaikan program Pelatihan Manajerial atau Kepemimpinan (seperti Pelatihan Kepemimpinan Administrator/PKA, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas/PKP, atau sejenisnya). Nilai rerata ini hanya dihitung dari ASN yang mendapatkan skor akhir minimal 80, menunjukkan bahwa mereka telah mencapai standar kompetensi yang tinggi dalam pelatihan tersebut.
4	Interpretasi	Rerata nilai yang tinggi (mendekati 100) menunjukkan bahwa ASN peserta pelatihan memiliki kualitas penyerapan materi, keterampilan, dan kompetensi manajerial/kepemimpinan yang sangat baik dan melebihi ambang batas minimal (80). Hal ini mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan diklat dalam meningkatkan kapasitas kepemimpinan. Sebaliknya, rerata yang hanya sedikit di atas 80 mengindikasikan bahwa meskipun ASN tersebut lulus, kualitas kompetensinya masih perlu ditingkatkan lebih lanjut.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rerata Nilai = (a) / (b) Keterangan (a) = Total Kumulatif Nilai Akhir ASN yang Mendapat Nilai ≥ 80: Ini adalah jumlah total (akumulasi) dari semua nilai akhir yang didapatkan oleh para peserta pelatihan manajerial/kepemimpinan yang dinyatakan lulus dengan skor minimal 80 atau lebih. (b) = Jumlah ASN yang Mendapat Nilai ≥ 80: Ini adalah hitungan (frekuensi) jumlah individu ASN yang berhasil lulus pelatihan dengan skor akhir minimal 80.

6	Nama Variabel Pembangun	a. Total Kumulatif Nilai Akhir ASN Kemenag yang Mengikuti Pelatihan Manajerial dan Memperoleh Nilai ≥ 80 . b. Jumlah ASN Kemenag yang Mengikuti Pelatihan Manajerial dan Memperoleh Nilai ≥ 80 .
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial (PKA, PKP, atau Diklat Fungsional/Teknis Kepemimpinan). - Evaluasi Kompetensi Peserta Pelatihan (melalui ujian, penilaian proyek, atau studi kasus). - Pengolahan Data dan Sertifikasi Alumni Pelatihan ASN.
8	Ukuran/Satuan	Skor Numerik (0-100)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	- Berdasarkan Jenis Pelatihan: PKA, PKP, Pelatihan Fungsional Tertentu. - Berdasarkan Unit Penyelenggara: Balai Diklat Keagamaan (BDK), Pusat Pelatihan dan Pendidikan (Pusdiklat) Teknis. - Berdasarkan Kategori ASN: Eselon III, Eselon IV, Fungsional Tertentu.
11	Level Estimasi	- Nasional '- Unit Eselon I atau Satuan Kerja
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Rerata nilai ASN Kementerian Agama yang mengikuti Pelatihan Manajerial (Kepemimpinan) minimal 80

3	Konsep/Definisi	Rata-rata (rerata) nilai evaluasi yang diperoleh oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama yang telah menyelesaikan program Pelatihan Manajerial atau Kepemimpinan (seperti Pelatihan Kepemimpinan Administrator/PKA, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas/PKP, atau sejenisnya). Nilai rerata ini hanya dihitung dari ASN yang mendapatkan skor akhir minimal 80, menunjukkan bahwa mereka telah mencapai standar kompetensi yang tinggi dalam pelatihan tersebut.
4	Interpretasi	Rerata nilai yang tinggi (mendekati 100) menunjukkan bahwa ASN peserta pelatihan memiliki kualitas penyerapan materi, keterampilan, dan kompetensi manajerial/kepemimpinan yang sangat baik dan melebihi ambang batas minimal (80). Hal ini mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan diklat dalam meningkatkan kapasitas kepemimpinan. Sebaliknya, rerata yang hanya sedikit di atas 80 mengindikasikan bahwa meskipun ASN tersebut lulus, kualitas kompetensinya masih perlu ditingkatkan lebih lanjut.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rerata Nilai = $(a) / (b)$ Keterangan (a) = Total Kumulatif Nilai Akhir ASN yang Mendapat Nilai ≥ 80: Ini adalah jumlah total (akumulasi) dari semua nilai akhir yang didapatkan oleh para peserta pelatihan manajerial/kepemimpinan yang dinyatakan lulus dengan skor minimal 80 atau lebih. (b) = Jumlah ASN yang Mendapat Nilai ≥ 80: Ini adalah hitungan (frekuensi) jumlah individu ASN yang berhasil lulus pelatihan dengan skor akhir minimal 80.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Total Kumulatif Nilai Akhir ASN Kemenag yang Mengikuti Pelatihan Manajerial dan Memperoleh Nilai ≥ 80. b. Jumlah ASN Kemenag yang Mengikuti Pelatihan Manajerial dan Memperoleh Nilai ≥ 80.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial (PKA, PKP, atau Diklat Fungsional/Teknis Kepemimpinan). - Evaluasi Kompetensi Peserta Pelatihan (melalui ujian, penilaian proyek, atau studi kasus). - Pengolahan Data dan Sertifikasi Alumni Pelatihan ASN.
8	Ukuran/Satuan	Skor Numerik (0-100)
9	Waktu / Cut off	Tahunan

	Ketersediaan Data	
10	Klasifikasi	- Berdasarkan Jenis Pelatihan: PKA, PKP, Pelatihan Fungsional Tertentu. - Berdasarkan Unit Penyelenggara: Balai Diklat Keagamaan (BDK), Pusat Pelatihan dan Pendidikan (Pusdiklat) Teknis. - Berdasarkan Kategori ASN: Eselon III, Eselon IV, Fungsional Tertentu.
11	Level Estimasi	- Nasional '- Unit Eselon I atau Satuan Kerja
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
N O	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase koleksi digital perpustakaan yang dapat diakses secara online
3	Konsep/Definisi	Rasio yang mengukur proporsi total koleksi perpustakaan (berbentuk e-book, e-journal, hasil penelitian, atau dokumen digital lainnya) yang dimiliki oleh unit perpustakaan Kementerian Agama dan telah tersedia, terindeks, dan dapat diakses secara penuh (full-text) atau sebagian oleh pengguna/masyarakat melalui platform daring (online), seperti repositori, e-library, atau aplikasi khusus.
4	Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa perpustakaan Kementerian Agama telah bertransformasi secara digital, mampu memberikan akses yang luas, mudah, dan merata terhadap kekayaan intelektual dan literasi keagamaan kepada publik. Hal ini mencerminkan peningkatan kualitas layanan dan dukungan terhadap pembelajaran jarak jauh. Persentase yang rendah mengindikasikan bahwa banyak koleksi digital masih tersimpan secara lokal (offline) atau belum berhasil diintegrasikan ke dalam sistem akses publik online.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = ((a) / (b)) * 100% Keterangan: (a) = Jumlah Koleksi Perpustakaan Digital yang Dapat Diakses Secara Online: Ini adalah hitungan (count) dari e-book, e-journal, atau dokumen digital lain yang dimiliki perpustakaan Kemenag dan sudah tersedia serta dapat diakses penuh melalui platform atau repositori online (seperti ELIPSKI). (b) = Total Jumlah Koleksi Perpustakaan Digital yang Dimiliki: Ini adalah seluruh hitungan (count) koleksi digital yang sudah dimiliki oleh perpustakaan Kemenag, termasuk yang mungkin masih tersimpan secara offline atau belum terindeks.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Koleksi Perpustakaan Digital yang Dapat Diakses Secara Online (Terindeks dan Tersedia di Platform Daring). b. Total Jumlah Koleksi Perpustakaan Digital yang Dimiliki (Termasuk yang belum diakses online).
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Akuisisi, Digitalisasi, dan Pengemasan Ulang (Repackaging) Koleksi Perpustakaan. - Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Perpustakaan Digital (E-Library/Repository). - Kegiatan Metadata Entry dan Indeksasi Koleksi. - Pelaporan Kinerja Layanan Perpustakaan.
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	- Berdasarkan Jenis Koleksi: E-book, E-Journal, Laporan Penelitian, Karya Ilmiah Dosen/Mahasiswa. - Berdasarkan Sektor Keagamaan: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. - Berdasarkan Unit Pengelola: Pusat, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), Balai Litbang Diklat.
11	Level Estimasi	- Nasional '- Satuan Kerja
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan	-

	nama publikasinya)	
N O	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Nilai Akreditasi Perpustakaan
3	Konsep/Definisi	Nilai numerik hasil penilaian resmi yang diberikan oleh lembaga akreditasi perpustakaan (Perpustakaan Nasional Republik Indonesia/Perpusnas) terhadap perpustakaan di lingkungan Kementerian Agama. Penilaian ini mencakup berbagai aspek, seperti koleksi, sarana/prasarana, pelayanan, sumber daya manusia (SDM), dan pengorganisasian, untuk menentukan kualitas dan standar operasional perpustakaan. Nilai akreditasi mencerminkan status mutu perpustakaan (misalnya: A/Unggul, B/Baik, C/Cukup, atau Tidak Terakreditasi).
4	Interpretasi	Nilai akreditasi yang tinggi (misalnya nilai A atau B) menunjukkan bahwa perpustakaan Kementerian Agama telah memenuhi standar nasional atau bahkan melampauinya, memiliki tata kelola yang baik, koleksi yang memadai, dan pelayanan yang prima. Nilai ini menjadi indikator penting kualitas infrastruktur pendukung pendidikan dan literasi di lingkungan Kemenag. Nilai yang rendah mengindikasikan perlunya perbaikan signifikan pada aspek-aspek pengelolaan perpustakaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Nilai Akreditasi = Skor Akhir Penilaian (diambil langsung dari Sertifikat Akreditasi)
6	Nama Variabel Pembangun	Nilai Akhir Akreditasi Perpustakaan yang Diberikan oleh Lembaga Akreditasi.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pengajuan dan Persiapan Permohonan Akreditasi Perpustakaan oleh UPT/Satuan Kerja Kemenag. - Asesmen Lapangan dan Penilaian oleh Asesor dari Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas). - Penerbitan Sertifikat Akreditasi dan Penetapan Nilai oleh Lembaga Akreditasi.
8	Ukuran/Satuan	Skor Numerik (Skala 0-100) atau Peringkat Mutu (A, B, C)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Berkala (3 - 5 Tahunan) sesuai masa berlaku akreditasi

10	Klasifikasi	- Berdasarkan Jenis Perpustakaan: Perpustakaan Perguruan Tinggi (UIN/IAIN), Perpustakaan Sekolah (Madrasah), Perpustakaan Khusus (Litbang/Arsip). - Berdasarkan Peringkat Mutu: A (Unggul), B (Baik), C (Cukup), Belum Terakreditasi.
11	Level Estimasi	Satuan Kerja Perpustakaan
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
N O	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase rancangan peraturan yang diselesaikan sesuai perencanaan
3	Konsep/Definisi	Ukuran kinerja yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu lembaga dalam menyelesaikan penyusunan dan pengesahan rancangan peraturan (termasuk rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, rancangan peraturan daerah, atau jenis peraturan lainnya) dalam periode waktu yang telah direncanakan atau ditargetkan dalam Progam Legislasi Nasional (Prolegnas) atau Program Legislasi Daerah (Prolegda) atau rencana kerja sejenis
4	Interpretasi	Nilai persentase yang tinggi (mendekati 100%) menunjukkan bahwa lembaga tersebut sangat efektif dan efisien dalam manajemen proses legislasi/regulasi, dengan sedikit kendala atau penundaan. Hal ini mencerminkan kualitas perencanaan, koordinasi antar instansi, dan kepatuhan terhadap jadwal kerja. Persentase yang rendah mengindikasikan adanya masalah signifikan dalam proses legislasi, seperti penundaan, perubahan prioritas, atau kesulitan dalam mencapai konsensus.

5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = ((a) / (b)) * 100% Keterangan: (a) = Jumlah Rancangan Peraturan yang Berhasil Diselesaikan Sesuai Perencanaan: Ini adalah jumlah peraturan (seperti RUU, RPP, atau Perda) yang telah berhasil disahkan/ditetapkan tepat waktu sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Program Legislasi (Prolegnas/Prolegda) atau rencana kerja awal. (b) = Total Jumlah Rancangan Peraturan yang Direncanakan: Ini adalah total keseluruhan jumlah rancangan peraturan yang ditargetkan atau dimasukkan dalam daftar prioritas untuk diselesaikan dalam periode waktu tertentu.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Rancangan Peraturan yang Berhasil Diselesaikan (disahkan/ditetapkan) dalam Periode Perencanaan. b. Total Jumlah Rancangan Peraturan yang Direncanakan (ditargetkan) untuk Diselesaikan dalam Periode yang Sama.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Penyusunan program legislasi/peraturan. - Penyusunan, pembahasan, dan finalisasi rancangan peraturan. - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan.
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	- Berdasarkan Tingkat Peraturan: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri/Lembaga '- Berdasarkan Sektor/Bidang: Ekonomi, Sosial, Hukum & Keamanan, Pemerintahan Daerah, dan lain-lain - Berdasarkan Jenis Program: Prolegnas Prioritas, Prolegnas Kumulatif Terbuka, Prolegda.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan	-

	nama publikasinya)	

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi Keagamaan
3	Konsep/Definisi	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi adalah persentase jumlah penduduk yang sedang menempuh pendidikan tinggi (Diploma/Sarjana) terhadap jumlah penduduk usia 19–24 tahun. APK dapat melebihi 100% karena menghitung semua yang sedang bersekolah di jenjang tersebut, tanpa memperhitungkan apakah usianya sesuai.
4	Interpretasi	APK Pendidikan Tinggi memberikan gambaran tentang daya serap sistem pendidikan tinggi terhadap penduduk, termasuk mereka yang lebih tua atau lebih muda dari usia ideal pendidikan tinggi. Angka ini mencerminkan aksesibilitas dan keterjangkauan pendidikan tinggi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan/Ma'had Aly b = Jumlah penduduk usia 19–24 tahun
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan/Ma'had Aly b. Jumlah penduduk usia 19–24 tahun
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendataan Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis perguruan tinggi: PTKN, PTKS
11	Level Estimasi	Nasional, dan Perguruan Tinggi Keagamaan
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Persentase lulusan pendidikan tinggi Keagamaan/Ma'had Aly yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun
3	Konsep/Definisi	Persentase lulusan satuan pendidikan tinggi keagamaan, termasuk Ma'had Aly, yang memperoleh pekerjaan (formal/informal) dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan setelah kelulusan.
4	Interpretasi	Indikator ini mencerminkan daya serap lulusan pendidikan tinggi keagamaan terhadap dunia kerja. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik keterkaitan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan pasar kerja.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah lulusan PTK/Ma'had Aly yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun pada periode sebelumnya b = Jumlah lulusan PTK/Ma'had Aly pada periode sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah lulusan pendidikan tinggi keagamaan/Ma'had Aly yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu < 1 tahun setelah lulus b. Jumlah total lulusan pendidikan tinggi keagamaan/Ma'had Aly pada periode yang sama
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Tracer Studi oleh masing-masing Perguruan Tinggi Keagamaan/Ma'had Aly
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahun
10	Klasifikasi	Berdasarkan status kerja: Bekerja < 1 tahun, Bekerja ≥ 1 tahun, Belum Bekerja
11	Level Estimasi	Nasional, dan Perguruan Tinggi Keagamaan
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat THE Impact SDGs
3	Konsep/Definisi	Jumlah perguruan tinggi (PT) yang masuk dalam daftar Times Higher Education (THE) Impact Rankings pada peringkat kurang dari 1000 besar dunia, berdasarkan penilaian kontribusi PT terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).
4	Interpretasi	Indikator ini menunjukkan pengakuan internasional terhadap peran dan kontribusi perguruan tinggi Indonesia dalam mendukung SDGs melalui pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, tata kelola institusi, dan kemitraan. Semakin banyak PT yang masuk <1000 besar, semakin tinggi pengakuan terhadap kinerja keberlanjutan perguruan tinggi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Jumlah PTK/Ma'had Aly dalam peringkat THE Impact Rankings <1000
6	Nama Variabel Pembangun	Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan/Ma'had Aly yang masuk dalam THE Impact Rankings SDGs
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan/Ma'had Aly yang masuk dalam THE Impact Rankings SDGs
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan SDGs Goal
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan jumlah mahasiswa pada PTK/Ma'had Aly
3	Konsep/Definisi	Persentase peningkatan jumlah mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) dan Ma'had Aly adalah ukuran relatif yang menunjukkan perubahan jumlah mahasiswa yang terdaftar aktif pada institusi pendidikan tinggi keagamaan dari periode waktu tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. PTK meliputi Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), dan perguruan tinggi keagamaan swasta yang terakreditasi. Ma'had Aly adalah lembaga pendidikan tinggi pesantren yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesi dalam bidang keagamaan Islam.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur tingkat pertumbuhan partisipasi mahasiswa dalam pendidikan tinggi keagamaan. Nilai positif menunjukkan adanya peningkatan jumlah mahasiswa, sedangkan nilai negatif menunjukkan penurunan. Semakin tinggi persentase peningkatan, semakin baik kinerja dalam memperluas akses pendidikan tinggi keagamaan. Indikator ini mencerminkan daya tarik, kapasitas, dan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan serta efektivitas kebijakan pengembangan pendidikan tinggi keagamaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase peningkatan = $((a - b) / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = jumlah mahasiswa tahun berjalan; b = jumlah mahasiswa tahun sebelumnya.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah mahasiswa tahun berjalan b. Jumlah mahasiswa tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pendataan EMIS PTK dan Ma'had Aly - Verifikasi dan Validasi Data Mahasiswa oleh Setjen Kemenag dan Ditjen Pendis - Monitoring dan Evaluasi Data Mahasiswa
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan

10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri (UIN, IAIN, STAIN) - PTK Swasta - Ma'had Aly Berdasarkan Jenjang: - S1/Sarjana - S2/Magister - S3/Doktor
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Persentase PTK/Ma'had Aly yang terakreditasi
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur proporsi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) pada Ma'had Aly yang telah memiliki status akreditasi, baik akreditasi program studi maupun kelembagaan, oleh lembaga akreditasi yang diakui pemerintah.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase, menunjukkan bahwa semakin banyak PTK di Ma'had Aly yang telah melalui proses penjaminan mutu melalui sistem akreditasi formal, sehingga menjamin kompetensi, kualitas pendidikan, dan standar nasional pendidikan telah dipenuhi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a/b) \times 100\%$ Dengan: a = Jumlah Ma'had Aly/PTK di Ma'had Aly yang telah terakreditasi b = Jumlah total Ma'had Aly/PTK di Ma'had Aly
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah PTK/Ma'had Aly yang telah terakreditasi b. Jumlah total PTK/Ma'had Aly yang ada
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pelaksanaan akreditasi Ma'had Aly oleh BAN-PT atau LAMDIK/LAMEMBA (jika berlaku) - Pemutakhiran data EMIS dan SIKS-Diktis - Monitoring dan evaluasi mutu Ma'had Aly oleh Ditjen Pendis
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Mutu Pendidikan Keagamaan Tinggi
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi, dan/atau per lembaga Ma'had Aly
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Persentase dosen dan tenaga kependidikan PTK/Ma'had Aly yang memperoleh sertifikasi peningkatan kompetensi
3	Konsep/Definisi	Persentase dosen dan tenaga kependidikan Perguruan Tinggi Kejuruan (PTK) yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi sebagai bukti peningkatan keterampilan, pengetahuan, atau keahlian sesuai bidang keahliannya. Sertifikasi ini dapat berupa sertifikat pelatihan, uji kompetensi, atau program pengembangan profesional lainnya yang diakui secara nasional/internasional.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur sejauh mana dosen dan tenaga kependidikan PTK telah meningkatkan kompetensinya melalui program sertifikasi. Persentase yang tinggi menunjukkan komitmen institusi dalam pengembangan SDM dosen dan kualitas pengajaran.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan PTK yang memperoleh sertifikasi kompetensi b = Total Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan PTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah Dosen PTK Bersertifikasi Kompetensi 2. Jumlah Tenaga Kependidikan PTK Bersertifikasi Kompetensi 3. Jumlah Dosen PTK 4. Jumlah Tenaga Kependidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelatihan/sertifikasi dosen oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) atau badan sertifikasi terkait. 2. Program pengembangan dosen (e.g., Microcredential, pelatihan industri). 3. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan/Kebudayaan/Ristek atau mitra industri.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	- Bidang Keahlian: Sertifikasi diklasifikasikan berdasarkan bidang - Jenis Sertifikasi: Sertifikasi nasional (BNSP), internasional, atau pelatihan khusus.
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Rata-rata masa tunggu lulusan pendidikan tinggi keagamaan untuk mendapatkan pekerjaan
3	Konsep/Definisi	Rata-rata waktu yang dibutuhkan lulusan pendidikan tinggi (sarjana/diploma) sejak kelulusan hingga memperoleh pekerjaan pertama yang dibayar (formal/non-formal)
4	Interpretasi	Indikator ini mencerminkan kecepatan transisi lulusan dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Semakin rendah nilai rata-rata masa tunggu, maka semakin baik daya serap lulusan oleh pasar kerja dan semakin relevan pendidikan yang diperoleh
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Rata-rata masa tunggu} = \frac{(\sum \text{waktu tunggu semua lulusan yang bekerja})}{\text{jumlah lulusan yang bekerja}}$
6	Nama Variabel Pembangun	Rata-rata Masa Tunggu Lulusan Pendidikan Tinggi (Bulan)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) - Survei Penelusuran Alumni (Tracer Study) oleh perguruan tinggi - Survei Khusus terkait Ketenagakerjaan Lulusan
8	Ukuran/Satuan	Waktu (Bulan)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	- Tahunan (data Sakernas/BPS dirilis setiap tahun). - Periodik (tracer study perguruan tinggi biasanya 1–2 tahun setelah kelulusan)
10	Klasifikasi	Diploma, Sarjana, Magister, Doktor
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Sakernas

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Persentase kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur proporsi perjanjian kerja sama (MoU/MoA/perjanjian kerja lainnya) yang masih aktif dan telah memberikan output berupa program nyata dalam peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, seperti pelatihan, pendampingan, sertifikasi, magang, pertukaran dosen/guru, atau program kemitraan peningkatan kompetensi lainnya.
4	Interpretasi	Persentase kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a/b) \times 100\%$ Dengan: a = Jumlah kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK b = Jumlah total kerja sama aktif
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah kerja sama aktif yang menghasilkan program peningkatan mutu PTK b. Jumlah total kerja sama aktif yang terdata
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pendataan dan pemantauan kerja sama pendidikan oleh unit teknis - Evaluasi program kemitraan peningkatan mutu PTK - Pelaporan kinerja kelembagaan dan kerja sama
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Efektivitas Kemitraan dan Pengembangan SDM Pendidikan
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi, Jenis Lembaga (Madrasah, PTKIN, Satuan Pendidikan Keagamaan, Balai Diklat, dst.)
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Indeks Keberagamaan Mahasiswa (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha)
3	Konsep/Definisi	Indeks Keberagamaan Mahasiswa adalah ukuran tingkat penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan mahasiswa pada masing-masing agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang mencakup aspek keyakinan, ibadah, pengetahuan agama, dan perilaku sosial keagamaan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan semakin kuatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan mahasiswa. Indeks dapat digunakan untuk melihat pola keberagamaan antaragama, antarwilayah, maupun antarperguruan tinggi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Indeks} = (\sum \text{skor aspek keagamaan individu} / \text{skor maksimum}) \times 100$
6	Nama Variabel Pembangun	1. Skor keyakinan keagamaan mahasiswa 2. Skor praktik ibadah mahasiswa 3. Skor pengetahuan ajaran agama 4. Skor perilaku sosial keagamaan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survei Indeks Keberagamaan Mahasiswa
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha.
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Jumlah perguruan tinggi keagamaan yang masuk ke dalam peringkat THE Impact SDGs
3	Konsep/Definisi	Persentase perguruan tinggi di tingkat nasional yang berhasil masuk dalam peringkat Times Higher Education (THE) Impact Rankings pada posisi 1000 teratas secara global, dengan fokus pada kontribusi perguruan tinggi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)
4	Interpretasi	Indikator ini mencerminkan sejauh mana perguruan tinggi di Indonesia secara kolektif diakui secara internasional atas dampak positifnya dalam mendukung pencapaian SDGs. Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak perguruan tinggi Indonesia yang memiliki kinerja unggul dan diakui secara global dalam kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan
5	Metode / Rumus Perhitungan	Jumlah = Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan yang masuk ke dalam peringkat THE Impact SDGs
6	Nama Variabel Pembangun	Jumlah total perguruan tinggi yang berpotensi masuk THE Impact Rankings SDGs
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pemeringkatan Times Higher Education (THE) Impact Rankings
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	THE 17 GOALS
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Times Higher Education

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Pendidikan Tinggi Islam
2	Nama Indikator	Persentase PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang memenuhi standar sarana prasarana
3	Konsep/Definisi	Persentase PTK yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi adalah proporsi perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang memiliki fasilitas akademik dan non-akademik sesuai ketentuan standar minimal sarana dan prasarana pendidikan tinggi.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak perguruan tinggi keagamaan yang memiliki sarana dan prasarana memadai sesuai standar nasional pendidikan tinggi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah PTK/Ma'had Aly yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi dalam periode tertentu; b = Jumlah total PTK/Ma'had Aly yang ada dalam periode yang sama;
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah PTK/Ma'had Aly yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi; 2. Jumlah total PTK/Ma'had Aly.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Verifikasi dan validasi data sarana prasarana melalui EMIS dan monitoring lapangan; - Fasilitasi pembangunan dan rehabilitasi sarpras PTK; - Evaluasi pemenuhan standar sarpras oleh Tim Penjaminan Mutu PTK.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang menyediakan fasilitas yang mendukung Pendidikan Tinggi berbasis gender dan inklusif
3	Konsep/Definisi	Persentase PTK yang menyediakan fasilitas pendidikan berbasis gender dan inklusif adalah ukuran proporsi perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang memiliki sarana, kebijakan, dan lingkungan fisik yang mendukung kesetaraan gender serta akses bagi seluruh kelompok tanpa diskriminasi.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini, semakin banyak PTK yang menyediakan dukungan terhadap pendidikan tinggi yang inklusif. Hal ini menunjukkan komitmen lembaga pendidikan dalam memenuhi hak-hak pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah PTK yang menyediakan fasilitas inklusif b = Jumlah PTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah PTK yang menyediakan fasilitas inklusif 2. Jumlah PTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendataan oleh EMIS
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase mahasiswa PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) penerima beasiswa
3	Konsep/Definisi	Persentase mahasiswa PTK penerima beasiswa adalah ukuran proporsi mahasiswa pada perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang memperoleh bantuan biaya pendidikan dari pemerintah, lembaga keagamaan, atau sumber lain yang sah.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase mahasiswa penerima beasiswa, menunjukkan semakin luasnya akses bantuan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa, baik dari pemerintah, institusi, maupun pihak swasta
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa penerima beasiswa b = Jumlah mahasiswa
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa 2. Jumlah Mahasiswa
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pencatatan oleh EMIS
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Jenis Beasiswa: Akademik, Non-Akademik (olahraga/seni), Kebutuhan Ekonomi, Prestasi, dll.
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase mahasiswa kategori UKT kelompok I
3	Konsep/Definisi	Persentase mahasiswa kategori Uang Kuliah Tunggal (UKT) Kelompok I adalah proporsi mahasiswa baru atau mahasiswa aktif di Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang ditetapkan dalam kelompok UKT paling rendah (Kelompok I). Kelompok UKT I ini diperuntukkan bagi mahasiswa dengan kondisi ekonomi paling membutuhkan dan/atau memiliki keterbatasan finansial, sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur tingkat keterjangkauan layanan pendidikan tinggi di PTK. Semakin tinggi persentase mahasiswa yang masuk dalam kategori UKT Kelompok I, menunjukkan semakin efektif upaya Kementerian Agama dan PTK dalam memastikan bahwa pendidikan tinggi dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa kategori UKT Kelompok I b = Jumlah total mahasiswa baru atau mahasiswa aktif
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah mahasiswa kategori UKT Kelompok I pada PTKN 2. Jumlah total mahasiswa baru atau mahasiswa aktif pada PTKN
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Penerapan sistem UKT berbasis data ekonomi mahasiswa - Verifikasi dan validasi ekonomi calon mahasiswa baru (UKT online/offline) - Sosialisasi dan pelaksanaan kebijakan afirmatif UKT
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Tahun Masuk: - Angkatan 202X; - Angkatan 202X-1, dst.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan	-

	nama publikasinya)	

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan animo mahasiswa baru
3	Konsep/Definisi	Persentase peningkatan animo mahasiswa baru adalah perubahan persentase jumlah pendaftar baru pada suatu institusi pendidikan tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya
4	Interpretasi	Variabel ini menunjukkan seberapa besar minat calon mahasiswa untuk mendaftar pada institusi tersebut. Peningkatan nilai menunjukkan daya tarik institusi yang meningkat, sedangkan penurunan mengindikasikan menurunnya minat calon mahasiswa
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah pendaftar tahun berjalan b = Jumlah pendaftar tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah pendaftar tahun berjalan 2. Jumlah pendaftar tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) atau Rekrutmen Calon Mahasiswa
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase mahasiswa baru yang berkuliah di perguruan tinggi keagamaan (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) berkualitas
3	Konsep/Definisi	Persentase mahasiswa baru yang berkuliah di perguruan tinggi berkualitas adalah rasio antara jumlah mahasiswa baru yang diterima dan terdaftar di Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang telah terakreditasi Unggul/A atau memiliki peringkat terbaik, dibandingkan dengan total seluruh mahasiswa baru yang diterima di PTK pada periode tertentu.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur ketersediaan akses dan pilihan pendidikan tinggi yang berkualitas bagi mahasiswa baru. Semakin tinggi proporsi mahasiswa baru yang memilih dan diterima di PTK berkualitas, menunjukkan semakin efektif upaya Kementerian Agama dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan tinggi dan penyediaan pilihan institusi yang terpercaya.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa baru yang diterima di PTK dengan akreditasi institusi Unggul/A atau peringkat terbaik. b = Jumlah mahasiswa baru yang diterima di seluruh PTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah mahasiswa baru yang diterima di PTK dengan akreditasi institusi Unggul/A atau peringkat terbaik. 2. Jumlah mahasiswa baru yang diterima di seluruh PTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Penghitungan oleh EMIS
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase mahasiswa baru PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) berkuliah di Prodi STEM terakreditasi unggul
3	Konsep/Definisi	Persentase mahasiswa baru PTK yang berkuliah di program studi STEM terakreditasi unggul adalah ukuran proporsi mahasiswa baru pada perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang terdaftar di program studi bidang Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika (STEM) dengan status akreditasi “Unggul” dari BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak mahasiswa baru di PTK yang memilih program studi STEM dengan mutu akademik tinggi, mencerminkan peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi keagamaan terhadap kebutuhan iptek.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Proporsi = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa baru di Prodi STEM terakreditasi Unggul b = Jumlah total mahasiswa baru di seluruh Prodi STEM
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah mahasiswa baru di prodi STEM terakreditasi unggul 2. Jumlah total mahasiswa baru di prodi STEM
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pelaporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) oleh perguruan tinggi
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma’had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Ditjen Pendidikan Islam
2	Nama Indikator	Jumlah perguruan tinggi keagamaan (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang terpetakan berdasarkan keunggulannya
3	Konsep/Definisi	Jumlah perguruan tinggi keagamaan yang terpetakan berdasarkan keunggulannya adalah banyaknya PTK (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang telah diklasifikasikan menurut bidang atau capaian unggulan, seperti riset, inovasi, pengabdian masyarakat, tata kelola, dan mutu akademik.
4	Interpretasi	Semakin tinggi jumlah PTK yang terpetakan menunjukkan semakin baiknya pemetaan mutu dan diferensiasi perguruan tinggi keagamaan berdasarkan keunggulan spesifiknya, yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan kebijakan dan pembinaan mutu.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Jumlah = Banyaknya PTK yang telah dikategorikan sesuai hasil pemetaan keunggulan berdasarkan kriteria mutu dan capaian unggulan.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah PTK yang telah terpetakan berdasarkan keunggulannya.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Kegiatan pemetaan dan klasifikasi PTK oleh Kementerian Agama - Survei dan asesmen potensi unggulan PTK - Penyusunan profil kelembagaan PTK
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase Prodi PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang mendapatkan akreditasi unggul
3	Konsep/Definisi	Persentase Prodi PTK yang mendapatkan akreditasi unggul adalah ukuran proporsi program studi pada perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang memperoleh peringkat akreditasi “Unggul” dari BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak program studi di perguruan tinggi keagamaan yang telah mencapai mutu akademik tertinggi, mencerminkan peningkatan kualitas pendidikan dan tata kelola akademik di lingkungan PTK.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah PTK yang berakreditasi unggul b = Jumlah PTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah PTK yang berakreditasi unggul 2. Jumlah PTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendataan oleh EMIS
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma’had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Di PDDikti

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang terakreditasi
3	Konsep/Definisi	Persentase LPTK PTK yang terakreditasi adalah ukuran proporsi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan di lingkungan perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang telah memperoleh status akreditasi dari BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak LPTK di PTK yang memenuhi standar mutu kelembagaan dan tata kelola pendidikan, mencerminkan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan calon tenaga pendidik keagamaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase=(a / b) × 100 % Keterangan: a = Jumlah LPTK yang telah terakreditasi. b = Jumlah LPTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah LPTK yang telah terakreditasi. 2. Jumlah LPTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pendampingan dan fasilitasi akreditasi LPTK; - Penguatan sistem penjaminan mutu internal; - Verifikasi data akreditasi melalui EMIS dan BAN-PT/LAM.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Peringkat Akreditasi: - Unggul/A - Baik Sekali/B - Baik/C
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase program studi Program Profesi Guru (PPG) PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang terakreditasi unggul
3	Konsep/Definisi	Persentase program studi PPG PTK yang terakreditasi unggul adalah ukuran proporsi program studi Program Profesi Guru pada perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang memperoleh peringkat akreditasi “Unggul” dari BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak program studi PPG di PTK yang telah mencapai mutu akademik tertinggi, mencerminkan peningkatan kualitas pendidikan profesi guru keagamaan dan kesiapan lembaga dalam menghasilkan pendidik profesional.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah PTK yang telah terpetakan berdasarkan keunggulannya. b = Jumlah PTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah PTK yang telah terpetakan berdasarkan keunggulannya. 2. Jumlah PTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Peningkatan dan Fasilitasi Akreditasi Unggul Program Studi PPG (melalui pembinaan, pendampingan, workshop, penyusunan dokumen akreditasi, dan evaluasi diri). - Pendataan dan Rekapitulasi Program Studi PPG yang telah terakreditasi (termasuk status akreditasi aktif) di bawah Kementerian Agama
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma’had Aly
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data?	-

	(Disebutkan nama publikasinya)	

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase dosen berkualifikasi akademik S3 a. Total b. STEM c. Non STEM
3	Konsep/Definisi	Persentase dosen berkualifikasi akademik S3 adalah rasio jumlah dosen bergelar doktor (S3) terhadap jumlah total dosen aktif di perguruan tinggi, baik secara keseluruhan (total), di bidang STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), maupun di bidang non-STEM.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin baik kualitas sumber daya dosen yang berperan dalam meningkatkan mutu tridharma perguruan tinggi, khususnya di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Total = $((a + b) / c) \times 100\%$ STEM = $(a / c) \times 100\%$ Non-STEM = $(b / c) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah dosen S3 STEM b = Jumlah dosen S3 non-STEM c = Jumlah dosen
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah dosen S3 STEM 2. Jumlah dosen S3 non-STEM 3. Jumlah dosen
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dan EMIS Perguruan Tinggi Keagamaan
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase dosen yang mempunyai pengalaman di luar kampus
3	Konsep/Definisi	Persentase dosen yang mempunyai pengalaman di luar kampus adalah rasio jumlah dosen tetap yang terlibat dalam aktivitas profesional di luar perguruan tinggi seperti industri, lembaga riset, pemerintahan, organisasi internasional, atau kegiatan pengabdian masyarakat, terhadap jumlah total dosen tetap.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin banyak dosen yang memiliki pengalaman praktis dan relevan di dunia luar kampus, yang diharapkan dapat meningkatkan relevansi pembelajaran dan penelitian di perguruan tinggi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah dosen yang memiliki pengalaman di luar kampus b = Jumlah dosen tetap
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah dosen yang memiliki pengalaman di luar kampus 2. Jumlah dosen tetap
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survei Aktivitas Dosen atau Pelaporan Beban Kerja Dosen (BKD)
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase dosen yang menduduki jabatan lektor/lektor kepala/guru besar
3	Konsep/Definisi	Persentase dosen yang menduduki jabatan akademik Lektor, Lektor Kepala, atau Guru Besar adalah rasio jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik tersebut terhadap jumlah total dosen tetap di perguruan tinggi.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin baik tingkat profesionalisme, kepakaran, dan kontribusi dosen dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat).
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = jumlah dosen dengan jabatan Lektor, Lektor Kepala, atau Guru Besar b = jumlah total dosen tetap
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah dosen dengan jabatan Lektor, Lektor Kepala, atau Guru Besar 2. Jumlah total dosen tetap
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dan EMIS Perguruan Tinggi Keagamaan
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Jenis Jabatan: Lektor, Lektor Kepala, Guru Besar
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti program peningkatan kompetensi
3	Konsep/Definisi	Persentase dosen dan tenaga kependidikan Perguruan Tinggi Kejuruan (PTK) yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi sebagai bukti peningkatan keterampilan, pengetahuan, atau keahlian sesuai bidang keahliannya. Sertifikasi ini dapat berupa sertifikat pelatihan, uji kompetensi, atau program pengembangan profesional lainnya yang diakui secara nasional/internasional.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur sejauh mana dosen PTK telah meningkatkan kompetensinya melalui program sertifikasi. Persentase yang tinggi menunjukkan komitmen institusi dalam pengembangan SDM dosen dan kualitas pengajaran.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah dosen dan tenaga kependidikan PTK yang memperoleh program peningkatan kompetensi b = Jumlah dosen dan tenaga kependidikan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang memperoleh program peningkatan kompetensi 2. Jumlah dosen dan tenaga kependidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelatihan/sertifikasi dosen oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) atau badan sertifikasi terkait. 2. Program pengembangan dosen (e.g., Microcredential, pelatihan industri). 3. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan/Kebudayaan/Ristek atau mitra industri.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Jenis Sertifikasi: Sertifikasi nasional (BNSP), internasional, atau pelatihan khusus.
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase dosen PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang menjadi Narasumber Konferensi nasional maupun internasional
3	Konsep/Definisi	Persentase dosen PTK yang menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional adalah ukuran proporsi dosen pada perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) yang berpartisipasi sebagai pembicara, pemakalah, atau panelis pada forum ilmiah tingkat nasional dan internasional.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin aktif dan diakui dosen PTK dalam jejaring ilmiah nasional dan global, mencerminkan peningkatan kapasitas akademik, reputasi, dan kontribusi ilmiah perguruan tinggi keagamaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah dosen yang menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional b = Jumlah dosen aktif yang ada di PTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah dosen yang menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional 2. Jumlah dosen aktif yang ada di PTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pendataan partisipasi dosen pada kegiatan ilmiah - Fasilitasi dan insentif publikasi ilmiah dan partisipasi konferensi - Evaluasi kegiatan tridarma dosen
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Konferensi: - Nasional - Internasional
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Rasio dosen asing PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) dengan dosen dalam negeri
3	Konsep/Definisi	Rasio dosen asing dengan dosen dalam negeri pada PTK adalah perbandingan antara jumlah dosen berkewarganegaraan asing dengan jumlah dosen warga negara Indonesia yang mengajar di perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha).
4	Interpretasi	Semakin tinggi rasio menunjukkan semakin besar keterlibatan dosen asing dalam kegiatan akademik PTK, yang mencerminkan peningkatan kolaborasi internasional dan pengakuan global terhadap mutu pendidikan tinggi keagamaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Rasio} = 1 : (b / a)$ Keterangan: a = Jumlah dosen asing aktif di PTK b = Jumlah dosen dalam negeri aktif di PTK
6	Nama Variabel Pembangun	a = Jumlah dosen asing aktif di PTK b = Jumlah dosen dalam negeri aktif di PTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Program visiting professor atau exchange lecturer - Skema rekrutmen dosen asing - Kerja sama internasional PTK (MoU/MoA)
8	Ukuran/Satuan	Rasio
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase pemenuhan jumlah tenaga kependidikan PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) pada jenjang jabatan fungsional
3	Konsep/Definisi	Persentase pemenuhan jumlah tenaga kependidikan PTK pada jenjang jabatan fungsional adalah ukuran tingkat kesesuaian antara jumlah tenaga kependidikan yang telah menduduki jabatan fungsional (misalnya arsiparis, pustakawan, pranata laboratorium, analis kepegawaian, dan sejenisnya) dengan jumlah formasi atau kebutuhan ideal di perguruan tinggi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha).
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin terpenuhinya kebutuhan tenaga kependidikan sesuai jabatan fungsional yang dibutuhkan, mencerminkan efektivitas manajemen SDM dan profesionalitas tenaga kependidikan di lingkungan PTK.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah tenaga kependidikan eksisting pada jenjang jabatan fungsional b = Jumlah kebutuhan tenaga kependidikan pada jenjang jabatan fungsional
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah tenaga kependidikan eksisting pada jenjang jabatan fungsional 2. Jumlah kebutuhan tenaga kependidikan pada jenjang jabatan fungsional
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	a. Pendataan Tenaga Kependidikan oleh Dinas Pendidikan / Kementerian b. Analisis Kebutuhan Formasi oleh BKN / Kemdikbudristek / Pemerintah Daerah
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Data diperbarui secara berkala (tahunan) dengan cut-off per tanggal 30 Juni setiap tahun.
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase lulusan perguruan tinggi (berkualifikasi S1) dengan pengalaman 1 (satu) semester di luar kampus
3	Konsep/Definisi	Proporsi lulusan program sarjana (S1) dari Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang telah mengikuti program pembelajaran di luar kampus selama minimal satu semester penuh, relatif terhadap total lulusan program sarjana (S1) pada periode yang sama
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur keberhasilan Kementerian Agama dalam mendorong dan memfasilitasi lulusan S1 untuk memiliki pengalaman praktis dan relevan di luar lingkungan akademik. Semakin tinggi persentase lulusan dengan pengalaman di luar kampus, menunjukkan semakin kuatnya adaptasi kurikulum dan program pendidikan PTK terhadap kebutuhan dunia kerja dan dinamika masyarakat
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah lulusan PTK dengan pengalaman satu semester di luar kampus. b = Jumlah lulusan PTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lulusan PTK dengan pengalaman satu semester di luar kampus. 2. Jumlah lulusan PTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pelaksanaan dan Fasilitasi Program Pembelajaran di Luar Kampus (Magang, KKN, Pertukaran Mahasiswa, dll.) dan Pendataan Partisipan serta Lulusan dari Program Tersebut. - Proses Yudisium dan Pendataan Seluruh Lulusan Program Sarjana (S1)
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data?	-

NO	Atribut	Keterangan
	(Disebutkan nama publikasinya)	

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang memiliki Pusat Pengembangan Karir
3	Konsep/Definisi	Proporsi Perguruan Tinggi Keagamaan (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) di bawah Kementerian Agama yang memiliki unit atau fasilitas yang secara khusus memberikan layanan pengembangan karir kepada mahasiswa dan alumni, relatif terhadap total PTK yang ada
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur ketersediaan fasilitas dan layanan pengembangan karir di PTK. Semakin tinggi persentase PTK yang memiliki pusat pengembangan karir, menunjukkan semakin besar perhatian dan upaya Kementerian Agama dalam mempersiapkan lulusan PTK untuk memasuki dunia kerja atau berwirausaha
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah PTK yang memiliki pusat pengembangan karir b = Jumlah PTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah PTK yang telah terpetakan berdasarkan keunggulannya 2. Jumlah PTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Identifikasi dan verifikasi keberadaan pusat pengembangan karir di setiap PTK (melalui survei, pendataan, atau laporan dari PTK). - Pendataan dan rekapitulasi total PTK di bawah Kementerian Agama.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan	-

NO	Atribut	Keterangan
	nama publikasinya)	

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase lulusan PTK yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan: a. Total; b. Karyawan atau Wirausaha
3	Konsep/Definisi	Persentase lulusan PTK yang berhasil memiliki pekerjaan adalah proporsi lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang telah berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai karyawan atau merintis usaha (wirausaha) dalam periode waktu tertentu setelah kelulusan, dibandingkan dengan total lulusan yang lulus pada periode yang sama. Indikator ini mengukur keberhasilan PTK dalam mempersiapkan lulusannya untuk memasuki dunia kerja atau menciptakan lapangan kerja sendiri.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur keberhasilan PTK dalam menghasilkan lulusan yang relevan dan siap kerja atau siap berwirausaha. Semakin tinggi persentase lulusan yang berhasil memiliki pekerjaan, baik sebagai karyawan maupun wirausaha, menunjukkan semakin baik kualitas kurikulum, proses pembelajaran, dan pembinaan karir yang dilakukan oleh PTK. Ini mengindikasikan bahwa lulusan PTK memiliki daya saing yang tinggi dan mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja atau menciptakan peluang ekonomi sendiri. Peningkatan indikator ini berkontribusi pada peningkatan relevansi pendidikan tinggi keagamaan, peningkatan angka serapan lulusan, pengurangan pengangguran terdidik, serta peningkatan kontribusi PTK terhadap pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \{ (a + b) / c \} \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah lulusan PTK yang berhasil menjadi karyawan dalam periode tertentu setelah kelulusan. b = Jumlah lulusan PTK yang berhasil menjadi wirausaha dalam periode tertentu setelah kelulusan. c = Jumlah total lulusan PTK yang lulus dalam periode yang sama.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lulusan PTK yang berhasil menjadi karyawan dalam periode tertentu setelah kelulusan. 2. Jumlah lulusan PTK yang berhasil menjadi wirausaha dalam periode tertentu setelah kelulusan. 3. Jumlah total lulusan PTK yang lulus dalam periode yang sama.

NO	Atribut	Keterangan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Tracer Study PTK - Program Career Center dan Alumni - Pelatihan kewirausahaan dan magang - Inkubator bisnis mahasiswa/alumni
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Pekerjaan: Karyawan, Wirausaha
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase tenaga kerja lulusan PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) bidang STEM
3	Konsep/Definisi	Proporsi angkatan kerja yang memiliki gelar pendidikan tinggi (D3, D4/Sarjana Terapan, S1, S2, S3) dari program studi di bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM), relatif terhadap total angkatan kerja lulusan pendidikan tinggi. Indikator ini mengukur ketersediaan SDM berkualitas di sektor-sektor kritis yang mendorong inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing bangs
4	Interpretasi	Indikator ini mencerminkan sejauh mana sistem pendidikan tinggi nasional mampu menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan industri dan sektor strategis di bidang STEM. Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan ketersediaan SDM STEM yang memadai untuk mendukung inovasi, riset dan pengembangan, transformasi digital, serta peningkatan produktivitas ekonomi. Ini juga mengindikasikan keberhasilan dalam mendorong minat dan kapasitas generasi muda pada disiplin ilmu yang penting untuk masa depan
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah lulusan PTK bidang STEM. b = Jumlah lulusan PTK.
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lulusan PTK bidang STEM. 2. Jumlah lulusan PTK.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) atau survei ketenagakerjaan lainnya yang spesifik
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Bidang STEM: - Sains (Fisika, Kimia, Biologi, Matematika, Statistika, dll.) - Teknologi (Informatika, Sistem Informasi, dll.) - Teknik/Rekayasa (Sipil, Elektro, Mesin, dll.) - Matematika Murni & Aktuaria
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya

NO	Atribut	Keterangan
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Sakernas

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan mahasiswa PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha) yang mendapatkan sertifikasi kompetensi/profesi
3	Konsep/Definisi	Proporsi lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) di bawah Kementerian Agama yang berhasil memperoleh sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi yang diakui dan memiliki reputasi baik, relatif terhadap total lulusan pada periode yang sama. Indikator ini mencerminkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur keberhasilan PTK dalam menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan akademis, tetapi juga dibekali dengan keterampilan praktis dan pengakuan kompetensi yang diakui secara profesional. Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan bahwa program pendidikan di PTK semakin relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan lulusannya memiliki daya saing yang kuat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah lulusan PTK yang mendapat sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi bereputasi. b = Jumlah lulusan PTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lulusan PTK yang mendapat sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi bereputasi. 2. Jumlah lulusan PTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Fasilitasi program sertifikasi kompetensi bagi mahasiswa/lulusan, kerja sama dengan lembaga sertifikasi, dan pendataan lulusan yang bersertifikat kompetensi. - Pendataan dan rekapitulasi total lulusan PTK di bawah Kementerian Agama
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Lembaga Sertifikasi: - LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) terlisensi BNSP - Asosiasi Profesi - Lembaga Sertifikasi Internasional
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

NO	Atribut	Keterangan
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Rasio Outbound per Inbound mahasiswa PTK (Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha)
3	Konsep/Definisi	Rasio outbound per inbound mahasiswa adalah perbandingan antara jumlah mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang mengikuti program mobilitas ke luar negeri (outbound) dengan jumlah mahasiswa asing yang mengikuti program mobilitas ke dalam PTK tersebut (inbound) dalam periode tertentu.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur tingkat internasionalisasi dan relevansi pendidikan tinggi keagamaan dengan dinamika global. Semakin seimbang rasio antara mahasiswa outbound dan inbound (mendekati 1:1), menunjukkan semakin kuatnya daya tarik dan kemampuan PTK dalam menciptakan ekosistem akademik yang inklusif secara internasional, serta semakin aktifnya mahasiswa PTK dalam mencari pengalaman global. Peningkatan rasio ini mencerminkan pengakuan PTK di kancah internasional, pengayaan perspektif multikultural di kampus, serta peningkatan kompetensi global mahasiswa. Hal ini berdampak pada peningkatan kualitas lulusan yang siap bersaing di pasar kerja global, pengembangan jejaring internasional, dan peningkatan reputasi PTK sebagai pusat keunggulan pendidikan keagamaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rasio Outbound per Inbound = $1 : (b / a)$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa outbound PTK b = Jumlah mahasiswa inbound PTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah mahasiswa outbound PTK 2. Jumlah mahasiswa inbound PTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Program mobilitas mahasiswa internasional (Erasmus+, IISMA, dll) - Student exchange antarlembaga PTKI dan mitra luar negeri - Program KKN internasional / transfer kredit luar negeri
8	Ukuran/Satuan	Rasio
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi

NO	Atribut	Keterangan
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase mahasiswa yang berkegiatan di luar program studi
3	Konsep/Definisi	Persentase mahasiswa yang berkegiatan di luar program studi adalah proporsi mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang mengikuti kegiatan atau program di luar kurikulum inti program studi mereka, dibandingkan dengan total seluruh mahasiswa yang aktif di PTK dalam periode tertentu. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi tambahan, soft skills, dan pengalaman di luar bidang keilmuan utama.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur tingkat fleksibilitas kurikulum dan partisipasi mahasiswa dalam pengembangan diri di luar bidang utama, yang krusial untuk meningkatkan relevansi lulusan. Semakin tinggi persentase mahasiswa yang berkegiatan di luar prodi, menunjukkan semakin kuatnya upaya PTK dalam memberikan pengalaman belajar holistik dan kesempatan untuk mengembangkan soft skills, kemandirian, serta jejaring. Ini juga mencerminkan kesadaran mahasiswa akan pentingnya kompetensi lintas disiplin.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100 \%$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa aktif yang berkegiatan di luar program studi dalam periode tertentu. b = Jumlah mahasiswa aktif yang ada di PTK dalam periode yang sama.
6	Nama Variabel Pembangun	a: Jumlah mahasiswa aktif yang berkegiatan di luar program studi dalam periode tertentu. b: Jumlah mahasiswa aktif yang ada di PTK dalam periode yang sama.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Kegiatan organisasi kemahasiswaan (ormawa) - Magang (MBKM, kerja praktik, dll) - KKN, pengabdian masyarakat - Program pertukaran pelajar, riset kolaboratif, dan kompetisi mahasiswa
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan

NO	Atribut	Keterangan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Kegiatan: - Program MBKM (spesifik: Pertukaran Pelajar, Magang, Asistensi Mengajar, dll.) - Organisasi Kemahasiswaan (Internal/Eksternal) - Kompetisi/Lomba - Pengabdian Masyarakat - Karya Ilmiah/Kreativitas (di luar tugas akhir prodi)
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi
3	Konsep/Definisi	Persentase mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang berpartisipasi dalam kompetisi akademik, seni, atau olahraga yang diselenggarakan di tingkat nasional maupun internasional dalam periode waktu tertentu. Kompetisi ini mencakup, namun tidak terbatas pada, olimpiade sains, lomba inovasi, debat, kompetisi pemrograman, turnamen olahraga, dan festival seni.
4	Interpretasi	Indikator ini menggambarkan tingkat partisipasi dan daya saing mahasiswa PTK di kancah nasional dan internasional. Persentase yang tinggi menunjukkan lingkungan akademik yang kondusif untuk pengembangan potensi mahasiswa di luar kurikulum formal, serta reputasi PTK dalam menghasilkan talenta-talenta berdaya saing global.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase peningkatan = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi pada tahun berjalan b = Jumlah mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi pada tahun berjalan 2. Jumlah mahasiswa yang mengikuti program sertifikasi profesi pada tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pendataan Partisipasi Mahasiswa dalam Kompetisi (PPMK)
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia	-

NO	Atribut	Keterangan
	publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri/pemerintah/ Lembaga Masyarakat /Internasional
3	Konsep/Definisi	Proporsi jumlah PTK yang terlibat aktif dalam kolaborasi atau kemitraan dengan entitas eksternal (dunia usaha dan industri, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, atau lembaga internasional) dibandingkan dengan total keseluruhan PTK. Kerja sama ini dapat meliputi berbagai bentuk, seperti magang industri, proyek penelitian bersama, pengembangan kurikulum bersama, pelatihan, program pengabdian masyarakat, atau pertukaran keahlian.
4	Interpretasi	Indikator ini mencerminkan tingkat keterbukaan dan relevansi institusi pendidikan dengan kebutuhan eksternal. Semakin tinggi persentase ini, semakin kuat integrasi institusi pendidikan dengan lingkungan kerja, industri, dan masyarakat, yang berpotensi meningkatkan kualitas pendidikan dan relevansi lulusan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase PTK yang bekerjasama = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja, industri, pemerintah, lembaga masyarakat, atau internasional b = Jumlah PTK
6	Nama Variabel Pembangun	a = Jumlah PTK yang bekerjasama dengan dunia kerja, industri, pemerintah, lembaga masyarakat, atau internasional b = Jumlah PTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survei Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendataan Potensi dan Kemitraan Institusi Pendidikan
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Jenis mitra: Industri, Pemerintah, LSM, Internasional
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan	-

NO	Atribut	Keterangan
	nama publikasinya)	

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti dibidang: a. Pendidikan dan pengajaran b. Penelitian dan publikasi c. Pengabdian kepada masyarakat
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur sejauh mana kerja sama yang telah disepakati dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kegiatan nyata. Kerja sama dimaksud mencakup perjanjian, nota kesepahaman, atau bentuk komitmen resmi antara perguruan tinggi/lembaga dengan mitra, yang kemudian dilaksanakan melalui kegiatan sesuai bidang.
4	Interpretasi	Nilai persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak kerja sama yang benar-benar ditindaklanjuti dan berdampak, sedangkan nilai rendah mengindikasikan adanya banyak kesepakatan yang belum terlaksana secara nyata.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase kerja sama bidang pendidikan dan pengajaran: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah kerja sama pendidikan dan pengajaran yang ditindaklanjuti b = Jumlah kerja sama pendidikan dan pengajaran yang disepakati Persentase kerjasama bidang penelitian dan publikasi: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah kerja sama penelitian dan publikasi yang ditindaklanjuti b = Jumlah kerja sama penelitian dan publikasi yang disepakati Persentase kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah kerja sama pengabdian kepada masyarakat yang ditindaklanjuti b = Jumlah kerja sama pengabdian kepada masyarakat yang disepakati

NO	Atribut	Keterangan
6	Nama Variabel Pembangunan	1. Jumlah kerja sama pendidikan dan pengajaran yang ditindaklanjuti 2. Jumlah kerja sama pendidikan dan pengajaran yang disepakati 3. Jumlah kerja sama penelitian dan publikasi yang ditindaklanjuti 4. Jumlah kerja sama penelitian dan publikasi yang disepakati 5. Jumlah kerja sama pengabdian kepada masyarakat yang ditindaklanjuti 6. Jumlah kerja sama pengabdian kepada masyarakat yang disepakati
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan	1. Pencatatan dan Pemantauan Kerjasama (Monitoring and Evaluation of Partnerships) 2. Manajemen Kerjasama (Partnership Management) 3. Pelaporan Kinerja Kerjasama (Partnership Performance Reporting)
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Jenis mitra: Industri, Pemerintah, LSM, Internasional
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase mahasiswa yang mengikuti program peningkatan literasi Kitab Suci
3	Konsep/Definisi	Persentase mahasiswa pada perguruan tinggi keagamaan atau umum yang berpartisipasi dalam program peningkatan literasi Kitab Suci, baik melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler yang difasilitasi oleh lembaga pendidikan dan instansi keagamaan.
4	Interpretasi	Peningkatan nilai menunjukkan bahwa semakin banyak mahasiswa yang mendapatkan akses dan kesempatan dalam penguatan spiritualitas dan nilai-nilai kebajikan lintas agama.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah mahasiswa yang mengikuti program literasi Kitab Suci dalam satuan waktu tertentu b = Jumlah mahasiswa dalam satuan waktu yang sama
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah mahasiswa yang mengikuti program literasi Kitab Suci dalam satuan waktu tertentu 2. Jumlah mahasiswa dalam satuan waktu yang sama
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pengembangan dan pelaksanaan program literasi Kitab Suci di PTKI/PTU 2. Pelatihan dan workshop peningkatan pemahaman kitab suci 3. Kegiatan pembinaan keagamaan berbasis kitab suci 4. Kemitraan dengan ormas dan lembaga keagamaan dalam literasi kitab 5. Monitoring dan evaluasi program pembelajaran kitab suci
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data?	-

NO	Atribut	Keterangan
	(Disebutkan nama publikasinya)	

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase PTK yang mengembangkan pusat-pusat kajian keagamaan sesuai kebutuhan lokal
3	Konsep/Definisi	Persentase PTK yang membentuk dan mengembangkan pusat kajian keagamaan berbasis isu-isu lokal seperti moderasi beragama, toleransi, harmoni sosial, dan penguatan nilai keagamaan kontekstual sesuai kebutuhan masyarakat sekitar.
4	Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan keberhasilan PTK dalam merespons dinamika sosial-keagamaan di tingkat lokal dengan pendekatan berbasis riset dan advokasi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah PTK yang telah mengembangkan pusat kajian keagamaan berbasis isu dan kebutuhan lokal b = Jumlah PTK yang menjadi sasaran program
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah PTK yang telah mengembangkan pusat kajian keagamaan berbasis isu dan kebutuhan lokal 2. Jumlah PTK yang menjadi sasaran program
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pembentukan pusat studi keagamaan berbasis lokal 2. Penelitian berbasis kebutuhan sosial-keagamaan lokal 3. Pengabdian masyarakat berbasis hasil kajian keagamaan 4. Penerbitan hasil kajian tematik keagamaan 5. Kemitraan PTK dengan pemda/lembaga masyarakat dalam bidang keagamaan
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase prodi yang mengimplementasikan integrasi keilmuan
3	Konsep/Definisi	Persentase prodi yang mengimplementasikan integrasi keilmuan adalah rasio jumlah program studi (prodi) di perguruan tinggi keagamaan yang telah menerapkan kurikulum, metode pembelajaran, atau penelitian berbasis integrasi keilmuan dibandingkan dengan total prodi yang diukur pada periode tertentu
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini, semakin banyak prodi yang berhasil menggabungkan ilmu agama dengan ilmu umum atau interdisipliner, untuk menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan holistik dan relevan dengan kebutuhan masyarakat
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah prodi yang mengimplementasikan integrasi keilmuan b = Jumlah prodi yang diukur
6	Nama Variabel Pembangun	a = Jumlah prodi yang mengimplementasikan integrasi keilmuan b = Jumlah prodi yang diukur
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Evaluasi kurikulum dan implementasi integrasi keilmuan 2. Workshop/pelatihan pengembangan kurikulum integratif 3. Pendampingan dan monitoring prodi
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Jenis Institusi: - PTK Negeri - PTK Swasta - Ma'had Aly
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase karya tulis ilmiah yang bereputasi nasional
3	Konsep/Definisi	Persentase karya tulis ilmiah yang bereputasi nasional di Kementerian Agama adalah perbandingan jumlah karya tulis ilmiah ilmiah yang terakreditasi nasional (minimal SINTA 1 atau SINTA 2) yang dikelola oleh unit kerja atau perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama, terhadap total jumlah karya tulis ilmiah yang diterbitkan di lingkungan Kementerian Agama
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan kualitas dan pengakuan nasional atas karya tulis ilmiah-karya tulis ilmiah ilmiah di bawah pengelolaan Kementerian Agama
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah karya tulis ilmiah terakreditasi nasional (SINTA 1 atau 2) b = Total karya tulis ilmiah yang dikelola
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah karya tulis ilmiah yang terakreditasi nasional (SINTA 1 atau SINTA 2) 2. Total jumlah karya tulis ilmiah yang dikelola
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pengelolaan dan Akreditasi karya tulis ilmiah Ilmiah
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	1. SINTA 1 (Tertinggi) 2. SINTA 2 3. SINTA 3 4. SINTA 4 ke bawah
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Di Scopus

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase publikasi ilmiah bereputasi internasional PTK yang disitasi
3	Konsep/Definisi	Persentase artikel jurnal bereputasi internasional yang disitasi adalah proporsi artikel ilmiah yang dipublikasikan oleh dosen/peneliti PTK pada jurnal bereputasi internasional yang telah mendapat sitasi (citation) dari artikel lain dalam periode tertentu. Jurnal bereputasi internasional adalah jurnal yang terindeks dalam database internasional yang diakui seperti Scopus, Web of Science (WoS), atau database internasional lainnya yang memiliki sistem peer-review yang ketat. Sitasi adalah rujukan atau referensi yang dibuat oleh artikel lain terhadap artikel yang dimaksud, yang menunjukkan dampak dan kontribusi artikel tersebut terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Artikel yang disitasi menunjukkan kualitas, relevansi, dan pengaruh penelitian terhadap komunitas ilmiah internasional.
4	Interpretasi	Indikator ini mengukur dampak dan kualitas publikasi ilmiah PTK di tingkat internasional. Semakin tinggi persentase artikel yang disitasi, menunjukkan semakin baik kualitas dan relevansi penelitian yang dihasilkan oleh PTK.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100 \%$
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah artikel jurnal bereputasi internasional yang memperoleh sitasi; b. Jumlah total artikel jurnal bereputasi internasional yang diterbitkan oleh PTK.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Insentif Publikasi Ilmiah Internasional; - Bantuan Penulisan Artikel Bereputasi; - Pelatihan Sitasi dan Manajemen Referensi Ilmiah.
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Quartile Jurnal (SJR/JCR): - Q1 (Quartile 1); - Q2 (Quartile 2); - Q3 (Quartile 3); - Q4 (Quartile 4).
11	Level Estimasi	Nasional, Perguruan Tinggi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

NO	Atribut	Keterangan
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Jumlah karya tulis ilmiah berorientasi SDGs yang terpublikasi di Jurnal Internasional bereputasi
3	Konsep/Definisi	Persentase jumlah karya tulis ilmiah yang mendukung capaian Sustainable Development Goals (SDGs) dan berhasil terpublikasi di jurnal internasional bereputasi, dibandingkan dengan total karya tulis ilmiah yang dihasilkan dalam periode tertentu.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin kuat kontribusi akademik civitas akademika dalam mendukung target SDGs melalui publikasi yang diakui secara internasional.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus = Jumlah karya tulis ilmiah berorientasi SDGs yang terpublikasi di jurnal internasional bereputasi
6	Nama Variabel Pembangun	Jumlah karya tulis ilmiah berorientasi SDGs yang terpublikasi di jurnal internasional bereputasi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penelitian dosen dan mahasiswa berfokus SDGs 2. Workshop penulisan artikel ilmiah bereputasi 3. Pendampingan publikasi internasional
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan THE 17 GOALS
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Rasio produktifitas publikasi ilmiah dengan jumlah dosen
3	Konsep/Definisi	Rasio produktivitas publikasi jurnal dengan jumlah dosen adalah perbandingan antara jumlah artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal terakreditasi nasional atau internasional dengan jumlah dosen tetap di perguruan tinggi keagamaan di lingkungan Kementerian Agama dalam periode tertentu
4	Interpretasi	Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin produktif dosen dalam menghasilkan publikasi ilmiah, yang mencerminkan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan Kementerian Agama
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rasio: $1 : (b / a)$ Keterangan: a = Jumlah artikel ilmiah yang dipublikasikan b = Jumlah dosen tetap
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah artikel ilmiah yang dipublikasikan 2. Jumlah dosen tetap
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Kegiatan Penelitian dan Publikasi Ilmiah Dosen PTKIN/PTKIS 2. Program Insentif Publikasi Ilmiah 3. Program Peningkatan Mutu Penelitian Dosen
8	Ukuran/Satuan	Rasio
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Quartil Artikel: (Q1, Q2, Q3, dan Q4)
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Di Scopus

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Jumlah Paten Granted karya tulis ilmiah Perguruan Tinggi Keagamaan
3	Konsep/Definisi	Jumlah Paten Granted karya tulis ilmiah Perguruan Tinggi adalah total hak paten yang telah resmi diberikan (granted) oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) kepada Perguruan Tinggi Keagamaan di lingkungan Kementerian Agama dalam periode tertentu
4	Interpretasi	Semakin banyak jumlah paten yang granted, semakin menunjukkan meningkatnya kapasitas inovasi, riset terapan, dan kontribusi Perguruan Tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta pemanfaatannya untuk masyarakat
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus: Jumlah Paten Granted (disetujui DJKI) dalam satu tahun
6	Nama Variabel Pembangun	Jumlah paten granted yang diperoleh oleh Perguruan Tinggi Keagamaan.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Inovasi di PTKIN/PTKIS 2. Program Pendaftaran dan Fasilitasi Paten Perguruan Tinggi
8	Ukuran/Satuan	Unit (paten)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Kategori Jumlah Paten Granted 1. Rendah (0 – 2 paten granted) 2. Sedang (3 – 5 paten granted) 3. Tinggi (> 5 paten granted)
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan DUDI/Masyarakat
3	Konsep/Definisi	Persentase hasil riset dan inovasi adalah rasio antara jumlah hasil riset dan inovasi yang telah dimanfaatkan oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) atau masyarakat terhadap total hasil riset dan inovasi yang dihasilkan perguruan tinggi keagamaan dalam periode tertentu
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak hasil riset dan inovasi yang aplikatif, relevan, dan bermanfaat bagi DUDI/masyarakat, menandakan peningkatan kualitas riset terapan di perguruan tinggi
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah hasil riset yang dimanfaatkan DUDI/Masyarakat b = Jumlah hasil riset
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah hasil riset yang dimanfaatkan DUDI/Masyarakat 2. Jumlah hasil riset
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Kegiatan Penelitian dan Inovasi Terapan 2. Program Hilirisasi Hasil Riset 3. Kemitraan Perguruan Tinggi dengan DUDI/Komunitas Masyarakat
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan Pihak Pemanfaat: - Dunia Usaha (Perusahaan, Startup) - Dunia Industri - Masyarakat (Komunitas, Kelompok Tani, UMKM) - Pemerintah/Lembaga Publik
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase Lembaga Penelitian dan Pengabdian ke Masyarakat (LPPM) yang ditingkatkan kapasitasnya
3	Konsep/Definisi	Persentase LPPM yang mendapatkan program peningkatan kapasitas melalui pelatihan, workshop, pendampingan, atau sertifikasi dalam rangka penguatan fungsi riset dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan perguruan tinggi keagamaan
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan makin banyak LPPM yang ditingkatkan kapasitasnya, sebagai cerminan perbaikan kualitas manajemen riset dan pengabdian di perguruan tinggi
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah LPPM yang ditingkatkan kapasitasnya b = Jumlah LPPM PTK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah LPPM yang ditingkatkan kapasitasnya 2. Jumlah LPPM PTK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelatihan/Workshop Manajemen Riset dan Pengabdian Masyarakat 2. Sertifikasi Kompetensi Pengelola LPPM 3. Program Penguatan Tata Kelola LPPM 4. Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan LPPM
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis peningkatan kapasitasnya: 1. Pelatihan Pengelolaan LPPM 2. Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Kelola LPPM 3. Sertifikasi Kompetensi Pengelola LPPM 4. Pendampingan Penyusunan Roadmap Riset & Pengabdian
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur tingkat kecukupan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang tersedia untuk mendukung layanan digital dan operasional sistem informasi di lingkungan instansi pemerintah.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa kebutuhan infrastruktur TIK (seperti jaringan, server, perangkat keras, dan pusat data) telah terpenuhi secara optimal guna mendukung kelancaran layanan digital.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah kebutuhan infrastruktur TIK yang telah terpenuhi b. Jumlah total kebutuhan infrastruktur TIK yang direncanakan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah perangkat keras (hardware) yang tersedia 2. Jumlah kebutuhan jaringan dan konektivitas yang terpenuhi 3. Jumlah layanan server/cloud yang tersedia 4. Total kebutuhan infrastruktur yang diidentifikasi dalam perencanaan TIK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Infrastruktur TIK
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Teknologi Informasi dan Komunikasi / Infrastruktur Digital / Dukungan Layanan Pemerintah Digital
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur proporsi data prioritas yang telah tersedia dan sesuai dengan kebutuhan pengukuran indikator pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) instansi.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa instansi telah menyediakan data yang relevan dan selaras dengan perencanaan nasional dan sektoral, sehingga mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah data prioritas yang tersedia dan selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra b. Jumlah total data yang dibutuhkan untuk mengukur indikator RPJMN dan Renstra
6	Nama Variabel Pembangun	1. Daftar indikator RPJMN dan Renstra yang membutuhkan data 2. Jumlah data yang telah tersedia dalam format dan frekuensi yang sesuai 3. Kesesuaian metadata dan definisi operasional data
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan Data Prioritas Pembangunan
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Perencanaan Pembangunan / Satu Data Indonesia / Tata Kelola Data Pemerintah
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Badan Kepegawaian Negara
2	Nama Indikator	Rerata nilai akreditasi lembaga pada Unit Penilaian Kompetensi Kementerian Agama oleh BKN minimal 85
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur kualitas Unit Penilaian Kompetensi (UPK) di lingkungan Kementerian Agama berdasarkan hasil akreditasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Nilai akreditasi mencerminkan standar mutu dalam pelaksanaan penilaian kompetensi ASN.
4	Interpretasi	Semakin tinggi rerata nilai akreditasi, semakin menunjukkan bahwa UPK Kementerian Agama telah memenuhi standar mutu nasional. Nilai minimal 85 menunjukkan tingkat keandalan yang tinggi dalam pelaksanaan penilaian kompetensi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rerata = $(\Sigma a) / b$ Keterangan: a. Nilai akreditasi masing-masing Unit Penilaian Kompetensi b. Jumlah Unit Penilaian Kompetensi yang dinilai oleh BKN
6	Nama Variabel Pembangun	1. Nilai akreditasi masing-masing UPK oleh BKN 2. Jumlah UPK Kementerian Agama yang telah mengikuti proses akreditasi 3. Standar akreditasi dari BKN (misalnya aspek kelembagaan, SDM, sarana, dan metode asesmen)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Evaluasi dan Akreditasi Unit Penilaian Kompetensi ASN
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Manajemen ASN / Pengembangan Kompetensi / Reformasi Birokrasi
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Keuangan
2	Nama Indikator	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur kualitas pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja berdasarkan aspek kepatuhan, efektivitas penyerapan anggaran, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi penggunaan dana, sebagaimana dinilai oleh Kementerian Keuangan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi nilai kinerja, menunjukkan bahwa satuan kerja semakin baik dalam merencanakan dan merealisasikan anggarannya secara tertib, efisien, dan sesuai peraturan yang berlaku.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Nilai dari Kementerian Keuangan
6	Nama Variabel Pembangun	Nilai dari Kemenkeu
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan aspek penilaian: Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Efektivitas, Efisiensi, dan Kepatuhan terhadap Regulasi
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase Efektivitas dan Efisiensi Program yang mencapai tujuan
3	Konsep/Definisi	Penilaian terhadap tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian target output/outcome dari program/kegiatan yang di awasi melalui Program Pengawasan Intern
4	Interpretasi	Mengukur seberapa efektif dan efisien suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah program yang dinilai efektif dan efisien serta mencapai tujuan b. Jumlah total program yang dilaksanakan
6	Nama Variabel Pembangun	Program yang Efektif, Anggaran
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Audit, Reviu, Pemantauan, Evaluasi
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Program yang efektif dan efisien mencapai target yang ditentukan
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian PAN-RB
2	Nama Indikator	Nilai SAKIP satuan kerja
3	Konsep/Definisi	Peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja dan anggaran dalam mencapai tujuan organisasi
4	Interpretasi	Mengukur seberapa baik satuan kerja dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja sesuai dengan SAKIP

NO	Atribut	Keterangan
5	Metode / Rumus Perhitungan	Peningkatan rata-rata nilai SAKIP satuan kerja = rata-rata nilai SAKIP satuan kerja yang dievaluasi
6	Nama Variabel Pembangun	1.Perencanaan Kinerja 2.Pengukuran Kinerja 3.Evaluasi Kinerja 4.Pelaporan Kinerja
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Penyusunan Dokumen Perencanaan kinerja, Laporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, Audit Kinerja
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Peningkatan rata-rata nilai SAKIP sesuai target yang ditetapkan
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan yang efektif
3	Konsep/Definisi	Penilaian efektivitas sistem pengendalian internal dalam memastikan integritas, keandalan, dan ketepatan waktu laporan keuangan
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin baik fungsi pengendalian internal dalam mengelola risiko kesalahan atau kecurangan dalam pelaporan keuangan
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah satuan kerja dengan pengendalian intern pelaporan keuangan yang dinilai efektif b. Jumlah total satuan kerja yang dievaluasi
6	Nama Variabel Pembangun	Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pemantauan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Reviu PIPK
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan status efektivitas: Efektif, Cukup Efektif, Tidak Efektif
11	Level Estimasi	Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Inspektorat Jenderal
2	Nama Indikator	Nilai telaah sejawat
3	Konsep/Definisi	Pengukuran tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar melalui evaluasi sejawat internal
4	Interpretasi	Mengukur sejauh mana telaah sejawat efektif dalam memperbaiki kualitas audit dan pengawasan
5	Metode / Rumus Perhitungan	Nilai Telaah Sejawat =Jumlah (Bobot dari setiap komponen x Skor capaian komponen telaah sejawat)
6	Nama Variabel Pembangun	Proses Telaah Sejawat
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Evaluasi Sejawat
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan aspek penilaian: Kepatuhan terhadap standar akuntansi, Kualitas penyajian laporan, Sistem pengendalian intern, Kepatuhan regulasi, Kualitas dokumentasi
11	Level Estimasi	Tahunan
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Inspektorat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase kegiatan pengawasan berbasis risiko dan sesuai standar
3	Konsep/Definisi	Pengawasan yang berfokus pada identifikasi, penilaian, dan penanganan risiko yang berpotensi mempengaruhi kinerja suatu organisasi atau kegiatan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin efektif dan tepat sasaran kegiatan pengawasan dalam mengelola risiko dan memastikan kepatuhan pada standar yang berlaku
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Rumus} = (a/b) * 100\%$ Keterangan: a. Jumlah kegiatan pengawasan yang berbasis resiko dan sesuai standar b. Jumlah total kegiatan pengawasan
6	Nama Variabel Pembangun	Pengawasan Berbasis Risiko
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Penyusunan Audit Berbasis Risiko dan Pedoman Kerja Pengawasan Tahunan
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Bulanan
10	Klasifikasi	Berdasarkan pendekatan: Berbasis Risiko, Non-Risiko
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Inspektorat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase pengendalian risiko kecurangan
3	Konsep/Definisi	Menilai keberhasilan pengendalian terhadap potensi risiko kecurangan dalam pengelolaan sumber daya publik
4	Interpretasi	Mengukur sejauh mana program/kegiatan telah dilengkapi dengan sistem dan prosedur pengendalian yang efektif untuk mencegah terjadinya kecurangan

NO	Atribut	Keterangan
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan pengendalian risiko kecurangan b. Jumlah total satuan kerja
6	Nama Variabel Pembangun	Pengendalian Risiko Kecurangan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Audit, Reviu, Pemantauan, Evaluasi
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Bulanan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis risiko: Penyalahgunaan Keuangan, Manipulasi Laporan, Penyalahgunaan Wewenang, Gratifikasi/Korupsi
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Inspektorat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase penanganan risiko kecurangan
3	Konsep/Definisi	Mengukur jumlah kasus yg memiliki risiko fraud yang ditindaklanjuti dan dibuktikan
4	Interpretasi	Mengukur sejauh mana upaya penanganan terhadap risiko kecurangan yang teridentifikasi telah dilakukan dengan baik
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah risiko kecurangan yang telah ditangani b. Jumlah total risiko kecurangan yang teridentifikasi
6	Nama Variabel Pembangun	Penanganan Risiko Kecurangan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Audit Investigasi, Audit Tujuan Tertentu
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Bulanan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis risiko: Penyalahgunaan Keuangan, Manipulasi Laporan, Penyalahgunaan Wewenang, Gratifikasi/Korupsi
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Inspektorat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase Pengamanan Aset Negara
3	Konsep/Definisi	Tingkat Pengamanan aset negara melalui capaian keamanan administrasi, keamanan hukum, dan keamanan fisik terhadap aset yang bermasalah
4	Interpretasi	Mengukur efektivitas pengamanan terhadap aset negara yang bermasalah (sebanyak 27 kasus) untuk mencegah kehilangan atau penyalahgunaan
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah aset negara yang telah diamankan b. Jumlah total aset negara yang dikuasai
6	Nama Variabel Pembangun	Pengamanan Aset Negara
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Audit Investigasi, Audit Tujuan Tertentu
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Bulanan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis aset: Tanah, Bangunan, Peralatan/Mesin, Aset Tak Berwujud
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase kajian kebijakan yang dimanfaatkan
3	Konsep/Definisi	Proporsi kajian yang digunakan dalam pengambilan keputusan
4	Interpretasi	Menggambarkan sejauh mana hasil kajian kebijakan digunakan dalam pengambilan keputusan atau penyusunan kebijakan oleh instansi
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah kajian kebijakan yang dimanfaatkan b. Jumlah total kajian kebijakan yang disusun
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah dokumen kajian yang digunakan sebagai dasar kebijakan/program 2. Jumlah seluruh dokumen kajian yang disusun dalam periode tertentu
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Penyusunan, Diseminasi, dan Monitoring Pemanfaatan Kajian Kebijakan
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Triwulan dan Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan substansi: Pengkajian dan Perumusan Kebijakan Pemerintah
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Inspektorat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase tindaklanjut hasil pengawasan yang diverifikasi

3	Konsep/Definisi	Rasio yang menunjukkan seberapa efektif suatu entitas atau lembaga dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi atau temuan yang dihasilkan dari kegiatan pengawasan (audit, inspeksi, atau evaluasi) oleh Badan Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atau lembaga pengawas eksternal, yang kemudian hasilnya telah diverifikasi dan dinyatakan selesai (sesuai/tuntas) oleh pihak pengawas
4	Interpretasi	Persentase yang tinggi (mendekati 100%) menunjukkan tingkat kepatuhan dan akuntabilitas yang baik dari entitas yang diawasi. Ini mencerminkan komitmen manajemen untuk memperbaiki kelemahan, meningkatkan kinerja, dan menuntaskan temuan pengawasan. Persentase yang rendah mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal, resistensi terhadap perbaikan, atau kurangnya komitmen manajemen dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan masalah yang ditemukan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $((a) / (b)) * 100\%$ Keterangan: (a) = Jumlah Rekomendasi/Temuan Hasil Pengawasan yang Telah Ditindaklanjuti dan Dinyatakan Selesai Diverifikasi: Angka ini merujuk pada temuan audit/pengawasan yang telah diperbaiki oleh unit yang diawasi, dan perbaikan tersebut sudah diperiksa ulang dan dinyatakan tuntas oleh lembaga pengawas (seperti Inspektorat atau BPK). (b) = Total Jumlah Rekomendasi/Temuan Hasil Pengawasan yang Wajib Ditindaklanjuti: Ini adalah jumlah seluruh rekomendasi atau temuan yang dikeluarkan oleh lembaga pengawas yang harus ditindaklanjuti oleh entitas yang diawasi.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Rekomendasi/Temuan Hasil Pengawasan yang Telah Ditindaklanjuti dan Dinyatakan Selesai Diverifikasi oleh Pihak Pengawas. b. Total Jumlah Rekomendasi/Temuan Hasil Pengawasan yang Wajib Ditindaklanjuti dalam Periode Pengawasan.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pelaksanaan Audit, Inspeksi, atau Evaluasi (Pengawasan). - Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan Rekomendasi. - Pelaksanaan Tindak Lanjut oleh Entitas yang Diawasi. - Kegiatan Verifikasi dan Monitoring Tindak Lanjut oleh Lembaga Pengawas (APIP/BPK/dll.).
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Triwulanan, dan Tahunan

10	Klasifikasi	- Berdasarkan Jenis Pengawasan: Audit Kinerja, Audit Keuangan, Audit Tujuan Tertentu (ATT), Reviu, Evaluasi. - Berdasarkan Status Tindak Lanjut: Selesai, Belum Sesuai, Belum Ditindaklanjuti. - Berdasarkan Entitas yang Diawasi: Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), Unit Kerja Teknis.
11	Level Estimasi	- Kementerian/Lembaga - Unit Eselon I/II
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase tindaklanjut pengaduan masyarakat yang diverifikasi
3	Konsep/Definisi	Persentase yang mengukur efektivitas dan responsivitas suatu instansi pemerintah dalam menanggapi dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan oleh masyarakat. Persentase ini secara spesifik dihitung dari jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti, dan penyelesaiannya telah diverifikasi serta dinyatakan tuntas oleh sistem atau pihak yang berwenang.
4	Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa instansi memiliki sistem penanganan pengaduan yang efektif, responsif, dan akuntabel. Hal ini mencerminkan komitmen instansi untuk melayani masyarakat dan memperbaiki pelayanan berdasarkan masukan/kritik. Persentase yang rendah mengindikasikan adanya kendala dalam proses penanganan, seperti lamanya waktu respons, kurangnya koordinasi, atau kegagalan dalam menyelesaikan masalah hingga tuntas dan terverifikasi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = ((a) / (b)) * 100% Keterangan: (a) = Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Telah Ditindaklanjuti dan Dinyatakan Selesai Diverifikasi/Tuntas: Ini adalah jumlah pengaduan yang tidak hanya direspons, tetapi juga masalahnya sudah diselesaikan, dan penyelesaian tersebut telah diverifikasi serta dikonfirmasi tuntas oleh sistem atau unit pengelola pengaduan resmi. (b) = Total Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Diterima dan Wajib Ditindaklanjuti: Ini adalah seluruh pengaduan sah yang masuk ke instansi atau sistem selama periode pelaporan dan memerlukan tindakan penyelesaian.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Telah Ditindaklanjuti dan Dinyatakan Selesai Diverifikasi/Tuntas dalam Periode Pelaporan. b. Total Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Diterima dan Wajib Ditindaklanjuti dalam Periode yang Sama.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Penerimaan dan Registrasi Pengaduan Masyarakat. - Proses Analisis, Disposisi, dan Tindak Lanjut Pengaduan oleh Unit Terkait. - Kegiatan Verifikasi, Monitoring, dan Penutupan Pengaduan oleh Petugas Pengelola Pengaduan
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Bulanan, Triwulanan dan tahunan

NO	Atribut	Keterangan
10	Klasifikasi	- Berdasarkan Status Pengaduan: Selesai (Diverifikasi/Tuntas), Sedang Diproses, Belum Ditindaklanjuti. - Berdasarkan Sektor/Isu Pengaduan: Pelayanan Publik, Infrastruktur, Hukum, Kepegawaian, dll. - Berdasarkan Kanal Penerimaan: LAPOR!, Surat Resmi, Langsung, Media Sosial.
11	Level Estimasi	- Kementerian/Lembaga - Unit Eselon I/II terkait pengaduan masyarakat
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase PTKN yang memperoleh nilai pembangunan zona integritas minimal 75
3	Konsep/Definisi	Rasio yang menunjukkan proporsi Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), baik di bawah Kementerian Agama maupun kementerian/lembaga lain, yang telah mencapai skor atau nilai evaluasi minimal 75 dalam proses Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Nilai 75 merupakan ambang batas kinerja minimal yang ditetapkan untuk menunjukkan komitmen dan keberhasilan signifikan dalam reformasi birokrasi, khususnya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
4	Interpretasi	Persentase yang tinggi mengindikasikan bahwa mayoritas PTKN telah berhasil mengimplementasikan program reformasi birokrasi yang efektif, dengan fokus kuat pada tata kelola yang bersih, transparan, dan pelayanan publik yang prima. Ini mencerminkan komitmen lembaga pendidikan keagamaan dalam membangun integritas. Persentase yang rendah menunjukkan perlunya peningkatan upaya dalam perbaikan manajemen risiko, pengendalian internal, dan penyediaan layanan yang bebas dari praktik korupsi.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $((a) / (b)) * 100\%$ Keterangan: (a) = Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) yang Memperoleh Nilai Pembangunan ZI ≥ 75: Ini adalah angka PTKN yang telah diukur dan skor penilaian Pembangunan Zona Integritas-nya mencapai minimal 75 (atau lebih tinggi), yang menunjukkan komitmen signifikan terhadap Reformasi Birokrasi, WBK, dan WBBM. (b) = Total Jumlah PTKN yang Wajib Melaksanakan Pembangunan ZI: Ini adalah keseluruhan jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (UIN, IAIN, STAIN, dll.) yang masuk dalam cakupan target pembangunan Zona Integritas.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) yang Memperoleh Nilai Pembangunan Zona Integritas ≥ 75. b. Total Jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) yang Wajib Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas.

NO	Atribut	Keterangan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan PTKN. - Survei dan Penilaian Mandiri (Internal) Pembangunan ZI oleh PTKN. - Evaluasi dan Penilaian Eksternal Pembangunan ZI oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) atau Tim Penilai Internal (TPI) Kementerian Agama/Kementerian terkait. - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kualitas Pelayanan Publik.
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	- Berdasarkan Jenis PTKN: UIN (Universitas Islam Negeri), IAIN (Institut Agama Islam Negeri), STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri), atau PTKN lainnya. - Berdasarkan Status Penetapan ZI: Belum Diusulkan, Diusulkan WBK, Ditetapkan WBK, Ditetapkan WBBM. - Berdasarkan Wilayah: Provinsi/Regional.
11	Level Estimasi	- Tingkat Kementerian Agama (agregasi nasional seluruh PTKN). - Dapat diturunkan hingga tingkat individu PTKN sesuai hasil penilaian Zona Integritas.
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan layanan pengadaan barang dan jasa
3	Konsep/Definisi	Ukuran kinerja yang mencerminkan peningkatan kualitas dan kematangan layanan yang diberikan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam memproses pengadaan barang/jasa. Peningkatan layanan ini diukur melalui perbandingan skor Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) atau Tingkat Kematangan UKPBJ dari tahun berjalan terhadap skor tahun sebelumnya. Semakin tinggi skor, semakin matang dan prima layanan pengadaan yang diselenggarakan.
4	Interpretasi	Nilai persentase yang positif menunjukkan adanya perbaikan kualitas layanan pengadaan, yang meliputi kecepatan, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Peningkatan ini selaras dengan upaya Reformasi Birokrasi dan pencegahan korupsi. Jika persentase negatif atau stagnan, ini mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap manajemen risiko, SDM, dan tata kelola pengadaan di lingkungan UKPBJ.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase Peningkatan = $\frac{((T_n) - (T_{n-1}))}{(T_{n-1})} \times 100\%$ Keterangan: - Nilai Indeks UKPBJ Tahun Berjalan (T_n): Nilai evaluasi kualitas layanan pengadaan barang/jasa (seringkali menggunakan skor Indeks Tata Kelola Pengadaan/ITKP atau Tingkat Kematangan UKPBJ) pada periode yang sedang dilaporkan. - Nilai Indeks UKPBJ Tahun Sebelumnya (T_{n-1}): Nilai evaluasi yang sama pada periode tahun sebelumnya, digunakan sebagai basis perbandingan. * 100%: Digunakan untuk mengubah hasil perubahan menjadi bentuk persentase, yang menunjukkan seberapa besar kenaikan (atau penurunan) kualitas layanan pengadaan dibandingkan tahun lalu.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) atau Tingkat Kematangan UKPBJ Tahun Berjalan (T_n). b. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) atau Tingkat Kematangan UKPBJ Tahun Sebelumnya (T_{n-1}).

NO	Atribut	Keterangan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pelaksanaan Survei dan Penilaian Mandiri Kematangan UKPBJ. - Evaluasi Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) atau Penilaian Kematangan UKPBJ oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadaan. - Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Digitalisasi Layanan Pengadaan (LPSE).
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	- Berdasarkan Kriteria Penilaian ITKP/Kematangan (misalnya, Aspek Kebijakan, Aspek Proses Bisnis, Aspek SDM, Aspek Kelembagaan). - Berdasarkan Jenis UKPBJ (Pusat/Daerah/Perguruan Tinggi).
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Rerata nilai ASN Kementerian Agama yang mengikuti Pelatihan Manajerial (Kepemimpinan) minimal 80
3	Konsep/Definisi	Rata-rata (rerata) nilai evaluasi yang diperoleh oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama yang telah menyelesaikan program Pelatihan Manajerial atau Kepemimpinan (seperti Pelatihan Kepemimpinan Administrator/PKA, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas/PKP, atau sejenisnya). Nilai rerata ini hanya dihitung dari ASN yang mendapatkan skor akhir minimal 80, menunjukkan bahwa mereka telah mencapai standar kompetensi yang tinggi dalam pelatihan tersebut.
4	Interpretasi	Rerata nilai yang tinggi (mendekati 100) menunjukkan bahwa ASN peserta pelatihan memiliki kualitas penyerapan materi, keterampilan, dan kompetensi manajerial/kepemimpinan yang sangat baik dan melebihi ambang batas minimal (80). Hal ini mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan diklat dalam meningkatkan kapasitas kepemimpinan. Sebaliknya, rerata yang hanya sedikit di atas 80 mengindikasikan bahwa meskipun ASN tersebut lulus, kualitas kompetensinya masih perlu ditingkatkan lebih lanjut.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rerata Nilai = (a) / (b) Keterangan (a) = Total Kumulatif Nilai Akhir ASN yang Mendapat Nilai ≥ 80: Ini adalah jumlah total (akumulasi) dari semua nilai akhir yang didapatkan oleh para peserta pelatihan manajerial/kepemimpinan yang dinyatakan lulus dengan skor minimal 80 atau lebih. (b) = Jumlah ASN yang Mendapat Nilai ≥ 80: Ini adalah hitungan (frekuensi) jumlah individu ASN yang berhasil lulus pelatihan dengan skor akhir minimal 80.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Total Kumulatif Nilai Akhir ASN Kemenag yang Mengikuti Pelatihan Manajerial dan Memperoleh Nilai ≥ 80. b. Jumlah ASN Kemenag yang Mengikuti Pelatihan Manajerial dan Memperoleh Nilai ≥ 80.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial (PKA, PKP, atau Diklat Fungsional/Teknis Kepemimpinan). - Evaluasi Kompetensi Peserta Pelatihan (melalui ujian, penilaian proyek, atau studi kasus). - Pengolahan Data dan Sertifikasi Alumni Pelatihan ASN.
8	Ukuran/Satuan	Skor Numerik (0-100)

NO	Atribut	Keterangan
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	- Berdasarkan Jenis Pelatihan: PKA, PKP, Pelatihan Fungsional Tertentu. - Berdasarkan Unit Penyelenggara: Balai Diklat Keagamaan (BDK), Pusat Pelatihan dan Pendidikan (Pusdiklat) Teknis. - Berdasarkan Kategori ASN: Eselon III, Eselon IV, Fungsional Tertentu.
11	Level Estimasi	- Nasional '- Unit Eselon I atau Satuan Kerja
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Rerata nilai ASN Kementerian Agama yang mengikuti Pelatihan Manajerial (Kepemimpinan) minimal 80
3	Konsep/Definisi	Rata-rata (rerata) nilai evaluasi yang diperoleh oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama yang telah menyelesaikan program Pelatihan Manajerial atau Kepemimpinan (seperti Pelatihan Kepemimpinan Administrator/PKA, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas/PKP, atau sejenisnya). Nilai rerata ini hanya dihitung dari ASN yang mendapatkan skor akhir minimal 80, menunjukkan bahwa mereka telah mencapai standar kompetensi yang tinggi dalam pelatihan tersebut.
4	Interpretasi	Rerata nilai yang tinggi (mendekati 100) menunjukkan bahwa ASN peserta pelatihan memiliki kualitas penyerapan materi, keterampilan, dan kompetensi manajerial/kepemimpinan yang sangat baik dan melebihi ambang batas minimal (80). Hal ini mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan diklat dalam meningkatkan kapasitas kepemimpinan. Sebaliknya, rerata yang hanya sedikit di atas 80 mengindikasikan bahwa meskipun ASN tersebut lulus, kualitas kompetensinya masih perlu ditingkatkan lebih lanjut.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rerata Nilai = (a) / (b) Keterangan (a) = Total Kumulatif Nilai Akhir ASN yang Mendapat Nilai ≥ 80: Ini adalah jumlah total (akumulasi) dari semua nilai akhir yang didapatkan oleh para peserta pelatihan manajerial/kepemimpinan yang dinyatakan lulus dengan skor minimal 80 atau lebih. (b) = Jumlah ASN yang Mendapat Nilai ≥ 80: Ini adalah hitungan (frekuensi) jumlah individu ASN yang berhasil lulus pelatihan dengan skor akhir minimal 80.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Total Kumulatif Nilai Akhir ASN Kemenag yang Mengikuti Pelatihan Manajerial dan Memperoleh Nilai ≥ 80. b. Jumlah ASN Kemenag yang Mengikuti Pelatihan Manajerial dan Memperoleh Nilai ≥ 80.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial (PKA, PKP, atau Diklat Fungsional/Teknis Kepemimpinan). - Evaluasi Kompetensi Peserta Pelatihan (melalui ujian, penilaian proyek, atau studi kasus). - Pengolahan Data dan Sertifikasi Alumni Pelatihan ASN.
8	Ukuran/Satuan	Skor Numerik (0-100)

NO	Atribut	Keterangan
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	- Berdasarkan Jenis Pelatihan: PKA, PKP, Pelatihan Fungsional Tertentu. - Berdasarkan Unit Penyelenggara: Balai Diklat Keagamaan (BDK), Pusat Pelatihan dan Pendidikan (Pusdiklat) Teknis. - Berdasarkan Kategori ASN: Eselon III, Eselon IV, Fungsional Tertentu.
11	Level Estimasi	- Nasional '- Unit Eselon I atau Satuan Kerja
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase koleksi digital perpustakaan yang dapat diakses secara online
3	Konsep/Definisi	Rasio yang mengukur proporsi total koleksi perpustakaan (berbentuk e-book, e-journal, hasil penelitian, atau dokumen digital lainnya) yang dimiliki oleh unit perpustakaan Kementerian Agama dan telah tersedia, terindeks, dan dapat diakses secara penuh (full-text) atau sebagian oleh pengguna/masyarakat melalui platform daring (online), seperti repositori, e-library, atau aplikasi khusus.
4	Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa perpustakaan Kementerian Agama telah bertransformasi secara digital, mampu memberikan akses yang luas, mudah, dan merata terhadap kekayaan intelektual dan literasi keagamaan kepada publik. Hal ini mencerminkan peningkatan kualitas layanan dan dukungan terhadap pembelajaran jarak jauh. Persentase yang rendah mengindikasikan bahwa banyak koleksi digital masih tersimpan secara lokal (offline) atau belum berhasil diintegrasikan ke dalam sistem akses publik online.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $((a) / (b)) * 100\%$ Keterangan: (a) = Jumlah Koleksi Perpustakaan Digital yang Dapat Diakses Secara Online: Ini adalah hitungan (count) dari e-book, e-journal, atau dokumen digital lain yang dimiliki perpustakaan Kemenag dan sudah tersedia serta dapat diakses penuh melalui platform atau repositori online (seperti ELIPSKI). (b) = Total Jumlah Koleksi Perpustakaan Digital yang Dimiliki: Ini adalah seluruh hitungan (count) koleksi digital yang sudah dimiliki oleh perpustakaan Kemenag, termasuk yang mungkin masih tersimpan secara offline atau belum terindeks.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Koleksi Perpustakaan Digital yang Dapat Diakses Secara Online (Terindeks dan Tersedia di Platform Daring). b. Total Jumlah Koleksi Perpustakaan Digital yang Dimiliki (Termasuk yang belum diakses online).
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Akuisisi, Digitalisasi, dan Pengemasan Ulang (Repackaging) Koleksi Perpustakaan. - Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Perpustakaan Digital (E-Library/Repository). - Kegiatan Metadata Entry dan Indeksasi Koleksi. - Pelaporan Kinerja Layanan Perpustakaan.
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan

NO	Atribut	Keterangan
10	Klasifikasi	- Berdasarkan Jenis Koleksi: E-book, E-Journal, Laporan Penelitian, Karya Ilmiah Dosen/Mahasiswa. - Berdasarkan Sektor Keagamaan: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. - Berdasarkan Unit Pengelola: Pusat, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), Balai Litbang Diklat.
11	Level Estimasi	- Nasional '- Satuan Kerja
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Nilai Akreditasi Perpustakaan
3	Konsep/Definisi	Nilai numerik hasil penilaian resmi yang diberikan oleh lembaga akreditasi perpustakaan (Perpustakaan Nasional Republik Indonesia/Perpusnas) terhadap perpustakaan di lingkungan Kementerian Agama. Penilaian ini mencakup berbagai aspek, seperti koleksi, sarana/prasarana, pelayanan, sumber daya manusia (SDM), dan pengorganisasian, untuk menentukan kualitas dan standar operasional perpustakaan. Nilai akreditasi mencerminkan status mutu perpustakaan (misalnya: A/Unggul, B/Baik, C/Cukup, atau Tidak Terakreditasi).
4	Interpretasi	Nilai akreditasi yang tinggi (misalnya nilai A atau B) menunjukkan bahwa perpustakaan Kementerian Agama telah memenuhi standar nasional atau bahkan melampauinya, memiliki tata kelola yang baik, koleksi yang memadai, dan pelayanan yang prima. Nilai ini menjadi indikator penting kualitas infrastruktur pendukung pendidikan dan literasi di lingkungan Kemenag. Nilai yang rendah mengindikasikan perlunya perbaikan signifikan pada aspek-aspek pengelolaan perpustakaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Nilai Akreditasi = Skor Akhir Penilaian (diambil langsung dari Sertifikat Akreditasi)
6	Nama Variabel Pembangun	Nilai Akhir Akreditasi Perpustakaan yang Diberikan oleh Lembaga Akreditasi.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Pengajuan dan Persiapan Permohonan Akreditasi Perpustakaan oleh UPT/Satuan Kerja Kemenag. - Asesmen Lapangan dan Penilaian oleh Asesor dari Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas). - Penerbitan Sertifikat Akreditasi dan Penetapan Nilai oleh Lembaga Akreditasi.
8	Ukuran/Satuan	Skor Numerik (Skala 0-100) atau Peringkat Mutu (A, B, C)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Berkala (3 - 5 Tahunan) sesuai masa berlaku akreditasi
10	Klasifikasi	- Berdasarkan Jenis Perpustakaan: Perpustakaan Perguruan Tinggi (UIN/IAIN), Perpustakaan Sekolah (Madrasah), Perpustakaan Khusus (Litbang/Arsip). - Berdasarkan Peringkat Mutu: A (Unggul), B (Baik), C (Cukup), Belum Terakreditasi.
11	Level Estimasi	Satuan Kerja Perpustakaan
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

NO	Atribut	Keterangan
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Sekretariat Jenderal
2	Nama Indikator	Persentase rancangan peraturan yang diselesaikan sesuai perencanaan
3	Konsep/Definisi	Ukuran kinerja yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu lembaga dalam menyelesaikan penyusunan dan pengesahan rancangan peraturan (termasuk rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, rancangan peraturan daerah, atau jenis peraturan lainnya) dalam periode waktu yang telah direncanakan atau ditargetkan dalam Progam Legislasi Nasional (Prolegnas) atau Program Legislasi Daerah (Prolegda) atau rencana kerja sejenis
4	Interpretasi	Nilai persentase yang tinggi (mendekati 100%) menunjukkan bahwa lembaga tersebut sangat efektif dan efisien dalam manajemen proses legislasi/regulasi, dengan sedikit kendala atau penundaan. Hal ini mencerminkan kualitas perencanaan, koordinasi antar instansi, dan kepatuhan terhadap jadwal kerja. Persentase yang rendah mengindikasikan adanya masalah signifikan dalam proses legislasi, seperti penundaan, perubahan prioritas, atau kesulitan dalam mencapai konsensus.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $((a) / (b)) * 100\%$ Keterangan: (a) = Jumlah Rancangan Peraturan yang Berhasil Diselesaikan Sesuai Perencanaan: Ini adalah jumlah peraturan (seperti RUU, RPP, atau Perda) yang telah berhasil disahkan/ditetapkan tepat waktu sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Program Legislasi (Prolegnas/Prolegda) atau rencana kerja awal. (b) = Total Jumlah Rancangan Peraturan yang Direncanakan: Ini adalah total keseluruhan jumlah rancangan peraturan yang ditargetkan atau dimasukkan dalam daftar prioritas untuk diselesaikan dalam periode waktu tertentu.
6	Nama Variabel Pembangun	a. Jumlah Rancangan Peraturan yang Berhasil Diselesaikan (disahkan/ditetapkan) dalam Periode Perencanaan. b. Total Jumlah Rancangan Peraturan yang Direncanakan (ditargetkan) untuk Diselesaikan dalam Periode yang Sama.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Penyusunan program legislasi/peraturan. - Penyusunan, pembahasan, dan finalisasi rancangan peraturan. - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan.
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)

9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	- Berdasarkan Tingkat Peraturan: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri/Lembaga '- Berdasarkan Sektor/Bidang: Ekonomi, Sosial, Hukum & Keamanan, Pemerintahan Daerah, dan lain-lain - Berdasarkan Jenis Program: Prolegnas Prioritas, Prolegnas Kumulatif Terbuka, Prolegda.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-